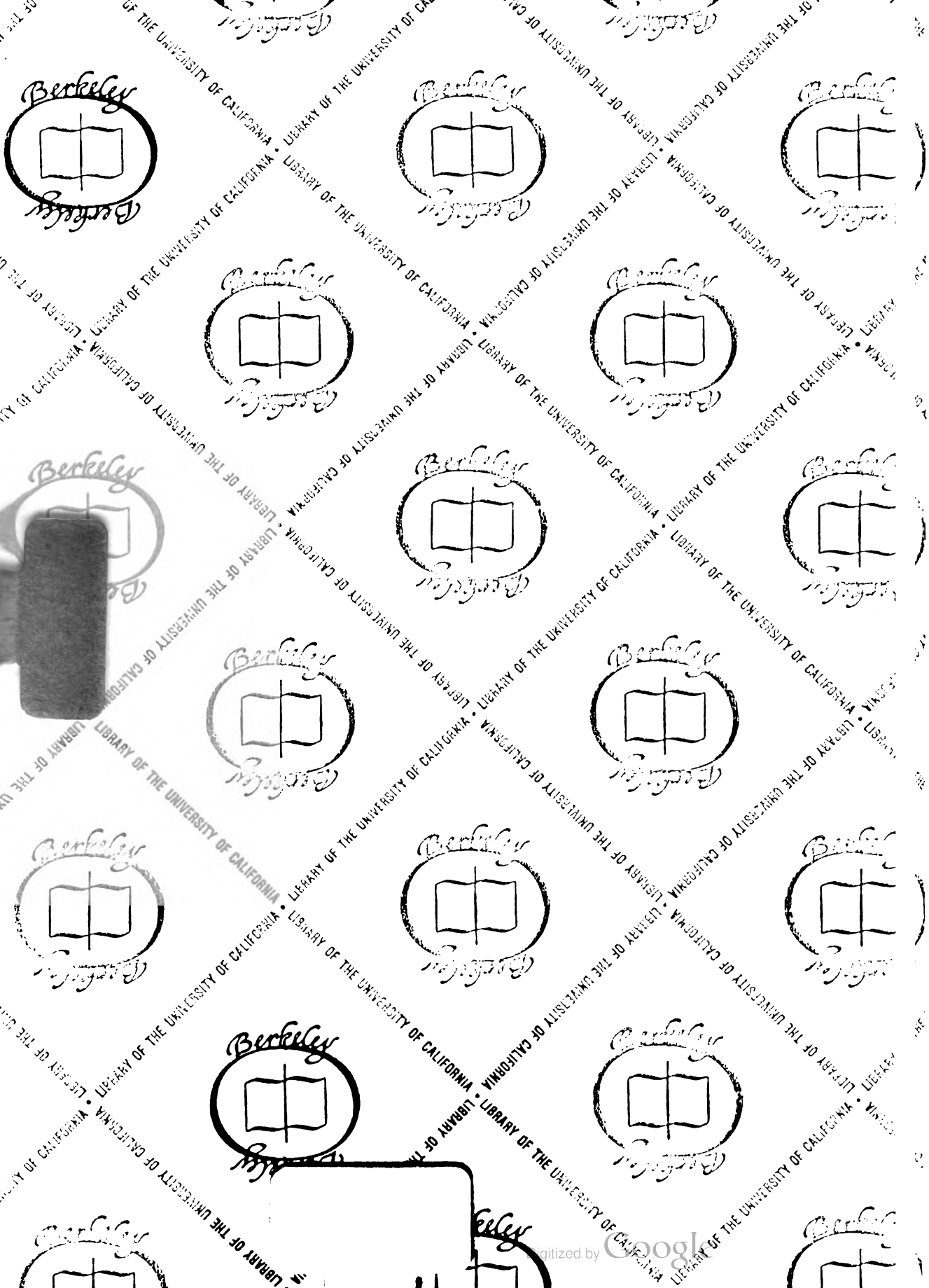


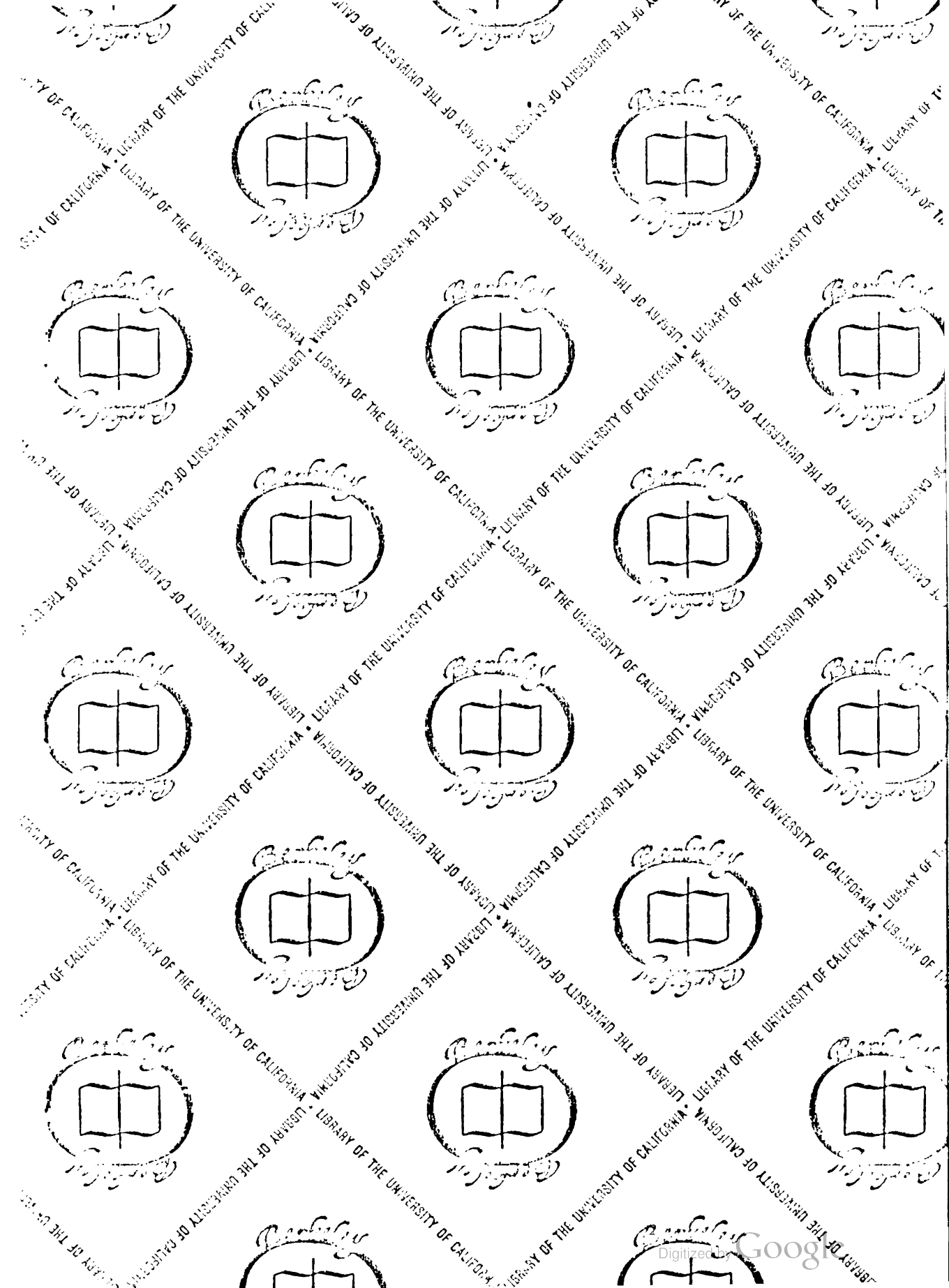
UC-NRLF



B 3 540 029



LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA



v.32-6-10

GURU

No. 6 Th. XXXII - 30 JUNI 83.

MAIN/JUC-B



Majalah Bulanan Profesi **Guru**

Digitized by Google



Drs. Soedarmadji, Wk. Ketua PB-PGRI memimpin Sidang pada acara Menpora – Dr. Abdul Gafur (kiri) menyampaikan pengarahannya, dan Drs. W.D.F. Rindorindo Sekjen PB-PGRI (kanan).



Sementara tokoh PGRI pada masa revolusi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sempat diabadikan pada saat upacara pembukaan Konpus PGRI tahun 1983. Dari kiri. Rh. Kusnan (Ketua Umum PB-PGRI ke II-1945), B. Endropranoto (Pengarang Mars PGRI), A.H. Harahap, H. Basyuni Suriamiharja, Slamet I, Dr. M. Hutasoit, Ali Marsaban (Sekjen PB-PGRI ke I-1945) juga hadir tak nampak dalam gambar.



Majalah Suara Guru

No. 6 Th. XXXII – 30 JUNI 83.

PENERBIT

Pengurus Besar Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI)

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI

PEMIMPIN UMUM

H.Basyuni Suriamiharja

KETATAUSAHAAN

Pimpinan : Drs.W.D.F.Rindorindo
Wki.Pimp. : Muhd. Hatta
Anggota : F.A.Santoso, B.Sc.

REDAKSI

Pimpinan : Prof.Dr.Amran Halim
Wki.Pimp./Skr. : Drs.H.Gazali Dunia
Anggota : Suyono ● A.T.Sianipar, SH.
● Ki Soeratan ● Drs. Gino Sutarno
● Anggota PB-PGRI lainnya

STAF REDAKSI

● Galisung MS ● Syarifulkani ● Sutyo
● Edi Marhami

IZIN TERBIT

Skp Deppen No. 099 SK-PDHM-SIT-66
Tanggal 18 Februari 1966
(Izin Peperada Jaya No KEP-108-P/5-1966)

REDAKSI & TATA USAHA

Jl. Tanah Abang Tiga No.24 Jakarta
Telp. 341121 – 340598

Percetakan

HARAPAN MASA - Jakarta
Telp. 582225

DAFTAR ISI

	Halaman
* Tajuk Rencana	2
PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
* Pendidikan Harus Mampu Menghasilkan Lulusan yang Membangun: Prof. Dr. Nugroho Notosusanto. .	3
* Sejarah Dapat Memberi Arti Bagi Perjuangan dan Kelestarian Bangsa Indonesia: Prof. Dardji Darmodihardjo, SH.	4
* Pedoman Untuk Menciptakan Hubungan Masyarakat yang Baik: R. Iyeng Wiraputra, M.Sc	5
* Kelemahan Perguruan Tinggi Kita Dewasa ini: Oleh: Sutan Takdir Alisjahbana	7
* Meningkatkan Mutu Buku Salah Satu Faktor Majukan Dunia Pendidikan	9
* Mengenal kata-kata baru (VI)	10
KONPERENSI PUSAT PGRI 1983	
* Sambutan Ketua Umum PB-PGRI pada Konpus PGRI	13
* Pengarahan Menko Kesra pada Konpus PGRI	15
* Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Konpus PGRI	24
* Pengarahan Menteri Penerangan pada Konpus PGRI	28
BERITA ORGANISASI	
* Kegiatan PB-PGRI	36
* Sumbangan Gedung PGRI	37
* YPLP-PGRI: Tahukah Anda?	39
* Dapatkah Direktorat Sekolah Swasta Melaksanakan Fungsinya: Slamet I, YPLP-PGRI Pusat	41
RUANG UUD 1945	
* UUD 1945 dalam Gerak Pelaksanaannya (IV)	43
KESEHATAN	
* Serangan Jantung dapat dihindari	52
KEPEGAWAIAN	
* Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil	55
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
* Keputusan Dirjen PDM No. 018/C/Kep/1-83 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta	58
Rekening Giro :	
BRI Cabang Tanah Abang Tiga No. 4 Jakarta Pusat : No. 31. 46. 2118	

GAMBAR KULIT DEPAN

**BAPAK SOEPARDJO ROESTAM,
MENTERI DALAM NEGERI
DALAM KABINET PEMBANGUNAN IV.**

Tajuk Rencana

Dalam bulan juni 1983 terjadi beberapa peristiwa penting yang perlu kita catat. Pertama, dilaksanakannya Konpus PGRI ke-3 dalam masa bakti XIV (1979-1984) pada tanggal 6, 7 dan 8 Juni 1983.

Dalam Konpus ke-3 ini ada 4 pokok permasalahan yang dirumuskan oleh para peserta:

1. Peranan Guru/PGRI dalam upaya pemasyarakatan dan pensuksesan pelaksanaan hasil-hasil Sidang Umum MPR 1983.
2. Pemikiran konseptual PGRI bagi Repelita IV Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Generasi Muda.
3. Kesejahteraan Guru.
4. Penyelenggaraan Kongres PGRI XV tahun 1984 yang akan datang.

Konpus yang dihadiri para utusan Pengurus Daerah PGRI seluruh Indonesia tambahan para undangan diantaranya Gubernur KDKI, Bapak Suprpto, telah dibuka oleh Menteri P dan K, Bapak Prof. Dr. Nugroho Notosusanto dengan amanah dan pengarahan-pengarahan yang berhubungan dengan masalah pendidikan yang sedang dan akan dihadapi nanti.

Pada tanggal 8 Juni 1983 pada pukul 24.00 malam Konpus yang bertemakan: "Peranan Guru dalam Memasyarakatkan dan Mensukseskan Hasil ditutup dan setiap utusan kembali ke daerah masing-masing membawa tugas-tugas sesuai dengan putusan-putusan yang telah diambil dalam Konpus tersebut.

Peristiwa ke 2 yang tak kalah menggemparkan tanah air kita, dan dunia Internasional, terjadinya gerhana matahari total di sebagian tanah air kita.

Berpuluh-puluh ahli berdatangan ke tempat-tempat yang dianggap paling strategis seperti Tanjung Kodok, Pangandaran dan lain-lain untuk menyaksikan peristiwa besar yang hanya dapat dialami sekali 350 tahun. Di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang benar-benar mengalami gelap total, seperti Jawa Tengah, Ujung Pandang dan Irian Jaya, terjadi kesibukan-kesibukan luar biasa. Penduduk diperingatkan untuk tidak melihat langsung gerhana tersebut tapi melalui televisi.

Umat Islam, sesuai dengan amanah agama di mana-mana melakukan sembahyang khusus (sembahyang gerhana), dua rakaat.

Dan pada tanggal 12 Juni 1983 umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia mulai melakukan ibadah puasa. Bulan puasa disebut juga bulan "Rahmat dan bulan Ampunan". Sesuai dengan janji Allah, barang siapa menunaikan ibadah puasa dan melakukan sembahyang malam (tarawih) akan diampuni dosanya tahun yang lalu. Dalam bulan Ramadhan ada satu malam yang disebut "Malam Lailatulqadar", siapa yang beribadat/beramal malam itu, akan mendapat pahala lebih dari pahala 1.000 bulan.

Akhirnya melalui Suara Guru ini kami ucapkan selamat berpuasa, semoga setelah puasa setiap pribadi umat Islam benar-benar telah bersih dari dosa dan dengan jiwa bersih dan ikhlas ikut berpartisipasi dalam Pembangunan Negara kita ini.

Redaksi.-

Pendidikan Harus Mampu Menghasilkan Lulusan Yang Membangun



Prof. Dr. Nugroho Notokusanto

PENDIDIKAN seyogyanya tidak hanya sampai mencerdaskan bangsa saja, dan tidak hanya membangkitkan daya penalarannya saja, akan tetapi pendidikan itu harus mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat membantu bangsa dan negara untuk memecahkan masalah-masalah di dalam pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya dilaksanakan secara semesta, terarah, sistematis dan berencana.

Demikian Menteri P dan K Prof. Dr. Nugroho Notokusanto dalam sambutan tertulisnya pada pelantikan Rektor IKIP Yogyakarta, yang dibacakan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen P dan K Prof. Dr. D.A. Tisna Amijaya, di Yogyakarta pada tanggal 29 Maret 1983.

Karena itu, tambahnya, secara esensial pembangunan nasional itu dalam dirinya merupakan usaha kita bersama untuk mengikis habis kemiskinan, menghapus kebodohan, melenyapkan ketidaktahuan dan menghilangkan ketinggalan serta keterbelakangan. Untuk itu para lulusan yang dihasilkan oleh proses belajar mengajar di IKIP seharusnya berupa guru yang mempunyai kemampuan untuk mendidik pada umumnya, untuk mengajar pada khususnya, baik di jalur pendidikan formal maupun di lapangan pendidikan non formal. Dengan demikian para lulusan IKIP haruslah merupakan pendidikan profesional yang benar-benar dapat mengisi segala cirinya, baik dalam aspek pengetahuan, ketrampilan maupun dalam penjiwaan dan penghayatannya.

– Enamp hal yang harus dilaksanakan Rektor

Dikatakan oleh Menteri P dan K Prof. Dr. Nugroho bahwa pribadi seorang rektor seringkali merupakan personifikasi institut, di mana

kesan pertama dan citra institut tersebut ditentukan oleh penampilan wibawa Rektornya.

Dikatakan selanjutnya, sebagai pimpinan tertinggi di kampus, pekerjaan dan tugas yang menjadi tanggung jawab Rektor tidaklah ringan, terutama kebijaksanaan dalam mengenai pengembangan institut menjadi masyarakat ilmiah.

Sesuai dengan tugas yang diemban oleh institut, khususnya mengenai peningkatan kemampuan mendidik dan mengajar di kalangan anak didiknya, Menteri minta Rektor untuk melaksanakan ke-enam hal sebagai berikut:

Pertama, menjadi IKIP Yogyakarta suatu institusi yang mengejawantahkan tugas dan fungsinya secara tepat dan merupakan pusat pemeliharaan, penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa yang akan datang.

Kedua, menjadi IKIP sebagai wahana pembangunan dan kesatuan bangsa, di mana dikembangkan manusia-manusia Indonesia yang bertakwa dan berpancasila, yang berjiwa penuh pengabdian dan kompeten untuk memenuhi panggilan pembangunan serta memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Ketiga, menciptakan suasana dan ketentuan kerja yang memungkinkan perkembangan yang wajar dan sehat dari karier akademik dan administratif bagi semua orang yang berkarya di dalam lingkungan kampus.

Bersambung ke hal. 12

SEJARAH DAPAT MEMBERI ARTI BAGI PERJUANGAN DAN KELESTARIAN BANGSA INDONESIA

PARA PESERTA penataran dipikulkan tugas untuk membina para guru IPS—Sejarah, agar dapat meningkatkan mutu pelaksanaan bidang studi IPS—Sejarah. Hal tersebut dikemukakan Dirjen PDM, Prof. Darji Darmodiharjo, SH pada pembukaan penataran lokakarya Instruktur Pemantapan Kerja Guru IPS—Sejarah Pendidikan Menengah Umum, di Wisma Dirga, Cibulan—Bogor, tanggal 28 Maret 1983.

Di samping itu, dengan perantaraan para instruktur diharapkan pula sejarah dapat memberi arti yang lebih besar bagi perjuangan dan kelestarian bangsa Indonesia. Pelajaran IPS—Sejarah perlu dibuat dan diselenggarakan secara lebih mendalam, sehingga hilai-nilai serta kaidah kaidah yang luhur dari hidup kemanusiaan, khususnya nilai-nilai perjuangan nasional dapat diteruskan dan diwariskan kepada anak didik kita.

Di bagian lain Dirjen mengemukakan bahwa untuk mengubah cara guru mengajar dari mengejar keilmuan Sejarah menjadi sarana penanaman dan pewarisan nilai-nilai kehidupan dalam diri anak didik bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini memerlukan pengertian dan penanaman kemampuan teknik belajar mengajar yang cocok untuk tujuan itu. Namun dengan semangat pengabdian kita bersama disertai dengan ketekunan dan kerajinan dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa pastilah apa yang kita cita-citakan akan berhasil.

— Bahan Kurikulum

Menurut Dirjen PDM dalam rangka membangun manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, bahan kurikulum sebagai isi sistem pendidikan nasional dibagi menjadi 5 kelompok bahan program belajar mengajar, yaitu: yang berkenaan dengan sikap dan nilai hidup; yang berkenaan

dengan pengetahuan; yang berkenaan dengan ketrampilan; yang berkenaan dengan bidang humaniora; dan yang berkenaan dengan kewarganegaraan.

Bahan kurikulum yang dibagi menjadi 5 kelompok tersebut, terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri dalam proses perkembangan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, masing-masing unsur itu mempunyai tempat dalam proses pendidikan.

Lebih lanjut dijelaskan, dengan mengelompokkan seluruh program belajar ke dalam lima kelompok itu, maka dapatlah disusun suatu program berkelanjutan yang mencakup semua unsur pokok pendidikan nasional dalam perbandingan komposisi yang proposional sesuai dengan tujuan-tujuan khusus setiap jenjang dan jenis pendidikan. Di samping itu, berbagai hal yang berkaitan dengan kesadaran lingkungan serta kemampuan berkomunikasi juga harus diperhitungkan dalam pelaksanaan program belajar mengajar tersebut, dan bahannya diintegrasikan dalam setiap unsur program yang memungkinkan.

— Pendidikan Watak

Menyinggung masalah manusia Indonesia yang berkepribadian, Prof. Darji mengatakan, pendidikan watak mempunyai arti yang amat penting di dalam usaha membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian. Pendidikan watak dan pembentukan kepribadian dilakukan baik di dalam seluruh unsur dan suasana pendidikan maupun khususnya dalam Pendidikan Agama, Pendidikan Moral Pancasila dan Budi Pekerti. Penataran lokakarya Instruktur Pemantapan Kerja Guru IPS—Sejarah tersebut di ikuti 85 orang peserta, dan berlangsung selama satu minggu.

PEDOMAN UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG BAIK

Oleh:

R. IYENG WIRAPUTRA M.Sc.

Eunstein meyakinkan dunia akan kebesarannya bukan dengan mengatakan bahwa ia seorang besar, melainkan dengan perbuatan. Citra masyarakat diciptakannya melalui perbuatan, bukan melalui kata-kata tentang apa yang diperbuatnya.

Demikian juga mengenai organisasi atau lembaga. Citra masyarakat tentang sekolah dibentuk dengan melihat apa yang diperbuat orang di sekolah itu, bagaimana keadaan sekolah itu. Setiap anggota dari warga sesuatu sekolah memberikan sumbangannya dalam pembentukan citra masyarakat terhadap lembaga itu. Citra dan hubungan masyarakat ialah apa yang dipikirkan dan dikatakan orang mengenai sesuatu sekolah berdasarkan kesan yang diberikan oleh sekolah itu kepada masyarakat.

Pemimpin sekolah sangat berkepentingan dengan hubungan masyarakat dan bertanggung jawab atas keberhasilannya. Nama baik sekolah akan menarik tenaga kerja dan siswa yang baik pula. Orang ingin bekerja dan belajar di sekolah yang mempunyai nama yang baik; semangat kerja pada umumnya tinggi dan orang suka mengabdikan diri lebih lama karena ia dapat membanggakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Produktivitas dan mutu pendidikan lebih tinggi kalau orang-orang merasakan bangga atas sekolahnya.

Citra masyarakat yang baik dapat membantu untuk membuka pintu bagi sesuatu perusahaan. Ini berarti, bahwa lebih mudah bagi sesuatu perusahaan untuk menjual produksinya dan hal ini sebaiknya meningkatkan kesempatan kerja untuk setiap orang dalam perusahaan yang bersangkutan. Kalau perusahaan menjual hasilnya atau memberikan pelayanan secara langsung kepada konsumen, maka hubungan masyarakat yang baik dapat mempengaruhi orang untuk membeli.

Dalam masa resesi ekonomi, masa krisis, reaksi masyarakat sering menentukan apakah sesuatu

perusahaan dapat dipertahankan atau tidak, apakah sesuatu sekolah dapat tetap berdiri ataukah sebaiknya ditutup saja. Itikad baik dan hubungan serta citra masyarakat yang sehat merupakan jaminan bagi sesuatu lembaga dalam masa yang sulit ketika lembaga itu membutuhkan sahabat dalam masyarakat.

Dengan demikian kesanggupan untuk bertahan banyak bergantung pada citra masyarakat. Preferensi masyarakat merupakan bentuk demokrasi yang paling murni. Perasaan dan tanggapan masyarakat terhadap sesuatu lembaga-lah yang akhirnya menentukan keberhasilan atau kegagalan lembaga yang bersangkutan.

Menciptakan citra yang baik

Hakekat persaingan yang meningkat dari kebanyakan perusahaan dan industri, mobilitas langganan yang makin besar, kecepatan angkatan dan kemudahan dalam komunikasi berarti, bahwa setiap perusahaan satu sama lain bersaing dalam bidangnya lepas dari lokasinya. Tidaklah selalu hasil produksi atau pelayanan yang terbaik yang menarik, melainkan sesuatu yang paling efektif dikaitkan dengan hubungan masyarakat dan program periklanan yang paling dikejar dan diterima orang.

Dengan alasan inilah, maka sekarang banyak perusahaan menaruh perhatian yang cermat dan sistematis terhadap bidang hubungan masyarakat. Titik berat ini menyebabkan para usahawan mencari tenaga-tenaga ahli, banyak menyisihkan biaya dan memperluas program latihan bagi para pengawas untuk meningkatkan citra masyarakat yang lebih baik. Di samping itu perhatian yang lebih besar dicurahkan kepada usaha untuk menambah keuntungan bagi pegawai, kegiatan, publikasi dan perhatian lain yang dapat mempengaruhi kepercayaan pegawai dan masyarakat

dan apa yang mereka katakan mengenai perusahaan yang bersangkutan. Berhubung dengan usaha yang terpadu ini dan kepentingan peranan pimpinan dalam bidang inilah yang mendorong manajemen untuk lebih memperhatikan kegiatan untuk menciptakan hubungan masyarakat yang sehat.

Langkah pertama lebih ialah untuk menentukan status atau citra perusahaan sekarang dan kemudian harus merencanakan dan melaksanakan program untuk mengadakan perbaikan-perbaikan

Apa yang dikaitkan mengenai perusahaan di atas juga berlaku untuk bidang pendidikan dan persekolahan. Untuk menciptakan dan memelihara hubungan dan citra masyarakat yang baik, langkah-langkah yang berikut hendaknya diperhatikan:

1. *Pengaruhilah dengan baik orang-orang yang membentuk citra tentang sekolah saudara.* Apa yang akan diceriterakan pegawai saudara kepada tetangga dan sahabat mereka tentang sekolah saudara ?

2. *Usahakan agar keadaan di sekolah saudara tertib.*

Hendaknya diingat, bahwa dasar untuk hubungan yang baik dengan pihak luar ialah hubungan yang baik di dalam sekolah sendiri.

3. *Jadilah kepala rumah tangga yang baik.*

Keluarga suka membanggakan keadaan dalam rumah tangganya. Usahakan agar warga sekolah melayani tamu dengan memuaskan dan ciptakan pada mereka rasa bangga atas lingkungan yang menyenangkan.

4. *Tingkatkan keamanan, sikap ramah, suka menolong dan bersahabat.*

Seorang tamu mungkin hanya bertemu dengan seorang warga sekolah. Dengan komunikasi yang baik setiap orang dapat memberikan informasi yang benar.

5. *Praktekkan komunikasi yang baik.*

Berilah personal cukup informasi, sehingga mereka dapat memberikan penjelasan; baik kepada orang-orang di dalam sekolah, maupun kepada pihak luar. Cara yang paling efektif untuk memberikan informasi ialah melalui personal sendiri.

6. *Jagalah nama baik sekolah.*

Sebagai kita ketahui, merusak nama baik tidak

lah sukar, akan tetapi memperbaiki nama yang telah rusak mungkin tidak akan berhasil sepenuhnya.

Oleh karena prakarsa untuk mengambil langkah-langkah itu menjadi tugas kewajiban pemimpin, maka pemimpin hendaknya menyediakan diri untuk melangkah lebih jauh dalam bidang hubungan masyarakat. Di antaranya dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Tingkatkan kewargaan masyarakat.*

Dengan kewargaan masyarakat dimaksudkan dukungan terhadap proyek-proyek masyarakat; pemeliharaan kekayaan sekolah; pembinaan hubungan personal dan masyarakat dukungan terhadap kegiatan pendidikan, kebudayaan dan keagamaan.

Tidak ada sekolah yang dapat berfungsi dengan lepas sama sekali dari masyarakat.

2. *Tingkatkan sikap saling bersahabat.*

Setiap organisasi satu lembaga hendaknya mengambil prakarsa untuk meyakinkan, bahwa semua personal, akan tetapi terutama team pimpinan, mengenal dengan baik masyarakat sekitarnya, warganya, fasilitas dan kebutuhannya. Di samping itu hendaknya organisasi membuka pintu seluas-luasnya, sehingga masyarakat dapat mengenal lembaga dari dekat.

3. *Berikan kepemimpinan kemasyarakat.*

Jangan hendaknya dilupakan, bahwa setiap organisasi, termasuk sekolah, harus juga membantu warganya untuk menikmati hidup yang memuaskan dan membangun. Jalan yang terbaik ialah melalui partisipasi dalam kelompok dan kegiatan kemasyarakat. Banyak kemampuan dan pengetahuan staf sekolah yang dapat disumbangkan untuk peningkatan daerah dan masyarakat sekitarnya. Partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan membawa manfaat bagi kedua pihak. Tugas kewajiban staf sekolah makin jauh melampaui batas dinding sekolah.

Dengan memperhatikan hal-hal yang dikemukakan di atas, makin jelas betapa pentingnya hubungan antara sekolah dan masyarakat. Oleh karena pimpinan sekolah banyak menentukan tentang kegiatan apa yang dijalankan oleh sekolah, maka pendidikan makin banyak membutuhkan pimpinan yang kreatif dan aktif dalam mengadakan hubungan dan pelayanan kepada masyarakat.***

KELEMAHAN PERGURUAN TINGGI KITA DEWASA INI

Oleh :
Sutan Takdir Alisjahbana

Pada pertukaran tahun sekolah, ketika suatu angkatan menamatkan sekolahnya dan angkatan yang lain masuk ke sekolah, sedangkan murid-murid yang belum selesai pindah dari kelas yang rendah ke kelas yang lebih tinggi, tentulah soal pendidikan menjadi penting dan banyak disoroti. Pada suatu pihak orang-orang yang menamatkan sekolahnya dalam berbagai tingkat, memikirkan pekerjaan apa yang akan dilakukannya. Pada pihak yang lain orang tua memikirkan ke sekolah mana anaknya akan dimasukkan, sekolah apakah yang akan dipilih dalam berbagai jenis sekolah yang terdapat di negeri kita.

Selain dari pada itu tentulah tiba pula saatnya soal pendidikan itu disoroti secara umum dari segi mutunya dan dari segi kesesuaiannya dengan keperluan masyarakat yang banyak dan serba-ragam sekarang ini.

Di sini saya terutama sekali hendak menyoroti perguruan tinggi sebab tentangnya saya mempunyai pengalaman dari dekat, baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Pada umumnya dapat dikatakan kedudukan perguruan tinggi kita sangat menyedihkan.

Hal itu disebabkan oleh jalan pikiran kita tentang kedudukan perguruan tinggi dalam perkembangan masyarakat dan kebudayaan belum sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kebudayaan dunia yang amat cepat berubah dan saling pengaruh sekarang. Tujuan kita dalam perjuangan kemerdekaan dahulu adalah merebut kemerdekaan dan menyatuhkan bangsa sebagai syarat perkembangan masyarakat dan kebudayaan kita yang setara dengan bangsa-bangsa yang telah maju di dunia.

Tujuan itu telah hampir empat puluh lima tahun tercapai, tetapi perkembangan dan kemajuan masyarakat dan kebudayaan masih jauh tertinggal di belakang, teristimewa berhubung dengan ilmu, teknologi dan ekonomi. Kecerdasan bangsa kita relatif amat sedikit bertambah, malahan kalau kita lihat dari jurusan puncak ilmu dan teknologi sekarang, tidak berlebihan

kalau kita katakan, bangsa kita dalam hal ini relatif mundur.

Hal itu terutama sekali disebabkan perguruan tinggi kita, meskipun jumlahnya bertambah, terus menerus merosot sejak dari paa diambil alih dari pihak Belanda, seperti ITB dan Universitas Indonesia. Pihak Belanda dahulu selalu mempunyai politik mendapatkan profesor yang terbaik untuk perguruan tingginya di Indonesia. Profesor profesor yang mengajar di Technische Hogers School di Bandung, maupun yang mengajar di Rechts hope School di Jakarta dan kemudian hope School di Jakarta dan kemudian dalam Universitas of Indonesia adalah Profesor yang internasional kedudukannya, yang di Negeri Belanda sendiri menjadi profesor, karena memenuhi syarat-syarat yang tertinggi di negeri itu.

Segan-segan

Desakan rakyat akan perkembangan dan perluasan pendidikan Universitas tidak dapat ditahan, sehingga Pemerintah kita dan swasta terpaksa mengadakan universitas sebanyak mungkin, tetapi di sisi itu lupa untuk mendidik dosen yang sebaik-baiknya, yang sesuai dengan tingkat kemajuan dunia sekarang ini. Kita bandingkan saja hal ini misalnya dengan negara yang dekat dengan kita. Malaysia pada waktu mulai merdeka dan perlahan-lahan mendirikan universitasnya. Tidak segan-segan negara itu untuk mengisi lowongan dosen-dosennya dengan memasang iklan mencari dosen yang terbaik dari seluruh dunia; ada yang datang dari Australia, ada yang datang dari Jerman dan tentu pula banyak yang datang dari Inggris, dari India, dari Srilangka, dan lain-lain.

Dalam kedudukan yang demikian, jelas bahwa gaji dari dosen-dosen di Malaysia adalah pada tingkat internasional. Dosen-dosen yang paling rendah sekitar Rp. 500.000,- Rp.600.000,- sebulan. Di negeri kita hal itu tidak dapat dilakukan terutama karena kecakapan bahasa Inggris

mahasiswa di negeri kita amat rendah. Dengan demikian dosen-dosen yang kita peroleh sekarang kebanyakan berasal dari Universitas-universitas di Indonesia sendiri yang mutunya bertambah lama bertambah rendah. Dosen-dosen amat banyak pekerjaannya untuk mencari nafkah, supaya keluarganya dapat hidup. Di sisi itu apabila mereka pandai membaca bahasa Inggris, sukar mereka mendapat buku-buku dari luar negeri, sedangkan kesempatan untuk pergi ke luar negeri hanya diperoleh segelintir saja dari antara mereka. Pemerintah kita seolah-olah enggan mengirim mereka ke universitas-universitas yang terbaik di Amerika, di Eropa dan Jepang.

Pemerintah kita tidak mempunyai rancangan yang tetap dan tepat untuk mendidik pemuda-pemudanya di luar negeri di tempat puncak-puncak ilmu pengetahuan di zaman sekarang yang amat cepat majunya. Jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri sangat sedikit, kebanyakan dari golongan ekonomi kuat di antaranya sangat sedikit pribumi yang dapat dengan biaya sendiri mengirimkan anaknya ke luar negeri. Kalau kita pikirkan bahwa Malaysia pada saat ini mempunyai 50.000 mahasiswa pada berbagai jenis perguruan tinggi di luar negeri di Inggris, di Amerika, di Australia dan akhir-akhir ini di Jepang, sadarlah kita bagaimana terkebelakangnya kita. Kalau kita bandingkan dengan ini, Indonesia yang berpenduduk 150 juta, mesti mempunyai mahasiswa setengah juta di luar negeri.

Dilihat dari jurusan dan sarana universitas pun kita amat lemah. Universitas Indonesia yang merupakan salah satu universitas yang terpenting di Indonesia hanya mempunyai perpustakaan 400.000 buku, sedangkan universitas di Singapura dan Kuala Lumpur mempunyai sejuta buku. Di sisi itu kecakapan sarjana dan mahasiswanya tentang bahasa Inggris jauh lebih tinggi dari kita. Di lihat dari jurusan ini mahasiswa dan dosen-dosen kita terjebak dalam keterbelakangan bahasa Indonesia yang amat sedikit mempunyai karangan asli atau terjemahan buku yang relevan tentang kemajuan ilmu, teknologi, dan lain-lain. Hingga sekarang belum kelihatan usaha dan rancangan besar-besaran akan menulis dan menerjemahkan buku yang dapat dibandingkan sekedarnya seperti dilakukan di Jepang di

zaman Meiji hingga sekarang.

Berhubung dengan ini, baik disini dikutip apa yang dikatakan oleh Ir. G.M. Tampubolon, ketua umum Persatuan Insinyur Indonesia baru-baru ini, Indonesia tak cukup mempunyai tenaga ahli, ilmuwan maupun profesional untuk menunjang, khususnya pembangunan Pelita IV, Di Philipina diantara 1.547 orang terdapat seorang insinyur, di Korea diantara 1.575 orang sedangkan di Indonesia diantara 5.750 orang.

Sangat menarik hati juga ucapan seorang yang tinggi kedudukannya dalam dunia perbankan, yang disini tidak akan saya sebut namanya. Katanya tiap tahun duani perbankan menguji sejumlah besar dari tamatan universitas-universitas di Indonesia untuk diterima sebagai pegawai. Dari yang ikut sertf setinggi-tingginya yang lulus 20%. Yang 20% ini mesti menempuh kursus dahulu di Indonesia, sesudah itu dikirim ke luar negeri untuk belajar. Baru sepulang dari luar negeri mereka dapat dipakai dalam pekerjaan perbankan yang diperlukan.

Ketatkan Festival

Berhubung dengan ini, alangkah baiknya kalau Departemen P & K atau Pemerintah kita dalam arti yang seluas-luasnya menyelidiki dan merencanakan betul-betul berapa tenaga-tenaga ahli yang kita perlukan dalam lima-enam tahun yang akan datang, yang betul-betul mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya. Berhubung dengan itu, saya hendak mengusulkan supaya yang lulus dari ujian perintis nanti 5.000 atau lebih baik lagi 10.000 dari pada yang terbaik dikirimkan ke universitas-universitas yang terbaik di luar negeri, dengan pembagian yang sesuai dengan keperluan bangsa Indonesia dalam usaha pembangunannya dalam waktu 5 - 6 tahun yang akan datang. Dalam perkembangan dunia sekarang ini ketika kebudayaan industri, yang telah 2 abad menguasai masyarakat dan kebudayaan dunia, sedang mengalami kerisis baru, sehingga orang-orang berbicara tentang Revolusi Industri II, pembangunan di Indonesia, tidak dapat berjalan dengan tenaga-tenaga kelas II atau kelas III. Kita tidak mungkin menyertai perkembangan dan kemajuan dunia dengan cara berpikir, dengan kepandaian dan keterampilan yang amat jauh tertinggal di belakang.

Pembangunan di Indonesia menghendaki pe-
Bersambung ke hal. 57

MENINGKATKAN MUTU BUKU SALAH SATU FAKTOR MEMAJUKAN DUNIA PENDIDIKAN

Salah satu faktor yang penting untuk berhasilnya usaha memajukan dunia pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kebudayaan nasional kita adalah berhasilnya meningkatkan mutu buku yang terbitkan oleh para penerbit dan percetakan kita sebagai kegiatan teknis grafis. Demikian sambutan tertulis Sekjen Departemen P dan K Soetanto Wirjoprasonto yang dibacakan oleh Kepala Biro Perlengkapan Departemen P dan K, Ir. Wahyudi Ruwiyanto pada penutupan penataran tenaga teknis grafika angkatan ketiga, di Pusat Grafika Indonesia, Jakarta tanggal 19 Maret 1983.

Dikatakan Sekjen, Bidang kegrafikaan sebagai sarana komunikasi dalam bentuk cetak mempunyai peranan yang strategis dalam Pembangunan Nasional. Sebab, melalui sarana cetak seperti buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain, orang dapat belajar dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Lebih-lebih dalam dunia pendidikan, buku merupakan alat fundamental dalam proses belajar mengajar.

– Meningkatkan Ketrampilan

Lebih lanjut Sekjen mengatakan, bidang grafika adalah salah satu aspek dari masalah perbukuan terutama dilihat dari segi bentuk materi dari buku yang diterbitkan, misalnya perwajahan buku sangat besar pengaruhnya terhadap minat baca bagi anak didik dan masyarakat. Justru dari segi teknis grafis ini, menurut penilaian Sekjen, buku yang akan dibeli oleh Departemen P dan K masih terdapat kelemahan menonjol. Jadi dengan meningkatnya teknis percetakan maka buku-buku kita dapat menarik, bahkan dapat mendorong minat baca serta membantu daya serap para pembaca.

Khususnya menyangkut tenaga teknis grafika, menurut Soetanto, Pusat Grafika Indonesia sesuai dengan misinya berusaha terus meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan tenaga grafika agar produk buku yang dihasilkan dapat memenuhi harapan kita. Kita tidak usah malu mengakui kenyataan bahwa tingkat hidup

rakyat kita masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rakyat negara yang telah maju. Karena itulah kita harus melihat bahwa aspek pembangunan yang senantiasa kita lakukan sekarang ini akan membawa tingkat kemajuan dalam hidup rakyat di masa depan.

– Telah dididik 3.362 orang

Kepala Pusat Grafika Indonesia, Drs. F. Si-tanggung dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan pengalaman bahwa teknologi terus berkembang, dan apabila hal ini tidak diimbangi pula dengan peningkatan pengetahuan dengan berbagai jalan seperti latihan atau penataran, dikhawatirkan kita akan tertinggal jauh dari perkembangan teknologi itu.

Dikatakan, sampai saat ini Pusat Grafika Indonesia baru mampu mendidik dan melatih tenaga teknis grafis sebanyak lebih kurang 3.362 orang, sedangkan menurut sementara catatan data di Indonesia terdapat lebih kurang 3.000 perusahaan grafika. Jadi berarti, masih belum sebanding antara jumlah perusahaan dengan tenaga teknis grafika yang pernah belajar di Pusat Grafika Indonesia. Karena itu adalah menjadi tugas yang tidak ringan bagi Pusat Grafika Indonesia, bagaimana agar dapat pemeratakan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan grafika keseluruhan perusahaan di segala penjuru tanah air.

Penataran tenaga teknis grafika angkatan ketiga ini dimulai Januari 1983 yang lalu, berlangsung selama lebih kurang 70 hari diikuti 121 orang, dan dari hasil akhir penilaian tidak lulus 1 orang. Dari seluruh peserta tersebut meliputi 12 kejuruan, dengan perincian sebagai berikut: kejuruan Perwajahan, 17 orang; Foto Reproduksi Hitam Putih, 16 orang; Foto Reproduksi Warna, 7 orang; Susun H. Tangan 5 orang; Susun H. Mesin, 3 orang; Susun Huruf Foto, 7 orang; Cetak Ofset Warna, 16 orang; penyelesaian Grafika, 10 orang; Perawatan Mesin dan Elektro, 9 orang; Cetak Tinggi, 10 orang; Pengujian Bahan Grafika, 8 orang; dan Kejuruan Cetak Ofset Kecil, 13 orang. (d/4).

MENGENAL KATA DAN ISTILAH BARU

(VI)

kapasitas	daya muat; daya tampung
karyawisata	perjalanan (dalam rombongan) dalam rangka pelaksanaan tugas pekerjaan
klasifikasi	penggolongan
kolesterol	sejenis lemak yang biasa terdapat di dalam darah, otak, empedu, dan batu empedu
komplemen	pelengkap (sehingga sempurna)
komplikasi	penyakit yang baru timbul kemudian dan menambah penyakit yang sudah ada
komplikasi IUD	gejala seperti perdarahan, translokasi, infeksi yang diakibatkan oleh IUD yang perlu mendapat tindakan medis dengan segera
komponen	bagian dari keseluruhan, unsur
komposit	gabungan, campuran
konfirmasi	penegasan, pengesahan
konflik	percekcokan; perselisihan; pertentangan
konsepsi	rancangan yang telah ada dalam pikiran
konsultan	penasehat
kontestan	peserta kontes
kontrasepsi	alat pencegah kehamilan, terbuat dari bahan yang tidak mudah bereaksi kimia
kontribusi	uang iuran
kontroversi	1. persahabatan,; 2. persengketaan; pertentangan
koordinasi	penyesuaian dan pengaturan yang baik
kreativitas	daya cipta
lobi	raung teras di dekat pintu masuk, yang dilengkapi dengan beberapa perangkat meja-kursi yang berfungsi sebagai ruang tunggu
losmen	penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan
layer	petelur (tentang ayam)
layout	tata letak; tata susun; perwajahan
leaflet	selebaran
level	tataran
life cycle	daur hidup
life environment	lingkungan hidup

line	jalur
linear	beruntun; linear
linearity	keberuntungan; linearitas
linkage	kaitan
loop	sengkelit
manajemen	pengelolaan
manajer	pengelola
metropolitan	(mengenai) kota besar
moneter	(mengenai) keuangan
maintenance	perawatan; pemeliharaan
manage	mengelola
management	pengeloan
manager	pengelola
manifestation	pengejawantahan
mapping	pemetaan
massage parlour	panti pijat
master of ceremony	pembawa acara
means	sarana
(mental) strain	ketegangan (jiwa)
migration	ruaya
milk fish fry	nener
monoligual	ekabahasa
morbidity rate	angka kesakitan
multiple	ganda
multiple choice	pilihan ganda
multipurpose	serba guna
mutation	alih tugas
native pasture	pangonan
native speaker	penutur asli
nomenclature	tata nama
occupation	mata pencaharian; pekerjaan; jabatan
offshore	lepas pantai
output	keluaran
overlapping	tumpang tindih
packaging	pengepakan
participation	peran serta; keikutsertaan
pattern	pola
peat	gambut

magazine	majalah
personality	kepribadian
picnic	darmawisata
piloting	perintisan
pilot plant	pabrik paduan
pilot project	proyek perintis
pilot testing	uji coba
plant food	hara
plot	alur
point of view	sudut pandangan; segi
policy	kebijaksanaan
pollution	pencemaran
polygon	astakona
postgraduate	pasca sarjana
precondition	prasyarat
preface	kata pengantar
prejudice	prasangka
production sharing (contract)	(kontrak) bagi hasil
proved reserves	cadangan terbukti
public relation	hubungan masyarakat
purchasing power	daya beli
qualified worker	pekerja cakap
quota	jatah
random	acak
rate	laju
ratio	nisbah

PENDIDIKAN

Sambungan dari hal. 3

yang merupakan pembinaan karier para guru yang berada di lapangan dapat tertangani dengan baik dan memperlancar proses pengangkatan dan penempatan para lulusan LPTK.

Akhirnya kepada semua warga sivitas akademika Menteri minta agar membantu usaha-usaha Rektor dalam menjalankan tugas Pemerintah yaitu mengembangkan lembaga pendidikan guru di tengah-tengah negara yang sedang membangun ini.

Drs. St. Vembriarto dilantik menjadi Rektor IKIP Yogyakarta untuk kedua kalinya oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk periode 1983 - 1987.

Keempat, mengingatkan mahasiswa, sehingga bermanfaat bagi usaha-usaha pembangunan nasional dan daerah melalui proses pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan kemampuan berbuat inovatif, produktif dan konstruktif.

Kelima, menegakkan disiplin yang tinggi, disiplin kepegawaian, disiplin anggaran, disiplin belajar dan mengajar, serta disiplin akademik.

Keenam, agar IKIP sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) ditingkatkan kemampuan manajemen dan organisasinya, agar inovasi seperti program Belajar Jarak Jauh (BJJ)

**SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR PGRI
PADA UPACARA PEMBUKAAN KONPERENSI PUSAT PGRI
TAHUN 1983, TANGGAL 6 JUNI 1983 DI JAKARTA.**

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmatNya bahwa PGRI pada saat ini berkesempatan memulai menyelenggarakan Konperensi Pusat tahun 1983. Konperensi yang akan dibuka saat ini merupakan Konpus ke III dalam masa bakti PGRI ke 14 (Th. 1979-1984).

Sesuai dengan ketentuan AD/ART-PGRI, Konpus merupakan musyawarah kerja Nasional organisasi tahunan yang bergugas menilai pelaksanaan program kerja organisasi tahun yang silam dan menetapkan program kerja bagi tahun berikutnya, berlandaskan program umum keputusan Kongres dan garis kebijaksanaan yang ditetapkan Pemerintah. Sebagai instansi organisasi tertinggi kedua setelah Kongres, sesuai dengan perkembangan keadaan, Konperensi Pusat berwenang menentukan kebijaksanaan tertentu yang belum ditetapkan Kongres.

Dalam tradisi PGRI, suatu pertemuan organisasi apakah Kongres ataupun Konpus dan lain-lain tidaklah semata-mata merupakan forum tempat memasalahkan keorganisasian, akan tetapi sekaligus merupakan satu forum profesi dimana dibahas dan dirumuskan beberapa permasalahan keguruan dan kependidikan yang relevant secara ilmiah.

Tahun kerja PGRI tahun yang lalu sebagian besar kegiatan ke luar tercutah pada upaya menyukseskan Pemilu 1982 dan SU-MPR 1983. Hal ini bukan saja karena panggilan kewajiban PGRI sebagai organisasi komponen Orde Baru keluarga besar Golongan Karya dalam komitmennya menegakkan dan menyukseskan cita-cita perjuangan Orde Baru, akan tetapi terkait pula atas panggilan khusus profesinya, bahwa sukses-



*H. Basyuni Suriamiharja
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI*

nya Pemilu dan SU-MPR adalah salah satu media pendidikan politik berlandaskan Pancasila bagi seluruh rakyat, termasuk anak-anak didik kita.

Alhamdulillah, berkat pimpinan Pemerintah yang capable dan kebijaksanaan di bawah pimpinan Bapak Presiden Soeharto dibarengi dengan partisipasi dan rasa tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, maka Pesta Demokrasi Pancasila, Pemilu 1982 dan SU-MPR 1983 telah berjalan lancar dan suks. GBHN TAP No. II/MPR/1983 disertai TAP-TAP MPR lainnya terpilihnya kembali Bapak Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia sebagai Presiden RI masa bakti pemerintahan 1983-1988, memberikan keyakinan pada kita akan kesinambungan dan keberhasilan pembangunan bangsa dalam suasana persatuan dan kesatuan nasional yang makin mantap, menuju terwujudnya cita-cita kemerdekaan, Proklamasi 17 Agustus 1045.

Masa berkiprah politik praktis 5 tahunan, sudah dilalui. Semua pihak saat ini sudah kembali membenahi diri dan menunaikan tugas dalam ruang lingkup dan profesinya masing-masing

dengan segala peningkatannya, seirama dan berpegang pada amanat rakyat, sebagaimana yang digariskan oleh isi ketetapan-ketetapan SU-MPR 1983. Berbicara dan berkhiprah politik praktis kembali menjadi ajangnya para wakil rakyat, pada lembaga-lembaga politik di pusat dan atau di daerah. Dalam nafas inilah antara lain Konperensi Pusat PGRI diselenggarakan.

Konpus PGRI tahun 1983 yang isnya Allah akan diselenggarakan tanggal 6 s/d 8 Juni 1983 ini mengambil tema: "Peranan Guru dalam Memasyarakatkan dan Mensukseskan Hasil Sidang Umum MPR 1983 dan Pelita IV dalam Bidang Pendidikan".

PGRI menyadari, bahwa kelangsungan dan keberhasilan pembangunan Bangsa di bawah pimpinan Pemerintah dan pada saat ini di bawah Kabinet Pembangunan IV dengan Panca Kridanya, terjamin karena kesadaran, dukungan dan peransertanya seluruh rakyat. Di segi lain PGRI menyadari pula, bahwa porsi tugas guru yang paling utama adalah mengemban misi nasional mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan profesinya di bidang pendidikan. PGRI meyakini, bahwa keberhasilan sesuatu tugas pekerjaan, besar atau kecil, pokok pertama terletak pada unsur manusianya, sebagai tenaga pelaksana. Guru dalam kontok pelaksana kependidikan merupakan unsur penentu. Karena itu bila berbicara tentang dedikasi, mutu dan profesi guru tidak terlepas dari sisi lainnya, yaitu kesejahteraan yang menompangnya serta perlindungan jabatannya. Pemasalahan lain yang dihadapi ialah dalam bidang organisasi bahwa masa PGRI ke XIV tinggal $\pm 1\frac{1}{2}$ tahun lagi di mana Kongres PGRI ke XV sewajarnya mulai dipikirkan.

Dalam kaitan tema dan permasalahan tersebut di atas maka Konpus sekarang ini bertujuan untuk memusyawarahkan dan merumuskan 4 sasaran permasalahan pokok, yaitu:

1. Peranan Guru/PGRI dalam upaya pemsyarakatan dan pensuskesan pelaksanaan hasil-hasil SU-MPR 1983;
2. Pemikiran konseptual PGRI bagi Repelita IV Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Generasi Muda;
3. Kesejahteraan Guru-guru;
4. Penyelenggaraan Kongres PGRI ke XV tahun

1984 yang akan datang.

PGRI menyadari, bahwa Kongres PGRI saat ini diwarnai oleh situasi kemasyarakatan yang banyak tantangan dan menuntut peningkatan ketabahan, solidaritas dan dedikasi kita semua, khususnya di bidang ekonomi, bahkan tidak kurang peliknya, dalam bidang pendidikan sendiri. Isnya Allah, PGRI yang lahir tanggal 25 Nopember 1945, dengan segala identitasnya sebagai penegak, pengemban dan pelestari jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 akan tetap mampu berkhiprah melestarikan pengabdianya terhadap Bangsa dan Negara. Bermodalkan kepada menghayati atas misi dan hakekat kelahirannya, warga PGRI insya Allah, akan cukup pengertian dan tabah dalam menghadapi dan menghayati keadaan.

Selanjutnya, Pengurus Besar PGRI mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, bimbingan dan bantuan yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah-Daerah selama ini.

Kepada Bapak Presiden RI, Bapak Menko Kesra, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri P dan K, Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Penerangan, Bapak Menteri Koperasi, Bapak Menteri Negara Urusan Pemuda & Olahraga, Bapak Gubernur DKI Jakarta serta para Bapak Gubernur Kdh. di seluruh Indonesia, DPP-Golongan Karya dan semua fihak yang melimpahkan restu, bimbingan dan bantuan baik penyelenggaraan maupun pengisian Konpus ini Pengruus Besar PGRI mengucapkan terima kasih dan menyampaikan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya.

Kepada para tamu undangan kami mengucapkan

Kepada para tamu undangan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya memenuhi undangan kami.

Kepada Para Pengurus Daerah peserta Konpus dari seluruh Indonesia, Pengurus Besar PGRI mengucapkan selamat datang, selamat bertemu dan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Saudara-saudara hadir dalam Konpus ini.

Akhimya, kepada Bapak Menteri P dan K kami mohon, berkenan kiranya menyampaikan sambutan pengarahannya serta meembuka resmi Konpus ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati pertemuan ini dapat berjalan lancar dan sukses.

P E N G A R A H A N
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
PADAN KONPERENSI PUSAT PGRI DI JAKARTA,
TABGGAL, 6 JUNI 1983

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara-saudara Pengurus Besar PGRI,

Para peserta Konperensi Pusat dan hadirin/hadirat yang saya hormati.

1. PENDAHULUAN

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanallahu Wata'ala, karena atas rahmat dan ridhoNya, pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam Konperensi Pusat PGRI.

Konperensi Pusat saya anggap penting dan tepat waktu diselenggarakannya; penting karena saudara-saudara peka terhadap perkembangan bangsa dan negara, yaitu akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan "Peranan Guru dalam memasyarakatkan dan mensukseskan hasil Sidang Umum MPR 1983 dan Pelita IV dalam bidang pendidikan" dan dikatakan tepat karena Konperensi Pusat ini diselenggarakan pada saat berakhirnya Pelita III dan menghadapi Pelita IV, saat melakukan segala pemikiran dan persiapan.

Oleh karena itu saya sambut dengan gembira permintaan PB PGRI dan saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pengarahannya pada konperensi yang terhormat ini dengan judul "PERANAN GURU DAN PENDIDIKAN DALAM UPAYA BERSAMA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT".

Masalah peranan guru dan pendidikan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, telah kita ketahui, kita pahami serta telah kita laksanakan bersama sejak Negara kita Merdeka sampai sekarang, karenanya pengarahannya akan lebih bersifat suatu penyegaran (refreshing) dengan memberi penekanan-penekanan dalam beberapa hal yang perlu mendapat perhatian

yang lebih sungguh-sungguh, antara lain menguraikan yang berkaitan dengan beberapa pengertian mengenai kesejahteraan rakyat, pendidikan dan guru; pokok-pokok kebijaksanaan Pemerintah di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Generasi Muda; sebagai pengantar atau untuk mengawali pokok uraian ceramah tentang Peranan Guru dan Pendidikan di bidang kesejahteraan rakyat.

II. BEBERAPA PENGERTIAN :

1. Kesejahteraan Rakyat.

Saudara-saudara;

Sejak awal Kabinet Pembangunan III tahun 1978 telah dicoba untuk merumuskan suatu batasan atau pengertian tentang kesejahteraan rakyat (disingkat kesra) - dalam arti luas sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Batasan tersebut dimaksud untuk menghindari perbedaan pengertian sehingga kita dapat bicara dengan bahasa yang sama, dengan kata lain perlu adanya kesepakatan atau terwujudnya kesatuan bahasa mengenai istilah yang dipergunakan.

Kesejahteraan Rakyat mempunyai arti dan ruang lingkup permasalahan yang sangat luas, demikian luasnya sehingga pengertiannya sendiri sering menjadi kabur. Untuk menambah kejelasan dan mencegah kekaburan pengertian tersebut kita perlu mengusahakan adanya satu diskripsi atau batasan sementara dengan maksud agar diskripsi/batasan tersebut dapat disempurnakan di kemudian hari sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Menurut diskripsi/batasan sementara, Kesejahteraan Rakyat adalah: Suatu keadaan di mana seluruh rakyat secara merata, hidup berkecukupan baik material maupun spiritual; aman, tenteram, tertib dan maju; jauh dari segala penderitaan dan ketakutan, serta di mana harkat

dan derajat manusia dapat dipelihara dan dijunjung tinggi.

Apabila kita mendasarkan batasan ini maka ruang lingkup bidang KESRA jelas meliputi segenap aspek kehidupan bangsa dan negara, di mana secara struktural meliputi fungsi bidang tugas ketiga MENKO, yaitu bidang tugas MENKO POLKAM, MENKO EKUIN/PENGAWASAN PEMBANGUNAN dan bidang tugas MENKO KESRA, di mana bidang yang disebut terakhir ini sekarang dipercayakan pada saya. Karena itu KESRA yang saya pimpin sesungguhnya hanyalah sebagian saja dari KESRA dalam arti luas, sehingga yang saya pimpin lebih mendekati pengertian bidang sosial budaya, yang dalam Struktur Kabinet Pembangunan IV hanya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Agama, Sosial, Pemuda dan Olahraga serta Peranan Wanita.

2. Pendidikan

Mendidik dalam arti luas ialah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dengan sengaja dan sadar serta penuh tanggung jawab untuk membimbing anak didik agar memiliki watak dan kepribadian yang baik di samping penguasaan ilmu pengetahuan serta keterampilan.

Apabila konsep tersebut dijabarkan maka terdapat tiga unsur yang penting yaitu mendidik, mengajar dan melatih di mana ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Jelasnya mendidik lebih ditujukan kepada pengembangan aspek-aspek moral, agama dan segi-segi kepribadian. Mengajar lebih dipusatkan sasarannya kepada pengisian ilmu pengetahuan serta peningkatan kecerdasan. Adapun melatih lebih dipusatkan kepada pengembangan keterampilan anak didik dalam rangka mempraktekkan atau mengamalkan hasil pendidikan dan pengajaran yang diterima.

3. Guru.

Guru adalah jabatan dan profesi yang luhur dan mulia, karena menurut pendapat orang kebanyakan, "guru" mempunyai konotasi pengertian bahwa guru adalah seseorang yang patut *digugu* (dipercaya) dan *ditiru* (diteladani). Demikian pula guru merupakan bagian dari

pendidikan yang sangat menentukan, karena guru mempunyai peranan yang beraneka ragam, antara lain:

- a. Sebagai *pendidik* ia harus mengembangkan watak dan kepribadian anak didik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Sebagai *pengajar* ia harus membantu perkembangan anak didik untuk dapat menerima, memahami dan menguasai ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai *pelatih* ia harus membantu anak didik untuk menguasai keterampilan.
- d. Sebagai *pancu* ia harus memberi petunjuk dan pengarahan terhadap anak didik dalam perjalanan mencari identitasnya.
- e. Sebagai *model* ia harus memberi contoh/teladan bagi anak didik.
- f. Sebagai *konsultan* ia menjadi tempat bertanya, minta nasihat anak didik.
- g. Sebagai *inovator* dan *kreator* yang mendorong dan mengarahkan daya khayal dan daya cipta anak didik.

III. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Saudara-saudara;

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara disebutkan bahwa hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan Masyarakat Indonesia seluruhnya. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas manusia Indonesia sebagai suatu bangsa agar lebih mampu menegakkan dan membangun negaranya.

Sesuai pula dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa "Pancasila", maka dalam setiap kegiatan membangun bangsa dan negara, harus selalu diusahakan adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan dengan masyarakat, dalam hubungan dengan alam, dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain dan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya.

Dalam kaitan inilah pendidikan memegang peranan yang penting, karena setiap langkah

pembangunan akan selalu berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan, meskipun dalam dimensi yang berbeda-beda.

Mengingat arti pentingnya pendidikan dalam mewujudkan kualitas bangsa, maka kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dalam Pelita IV diusahakan untuk lebih ditingkatkan dalam rangka melaksanakan tujuan pembangunan nasional yaitu:

Pertama : Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil.

Kedua : Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Apabila diteliti maka kebijakan pembangunan nasional dalam Pelita IV pada dasarnya masih tetap sama dengan Pelita III, hanya perlu lebih ditingkatkan agar makin nyata dapat dirasakan peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan yang makin merata dan adil bagi seluruh rakyat.

Khususnya kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat, meliputi bidang-bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan keluarga berencana, agama, kesejahteraan

sosial, peranan wanita dan generasi muda. Namun dalam kesempatan ini saya akan lebih menitikberatkan uraiannya pada bidang yang langsung merupakan profesi utama para guru, di samping selintas penguraian bidang Kesra lainnya sebagai pelengkapny.

1. Bidang Pendidikan.

Saudara-saudara;

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut maka diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan moral Pancasila serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan



Menko Kesra H. Alamsyah Ratu Perwiranegara (tengah) saat menyampaikan pengarahannya pada hari pertama Konpus PGRI, 6 Juni 1983.

mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda harus makin ditingkatkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta dan lingkungan masyarakat. Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda maka di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta, wajib diberikan pendidikan *sejarah perjuangan bangsa*.

Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu dan perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan wajib belajar, serta meningkatkan perluasan kesempatan belajar pada tingkat pendidikan menengah.

Namun dalam hal peningkatan mutu pendidikan sangat diperlukan di semua tingkatan, mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, di mana dituntut agar pendidikan dapat menghasilkan ahli-ahli dan tenaga-tenaga trampil yang dapat menjawab tantangan tersebut.

Selanjutnya dalam masalah wajib belajar, telah kita ketahui bahwa program wajib belajar akan dilaksanakan pada Pelita IV, maka sasaran Pelita III, yaitu agar anak usia 7 – 12 tahun sudah bisa ditampung semua dan untuk keperluan tersebut usaha-usaha telah dilaksanakan antara lain dengan Inpres Sekolah Dasar yang dimulai sejak tahun 1973/1974, sedangkan tahun 1983/1984 sebagai tahun akhir Pelita III, telah ditetapkan sebagai tahun pemantapan persiapan wajib belajar, agar pada awal tahun Pelita IV wajib belajar benar-benar sudah dapat dilaksanakan.

Dalam rangka memperluas untuk memperoleh pendidikan, dilanjutkan usaha penyediaan fasilitas pendidikan untuk menampung anak-anak usia sekolah dan usaha tersebut menjangkau pula kelompok masyarakat yang karena kurang mampu, cacat ataupun bertempat tinggal terpencil kurang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia, agar mereka mendapat kesempatan belajar dan meningkatkan keterampilan.

Sistim pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan keterampilan serta dapat sekaligus meningkatkan pro-

duktivitas, kreativitas, mutu dan efisiensi kerja. Dalam hubungan ini berbagai tingkat dan jenis pendidikan serta latihan-latihan kejuruan dan politeknik, perlu lebih diperluas dan ditingkatkan mutunya dalam rangka mempercepat dipenuhinya kebutuhan tenaga-tenaga yang cakap dan terampil bagi pembangunan di berbagai bidang.

Dalam rangka tercapainya suatu sistim pendidikan secara nasional, mantap dan terpadu, perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan secara fungsional dan terintegrasi bidang pendidikan umum dan kejuruan, serta dilanjutkan usaha-usaha menertibkan fungsi dan peranan pendidikan dan latihan kedinasan.

Pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, termasuk kepramukaan, latihan-latihan keterampilan dan pemberantasan buta huruf perlu lebih dikembangkan.

Dalam hal pelaksanaan wajib belajar pendidikan luar sekolah sangat membantu tercapainya kesempatan bagi semua anak menikmati pendidikan, terutama bagi masyarakat yang hidup di daerah terpencil.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pendidik untuk semua tingkat dan jenis baik dalam jumlah yang memadai maupun pembinaan mutu dan kesejahteraannya perlu ditingkatkan dan dikembangkan.

Demikian pula perguruan swasta perlu ditingkatkan mutu, peranan dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan makin dikembangkan pertumbuhannya berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas perguruan yang bersangkutan.

Dengan usaha tersebut dapat diharapkan bertambahnya kesempatan bagi masyarakat untuk mengecap pendidikan dan bertambahnya tenaga-tenaga yang benar-benar dibutuhkan oleh pembangunan.

Selanjutnya pendidikan tinggi dikembangkan dan peranannya lebih diarahkan untuk:

- a. menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa datang.
- b. mendidik mahasiswa agar mampu menguasai



Bapak Ali Marsaban, (salah seorang pendiri PGRI dan ex Sekjen PB-PGRI yang I-1945) no. 2 dari depan, berkesempatan menghadiri Upacara pembukaan Konpus PGRI th. 1983.

ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Peranan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam kegiatan pembangunan juga perlu makin ditingkatkan dengan cara:

- a. menjamin penggunaan kebebasan mimbar akademi dalam bentuk yang kreatif dan konstruktif, namun tetap dengan penuh tanggung jawab baik secara moral maupun konstitusional.
- b. melanjutkan usaha-usaha ke arah integrasi dan konsolidasi kegiatan mahasiswa dan cendekiawan sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya dalam wadah-wadah yang efektif sehingga mereka dapat menyumbangkan prestasi/partisipasi yang positif.

Pendidikan jasmani dan olahraga juga perlu ditingkatkan dan dimasyarakatkan sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap anggota masyarakat. Dalam hubungan ini meliputi juga peningkatan prestasi olahraga, karena itu perlu ditingkatkan prasarana dan

sarananya termasuk para pendidik, pelatih dan penggeraknya dan digalakkan gerakan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat secara berkesinambungan.

Pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia, keputakaan, penerbitan, penulisan, penterjemahan juga perlu ditingkatkan khususnya dalam rangka lebih memantapkan usaha penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

2. Bidang Kebudayaan.

Saudara-saudara;

Dalam Bidang Kebudayaan yang harus mendapat perhatian ialah:

- a. Dibina dan dikembangkan nilai budaya Indonesia untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebangsaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan.
- b. Kebudayaan nasional terus dibina dan diarahkan pada penerapan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila dan sekaligus dapat mencegah nilai-nilai sosial budaya yang negatif.

- c. Dalam rangka memperkokoh kesetiakawanan nasional, tenggang rasa, hemat dan sederhana, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur dan kesatria, perlu dibina dan dikembangkan tanggung jawab sosial dan disiplin nasional.
- d. Dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta ketahanan nasional perlu ditingkatkan pembauran bangsa di segala bidang kehidupan.
- e. Pembinaan bahasa Indonesia, bahasa Daerah, kesenian maupun tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa perlu dibina dan dikembangkan.

3. Bidang Generasi Muda.

Generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber insani bagi pembangunan perlu ditingkatkan pembinaan dan pengembangan secara terus menerus dalam rangka pendidikan nasional dengan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan kepemimpinan; kesegaran jasmani dan daya kreasi; patriotisme dan idealisme; kepribadian dan budi pekerti yang luhur.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan untuk menjamin terlaksananya tujuan pembangunan dan pengembangan generasi muda melalui berbagai kegiatan untuk merangsang para pemuda untuk lebih terlibat dalam proses pembangunan; seperti misalnya: kelompok-kelompok produktif sektor pertanian, kegiatan penghijauan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Satu hal tidak boleh dilupakan bahkan senantiasa perlu dikembangkan adalah sifat historis kepeloporan pemuda di segala aspek kehidupan bangsa, terutama sekarang dalam masa pembangunan ini, mengingat hari depan bangsa sangat bergantung pada kemampuan, kesadaran, dedikasi dan kepekaan Generasi Muda, terutama para kadernya.

4. Bidang Peranan Wanita.

Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita di segala bidang dan dalam rangka inilah wanita yang menurut UUD 1945 mempunyai hak dan kew-

jiban serta kesempatan yang sama dengan pria ditantang untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Karenanya perlu sekali dikembangkan usaha untuk menggugah partisipasi para wanita agar ikut lebih aktif dalam pembangunan tanpa meninggalkan kodrat kewanitaannya, antara lain: menunjang gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penyebar-luasan pengetahuan praktis tentang gizi dan menu makanan rakyat; pembudayaan kesehatan dan kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih dan pendidikan keterampilan dan terutama bagaimana membangkitkan dan mengembangkan sifat mandiri yang positif di antara kaumnya.

5. Bidang Agama.

Dalam bidang agama yang perlu mendapat perhatian ialah keharusan dilaksanakannya perikehidupan beragama dan perikehidupan berke-Tuhanan Yang Maha Esa yang selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta senantiasa diusahakan makin meningkatnya hidup rukun di antara sesama umat, dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.

Khususnya mengenai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu digarisbawahi bahwa tidak merupakan agama, oleh karena itu perlu ditingkat-tertibkan pembinaannya agar tidak mengarah pada terbentuknya agama baru, dan pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Khususnya di alam pembangunan di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia semakin pesat serta derasnya arus kebudayaan asing yang negatip masuk ke masyarakat kita, maka pendidikan agama perlu lebih dimantapkan dan diberikan di semua tingkat pendidikan baik formal maupun non formal, terutama di lingkungan keluarga harus merupakan kemutlakan untuk diadakan sebagai dasar pembentukan moral dan mental anak.

6. Bidang Kesehatan.

Dalam bidang kesehatan yang perlu mendapat perhatian ialah: Terwujudnya sistem kesehatan nasional yang berisi untuk mempertinggi taraf kesehatan dan kecerdasan rakyat, perbaikan

mutu gizi, peningkatan pemberantasan penyakit menular dan penyakit rakyat, peningkatan pengadaan air minum, peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan, perlindungan rakyat terhadap bahaya narkotika, serta usaha memasyarakatkan perilaku hidup sehat sehingga membudaya.

Lebih lanjut perlu pula untuk ditingkatkan dan dikembangkan program keluarga berencana demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, yang lebih lanjut akan merupakan dasar utama bagi terwujudnya cita kesejahteraan rakyat yang sangat didambakan oleh seluruh bangsa Indonesia.

7. Bidang Kesejahteraan Sosial.

Untuk tercapainya keadilan sosial, perlu dilanjutkan, dikembangkan dan ditingkatkan usaha-usaha sosial terutama terhadap orang-orang yang hidupnya terasing dan terbelakang. Memang kebodohan, kemelaratan dan keterbelakangan merupakan tantangan pembangunan nasional untuk mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945.

Karena itu pula penanggulangan terhadap fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, rehabilitasi sosial bagi orang-orang tersesat dan bantuan serta rehabilitasi sosial bagi para korban bencana alam perlu makin ditingkatkan.

Dalam hubungan ini partisipasi masyarakat terutama bagian masyarakat yang telah dapat menikmati hasil pembangunan sangat diharapkan untuk menolong sesama bangsa dalam meningkatkan harkat dan derajat manusia Indonesia sesuai dengan pandangan hidupnya "Pancasila".

IV. PERANAN GURU DAN PENDIDIKAN DALAM USAHA KESEJAHTERAAN RAKYAT.

Saudara-saudara;

Sebagaimana kita ketahui bersama di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat, kita ketemudian tujuan kemerdekaan atau tujuan nasional kita, yang antara lain disebutkan: "untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Dalam rangka itulah peranan guru/pendidik sangat penting, karena memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, pada dasarnya merupakan kemampuan bangsa untuk mengatasi hambatan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kondisi kehidupan bangsa (poleksosbud hankam).

Makna yang terkandung di dalamnya adalah suatu usaha pembangunan yang berpangkal pada manusia dengan segala potensi-potensi dan kemungkinan-kemungkinan yang ada padanya; oleh karena itu pembangunan nasional merupakan usaha manusia yang berangkat dari kondisi dan kenyataan perikehidupan bangsa (poleksosbud hankam), melalui usaha yang teratur dan terarah dalam mengerahkan kemampuan-kemampuan manusia untuk mencapai tujuan yakni: meningkatkan kualitas dan mutu hidup dan kehidupan manusia, baik mental spiritual maupun fisik materiil, sesuai dengan harkat, martabat dan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan.

Dalam rangka pemikiran inilah pendidikan menduduki tempat yang amat strategis dan menentukan sebab pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar dan sangaja untuk membina anak didik (generasi muda) ke arah perkembangan kehidupan yang lebih baik. Melalui pendidikan diusahakan terbinanya manusia yang mampu untuk senantiasa mengembangkan dirinya dan kemampuannya, menjadi pribadi yang utuh, percaya kepada diri-sendiri, mampu memelihara dan mengembangkan eksistensinya, baik hubungannya antar sesama manusia, maupun dengan Tuhan.

Jelaslah pendidikan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga pendidikan merupakan tugas yang rumit dan unik. Namun mengingat peranan pendidikan yang karena sifatnya tidak secara langsung nampak mendukung pembangunan bidang lain, dalam arti tidak seperti penonjolan secara langsung peranan pada bidang-bidang fisik materiil, maka sering kurang mendapat perhatian yang semestinya, bahkan kadang-kadang agak tersisihkan oleh peranan lain yang segera secara langsung dapat dirasakan hasilnya.

Selanjutnya di alam pembangunan sangat ditentukan oleh faktor manusia pembangun yang mempunyai/memiliki sikap mental seperti: adanya kesiapan dan keterbukaan menerima gagasan baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa,

percaya kepada kemampuan bangsa, menyadari akan kemampuan serta keterbatasannya, berorientasi ke masa depan, sadar akan harkat dan martabat manusia sebagai individu dan makhluk sosial, serta kewajiban untuk bekerja dan beramal demi kepentingan nusa dan bangsa, tanpa melupakan iman dan taqwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kesemuanya itu perlu ditumbuhkan dan dikembangkan serta dilatih terutama melalui pendidikan baik formal maupun non formal, di samping pengalaman yang juga merupakan pendidikan tersendiri.

Di atas telah dikemukakan bahwa pendidikan menyentuh segala aspek kehidupan manusia, maka selain menyangkut hal-hal yang telah saya kemukakan tadi, masih banyak penanganan bidang lain yang dapat dipecahkan melalui pendidikan seperti: dengan pendidikan dapat memecahkan masalah kependudukan, keluarga berencana, ketenagakerjaan, P4 dan lain-lain.

Dalam hubungan ini peranan guru sangat menentukan keberhasilan tujuan pendidikan, karena gurulah sebagai subyek merupakan peran utama dalam melaksanakan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan pendidikan yang berlaku.

Sebagaimana telah saya jelaskan di muka mengenai keaneka-ragaman peran guru, maka dari padanya dituntut bermacam-macam syarat antara lain:

- a. Di dalam pembangunan nasional terutama pembangunan untuk bangsa, peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, guru harus berperan sebagai *pendidik*.
- b. Dalam rangka mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ia sebagai *pengajar* harus berusaha memberikan pelajaran dengan metoda yang sesuai dengan situasi dan kondisi kepada anak didik agar mereka dapat dan mampu mengatasi segala tuntutan dan tantangan yang dihadapi.
- c. Lebih lanjut dalam usaha mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat, guru harus berperan sebagai *pelatih* dalam mengembangkan ketrampilan anak didik.

d. Dalam perjalanan kehidupan anak didik mencari identitas pribadinya, anak didik perlu mendapat petunjuk dan bimbingan dari guru dan dalam mengembangkan daya cipta dan daya khayal anak didik hendaknya guru *berperan sebagai pendorong dan pengarah*.

- e. Di dalam melaksanakan tugas agar tujuan pendidikan bisa tercapai sesuai dengan yang dicita-citakan, harus disertai dengan kasih sayang. Ia harus melakukan tugasnya dengan pendekatan manusiawi, ia harus memberi petunjuk kepada anak didiknya dalam perjalanan mencari dan menambah ilmu menjadi penasihat dan tempat minta pendapat bagi para anak didik.

Karenanya bagi seorang guru dituntut untuk senantiasa menambah ilmu dan pengetahuan di samping belajar dari pengalaman-pengalaman. Kesemuanya itu hanya bisa berhasil dengan baik bilamana segala apa yang di-erikan oleh guru dapat pula dicerminkan dalam perilaku guru sehari-hari, yaitu memberi suri tauladan setiap sat kepada anak didik.

Hal inilah yang perlu mendapat perhatian utama dari seorang guru, karena betapapun baiknya cara mengajar disertai banyaknya dan luasnya pelajaran yang diberikan, namun tanpa adanya suri tauladan tersebut, akan sia-sialah usaha yang luhur tersebut.

Dari uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa guru di dalam mewujudkan pembangunan (pendidikan) adalah sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan cita-cita bangsa.

Sebaliknya para guru, sebagai manusia biasa juga tidak luput dari segala kekurangan, keterbatasan serta kebutuhannya, maka perlu ada usaha-usaha yang nyata dari kita bersama, pemerintah dan masyarakat agar para guru mendapat perhatian baik dalam usaha untuk menambah pengetahuan dan keterampilan maupun dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya, sehingga, para guru akan dapat lebih memusatkan perhatiannya kepada trilogi tugasnya sekaligus sebagai pendidik, pengajar dan pelatih.

V. PENUTUP.

Saudara, hadirin dan hadirat yang terhormat.

Sebelum saya mengakhiri pengarahan saya, perlu diutarakan bahwa saya bukan saja hanya merasakan, melainkan lebih dari pada itu, dapat menghayati sendiri betapa penting arti pendidikan dan betapa berat tugas sebagai pendidik. Terutama di negara yang sedang berkembang seperti negara kita, di mana masih terdapat kelangkaan dan kekurangan sarana dan prasarana, ketenagaan serta belum sempurnanya peraturan perundang-undangan pendidikan dan dihubungkan pula dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta derasnya nilai-nilai budaya yang negatif masuk ke dalam masyarakat, tugas pendidikan/guru makin bertambah berat. Namun demikian saya percaya bahwa karena dedikasi yang tinggi dibarengi dengan cinta kasih terhadap anak didik, para guru masih tetap memiliki rasa tanggung jawab yang besar, pada profesinya dan demi berhasilnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

Atas dasar itulah saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara.

Akhirnya saya sampaikan pula "Selamat berkonperensi dan mencapai sukses seperti yang direncanakan".

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 6 Juni 1983

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

ttd.

(ALAMSYAH RATU PRAWIRANEGARA)



PENERBIT DAN TOKO BUKU

P.T. PRADNYA PARAMITA (PERSERO)

Jl. Kebon Sirih No. 46 – Tromolpos No. 146/Jkt. Telp 360411 – Jakarta Barat

Alamat Kawat: PRADNYA – Jakarta

BANK: BANK DAGANG NEGARA Gambir – B.N.I. 1946 Kramat dan Gambir – BANK BUMI DAYA Gambir

*MENERBITKAN BUKU-BUKU PELAJARAN UNTUK
S.D./SMTP/SMTA. PENYALUR BUKU-BUKU PAKET
JUGA MENYEDIAKAN BUKU-BUKU UNTUK UNIVERSITAS
DAN UMUM.*

MINTALAH DAFTAR BUKU KAMI.

Sambutan Menteri Dalam negeri pada Konperensi pusat PGRI di Jakarta, Tanggal 7 Juni 1983

Assamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Yang terhormat Pengurus Besar PGRI,
Para Peserta Konperensi Pusat PGRI,
Hadirin yang saya hormati.

Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini PGRI dapat menyelenggarakan Konperensi Pusatnya. Terima kasih saya sampaikan atas kesempatan memberikan sambutan di dalam forum yang bahagia ini.

Di dalam pembangunan nasional sekarang yang sedang kita lancarkan, Guru mempunyai peranan yang sangat penting, karena para Guru mempunyai tugas pokok menyiapkan anak didiknya menjadi insan yang berakhlak tinggi, berilmu untuk mengamalkan dalam estafette pembangunan nasional yang berlangsung terus menerus dan selalu meningkat, makin maju dan makin laju. Sehubungan dengan itu, thema pokok Konperensi ini, yaitu "Peranan Guru dalam memasyarakatkan hasil Sidang Umum MPR 1983 dan PELITA IV dalam bidang Pendidikan" pada hakekatnya merupakan salah satu upaya nyata untuk membulatkan lagi tekad para pendidik, untuk berkarya lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya tersebut, agar para anak didiknya dapat memenuhi harapan bangsa, yaitu menerima tanggung jawab untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan terus-menerus, sehingga maksud dan makna yang terkandung dalam GBHN 1983 serta TAP-TAP MPR 1983 lainnya dapat terwujud menjadi kenyataan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Hadirin yang saya hormat,

Ketetapan-ketetapan MPR adalah hasil per-

musyawaratan wakil-wakil rakyat Indonesia di dalam Lembaga Kedaulatan Rakyat Tertinggi, merupakan kristalisasi daripada aspirasi rakyat Indonesia yang terserap oleh wakil-wakilnya, dan selanjutnya dirumuskan di dalam bentuk ketetapan-ketetapan tersebut. Itulah sebabnya saya sangat bergembira, karena PGRI memahami benar-benar tanggung jawabnya, maka melalui jalur di mana para anggotanya berperan, akan memasyarakatkan hasil-hasil Sidang Umum MPR 1983 tersebut, dan selanjutnya membeirikan dorongan kepada masyarakat, untuk mensukseskan pelaksanaannya, khususnya yang berhubungan dengan Pendidikan dan Pembangunan Daerah.

Tentulah dimaklumi, bahwa pembangunan di segala bidang kehidupan, termasuk juga bidang pendidikan dan pembangunan daerah, yang tercantum di dalam Ketetapan-ketetapan MPR khususnya GBHN 1983 – akan dijabarkan di dalam REPELITA IV, untuk dapat dilaksanakan mulai 1 April 1984 yang akan datang. Kini REPELITA IV, untuk dapat dilaksanakan Kini REPELITA IV itu sedang disusun. Dan oleh sebab itu masih dapat ditampung pemikiran-pemikiran konsepsional, yang dapat diterima sebagai bagian integral di dalam rencana tersebut, untuk melaksanakan nanti melalui APBN yang dapat dianggap sebagai program tahunan dalam pelaksanaan REPELITA IV.

Saudara-saudara yang terhormat,

Pola Umum REPELITA IV yang termaksud di dalam GBHN (TAP MPR II/MPR/1983) mencakup segi yang luas. Tidak kurang dari 17 pokok ("butir-butir" dari huruf a – q), mencakup antara lain pendidikan masa kanak-kanak, pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

Di dalam bidang pendidikan itu tersurat tentang:

1. Tujuan pendidikan nasional,
2. Usaha untuk membudayakan P4,
3. Pendidikan Pancasila,
4. Pendidikan sejarah bangsa,
5. Proses pendidikan,
6. Pembangunan pendidikan,
7. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan,
8. Sistem pendidikan,
9. Usaha pembinaan,
10. Pendidikan luar sekolah,
11. Perguruanswasta,
12. Pengembangan dan pengarahannya pendidikan tinggi,
13. Peningkatan peranan perguruan tinggi,
14. Pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan,
15. Pendidikan jasmani dan olahraga,
16. Bahasa Indonesia,
17. Kepustakaan dan penelitian.

Untuk dapat mencapai Tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila sebagaimana dikehendaki GBHN, hal tersebut di bawah perlu mendapat perhatian kita bersama.

- a. untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diperlukan pendidikan keagamaan yang sungguh-sungguh,
- b. untuk meningkatkan kecerdasan, diperlukan sistem pendidikan yang mampu mencerdaskan, yaitu pendidikan yang dapat memberi landasan bagi berkembangnya kecerdasan anak didik dengan latihan berpikir yang logis dan sistematis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, baik secara teoritis, maupun secara praktis;
- c. untuk meningkatkan ketrampilan, diperlukan pendidikan dan latihan yang memadai, sehingga anak didik mampu menggunakan sarana yang tersedia untuk membuka kemungkinan terwujudnya hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera;
- d. untuk mempertinggi budi pekerti, diperlukan pendidikan moral yang luhur, yang memungkinkan berkembangnya nilai-nilai kebijaksanaan, yang mendasari pola sikap tingkah laku anak didik untuk selanjutnya;
- e. untuk memperkuat kepribadian, diperlukan

pendidikan watak yang kuat, watak yang mengembangkan semangat juang dan ketahanan mental, yang sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan dan rintangan dalam membangun diri dan masyarakatnya, untuk mengatasi segala kesulitan dengan cara-cara yang etis, dalam arti tidak mengganggu warga masyarakat lainnya;

- f. untuk mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, diperlukan pendidikan yang mampu menumbuhkan pengertian yang mendalam mengenai eksistensinya bangsa Indonesia, dan oleh sebab itu mengembangkan kesadaran untuk mencintai bangsa, tanah air dan negaranya, dan oleh karenanya juga sanggup membelanya dari gangguan apapun dari manapun juga datangnya;
- g. untuk menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa, diperlukan pendidikan yang selain memenuhi kaidah-kaidah sebagaimana saya sebutkan tadi, juga harus dapat memahami makna pembangunan, tata pembangunan, pola operasional pembangunan, aturan permainan dalam pembangunan nasional serta tujuan pembangunan nasional, sebagaimana telah ditegaskan dalam GBHN 1983 dan GBHN-GBHN berikutnya.

Saudara-saudara,

Pendidikan nasional adalah berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu para pendidik harus benar-benar memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila, sehingga dalam proses belajar mengajar, tidak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila. Para Guru yang juga berkedudukan sebagai motivator dan dinamisator dalam membudayakan P-4, harus terjun ke masyarakat. Dalam proses ini harus dapat tercakup juga Pendidikan Moral Pancasila serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda.

Pancasila adalah sumber dari segala gagasan kita mengenai wujud masyarakat yang kita anggap baik, yang menjamin kesentausaan hidup kita semua, yang mampu memberi kesejahteraan lahir dan batn. Karenaitulah perlu diadakan

upaya terhadap anak didik dan seluruh lapisan masyarakat, agar kita semua makin mendalami dan mampu melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian para Guru juga menjadi penggerak untuk memahami kembali, meresapi, menghayati dan mengamalkan gagasan-gagasan kita mengenai masyarakat yang kita cita-citakan, melalui rangkaian GBHN-GBHN yang berkesinambungan.

GBHN merupakan arah dan strategi perjuangan bangsa, menjadi milik serta kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dan keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung kepada partisipasi seluruh masyarakat. Oleh sebab itulah, seperti halnya dengan P-4, isi, maksud dan tujuan GBHN juga perlu ditanamkan kepada anak didik dan seluruh masyarakat, oleh para Guru dalam melaksanakan fungsi dan missinya.

Dalam rangka pelaksanaan asas otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi, maka Pemerintah Daerah juga menyusun Repelita Daerahnya masing-masing untuk membangun Daerahnya.

Pembangunan daerah dan pembangunan sek-

toral, yaitu pelaksanaan Repelita Nasional di Daerah, perlu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah, sedang keseluruhan pembangunan daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan, demi terbinanya Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan di dalam mewujudkan tujuan Nasional.

Untuk melaksanakan peningkatan pembangunan Daerah diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi rakyat di daerah. Masing-masing daerah perlu lebih meningkatkan kesadaran dan kemampuan penduduknya untuk memanfaatkan serta memelihara kelestarian berbagai sumber alam, mengatasi berbagai masalah yang mendesak, dan membina lingkungan pemukiman yang sehat. Untuk itu perlu ditingkatkan usaha penyuluhan dan peningkatan ketrampilan penduduk. Dalam hal demikian masyarakat pedesaan berperan penting. Oleh sebab itu perhatian sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa, serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung ataupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan.



Prof. Pamudji, MA – Rektor IIP mewakili Menteri Dalam Negeri menyampaikan pengarahan pada Konpus PGRI tahun 1983.

Saudara-saudara,

Dalam keadaan demikian inilah justru diperlukan perwujudan rasa tanggung jawab yang besar bagi para Guru, sehingga secara langsung atau tidak langsung berakibat positif terhadap anak didik dalam proses pembentukan Manusia Indonesia sebagaimana hendak dicapai dengan Tujuan Pendidikan Nasional tadi. Pada tahap sekarang ini saya melihat cukup besar partisipasi masyarakat bagi dunia pendidikan, sebagaimana nampak dari kegiatan POMG yang cukup membantu. Suasana yang baik itu perlu dipelihara, agar menumbuhkan suasana kerja sama yang semakin akrab dan oleh sebab itu akan mampu mengatasi permasalahan bersama.

Demikianlah beberapa hal yang saya ingin sampaikan dalam Konperensi Pusat PGRI ini, kiranya dapat menjadi bahan tambahan dalam

menghimpun pokok-pokok pikiran bagi PGRI yang akan disumbangkan dalam menyusun REPELITA IV.

Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat berkonperensi, dan kiranya Konperensi ini dapat mencapai kebulatan pendapat guna meningkatkan mutu pendidikan Nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan bimbingan-Nya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SOEPARDJO

mengucapkan
Selamat Idul Fitri
1 Syawal 1403 H
Mohon Maaf Lahir & Bathin

HARUM GURIH NIKMAT

GUDANG GARAM
10 SIGARET KRETEK

DIREKSI, STAF DAN SEGENAP KARYAWAN
P.T. Perusahaan Rokok
GUDANG GARAM Kediri-Indonesia

RAMAYANA '83

**"PERANAN GURU DAN PGRI DALAM MEMASYARAKATKAN
DAN MENSUKSESKAN HASIL SIDANG UMUM MPR-1983
DAN MENYONGSONG PELITA IV"**

Assalamualaikum w.w.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan dari PGRI yang dewasa ini mengadakan Konperensi Pusat yaitu konperensi yang berfungsi sebagai musyawarah kerja nasional tahunan organisasi.

Saya pun berterima kasih atas kesempatan yang menyampaikan sumbangan gagasan yang saya harapkan dapat menjadi tambahan pemikiran guna peningkatan peranan PGRI lebih lanjut. Saya melihat beberapa segi persamaan tugas antara para guru dan para juru penerang, yaitu memberikan pendidikan kepada orang lain, walaupun jalur guru adalah pendidikan formal, sedangkan jalur penerangan adalah pendidikan non formal. Kedua-duanya bertugas membentuk sikap mental manusia Pancasila, walaupun guru titik beratnya memberikan kunci-kunci ke arah terbukanya pengembangan ilmu pengetahuan, sedang penerangan mengembangkan motivasi serta memantapkan pengertian-pengertian yang perlu di dalam pelbagai aspek kehidupan dan pembangunan.

Peranan Guru adalah peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bangsa. Tanpa adanya guru, kemampuan mengembangkan pikiran untuk menjelajah ke dunia ilmu pengetahuan tak akan berjalan dengan semestinya. Guru memang merupakan salah satu faktor penting di dalam proses pendidikan.

Guru adalah pembina, penuntun, pengarah dan pemberi petunjuk kepada murid yang jenjang demi jenjang dapat menguasai pengetahuan yang pada hakekatnya merupakan kemampuan untuk mengurai rahasia-rahasia alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bagi kepentingan manusia.

Guru adalah orang yang arif bijaksana, orang

yang sedemikian besar rasa pengabdianya.

Guru adalah pengabdian terhadap masyarakat yang penuh dengan dedikasi dengan tidak terlalu banyak memikirkan diri sendiri.

Guru, anak didik, sistem pendidikan dan sarana serta prasarana pendidikan adalah faktor-faktor penting yang merupakan kesatuan di dalam penyelenggaraan pendidikan. Betapa penting dan arti strategis dari pada pendidikan dapatlah kita lihat pada UUD 1945, Bab XIII, Pasal 31 yang menyebutkan:

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran;
- 2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang;
- 3) Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut jika tidak hendak dikatakan terpenting, maka unsur guru adalah merupakan unsur yang sangat penting di samping unsur-unsur pendidikan yang lain, karena memang sesungguhnya bahwa Guru adalah pemegang kompetensi yang paling tinggi di dalam pembentukan jiwa maupun pemupukan penalaran dari para anak didiknya. Di tangan para gurulah terletak sebagian besar pengarah pengembangan hidup seseorang. PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai organisasi profesi yang tunggal dan yang telah menempatkan dirinya di dalam barisan secara tepat sungguh melegakan. PGRI yang menyatakan bahwa organisasinya berdasar dan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu hal yang sangat tepat, mengingat peranan guru yang sangat strategis itu.

Dalam usaha pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila tidaklah mungkin dapat ditolerir pendirian guru yang tidak berdasarkan Pancasila. Kita sungguh harus berucap syukur karena PGRI sebagai organisasi profesi yang sangat penting telah makin mampu memantapkan diri serta makin meningkatkan kewaspadaan sehingga senantiasa menjaga integritasnya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai salah satu organisasi profesi sudah selayaknyalah apabila PGRI selalu membenahi

diri agar peranannya di dalam pembangunan bangsa makin meningkat dan makin dapat dirasakan sebagai penopang utama di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, dan selalu seirama dengan perkembangan pembangunan nasional.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa PGRI, dengan anggota-anggotanya para guru di seluruh Indonesia telah berbuat banyak bagi nusa bangsa dan negaranya baik melalui pengabdian sesuai dengan profesinya, maupun melalui peranannya sebagai insan politik Pancasila.

Di dalam proses kehidupan demokrasi Panca-



Menteri Penerangan Bpk. H. Harmoko menyampaikan prasaran/pengarahannya pada Konpus PGRI. Dari kanan: H. Harmoko, H. Basyuni Suriamiharja, Drs. H. Gazali Dunia, H.P. Laxito (PB-PGRI).

sila tak dapat disangkal lagi bahwa PGRI telah banyak berbuat untuk mensukseskan PEMILU yang semasa Orde Baru ini telah dilakukan sebanyak tiga kali yang keseluruhannya merupakan serangkaian sukses daripada Orde Baru itu sendiri.

PEMILU 1982 yang berhasil kita laksanakan bersama secara kontitusional dan secara langsung, umum, bebas dan rahasia telah dapat menampakkan lebih jelas lagi wajah daripada pelaksanaan demokrasi Pancasila yang hasil-hasilnya makin memperkokoh stabilitas nasional yang dinamis,

di mana pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

Disusul dengan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SIUM MPR) tahun 1983 yang lebih menampakkan sikap kedewasaan kita sebagai bangsa yang ber-Pancasila dan bertekad untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.

Kita semua mengetahui bahwa Sidang Umum MPR yang dilaksanakan di Jakarta, ibukota Republik Indonesia pada awal bulan Maret 1983 dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh Wakil-wakil Rakyat dari seluruh Indonesia



Menteri P dan K, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, menyampaikan pengarahannya pada Upacara Pembukaan Konpus PGRI 6 Juni 1983 di Jakarta



Menteri Agama, H. Minawir Sadzali, MA menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta Konpus PGRI. Dari kiri: H. Basyuni Surianiharja, H. Munawir Sadzali, MA dan Dra. Wahjudi, Wk. ketua PB-PGRI.

GAMBAR



Drs. Sularso mewakili Menteri Koperasi saat menyampaikan prasarana dan pengarahannya pada Konpus PGRI dalam acara peningkatan pembinaan Koperasi Guru. Nampak hadir pula: Prof. Wahyu Soekotojo, MA (no. 3 dari kanan) Penasihat Ahli Menteri Koperasi. Duduk paling kiri: Drs. H. Gazali Dunia, Sekbid Kesejahteraan PB-PGRI.



Gubernur DKI Jakarta, R. Soeprapto, menyampaikan kata sambutannya pada pembukaan Konpus PGRI, 6 Juni 1983.

sehingga berjalan dengan tertib walaupun diwarnai oleh perdebatan seru yang tidak jarang memakan waktu bahkan sering hingga semalam suntuk. Sementara itu seluruh rakyat mengikuti dengan seksama, media massa terus menerus memberitakan setiap perkembangan ke seluruh pelosok tanah air dan ke seluruh penjuru dunia. Rakyat dengan tenang dan tenteram telah mempercayakan segala sesuatunya kepada para wakil-wakilnya, dan setelah Sidang Umum menelorkan ketetapan-ketetapan maka rasa syukur dan kebanggaan nasional yang tampak dengan cemerlang. Kita merasa bangga sebagai bangsa, karena kita bersama dengan sistem demokrasi yang kita ciptakan mampu memelihara kelangsungan hidup yang stabil tetapi dinamis serta mampu melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Dunia Internasional pun makin menaruh hormat dan penghargaan serta kepercayaan bagi bangsa Indonesia, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam.

Ketetapan-ketetapan telah dihasilkan oleh Sidang Umum MPR 1983, yang sudah kita ketahui bersama dan yang maknanya sungguh amat penting di dalam proses kelanjutan hidup bangsa Indonesia.

- Ketetapan MPR RI No. II/MPR-RI/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, merupakan hasil gemilang, di mana kita memperoleh pedoman lebih lanjut untuk meneruskan Pembangunan Lima Tahun mendatang (PELITA IV), sebagai kesinambungan pembangunan yang telah kita letakkan dasarnya pada PELITA I lima belas tahun yang lalu;
- Ketetapan MPR RI No. III/MPR-RI/1983 tentang Pemilihan Umum, merupakan salah satu pedoman di dalam mengembangkan demokrasi Pancasila, sehingga azas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dapat dilaksanakan dengan makin sempurna dan sesuai dengan watak kepribadian Indonesia;
- Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR-RI/1983 tentang Referendum, merupakan penegasan tekad rakyat dalam rangka melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Ketetapan MPR No. V/MPR-RI/1983 ten-

gantung Pertanggung jawaban Presiden RI Soeharto selaku Mandataris MPR serta pengukuhan pemberian penghargaan sebagai Bapak Pembangunan, merupakan satu ketegasan rakyat di dalam menghargai prestasi pemimpin nasionalnya yang telah menumpahkan dedikasinya untuk memajukan bangsa dan negara melalui pembangunan.

- Ketetapan MPR No. VI/MPR-RI/1983 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia, yang menetapkan pilihan rakyat kepada Presiden Soeharto agar meneruskan kepemimpinannya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk meneruskan pembangunan nasionalnya.
- Ketetapan MPR No. VII/MPR-RI/1983 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka penguasaan dan pengamanan pembangunan nasional, merupakan pencerminan kebulatan tekad Rakyat untuk mempercayakan kepemimpinan nasional, terutama dalam bidang pembangunan kepada Presiden/Mandataris MPR;
- Ketetapan MPR No. VIII/MPR-RI/1983 tentang Pengangkatan Wakil Presiden RI, menunjukkan bahwa pelaksanaan konstitusi dijalankan dengan sungguh, sehingga sebesar apapun kepercayaan rakyat kepada Presiden/Mandataris MPR, namun Presiden harus didampingi oleh Wakil Presiden yang akan membantu di bidang-bidang tertentu;
- Kemudian yang cukup penting pula adalah Ketetapan MPR-RI nomor I/MPR-RI/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, yang membuat seluruh sidang berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.

Ketetapan-ketetapan tersebut adalah salah satu tonggak sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Dari ketetapan-ketetapan tersebut bangsa Indonesia melanjutkan perjalanannya dengan menyelenggarakan Pemerintahan yang harus membina, membimbing serta mengembangkan partisipasi rakyat semua.

Agar partisipasi rakyat dapat lebih tepat, maka perlu adanya usaha untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang terkandung di dalam ketetapan-ketetapan tersebut.

Ketetapan Nomor II tentang GBHN merupakan salah satu ketetapan yang mengandung

banyak pengertian yang menyangkut masalah pembangunan bangsa yang akan dilaksanakan di dalam kurun waktu PELITA IV, lima tahun mendatang.

Sungguh sangat luas dan dalam isi GBHN yang terdapat di dalam ketetapan nomor II-SIUM MPR 1983 itu, karena GBHN adalah garis besar pembangunan bangsa Indonesia, yang mencakup pembangunan manusia seutuhnya, baik aspek lahiriah maupun aspek batiniah. GBHN 1983 yang secara konsisten terhadap GBHN ketetapan-ketetapan MPR sebelumnya memuat: Pendahuluan, – Pola Dasar Pembangunan Nasional; – Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang; – Pola Umum Pembangunan Lima Tahun ke IV, dan Penutup.

Saya berharap agar pengurus PGRI serta segenap anggota PGRI mendalami GBHN 1983, agar kita dapat makin lebih mantap menyampaikan kepada masyarakat luas, khususnya kepada para anak didik. Dengan memaparkan isi kebijaksanaan pembangunan (PELITA IV) maka kita akan dapat membawa masyarakat atau anak didik mengerti arah pembangunan yang akan kita laksanakan, yang dengan demikian dapat dihindarkan salah pengertian yang tidak perlu. Perlu kita perhatikan pula kiranya, terutama bagi para pendidik dan para juru penerang, bahwa di dalam penutup GBHN tercantum antara lain petunjuk, bahwa berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena jumlah anak didik atau pelajar cukup tinggi serta mereka jelas mempunyai potensi yang cukup besar, baik sebagai warga negara anggota masyarakat biasa maupun sebagai calon cendekiawan yang akan ikut serta aktif di dalam pembinaan kehidupan bernegara di masa yang akan datang, maka hasil-hasil Sidang Umum MPR 1983 secara keseluruhan maupun setiap Ketetapan yang masing-masing memiliki dampak kemasyarakatannya perlu sekali dijelaskan dan dimengertikan kepada mereka.

Pemuda-pemuda pelajar yang masing berada di teingkat sekolah dasar, ataupun yang telah di bangku sekolah menengah, menjelang ke perguruan tinggi sangat diperlukan pengertian

dan kemudian partisipasinya sesuai dengan fungsinya sebagai pemuda pelajar.

Jalur pendidikan lewat sekolah merupakan jalur yang sangat efektif untuk memberikan pengertian dan kesadaran bagi anak didik, karena wibawa guru sangat berperan penting terhadap mereka – Guru yang senantiasa bertindak dengan ketauladanan akan menjadi panutan daripada anakpanak didiknya, ajaran-ajarannya akan selalu menjadi pedoman yang menuntun mereka dalam menempuh kehidupan selanjutnya.

Melalui jalur pendidikan lewat sekolah yang memang dilaksanakan dengan kedisiplinan akan berpengaruh besar terhadap peranan kesadaran anak didik untuk menghargai tingkah laku yang berdisiplin pula. Sekolah memang merupakan candradimuka bagi ssetiap anak didik. Sekolah memang merupakan salah satu sarana penting untuk membentuk sikap mental dan kemampuan ilmu pengetahuan. Dan sekolahpun harus menjadi sarana yang efektif pula untuk menciptakan manusia Pancasila yang benar-benar meresapi dan menghayati arti Pancasila serta mampu mengamalkannya.

Untuk keperluan pendidikan sekolah seakan-akan memang diberikan kepercayaan yang lebih besar untuk mendidik anak-anak. Sejumlah besar jam atau waktu di dalam satu hari sepenuhnya diserahkan kepada pendidikan lewat sekolah. Para orang tua yang mengirimkan anaknya ke sekolah sepenuhnya mempercayakan kepada sekolah mengenai pendidikan anaknya. Pendidikan non formal yang dilakukan di dalam pergaulan sosialpun sebenarnya sekedar merupakan pendukung terhadap pendidikan sekolah. Demikian pula pendidikan non formal yang dilakukan di lingkungan keluarga, yang bagi sementara kalangan seringkali tidak dapat di-daya gunakan secukupnya, tentu jauh di bawah keefektifan pendidikan sekolah. Dengan demikian pendidikan melalui jalur sekolah sungguh sangat besar arti dan kegunaannya. Lalu siapakah yang berperan di dalam sekolah itu? Maka jawabnya adalah para Guru. Para gurulah yang menjadi rokh serta semangat daripada sesuatu lembaga pendidikan.

Di dalam masyarakat memang benar terdapat pula lembaga kemasyarakatan yang paralel garis tuasnya dengan guru. Lembaga tersebut adalah

lembaga penerangan termasuk lembaga komunikasi massa.

Penerangan dan komunikasi massa bertugas untuk menyampaikan penerangan kepada masyarakat yang pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendidikan yaitu menyampaikan pendidikan dan formal. Jika ada perbedaan, maka perbedaan itu terletak pada materi yang disampaikan serta pendekatan yang dilakukan.

Penerangan yang oleh GBHN diberi tugas antara lain menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, memasyarakatkan kebudayaan dan kepribadian Indonesia serta menggalakan partisipasi dalam pembangunan, sebenarnya tidak berbeda dengan pendidikan. Mungkin penerangan mempunyai sasaran yang lebih luas, sedangkan pendidikan bersasaran pemuda-pemudi anak didik yang bersekolah. Maka dari itu banyak hal yang dapat diadakan sinkronisasi antara pendidikan dengan penerangan sehingga kedua-duanya dapat saling mengisi dan saling mendukung, mungkin saja aparat penerangan sekali, waktu menyampaikan pesan penerangan kepada para anak didik, baik lewat prosedur formal maupun non formal yang sebelum ini telah banyak berlangsung.

Sekali lagi perlu ditandaskan bahwa di dalam proses pendidikan peranan guru sangatlah penting apalagi di dalam masa pembangunan nasional dewasa ini. Guru di samping mengantarkan murid ke dunia ilmu pengetahuan, juga harus mampu membimbing dan memberikan petunjuk bagi anak didik dalam hal mempertimbangkan pilihan yang tepat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Guru perlu mendalami cakrawala pembangunan seperti yang telah tertuang di dalam GBHN dan PELITA-PELITA. Guru perlu menunjukkan proyeksi-proyeksi pembangunan di mana akan diperlukan tenaga-tenaga trampil dan berpendidikan tertentu.

Di dalam PELITA IV jelas tingkat kemajuan telah berbeda dengan awal PELITA I. Di dalam PELITA IV telah dituntut tenaga-tenaga yang lebih ahli di dalam menangani bidang-bidang industri di samping bidang pertanian yang juga harus makin tinggi mutunya. Apalagi sudah menjadi tekad bangsa bahwa lepas landas pem-

angunan Indonesia diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dilakukan pada PELITA ke VI.

Pembangunan yang makin serta muka tidak mungkin dilaksanakan hanya dengan tenaga-tenaga yang tanpa keahlian dan ketrampilan. Tenaga-tenaga yang berkeahlian dan berketrampilan tidak mungkin disulap di dalam waktu sekejap, melainkan harus dipersiapkan dengan seksama, teliti serta memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk itu semua pendidikan yang terarah sangat penting artinya. Untuk melaksanakan pendidikan yang terarah peranan guru lah yang akhirnya merupakan faktor yang sangat penting.

Untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang akan menangani pembangunan PELITA ke V atau ke VI yang akan datang sungguh sangat bijaksana apabila dipersiapkan dari sekarang melalui pendidikan yang memperlengkap bekal kepandaian maupun sikap mental yang lebih mantap sebagai manusia Pancasila.

Di dalam menghadapi PELITA IV kiranya banyak sekali hal yang dapat bersama-sama kita sumbangkan, termasuk dalam bidang pendidikan.

Khususnya di bidang pendidikan, GBHN 1983 telah memberikan penggarisan yang jelas dan konkrit, yang saya harapkan telah dimengerti dan diresapi oleh para guru dalam rangka penyempurnaan sifat profesinya. Apabila ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam butir Pendidikan - Kebudayaan di dalam GBHN - 1983 telah diresapi maknanya kemudian diamalkan sesuai dengan PELITA IV yang segera akan disusun Pemerintah dengan sebaik-baiknya, maka kita berarti akan dapat memberikan sumbangan yang amat besar bagi penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan pendidikan yang baik dan yang memadai terhadap ketentuan konstitusional yang telah disepakati rakyat Indonesia, jelas merupakan sumbangan yang sangat besar terhadap pembangunan nasional kita.

Kita mengetahui bahwa Pemerintah di dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, untuk masa lima tahun mendatang telah menentukan lima sasaran yaitu: Panca Krida Kabinet Pembangunan IV. Lima sasaran tersebut ialah :

1. Meningkatnya Trilogi Pembangunan yang

didukung Ketahanan Nasional yang makin mantap;

2. Meningkatkan pendayagunaan Aparatur Negara menuju terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
3. Meningkatkan Pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila dan P-4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Meningkatkan pelaksanaan Politik Luar Negeri yang bebas aktif untuk kepentingan Nasional;
5. Terlaksananya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia dalam tahun 1987.

Kita mengetahui bahwa yang dimaksudkan dengan Trilogi Pembangunan adalah, terlaksananya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya; terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Peranan guru dapat tampil dengan nyata, dalam ikut menjaga stabilitas nasional yang dinamis unsur pendidikan yang diperankan oleh para guru sangat berarti. Anak didik yang rata-rata masih diliputi oleh semangat dan gelora anak muda yang penuh dinamika seringkali menjadi unsur bahwa apabila dinamika tersebut tidak dikendalikan dengan baik. Akibat-akibat sampingan daripada hasil pembangunan seringkali mudah menggoda anak-anak didik kital Penyusunan pengaruh negatif dari manca negara juga seringkali disasarkan terhadap generasi muda.

Alangkah besar dan penting artinya apabila anak-anak didik kita yang merupakan generasi penerus itu dapat dijaga dan diselamatkan dari adanya pengaruh yang mengganggu atau bahkan merusak jiwanya.

Kita harus menjaga keselamatan bunga-bunga bangsa kita sehingga dapat tumbuh dengan sehat yang akhirnya memberikan buah yang segar dan mampu menjaga kelestarian eksistensi bangsa yang makin maju.

Sebenarnya kita harus mengucapkan syukur bahwa sebagai hasil pembangunan sarana dan prasarana pendidikan telah jauh lebih baik dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Kita harus pula berbahagia bahwa keadaan fisik anak-anak kita dewasa ini jauh lebih terpenuhi syarat pertumbuhannya, sedangkan alam kemere-

lekaan telah pula mempengaruhi jiwa mereka. Kenyataan-kenyataan tersebut harus kita kembangkan daya gunanya agar dapat disumbangkan di dalam pembangunan bangsa. Sistem pendidikan nasional perlu segera kita wujudkan, peranan guru perlu kita tingkatkan dan tindakan-tindakan penyelamatan perlu segera diambil sebagai prioritas yang tak perlu ditunda-tunda.

Saya sungguh-sungguh berharap bahwa Konferensi Pusat PGRI akan dapat menelaah permasalahan yang menyangkut peranan guru di dalam ikut menangani stabilitas nasional dalam kerangka ketahanan nasional.

Saya telah banyak mendengar bahwa ketahanan nasional telah dikenal dan dimengerti di kalangan pendidikan, bahkan saya telah seringkali mengetahui pengetrapan pengertian ketahanan yang dikaitkan dengan sekolah.

Kiranya di tangan para Guru lah pengamalan pengertian-pengertian tersebut dapat diwujudkan. Bimbingan, pengarahan dan petunjuk-petunjuk para Guru lah sangat diperlukan untuk mengantarkan anak didik menuju kekedewasaan yang bermental kuat, berjiwa luhur dan berilmu serta berketrampilan. Di tangan para Guru lah antara lain anak didik dapat diantarkan ke gerbang kehidupan yang menyongsong masa depan yang lebih cerah.

Akhirnya, sekali lagi saya ucapkan selamat berkonferensi dengan harapan agar konferensi dapat menghasilkan sesuatu yang diperlukan oleh pembangunan bangsa.

Melalui forum ini pula saya mengharapkan agar kerjasama antara PGRI dengan aparaturnya dapat makin dikembangkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmt kepada kita semua.

Terima kasih.

WSSALAMU'ALAIKUM Wr. Wb.

Menteri Penerangan.

(H A R M O K O)

Jakarta, 7 Juni 1983.

KEGIATAN PB-PGRI

1. Pada akhir Mei 1983, Ketua Umum PB-PGRI H. Basyuni Suriamiharja telah berangkat ke Singapura memenuhi undangan Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura (KGMS) menghadiri Kongres (Mesyuarat Agung). Selain itu ada keinginan mereka untuk mengadakan "ikatan langgar antara 4 Negara Nusantara" (istilah mereka), mengadakan forum setahun atau 2 tahun sekali.
2. Pada tanggal 6 - 9 Juni 1983, Konperensi Pusat PGRI telah diselenggarakan di Jakarta dengan tema: "Peranan Guru dalam Memasyarakatkan dan Mensukseskan Pelaksanaan Hasil SU-MPR 1983 dan Pelita IV dalam Bidang Pendidikan". Konpus tersebut telah dibuka oleh Menteri P dan K Bapak Prof. Dr. Nugroho Notosusanto dan juga telah mendapat pengarahan dari:
Menko Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Penerangan, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Koperasi, Ketua DPP Golongan Karya, Gubernur KDKI Jakarta.

Konpus tersebut telah mengambil keputusan antara lain:

1. Pola Dasar Operasional Pemasyarakatan dan Penuksesan Pelaksanaan Hasil Sidang Umum MPR 1983 di Lingkungan Pendidikan;
2. Sumbangan Pikiran PGRI tentang Repelita IV Bidang Pendidikan dan Pembinaan Generasi Muda;
3. Sumbangan Pikiran PGRI dalam Rangka Menyambut Pelaksanaan Wajib Belajar
4. Sumbangan Pikiran PGRI tentang Pemecahan Masalah Penerimaan Murid Baru (PMB);
5. Program Kerja PGRI tahun 1983/1984, dimana telah ditetapkan pula bahwa Kongres PGRI XV, insya Allah akan diselenggarakan di Jakarta bulan Juli 1984;
6. Laporan Kerja Pengurus Besar PGRI tahun kerja 1982/1983.

Pada tanggal 11 Juni 1983 Sekjen PB-PGRI Drs. W.D.F. Rindorondo telah berangkat ke Amerika Serikat atas undangan American Embassy selama satu bulan.

PENGURUS BESAR PGRI DAN PIMPINAN MAJALAH SUARA GURU BESERTA STAF, DENGAN INI MENGUCAPKAN:

SELAMAT MERAYAKAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1403 H

**MINAL AIDIN WAL FAIZIN
MOHON MAAF LAHIR BATIN**

**SEMOGA BERKAT DAN RAHMAT ALLAH SWT SENANTIASA
TERLIMPAHKAN KEPADA BAPAK/IBU PEMBACA MAJALAH
SUARA GURU & PENCINTA PENDIDIKAN**

PB-PGRI/PIMP.SG

SUMBANGAN GEDUNG GURU/PB-PGRI

UANG MASUK SUMBANGAN GEDUNG PGRI
SAMPAI DENGAN BULAN APRIL 1983

NO.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	31-3-1983	Transfer	Rp. 141.064.745,-
2.	2-4-1983	PGRI Cab. Toli-toli Sulawesi Tengah	69.000,-
3.	"	" Cab. Watampone Sulawesi Selatan	1.000.000,-
4.	4-4-1983	" 204/XIV Cab. Kutai Tenggara Kaltim	370.000,-
5.	7-4-1983	" Pasarbaru Banjarmasin	1.004.500,-
6.	"	" Kodya.Pekalongan Jawa Tengah 2 x	794.720,-
7.	15-4-1983	" Ancab Banjarsari Kab. Ciamis Jabar	170.000,-
8.	18-4-1983	" Guru, Karyawan Kanwil Dept. P & K Propinsi Maluku di Ambon	843.540,-
9.	19-4-1983	" Kodya Semarang Jawa Tengah	1.470.000,-
10.	20-4-1983	" Cab. Tanah Laut Pleihari Kalsel	60.000,-
11.	"	" Ancab Cijulang Ciamis Jawa Barat	60.000,-
12.	"	" Cab. Kebumen Jawa Tengah	999.200,-
13.	22-4-1983	" Guru SDN Jakarta Barat	
		Perincian :	
		1. Cab. Kec. Tamansari	Rp. 430.000,-
		2. " " Grogol Petamburan	Rp. 795.000,-
		3. " " Kebon Jeruk	Rp. 400.000,-
		4. " " Cengkareng	Rp. 300.000,-
		5. " " Tambora	Rp. 500.000,-
			<hr/>
			Rp. 2.425.000,-
14.	22-4-1983	" Cab. Kuningan Jawa Barat	250.000,-
15.	25-4-1983	" " Bekasi Jawa Barat	150.000,-
16.	"	" " Wonogiri Jawa Tengah	1.500.000,-
17.	26-4-1983	" " Kerinci Sungai penuh Jambi	1.290.000,-
18.	"	" " Cianjur Jawa Barat	442.100,-
19.	.4-5-1983	" Guru-guru SDN Jakarta Pusat	2.811.000,-
20.	5-5-1983	" Cab. Brebes, Jawa Tengah	502.800,-
21.	6-5-1983	" " Kodya Yogyakarta	2.000.000,-
22.	13-5-1983	" " Kab. Seragen, Jawa Tengah	500.000,-
23.	"	" Guru SMP Negeri 203, Pasar Rebo, Jakarta	28.000,-
24.	"	" Guru, karyawan Kanwil Dept. P dan K Prop. Maluku di Ambon	633.640,-
25.	"	" Cab. Bekasi, Jawa Barat	150.000,-

Jumlah Rp.

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
26.	17-5-1983	Transfer -----	Rp.
27.	"	PGRI Cab. Wonogiri, Jawa Tengah	" 1.000.000,-
28.	18-5-1983	" Guru SMEA Negeri 8, Jakarta Pusat	" 50.000,-
29.	20-5-1983	" Cab. Gunung Kidul, Yogyakarta	" 3.360.000,-
30.	25-5-1983	" " Kodya Surakarta, Jawa Tengah	" 300.000,-
31.	28-5-1983	" " Kodya Magelang, Jawa Tengah	" 350.000,-
32.	30-5-1983	" PAC Kalianda, Lampung Selatan	" 280.000,-
33.	"	" " Kei Kecil Tual, Maluku Tenggara	" 164.000,-
34.	"	" Cab. 007 Kab. Aceh Utara, Lho' Sumawe	" 100.000,-
35.	"	" " Bengkulu Utara, Bengkulu	" 25.000,-
36.	"	" " Kab. Semarang, Ambarawa, Jawa Tengah	" 150.000,-
<hr/>			
	3-5-1983	Bapak Sunarjo Haditjaroko, MA Nderland N.F. 200.- + N.F.100=NF.310	
<hr/>			
Jumlah			Rp. 166.367.245,-

3-5-1983 Bapak Sunarjo Haditjaroko, MA Nderland N.F.200.- + N.F.100 = NF.300

Jakarta, 31 Mei 1983.

PANITIA PEMBANGUNAN GEDUNG GURU
Bendahara,

Slamet I.

RALAT :

1). Setoran Dana Gedung sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimuat di Suara Guru no. 10 Th. XXXI-Okt-Nov. 1982 *atas nama PGRI Cabang Surakarta adalah salah.*
Seharusnya : Atas nama *PGRI Cabang Karanganyar.*

2). Dalam Majalah Suara Guru No. 5 Th. XXXII-Mei 1983, hal. 36; *seharusnya :*

No. 21	Tgl. 24-2-1983:	PGRI Kodya Jambi	Rp. 250.000,-
22	25-2-1983:	Cab. Kab. Poso, Sulawesi Tengah	Rp. 267.000,-
23	25-2-1983:	Cab. Kab. Sidenreng, Rappang, Sulsel	Rp. 400.000,-
24	26-2-1983:	Cab. 012/1 Pematang Siantar, Sumut	Rp. 25.000,-
25	26-2-1983:	Ancab. Padaherang, Ciamis, Jabar	Rp. 200.000,-
26	26-2-1983:	Drs. H.M. Shaleh Bahauddin, Kabid Binbaga Islam Kanwil Depag, Kalteng	Rp. 13.500,-

**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)
TAHUKAH ANDA ?**

(I)

Taukah anda, bahwa :

1. Menurut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dinyatakan: Perguruan Swasta perlu ditingkatkan mutu, peranan dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan makin dikembangkan pertumbuhannya berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas perguruan yang bersangkutan.
2. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1981 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta yang diundangkan di Jakarta tanggal 14 Agustus 1981 ditetapkan :
 - 2.1. Sekolah Swasta yang memenuhi syarat dapat diberi bantuan.
 - 2.2. Bantuan dapat diberikan berupa:
 - a. Uang
 - b. Tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
 - c. Sarana dan prasarana pendidikan
 - d. Bantuan lain menurut keperluan.
 - 2.3. Syarat untuk memperoleh bantuan bagi Sekolah Swasta adalah :
 - a. Telah didaftarkan pada Departemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 - b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Departemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 - c. Diperuntukkan warga negara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia.
 - d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Jumlah penerimaan uang yang lebih kecil dari biaya minimum sekolah.
3. Untuk memperoleh bantuan, Penyelenggara Sekolah Swasta wajib mengajukan permohonan kepada Menteri P dan K melalui Kanwil Departemen P dan K di Propinsi. Kepala sekolah tidak diperbolehkan mengajukan sendiri permohonan bantuan itu. Ia hanya menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Penyelenggara Sekolah untuk permohonan bantuan tersebut.
4. Menteri berhak mengubah atau menghentikan pemberian bantuan yang telah ditetapkan bagi suatu sekolah swasta yang bersangkutan:
 - a. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat tersebut pada No. 2. 3.
 - b. Ditutup atau dibubarkan.
 - c. Tidak memperoleh kemajuan yang diharapkan.
 - d. Sudah mampu berdiri sendiri.
5. Mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan swasta ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan pertimbangan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan.
6. Penyelenggara sekolah swasta yang menerima bantuan wajib :
 - f. Seluruh muridnya memenuhi persyaratan murid sekolah negeri yang setingkat.
 - g. Memiliki sekurang-kurangnya dua orang guru tetap yang diangkat Penyelenggara Sekolah Swasta serta memiliki kewenangan mengajar.
 - h. Telah memiliki tingkat kelas lengkap sesuai dengan jenis sekolahnya sekurang-kurangnya masing-masing tingkat satu kelas.



Mengheningkan Cipta pada saat Pembukaan RAKOR II YPLP-PGRI Sulesl, 29 Mei 1983 di Ujungpandang. Dari kiri: Makutanang Dg Ngantung, Ketua UPLP-PGRI Sulesl, D. Somantri, Wk. Sekr. YPLO-PGRI Pusat, Drs. Athailah, Kakanwil Dep. P & K. Sulesl, Sekretaris Kakanwil Sulesl, Drs. A. Rasyid Mappagiling, Ketua PD PGRI Sulesl, Burhanuddin, Bendaharawan YPLP-PGRI.

- 6.1. Menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu tentang sekolah yang diselenggarakannya kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- 6.2. Bertanggung jawab atas bantuan yang diterima sekolahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Penyelenggara Sekolah Swasta yang menerima bantuan wajib menerima pengawasan dan atau pemeriksaan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
8. Penyelenggara Sekolah Swasta yang menerima bantuan wajib melaksanakan peraturan kepewajiban dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di sekolah yang diselenggarakannya.
9. Penyelenggara Sekolah Swasta yang menerima bantuan menurut Peraturan Pemerintah ini berkewajiban untuk berusaha meningkatkan penerimaannya dari sumber-sumber lain dan dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**YAYASAN
PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PGRI PUSAT.**

Dapatkah Direktorat Sekolah Swasta Melaksanakan Fungsinya?

Oleh : Slamet I, YPLP-PGRI Pusat

Dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.: 0145/0/1979 tentang Pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, harapan kami selaku penyelenggara sekolah-sekolah swasta nampaknya mulai akan menjadi kenyataan. Yaitu bahwa akan ada wadah tersendiri untuk pembinaan sekolah swasta oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, baik di Pusat maupun di Daerah.

Kami katakan bahwa akan ada wadah tersendiri, karena sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut di atas, pembinaan sekolah-sekolah swasta dipercayakan kepada beberapa instansi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah mempunyai tugas pembinaan tersendiri, yaitu pembinaan sekolah-sekolah negeri, seperti Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dan Direktorat Pendidikan Guru dan Tenga Teknis.

Bagi penyelenggara sekolah-sekolah swasta di Pusat adanya Direktorat Sekolah Swasta ini sangat memudahkan tugasnya dan mempercepat penyelesaian masalahnya, karena untuk mengurus sekolah-sekolahnya yang terdiri dari bermacam-macam tingkat dan jenis itu di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah cukup berurusan dengan satu instansi saja, yaitu Direktorat Sekolah Swasta.

Perkembangan sekolah-sekolah swasta di daerah-daerah makin hari makin meluas, sehingga jumlah sekolah menengah swasta pada waktu ini jauh lebih besar dari jumlah Sekolah Menengah Negeri. Perbedaan ini akan lebih besar lagi apabila pada tahun 1984 kita melaksanakan wajib belajar.

Dalam Keputusan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang me-

ngenai pendidikan, Perguruan Swasta khusus disebut dalam ayat tersendiri yaitu ayat e yang berbunyi:

"Perguruan Swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional. Untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas perguruan yang bersangkutan".

Ini kami tafsirkan, bahwa MPR memandang peranan perguruan swasta sangat penting di dalam usaha Pemerintah untuk mencerdaskan bangsa, dan perlu mendapatkan pembinaan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah.

Keputusan MPR No. IV/MPR/1978 ini dijabarkan secara positif oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979 tentang Pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan Surat Keputusan ini di Pemerintah Pusat terdapat satu Direktorat tersendiri yang bertugas untuk memberikan pembinaan terhadap sekolah-sekolah swasta sedemikian, sehingga dapat membantu Pemerintah dalam usaha pemerataan pendidikan melalui perguruan swasta yang mutunya sama tinggi dengan sekolah-sekolah negeri. Dengan pembentukan Direktorat Sekolah Swasta ini pembinaan perguruan swasta di Pusat tidak lagi merupakan tugas-sampiran.

Manfaat adanya Direktorat Sekolah Swasta ini telah dapat dirasakan oleh perguruan swasta dengan usaha-usahanya, seperti pendapatan kembali semua sekolah swasta di seluruh Indonesia, pembentukan Musyawarah Perguruan Swasta (MPS), pencabutan PP No. 32/1958 dan pengantiannya dengan PP No. 28/1981 yang sangat

menguntungkan sekolah-sekolah yang betul-betul memerlukan bantuan, diterbitkannya Keputusan Menteri P dan K No. 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta, No. 0375/U/1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepala Sekolah Swasta, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen P dan K No. 018/c/Kep/I/83 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, No. 019/C/Kep/I/83 tentang Standardisasi Sekolah Swasta No. 020/C/Kep/I/83 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta, mengadakan penataran/penerangan kepada para penyelenggara sekolah swasta di daerah-daerah dan lain sebagainya. Di samping itu keluarnya pemberian bantuan Pemerintah yang lebih lancar.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kelanjutan tugas Direktorat Sekolah Swasta di Daerah/Propinsi. Pada waktu yang baru lalu di Kanwil Departemen P dan K urusan mengenai perguruan swasta masih dititipkan kepada Bagian Perencanaan. Walaupun masih merupakan tugas titipan, namun penanganan urusan sekolah-sekolah swasta di satu tangan sudah merupakan satu perbaikan dan kemajuan. Kalau dulu urusan sekolah swasta dibagi-bagikan antara beberapa Inspeksi/Bagian/Bidang di Propinsi, maka belum lama berselang urusan ini hanya dihadapi oleh Bagian Perencanaan saja. Pengurusan di satu tangan ini sangat memudahkan para penyelenggara sekolah swasta di daerah-daerah dan mempercepat penyelesaiannya. Tapi bagaimanapun juga urusan perguruan swasta masih merupakan tugas sampiran di Bagian Perencanaan Kanwil, karena belum diberi wadah tersendiri. Walaupun di dalam Bagian Perencanaan, sebaiknya diberi wadah tersendiri.

Dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang mengenai Pendidikan, Perguruan Swasta masih dimasukkan dalam ayat tersendiri, yaitu ayat k yang berbunyi:

"Perguruan Swasta perlu ditingkatkan mutu, peranan dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan makin dikembangkan pertumbuhannya berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas perguruan yang bersangkutan".

Ini berarti pentingnya peranan perguruan swasta di dalam usaha pemerataan pendidikan nasional oleh Pemerintah.

Kalau Keputusan MPR No. IV/MPR/1978 dijabarkan secara positif oleh Pemerintah dengan pembentukan Direktorat Sekolah Swasta di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka wajar apabila di Kanwil Departemen P & K Propinsi juga diberi wadah tersendiri untuk urusan sekolah-sekolah swasta di Daerah, sebagai kelanjutan Direktorat Sekolah Swasta di Pusat. Wadah ini dapat berbentuk bagian atau bidang. Kalau perlu, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut, merupakan suatu Sub Bagian Sekolah Swasta di bawah Bagian Perencanaan dengan paling banyak 3 orang petugas, masing-masing mengurus Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Guru dan Tata Usaha. Seorang di antara mereka ditunjuk sebagai Kepala Sub Bagian Sekolah Swasta.

Dengan adanya wadah tersendiri di Pusat dan di Daerah untuk mengurus perguruan swasta berarti suatu kemajuan di dalam pembinaan sekolah-sekolah swasta. Kami yakin bahwa dengan demikian pembinaan itu dapat dilaksanakan secara lebih mantap, sempurna dan sungguh-sungguh menuju ke arah pendewasaan Perguruan Swasta, demi berhasilnya usaha pembangunan di bidang pendidikan. Sehingga Direktorat Swasta benar-benar dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dikehendaki oleh GBHN.

Jakarta, Juni 1983.

IV. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM GERAK PELAKSANAANNYA

Undang-Undang Dasar 1945 berlaku di Indonesia dalam dua kurun waktu. Yang pertama antara 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949, yaitu sejak ditetapkannya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan mulai berlakunya Konstitusi RIS pada saat pengakuan kedaulatan dalam bulan Desember 1949. Yang kedua adalah dalam kurun waktu 1959 sampai sekarang, yaitu sejak diumumkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Dalam kedua kurun waktu berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 itu kita telah dapat mencatat dan menarik pengalaman-pengalaman tentang gerak pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu, termasuk juga penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Dalam kurun waktu 1945 – 1959, jelas Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena kita memang sedang dalam pancaroba, dalam usaha membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja kita proklamasikan, sedangkan pihak kolonialis Belanda justru ingin menjajah kembali bekas jajahannya yang telah merdeka itu. Segala perhatian bangsa dan negara diarahkan untuk memenangkan perang kemerdekaan.

Sistim Pemerintahan dan kelembagaan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas belum dapat dilaksanakan. Dalam kurun waktu ini sempat diangkat Anggota DPA Sementara, sedangkan MPR dan DPR belum dapat dibentuk. Waktu itu masih terus diberlakukan ketentuan Aturan Peralihan pasal IV yang menyatakan bahwa: "Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya

dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional".

Namun ada satu penyimpangan konstitusional yang prinsipil yang dapat dicatat dalam kurun waktu 1945 – 1949 itu ialah perubahan sistim Kabient Presidentil menjadi sistim Kabinet Parleментар.

Berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 11 Nopember 1945, yang kemudian disetujui oleh Presiden dan diumumkan dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, sistim Kabient Presidential tersebut diganti dengan sistim Kabinet Parleментар.

Sejak saat itu kekuasaan Pemerintahan (eksekutif) dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan Kabinet dengan para Menteri sebagai anggota Kabinet. Secara bersama-sama atau sendiri, Perdana Menteri dan para Menteri bertanggungjawab kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR, tidak bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan sistim Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penyimpangan sistim ini jelas pengaruhnya terhadap stabilitas politik dan stabilitas Pemerintahan.

Syukur alhamdulillah bahwa berkat kebulatan tekad seluruh rakyat waktu itu untuk terus berjuang menegakkan kemerdekaan, maka dengan naungan Undang-Undang Dasar 1945 – meskipun telah terjadi penyimpangan terhadapnya – akhirnya bangsa Indonesia dapat memenangkan perang kemerdekaan itu, meskipun dengan terpaksa mengorbankan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Akhirnya Belanda mengakui Kemerdekaan Indonesia, namun kita, pihak "Republik Proklamasi" terpaksa menerima berdirinya Negara Indonesia yang lain dari yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus dan didirikan berda-

sarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita tetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia terpaksa menjadi Negara Federasi RIS berdasarkan pada konstitusi RIS Undang-Undang Dasar 1945 berlaku hanya di Negara Bagian RI yang meliputi sebagian pulau Jawa dan Sumatera dengan Ibukota Yogyakarta.

Untunglah Negara Federasi RIS ini hanya berlangsung sangat sementara. Berbat kesadaran para pemimpin RIS dengan dipelopori oleh pimpinan-pimpinan yang "republikan", maka pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Federasi RIS kembali menjadi Negara Kesatuan RI, tetapi dengan landasan Undang-Undang Dasar yang lain dari Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara yang diberi nama Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Menurut Undang-Undang Dasar ini sistim Pemerintahan yang dianut adalah sistim pemerintahan Parlemerter bukan sistim kabinet Presidensial. Menurut sistim pemerintahan Presiden konstitusional dan "tidak dapat diganggu-gugat". Yang bertanggungjawab adalah para Menteri, ialah bertanggungjawab kepada Parlemen.

Penentuan sistim yang demikian ini sebenarnya bersumber pada landasan pemikiran yang lain dari yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang menganut sistim Parlemerter berpijak pada landasan pemikiran demokrasi liberal yang mengutamakan pada kebebasan individu, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistim Presidensial berpijak pada landasan demokrasi Pancasila, yang berintikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, di mana Presiden bertanggungjawab kepada pemberi mandat, MPR, tidak kepada Parlemen.

Pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan akibat-akibatnya jelas telah kita saksikan bersama, berupa kekacauan-kekacauan, baik di bidang politik, keamanan maupun ekonomi.

Konstituante yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 bertugas menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap, ternyata telah mengalami kemacetan total dan bahkan

mempunyai akibat yang sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Maka dengan dasar alasan yang kuat dan dengan dukungan dari sebagian terbesar rakyat Indonesia dikeluarkanlah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Deiktum Dekrit Presiden itu adalah:

1. Menetapkan pembubaran Konstituante;
2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950;
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri dari Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Jadi sejak 5 Juli 1959 itu berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Dalam kurun waktu 19 tahun itu makin banyak pengalaman kita dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila kita mengadakan pengkajian dan perbandingan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu antara 1959 – 1965 (Orde Lama) dan kurun waktu antara 1966 sampai sekarang (Orde Baru) maka jelas tampak dan terasa kemajuan-kemajuan yang telah kita capai dalam mengusahakan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.

Dalam Orde Lama, Lembaga-lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK belum dibetnuk berdasarkan Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya lembaga-lembaga tersebut masih dalam bentuk sementara. Belum lagi kita kupas mengenai berfungsinya lembaga-lembaga tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif – bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat – telah menggunakan kekuasaan itu dengan tidak se-

mestinya. Presiden telah mengeluarkan produk-produk legislatif yang mestinya berbentuk Undang-undang (artinya dengan persetujuan DPR) dalam bentuk Penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR.

MPRS telah mengambil keputusan untuk mengangkat seseorang sebagai Presiden seumur hidup yang jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan masa jabatan Presiden 5 tah

Hak budget DPR tidak berjalan, artinya Pemerintah tidak mengajukan Rancangan Undang-undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. Bahkan dalam tahun 1960 Presiden waktu itu telah membubarkan DPR, karena DPR tidak dapat menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah.

Itulah beberapa kasus penyimpangan yang serius terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Penyimpangan-penyimpangan ini jelas bukan saja telah mengakibatkan tidak berjalannya sistem yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan ternyata telah mengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan serta kemerosotan di bidang ekonomi, yang mencapai puncaknya dengan pemberontakan yang gagal oleh G-30-S/PKI.

Pemberontakan G-30-S/PKI yang dapat digambarkan kewaspadaan dan kesigapan ABRI dengan dukungan kekuatan rakyat, telah mendorong lahirnya Orde Baru 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekwen.

Dengan gagalnya perebutan kekuasaan G-30-S/PKI itu telah dapat diungkapkan dan dibuktikan – baik melalui sidang-sidang pengadilan maupun bahan-bahan keterangan lainnya – bahwa PKI-lah yang mendalangi secara sadar dan terencana "Coup d'etat" itu. Perbuatan jahat tersebut bukan saja telah menimbulkan korban jiwa dan benda yang cukup besar, bukan saja bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar dan hukum yang berlaku, tetapi jelas mempunyai tujuan untuk merubah dan meniadakan dasar falsafah negara Pancasila dengan dasar falsafah yang lain.

Dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia PKI telah dua kali mengkhianati negara, bangsa dan dasar negara yang sama-sama kita cintai dan kita agungkan bersama. Atas dasar itulah maka

rakyat menghendaki dan menuntut dibubarkannya PKI. Namun Pimpinan Negara waktu itu, tidak mau mendengarkan dan tidak mau memenuhi tuntutan rakyat, sehingga timbullah apa yang disebut "situasi konflik" antara Rakyat di satu pihak dan Presiden di lain pihak. Keadaan semakin meruncing, keadaan ekonomi dan keamanan makin tidak terkendalikan.

Dengan dipelopori oleh Pemuda/Mahasiswa, rakyat menyampaikan "Tri Tuntutan Rakyat" (TRITURA), yaitu :

1. Bubarkan PKI;
2. Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur PKI;
3. Turunkan harga-harga/perbaikan ekonomi.

Gerakan memperjuangkan TRITURA ini makin hari semakin meningkat sehingga Pemerintah d.h.i. Presiden waktu itu boleh dikatakan tidak dapat menguasai keadaan lagi.

Dalam situasi yang demikian itulah Presiden waktu itu pada tanggal 11 Maret 1966 mengeluarkan Surat Perintah kepada Letnan Jenderal TNI Soeharto, Menteri/Panglima Angkatan Darat yang intinya memberikan wewenang kepadanya untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) ini dianggap oleh rakyat sebagai lahirnya ORDE BARU.

Dengan berlandaskan kepada SUPERSEMAR itu, pengembalian SUPERSEMAR telah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya yang ditanggapi dan disambut dengan penuh kelegaan oleh seluruh rakyat. Dan dengan semangat SUPERSEMAR itu pula Orde Baru mengambil langkah-langkah, koreksi dengan cara-cara yang konstitusional terutama dalam menegakkan, mengamankan dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekwen.

Sungguh telah banyak langkah-langkah yang dilakukan dan berhasil dilakukan oleh Orde Baru dalam rangka menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 selama 10 – 12 tahun terakhir ini.

Orde Baru telah banyak langkah-langkah yang

Orde Baru telah berhasil menyalurkan aspirasi rakyat dalam mengadakan koreksi-koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan, kekacauan-kekacauan dan keadaan-keadaan buruk di berba-

gai bidang selama Orde Lama melalui cara-cara yang kondisional, artinya melalui Sidang-sidang MPR, yaitu Sidang Umum MPR(S) ke IV tahun 1966 dan Sidang Istimewa tahun 1967.

Sejumlah Ketetapan yang bersifat prinsipil telah dihasilkan dalam Sidang Umum MPR(S) tahun 1966 itu, seperti: TAP IX/MPRS/66 yang mengukuhkan SUPERSEMAR, TAP XXV/MPRS/66 mengenai pembubaran PKI dan ormas-ormasnya (semacam penguatan keputusan Pengemban Supersemar). TAP XXIII/MPRS/66 tentang pembaharuan landasan politik luar negeri, TAP XXII/MPRS/66 tentang pembaharuan landasan di bidang ekonomi dan pembangunan, dan sejumlah TAP-TAP lainnya menyangkut atau berisi masalah-masalah yang sifatnya koreksi dan pembaharuan terhadap keadaan yang lama.

Sidang Istimewa MPR(S) tahun 1967 diadakan atas permintaan DPR yang menganggap bahwa Presiden waktu itu telah dengan sungguh-sungguh melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Sidang MPR(S) telah memutuskan menarik kembali mandat MPR(S) dari Presiden Soekarno waktu itu, karena dianggap telah tidak dapat menjalankan haluan negara dan keputusan-keputusan Majelis sebagai layaknya dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden.

Kemudian pada Sidang Umum MPR(S) tahun 1968, MPR(S) telah mengangkat Jenderal Soeharto Pengemban Tap IX sebagai Presiden (tetap) sampai terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum.

Sejak itulah pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 diusahakan untuk dapat berlangsung sebaik-baiknya secara murni dan konsekwen.

Dalam rangka ini diusahakan pembentukan kelembagaan negara MPR, DPR, DPA, BPK dan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembentukan lembaga-lembaga tersebut harus dilakukan dengan Undang-undang. Karenanya Pemerintah bersama DPR berusaha keras dan berhasil dalam waktu yang ditentukan membuat Undang-undangnyanya.

Terbetuklah berbagai Undang-undang yang mengatur pembentukan MPR, DPR, DPA, BPK dan juga Mahkamah Agung, yaitu:

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1975;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung, yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1978;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1973 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 13 Tahun 1965, yang menjadi landasan kerja bagi Mahkamah Agung dan Badan-badan Pengadilan lainnya.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka penyusunan/pembentukan badan-badan perwakilan rakyat seperti DPR-RI, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II harus dilakukan melalui pemilihan umum. Undang-undang Pemilihan Umum itu juga telah dapat dihasilkan. Berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum tadi telah diadakan pemilihan umum pada tahun 1971 (yang pertama dalam Orde Baru), untuk memilih anggota-anggota DPR-RI, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II.

Dengan hasil pemilihan umum tahun 1971 itu terbentuklah DPR-RI, DPRD tingkat I dan II. Dan dengan terbentuknya DPR-RI, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II itu terbentuknya MPR pada tahun 1972, yang anggota-anggotanya terdiri dari seluruh anggota DPR hasil Pemilihan Umum, utusan-utusan daerah yang dipilih oleh DPRD tingkat I dan utusan-utusan golongan-golongan, baik dari ABRI maupun non ABRI yang mewakili berbagai golongan fungsional, termasuk koperasi dan organisasi yang berkecimpung di bidang ekonomi, seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945.

MPR hasil Pemilu tahun 1971 itu telah mengadakan Sidang Umumnya pada tahun 1973 dan telah berhasil melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik yaitu: membuat GBHN tahun 1973 - 1978 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk lima tahun.

Demikian pula DPA telah dibentuk berdasarkan Undang-undang DPA yang pertama kali pada tahun 1967 sebagai badan pertimbangan Presiden yang (sesuai dengan undang-undangnya) mempunyai masa jabatan sama dengan masa jabatan Presiden. BPK akhirnya pada tahun 1973 telah dapat dibentuk berdasarkan Undang-undang BPK yang dihasilkan pada tahun 1973 itu.

Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang lain, yang juga diusahakan berjalan sebaik-baiknya adalah menyangkut anggaran belanja. Orde Baru sudah sejak 1967 melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 itu, dan telah berlaku setiap tahun sampai sekarang. Mungkin telah dapat dianggap sebagai konvensi (hukum dasar tidak tertulis, sebagai pelengkap Undang-Undang Dasar) bahwa RAPBN itu diajukan oleh pemerintah kepada DPR pada permulaan bulan Januari, 3 bulan sebelum berlakunya tahun anggaran baru. Dan DPR telah dapat menyelesaikan tugasnya (memberikan persetujuan) satu bulan sebelum mulainya anggaran yang bersangkutan.

Dalam bidang kegiatan legislatif (pembentukan Undang-undang) juga telah berjalan dengan baik melalui "partnership" yang tugas antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan dan semangat Undang-Undang Dasar 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat ternyata telah dapat berfungsi dengan intensif dan efektif, baik dalam melaksanakan "kekuasaan" legislatifnya maupun hak budjetnya. DPR yang menurut ketentuan Undang-Undang Dasar bersidang sedikitnya sekali dalam 1 tahun, ternyata telah menggunakan waktunya hampir seluruh tahun (4 kali masa sidang dalam setahun) untuk persidangan.

Dalam hubungan ini dapat dicatat juga bahwa selama Orde Baru ini telah banyak dihasilkan Undang-undang dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping Undang-undang mengenai Lembaga-lembaga Negara seperti yang telah disebutkan tadi, dapat dikemukakan misalnya Undang-Undang Partai Politik dan Golongan Karya dan Undang-Undang Pokok Pers sebagai pelaksanaan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga Undang-undang mengenai

pemerintahan di Daerah. Undang-Undang Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Perkawinan dan lain-lain adalah pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu masih banyak lagi yang harus kita garap dan diselesaikan Undang-undangnya.

Namun selama Orde Baru ini baik pemerintah maupun DPR telah melaksanakan fungsinya dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Dasar itu dalam 10 tahun ini telah mulai terbina dan terpelihara dengan baik. Mekanisme kepemimpinan nasional yang lima tahunan telah dapat berjalan dengan baik (dua kali dalam 10 tahun terakhir ini).

Mekanisme lima tahunan itu secara garis besar meliputi kegiatan-kegiatan kenegaraan sebagai berikut :

1. MPR yang terdiri dari seluruh anggota DPR, utusan-utusan daerah dan golongan sebagai hasil Pemilu berdasarkan Undang-undang mengadakan Sidang Umum sekali dalam 5 tahun (demikian juga Pemilu diadakan sekali dalam 5 tahun).
2. Dalam Sidang Umum tersebut, MPR melaksanakan tugasnya:
 - menetapkan GBHN;
 - memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa 5 tahun dengan tugas untuk melaksanakan GBHN yang ditetapkan oleh MPR.
3. Presiden/Mandataris MPR dengan dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden, melaksanakan tugasnya berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN, yang akan dipertanggungjawabkan kepada Sidang Umum MPR oleh Presiden/Mandataris pada akhir masa jabatannya.
4. Termasuk tugas-tugas Presiden/Mandataris yang erat hubungannya dengan mekanisme ini adalah antara lain:
 - membentuk (mengangkat anggota-anggota) Lembaga Tinggi Negara DPA dan BPK sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan;
 - melaksanakan Pemilu tepat pada waktunya untuk membentuk DPR dan MPR yang baru nanti;

- mengajukan APBN setiap tahun tepat pada waktunya dalam rangka melaksanakan GBHN. Sesuai GBHN yang sekarang, maka Presiden terpilih harus menyusun REPELITA III dan menyiapkan APBN tahun pertama pelaksanaan REPELITA itu;
 - membuat Undang-undang yang diperlukan dengan persetujuan DPR dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN;
 - dan seterusnya.
5. DPR (setelah selesai Sidang Umum MPR) melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan tugas Presiden, baik melalui hak budgetnya – menyetujui APBN – setiap tahunnya, memberikan persetujuan atas RUU dan sarana-sarana pengawasan lainnya.
 6. Demikian juga Lembaga-lembaga Negara lainnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang yang bersangkutan.

Dengan terlaksananya Pemilu tahun 1977 terbentuklah DPR dan MPR hasil Pemilu untuk yang kedua kalinya MPR hasil Pemilu telah bersidang dalam bulan Maret 1978 dan berhasil melaksanakan tugasnya membuat GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk lima tahun yang akan datang.

Presiden terpilih dengan dibantu oleh Wakil Presiden dalam waktu yang singkat telah membentuk pembantu-pembantunya yaitu para Menteri dan menetapkan program kerjanya untuk melaksanakan putusan-putusan MPR itu. GBHN dan keputusan-keputusan lainnya.

Demikian juga DPA dan BPK yang menurut undang-undangnya mempunyai masa jabatan lima tahun juga telah dibentuk (diangkat anggota-anggotanya) berdasarkan Undang-undangnya masing-masing.

Kemudian kegiatan penting dari Presiden/Madataris (pemerintah) yang baru adalah penyiapan REPELITA (kali ini ketiga) sebagai pelaksanaan dari GBHN dan penyiapan APBN tahun yang akan datang sebagai pelaksanaan tahunan dari REPELITA yang bersangkutan, Persiapan-persiapan lainnya yang perlu dilakukan dalam kaitan dengan mekanisme kepemimpinan nasional yang lima tahunan itu adalah penyelenggaraan Pemilu dalam tahun yang ditentu-

kan, sebagai wahana demokrasi dalam membentuk lembaga-lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat: DPR dan MPR yang baru nanti.

Apabila mekanisme lima tahunan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang yang berlaku itu dapat terus kita pelihara pelaksanaannya dengan lancar dan tertib, jela akan memberikan sumbangan yang besar dalam usaha kita bersama untuk menegakkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 semurni-murninya dalam rangka membina kelestarian kehidupan bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 selama masa Orde Baru ini telah terjadi keputusan-keputusan ataupun langkah-langkah kenegaraan yang bersifat melengkapi atau mengembangkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Praktek kenegaraan yang baik dan konstruktif tentu dapat terus dipelihara dan dimantapkan agar menjadi hukum tidak tertulis (konvensi) ataupun mungkin dapat dikukuhkan menjadi salah satu Ketetapan MPR.

Ketetapan MPR tentang penentuan "tiga serangkai" Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan-Keamanan secara bersama-sama melakukan sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden, sebelum MPR dapat memilih Presiden yang baru dalam keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, merupakan salah satu putusan MPR untuk melengkapi atau mengembangkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Ketentuan ini telah diputuskan oleh MPR, dalam Sidang MPR tahun 1973 dan tetap berlaku sampai sekarang.

Ada sejumlah langkah kenegaraan penting – baik merupakan keputusan resmi (Ketetapan MPR) ataupun telah terjadi dalam praktek – yang dapat dicatat sebagai pelengkap atau pengembangan dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya:

- 1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat (bulat).
Salah satu ciri dari Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam hal ini jelas perlunya ada musyawarah dalam pengambilan keputusan. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 (pasal

2 ayat (3) menetapkan bahwa MPR mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak namun dalam praktek kenegaraan selama ini dibawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 selalu diusahakan – dan ternyata hampir selalu berhasil – untuk mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, artinya dengan aklamasi. Ini telah dilakukan baik dalam sidang-sidang MPR maupun DPR. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak – artinya dengan pemungutan suara – hanya dilakukan apabila usaha musyawarah untuk mencapai mufakat (bulat) ternyata tidak dapat dicapai, meskipun telah diusahakan dengan sungguh. Hal ini adalah suatu contoh praktek kenegaraan yang baik dan telah terpelihara selama ini.

- 2) Pidato Kenegaraan Presiden di depan sidang DPR setiap tanggal 16 Agustus – bertepatan pula dengan permulaan masa sidang DPR – yang berisi laporan pelaksanaan tugas pemerintah dalam tahun yang lewat dan arah kebijaksanaan ke depan dalam tahun yang bersangkutan.
- 3) Penyampaian pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatannya di depan sidang MPR yang telah berlangsung dua kali, serta penilaian MPR atas pertanggungjawab tersebut
- 4) Prakarsa Presiden untuk menyiapkan bahan-bahan GBHN jauh sebelum sidang MPR itu berlangsung, untuk disampaikan kepada MPR pada waktu peresmian, sehingga MPR dengan Badan Pekerja dapat memahaminya, memusyawarakannya dan dapat mengambil keputusan tepat pada waktunya.
- 5) Ratifikasi perjanjian-perjanjian oleh DPR. Menurut pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain. Namun, menurut praktek penyelenggaraannya yang telah berlangsung cukup lama, yang diajukan kepada DPR untuk mendapatkan ratifikasi hanyalah perjanjian-perjanjian yang terpenting saja, seperti treaties dan agreements tertentu; selainnya diratifikasikan dengan Keputusan Presiden.

Masih banyak contoh-contoh lain yang dapat dikemukakan sebagai praktek kenegaraan yang

sifatnya melengkapi dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Ini semua menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang singkat dan mengatur pokok-pokok itu telah memberikan keluwesan dan kelincihan, sehingga memperlancar pelaksanaannya dan mampu menampung persoalan-persoalan politik dan kenegaraan sesuai dengan kebutuhan.

Dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara mantap, maka dapatlah diciptakan stabilitas politik dan pemerintahan – seperti yang dapat kita rasakan selama 10 tahun terakhir ini – yang merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya pembangunan bangsa dalam rangka mengisi kemerdekaan untuk mencapai cita-cita nasional, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Undang-undang Dasar 1945 sungguh cocok dan mampu memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia yang sedang membangun dewasa ini. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dan memberikan landasan idiil yang luhur dan kuat yang mampu memberikan gairah rangsangan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir maupun batin, ialah dasar falsafah Pancasila yang terpancang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dan memberikan landasan struktural yang kokoh yang menjamin stabilitas pemerintahan seperti digambarkan dalam sistem dan mekanisme pemerintahan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian juga Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dan memberikan landasan operasional yang mampu memberikan pengarah dinamik yang jelas, dan sesuai dengan perkembangan keadaan dan kemajuan zaman seperti yang digariskan oleh mekanisme penyusunan haluan-haluan negara serta ketentuan-ketentuan di berbagai bidang kehidupan yang tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

V. PELESTARIAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 disamping memuat aturan pokok yang diperlukan bagi Negara dan Pemerintah, berisikan pula dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa.

Dasar falsafah dan pandangan hidup tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu dan sejarah bangsa Indonesia dan telah ditempa dan diuji melalui perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan.

Kemantapan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 dan kebutuhan yang tidak dapat disangkal untuk mempertahankan dan mengamankannya sangat jelas dirasakan oleh generasi yang telah terpanggil untuk membelanya bahkan melalui perjuangan fisik.

Namun perlu tetap diusahakan agar generasi-generasi yang akan datang tetap dapat menghayati nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan tantangan utama yang kita hadapi dalam pelestarian Undang-Undang Dasar 1945 untuk masa selanjutnya.

Dalam dunia yang kian menyempit, di mana hubungan antar-manusia dan antar bangsa menjadi semakin intensif, membawa masalah-masalah yang semakin saling berkaitan, kita akan dihadapkan kepada pengaruh aneka-ragam pemikiran dan pendekatan yang dapat berlawanan secara hakiki dengan pokok-pokok pikiran yang melandasi Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu harus dicegah agar kita tidak menggunakan sistim nilai yang lain – asing – dalam mengukur pelaksanaan dan kemantapan Undang-Undang Dasar 1945.

Jika hal itu terjadi, maka dapat melahirkan tuntutan-tuntutan yang tak mungkin terpenuhi tanpa mengorbankan jiwa dan asas kehidupan bangsa dan negara yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Adalah menjadi tugas kita semua – baik generasi tua maupun generasi muda – untuk menjamin kelestarian Undang-Undang Dasar 1945, bukan saja sebagai himpunan serangkaian nilai-nilai luhur tetapi juga sebagai pegangan hidup yang akan tetap relevan dalam rangka tantangan-tantangan masa depan. Untuk itu perlu dilaksanakan pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 kepada generasi ke generasi.

VI. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Undang-Undang Dasar 1945 sungguh cocok dan mampu memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dan

memberikan landasan idiil yang luhur dan kuat yang mampu memberikan gairah rangsangan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir maupun batin, ialah dasar falsafah Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dan memberikan landasan struktural yang kokoh yang menjamin stabilitas pemerintahan seperti digambarkan dalam sistim dan mekanisme pemerintahan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian juga Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dan memberikan landasan operasional yang mampu memberikan pengarah dinamika yang jelas, dan sesuai dengan perkembangan keadaan dan kemajuan zaman seperti yang digariskan dalam mekanisme penyusunan haluan-haluan negara serta ketentuan-ketentuan di berbagai bidang kehidupan yang tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara mantap, maka dapatlah diciptakan stabilitas politik dan pemerintahan – seperti yang dapat kita rasakan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir ini – yang merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya pembangunan bangsa dalam rangka mengisi kemerdekaan untuk mencapai cita-cita nasional, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Undang-Undang Dasar 1945 memang hanya singkat dan tidak memuat ketentuan-ketentuan yang terperinci. Justru karena hanya singkat dan terdiri dari hanya pokok-pokok itulah terletak ke hikmatan keluwesan, dan ketahanan Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih dari itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga menampilkan suatu kemampuan untuk dapat menghadapi tantangan tahap pembangunan bangsa kita dengan segala ketahanan dan kestabilan sistim serta kemantapan gerak yang diperlukan.

Hukum dasar yang bersifat singkat, padat, utuh, dan luwes, sistim Presidensial dengan mekanisme kepemimpinan nasionalnya yang mantap; pola hubungan kerjasama fungsional yang khas antara lembaga negara; kesemuanya ini memberikan kepastian akan suatu pemerintahan yang stabil, berwibawa dan kompeten yang merupakan syarat bagi kelancaran tercapainya tujuan-tujuan nasional.

Pemerintah yang demikian ini dapat lebih menjamin kesinambungan kebijaksanaan serta ketepatan pendekatan menghadapi pelbagai masalah kompleks yang akan timbul pada tingkatan pembangunan bangsa dan perkembangan dunia dimasa depan.

Bagi kita yang ingin mengetahui, ingin mengerti dan ingin menghayati Undang-Undang Dasar agar dapat melaksanakan sebaik-baiknya, kiranya sangat perlu untuk selalu mengingat dan meresapi pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang menjwai pasal-pasal dalam wujud norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan meresapi pokok-pokok pikiran yang demikian itu, maka dalam menjalankan pelak-

sanaan Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan akan dapat memberikan tanggapan yang tepat atas masalah-masalah yang dihadapi sejalan dengan dinamika perkembangan keadaan tanpa meninggalkan keaslian semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Namun, pada akhirnya faktor yang menentukan pada usaha pelestarian dan pemantapan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah manusia. Maka dari itu semangat dan tekad para pemimpin dan penyelenggara pemerintah serta rakyat Indonesia sebagai keseluruhan dalam melestarikan dan menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 secara harfiah dan batiniah merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan perjuangan kita mewujudkan cita-cita Proklamasi.



Pelajar SMP Negeri 77 Jakarta ikut memeriahkan Konpus PGRI dengan membawa lagu HIMNE GURU.

Serangan Jantung Dapat Dihindari

Hingga akhir-akhir ini serangan jantung dianggap oleh para dokter sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan atau sebagai penyakit turunan atau juga sebagai akibat dari ketuaan. Tetapi kini makin banyak ahli yang berpendapat bahwa itu tidak benar seluruhnya. Banyak laporan dari para "detektif" kedokteran yang mencatat sejumlah serangan jantung di seluruh dunia, menimbulkan persangkaan adanya hubungan antara aturan orang makan, sifat makanan yang mereka makan dan jumlah serangan jantung yang mereka alami. Makin makmur suatu negara, makin banyak serangan jantung yang timbul di kalangan penduduknya. Demikianlah menurut statistik.

Sudah sejak tahun 1948 Yayasan Jantung Nasional Amerika mengadakan penyelidikan mengenai pertanyaan bagaimana dan mengapa serangan jantung timbul dalam rata-rata golongan manusia. Tujuannya ialah: mencari faktor risiko serangan jantung koroner dan menyelidiki artinya.

Para dokter pemerintah memilih 2282 orang lelaki dan 2845 orang wanita yang berusia di antara 30 dan 62 tahun. Mereka ialah wanita rumah tangga, pemilik warung, karyawan pendidikan, buruh pabrik, yang semuanya sehat dan bebas dari serangan jantung. Setiap sukarelawan diperiksa dengan teliti yang mencakup pemeriksaan darah, penyinaran tembus, tekanan darah dan elektrokardiogram. Para pemeriksa mencatat secara lengkap keadaan kesehatan mereka sebelumnya dan kebiasaan hidup mereka. Setiap pemeriksaan diulang dua tahun sekali tetapi sementara itu para peserta selalu berada dalam pengawasan. Setiap penyakit dicatat dan bila ada kematian maka dengan segera diadakan pemeriksaan mayat agar dapat diketahui penyebab kematian yang tepat.

Sejuta keterangan yang telah dikumpulkan oleh para dokter, yang dengan cermat memperhatikan 5127 orang lelaki dan wanita tadi selama 20 tahun, dimasukkan ke dalam komputer.

Hasilnya ialah analisa mengenai kemungkinan serangan jantung di bawah ini: satu dari sepuluh orang lelaki yang berusia antara 30 dan 60 tahun, mempunyai kemungkinan memiliki gejala serangan jantung koroner dengan kemungkinan bahwa satu dari tiga orang yang memiliki gejala tadi akan meninggal karena serangan jantung.

Bila ia terlalu gemuk dan memiliki tekanan darah yang terlalu tinggi dan berlebihan kolesterol dalam darahnya, maka ada kemungkinan besar bahwa ia akan mengalami serangan jantung. Bila ia banyak merokok maka kemungkinannya menjadi berlipat ganda. Pada kaum wanita angka-angkanya lebih menguntungkan karena pada mereka risikonya baru timbul 20 tahun kemudian. Menurut teori kaum wanita memperoleh penanggulangan itu berkat hormon kelamin.

Tetapi penyelidikan tadi tidak terbatas pada menetapkan kemungkinan akan kematian mendadak. Dalam catatan kecil yang menimbulkan harapan, tercantum bahwa itu karena salah para penderita sakit jantung koroner sendiri, sebab semua tadi dapat dihindarkan. Dr. William B. Kannel, pemimpin para penyelidik tadi berkata, "Serangan jantung tidak seluruhnya datang dengan sendirinya. Itu sebagian besar disebabkan oleh olah manusia dan bila pengetahuan kita dilaksanakan dengan tepat, maka jumlah serangan jantung koroner yang mengakibatkan kematian, dapat dibagi dua."

Selanjutnya penyelidikan telah menemukan enam faktor risiko yang berhubungan dengan suatu penyakit yang begitu meluas sehingga dapat kita katakan suatu wabah.

Keenam faktor tadi ialah:

Kadar kolesterol yang menaik, tekanan darah terlalu tinggi, banyak merokok, kemampuan paru-paru yang mengurang, kelainan jantung dan berat badan yang berkelebihan.

1. Kolesterol, zat seperti lemak dalam darah, merupakan ancaman yang paling besar. Orang yang memiliki kadar kolesterol darah di atas

260, mempunyai kemungkinan akan mengalami serangan jantung empat kali lebih besar daripada orang yang memiliki kadar 220 atau kurang. Kebanyakan orang memiliki kadar kolesterol tinggi karena mereka makan makanan yang keliru. Bila kita makan makanan yang mengandung banyak lemak maka kadar kolesterol darah akan menaik.

Walaupun hubungan antara kolesterol dan serangan jantung belum jelas sekali, orang menganggap bahwa kolesterol melepaskan diri dari darah lalu menempel pada dinding pembuluh darah. Pada suatu saat darah yang berusaha mengalir melalui pembuluh darah yang menciut karena dindingnya penuh dengan kolesterol, dapat merupakan sumbat yang cukup besar untuk menghalang-halangi perjalanan darah. Bila yang tersumbat ini pembuluh nadi maka ini berarti suatu serangan jantung.

2. Juga tentang tekanan darah masih banyak yang belum dikenal.

Suatu pendapat bahwa tekanan darah anda harus sama dengan "100 ditambah dengan usia anda", tidak memiliki nilai keilmuan. Tetapi penyelidikan menunjukkan dengan jelas bahwa ada tingkat aman dan tingkat bahaya. Mereka yang diperiksa, yang memiliki tekanan darah 160 atau lebih, telah mengalami serangan jantung empat kali lebih banyak daripada mereka yang memiliki tekanan darah 120 atau kurang.

3. Merokok lebih dari satu bungkus sehari menimbulkan risiko serangan jantung koroner yang mematikan menjadi dua kali lebih. Penyelidikan menunjukkan bahwa kenaikan risiko tadi ditimbulkan oleh pemasukan nikotin ke dalam darah. Kenaikan pemasukan ini menyebabkan keluarnya bahan kimia tertentu, catecholamin, sehingga dapat mengganggu irama denyutan jantung, bahkan menghentikannya sama sekali. Untung sekali bahwa penyelidikan itu juga menunjukkan bahwa bahaya ini dapat hilang bila orang berhenti merokok.

4. Beberapa sukarelawan yang diperiksa, yang di masa lampau tidak pernah mengalami serangan jantung koroner atau tidak memperlihatkan gejala-gejala hal itu, memiliki elektrokardiogram yang polanya memperlihatkan persamaan dengan

patron yang dimiliki para korban serangan jantung. Para dokter dari Yayasan Jantung Nasional mengambil kesimpulan bahwa ECG yang abnormal ini menunjukkan serangan jantung yang berlangsung secara "diam-diam", sehingga tak diketahui, tetapi walaupun demikian mengganggu fungsi jantung. Orang yang menderita serangan jantung serupa itu (diam-diam) paling sedikit mempunyai dua kali kemungkinan untuk di kemudian hari mengalami serangan jantung yang mematikan.

5. Berat badan juga memegang peranan yang menentukan. Bila berat badan antara 20 persen lebih di atas yang wajar, maka anda memperlipatganda risiko mendapat serangan jantung yang tiba-tiba dan mematikan. Kebanyakan orang lelaki di antara 30 dan 40 tahun mempunyai berat badan yang normal bagi mereka dan mereka tetap mempertahankan berat badan tadi sampai pada hari tuanya. Tetapi kaum wanita menjadi lebih gemuk bila mereka tambah usia.

Kebanyakan kegemukan berjalan bersama dengan tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi dan penyakit gula - suatu kombinasi yang amat mempertinggi risiko untuk mendapat serangan jantung. Setelah berat badan beberapa orang lelaki dan wanita gemuk menurun selama pemeriksaan, maka tekanan darah dan kadar kolesterol mereka juga menurun.

6. Para penyelidik menemukan bahwa suatu percobaan sederhana tetapi jarang dilakukan, dapat menjadi suatu peringatan bagi mereka yang memiliki kemungkinan besar untuk mengalami serangan jantung. Percobaan tadi ialah untuk menguji kemampuan paru-paru. Caranya ialah seseorang harus menarik napas sedalam mungkin untuk kemudian melepaskannya ke dalam tempat pengukur. Tergantung pada bentuk tubuh dan tinggi orang yang diuji, banyak udara yang dihembuskan ialah ada di antara tiga sampai empat liter. Orang yang memiliki kemampuan paru-paru di bawah yang normal, memiliki kemungkinan mendapat serangan jantung dua kali lebih banyak. Pada umumnya mereka terdiri dari orang-orang yang bekerja sambil duduk dan tidak pernah melakukan gerak badan.

Berolahraga atau kurang berolahraga itu tidak terlalu penting untuk menghindari serangan jantung. Tetapi orang yang berolahraga secara teratur memiliki peluang mengatasi serangan jantung empat kali lebih besar daripada orang yang tak pernah berolahraga.

Olahraga yang teratur memaksa jantung untuk lebih banyak bekerja dan dengan demikian jantung tidak akan "terkejut" lagi bila tiba-tiba ada tambahan pekerjaan.

Perubahan kebiasaan nasional.

Tinggal kini suatu kenyataan bahwa kebiasaan rakyat makan termasuk faktor yang terpenting yang pegang peranan dalam serangan jantung. Karena bukti-bukti makin lama makin menumpuk, maka makin banyak ahli yang mendesak untuk berbuat sesuatu. Karena kolesterol dan lemak yang menjadi biang keladinya maka "sesuatu" yang dimaksud tadi ialah rupanya bahwa kita harus mengunrangi makannya.

Tetapi manusia itu tidak mudah merubah kebiasaan hidupnya, tanggung jawab untuk merubah pola hidup bangsa Amerika membuat yang berwajib menjadi ragu-ragu.

Dalam tahun 1962 para penasehat dari Yayasan Jantung Nasional mengusulkan suatu percobaan dengan 100.000 orang lelaki yang harus menunjukkan apakah perubahan aturan makan akan dapat banyak mengurangi jumlah serangan jantung.

Setelah mengadakan percobaan selama dua tahun, maka kesimpulannya ternyata jelas: Tidak hanya pengusaha bahan makanan tetapi uga rakyat menerima perubahan aturan makan. Dari percobaan tadi terbukti ada banyak pengurangan kita-kira 11 persen – jumlah kolesterol jahar. Segera sudah pada permulaan berat badan sebayakan orang lelaki menurun lima pon. Dan tanpa ditatar hampir separuh dari para sukarelawan menghentikan kebiasaannya merokok. Hasil terakhir ialah bahwa jumlah serangan jantung pada kaum lelaki menurun menjadi separuhnya.

Hasil dari penyelidikan yang berdasarkan pengetahuan jelas menunjukkan bahwa orang dapat memperkecil sendiri kemungkinan akan mengalami serangn jantung. Ini berarti bahwa kita harus mengunjungi dokter yang akan mengadakan pemeriksaan seksama. Bila ternyata ada salah satu faktor risiko maka bahaya dapat diperkecil. Perubahan kebiasaan aturan makan dapat mengurangi jumlah kolesterol, obat dapat menurunkan tekanan darah anda, dengan mengurangi kelebihan kalori yang dibutuhkan untuk kegiatan anda sehari-hari, anda dapat mengurangi berat badan anda. Menghisap rokok yang berlebihan dapat dihentikan dan melakukan gerak badan secara teratur dapat mempertinggi kemampuan paru-paru dan dengan demikian mampu mengatasi serangan jantung.

(SARTIKA)

BERITA DUKACITA

Pengurus Besar PGRI beserta Staf turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas berpulanginya ke rahmatullah Bapak HAMIDAN – Pengurus Daerah X PGRI Kalimantan Selatan pada tanggal 23 Mei 1983 di Banjarmasin.

Semoga arwah almarhum diterima disisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa sabar. Semua kita adalah milik Allah dan akan kembali juga kepada-Nya.

Innalillahi wainna Ilaihi rajiun !

HAK & KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

Ketentuan mengenai HAK dan KEWAJIBAN Pegawai Negeri diatur dalam berbagai peraturan yang jumlahnya sangat banyak. Di samping materinya rumit dan sifatnya yang secara teknis mendetail tidak mudah dipahami secara sambil lalu saja. Terkecuali oleh yang bertugas dan secara khusus menjuruskan spesialisasinya di bidang Kepegawaian.

Tulisan mengenai Hak dan Kewajiban pegawai ini bukan bermaksud untuk memberikan ikhtisar selengkapnya mengenai kedudukan pegawai negeri tetapi hanya merupakan pedoman dasar yang memberikan petunjuk secara praktis yang terbatas pada hal-hal yang pokok dan esensial saja. Namun demikian dengan tulisan ini penulis akan mencoba menunjukkan apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang Pegawai Negeri secara kronologis pada suatu rangkaian siklus kehidupan seorang Pegawai Negeri Sipil. Yaitu sejak pada tingkatan pertama kali menjadi seorang pegawai negeri, sebagai abdi negara kemudian pada fase kedua selama berstatus pegawai negeri sampai pensiun.

Penyebutan istilah Hak dan Kewajiban di dalam tulisan ini bukannya bermaksud mendahulukan Hak dari pada Kewajiban. Hak-hak itu pada hakekatnya beimbalan dengan kewajiban-kewajibannya. Menerima Hak dan menjalankan Kewajiban berada dalam hubungan timbal balik. Hak-hak Pokok dan Kewajiban-kewajiban Pokok sudah diatur di dalam pelbagai peraturan perundangan.

Seorang Pegawai Negeri mempunyai berbagai macam kewajiban yang harus dilakukan atau diperhatikan. Di antara kewajiban-kewajiban itu mungkin sudah banyak diketahuinya, tetapi mungkin juga belum diketahui secara jelas. Hal ini tidak mengherankan karena banyaknya

kewajiban-kewajiban itu tidak ditetapkan hanya dalam satu bentuk peraturan tetapi materinya tersebar dalam berbagai bentuk peraturan (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan BAKN dan sebagainya). Selanjutnya pengertian Pegawai Negeri dalam tulisan adalah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sistimatika

Berkenaan dengan maksud judul tulisan ini maka secara bersambung dalam majalah ini akan diuraikan hal-hal yang berkenaan dengan serangkaian siklus kehidupan Pegawai Negeri antara lain sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Mengenai Hak-hak Pegawai Negeri.

Bab III. Mengenai Kewajiban Pegawai Negeri.

Bab IV. Mengenai Beberapa Ketentuan yang perlu diketahui. Dari masing-masing bab tadi akan diuraikan atas Sub Bab. Sub Bab dan anak Sub Bab dengan isi materi yang berhubungan dengan Bab yang bersangkutan.

II. HAK-HAK PEGAWAI NEGERI.

A. Gaji

Penjelasan tentang Gaji:

1. Gaji (Berdasarkan PGPS 1968 disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
2. Yang dimaksud dengan gaji adalah upah yang diberikan kepada setiap Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Di dalam PGSP 68 yang disempurnakan dengan

PGPS'77 pada prinsipnya di Indonesia hanya mengenal satu peraturan gaji bagi seluruh pegawai negeri dengan tidak membedakan kewarga-negaraan maupun jenis kelamin. Perbandingan antara gaji pokok minimum bagi pegawai terendah Rp. 12.000,— dengan gaji pokok maksimal bagi pegawai pangkat tertinggi (Rp. 120.000,—) adalah 1 : 10.

4. Panjang skala gaji adalah 24 tahun. Maksudnya adalah walaupun seorang Pegawai Negeri Sipil telah mencapai masa kerja golongan selama 18 tahun dan telah mencapai pangkat tertinggi dalam jabatannya yang dipangkunya dan tidak mungkin naik pangkat lagi tetapi masih akan memperoleh kenaikan gaji berkala.
5. Gaji ditetapkan atas dasar pangkat yang dipangku dengan memperhatikan ijazah, masa kerja dan pengalaman kerja.
6. Bagi seorang yang diangkat menjadi calon pegawai Negeri Sipil diberikan gaji pokok sebesar 80%.

B. HAK-HAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN GAJI.

1. Tunjangan Keluarga (Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977).

Penjelasan :

- 1). Pegawai Negeri Sipil yang beristeri atau bersuami diberikan tunjangan isteri atau tunjangan suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok.
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata-nyata menjadi tanggung jawabnya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak termasuk satu anak angkat.

Apabila anak tersebut masih sekolah maka dapat diperpanjang sampai anak tersebut berumur 25 (dua puluh lima) tahun. Anak pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat tunjangan pada bulan Maret 1980 tetap

mendapat tunjangan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau 25 tahun. Sedang anak yang dalam bulan Maret 1980 tidak mendapat tunjangan anak lagi maka mulai April 1980 bisa mendapat tunjangan lagi sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau 25 tahun bagi yang masih bersekolah.

Apabila anak tersebut masih sekolah maka dapat diperpanjang sampai anak tersebut berumur 25 (dua puluh lima) tahun. Anak pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat tunjangan pada bulan Maret 1980 tetap mendapat tunjangan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau 25 tahun. Sedang anak yang dalam bulan Maret 1980 tidak mendapat tunjangan anak lagi maka mulai April 1980 bisa mendapat tunjangan lagi sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau 25 tahun bagi yang masih bersekolah.

- 3) Dalam hal suami isteri sama-sama menjadi Pegawai Negeri Sipil maka tunjangan diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.

2. Tunjangan Jabatan.

Tunjangan jabatan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural dan jabatan penting lainnya yang mengakibatkan para pejabatnya memikul tanggung jawab yang berat.

Macam-macam tunjangan jabatan :

- 1) Tunjangan Jabatan Struktural (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1977) Kepada Pegawai Negeri yang menjabat jabatan struktural pada suatu organisasi negara diberikan tunjangan jabatan struktural. Besarnya tunjangan tersebut ditetapkan berdasar eselon jabatan masing-masing. Eselon dan nama jabatan yang pemangkunya memperoleh tunjangan jabatan, ditetapkan secara tegas dan limitatif di dalam lampiran Keputusan Presiden No. 15 tahun 1977 atau yang akan ditetapkan kemudian oleh Presiden bagi jabatan-jabatan eselon I dan II dan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara bagi jabatan-jabatan

eselon III, IV dan V. Mereka yang menjabat lebih dari satu jabatan struktural hanya mendapatkan satu tunjangan jabatan struktural yang tertinggi jumlahnya. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat sementara dalam suatu jabatan struktural untuk waktu lebih dari 6 (enam) bulan, memperoleh tunjangan jabatan struktural pada bulan yang ketujuh dan berikutnya. Tunjangan jabatan struktural yang berlaku mulai tanggal 1 April 1977 diatur dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1977 dan pedoman pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 06/SE/1977. Selanjutnya eselon besarnya tunjangan jabatan struktural adalah:

No.	Eselon	Keterangan
Besarnya Tunjangan		
1.	Ia	Rp. 120.000,-
2.	Ib	Rp. 100.000,-
3.	IIa	Rp. 50.000,-
4.	IIb	Rp. 45.000,-
5.	IIIa	Rp. 25.000,-
6.	IIIb	Rp. 20.000,-
7.	IVa	Rp. 17.500,-
8.	IVb	Rp. 15.000,-
9.	Va	Rp. 12.500,-
10.	Vb	Rp. 10.000,-

wai Negeri Sipil yang ditugaskan di bidang Pendidikan pada suatu Perguruan Tinggi dan Sekolah Negeri diberikan tunjangan jabatan tiap bulan sebagai berikut:

– Guru Besar	Rp. 100.000,-
– Lektor Kepala	Rp. 60.000,-
– Lektor Kepala	Rp. 60.000,-
– Lektor	Rp. 45.000,-
– Lektor Madya	Rp. 35.000,-
– Lektor Muda	Rp. 30.000,-
– Asisten Ahli	Rp. 15.000,-
– Asisten Ahli Madya	Rp. 10.000,-
– Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	Rp. 30.000,-
– Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sekolah Luar Biasa/Aliyah	Rp. 25.000,-
– Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sekolah Luar Biasa/Tsanawiyah	Rp. 20.000,-
– Penilik Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar/Sekolah Luar Biasa dan Penilik Pendidikan Agama	Rp. 12.500,-
– Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Percobaan/Madrasah Ibtidaiyah	Rp. 10.000,-

2).Tunjangan Jabatan Bidang Pendidikan
(Keputusan Presiden No. 16/1977). Pega-

(M. Haji)

KELEMAHAN

Sambungan dari hal 7

ngetahuan dan ilmu yang setinggi-tingginya. Bagi kita tidak ada pilihan, mulai sekarang mengirimkan mahasiswa dan dosen sebanyak mungkin ke luar negeri dan mengangkat universitas kita setinggi-tingginya di sisi betul-betul memodernkan bahasa Indonesia untuk mengejar bahasa Jepang, Jerman, Inggris dan lain-lain.

Karena rakyat kita pada umumnya miskin,

jelaslah bahwa pemerintah mesti membayar sebagian yang terbesar dari biayanya, seperti sejak bertahun-tahun dilakukan oleh pemerintah Malaysia.

Kalau perlu dapat diketatkan perbelanjaan yang lain, sebagai berbagai festival, kontes, pertandingan dan sebagainya. Tak ada alternatif lain bagi kita. (SK, 28-6-83).

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
No. 018/C/Kep/I/83**

tentang

**SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.**

Menimbang:

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982, nomor 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta;
- b. bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh persetujuan bagi pendirian sekolah swasta ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.

4. tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/4/U/1982.

Memperhatikan :

Saran-saran Direktur Sekolah Swasta, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat:

- a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 31;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, nomor IV/MPR/1978;
- c. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (dari Republik Indonesia Negara Bagian) jo. Undang-undang Nomor 12 tahun 1954;
- d. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1981;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 1. No. 34 tahun 1972;
 2. No. 44 tahun 1974
 3. No. 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982;
 4. No. 27 tahun 1978;
 5. No. 71/M tahun 1978;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 1. tanggal 20 April 1976, No. 098a/U/1976;
 2. tanggal 20 Juni 1980, No. 0222a/1980 sampai dengan No. 0222h/0/1980;
 3. tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/0/1981;

BAB I

Umum

Pasal 1

Orang-orang atau badan-badan swasta dapat mendirikan dan menyelenggarakan sekolah swasta.

Pasal 2

Sekolah swasta yang dapat didirikan ialah Taman Kanan-kanan (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP), dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA).

Pasal 3

- (1) Setiap pendirian sekolah swasta memerlukan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan.
- (2) Persetujuan tertulis yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Sekolah swasta baru hanya dapat didirikan menjelang permulaan tahun ajaran.

BAB II

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA

Pasal 5

Sekolah swasta yang akan didirikan harus memenuhi syarat:

1. Diselenggarakan oleh suatu penyelenggara sekolah/yayasan yang bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
2. Penyelenggara sekolah harus mempunyai program yang jelas baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah.
4. Pada saat pembukaan, sekolah swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan paling sedikit seorang tenaga pengajar tetap yang berwenang mengajar pada jenis/tingkat sekolah yang bersangkutan.
5. Tersedia calon murid yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
6. Tidak menampati dan menggunakan fasilitas sekolah yang memenuhi persyaratan.

BAB III

TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Pasal 6

Penyelenggara sekolah swasta mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan pendirian sekolah secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersangkutan dengan mencantumkan/melampirkan:

1. pertimbangan/alasan pendirian sekolah;
2. data kelengkapan persyaratan yang ditentukan
3. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

Permohonan tertulis yang dimaksud dalam pasal 6 Bab III ini diajukan:

1. melalui Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk pendirian TK dan SD;
2. melalui Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya untuk pendirian SLB, SMTP, dan SMTA.

Pasal 8

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum tahun ajaran baru.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan meneliti berkas permohonan, memberikan pendapat/rekomendasi serta meneruskannya kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima berkas permohonan pendirian TK/SD swasta.
- (2) Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya meneliti berkas permohonan pendirian sekolah swasta, memberikan pendapat/rekomendasinya serta meneruskannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di propinsi, dalam waktu selambat-lambatnya sebulan setelah berkas permohonan diterima, baik untuk TK/SD, SLB, SMTP maupun SMTA.

Pasal 10

Dalam memberikan pendapat/rekomendasi berkas permohonan pendirian sekolah swasta, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dan Kabupaten/Kotamadya memperhatikan pertimbangan teknis edukatif dan pertimbangan lain, diantaranya:

- a. jumlah anak usia sekolah yang ada;
- b. jumlah daya tampung sekolah yang telah ada baik negeri maupun swasta;
- c. peta dan penyebaran sekolah yang telah ada di daerah yang bersangkutan;
- d. relevansi pendidikan dari jenis sekolah yang akan didirikan dengan keperluan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, setelah mempelajari dan meneliti berkas permohonan pendirian sekolah swasta memberikan keputusan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berkas permohonan diterima.
- (2) Keputusan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 12

- (1) Persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah diberikan secara tertulis dan dikirimkan secara resmi kepada pemohon/penyelenggara sekolah.
- (2) Penolakan oleh Kepala Kantor Wilayah diberikan secara tertulis dan dikirimkan secara resmi kepada pemohon/penyelenggara sekolah, disertai dengan alasan/pertimbangan penolakan.
- (3) Baik persetujuan maupun penolakan tertulis seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat kepada penyelenggara sekolah/yayasan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun ajaran baru.

Pasal 13

Berdasarkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal 12, Penyelenggara sekolah dapat melaksanakan pendirian sekolah.

BAB V PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 14

Kepala Kantor Wilayah dapat mengadakan pengamatan setempat apakah pendirian sekolah yang bersangkutan telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui.

Pasal 15

Persetujuan tertulis seperti tersebut pada ayat (1) pasal 12 Keputusan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 16

- (1) Setiap pendirian sekolah swasta baru, harus dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

- (2) Sekolah swasta yang telah didirikan sesuai dengan persyaratan seperti tersebut pada pasal 5 keputusan ini, diberikan Nomor Data Sekolah dalam bentuk piagam oleh Direktorat Sekolah Swasta melalui Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
- (3) Piagam yang dimaksudkan ayat (2) pasal ini berlaku sebagai tanda tercatat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sekolah swasta yang sudah mendapat Nomor Data Sekolah dari Direktorat Swasta sebelum berlakunya keputusan ini akan diberikan piagam yang sama seperti yang dimaksud pasal 16 tersebut di atas.
- (2) Bagi sekolah swasta yang telah berdiri sebelum berlakunya keputusan ini, tetapi belum mempunyai Nomor Data Sekolah dari Direktorat Sekolah Swasta, diberi waktu 2 (dua) tahun untuk mendapatkan Nomor Data Sekolah tersebut.

BAB VII PENUTUP Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Pebruari 1983
Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah

ttd.

Prof Darji Darmodiharjo, SH
NIP. 130676351



Mr. Gurnam Singh, Wk. Guru Asia di IFFTU berkesempatan menghadiri Konpus PGRI tahun 1983. Nampak sedang bersalaman dengan Ketua Umum PB-PGRI pada malam penutupan Konpus PGRI, 8 Juni 1983.



Pengurus Besar PGRI dan utusan daerah peserta Konpus diterima Menko Kesra, 9 Juni 1983. Dari kiri: A.T. Sianipar, SH, dan Ny. Martha Miyardi (PB-PGRI), di sebelah kanan: Pejabat Tinggi Menko Kesra/Pembawa acara.



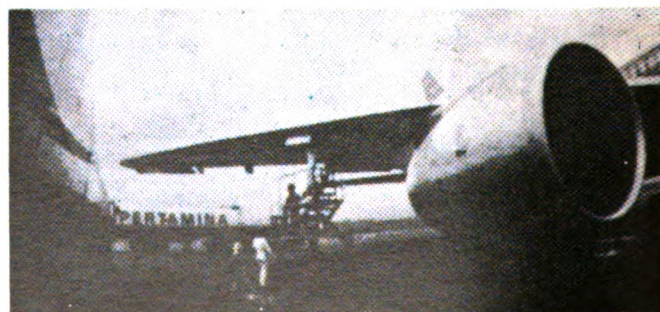
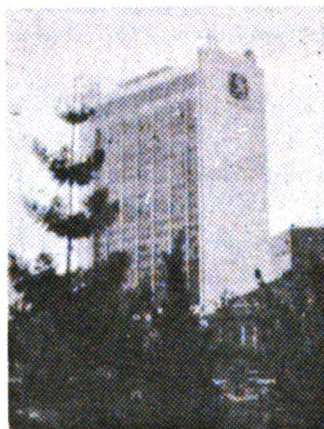
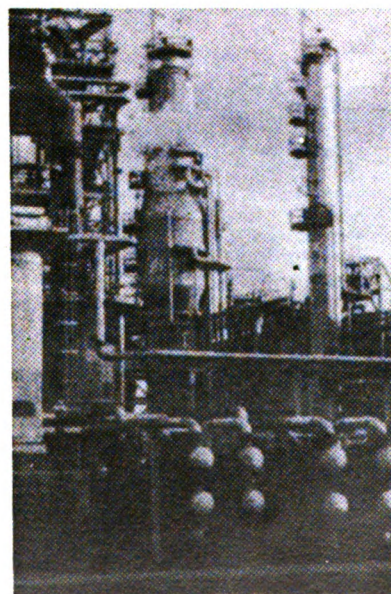
PERTAMINA

**PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA**

Kantor Pusat : Jl Merdeka Timur No 1

Telp : 3039, 3032300 s/d 3032307

Telex : 44152, 44302, 44441.



".....kami menantang buasnya hutan rimba, hampasan ombak lautan untuk mencari dan menemukan sumber minyak dan gas bumi penggerak roda-roda pembangunan....."

Sinar GURU

No. 7 Th. XXXII - 31 JULI 83.

MAIN/UC-B

APR 5 1984

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

Majalah Bulanan Profesi Guru



Drs. Hasan Ibrahim, Ketua PGRI Sumatera Selatan sedang bersalaman dengan Menko Kesra H. Alamsyah Ratu Perwiranegara pada saat peserta Konpus PGRI 1983 diterima Menko Kesra.



Ketua Umum PB-PGRI H. Basyuni Suriamiharja saat menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Konpus PGRI th. 1983 kepada Bpk. Menko Kesra, 9 Juni 1983.



Majalah Suara Guru
No. 7 Th XXXII – 31 Juli 1983

PENERBIT

Pengurus Besar Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI)

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI

PEMIMPIN UMUM

H.Basyuni Suriamiharja

KETATAUSAHAAN

Pimpinan : Drs.W.D.F.Rindorindo
Wkl.Pimp. : Muhd. Hatta
Anggota : F.A.Santoso, B.Sc.

REDAKSI

Pimpinan : Prof.Dr.Amran Halim
Wkl.Pimp./Sekr. : Drs.H.Gazali Dunia
Anggota : Suyono ● A.T.Sianipar, SH.
● Ki Soeratman ● Drs. Gino Sutarno
● Anggota PB-PGRI lainnya

STAF REDAKSI

● Galisung MS ● Syarifulkani ● Sutiyo
● Edi Marhami

IZIN TERBIT

Skp Deppen No. 099 SK-PDHM-SIT-66
Tanggal 18 Februari 1966
(Izin Peperada Jaya No KEP-108-P/5-1966)

REDAKSI & TATA USAHA

Jl. Tanah Abang Tiga No.24 Jakarta
Telp. 341121 – 340598

Percetakan

HARAPAN MASA - Jakarta
Telp. 582225

DAFTAR ISI

	Halaman
* Tajuk Rencana	2
* Sambutan Menko Kesra pada saat Menerima peserta Konpus PGRI	3
* Sambutan Gubernur KDKI Jakarta pada Konpus PGRI	4
PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
* Prof. Dr. Nugroho Notosusanto: Anak didik Seharus- nya Tidak hanya Mengenal tetapi Dapat Menghayati Sejarah Nasional	6
* Prof. Darji Darmodiharjo, SH: Sejarah Dapat Mem- beri Arti Bagi Perjuangan dan Kelestarian Bangsa Indonesia	7
* Dr. Anwar Jasin, M. Ed: Masalah Relevansi Pendidik- an dalam Perspektif Sejarah	8
* Drs. Darwis A. Soelaiman, MA: Pendidikan di Indo- nesia pada Dekade 80-an	13
* Dr. Ir. Jujun Suparjan Suriasumantri Nilai Budaya dalam Proses Pendidikan	23
* Mengenal Kata dan Istilah Baru (VII)	27
RUANG P – 4	
* Drs. S. Samiyana: Pelaksanaan Ekaprasetia Pancakarsa dalam Kedinasan	30
* UANG MASUK SUMBANGAN GEDUNG PGRI	37
RUANG UNDANG-UNDANG DASAR 1945	
* Prof. Padowahyono, SH: Sistem Hukum Nasional di dalam Negara Hukum Pancasila	38
KEWANITAAN	
* Secuil Tentang Ibu Inggit dalam Proses Pergerakan dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia	49
YPLP – PGRI PUSAT	
* Tahukah Anda ? (II)	53
KESEHATAN	
* Bagaimana Membantu Dokter Anda "Menanggulangi" Tekanan Darah Tinggi	55

Rekening Giro :

BRI Cabang Tanah Abang Tiga No. 4 Jakarta
Pusat : No. 31. 46. 2118

KETERANGAN GAMBAR KULIT

H. ALAMSJAH RATU PERWIRA NEGARA
MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM
KABINET PEMBANGUNAN IV.

Tajuk Rencana

Dalam Rapat Kerja Nasional Departemen P dan K tanggal 6 Juni 1983 Bapak Presiden di antaranya telah memberikan tekanan pidatonya berupa pengarahan terhadap para peserta Rakernas yang tentu juga menjadi perhatian dan tanggung jawab para guru/Anggota PGRI di seluruh tanah air.

Di antara butir-butir pengarahan yang amat ditekankan ialah: meningkatkan pendidikan kejuruan untuk menghasilkan tenaga pembangun yang sangat diperlukan. Detik-detik tinggal landas menuju Pelita IV, adalah satu tantangan bagi kita para pendidik, khususnya Departemen P dan K, agar mampu menghasilkan tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga teknisi dalam segala bidang pembangunan yang kelas dilaksanakan pada Pelita IV.

Pendidikan yang merupakan sentral pembangunan harus mampu menjawab tantangan-tantangan ini, di samping keperluan pembangunan fisik, juga mampu dengan baik dalam pelaksanaan wajib belajar yang akan dilaksanakan pula dalam Pelita IV.

Akhirnya di tengah-tengah kita siap-siap melaksanakan Pelita IV, kita baru saja menyelesaikan "Penerimaan Murid Baru" yang pada setiap tahun menimbulkan kemelut-kemelut di kalangan orangtua, pelajar dan para mahasiswa, yang tidak tertampung oleh sekolah-sekolah/perguruan tinggi negeri.

Lemparan nada senafas dari sementara pejabat Dep P dan K, dipusat pun di daerah "agar yang tak dapat diterima di negeri disalurkan ke swasta", satu sikap yang belum mantap. Karena antara negeri dan swasta terdapat jurang yang tak terlangkahi oleh orangtua murid yang biaya-biaya kuliah dan syarat-syarat masuk benar-benar mencekik leher orangtua.

Alangkah baiknya kalau pemerintah turun tangan mengatur syarat-syarat keuangan perguruan swasta itu, hingga terjangkau oleh isi saku orangtua murid Indonesia ini, yang rata-rata masih berada di bawah garis kemiskinan !

Redaksi

SAMBUTAN MENKO KESRA PADA SAAT MENERIMA PESERTA KONPUS PGRI



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama saya menyampaikan rasa penyesalan dari Bapak Wakil Presiden tidak dapat menerima peserta Konpus PGRI sehubungan beliau ada kesibukan-kesibukan lain. (diluar kota). Sehubungan dengan itu Bapak Wakil Presiden telah meminta saya untuk menerima Saudara-saudara, a.n. beliau.

Saudara-saudara yth.

1. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas selesainya Konperensi Pusat PGRI— dan diteruskannya hasil Konperensi Pusat tersebut kepada saya.

Insy Allah akan saya teruskan kepada Bapak Wakil Presiden.

2. Dalam agenda, Konperensi Pusat PGRI Saudara-saudara telah membahas empat masalah pokok, yaitu :

1) Peranan Guru/PGRI dalam pemasyarakatan/pensuksesan pelaksanaan SU MPR 1983

2) Pemikiran konseptual PGRI bagi Pelita IV bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

3) Kesejahteraan Guru.

4) Menetapkan penyelenggaraan Kongres PGRI XV pada akhir tahun 1984.

dimana pada pengarahannya saya pada tanggal 6 Juni 1983 telah pula disinggung beberapa hal.

3. Yang perlu mendapatkan perhatian ialah:

PGRI sebagai organisasi profesi — lebih menekankan kepada profesinya yaitu dengan jalan: membuat pemikiran konseptual mengenai pendidikan sebagai saran kepada pemerintah dan pembinaan terhadap para anggota dalam usaha peningkatan mutu Guru (watak - kepribadian - kecerdasan dan ketrampilan) dan tidak boleh dilupakan masalah kesejahteraannya.

Sekali lagi saya tekankan, bahwa peranan guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan berarti keberhasilan pembangunan

bangsa. Oleh karena itu, pembinaan guru harus mendapat perhatian khusus dan mendapat prioritas pertama.

4. Selanjutnya saya minta perhatian Pengarahan Bapak Presiden didepan Rapat Kerja Nasional Dep. P dan K tanggal 6 Juni 1983 — yang antara lain dikemukakan :

a) Lebih meningkatkan pendidikan kejuruan untuk menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan, karena tantangan pembangunan sangat membutuhkan tenaga-tenaga tersebut.

b) Pelaksanaan wajib belajar akan dilaksanakan pada Pelita IV — segala daya dan upaya harus dikerahkan, karena wajib belajar mempunyai nilai ideologis dan strategis.

c) Pendidikan merupakan peranan sentral dalam pembangunan masyarakat Indonesia, yaitu dalam pembentukan: kemampuan, watak, kecerdasan masyarakat Indonesia mendatang.

d) Dalam proses pendidikan harus dapat menghilangkan pewarisan sikap dan perbuatan yang mempertajam pertentangan dan kecurigaan diantara kita karena adanya berbagai perbedaan (sosial, agama, suku maupun paham politik).

5. Demikian Saudara-saudara, mudah-mudahan segala apa yang telah diterima dan dibahas dalam Konperensi Pusat PGRI, akan berguna bagi kita semua. Kepada para peserta dari Daerah saya sampaikan Selamat Jalan dan terima kasih kepada PB PGRI atas kepercayaan yang diberikan kepada saya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT,

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA.

Sambutan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada upacara pembukaan Konperensi Pusat PGRI Tahun 1983.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

- Yth. Bapak Menteri P dan K,
- Yth. Saudara Ketua Umum PB. PGRI,
- Saudara-saudara peserta dan penyelenggara Konperensi Pusat PGRI yang kami hormati.

Petama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri upacara pembukaan Konperensi Pusat PGRI tahun 1983.

Bapak Menteri dan Saudara-saudara sekalian yang kami hormati,

Konperensi Pusat PGRI pada tahun ini mengambil thema "Peranan Guru dalam memasyarakatkan dan mensukseskan hasil Sidang Umum MPR 1983 dan Pelita IV dalam bidang pendidikan", di mana permasalahan serta materi dan sasaran yang akan dibahas dalam konperensi ini mencakup antara lain peranan guru/PGRl dalam memasyarakatkan dan mensukseskan hasil-hasil Sidang Umum MPR 1983, pemikiran konseptual PGRI pada Repelita IV bidang Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian juga akan membahas permasalahan yang tidak kalah penting yaitu perihal kesejahteraan guru sebagai tenaga pendidik.

Pemilihan thema dan inti pembahasan materi ini menurut pendapat kami adalah sangat tepat karena PGRI adalah satu organisasi profesi dan satu-satunya wadah organisasi guru di Indonesia yang anggota-anggotanya terdiri dari para guru/pendidik yang tersebar di seluruh

pelosok tanah air, di mana dalam hal ini berkewajiban membantu pemerintah untuk memasyarakatkan dan mensukseskan hasil-hasil Sidang Umum MPR tahun 1983. Kami katakan demikian karena menyadari bahwa PGRI yang beranggotakan para guru/tenaga pendidik, secara individual berfungsi sebagai pengajar/pendidik pada sekolah formal, tetapi di samping itu pula para guru juga memiliki fungsi sebagai pendidik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa fungsi mendidik masyarakat itu merupakan tugas tanpa pamrih yang tidak mengenal batas waktu dan tempat, dalam ruang lingkup yang begitu pula. Dengan demikian tugas tersebut adalah merupakan tugas yang mulia dan strategis:

mulia = tulus melalui perasaan diri;

strategis = membentuk jasmani mendasar

Hasil Sidang Umum MPR perlu dihayati, dimengerti serta dilaksanakan dan diamankan oleh setiap warganegara dan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan maksud tersebut, pemerintah dalam hal ini juga Pemerintah DKI Jakarta telah menempuh cara memberikan penerangan yang baik kepada segenap aparat Pemerintah DKI Jakarta itu sendiri maupun kepada warga Ibukota antara lain melalui RT/RW-nya. Pemerintah DKI Jakarta menyadari bahwa apa yang selama ini dilakukan dalam pelaksanaan hasil sidang Umum MPR 1983 memerlukan dukungan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Untuk itu Pemerintah DKI Jakarta memandang organisasi PGRI sangat tepat untuk ikut menunjang dan berperan serta aktif dan positif dalam memasyarakatkan dan mensukseskan hasil Sidang Umum MPR 1983.

Sebagaimana kita maklumi bahwa tahun ini adalah merupakan tahun terakhir Pelita III

di mana selanjutnya kita akan memulai pelaksanaan Pelita ke IV. Dalam hubungan ini PGRI melalui konperensi Pusat tahun 1983 bermaksud untuk melakukan pembahasan dan pemikiran konsep bagi Pelita ke IV dalam bidang pendidikan yang akan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan seperti yang digariskan oleh GBHN, maka pendidikan nasional haruslah ditujukan pada pembinaan potensi manusia baik mental maupun fisiknya guna menghasilkan generasi aktif, kreatif serta cakap dan bertanggung jawab karena suatu proses pembangunan tidak akan berhasil tanpa didukung oleh tenaga-tenaga yang trampil dan berdedikasi.

Sesungguhnya kita menyadari pula bahwa masih banyak hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan sorotan serta pemikiran-pemikiran kita bersama dalam bidang pembangunan pendidikan, seperti perluasan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sistim administrasi dan management pendidikan, yang kesemuanya itu akan mendorong ke arah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang akan menunjang pelaksanaan wajib belajar.

Namun di samping itu perlu kiranya benar-benar kita sadari bahwa bidang pendidikan pada hakekatnya bukanlah semata-mata merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, tapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan orang tua.

Keterlibatan ketiga unsur ini adalah sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti Pemerintah dalam hal ini akan berusaha mencukupi fasilitas-fasilitas pendidikan dan tenaga guru, serta berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Masyarakat dan para orang

tua dalam hal ini membantu menciptakan suasana aman tentram bagi guru untuk mendidik dan membimbing serta mengarahkan anakanak didik untuk menjadi warga negara yang baik, serta berguna bagi bangsa dan negara. Khususnya konstansasi terhadap kondisi ibukota Jakarta:

1. Kondisi ibukota (dari Aspek masyarakat).
2. Masalah besar :
 - 1) masyarakat tertib.
 - 2) menyiapkan generasi yang tertib.

Sebagai akhir sambutan ini, kami mengharapkan kepada saudara-saudara peserta konperensi dan pengurus PGRI agar konperensi dapat menghasilkan konsep-konsep serta pemikiran sebagaimana disebutkan dalam thema konperensi ini agar dapat dijadikan bahan dan pegangan untuk memasyarakatkan dan mensukseskan hasil Sidang Umum MPR 1983 dan Pelita IV dalam bidang pendidikan dalam usaha kita bersama meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan nasional.

Semoga kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkahi usaha-usaha kita.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabaraka-tuh.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd.

R. SOEPRAPTO

Anak didik Seharusnya Tidak hanya Mengenal tetapi Dapat Menghayati Sejarah Nasional



Prof. Dr. Nugroho Notosusanto

Menteri P dan K Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, dalam rangka orientasinya ke unit-unit Utama, pada tanggal 5 April – 8 April 1983 berturut-turut Menteri ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, (PDM), Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K), Kopertis Wilayah III, Kantor Wilayah Departemen P dan K DKI Jakarta.

Mengemukakan misi yang akan dilaksanakan, Menteri mengatakan, ketika ia dipanggil Presiden untuk disertai jabatan Menteri P dan K, Presiden berpesan untuk memperhatikan 3 hal, yaitu melaksanakan wajib belajar; karena pembangunan memerlukan banyak tenaga pelaksana menengah, maka pendidikan menengah kejuruan seperti SMT dan Politeknik harus makin dikembangkan; dana anak didik tidak hanya mengenal tetapi hendaknya dapat menghayati sejarah nasional. Sebab sejarah nasional inilah yang membedakan pendidikan nasional di negara-negara lain. Sedangkan IPA dan science (sain) itu di mana saja sama. Tetapi sejarah nasional pasti lain. Dan itu yang membentuk kepribadian nasional.

– Bertumpu pada Staf

Selanjutnya Nugroho mengemukakan styl yang akan ditrapkan selama 5 tahun ia sebagai generalis, dan staf sebagai spesialis atau ahli-ahli. Menteri mengharapkan staf yang ahli di bidang masing-masing memberikan saran atau hasil pemikirannya kepada Menteri baik diminta atau tidak. Dipakai atau tidak sarana itu urusan Menteri. Dengan demikian para staf tidak boleh

menunggu secara pasif, tetapi hendaknya agar selalu aktif berinisiatif.

Memberikan kata-kata sambutannya selama acara orientasi dan perkenalan dengan seluruh karyawan Departemen P dan K, Menteri menjelaskan, ia tidak akan menggunakan kelompok-kelompok yang non struktural, mekanisme pemberian saran, dan usul hasil pemikiran. Dalam keadaan normal dapat saja disampaikan melalui hirarki yang ada. Dalam keadaan mendesak dapat disampaikan melalui telepon, dan disusul dengan nota. Sistem nita ini menurut Nugroho hendaknya dapat dikembangkan dan bahkan cukup ditulis tangan dengan sistem nomor atau point-point, singkat jelas. Kalau hal ini menyangkut yang berat dan mengandung rahasia misalnya, maka boleh saja datang ketemu Menteri, hubungi saja terlebih dahulu staf Menteri.

– Kembangkan diri

Sementara itu di Kopertis Wilayah III Menteri mengatakan, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) perlu makin dikembangkan, karena perguruan tinggi itu merupakan komplement perguruan tinggi negeri. Namun demikian, Menteri mengingatkan PTS perlu menghindarkan diri dari avonturisme. Karena jika PTS ada yang tidak benar, pasti akan merugikan masyarakat dan bahkan PTS itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat perlu dilindungi dari avonturisme di bidang pendidikan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan masyarakat dan mencemarkan PTS.

Bersambung ke hal 12

Sejarah Dapat Memberi Arti Bagi Perjuangan dan Kelestarian Bangsa Indonesia



Prof. Darji Darmodiharjo, SH

PARA peserta penataran dipikulkan tugas untuk membina para guru IPS-Sejarah, agar dapat meningkatkan mutu pelaksanaan bidang studi IPS-Sejarah. Hal tersebut dikemukakan Dirjen PDM, Prof. Darji Darmodiharjo, SH pada pembukaan penataran lokakarya Instruktur Pemantapan Kerja Guru IPS-Sejarah Pendidikan Menengah Umum, di Wisma Dirga, Cibulan-Bogor, tanggal 28 Maret 1983.

Di samping itu, dengan perantaraan para instruktur diharapkan pula sejarah dapat memberi arti yang lebih besar bagi perjuangan dan kelestarian bangsa Indonesia. Pelajaran IPS-Sejarah perlu dibuat dan diselenggarakan secara lebih mendalam, sehingga nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang luhur dari hidup kemanusiaan, khususnya nilai-nilai perjuangan nasional dapat diteruskan dan diwariskan kepada anak didik kita.

Di bagian lain Dirjen mengemukakan bahwa untuk mengubah cara guru mengajar dari mengejar keilmuan Sejarah menjadi sarana penanaman dan pewarisan nilai-nilai kehidupan dalam diri anak didik bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini memerlukan pengertian dan penanaman kemampuan teknik belajar mengajar yang cocok untuk tujuan itu. Namun dengan semangat pengabdian kita bersama disertai dengan ketekunan dan kerajinan dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa pastilah apa yang kita cita-citakan akan berhasil.

– Bahan Kurikulum

Menurut Dirjen PDM dalam rangka membangun manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, bahan kurikulum sebagai isi sistem pendidikan nasional dibagi menjadi 5 kelompok bahan program belajar mengajar, yaitu: yang berkenaan dengan sikap dan nilai hidup; yang berkenaan dengan pengetahuan; yang berkenaan dengan ketrampilan; yang berkenaan dengan bidang humaniora; dan yang berkenaan dengan kewarganegaraan.

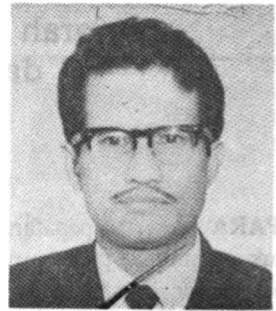
Bahan kurikulum yang dibagi menjadi 5 kelompok tersebut, terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri dalam proses perkembangan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, masing-masing unsur itu mempunyai tempat dalam proses pendidikan

Lebih lanjut dijelaskan dengan mengelompokkan seluruh program belajar ke dalam lima kelompok itu, maka dapatlah disusun suatu program berkelanjutan yang mencakup semua unsur pokok pendidikan nasional dalam perbandingan komposisi yang proposional sesuai dengan tujuan-tujuan khusus setiap jenjang dan jenis pendidikan. Di samping itu, berbagai hal yang berkaitan dengan kesadaran lingkungan serta kemampuan berkomunikasi juga harus diperhitungkan dalam pelaksanaan program belajar mengajar tersebut, dan bahannya diintegrasikan dalam setiap unsur program yang memungkinkan.

– Pendidikan Watak

Menyinggung masalah manusia Indonesia yang berkepribadian, Prof. Darji mengatakan, pendidikan watak mempunyai arti yang amat penting di dalam usaha membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian. Pendidikan watak dan pembentukan kepribadian baik di dalam seluruh unsur dan suasana pendidikan maupun khususnya dalam Pendidikan Agama, Pendidikan Moral Pancasila dan Budi Pekerti. Penataran lokakarya Instruktur Pemantapan Kerja Guru IPS-Sejarah tersebut diikuti 85 orang peserta, dan berlangsung selama satu minggu.

Masalah Relevansi Pendidikan dalam Perspektif Sejarah



Dr. Anwar Jasim, M. Ed.

PENGANTAR

Beberapa tahun yang lalu, ketika gagasan sekolah pembangunan mulai dilancarkan, seorang pengusaha swasta mengeluh, "Kami membutuhkan pantalon, tetapi mendapatkan celana pendek dari sekolah menengah kejuruan." Apa yang dikeluhkan pengusaha itu adalah suatu contoh yang menyangkut masalah relevansi merupakan salah satu masalah yang amat penting dan kritis yang dihadapi pendidikan nasional kita. Kegawatan masalah itu timbul akibat besarnya jarak antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan itu, terutama kebutuhan tenaga kerja yang trampil dan ahli bagi pembangunan nasional.

Masalah relevansi sebenarnya bukanlah masalah baru, tetapi sudah ada sejak zaman penjajahan. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan masalah ini mulai digarap secara sistematis dengan membangun sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak Orde Baru lahir masalah relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional mendapat prioritas utama. Hal ini dapat dimengerti sebagai sesuatu yang amat wajar karena Orde Baru adalah orde pembangunan.

PENGERTIAN RELEVANSI

Pengertian relevansi itu sendiri adalah sederhana, yaitu kaitan suatu usaha dengan tujuan yang ingin dicapai atau dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kalau saya haus saya membutuhkan air untuk menghilangkan haus saya. Usaha mendapatkan air adalah relevan dengan kebutuhan saya. Kalau saya minta air kepada seseorang dan orang itu memberi saya cerita tentang air,

maka itu tidak relevan dengan kebutuhan saya, karena cerita tentang air tidak akan dapat menghilangkan, bahkan menambah, haus saya, dan dapat dikatakan keseluruhan usaha saya tidak relevan dengan kebutuhan saya. Jadi, kalau kita berbicara tentang relevansi, yang pertama-tama harus ditanyakan relevansi terhadap apa.

Demikian juga halnya dengan masalah relevansi pendidikan. Usaha pendidikan, pembaharuan sistem pendidikan, perbaikan kurikulum dan metodologi pengajaran, harus relevan terhadap apa? Di sinilah mulai timbul kesukaran masalah relevansi. Masalah relevansi sangat bergantung kepada apa itu. Kalau apa itu belum jelas maka sukarlah kita menentukan program atau usaha untuk mencapai atau memenuhi apa itu karena kriteria relevansi itu ditentukan oleh apa itu.

Dalam contoh di atas, kriteria relevansi itu adalah seberapa jauh usaha saya telah berhasil menghilangkan haus saya. Nah, kalau dikatakan pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional, maka harus ditanyakan apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat dan pembangunan nasional, siapa siapa yang menentukan kebutuhan itu, bagaimana cara menentukannya, di mana dan kapan? Dan satu hal perlu disadari, yaitu kebutuhan itu berubah dengan berubahnya masyarakat dan lajunya pembangunan. Sekarang kita harus membayangkan bagaimana sukarnya menyusun program pendidikan nasional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah dan kebutuhan pembangunan akan tenaga kerja di segala bidang yang tidak dapat kita tentukan secara pasti (*fixed*) sebelumnya.

Kalau boleh kita sederhanakan, masalah relevansi sama halnya dengan seorang penembak

yang menembak sasaran yang bergerak, tetapi si penembak tidak mengetahui secara pasti posisi sasaran itu ketika peluru yang ditembakkan itu sampai ke tempat yang semula dituju. Selisih antara tujuan yang direncanakan semula untuk dicapai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan pembangunan pada saat pendidikan menghasilkan tamatan sesuai dengan tujuan yang direncanakan tetap akan menimbulkan kecaman dari masyarakat bahwa pendidikan itu tidak relevan. Kalau pada kasus si penembak, ia mendapat nilai yang rendah bila tidak mengenai sasarannya, dan dalam hal usaha pendidikan, bukan hanya kecaman, tetapi juga kerugian (tenaga, biaya, waktu, moril) yang tidak ternilai bagi bangsa kita.

Kita sama-sama mengakui bahwa salah satu kriteria keberhasilan pendidikan adalah relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Untuk itu haruslah kebutuhan masyarakat itu diterjemahkan dan dijabarkan dalam bentuk tujuan atau sasaran pendidikan agar dapat dijadikan standar atau tolok ukur untuk mengukur seberapa jauh usaha pendidikan itu berhasil dan relevan terhadap kebutuhan yang dijadikan titik tolak penjabaran tujuan dan sasaran pendidikan itu. Karena program dan usaha pendidikan itu disusun dan dilaksanakan berdasarkan tujuan dan sasaran itu relevansi dan keberhasilan pendidikan hanya bisa diukur sesuai dengan tujuan dan sasaran itu, bukan berdasarkan tujuan dan sasaran lain atau bukan pula kebutuhan masyarakat yang tidak dijadikan titik tolak penjabaran tujuan dan sasaran pendidikan. Para penyelenggara dan pelaksana pendidikan bertanggung jawab sepenuhnya dan wajib menerima kecaman dengan penuh kerelaan apabila terjadi kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kecaman adalah tidak adil atau tidak *fair* apabila usaha pendidikan itu tidak mencapai tujuan atau sasaran lain atau tidak relevan dengan kebutuhan lain yang tidak dijadikan titik tolak tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Atas dasar pengertian itu maka salah satu langkah paling strategis dan kritis dalam usaha peningkatan relevansi pendidikan adalah identifikasi kebutuhan masyarakat dan pembangunan (bukan hanya sekarang, tetapi beberapa tahun yang akan datang), menerjemahkan kebutuhan

itu ke dalam tujuan dan sasaran pendidikan, dan menjabarkan tujuan dan sasaran itu ke dalam program pendidikan.

RELEVANSI PENDIDIKAN PADA ZAMAN PENJAJAHAN

Tujuan utama penjajahan adalah eksploitasi ekonomi yakni mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari tanah jajahan bagi kemakmuran negeri penjajah. Untuk itu diperlukan tenaga kerja murah, rakyat Indonesia yang pasrah kepada penjajah, susunan masyarakat yang terbagi atas golongan penjajah dan golongan yang dijajah, serta susunan masyarakat tradisional feodal dipertahankan.

Susunan dan program pendidikan dan pengajaran kolonial sangat relevan dengan kebutuhan dan tujuan penjajah itu. Sekolah untuk anak-anak pribumi dan untuk anak-anak kaum penjajah terpisah, dengan perbedaan biaya dan mutu yang sangat menyolok. Sekolah untuk anak-anak pribumi (rakyat biasa) terpisah dari sekolah untuk anak-anak pribumi ningrat atau bangsawan. Tingkat sekolah tertinggi yang bisa dicapai anak-anak rakyat biasa adalah Sekolah Sambungan (*Vervolgschool*, sekolah desa 3 tahun + 2 tahun), dan jumlahnya pun dibatasi sesuai dengan banyaknya tenaga kerja murah yang dibutuhkan ekonomi kolonial Belanda. Apa yang diajarkan untuk anak-anak pribumi adalah sekedar kepandaian menulis, membaca, dan berhitung. Akan tetapi, semua itu relevan dengan kebutuhan kaum penjajah, dan sama sekali tidak relevan dengan kebutuhan dan aspirasi bangsa Indonesia.

Bagaimanakah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia? Pertanyaan ini dijawab antara lain oleh Ki Hadjar Dewantara dengan mendirikan perguruan nasional Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai satu alternatif untuk menggantikan sistem pendidikan kolonial. dengan salah satu asasnya yang terpenting kemerdekaan. Pendidikan dan pengajaran yang relevan bagi Ki Hadjar adalah pendidikan dan pengajaran yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan peri kehidupan rakyat, lahir dan batin. Sehubungan dengan itu salah satu tugas utama pendidikan dan pengajaran adalah memerdekakan manusia dalam arti berdiri sendiri (*zelfstanding*), tidak bergantung kepada orang lain (*onafhankelijk*) dan dapat mengatur dirinya

sendiri (*vrijheid, zelfbeschikking*). Pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk mencapai tujuan itulah yang relevan dan harus diajarkan kepada anak-anak Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan nasional. Hanya orang merdeka seperti itu yang dapat hidup bahagia dan sejahtera lahir dan batin.

Bagaimanakah pendidikan di bawah pendudukan tentara Jepang? Terlepas dari motif dilarangnya penggunaan bahasa Belanda oleh tentara Jepang, larangan itu sendiri telah memaksa pihak kita menggunakan bahasa Indonesia, yang sangat relevan dengan kepentingan kita dalam usaha membina persatuan dan kesatuan bangsa. Sungguhpun demikian semangat fasisme Jepang sangat tidak relevan dengan cita-cita demokrasi yang ingin kita kembangkan dalam mencapai kemerdekaan nasional.

RELEVANSI PENDIDIKAN PADA ZAMAN KEMERDEKAAN (1945 – 1965)

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, terbukalah kesempatan yang seluas-luasnya untuk membangun pendidikan dan pengajaran nasional yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Hanya beberapa bulan setelah proklamasi (akhir Desember 1945), Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) mendesak Kementerian Pengajaran RI untuk segera menyusun pedoman pendidikan baru yang disesuaikan dengan dasar susunan negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan supaya pendidikan dan pengajaran dijadikan alat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan negara dan bangsa, mengganti pendidikan dan pengajaran kolonial dengan pendidikan dan pengajaran nasional dengan cara revolusioner dengan mengingat kebaikan-kebaikan yang telah ada. Inilah arti dan penerapan relevansi pendidikan yang pertama-tama sesuai dengan aspirasi nasional, dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada zaman revolusi, relevansi pendidikan terutama ditekankan pada pencarian isi dan susunan pendidikan dan pengajaran yang bersifat dan bercorak nasional (sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan kebutuhan bangsa) dan demokratis (melayani kepentingan rakyat tanpa membedakan suku, golongan, agama dan tingkat sosial, dan ekonomi).

Dalam rangka usaha menjadikan pendidikan

dan pengajaran sebagai alat pembangunan pernah timbul gagasan dan rencana untuk mengadakan sekolah kerja (*doeschool, arbeitsschule*) sebagai ganti sekolah kolonial yang juga disebut sekolah dengar dan ngomong (*huister en praat-school*). Akan tetapi, dalam kesibukan menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, maka pada waktu itu orang sudah puas dengan menghilangkan isi pendidikan dan pengajaran yang berbau kolonial dan menggantinya dengan yang bersifat kebangsaan, serta susunan pengajaran atau persekolahan yang demokratis. Lahirnya Undang-Undang Dasar No. 4/1950 (yo. No. 12/1954) tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah dianggap sebagai prestasi besar dalam menyusun pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional dan demokratis berdasarkan Pancasila dan kebudayaan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 31 (hak tiap warga negara untuk mendapat pengajaran dan kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang) dan pasal 32 (kewajiban pemerintah memajukan kebudayaan Indonesia).

Dalam tahun lima puluhan, usaha peningkatan relevansi secara konsepsional dijabarkan dari Undang-Undang yang tertera di atas di samping mengadakan percobaan dan *tryout* khususnya pendidikan sekolah dasar, termasuk percobaan kewajiban belajar dengan memasukkan pendidikan ketrampilan yang fungsional bagi peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan khususnya. Salah satu puncak usaha mencari relevansi pada dekade itu adalah dikeluarkannya Instruksi Menteri Muda PP dan K tentang Sapta Usaha Tama (17-8-1959) dan Instruksi Menteri PD dan K tentang Pancawardhana (17-8-1961). Semua itu diadakan dalam rangka usaha menjadikan pendidikan dan pengajaran sebagai alat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, dengan mendidik anak-anak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang fungsional dan bermanfaat bagi pembangunan. Akan tetapi, usaha itu diadakan berdasarkan perencanaan yang kurang realistis dalam arti tidak didukung sarana yang diperlukan. Kita pernah mengenal adanya Rencana Sepuluh Tahun Kewajiban Belajar (1951–1960), yang gagal karena perencanaan yang kurang matang dan tidak didukung sumber yang diperlukan. Ki-

ta mengenal pula Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (1961–1969), yang juga gagal dan hanya rencana di atas kertas. Sungguhpun demikian, usaha-usaha peningkatan relevansi pendidikan setidaknya-tidaknya secara konseptual ada.

RELEVANSI PENDIDIKAN PADA MASA ORDE BARU (1965–SEKARANG)

Ada beberapa kelebihan usaha peningkatan relevansi pendidikan dalam masa Orde Baru dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pertama, masalah relevansi didekati secara empiris. Penelitian diadakan untuk mengetahui keadaan pendidikan kita yang sesungguhnya, terutama mengenai program pendidikan dan hasil yang telah dicapai. Di samping itu juga disurvei kebutuhan masyarakat terutama apa yang dikehendaki masyarakat agar dihasilkan pendidikan (dalam hal ini ketenagakerjaan) bagi pembangunan nasional. Mengenai hasil usaha penelitian ini, kita dapat membaca misalnya laporan Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (sekitar tahun 1970). Kedua dengan menggunakan data empiris itu perencanaan dapat dilakukan lebih sistematis dan realistis. Perencanaan peningkatan pendidikan STM misalnya, disesuaikan dengan kebutuhan tenaga (menurut jumlah dan keahlian) dalam sektor pembangunan industri. Ketiga, usaha peningkatan relevansi didukung oleh sarana terutama biaya yang diperlukan.

Di samping itu, dengan meningkatnya usaha-usaha pembangunan nasional di segala bidang, masyarakat (khususnya dunia usaha) mulai menilai hasil pendidikan. Banyak kecamatan yang menyangkut relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Kecamatan itu harus dianggap sebagai umpan balik dalam usaha perencanaan pendidikan yang lebih baik. Sungguhnya pihak penyelenggara dan pelaksana pendidikan sendiri merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai selama ini, walaupun mereka bersyukur semua hasil itu.

Rasa tidak puas itulah yang mendorong adanya usaha pembaharuan pendidikan nasional sekarang ini. Kita sedang menyaksikan adanya usaha pembaharuan yang diprakarsai oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daed Joesoef, dengan membentuk Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN) yang

telah selesai menyusun konsep pembaharuan pendidikan nasional yang bersifat semesta, menyeluruh, dan terpadu.

Semesta berarti pendidikan meliputi semua elemen kebudayaan: logika, etika, estetika, ketrampilan, nilai-nilai moral dan spiritual. Menyeluruh berarti program pendidikan harus memungkinkan anak-anak belajar di sekolah dan di luar sekolah, selama bersekolah dan sesudah keluar dari sekolah atau dengan kata lain belajar seumur hidup.

Terpadu berarti harus ada hubungan yang serasi antara semua jenis dan tingkat pendidikan formal dan nonformal tidak boleh terjadi isolasi, termasuk pendidikan madrasah dan pesantren, dan perlu adanya sistem pengelolaan terpadu pula.

Pada tahun-tahun lima puluhan, kita merasa puas dengan lahirnya Undang-Undang No.4/1950 (yo. No. 12/1954) tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, yang mengatur hanya sistem persekolahan umum saja. Puas, karena itu merupakan pelaksanaan UUD 1945 pasal 31, ayat 2, dan dengan itu kita resmi memiliki sistem persekolahan nasional sebagai pengganti sistem persekolahan kolonial.

Dengan meningkatnya usaha pembangunan bangsa dan negara, khususnya dalam pembangunan manusia seutuhnya dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, maka semakin lama dirasakan Undang-undang yang tertera di atas tidak relevan lagi dengan kebutuhan sekarang. Misalnya Undang-undang itu mengecualikan pendidikan persekolahan pada madrasah dan pendidikan masyarakat (orang dewasa). Ini berarti akan melestarikan sistem pendidikan yang dualistis (sistem persekolahan umum dan sistem persekolahan madrasah) yang berakibat menghasilkan dua macam warganegara dan dapat menghambat usaha persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional adalah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sesuai dengan bunyi dan jiwa pasal 31 UUD 1945 sehingga pembangunan manusia seutuhnya, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa itu lebih terjamin keberhasilannya.

Akhirnya perlu kita sadari bahwa semakin meningkatnya usaha dan hasil pembangunan nasional semakin meningkat pula kebutuhan

masyarakat dan semakin sukar menerjemahkan kebutuhan itu ke dalam tujuan dan sasaran pendidikan. Semakin jelas tujuan dan sasaran pendidikan akan semakin mudah orang menilai keberhasilan atau kegagalan usaha pendidikan, apalagi kalau diukur dengan kebutuhan masyarakat secara subyektif. Yang penting diperhatikan oleh para perencana pendidikan adalah mengembangkan cara-cara yang lebih efisien dan efektif menerjemahkan dan menjabarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke dalam program pendidikan nasional, sambil secara empiris mengumpulkan data tentang kebutuhan nyata masyarakat baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Ukuran relevansi pendidikan harus didasarkan pada tujuan dan sasaran pendidikan yang digaris-kan GBHN sebagai kriteria keberhasilan, dan se-

berapa jauh program pendidikan efisien dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan itu.

KESIMPULAN

Masalah relevansi pendidikan telah mulai timbul sejak kita sadari dan menjadi asas bahwa pendidikan itu harus dijadikan alat pembangunan bangsa dan negara. Semakin jelas kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional, semakin mudah diterjemahkan dan dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan program pendidikan nasional, dan semakin jelas relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional, serta semakin mudah mengukur tingkat keberhasilan usaha-usaha pendidikan.

PENDIDIKAN

Sambungan dari hal, 6

Sejarah nasional.

Dalam pengarahannya kepada para staf di lingkungan Ditjen PDM, Menteri mengemukakan selain tiga misi khusus itu, juga dibicarakan sejarah nasional secara mandalam. Jauh sebelum diangkat sebagai Menteri P dan K, Prof. Dr. Nugroho Notokusanto dan Dirjen PDM Prof. Dardji Dharmodihardjo, SH di panggil Presiden untuk membicarakan masalah pendidikan sejarah nasional.

Dikemukakan pelajaran sejarah nasional harus diusahakan sehingga meningkatkan penghayatan anak-anak didik terhadap sejarah nasional. Melalui pelajaran sejarah anak didik harus didorong mengenal tanggung jawab, cinta bangsa dan

negara serta menjunjung tinggi kehormatan bangsa sendiri.

Untuk itu perlu dipikirkan lebih lanjut mengenai sumber dari pada sejarah nasional itu. Boleh saja kran-kran-nya banyak tetapi sumbernya harus satu. Yang dimaksudkan sumber dalam hal ini adalah buku pegangan pelajaran sejarah itu sejak mulai TK s/d PT.

Pelajaran sejarah harus diajarkan secara efektif sehingga dapat dihayati, maka diperlukan instrumen-instrumen pendukung misalnya gambar-gambar, slide, yang dapat membantu untuk menimbulkan imajinasi anak dalam membayangkan masa yang sedang dibicarakan.

PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA DEKADE 80—AN



Drs. Darwis A. Sulaiman .

PENDAHULUAN

Setelah 35 tahun merdeka keadaan pendidikan di Indonesia masih perlu lebih banyak dipertanyakan apabila pembangunan pendidikan itu semakin memperlihatkan relevansi dan peningkatan mutunya. Secara mendasar usaha mempertanyakan pendidikan di Indonesia sudah dilakukan melalui Komisi .Pembaharuan Pendidikan Nasional yang diharapkan dapat memberi corak pendidikan pada dekade 80-an dan seterusnya. Di samping itu telah banyak pula timbul pikiran yang dikemukakan, baik oleh perorangan maupun oleh badan-badan, melalui ulasan dan tanggapan terhadap berbagai isu pendidikan yang sedang berkembang, seperti isu tentang relevansi kurikulum, mutu pendidikan, wibawa guru, perkelahian pelajar, eksplosif murid dan mahasiswa, dan pengangguran pemuda. Semua itu memberi petunjuk bahwa, di samping telah diperoleh hasil positif pembangunan pendidikan selama ini, masih perlu pula dicari cara yang lebih baik dan meningkatkan efektivitas penerapan cara yang telah dikenal khususnya dalam pengajaran di sekolah. Hal itu berarti pula bahwa perubahan dari keadaan sekarang mendesak diperlukan, baik konseptual dan, terutama, implementasinya.

Tulisan ini mencoba melihat beberapa segi pendidikan di Indonesia dan kaitannya dengan pembangunan pada masa yang akan datang, khususnya pada dekade 80-an yang baru dimasuki sekarang ini. Dekade 70-an adalah kenyataan yang telah dilalui. Apakah pada perkembangan berikutnya akan berubah kenyataan itu? Apa dan bagaimana?

KUALITAS HASIL PENDIDIKAN

Ada beberapa kenyataan yang dapat diangkat dari praktik pendidikan di Indonesia pada dekade yang lampau. Salah satu di antaranya ialah bahwa pendidikan di sekolah memperlihatkan kemajuan dalam kuantitas, baik berupa pertambahan yang besar dalam jumlah murid dan guru, dalam jumlah sekolah, alat dan biaya, maupun dalam usaha inovasi. Akan tetapi, kemajuan dalam kualitas belum menggembirakan, malah dalam beberapa segi hasil pendidikan di sekolah menunjuk pada kekhawatiran, misalnya dalam perkembangan segi efeksi kepribadian murid, dalam kemampuan bernalar, berkreasi, dan dalam segi perkembangan moral karakter seperti yang akhir-akhir ini sering dipersoalkan.

Kemajuan dalam segi kuantitas tidak berarti dengan sendirinya membawa kemajuan pada kualitas. Tidak selalu bahwa dengan bertambah banyak biaya pendidikan, hasil pendidikan akan lebih baik (Coleman, et.al. 1966). Seringkali kemajuan dalam segi kuantitas itu memperbanyak dan memperumit problema yang telah ada. Misalnya, memperbanyak tenaga guru yang tidak dipersiapkan dengan baik akan menimbulkan persoalan bagaimana menatar mereka tanpa merugikan murid karena mereka sedang sibuk ditatar. Menambah banyaknya buku pelajaran tidak berarti guru akan mampu menggunakan sebagai sumber bahan pengajaran. Demikian pula halnya apabila yang bertambah banyak itu gagasan baru yang hanya tumbuh dari "atas" dan tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa guru untuk melaksanakannya di lapangan. Pembaharuan kurikulum tidak akan banyak memberi pengaruh

pada peningkatan kualitas hasil pendidikan apabila yang baru itu hanya kurikulum dalam arti rencana, konsep atau *intention* (Cohen, et.al. 1979), tetapi tidak diikuti dengan pembaharuan kurikulum dalam arti *reality*, yaitu pengajaran atau pelaksanaan rencana itu dalam proses interaksi pengajaran. Lebih-lebih lagi masalah rumit akan timbul kalau yang bertambah adalah jumlah murid yang perlu mendapat pendidikan. Adalah kenyataan bahwa setiap tahun pertambahan murid dan mahasiswa semakin besar dan masalah yang ditimbulkannya masih tetap belum terselesaikan sekalipun telah sepuluh tahun dikerjakan dengan pertambahan gedung sekolah dan alat perlengkapannya.

Harus diakui bahwa persoalan mutu (kualitas) hasil pendidikan tidak mudah ditingkatkan. Di negara seperti Amerika Serikat sendiri revolusi dalam peningkatan mutu baru diadakan setelah lebih dahulu diadakan dua revolusi lainnya, yaitu revolusi dalam kuantitas dan revolusi dalam persamaan kesempatan (Ehlers, 1973:109). Namun, revolusi dalam perbaikan mutu itu sudah dimulai sejak lama meskipun sampai sekarang kekurangannya tetap selalu menjadi bahan kritik. Apabila dipahami bahwa kemajuan usaha pemerataan pendidikan (kuantitas) tidak selalu menunjang perbaikan mutu, perlu pula dipahami bahwa memperhatikan dan melakukan berbagai usaha untuk melaksanakan pemerataan tidak berarti mengurangi usaha atau melalaikan faktor peningkatan mutu hasil pendidikan. Keduanya harus berjalan bersamaan sebab tidak dapat ditanggguh usaha peningkatan mutu sampai persoalan pemerataan kesempatan terselesaikan. Demikian pula sebaliknya seperti telah ditegaskan dalam Repe-lita III bahwa usaha-usaha peningkatan mutu dilakukan tanpa mengabaikan usaha perluasan dan pemerataan pendidikan.

Persoalan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan (kuantitas) tidak persis sama maknanya dengan persamaan kesempatan (ekualitas). Pemerataan menyangkut soal jumlah, merata anak mendapat pendidikan, tetapi tidak berarti setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya yang satu dengan yang lain berbeda-beda itu. Persamaan kesempatan belum tentu berarti merata, tetapi tekanan diletakkan pada kesempatan bagi setiap anak untuk mengembangkan dirinya sesuai

dengan kemampuannya masing-masing. Pemerataan kesempatan merupakan percerminan asas keadilan sosial, sedangkan persamaan kesempatan berkaitan dengan asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan berhubungan dengan perlakuan terhadap manusia, yaitu manusia yang pada hakikatnya memiliki perbedaan individual. Baik pemerataan maupun persamaan kesempatan keduanya berkaitan dengan demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan tidak berarti memberi tekanan pada adanya kesempatan yang sama dengan melalaikan mutu, tetapi bermakna bahwa semua anak didik, betapapun beraneka ragam bakat dan kemampuan mereka, perlu mendapat bantuan sebanyak mungkin agar mereka dapat mengembangkan bakat yang beraneka ragam itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing sehingga dengan demikian mereka dapat memberi sumbangan yang lebih besar bagi kehidupan diri mereka sendiri dan masyarakatnya. Dengan kata lain demokrasi pendidikan berkaitan erat dengan mutu setiap anak didik sebagai hasil dari kesempatan memperoleh pendidikan itu dan bukan sekedar membuka kesempatan untuknya.

Adalah tidak tepat mengatakan bahwa semua murid yang telah menyelesaikan sekolah menengah telah dewasa dan terdidik karena banyak bukti yang menunjukkan bahwa tamatan sekolah menengah itu (demikian juga para mahasiswa) kurang matang jiwanya, kurang berkarakter, kurang memiliki kematangan sosial seperti misalnya sikap sopan santun, dan saling menghargai, dan mereka seakan-akan kurang mampu mengembangkan disiplin diri, padahal semuanya itu merupakan hal yang penting dalam kaitan dengan mutu hasil pendidikan. Di sekolah kemampuan murid yang berbeda-beda belum mendapat perhatian untuk dikembangkan dengan semestinya dan seringkali dipandang bahwa hanya murid yang kuat dalam segi akademik saja yang pandai, sedangkan mereka yang kuat dalam segi nonakademik kurang mendapat perhatian. Dengan kata lain sekolah masih sangat menghargai segi kognisi kepribadian murid dan kurang mendapat perhatian terhadap segi efeksi. Perlu dipertanyakan mengapa keadaan menjadi demikian.

RELEVANSI SISTEM DAN STRATEGI PENDIDIKAN

Berkaitan dengan soal kualitas pendidikan ialah soal relevansi pendidikan. Melihat kenyataan hasil pembangunan pendidikan selama ini, antara lain dalam kaitannya dengan perkembangan kepribadian murid dan kemampuan mereka untuk melakukan suatu pekerjaan bagi kehidupannya setelah mereka tamat, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem dan strategi pendidikan di Indonesia masih belum relevan dengan (1) pembinaan setiap murid sebagai persona dan (2) tuntutan kehidupan baru kini dan hari esok.

Relevansi dengan Murid Sebagai Persona

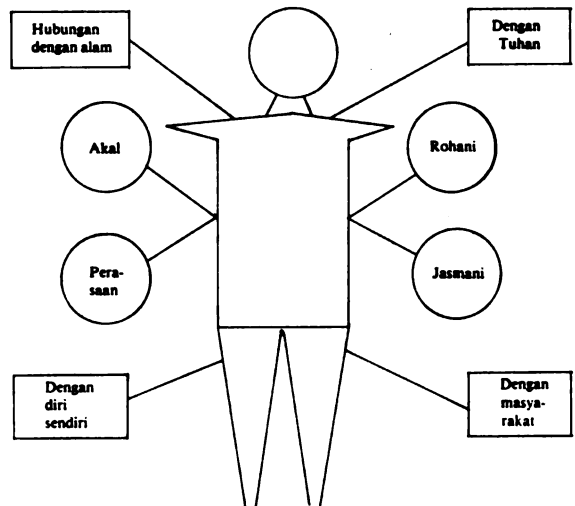
Masalah ini menyangkut persoalan sejauh mana rencana dan praktik pendidikan di sekolah telah tertuju pada pengembangan setiap murid seperti yang telah dirumuskan menjadi tujuan pendidikan, yaitu yang intinya ialah mendidik manusia (seorang warga negara Indonesia) yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, tinggi budi pekerti, kuat kepribadian dan tebal semangat kebangsaan, dan merupakan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan negara. Tujuan itu telah dirumuskan baik dalam GBHN dan Repelita III maupun dalam Konsep Sistem Pendidikan Nasional yang dihasilkan oleh Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional.

Manusia Indonesia yang menjadi cita-cita itu ialah manusia seutuhnya, manusia yang lengkap dan seimbang perkembangan semua segi kepribadiannya. Manusia seutuhnya itu tiada lain persona yang mampu menjangkau segenap hubungan dengan dirinya, yaitu hubungan dengan Tuhan, dengan alam sekelilingnya, dengan manusia lain dalam kehidupan sosial yang konstruktif, dan dengan dirinya sendiri. Persona yang demikian pada dirinya terdapat kepribadian terpadu karena baik akal pikirannya, maupun perasaan, rohani dan jasmaninya berkembang sepenuhnya. Integrasi perkembangan jasmani, akal pikiran, perasaan, dan moral seseorang menjadi manusia yang utuh merupakan tujuan pendidikan yang sangat mendasar sifatnya. Artinya tujuan demikian bukan hanya untuk pendidikan bangsa Indonesia, tetapi untuk semua umat manusia di dunia. Bagi bangsa Indonesia yang berpandangan hidup Pancasila tujuan demikian menjadi sangat tepat dan

dapat diwujudkan karena falsafah Pancasila membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seseorang untuk membina hubungannya dengan Tuhan, dengan alam, dengan masyarakat dan dengan dirinya sendiri, serta untuk mengembangkan akal pikiran, perasaan, rohani dan jasmaninya, yang semua itu memungkinkan ia mengaktualisasikan dirinya. Gambaran manusia Indonesia seutuhnya dapat dilukiskan dengan skema di sebelah ini.

Ada sejumlah pandangan hidup yang tidak membuka semua kesempatan bagi seseorang untuk melakukan hubungannya dan untuk mengembangkan segenap segi kepribadiannya seperti yang digambarkan di atas. Pandangan hidup Pancasila bukan saja memungkinkan semua itu, tetapi juga keselarasan dari semuanya itu yang tercermin dalam persona yang utuh adalah tujuan yang ingin diwujudkan.

Persoalannya ialah bagaimana manusia seutuhnya itu dapat diwujudkan. Melalui pendidikan hal itu tidak dapat diwujudkan apabila semua manusia dipandang sama, semua murid di sekolah diperlakukan sebagai suatu kelompok saja tanpa memperlakukannya sebagai seorang individu yang memiliki perbedaan satu sama lain. Setiap anak mempunyai kepribadian dan tugas pendidikan untuk membantu perkembangan kepribadian anak itu segenap dan selengkap-lengkapnya.



Gambar model manusia seutuhnya

Sekolah di Indonesia sekarang ini pada umumnya belum berhasil membantu perkembangan

murid secara individual. Sekolah masih memperlakukan murid sebagai kelompok, yang membuat situasi kelas sebagai ukuran untuk semua murid. Sebenarnya kita bukan mengajar murid secara kelompok, tetapi mengajar mereka secara individual yang datang kepada kita secara kelompok. Seperti dikatakan oleh Bloom (1971) bahwa penekanan haruslah diletakkan pada pengertian mutu pengajaran dalam arti apa yang memberi pengaruh kepada murid secara individual dan bukan kepada kelompok. Apabila bertolak dari asumsi bahwa setiap murid memerlukan perlakuan yang berbeda dalam proses belajar-mengajar dan apabila mutu pendidikan ditafsirkan dalam makna taraf di mana pendekatan pengajaran tertuju kepada murid tertentu, maka strategi dan usaha pelaksanaannya akan lain daripada yang umumnya digunakan oleh guru selama ini. Dengan menggunakan metode ceramah dan metode tanya jawab yang tidak efektif dapatlah dipahami betapa guru di sekolah memperlakukan muridnya sebagai kelompok. Padahal ada murid yang memang memerlukan penjelasan dan contoh yang kongkrit dibandingkan dengan murid yang lain; ada murid yang lebih banyak memerlukan pujian daripada murid yang lain; ada pula murid yang lebih banyak memerlukan latihan daripada murid yang lain yang barangkali cukup satu kali saja.

Keadaan praktik pendidikan seperti itu berarti bahwa sistem dan strategi pendidikan belum relevan dengan cita-cita pembentukan murid sebagai persona sekaligus sejumlah gagasan pembaharuan telah dicoba dikembangkan, seperti sistem modul, metode diskusi, dan pendekatan kompetensi.

Relevansi dengan Tuntutan Kehidupan Baru

Masalah ini berhubungan dengan persoalan sejauh mana sekolah telah mampu mempersiapkan murid untuk dapat bekerja dengan produktif dalam masyarakat setelah mereka tamat belajar

Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia telah berubah dengan cepat. Demikian pula halnya dengan kehidupan sehingga pendidikan di sekolah tertinggal dari kehidupan dalam masyarakat, dan ketinggalan itu memberi pengaruh pada kesiapan anak didik untuk menjalani kehidupannya.

Sekarang Indonesia sedang bergerak dari ke-

hidupan masyarakatnya yang agraris tradisional menuju kehidupan modern yang kompleks dan teknologis. Pendidikan mau tidak mau harus memperhatikan perubahan itu dan karena itu pendidikan harus relevan dengan tuntutan pekerjaan dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang sedang berubah itu, lebih-lebih dalam masyarakat yang lebih kompleks di masa depan, lapangan pekerjaan bukan saja banyak, tetapi juga untuk mendapatkannya sangat bergantung pada pengetahuan dan ketrampilan yang dituntut oleh pekerjaan itu. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin menonjol dan pengangguran sudah tentu tidak dapat dihindari apabila pendidikan tidak berhasil membekali murid dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidupnya. Sekarang ini untuk pertama kalinya dalam sejarah timbul fenomena baru, yaitu di beberapa negara masyarakatnya mulai menolak tamatan sekolah (Faure, 1972: 14). Manusia Indonesia seutuhnya yang menjadi cita-cita bukanlah manusia yang menjadi beban bagi dirinya, keluarganya, badan bagi orang lain, atau beban negara. Manusia Indonesia harus memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri yang disertai pengabdian dan tanggung jawab. Pendidikan harus membantu murid memiliki kemampuan dan sikap itu. Pembangunan sekolah kejuruan perlu diperbanyak dan sistem pendidikan di sekolah harus relevan dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi ciri kehidupan abad ini. Namun, kehidupan modern yang teknologis bukanlah tujuan dan bukan pula suatu kebenaran yang objektif yang membahagiakan manusia. Memang ada kecenderungan orang berkesimpulan bahwa kehidupan modern dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan memungkinkan semua masalah manusia di dunia ini dapat dipecahkan. Akan tetapi, kesimpulan demikian adalah tidak benar karena kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua masalah hidup manusia dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaliknya ilmu dan teknologi dapat membahayakan nilai yang menentukan martabat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi hanyalah alat dan alat itu akan membawa malapetaka tanpa didasari dengan keyakinan oleh pemakainya, yaitu keyakinan kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dengan segala alatnya. Me-

numbuhkan keyakinan itu adalah tugas pendidikan.

Persoalan pendidikan yang penting ialah bagaimana mempersiapkan anak didik untuk memanfaatkan hubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Perubahan kehidupan yang cepat karena ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menimbulkan kesulitan pada anak didik untuk menyesuaikan diri tanpa menimbulkan konflik pada dirinya karena ia berhadapan dengan nilai baru yang berbeda dengan nilai yang telah dikenal dan dimilikinya. Apabila murid tidak terbuka terhadap perubahan dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan yang cepat itu, maka kemajuan dalam hidupnya akan sulit dicapai. Karena itu, tugas pendidikan, seperti diperingatkan oleh Rogers (Ehlers, 1973) dan Toffler (1972), haruslah mempersiapkan seseorang untuk bersikap terbuka terhadap perubahan yang mengandung manfaat, yang mampu melakukan adaptasi dan belajar terus-menerus. Untuk itu maka pembangunan pendidikan harus relevan dengan kehidupan dalam masyarakat di Indonesia hari ini dan hari esok. Di samping perlu memperbanyak sekolah kejuruan guna mempersiapkan tenaga kerja, strategi dan metode pengajaran pada sekolah-sekolah umum terutama perlu diperbaharui sehingga lebih efektif usaha mewujudkan tujuan pendidikan.

Relevansi sistem pendidikan dengan faktor anak didik dan tuntutan kehidupan masyarakat seperti yang telah dikemukakan di atas, sesungguhnya bukanlah hal yang belum tersentuh dalam usaha pembangunan pendidikan selama ini, akan tetapi relevansi itu baru terbatas pada konsep dan belum mendapat tekanan pada pelaksanaannya. Dalam Repelita III dengan jelas dicantumkan permasalahan pendidikan, antara lain diperlukan pembangunan pendidikan yang lebih serasi bagi pembangunan. Pada tingkat konsepsi banyak persoalan telah dijangkau, tetapi pada tingkat operasional masih belum banyak berhasil. Hal demikian terutama disebabkan faktor cara mendekati masalah peningkatan mutu dan masalah relevansi pendidikan, antara lain menyangkut strategi dan metode pengajaran yang digunakan oleh guru-guru di sekolah.

TIGA MACAM PENDEKATAN

Apabila pada dekade 80-an pendidikan di

Indonesia akan diberikan tekanan pada peningkatan mutu anak didik yang relevan dengan perkembangan dirinya sebagai persona dan relevan dengan tuntutan kehidupan yang semakin kompleks, maka pada gilirannya strategi dan metode yang akan digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan itu perlu mendapatkan tekanan pula. Dalam hubungan ini, sebelum sampai pada taraf menetapkan strategi dan metode perlu ditetapkan cara mendekati masalah peningkatan mutu dan relevansi pendidikan itu. Ada tiga macam pendekatan pendidikan yang kiranya perlu dikembangkan, yaitu (1) pendekatan inkuiri, (2) pendekatan kompetensi, dan (3) pendekatan manusiawi. Ketiga pendekatan ini berkaitan dengan kritik yang banyak dilontarkan kepada sekolah, terutama di Amerika Serikat, selama dua dekade yang lampau. Di antara kritik itu menyatakan bahwa sekolah, guru, dan sistem pendidikan gagal dalam melaksanakan fungsinya, yaitu dalam meningkatkan mutu kemampuan akademik dan dalam membuat sekolah lebih manusiawi sifatnya.

Pendekatan Inkuiri dalam Pengajaran.

Pada dasarnya gaya atau metode mengajar terbagi atas dua macam, yaitu yang berpusat pada guru dan yang berpusat pada murid. Metode yang sangat berpusat pada guru ialah metode menjelaskan dengan ceramah (*expository*) dan yang berpusat pada murid dikenal dengan metode mencari keterangan dan memecahkan persoalan (inkuiri) atau lebih tepat disebut pendekatan *expository* dan pendekatan inkuiri.

Di antara kedua ekstrim berpusat pada guru dan pada murid itu terdapat sejumlah teknik atau metode mengajar seperti metode diskusi, dan bekerja kelompok.

Sudah waktunya pada dekade 80-an sekolah-sekolah di Indonesia mengadakan pembaharuan dalam metode pengajaran. Kalau selama ini sekolah sangat menekankan pada penggunaan pendekatan *expository* maka dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sudah perlu segera guru lebih mengarahkan perhatian pada bagaimana menggunakan dan mengembangkan pendekatan inkuiri. Mutu pengajaran tidak dapat ditingkatkan apabila guru hanya menggunakan metode ceramah sebab murid tidak terdorong untuk belajar dengan giat. Untuk dapat mengembangkan kemampuan bernalar, mencipta dan

mengembangkan sikap sosial, moral dan tanggung jawab pada murid kepada mereka harus diberikan cukup kesempatan untuk bergiat. Muridlah yang harus mencari dan memecahkan masalah bukan guru berbuat untuk mereka. Dengan pendekatan inkuiri murid diberi kesempatan yang luas untuk melakukan berbagai kegiatan belajar yang konstruktif, bukan hanya mendingarkan dan menghafal. Dengan inkuiri murid dapat mencari pengetahuan sendiri atau bersama-sama dari berbagai sumber dan bukan hanya dari guru dan buku. Dengan inkuiri murid terdorong untuk mengembangkan bakat dan minatnya karena kesempatan terbuka untuk itu, dan ini berarti mendorong pertumbuhan diri mereka menjadi persona sebagaimana yang dituju dengan cita-cita pembangunan manusia seutuhnya. Pendekatan inkuiri akan membantu murid mengembangkan kemampuan berpikir, merasa dan berbuat, dan menimbulkan keseimbangan antara kemampuan itu. Apabila keseimbangan itu dapat diperoleh, keseimbangan itu dapat menambah motivasi murid, dapat membuat pengetahuan yang diperolehnya tahan lama dan dipahami lebih baik serta dapat pula digunakan pengetahuan itu dalam situasi kehidupan. Murid-murid akan terus melakukan pekerjaan yang serupa atau berhubungan lama setelah pekerjaan itu selesai dilakukannya.

Penggunaan metode inkuiri bertolak dari asumsi bahwa kegiatan belajar yang maksimum akan terjadi apabila murid secara aktif terlibat dalam situasi belajar-mengajar (Michaelis, 1968-16). Menurut Kaltsounis (1971) inkuiri itu dipandang sebagai cara belajar yang alamiah; karena itu, sebagai suatu pendekatan dalam pengajaran, inkuiri merupakan implementasi cara belajar yang alamiah itu.

Dengan menggunakan pendekatan inkuiri tidak berarti pendekatan *expository* atau metode ceramah perlu dihilangkan dalam pengajaran. Metode ceramah mungkin paling tepat untuk memindahkan pengetahuan, sedang inkuiri mungkin lebih efektif dalam usaha mengembangkan daya berpikir dan berbuat pada murid-murid. Dengan demikian, tidak berarti bahwa metode ceramah jelek dan metode inkuiri harus baik. Tingkat keberhasilan penggunaan inkuiri sangat bergantung pada filsafat guru, kepada cara ia memahami inkuiri itu. Di samping itu kemam-

puan bertanya secara efektif merupakan unsur yang penting dalam mengembangkan metode inkuiri. Semakin tinggi mutu bertanya semakin tinggi tingkat inkuiri. Baik guru maupun murid-murid perlu mengajukan pertanyaan yang dapat menambah dimensi mutu berpikir yang oleh murid hal demikian sulit dapat dicapai dengan metode lain.

Sikap untuk menggunakan lebih banyak cara yang membuat murid aktif merupakan sikap yang demikian dan pengembangan kemampuan menggunakan pendekatan pendekatan cara yang membuat murid aktif merupakan sikap yang inovatif dari guru. Proses membina sikap yang demikian dan pengembangan kemampuan menggunakan pendekatan pendekatan inkuiri memerlukan waktu lama. Karena itu, usaha pembaharuan pengajaran untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan tidak dapat ditunda. Pendekatan inkuiri hendaknya telah menjadi bagian dari program guru dalam melaksanakan tugasnya pada dekade 80-an ini.

Pendekatan Kompetensi dalam Pengajaran

Dalam melaksanakan pengajaran biasanya guru bertolak dari mata pelajaran dan bahan pelajaran yang akan diajarkan dan tidak jelas tujuan khusus apa atau kompetensi apa yang diharapkan dimiliki oleh murid setelah pelajaran selesai diajarkan. Apalagi kalau guru memperlakukan murid semuanya sama sebagai suatu kelompok yang harus melakukan kegiatan yang sama untuk tujuan yang sama pula sudah tentu tidak jelas kemampuan apa yang telah dapat dikembangkan oleh murid sesuai dengan perbedaan murid itu masing-masing.

Pendekatan kompetensi dalam pengajaran sebaliknya bertolak dari tujuan khusus pengajaran berupa kompetensi tertentu yang harus dicapai oleh murid. Kompetensi itu dapat mengambil bentuk pengetahuan dan pemahaman (kognitif), nilai dan sikap (afektif), dan penampilan dalam melakukan tugas tertentu secara langsung (performans). Atas dasar kompetensi itu murid melakukan bermacam kegiatan belajar, biasanya lebih banyak secara individual, karena pendekatan kompetensi pengajaran biasanya diberikan dalam bentuk modul, yaitu berupa paket-paket kecil yang telah dipersiapkan oleh guru, yang masing-masing secara jelas diarahkan

untuk mencapai perangkat kompetensi tertentu yang dikehendaki.

Dengan pendekatan kompetensi kemampuan masing-masing murid dapat dibimbing dan dikembangkan. Murid terdorong untuk aktif belajar mencari keterangan dari berbagai sumber untuk menyelesaikan tugas modul tertentu. Dengan menetapkan kompetensi yang mencakup segenap segi kepribadian murid, diharapkan dengan pendekatan kompetensi dapat dituju kepada pembentukan persona murid seutuhnya. Dengan pendekatan kompetensi terkandung pula nilai penting yang diperlukan dalam pendidikan, yaitu bahwa setiap pihak yang berkepentingan dapat mengetahui apa yang dihasilkan oleh sekolah. Murid memiliki kompetensi tertentu yang diharapkan relevan dengan yang diinginkan oleh pihak-pihak itu (guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah) sehingga hal itu merupakan semacam pertanggung jawaban sekolah atau akuntabiliti terhadap tugas pendidikan yang dibebankan kepadanya.

Pendekatan Manusiawi dalam Pengajaran

Sudah tentu tidak ada pendekatan yang sempurna tanpa kelemahannya. Kelemahan pendekatan kompetensi di antaranya ialah bahwa murid lebih banyak bekerja sendiri sehingga dipandang kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dalam hubungan sesama manusia. Apalagi kalau dalam usaha menyelesaikan suatu modul murid sangat banyak menggunakan alat belajar elektronik sehingga pengajaran sering dikritik sebagai kurang manusiawi sifatnya. Di samping itu sekalipun dengan pendekatan kompetensi ingin dikembangkan seluruh segi kepribadian murid, tetapi guru cenderung menitik beratkan pengembangan segi kognitif dan performans sebab kompetensi dalam segi itu lebih kongkrit untuk dirumuskan, dan dinilai. Berbeda dengan kompetensi dalam segi afektif yang tidak mudah untuk dirumuskan, dicapai dan dinilai.

Di antara sekian banyak alasan kritik yang dilancarkan kepada sekolah oleh para pendidik, ahli ilmu jiwa, dan ahli filsafat selama dua dekade yang lalu ialah bahwa sekolah kurang memperhatikan segi afektif kepribadian murid. Unesco sendiri telah menegaskan bahwa salah satu tujuan khusus pendidikan ialah mengembangkan mutu

afeksi terutama dalam hubungan seseorang dengan orang lain (Faure, 1972: 156). Guru lebih banyak memusatkan perhatian kepada mengajar dan bukan mendidik. Hal demikian tercermin dari pernyataan anak-anak SMA di Jakarta yang berkelahi baru-baru ini (Kompas: 6 Nopember 1980). Karena sibuknya, guru hanya mengajar atau mengembangkan segi kognitif murid dan tidak ada waktu untuk mengenal mereka, bergaul, dan membimbing perkembangan pribadi mereka. Bimbingan terhadap perkembangan emosi, moral, rohani, kasih, tanggung jawab menjadi terlalaikan. Padahal hidup manusia memerlukan semua segi itu untuk dapat hidup dengan sesuai. Hubungan sesama murid dan antara murid dan personil lainnya di sekolah kurang pula mendapat perhatian sekolah, sedangkan untuk hidup bermasyarakat murid memerlukan bekal tentang bagaimana hidup bersama secara baik. Bila tidak demikian maka tidak heran kalau murid tidak merasa segan untuk berkelahi sesamanya, tidak mampu mengendalikan emosi, menghargai dan merasakan perasaan orang lain, tidak berkembang rasa kasih pada dirinya atau rasa tanggung jawab akan perbuatannya. Kekurangan peranan sekolah selama ini dalam pembinaan segi afektif kepribadian murid dapat diatasi apabila sekolah menggunakan pendekatan manusiawi atau pendekatan *humanitic* dalam pengajaran. Dengan pendekatan ini dari guru dapat diharapkan lebih banyak mendidik dari pada mengajar. Sebagai manusia maka murid diperlakukan sesuai dengan kodrat dan hakikatnya sebagai manusia, sebagai persona. Pendekatan manusiawi dapat menjangkau manusia sebagai persona seutuhnya, dan bukan hanya menjangkau segi akal pikirannya saja. Pendekatan manusiawi memberi kesempatan pada murid untuk memahami dirinya sendiri di samping memahami orang lain, menilai dirinya sendiri untuk kemudian mampu mengubah dirinya dan menempakan dirinya secara sesuai di tengah-tengah dunianya. Pendekatan manusiawi membuka kesempatan pada setiap murid untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin karena pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa murid berbeda antara yang satu dengan yang lain. Karena bertolak dari hakikat manusia, maka sesuai dengan pendekatan manusiawi kepada murid perlu diberi kebebasan

untuk menentukan sesuatu tentang dirinya, perlu dihargai, dicintai, dan karena ia sedang berkembang dan lemah perlu mendapatkan bimbingan sehingga ia dapat mengadakan aktualisasi dirinya sendiri.

Demikianlah tiga macam pendekatan yang perlu dikembangkan dalam pengajaran pada sekolah-sekolah di Indonesia pada dekade ini dan seterusnya dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan dan membuat pendidikan lebih relevan. Ketiga pendekatan ini ada kebaikan dan juga kelemahannya. Dengan menggunakan ketiganya diharapkan kelemahan dan kebaikan itu dapat saling mengisi. Namun, menjadi persoalan ialah apakah dalam keadaan sistem dan kebiasaan praktik pendidikan pada sekolah di Indonesia sekarang ini ketiga pendekatan itu mungkin digunakan. Seperti diketahui bahwa pendekatan kompetensi telah menjadi kebijaksanaan pendidikan di Indonesia untuk dikembangkan di sekolah dan di lembaga pendidikan guru, dan dalam praktiknya kesulitan masih banyak dihadapi. Kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan ketiga macam pendekatan itu kiranya akan dapat diatasi apabila sekolah melakukan sejumlah perubahan.

SEKOLAH PERLU BERUBAH

Perubahan yang perlu dilakukan oleh sekolah ialah antara lain sebagai berikut:

(1) Jadwal pelajaran jangan diatur terlalu kaku, tetapi harus bersifat lebih luwes terutama pada sekolah dasar dan sistem guru kelas. Ini memang sulit dilakukan karena sekolah telah terbiasa dengan pergantian pelajaran pada waktu tertentu. Namun perubahan perlu dilakukan supaya sekurang-kurangnya jangan sampai guru seperti dikejar-kejar waktu sehingga yang dipentingkan ialah menyelesaikan bahan pelajaran untuk diajarkan dan bukan pemahaman murid.

(2) Keadaan gedung sekolah, ruangan kelas, dan pengaturan kelas hendaklah yang memungkinkan murid-murid dapat bergerak dengan bebas dan belajar aktif dan tidak diam dengan kaku. Hal ini berkaitan dengan kesediaan guru untuk memberi kebebasan kepada murid guna melakukan kegiatan belajar tanpa harus duduk dengan tenang menghadap guru. Hal ini juga akan dirasa sulit untuk diubah kalau sekolah

khawatir akan tidak ada disiplin murid dan kalau disiplin diartikan sebagai hal yang terpisah dari kegiatan mengajar.

(3) Sekolah perlu memberi kesempatan yang lebih banyak kepada murid untuk bekerja sama dan bukan melakukan persaingan. Persaingan mempunyai beberapa kelemahan, antara lain bahwa persaingan hanya mendorong murid yang merasa ada kesempatan untuk menang sedangkan murid yang tidak merasa demikian bukan saja tidak terdorong malah akan takut dengan persaingan itu. Apabila persaingan itu dipandang sangat penting, murid cenderung untuk berusaha dengan cara apa saja berusaha memenangkan persaingan itu sekalipun melalakan segi tanggung jawab sosial dan moral. Jelasnya persaingan dapat menjurus kepada suasana yang tidak bersifat manusiawi. Jadi, apabila sekolah bertujuan mempersiapkan murid yang akan menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat, maka kepada mereka harus diajarkan cara bekerja sama dan bukan berkompetisi. Mencari pemuncak kelas dan menjurus kepada persaingan apabila murid-murid tidak diberi pengertian maksudnya dan mereka kurang berkesempatan bergaul dan bekerja sama satu sama lain.

(4) Sistem ujian perlu diubah dalam arti jangan hanya guru yang menilai murid, tetapi murid sendirinya perlu diberi kesempatan untuk menilai diri mereka sendiri. Hal penilaian terhadap kemajuan mereka (baik formatif maupun sumatif) hendaklah dengan mempertimbangkan hasil penilaian diri sendiri itu. Mungkin penilaian diri sendiri itu agak sulit bagi murid kelas rendah, tetapi tidak berarti tidak dapat dilakukan sama sekali. Penilaian semacam itu bermaksud terutama agar murid mampu memberi pertimbangan tentang dirinya sendiri dan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Atas dasar pemahaman itu ia akan terdorong untuk mengembangkan dirinya dengan lebih berhasil. Dalam praktik di sekolah pada umumnya guru menilai kemajuan belajar murid dan murid tidak memahami mengapa ia memperoleh nilai tertentu, dan ada murid yang tidak sanggup menerima kenyataan. Seringkali pula ia merasa penilaian guru tidak sesuai dengan yang disangkanya dan dapat menimbulkan salah paham dan rasa kecewa. Tidak heran jika hal demikian dapat

menimbulkan bentrokan antara murid dan guru, dan wibawa guru menjadi berkurang di mata murid. Dengan menilai diri sendiri diharapkan murid dapat memahami dan mau menerima kenyataan mengapa ia tidak lulus atau tidak naik kelas.

(5) Sekolah perlu memberi tekanan pada pengembangan segi nonakademik. Bagi perkembangan pribadi dan masyarakat hal yang tidak berkenaan dengan pengetahuan atau intelektual kadang-kadang merupakan hal yang jauh lebih penting. Sudah banyak contoh yang memperlihatkan bahwa anak yang pandai belum tentu mempunyai moral dan karakter yang baik, banyak yang tidak halus perasaannya dan tidak bertanggung jawab. Sebaliknya ada murid yang pengetahuan atau kemampuan berpikirnya tidak tinggi, tetapi memiliki karakter yang terpuji. Pelajaran agama, kesenian, musik, budi pekerti dan lain-lain yang bersifat nonakademik perlu mendapat perhatian di sekolah selain pengetahuan akademik dan pendidikan jasmani.

(6) Setelah lebih kurang lima tahun berpengalaman dengan kurikulum sekolah sekarang ini, rasanya kurikulum sekarang sudah perlu mendapat penilaian yang menyeluruh dan revisi terutama untuk membuatnya menjadi lebih relevan. Perubahan kurikulum berarti pula perubahan pengajaran. Seperti telah dikemukakan bahwa segi yang telah diperbaharui dalam kurikulum belum tentu telah diperbaharui dalam pengajaran sehingga kurikulum mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Dalam hubungan ini, sekolah perlu mengadakan perubahan yang besar dalam metode mengajar. Pendekatan inkuiri, termasuk metode diskusi, sosiodrama dan teknik mengajar lain yang membuat murid lebih aktif belajar, perlu digalakkan di sekolah. Murid jangan terlalu dibiasakan belajar mengumpulkan pengetahuan dan menghafal fakta. Mereka hendaklah dirangsang belajar untuk menemukan makna, memahami prinsip dan kaidah. Sekolah jangan terlalu membiasakan murid menerima tanpa kritik dan suka bergantung pada orang lain. Sekolah harus mendorong murid untuk mencari dengan inisiatif, kreatif dan percaya pada diri sendiri. Dengan kata lain sekolah harus membuat kurikulum bukan saja relevan, tetapi juga sesuatu yang hidup dan

bermakna bagi anak didik.

(7) Sehubungan dengan hal yang telah dikemukakan di atas, hal lainnya yang perlu mendapat perubahan di sekolah ialah bahwa sekolah harus lebih memberi tekanan pada mengajar murid bukan mengajarkan mata pelajaran. Dengan kata lain guru mendidik di samping mengajar. Memang guru mengajar murid, tetapi seringkatli terjadi seperti yang dikemukakan oleh Patterson (1973:95), "Tragedi pendidikan ialah banyaknya Kontak antara guru dan murid yang memberi pengaruh negatif pada murid dan banyak guru tidak sadar tentang ini". Hal demikian disebabkan kurangnya hubungan pribadi atau kontak personal antara guru dan murid. Pengetahuan yang diajarkan kepada murid akan memberi pengaruh yang positif melalui kontak itu. Untuk menciptakan hubungan itu maka pendekatan manusiawi adalah tepat untuk digunakan.

Perubahan-perubahan yang perlu dilakukan oleh sekolah masih dapat ditambah lagi menjadi suatu daftar yang panjang, tetapi, untuk memungkinkan penggunaan ketiga macam pendekatan dalam pengajaran yang telah disarankan di sini, perubahan yang telah dikemukakan itu adalah esensial. Bahwa perubahan itu akan dapat menjadi kenyataan pada akhirnya terletak di tangan guru sebagai tenaga pelaksana di sekolah.

GURU DAN PERSIAPAN GURU

Guru sebagai pelaksana pendidikan nasional merupakan faktor kunci. Hal ini telah ditegaskan oleh Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (Laporan KKP. 1980:15) dan selanjutnya juga disimpulkan bahwa guru sebagai pelaksana langsung dalam proses pendidikan mempunyai peranan yang amat penting sehingga harus mendapat perhatian khusus. Sebagai pelaksana dan faktor kunci mengandung arti bahwa semua kebijaksanaan rencana inovasi, dan gagasan pendidikan yang ditetapkan untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional pada akhirnya pelaksanaannya terletak di tangan guru. Apabila yang dikehendaki supaya sekolah berubah mengandung makna bahwa sesungguhnya guru yang berubah. Apabila guru tidak terbuka untuk perubahan maka setiap gagasan pembaharuan pendidikan sudah tentu tidak dapat memiliki

kompetensi mengajar dan mendidik, yang inovatif, yang kreatif, yang manusiawi, yang cukup waktu untuk menekuni tugas profesionalnya, yang dapat menjaga wibawanya di mata murid dan masyarakat, dan sudah tentu yang mampu meningkatkan mutu pendidikan nasional Pancasila. Untuk mendapatkan guru yang demikian, dua hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu pendidikan mereka dan kesejahteraan mereka.

Persiapan tenaga guru masih merupakan persoalan yang pelik dihadapi. Karena sifat sentralisasi pendidikan di Indonesia, banyak kebijaksanaan dan pengambilan keputusan dilakukan di tingkat pusat, sedangkan guru sebagai unsur pelaksana terbatas pada tugas melaksanakan kebijaksanaan itu. Demikian juga lembaga pendidikan guru, yaitu bahwa lembaga pendidikan guru dalam tugasnya mempersiapkan tenaga guru sekarang ini banyak bergantung pada pihak perencana keperluan tenaga guru. Keadaan demikian ada baiknya, tetapi terdapat pula kekurangannya. Lembaga pendidikan guru di satu pihak perlu memenuhi kebutuhan jumlah guru sehingga harus melaksanakan kebijaksanaan mendidik tenaga guru dengan program yang sangat singkat. Sedangkan di lain pihak lembaga pendidikan guru ingin mempersiapkan guru yang bermutu dengan standar tertentu.

Mendidik guru dalam waktu satu tahun seperti program DI sesungguhnya oleh lembaga pendidikan guru disadari masih jauh dari ukuran mutu guru yang dicitakannya. Apalagi program pengadaan guru dengan hanya menatar tamatan sekolah menengah kejuruan selama dua minggu lamanya dengan jelas harga tuntutan kuantitas sudah sangat mendesak harapan akan mutu guru sedangkan akibatnya sangat menentukan, yaitu mutu hasil pendidikan anak didik.

Di samping itu selama ini pendidikan guru dititik beratkan pada *in service* dan bukan pada *pre-service*. Perlu dipertanyakan apakah penatar-

an guru akan selalu merupakan jalan ke luar terbaik untuk meningkatkan mutu guru? Tidakkah mutu pendidikan persiapan guru lebih perlu diperhatikan daripada menghasilkan guru yang kurang bermutu lalu kemudian ditatar. Yang menjadi tujuan bukan hanya guru yang bermutu, tetapi yang lebih penting ialah murid yang lebih bermutu yang dihasilkan oleh guru. Jadi, kalau para guru sibuk dengan penataran sehingga kadangkala murid tidak dapat belajar dengan semestinya, sekalipun guru itu akan bertambah pengetahuan dan ketrampilannya, tetapi pada suatu saat sejumlah murid telah mengalami kerugian besar yang tidak segera tampak akibatnya. Selain itu pada umumnya penataran bertolak dari asumsi bahwa semua guru untuk tingkat sekolah tertentu sama saja kemampuan dan kelemahannya sehingga semuanya perlu ditatar untuk penataran yang sama. Penataran lalu tidak bertolak dari kebutuhan individual guru tetapi dari kebutuhan pelaksanaan rencana bahwa guru perlu ditatar. Kalau penataran berdasarkan kebutuhan guru akan keterampilan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dan mereka mengikuti penataran karena kesadaran akan perlunya keterampilan itu, kiranya dapat diharapkan guru-guru akan lebih bergairah dalam usaha mengembangkan pengetahuan mereka setelah ditatar. Pentingnya penataran guru tidak diragukan, tetapi pendidikan calon guru jauh lebih penting karena pada saat itu pengetahuan dan sikap profesional guru mulai ditanamkan.

Demikianlah beberapa buah pikiran mengenai pendidikan di Indonesia menghadapi dekade 80-an. Banyak segi pendidikan perlu dipertanyakan kembali dan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional telah merumuskan dasar-dasar penting untuk pembaharuan itu. Yang diperlukan ialah tindak lanjut karena kemajuan tidak dapat dicapai dengan berhenti lama.

Nilai Budaya dalam Proses Pendidikan



Dr. Ir. Jujun S. Suriasumantri

Kebudayaan didefinisikan untuk pertama kali oleh E.B. Taylor pada tahun 1871, lebih dari seratus tahun yang lalu (Murray, 1871). Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Murray, 1871). Meskipun pada tahun 1952 Kroeber dan Kluckhohn menginventarisasikan lebih dari 150 definisi kebudayaan yang dihasilkan oleh publikasi tentang kebudayaan selama lebih kurang tiga-perempat abad (Foster, 1962). Namun, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang bersifat prinsip dengan definisi pertama yang dicetuskan Taylor. Kuntjaraningrat (1974) secara lebih terperinci membagi kebudayaan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, serta sistem teknologi dan peralatan.

Manusia dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan yang banyak sekali. Adanya kebutuhan hidup inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan itu. Dalam hal ini, menurut Ashley Montagu (1961) kebudayaan mencerminkan tanggapan manusia terhadap kebutuhan dasar hidupnya. Manusia berbeda dengan binatang bukan saja dalam banyaknya kebutuhan, tetapi juga dalam cara memenuhi kebutuhan itu. Kebudayaanlah, dalam konteks ini, yang memberikan garis pemisah antara manusia dan binatang. Maslow (1945) mengidentifikasi lima kelompok kebutuhan manusia, yakni kebutuhan fisiologis, rasa aman, afiliasi, harga diri, dan pengembangan potensi. Binatang

kebutuhannya terpusat kepada dua kelompok pertama dari kategori Maslow, yakni kebutuhan fisiologis dan rasa aman serta memenuhi kebutuhan ini secara instingtif. Sedangkan manusia tidak mempunyai kemampuan bertindak secara otomatis yang berdasarkan insting tersebut sehingga dia berpaling kepada kebudayaan yang mengajarkan cara hidup. Pada hakekatnya, menurut Mavies (1973) kebudayaan merupakan alat penyelamat (*survival kit*) kemanusiaan di muka bumi.

Ketidakkampuan manusia untuk bertindak instingtif ini diimbangi oleh kemampuan lain, yakni kemampuan untuk belajar, berkomunikasi dan menguasai objek-objek yang bersifat fisik. Kemampuan untuk belajar ini dimungkinkan oleh berkembangnya inteligensi dan cara berfikir simbolik. Terlebih-lebih lagi manusia mempunyai budi yang merupakan pola kejiwaan yang di dalamnya terkandung "dorongan-dorongan hidup yang dasar, insetting, perasaan, dengan pikiran, kemauan dan fantasi (Alisjahbana, 1975)." Budi inilah yang menyebabkan manusia mengembangkan suatu hubungan yang bermakna dengan alam sekitarnya dengan jalan memberi penilaian terhadap objek dan kejadian. Pilihan nilai inilah yang menjadi tujuan dan isi kebudayaan (Alisjahbana, 1975).

Nilai-nilai budaya ini adalah jiwa dari kebudayaan dan menjadi dasar dari segenap wujud kebudayaan. Di samping nilai-nilai budaya ini kebudayaan diwujudkan dalam bentuk tata hidup yang merupakan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai budaya yang dikandungnya. Pada dasarnya tata hidup merupakan pencerminan yang kongkrit dari nilai budaya yang bersifat abstrak: kegiatan manusia dapat ditangkap pancaindera, sedangkan nilai budaya hanya

tertanggung oleh budi manusia. Di samping itu, nilai budaya dan tata hidup manusia ditopang oleh perwujudan kebudayaan yang ketiga yang berupa sarana kebudayaan. Sarana kebudayaan ini pada dasarnya merupakan perwujudan yang bersifat fisik yang merupakan produk dari kebudayaan atau alat yang memberikan kemudahan dalam berkehidupan.

Kebudayaan – Pendidikan

Keseluruhan faset dari kebudayaan tersebut sangat erat hubungannya dengan pendidikan sebab semua materi yang terkandung dalam suatu kebudayaan diperoleh manusia secara sadar lewat proses belajar. Lewat kegiatan belajar inilah diteruskan kebudayaan dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya. Dengan demikian, kebudayaan diteruskan dari waktu ke waktu: kebudayaan yang telah lalu bereksistensi pada masa kini dan kebudayaan masa kini disampaikan ke masa yang akan datang. Atau, menurut Alfred Korzybski (Montagu, 1961), kebudayaan mempunyai bahan-bahan kimiawi, binatang mengikat ruang, tetapi hanya manusia seorang yang mampu mengikat waktu.

Dalam kaitan pendidikan dengan kebudayaan inilah akan dicoba dikaji beberapa masalah pokok yang patut mendapatkan perhatian. Pengkajian ini ditujukan untuk menyelami beberapa gejala yang mempunyai pengaruh penting dalam proses pendidikan kita. Masalah ini akan didekati dari segi nilai-nilai budaya sebab objek inilah yang merupakan dasar idiil bagi perwujudan kebudayaan lainnya.

Allport (1951) mengidentifikasi enam nilai dasar dalam kebudayaan, yakni nilai teori, ekonomi, estetika, sosial, politik, dan agama. Yang dimaksudkan dengan nilai teori adalah hakikat penemuan kebenaran lewat berbagai metode seperti rasionalisme, empirisme, dan metode ilmiah. Nilai ekonomi mencakup kegunaan dari berbagai benda dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nilai estetika berhubungan dengan keindahan dan segi-segi artistik yang menyangkut, antara lain bentuk, harmoni, dan wujud kesenian lainnya yang memberikan kenikmatan kepada manusia. Nilai sosial berorientasi kepada hubungan antarmanusia dan penekanan segi-segi kemanusiaan yang luhur. Nilai politik berpusat kepada kekuasaan dan

pengaruh, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia politik. Sedangkan nilai agama merengkuh penghayatan yang bersifat mistik dan transedental dalam usaha manusia untuk mengerti dan memberi arti bagi kehadirannya, di muka bumi (Allport, 1951). Setiap kebudayaan mempunyai skala hirarki mengenai mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting dari nilai-nilai itu serta mempunyai penilaian tersendiri dari tiap-tiap kategori. Alisjahbana (1973) mengkaji perkembangan kebudayaan Indonesia dari segi ini.

Nilai Budaya yang Perlu Dikembangkan

Berdasarkan penggolongan di atas maka masalah pertama yang dihadapi oleh pendidikan ialah menetapkan nilai-nilai budaya apa saja yang harus dikembangkan dalam diri anak kita. Pendidikan yang dapat diartikan secara luas sebagai usaha yang sadar dan sistematis dalam membantu anak didik untuk mengembangkan fikiran, kepribadian dan kemampuan fisiknya (Wiley, 1967). Jadi, mengharuskan kita setiap waktu untuk mengkaji kembali masalah ini. Hal ini harus dilakukan disebabkan oleh dua hal, yakni (1) nilai-nilai budaya yang harus dikembangkan dalam diri anak didik kita haruslah relevan dengan kurun zaman di mana anak itu akan hidup kelak dan (2) usaha pendidikan yang sadar dan sistematis mengharuskan kita untuk lebih eksplisit dan definitif tentang hakikat nilai-nilai budaya tersebut. Keharusan kita untuk bersifat eksplisit dan definitif ini disebabkan gejala kebudayaan, yang meminjam perkataan Hall (Fawcett, 1959), lebih banyak bersifat tersembunyi (implisit) daripada terungkap (eksplisit), dan anehnya hakekat kebudayaan itu justru lebih tersembunyi bagi anggota masyarakatnya. Gejala yang kelihatannya bersifat paradoks ini mungkin tidak mengherankan lagi bila diingat bahwa banyak aspek kebudayaan yang kita terima begitu saja tanpa pengenalan dan pendalaman yang sadar.

Masalah ini lebih serius lagi kalau diperhatikan bahwa pada kenyataannya nilai-nilai budaya yang disampaikan lewat proses pendidikan bukan nilai-nilai budaya yang diperlukan oleh anak didik kita kelak di mana dia akan dewasa dan berfungsi dalam masyarakat, melainkan nilai-nilai konvensional yang sekarang berlaku

yang dialami dan dipraktikkan oleh orang tua dan guru mereka selaku pendidik.

Kesimpulan sementara penelitian Shaeffer (1978) di kecamatan Turen, Malang, menyebutkan bahwa kegiatan pendidikan dasar di sana tidak memberikan pengetahuan, nilai, sikap yang diperlukan anak itu kelak untuk hidup dalam abad XXI. Bukan rahasia lagi bahwa guru selaku pendidik seringkali dianggap termasuk ke dalam kelompok yang bersikap konservatif dalam menghadapi pembaharuan dan perubahan.

Skenario Masa Depan

Untuk menentukan nilai-nilai mana yang patut mendapatkan perhatian kita sekarang ini, pertama sekali kita harus dapat memperkirakan skenario dari masyarakat kita di masa yang akan datang. Skenario masyarakat Indonesia di masa yang akan datang itu, memperhatikan indikator dan perkembangan yang sekarang ada, cenderung untuk mempunyai karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

(1) Memperhatikan dampak dari tujuan dan strategi pembangunan nasional kita maka masyarakat Indonesia seringkali dianggap akan beralih dari masyarakat tradisional yang rural agraris menjadi masyarakat modern yang urban dan bersifat industri serta (2) Pengembangan kebudayaan kita ditujukan ke arah perwujudan peradaban yang bersifat khas berdasarkan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Karakteristik pertama mengharuskan kita untuk memusatkan perhatian kepada nilai-nilai yang relevan dengan masyarakat modern yang sedang dikembangkan. Dibandingkan dengan masyarakat tradisional, masyarakat modern mempunyai indikator-indikator sebagai berikut: (a) lebih bersifat analitik di mana sebagian besar aspek kehidupan bermasyarakat didasarkan kepada asas efisiensi, baik yang bersifat teknis maupun ekonomis dan b) lebih bersifat individual daripada komunal terutama ditinjau dari segi pengembangan potensi manusiawi dan masalah "survival".

Indikator pertama memberikan tempat yang penting kepada nilai teori dan nilai ekonomi. Nilai teori ini terutama sekali berkaitan erat dengan aspek penalaran (*reasoning*), ilmu dan

teknologi. Sedangkan nilai ekonomi berpusat kepada penggunaan sumber dan benda ekonomi secara lebih efektif dan efisien berdasarkan kalkulasi yang bertanggung jawab umpamanya pola konsumsi masyarakat. Indikator kedua menimbulkan pergeseran dalam nilai sosial dan nilai kekuasaan (politik). Kedua nilai ini harus lebih berorientasi kepada kepercayaan pada diri sendiri serta keberanian untuk mengambil keputusan sendiri.

Suatu masyarakat modern yang berdasarkan efisiensi bertumpu kepada ilmu dan teknologi sebagai landasan utamanya. Semua aspek kehidupan bermasyarakat ditata secara rasional berdasarkan analisis. Pengambilan keputusan dalam berbagai hal didasarkan kepada kerangka argumentasi yang didukung penalaran yang kuat. Kekuatan berfikir akan bersifat dominan dan mendesak ke belakang cara penarikan kesimpulan berdasarkan intuisi, perasaan dan tradisi. Dalam masyarakat sekarang keadaan ini bersifat terbalik yang dalam hal ini justru intuisi, perasaan dan tradisi itulah yang bersifat dominan. Peranan berfikir belum mendapat tempat yang penting dalam masyarakat yang dicerminkan dengan prioritas yang relatif rendah dari nilai teori dalam stelsel nilai-nilai kita. Patut ditandaskan di sini bahwa dalam masyarakat modern bukan tidak terdapat tempat bagi intuisi, perasaan dan tradisi, tetapi peranan ketiga sumber pengetahuan ini menjadi relatif kurang penting dibandingkan dengan berfikir.

Secara bertahap masyarakat tradisional yang berorientasi kepada status akan beralih menjadi masyarakat modern yang berorientasi kepada prestasi. Persaingan akan lebih tampak umpamanya saja dalam mencari tempat dalam sistem pendidikan dan mencari pekerjaan di mana gejala ini sudah kita rasakan sekarang. Hubungan antar manusia akan lebih bersifat individual sehingga *survival* seseorang ditentukan oleh kemampuannya untuk bersaing secara produktif dalam masyarakat yang menekankan kepada prestasi. Untuk terjun ke gelanggang yang keras ini manusia harus dibekali dengan kepercayaan pada diri sendiri serta kesiapan mental dan kemampuan untuk bersaing. Tanpa kelengkapan ini maka dia akan tersingkir dan gagal menjadi anggota masyarakat yang berguna. Mereka akan menjadi golongan yang *dropout* dari masya-

rakat sekitarnya dan membentuk kelompok sendiri yang bersifat disfungsi. Suatu gejala yang pun sekarang ini sudah tampak di negara-negara industri yang maju dalam bentuk *hippies*, *beatnik* dan kelompok-kelompok lainnya yang bersifat deviatif.

Sekiranya kesimpulan sementara Sheldon Shaeffer itu ternyata benar dan bersifat universal maka perlu diambil tindakan-tindakan preventif dan kuratif sebelum semuanya terlambat. Adalah lampu merah yang patut diperhatikan oleh segenap para pendidik di negara kita jika sekiranya benar bahwa sistem pendidikan kita gagal dalam memberikan pengetahuan, nilai dan sikap yang diperlukan anak didik di masa yang akan datang.

Diperlukan Kreativitas

Pengembangan kebudayaan nasional kita ditujukan ke arah terwujudnya suatu peradaban yang mencerminkan aspirasi dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan dasar bagi pengembangan peradaban itu. Namun, untuk mewujudkan peradaban itu diperlukan nilai khusus yang bernama kreativitas. Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencari pemecahan baru terhadap suatu masalah (English, 1958). Nilai ini bersifat mendorong ke arah pengembangan segenap potensi kebudayaan dalam mewujudkan peradaban yang khas. Tanpa kreativitas, hasilnya adalah serba tanggung: mediokriti tanpa penonjolan yang jelas. Kegiatan kreatif berarti melakukan sesuatu yang lain, suatu pola yang bersifat alternatif, bagi kelaziman yang telah bersifat baku. Dalam hal ini kreativitas sering bersilang jalan dengan konformitas: apakah kita berani untuk maju, atau aman dalam status quo, bernama stabilitas?

Kreativitas sering dihubungkan dengan kreasi di bidang seni. English (1958) mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan modus baru dalam ekspresi artistik. Dalam proses pengembangan kebudayaan nilai estetika mempunyai kedudukan yang khusus, dia bukan saja merupakan eksposisi yang menyimak keindahan yang memperkaya khazanah batin, tetapi juga berfungsi sebagai media yang memperhalus budi pekerti. "Selalu terdapat ladang moral yang subur." kata Golbert Chesterton, "untuk pertumbuhan artistik yang luhur." Dalam hal

ini ilmu dan seni bersifat saling melengkapi: kalau ilmuwan mengkaji aspek yang bersifat generik dari wujud fisik, maka seniman menyentuh daerah yang paling pribadi, kemanusiaan yang *soliter* dan unik (Dubos, 1968).

Nilai agama berfungsi sebagai sumber moral bagi segenap kegiatan. Hakikat semua upaya manusia dalam lingkup kebudayaan haruslah ditujukan untuk meningkatkan martabat manusia. Sebab kalau tidak maka hal ini bukanlah proses pembudayaan, melainkan dekadensi, keruntuhan peradaban. Dalam hal ini, agama memberikan kompas dan tujuan: sebuah makna, semacam arti, yang membedakan seorang manusia dari wujud berjuta galaksi. Kemajuan pesat di bidang ilmu dan teknologi yang ternyata tidak memberikan kebahagiaan yang hakiki menyebabkan manusia berpaling kembali kepada nilai-nilai agama. Seperti juga seni dengan ilmu, agama dan ilmu bersifat saling melengkapi: kalau ilmu bersifat nisbi dan pragmatis maka agama adalah mutlak dan abadi. Kiranya tidak ada orang yang lebih tepat selain Albert Einstein untuk mengungkapkan hakikat ini dengan kata-kata Ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Ilmuwan terkemuka ini pulalah yang lebih dari limapuluh tahun yang lalu terbata "Mengapa ilmu yang sangat indah ini, yang menghemat kerja dan membikin hidup lebih mudah, hanya membawa kebahagiaan yang sedikit kepada kita? (Suriasumantri, 1978).

Adalah kewajiban orang tua dan para pendidik untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk hidup dalam zamannya. Bukan sekedar hadir, atau eksis, tetapi hidup dengan kemanusiaan yang intens. Manusia yang taqwa, terpelajar, terdidik, ahli estetik, berbudi pekerti, aktif, kreatif, mampu menyesuaikan diri, berorientasi kepada kemajuan, hemat, berani mengambil keputusan, bertanggung jawab, rasional, optimistik, teratur (organized), yakin pada diri sendiri dan dapat diandalkan. Bukankah semua ini adalah nilai yang seyogyanya kita wariskan?"

"Ah, Horatio," seru Hamlet, si peragu, "Lebih banyak lagi hal-hal di langit dan di bumi, dibanding yang kau mimpikan dalam falsafahmu." Namun, bukankah perencanaan dimulai dengan mimpi, perjalanan jauh pun diawali satu langkah, mengapa lalu berpangku?

Yang pasti: waktu tidak pernah menunggu!
(Analisis Kebudayaan)

MENGENAL KATA DAN ISTILAH BARU (VII)

field work	kerja lapangan; kerja medan
fitfall	anderak
flavor	aroma
flexible	luwes
floorblock	blok latar
flowchart	bagan arus
flypass	jalan layang
gap	kesenjangan
general rehearsal	gladi resik
geographic coverage	cakupan geografis
government agency	instansi pemerintah
graduation	wisuda
gravity	daya berat
graceperiod	masa tenggang
ground	tanah (permukaan bumi)
growthrate	angka pertumbuhan
handicap	hambatan
handling	pengurusan; penanganan
hardness(of water)	kesadahan
hardware	perangkat keras
hinterland	tanah burit; pedalaman
homeless	tunawisma
humid	lengas
humidity	kelengasan
implicit	tersirat; implisit
innovative approach	pendekatan pembaharuan
integration	pemaduan; integrasi
investigate	menyidik
reasoning	penalaran
reconstruction	pemugaran; rekonstruksi
recycle	daur ulang
red clay	ampo
reference	acuan; rujukan
region	daerah
rehabilitation	pemulihan

rescue	penolong
resettlement	pemukiman kembali
resource	sumber daya
role ambiguity	ketaksaan peran
role conflict	konflik peran
role playing	main peran
rural area	daerah pedesaan
sample	contoh
sales quota	jatah penjualan
scope	cakupan
sealing-wax	alkari
seeded	unggulan
self-sufficient	swasembada
self-supporting	swadaya
sequence	runtunan; urutan
sequent	runtun
service	pelayanan
set	perangkat
shale	serpih
showroom	ruang pameran
slagorde (Bld)	jajaran
slip	carik (kertas)
software	perangkat lunak
soil	tanah (yang ditumbuhi tanaman)
sophisticated	canggih
spandoek (Bld)	kain rentang
span of control	rentang kendali
spare parts	suku cadang
specification	perincian
speech	wacana
stability	kemantapan
stable	mantap
stamina	daya tahan (tubuh); :stamina
standard	baku
standardization	pembakuan
steady	tunak
study	kajian; telaah
study tour	widyawisata
string	ambin

substitution
 success ratio
 sufferings
 supernatural
 supervisor
 symptom
 table salt
 take off
 tendency
 term
 terrain
 threshold
 time schedule
 tolerance
 trace
 track
 trainee
 trainer
 tranee
 transfer
 transparent
 trial and error
 trough
 training
 upgrading course
 unconformity

sulin
 nisbah keberhasilan
 derita (penderitaan)
 adikodrati
 selia; penyelia
 gejala
 garam halus; garam meja
 lepas landas; tinggal landas
 kecenderungan
 masa
 medan
 ambang
 jadwal
 tenggang rasa
 merunut
 lintasan
 karyasiswa
 penatar
 petatar
 perpindahan
 tembus pandang
 coba dan ralat
 palung
 latihan kejuruan
 penataran
 ketakselarasan



PELAKSANAAN EKAPRASETIA PANCAKARSA DALAM KEDINASAN

Oleh : Drs. S. Samiyana

Drs. S. Samiyana lahir di Cepu Jawa Tengah, 2 Juli 1930. Kesarjanaannya diperoleh dari Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanudin. Ia pernah mengikuti kursus SESPA DEPDAGRI angkatan II.

Jabatan yang dipangkunnya sekarang sebagai Kepala BP-7 Dati I Irian Jaya.

I. PENDAHULUAN.

Dalam kehidupan suatu bangsa perlu adanya ideologi, yang merupakan Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa dan cita-cita yang menjadi tujuan bangsa. Ideologi itu harus difahami, dihayati, diamankan dan diamalkan oleh seluruh rakyat. Bagi bangsa Indonesia, ideologi Pancasila mempunyai kedudukan dan arti yang sangat penting, baik sebagai falsafah, sebagai landasan dan tujuan hidup bernegara, maupun tujuan hdiup bermasyarakat. Demikian pentingnya Pancasila sebagai dasar dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya difahami dan dihayati benar-benar oleh setiap warga negara dan setiap penyelenggara negara.

Dengan detetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor II/MPR/1978, maka Pancasila akan lebih mudah dipahami, dihayati dan kemudian diamalkan. Walaupun pada dasarnya nilai-nilai luhur Pancasila telah merupakan milik bangsa Indonesia yang digali dari bumi Indonesia dan lahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, namun pelestarian dan pemerataan pemahamannya masih perlu dilakukan secara terus-menerus, agar dapat diamalkan sebaik-baiknya dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Aparatur Pemerintah – baik selaku warga negara maupun selaku abdi negara dan abdi masyarakat – merupakan pemikir, perencana, dan pelaksana dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus '45 sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk itu Pancasila perlu mereka yakini dan mereka jadikan titik tolak cara berpikir, cara merencana dan cara melaksanakan. Mengingat fungsinya yang amat penting itu, maka Aparatur Pemerintah harus ditingkatkan pengabdian dan kesetiiaannya kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Aparatur Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perusahaan-perusahaan milik negara dan milik daerah sebagai aparatur perekonomian negara dilakukan secara terus menerus, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif dan berwibawa, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan maupun untuk menggerakkan pelaksanaan pembangunan secara lancar.

Cara pendekatan.

Pembinaan dan penyempurnaan yang mendasar, yang perlu dilakukan secara terus-menerus terhadap aparatur pemerintah, adalah pemahaman dan penghayatannya dalam melaksanakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam kedinasan, sesuai dengan fungsinya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. Kita menyadari bahwa Aparatur Pemerintah yang terdiri dari berbagai pemeluk agama/kepercayaan, suku, tingkat kedudukan dan pola hidup/budaya, memerlukan upaya adanya kesatuan bahasa, kesatuan pandangan, dan kesatuan gerak langkah dalam

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Satu-satunya wujud upaya ke arah kesatuan bahasa, pandangan, dan gerak langkah di luar kedinasan telah dilakukan melalui wadah KORPRI. Sedang upaya tersebut di dalam kedinasan perlu digali dari berbagai norma agama/kepercayaan, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban kepegawaian, serta larangan-larangan yang harus dihindarkan, sehingga dapat dijadikan bimbingan bagi Aparat Pemerintah dalam melaksanakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dalam kedinasan.

Batasan pengertian.

Secara harfiah EKAPRASETIA PANCAKARSA berarti "janji yang tunggal untuk melaksanakan lima kehendak". Janji, di sini merupakan janji terhadap diri sendiri. Karena menuruti panggilan hati nuraninya sendiri, maka setiap manusia Indonesia berjanji terhadap diri sendiri, berjanji terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berjanji terhadap masyarakat dan berjanji terhadap alam sekitarnya, bahwa dengan segala kemauan dan kemampuan selalu mengendalikan diri dan kepentingannya, agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai manusia sosial dalam mewujudkan kehidupan berdasarkan Pancasila.

Pengendalian diri dan kepentingannya tadi mendorong tumbuhnya kehendak yang kokoh untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Berekaprasetia Pancakarsa tiada lain adalah berjanji dengan setulus hati untuk melaksanakan 36 butir mutiara Pancasila yang dirumuskan dalam P4, dalam kehidupan nyata sehari-hari sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Untuk menyegarkan kembali pengertian kita, P4 terdiri dari "P" yang empat jumlahnya. "P" yang pertama singkatan dari kata "pedoman", menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata "pedoman" bukan berasal dari kata "pedoman" bukan berasal dari kata "pedom" ditambah akhiran "an", melainkan berasal dari kata Daerah Jawa "dom" yang berarti jarum penusuk (misalnya: jarum jahit, jarum suntikan), atau "pandom" yang berarti jarum penunjuk (misalnya pada arloji). Dengan demikian maka "pedoman" mengandung maksud sebagai jarum

penunjuk ke suatu arah yang benar yang harus kita ikuti.

Huruf "P" yang kedua merupakan singkatan dari kata "penghayatan". Kata "penghayatan" berasal dari kata Arab "hayat" yang artinya "hidup". Setelah diadoptasi menjadi bahasa Indonesia, penghayatan berarti penjiwaan atau mendarah dagingkan ke dalam kesadaran hidup, sehingga sesuatu nilai tertentu menjadi membudaya.

Huruf "P" yang ketiga singkatan dari kata "pengamalan", yang juga berasal dari bahasa Arab "amal", artinya melaksanakan atau mewujudkan dalam perbuatan sehari-hari.

Jadi P4 mengandung maksud adanya tuntutan/patokan/jarum penunjuk yang lurus, bagaimana cara meresapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kesadaran hidup, untuk kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, agar nilai-nilai Pancasila mendarah daging/membudaya; dalam arti tidak lagi disuruh-suruh, tetapi dengan sendirinya keluar dari kesadaran sendiri, suka dan ingin melaksanakan dalam perbuatan sehari-hari segala butir-butir Pancasila.

Yang dimaksud dengan KEDINASAN adalah suasana kehidupan pegawai negeri sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Dinas. Dalam kehidupan kedinasan itu pegawai negeri dituntut kesetiaan dan keataatannya yang penuh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta bersatu padu, bermental baik, berwisata, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Tulisan ini bermaksud mengungkapkan beberapa norma sebagai bimbingan kepada pegawai negeri, sehingga dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan dinas benar-benar berdasarkan kesadaran yang telah membudaya sebagaimana tercermin dalam Ekaprasetia Pancakarsa, berupa norma-norma atau sikap-sikap tertentu dari butir-butir yang terkandung dalam Ekaprasetia Pancakarsa itu.

Sebagai gambaran tentang perlunya norma/ukuran dari setiap butir Ekaprasetia Pancakarsa itu dapat diberikan contohnya sebagai berikut: "Percaya dan takwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab." Bagaimanakah ukuran "percaya" dan bagaimana pula ukuran "takwa?" Untuk melaksanakan butir "percaya" dan "takwa" tersebut, perlu adanya bimbingan pelaksanaan sesuai dengan norma agama/kepercayaan masing-masing. Bagi pegawai negeri yang beragama Islam akan mengamalkan nilai "percaya" dan "takwa" itu berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam Al Qur'an. Bagi pegawai negeri yang beragama Kristen akan mengamalkannya berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam Kitab Injil. Bagi yang beragama Hindu Dharma berdasarkan Kitab Suci Weda, dan bagi yang beragama Buddha berdasarkan Kitab Suci Udana, Tripitaka, dan seterusnya.

Bagi aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam mensukseskan PAM PEMILU tahun 1982 bulan Mei yang lalu misalnya, dan dalam mensukseskan Sidang Umum MPR tahun 1983 masih diberikan tali pengikat yang lebih mulia lagi, yaitu dengan butir-butir Ekaprasetya Pancakarsa. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1980, tentang pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum pasal 3 sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Garis-garis Besar Haluan Negara serta tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa."

Dari uraian-uraian di atas maka pada bab berikut ini akan diungkapkan beberapa norma sebagai bimbingan dalam melaksanakan Ekaprasetya Pancakarsa dalam kepentingan-kepentingan kedinasan. Norma-norma tersebut di cuplik dari beberapa Kitab Suci dan beberapa ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya karena dalam menunaikan tugas kedinasan itu pegawai negeri mempunyai pendamping setia yang tiada taranya, maka setelah mengemukakan

norma-norma dari setiap Sila, akan digambarkan contoh perbuatan atau tingkah laku yang sesuai dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan rumah tangga.

II. BIMBINGAN PELAKSANAAN EKAPRASETYA PANCAKARSA DALAM KEDINASAN.

A. Bimbingan pelaksanaan butir-butir sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prasetya ke satu "Sapta Prasetya KORPRI" menyatakan: "Kami anggota KORPRI adalah warga negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa". Dalam melaksanakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini diperinci menjadi 4 butir:

Butir ke 1:

Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam melaksanakan butir ke 1 ini kami ungkapkan beberapa norma saja dari sekian banyak norma tentang "percaya" dan "takwa" sebagai berikut:

A. Bagi Umat Islam.

Beberapa norma dari Al Qur'an antara lain:

- 1) Surat Al Baqarah, 163 yang artinya: Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
- 2) Surat Al Maa-idah, 105 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi muharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. Nanti Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kami kerjakan.

b. Bagi umat Kristen:

Beberapa norma dari Injil antara lain:

- 1) Roma, 11 : 36 yang berbunyi: Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan

kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.

2) **Daniel, 2 : 8, 20** yang berbunyi: Allah semesta langit. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari pada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu.

3) **Lukas, 6 : 27 - 28** yang berbunyi: Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu.

c. Bagi umat Hindu Dharma:

Salah satu normanya dapat dibaca dalam Kitab Brahma Sutra I 1.2. yang berbunyi: Janmayasya Yatah (Tuhan/Brahma), suatu dari mana asal mula proses kejadian yang serba ada ini, sumber atau asal dari segala ciptaan dunia ini.

d. Bagi umat Buddha:

Salah satu normanya dapat ditemukan dalam Kitab Suci Udana VIII.3. yang artinya: Yang disebut Tuhan Yang Maha Esa, yang kekal dan abadi ialah "Yang Tidak Tercipta, Yang Tidak Dilahirkan, Yang Tidak Menjelma dan Yang Mutlak. Beriman, berarti memiliki srada (keyakinan) terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa, berarti bahwa umat Buddha berusaha untuk melaksanakan Dharma dalam kehidupan sehari-hari sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin.

Butir ke 2 :

Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.

Dalam melaksanakan butir ke-2 ini dapat digali beberapa norma sebagai berikut:

a. Bagi umat Islam;

Salah satu normanya terdapat dalam Surat **Asy Syuura 15**, yang artinya: Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepadaNya lah

kembali.

b. Bagi umat Kristen;

Beberapa normanya terdapat dalam:

1) **Galatia, 5 : 14** yang berbunyi: Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu Firman ini, yaitu: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

2) **Galatia, 6 : 9-10** yang berbunyi: Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita marilah kita berbuat baik kepada semua orang.

c. Bagi umat Hindu Dharma;

Salah satu normanya terdapat dalam **Rig Weda X, 121. 8** yang artinya: Siapakah yang akan kami puja dengan segala persembahan ini? Ia yang Maha Suci yang kebesarannya mengatasi semua yang ada, yang membangkitkan kebaktian Tuhan Yang Maha Berkuasa. Ia yang satu itu, Tuhan di atas semua.

d. Bagi umat Buddha;

Salah satu normanya kita dapati dalam **Prasasti Buku Kalinga nomor XXII dari raja Asoka abad ke-3 SM**, yang artinya "..... janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya agama orang lainpun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang di samping menguntungkan pula agama orang lain. Dengan berbuat sebaliknya kita telah merugikan agama kita sendiri, di samping merugikan agama lain. Oleh karena barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama orang lain, semata-mata karena didorong oleh rasa bakti kepada agamanya sendiri dengan berpikir: "bagaimana akan dapat memuliakan agamaku sendiri", dengan berbuat demikian ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu kerukunan dianjurkan "dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mendengarkan dan bersedia mendengar ajaran yang dianut orang lain."

Butir ke-3:

Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Dalam melaksanakan butir ke-3 ini dapat digali beberapa norma sebagai berikut:

a. Bagi umat Islam;

Salah satu normanya dapat dibaca dalam Surat Al Kafirun, 6 yang artinya: Untukmu agamu, dan untukkulah agamaku.

b. Bagi umat Kristen;

Beberapa normanya dapat dibaca dalam:

1) Sirakh 35 : 12, 13 & 16, yang berbunyi: Tuhan adalah Hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkan. Nya Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya dan doanya naik sampai ke awan.

2) I Petrus 2 : 16, yang berbunyi: Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah.

c. Bagi umat Hindu Dharma:

Salah satu normanya dapat dibaca dalam Rig' Weda I, 164, 46, yang artinya: Tuhan Yang Esa, para arif bijaksana mengatakan dengan banyak (nama), Agni, Yama, Matariswa. Berdasarkan ayat di atas tidaklah salah untuk menyebut nama Tuhan dengan Allah dan tidak bertentangan dengan Weda.

d. Bagi umat Buddha:

Dengan jalan meningkatkan penghayatan dan pengamalan Buddha Dharma seperti tertantum dalam Dekrit Asoka tersebut di atas, tentang toleransi antar umat beragama.

Butir ke-4 :

Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Dalam melaksanakan butir ke-4 ini dapat diungkapkan beberapa norma sebagai berikut:

a. Bagi umat Islam:

Salah satu normanya dapat dibaca dalam

Surat Yunus, 99 yang artinya: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya menjadi orang-orang yang beriman semuanya?

b. Bagi umat Kristen;

Beberapa normanya dapat dibaca dalam:

1) Kisah 5 : 29, yang berbunyi: Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab, katanya: "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia."

2) Ensiklopedia Populer Gereja, halaman 115, yang mengatakan: "..... Paksaan dalam bentuk apapun tidak dapat tempat di dalamnya, karena merusak inti daripada agama, yaitu penyerahan yang rela."

c. Bagi umat Hindu Dharma;

Salah satu normanya dapat dibaca dalam Brahma Sutra I.33, yang berbunyi: Sastrayonitwat = hanya Kitab Suci cara yang baik (untuk mengenal Tuhan).

d. Bagi umat Buddha;

Beberapa normanya dapat dibaca dalam:

1) Kitab Suci Suddharma Pundarika, yang maksudnya: Makna-makna yang tidak terhitung bersumber dari Hukum Tunggal.

2) Ajaran Silaparamita, yang mengatakan bahwa: Setiap orang janganlah melakukan perbuatan jahat dengan pikiran, ucapan dan perbuatan badan jasmani, sehingga menyebabkan orang lain menderita.

Butir-butir lainnya dari pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kedinasan dapat kami ambil contohnya sebagai berikut:

a) Pada saat pertama kali seseorang dilantik sebagai pegawai negeri mengangkat sumpah/janji pegawai dengan mengatakan: Demi Allah/Hoom Atta Paramisesa saya bersumpah

Demi Tuhan Yang Maha Esa saya menerangkan dengan sungguh-sungguh

b) Demikian pula pada saat dilantik menjabat jabatan tertentu juga mengucapkan sumpah/janji jabatan dengan menyebut: Demi Allah/

Hoom Atta Paramisesa/Demi Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya.

- c) Penyelenggaraan Halal bihalal atau Natal di lingkungan Insntasi pemerintah.
- d) Disediakkannya ruangan/tempat beribadah tertentu bagi para pegawai di suatu kantor pemerintah.
- e) Memulai redaksi suatu keputusan atau produk hukum dengan kata-kata "Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa."

Sebuah contoh perbuatan/tingkah-laku yang sesuai dengan perwujudan nilai-nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai berikut:

Nyonya A adalah seorang isteri seorang pegawai negeri golongan I, yang penghasilannya boleh dikatakan hanya cukup untuk makan saja. Tetapi ia adalah seorang ibu rumah tangga yang bahagia. Dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari ia tidak pernah mengeluh. Dalam suka dan dukanya ia tidak pernah melupakan dan selalu taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia patuh dan taat menjalankan ajaran dan perintah agamanya. Dengan segala daya berusaha ia untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan usaha kecil di rumah.

Dan itu semuanya dilakukan dengan penuh kerelaan dan kegembiraan. Anak-anaknya adalah anak-anak yang manis dan rajin. Dalam setiap kesempatan anak-anaknya diajar dan dibimbing untuk beribadah dan menjalankan agamanya melalui teladan dan petunjuk-petunjuknya. Ia juga memberikan kesempatan kepada adiknya, yang kebetulan ikut padanya untuk menjalankan cara mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa, karena kebetulan si adik tadi dalam lingkungan sebelumnya mengikuti nilai-nilai budaya leluhurnya yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa sikap, perbuatan dan tingkah-laku nyonya A tadi, dapat dikatakan sesuai dengan perwujudan nilai-nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Bimbingan pelaksanaan butir-butir sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Dalam melaksanakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab ini dieperinci menjadi 8 butir

sebagai berikut:

Butir 1 :

Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.

Adanya kewajiban bagi pegawai negeri untuk berpakaian rapih dan sopan serta bersikap dan bertingkah-laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai negeri sipil dan terhadap atasan.

Butir 2 :

Saling mencintai sesama manusia.

Adanya kewajiban bagi atasan untuk membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya,

Butir 3 :

Mengembangkan sikap tenggang rasa.

Adanya larangan bagi pegawai negeri untuk melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.

Butir 4 :

Tidak semena-mena terhadap orang lain.

Dalam kedinasan pegawai negeri dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.

Butir 5 :

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Adanya larangan bagi pegawai untuk memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai negeri sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan.

Butir 6 :

Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

Pegawai negeri sipil golongan ruang IV/a PGPS-1968 ke atas, anggota ABRI berpangkat Letnan II ke atas dan pejabat dilarang duduk sebagai pengurus, penasihat atau pelindung dalam Badan Sosial, apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materiil/finansil lainnya.

Butir 7 :

Berani membela kebenaran dan keadilan.

Pegawai negeri berkewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan

dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Kewajiban segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil.

Butir 8 :

Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Adanya kewajiban pegawai negeri untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan pegawai negeri sipil.

Sebuah contoh perbuatan/tingkah laku yang sesuai dengan perwujudan nilai-nilai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah sebagai

berikut.

Nyonya B adalah seorang isteri yang hidup serba kecukupan. Dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah menyombongkan harta dan kekayaannya. Dengan izin suaminya menggunakan sebagian kekayaannya dalam usaha sosial yang mengurus dan mendidik anak yatim piatu, sehingga produktif untuk dirinya sendiri serta masyarakat, dan ia sendiri aktif berperan di dalamnya. Di lingkungan tempat tinggalnya ia disukai oleh tetangga dan teman-temannya, karena ia selalu bersikap sopan santun kepada siapapun. Beberapa sikap dan perbuatan nyonya B tadi adalah sesuai dengan perwujudan nilai-nilai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

(bersambung)

**PIMPINAN BESERTA STAF DAN KARYAWAN PROYEK
ALAT PERAGA "PB-PGRI-DIRGAHAYU"**

MENGUCAPKAN

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

HUT KE - 38

(17 - 8 - 1945 - 17 - 8 - 1983)

WASSALAM

PELAKSANA PROYEK CV DIRGAHAYU

ttd

MTS SOEBRIEONO

Direktur Utama

**UANG MASUK SUMBANGAN GEDUNG PGRI
SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 1983.**

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	31-5-1983	Transfer	Rp. 166.367.245,-
2.	1-6-1983	Jasa Giro 1 Mei 1982 sampai 1 Mei 1983	Rp. 460.900,-
3.	2-6-1983	PGRI Cabang Pacitan Jawa Timur	Rp. 1.299.000,-
4.	4-6-1983	PGRI Cabang Timur Tengah Selatan, SoE, NTT	Rp. 289.000,-
5.	6-6-1983	PGRI Cabang Bantul, Yogyakarta	Rp. 500.000,-
6.	9-6-1983	PGRI Cabang Tanjung Pinang, Riau	Rp. 500.000,-
7.	10-6-1983	PGRI Cabang Bandung, Jawa Barat	Rp. 5.000.000,-
8.	10-6-1983	PGRI Cabang Guru-guru SD Jakarta Pusat	Rp. 200.000,-
9.	10-6-1983	PGRI Cabang Muara Enim, Sumatera Selatan	Rp. 2.000.000,-
10.	15-6-1983	PGRI Cabang Jayawijaya, Irian	Rp. 600.000,-
11.	21-6-1983	PGRI Guru, Karyawan Kanwil Dept. P & K Prop. Maluku di Ambon	Rp. 296.215,-
12.	21-6-1983	PGRI Cabang Cianjur, Jawa Barat	Rp. 442.100,-
13.	21-6-1983	PGRI Cabang Pasir, Tanah Grogot, Kaltim	Rp. 200.000,-
14.	28-6-1983	PGRI Cabang Bekasi, Jawa Barat	Rp. 150.000,-
15.	28-6-1983	PGRI Cabang Kodya Tegal, Jawa Tengah	Rp. 200.000,-
16.	29-6-1983	PGRI Cabang Kuningan, Jawa Barat,	Rp. 125.000,-
17.	30-6-1983	PGRI Cabang Semarang, Ambarawa, Jawa Tengah	Rp. 150.000,-
18.	30-6-1983	PGRI Guru SMPN I Kota bumi, Lampung Utara.	Rp. 40.000,-
J u m l a h			Rp. 178.819.460,-

Bapak Sunardjo Haditjaroko, MA

N. F. 300.-

Jakarta, 30 Juni 1983.

PANITIA PEMBANGUNAN GEDUNG GURU
Bendahara,

ttd.

S L A M E T

RALAT

Suara Guru No. 6 Hal. 38.

* Sumbangan Gedung Guru/PB-PGRI; seharusnya:

3-5-1983 Bpk Sunardjo Haditjaroko, MA Nederland NF 200,- + NF 100,- = NF 300,-
25-2-1983 Cabang Kabupaten Poso, Sulteng Rp. 567.000,-

* Halaman 2 baris 15 seharusnya :

.... bertemakan: "Peranan Guru dalam Memasyarakatkan dan Mensukseskan Hasil Sidang Umum MPR 1983 dan Pelita IV dalam Bidang Pendidikan" telah ditutup

SISTEM HUKUM NASIONAL DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA

Oleh: Prof. Padmowahyono, SH.

Naskah ini adalah pidato Prof. Padmo Wahjono, SH selaku Guru Besar Ilmu Hukum Negara, pada acara peringatan Dies Natalis U.I. ke-33 pada tanggal 2 Pebruari 1983.

— Red. —

I. Pendahuluan.

Hidup bermasyarakat mencerminkan suatu ketertiban, dan suatu ketertiban mencerminkan adanya hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa:

TIADA MASYARAKAT TANPA HUKUM

Dalam hal hidup bermasyarakat sudah berpuncak pada suatu organisasi negara yang merdeka, maka tertib bermasyarakat tersebut dipedomani oleh dasar organisasi negara tersebut. Apabila hal ini kita tinjau dari segi hukum, maka tertib masyarakat yang berupa tertib hukum, haruslah didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara tersebut.

Dengan demikian perlu kita fahami pokok-pokok sistem hukum nasional Indonesia yang terumus di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila.

Di dalam zaman modern ini, hidup bermasyarakat di dalam kerangka organisasi negara, diatur dengan hukum baik yang berbentuk tertulis maupun yang berbentuk tidak tertulis. Untuk mudahnya seringkali disebut Negara Hukum atau untuk lengkapnya, agar dapat membedakannya dengan konsep-konsep Negara Hukum lainnya disebut Negara Hukum Pancasila.

Jelaslah bahwa setiap negara pada zaman modern ini berdasarkan hukum. Sedangkan apa yang disebut hukum tergantung pada sistem hukum nasionalnya.

Bentuk hukum tertulis mengenal pelbagai jenis yang membentuk suatu peningkatan hukum yang intinya ialah peningkatan peraturan perundangan. Di dalam negara kita maka puncak peningkatan hukum tersebut ialah Undang-Undang Dasar 1945, yang dirumuskan lebih lanjut arah-gerakannya (haluannya) dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta dirumuskan lebih lanjut pengaturannya dengan Undang-Undang dan jenis bentuk hukum tertulis lainnya sesuai dengan pertingkatannya yang tidak hanya menunjukkan kedudukannya tetapi juga fungsinya.

Ditinjau dari segi isi dari pada hukum, maka dikenal adanya cita-cita hukum dan cita-cita hukum ini direalisasikan di segala aspek kehidupan manusia yang utuh di dalam bernegara maupun di dalam masyarakat (kepentingan umum) ataupun dalam memenuhi kepentingan pribadinya baik yang material maupun non material. Dalam hal isi ini pun nampak adanya peningkatan yang puncaknya ialah masyarakat (hukum) yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian sebagai pendahuluan dapat dikemukakan bahwa ketertiban hidup bermasyarakat dan bernegara dicerminkan ataupun dipedomani oleh suatu peningkatan hukum baik mengenai bentuk maupun isi, di mana yang lebih tinggi kedudukannya dalam peningkatan menentukan arahnya yang didukung oleh yang lebih rendah kedudukannya dalam peningkatan tersebut. Ini merupakan "soko-guru" suatu sistem

hukum nasional dalam zaman modern ini.

II. Rambu-rambu Undang-Undang Dasar.

Di dalam pendahuluan telah dijelaskan bahwa pedoman tertib hukum dituangkan dalam dasar negara sehingga perlu kita ketahui rambu-rambu apakah yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

1. Pengorganisasian bentuk/jenis hukum.

Negara kita menganut asas kedaulatan Rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah di tangan rakyat. Asas ini dalam hal pengorganisasian bentuk/jenis hukum dicerminkan dalam ketentuan bahwa bentuk/jenis hukum yang tertinggi haruslah dibentuk oleh rakyat/wakil rakyat.

Ketentuan ini dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

Alinea III :

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Alinea IV :

Kemudian dari pada itu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

Jadi setelah rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh rakyat melampaui wakilnya yang ada di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Majelis Permusyawaratan Rakyatlah yang menentukan arah-arah kebijaksanaan dengan Ketetapan MPR. Selanjutnya Mandataris bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat membentuk Undang-Undang. Mandataris dan pembantunya yaitu para Menteri melaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian para Menteri merealisasikan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri dan seterusnya.

2. Pengorganisasian materi hukum.

Puncak dari pada pertingkatan materi-hukum ialah cita-cita hukum. Sedangkan Cita-cita

Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 ialah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan yaitu:

- a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- c. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
- d. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya cita-cita hukum ini:

- a. diciptakan dalam fasal-fasal Undang-Undang Dasar;
- b. mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- c. mengharuskan pasal-pasal baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan peri kemanusiaan.

Cita-cita hukum ini pada hakekatnya adalah Pancasila, falsafah dasar negara kita yang pokok-pokok rumusan tujuannya dalam bernegara ialah:

- a. memajukan kesejahteraan umum;
- b. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penciptaan lebih lanjut cita-cita hukum ini dalam fasal-fasal Undang-Undang Dasar ialah:

a. Pasal 29 ayat 1. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

b. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga-negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

c. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang;

d. Pasal 30. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara;

e. Pasal 31. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran;

f. Pasal 33 :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

g. Pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Kesemuanya adalah mencerminkan kepentingan perorangan.

Dalam hal hidup bernegara kita lihat rumusan-rumusan:

a. Bab III : Kekuasaan Pemerintahan Negara yang meliputi antara lain:

- kekuasaan pemerintahan itu sendiri.
- keikutsertakan pemerintah dalam pembentukan undang-undang;
- kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.
- pernyataan perang dan perdamaian dengan negara lain;
- pernyataan keadaan bahaya;
- pengangkatan duta, konsul dan penerimaan duta besar asing.

- pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Kesemuanya konsekuen berdasarkan kedaulatan rakyat.

b. Bab IV Dewan Pertimbangan Agung;

c. Bab V Kementerian Negara;

d. Bab VI Pemerintahan Daerah;

e. Bab VIII Hal Keuangan;

f. Bab IX Kekuasaan Kehakiman;

g. Bab X Warganegara;

h. Pasal 32 Kebudayaan Nasional;

i. Bab XV Bendera dan Bahasa;

Instruksi Undang-Undang Dasar mengenai materi ini dikembangkan lebih lanjut dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dituangkan dalam bidang dan sektor sesuai Garis-garis Besar Haluan Negara.

Selanjutnya setiap tahunnya dituangkan dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun dalam undang-undang tentang pokok-pokok bidang tertentu.

Di dalam pelaksanaannya lebih lanjut kita dapat berorientasi pada Departemen-departemen yang asumsinya membagi habis tugas kenegaraan di bidang pemerintahan (*objecten van staatszorg*), yang pokok-pokok pengaturannya (*dianggap*) telah ada dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian secara teoritis Keputusan Menteri telah ada dasar hukumnya pada bentuk/jenis hukum yang lebih tinggi.

3. Sistem kelembagaan negara.

Apabila kita tinjau perihal pengorganisasian bentuk/jenis serta materi hukum maka pada hakikatnya hal ini erat permasalahannya dengan lembaga kenegaraan yang menanganinya. Konsisten dengan asas Kedaulatan Rakyat, maka lembaga tinggi negara yang menangani hukum ini harus dibentuk dengan undang-undang artinya (wakil) rakyat ikut menentukannya.

a. Pasal 2 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang;

- b. Pasal 19. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang;
- c. Pasal 16. Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang;
- d. Pasal 24. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- e. Pasal 23 ayat (5). Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.

Lembaga negara yang dikecualikan dalam hal ini ialah Presiden, yang rumusannya ialah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.

Rumusan Sistem Pemerintahan Negara kita tetap mewajibkan Presiden bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Sistem kepatuhan pada hukum.

Rambu-rambu yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, di dalam hal kepatuhan kepada hukum antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Secara umum dirumuskan bahwa:

"Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perorangan. Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara."

Jadi didambakan di sini suatu kepatuhan yang ideal, tidak berkelebihan rasanya apabila dikemukakan di sini manfaat Penataran P4 serta pelaksanaan Mata Kuliah Dasar Umum, khususnya Pancasila, serta Pendidikan Moral Pancasila di sekolah dasar dan menengah.

- b. Secara kelembagaan kepatuhan dituntut pula

dan hal ini terumus di dalam Sistem Pemerintahan Negara yaitu:

I. Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat);

II. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas);

III. Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis.

- c. Secara perorangan terumus dalam pasal 27 ayat 1;

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

5. Sistem penegakan hukum.

Menurut Undang-Undang Dasar kita maka penegakan hukum terutama dipercayakan kepada kekuasaan kehakiman.

Mengenai Kekuasaan Kehakiman ini rumusannya ialah:

- a. pasal 24 ayat 1 Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- b. di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.
- c. Jabatan di lingkungan kekuasaan kehakiman ini disebut hakim yang menurut pasal 25 dirumuskan: Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.
- d. Di dalam penjelasannya dirumuskan:

Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Demikianlah rambu-rambu yang ideal menurut Undang-Undang Dasar 1945, mengenai sistem hukum nasional yang intinya ialah pelaksanaan Kedaulatan Rakyat berdasarkan Pancasila dan

bagian-bagiannya (sub sistem) ialah:

- a. Sistem tata hukum nasional (bentuk/jenis maupun isi hukum).
- b. Sistem kelembagaan yang menangani hukum;
- c. Sistem kepatuhan pada hukum dan
- d. Sistem penegakan hukum.

III. Keadaan sekarang:

Bagaimanakah kenyataannya sekarang?

Pada waktu Negara Republik Indonesia di-proklamasikan, maka masyarakat Indonesia telah ada sebagai suatu masyarakat bekas jajahan. Ini berarti bahwa selama belum dibentuk hukum baru sesuai dengan sistem hukum yang telah ditentukan rambu-rambunya di Undang-Undang Dasar 1945, maka hukum yang telah ada di masyarakat Indonesia tetap berlaku, karena tiada masyarakat tanpa hukum. Jelas bahwa rambu-rambu yang telah ditetapkan menghadapi hambatan-hambatan ataupun tantangan-tantangan yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:

I. Dalam hal peningkatan hukum timbul kekaburan bahkan pembauran karena "kedudukan" bentuk/jenis hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, telah atau masih bahkan tetap "diduduki" oleh bentuk/jenis hukum dari masa yang lampau. Sekalipun secara teknis-yuridis mungkin bermutu tinggi, namun apabila dikaitkan dengan kelembagaannya, jelas belum menampung aspirasi rakyat Indonesia apabila kita hendak konsisten dengan asas Kedaulatan Rakyat.

Demikian pula mengenai materi, misalnya karena diasumsikan peraturan yang lama telah memberikan pengarahannya, maka peraturan baru yang merupakan pelaksanaan sekaligus memuat arahan baru, sedangkan peraturan lamanya belum dicabut. Timbullah dilema dalam hal bentuk dan materi dihubungkan dengan peningkatan hukum sebagai wadah penyaluran Kedaulatan Rakyat. Sehingga merupakan suatu keharusan untuk menegakkan kembali soko-guru sistem hukum nasional dengan menggalakkan dan meningkatkan pembentukan hukum yang sesuai dengan rambu-rambu Undang-Undang Dasar 1945, untuk menggantikan hukum yang lama, dalam suatu era hukum yang berbo-

bot dan mantap.

2. Di dalam hal kelembagaan nampak bahwa belum semua rambu-rambu yang telah ditentukan, dipatuhi dalam praktek. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang. Prinsip, pelaksanaan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen akan sangat melegakan dan memper lancar terjelmanya sistem hukum nasional, khususnya dalam hal kelembagaan.

Dinamika lembaga serta tersalurnya aspirasi rakyat merupakan tolok ukur pengembangannya. Hakekat kelembagaan kita ialah lembaga musyawarah dalam arti memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran yang ada pada suatu kurun waktu tertentu.

3. Kepatuhan pada hukum, merupakan suatu masalah yang tetap ada sepanjang masa. Sejarah kemanusiaan pada hakekatnya mencerminkan pula sejarah hukum dengan segala kepatuhan dan kegiatan penunjangnya. Pelbagai pola mulai dari sanksi/hukuman yang berat, merumuskan secara tegas tuntas dan lengkap segala hal yang harus dipatuhi (kodifikasi) ataupun sebagai usaha pencegahan (preventif), maupun perumusannya dalam keputusan pengadilan yang terbuka (yurisprudensi) mengandung maksud antara lain agar ada kepatuhan di masyarakat. Khusus di negara kita maka masalah yang sudah menyatu dengan perkembangan hukum ini, ditambah dengan suatu masalah lain yang pengembalian kewibawaan/citra hukum, yang mengalami suatu goncangan yang lazim timbul di negara yang memperoleh kemerdekaannya dengan suatu revolusi. Kewibawaan/citra hukum harus diperbaiki karena akibat penumbangan norma-norma lama termasuk norma hukum. Sisa hukum revolusi dalam suasana tiada revolusi fisik antara lain ialah: pemupukan kekuasaan (machtsvorming) tanpa memperhatikan batas kewewenangan, dan penerapan kekuasaan (machtsaanwending) tanpa berlatar belakang tertib hukum. Ringkasnya dengan meminjam istilah Undang-Undang Dasar 1945, terjadilah negara yang berdasar atas kekuasaan belaka, yang harus kita cegah dan hindari. Sejarah perkembangan hukum kita menunjukkan bahwa apabila seseorang tidak patuh pada hukum maka ia dikucilkan dari dan oleh masyarakat-

nya. Pada saat sekarang pengucilan ini dilakukan dengan memberikan predikat "oknum" kepadanya.

Dari segi ini nampak bahwa kelompok/masyarakatnya seolah-olah sekurang-kurangnya formal masih patuh pada hukum dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan oknum tersebut baik dari segi hukum atau moral.

Bahwa kepatuhan pada hukum dalam arti mendambakan keadilan dan menolak ketidakadilan, di masyarakat kita tetap ada dan semakin meningkat, nampak dari usaha anggota-anggota masyarakat untuk mencari keadilan, mulai dari mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaga Bantuan Hukum sampai ke Hansip, dengan segala konsekuensi yang menguntungkan ataupun merugikan, yang seringkali nampak dalam persoalan perdata.

Dari segi ketidak patuhan dapat dikatakan bahwa ada peraturan perundangan (hukum negara yang tertulis) yang tidak memberikan keadilan baik dalam pengaturannya maupun dalam penerapannya. Dengan pesatnya perkembangan peristilahan Bahasa Indonesia, maka bukan, tidak mungkin bahwa dengan adanya hukum semacam itu, masyarakat kemudian menganggap adanya hukum yang "berperan" sebagai oknum pula, yang harus dikucilkan dari masyarakat karena tidak mencerminkan kepatuhan kepada keadilan.

Secara yuridis-murni peraturan semacam itu disebut melanggar hak asasi sedangkan secara yuridis-sosiologis, peraturan tersebut hanya menguntungkan suatu golongan.

Padahal rambu Undang-Undang Dasar ialah:

Setiap warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.

Sautu masalah lain yang erat hubungannya dengan kepatuhan, ialah yang lazim timbul di dalam suasana bahwa negara mengatasi segala-galanya (etatisme: kedaulatan negara dan bukan kedaulatan rakyat), ialah tumbuhnya anggapan bahwa pejabat negara boleh tidak patuh pada hukum, karena asumsinya ia yang membuat hukum, jadi kalau toh tunduk itu karena kesukarelaan (selbstbindungstheorie-autolimistation). Dalam beberapa hal tertentu gejala inipun nampak dalam masyarakat kita baik secara terang-

terangan maupun secara tersamar dengan rumusan hak khusus (prerogatif), yang dalam suasana kedaulatan rakyat semestinya tidak ada.

Secara yuridis dapat dikatakan bahwa hal ini disebabkan karena hukum dianggap sebagai perintah, sehingga yang memerintah (kan) tidak tunduk pada perintah-perintahnya. Sedangkan hukum harus dilihat sebagai suatu ketentuan (hypothesis) siapapun yang memenuhi kualifikasinya terkena pada apa yang ditentukan, tanpa kecuali. Rumusan yang menampung gagasan ini jelas nampak di bidang hukum pidana dengan istilah "barang-siapa". Mungkin istilah ini perlu diperluas pemakaiannya di bidang hukum yang lain, terutama bidang hukum administrasi negara.

4. Dalam hal penegakan hukum bahwa akan ada suatu Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan dibantu oleh badan-badan kehakiman lainnya berdasarkan undang-undang, maka undang-undang tersebut sudah ada.

Namun satu badan pengadilan belum terbentuk yaitu pengadilan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara yang fungsinya antara lain ialah menegakkan hukum dalam penyelenggaraan kemakmuran. Di samping itu oleh masyarakat luas masih dirasakan bahwa rambu sebagai yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 24 dan 25 belum dilaksanakan yaitu:

- a. bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan
- b. bahwa harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Di dalam hal penegakan hukum ini maka tidak dapat dilewatkan masalah penerapan hukum. Kekuasaan yang "menjaga" agar para warganegara maupun penduduk, lembaga kenegaraan maupun lembaga masyarakat, melaksanakan tugasnya ataupun berperilaku sesuai dengan hukum, disebut kekuasaan polisional.

Kekuasaan polisional ini di negara kita sangat bervariasi dari Menpan, Irjen sampai kepada Angkatan kepolisian dan polisi-polisi khusus.

Pedoman hukumnya yang terutama dari kekuasaan polisional ini ialah hukum acara. Tolok ukur kemanusiaan yang adil dan beradab sangat didambakan dalam hukum acara ini.

Keadaan yang nyata di masyarakat kita di bidang ini masih dalam ambang pembinaan dalam rangka pembaharuan-pembaharuan hukum, termasuk kewibawaan aparaturnya.

Demikianlah selintas kilas pelaksanaan rambu-rambu Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem hukum nasional kita.

IV. Mitos-mitos di masyarakat.

Adanya perbedaan antara rambu-rambu yang ideal dan kenyataan-kenyataan di masyarakat, menumbuhkan kesalahan-kesalahan ataupun pandangan yang semakin lama semakin dianggap benar oleh masyarakat tanpa dikaji lebih lanjut. Untuk mudahnya anggapan-anggapan ini kami sebut "mitos", karena bukankah mitos seringkali tidak "perlu" dikaji kebenarannya, namun pendapat umum sudah terbentuk sebagai akibatnya.

I. Hukum menghambat pembangunan.

Ungkapan ini sangat bertentangan dengan ungkapan tiada masyarakat tanpa hukum. Yang benar mungkin, ialah hukum yang lama (jiwanya) kurang memperlancar pembangunan karena dilaksanakan dengan cara penafsiran yang sempit dan tidak sejalan dengan asas yang lasimnya terkandung dalam suatu aturan peralihan, yaitu sejauh tidak bertentangan dengan perkembangan (baru). Mitos ini pun bertentangan dengan kenyataan yang ada. Pada saat sekarang setiap langkah pembangunan didukung sepenuhnya oleh hukum. Sekurang-kurangnya dengan Surat Keputusan Menteri baik secara sendiri maupun secara bersama. Kita tidak dapat mengatakan bahwa Surat Keputusan Menteri itu bukan hukum, kecuali apabila memang jelas-jelas tidak mencerminkan keadilan dengan Pancasila sebagai tolok ukur. Prinsip tiada masyarakat tanpa hukum, yang tersirat pula dalam sistem pemerintahan negara kita yang berbunyi bahwa Negara Republik Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum, perlu kita hayati benar-benar dan diamalkan secara nyata.

Di sini kita berhadapan dengan pertingkatan pengaturan hukum. Memang pada puncaknya ialah pengaturan dengan hukum negara. Hukum negara inipun untuk mudahnya dapat dibagi dalam:

a. peraturan perundangan primer, yaitu yang disebutkan bentuk/jenis serta lembaga yang berwenang membentuknya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Undang-Undang Peraturan Pemerintah).

b. Peraturan perundangan sekunder yaitu yang tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun secara logis/hierarchis adalah demikian. TAP/MPRS/XX/1966 menyebutkan jenis-jenis Keputusan Presiden, Keputusan Menteri.

Gerak pembangunan banyak didukung oleh peraturan perundangan sekunder karena:

a. mungkin belum cukup bahan/datanya untuk pengaturannya dalam peraturan perundangan primer;

b. mungkin lebih banyak bersifat teknis-bidang-sektor pembangunan.

Pengaturan lebih lanjut dengan peraturan perundangan primer, sangat didambakan agar aspirasi rakyat dapat tersalur. Sebenarnya di samping peraturan perundangan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah, di masyarakat pun ada hukum yang berbentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dapat dikembangkan menjadi peraturan perundangan. Macam kebiasaan ini dapat bervariasi dari code ethiek atau sandi susila yang terbentuk dalam kelompok-kelompok profesi maupun asosiasi sampai persetujuan perorangan antara para warga masyarakat.

Dengan demikian hukum dapat mengakomodir setiap tertib masyarakat termasuk tertib pembangunan.

2. Sarjana Hukum adalah futurolog di segala aspek kehidupan manusia. Di masyarakat seringkali timbul anggapan bahwa apabila ada kesulitan di dalam kehidupan seseorang, kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara, orang menanyakan hukum untuk pemecahannya yang pasti dan yang bersanksi. Hal ini seringkali berlanjut pada pertanyaan mengapa para sarjana hukum tidak merumuskan ataupun menyarankan pengaturannya. Hal ini adalah sangat berat sehingga kita klasifikasikan dalam mitos. Sangat sulit untuk membentuk sarjana hukum baik secara perorangan maupun kelompok menjadi futurolog di segala bidang kehidupan manusia,

masyarakat dan negara.

Mungkin pola ini dapat diselenggarakan dalam masyarakat yang sederhana dan tidak berkembang, namun tidak demikian halnya di masyarakat pada zaman modern ini, tanpa bantuan dan keterbukaan para ahli di bidangnya masing-masing.

Pola ke-narasumber-an perlu dikembangkan didukung oleh pemikiran-melikiran antardisipliner. Kegiatan antara-departemen yang seringkali masih berbobot rendah dapat dikembangkan untuk merealisasikan pola tersebut.

3. Hukum harus dihindari dan bidang hukum tidak diprioritaskan. Suatu mitos yang unik baik yang timbul cara tersirat maupun secara tersurat, dibatin maupun diungkapkan ialah adanya ketegangan pada hukum, sehingga seolah-olah menghindari hukum dan tidak memprioritaskan pemikiran-pemikiran dengan hukum sebagai alat. Hal ini mungkin disebabkan karena :

- a. secara naluriah orang tidak ingin dihukum, sehingga asumsinya menggunakan hukum akan mengikat dirinya akan kemungkinan dihukum atau dibatasi oleh hukum.
- b. secara rasional telah ada spesialisasi dalam pelbagai ilmu "yang melayani" kehidupan manusia, masyarakat dan negara, keterbukaan terhadap bidang ilmu yang lain diasumsikan menghilangkan kemandiriannya (otonomi). Mitos ini jelas tidak tepat karena hukum tidak dapat dihindari dan pemikiran antara disiplin harus dipupuk dalam menangani permasalahan-permasalahan di masyarakat modern.

Di samping itu sikap menghindari hukum tidak menunjang hidup bermasyarakat dan bernegara, bahkan kemungkinan besar anti hidup bermasyarakat dan bernegara.

4. Kesemuanya bisa diatur/kesemuanya harus diatur.

Mitos selanjutnya kita jumpai dimasyarakat dalam ungkapan: "Itu bisa diatur" atau "bisa diatur" dan sebagainya. Mengingat keterbatasan manusia maka ungkapan tersebut adalah tidak mungkin kecuali apabila ditambahkan anak kalimat: "sesuai dengan kemauan kita", sehingga lengkapnya akan berbunyi "Itu bisa diatur sesuai dengan kemauan kita", hal mana mungkin bertentangan dengan aspirasi rakyat atau tujuan

bernegara kita. Bahkan untuk menembus hambatan dalam pelaksanaan, ungkapan ini dilengkapi dengan kalimat: "Kasih uang habis perjas". Dengan demikian jelas bahwa mitos ini tidak pantas untuk dikembangkan, penyuluhan hukum, penerangan hukum maupun bantuan hukum dapat dipakai untuk mengatasinya. Untuk meniadakan akibat buruk dari mitos ini dimasyarakat tumbuh pula mitos lain yaitu agar semuanya diatur dengan hukum negara khususnya peraturan perundangan primer agar rakyat mengetahui apa yang diatur. Suatu hal yang tidak mungkin pula karena gerak kenegaraan akan menjadi lamban (*wetten-staat*).

5. Bidang Hukum memerlukan orientasi non hukum.

Mitos kelima terutama timbul di lingkungan para pembaharu hukum. Kelemahan hukum lama (di Indonesia) digeneralisasikan pada hukum pada umumnya di Indonesia.

Masalah sebenarnya ialah orientasi non hukum dalam pembentukan hukum yang lama dalam mengikuti segala aspek kehidupan bermasyarakat waktu itu, tidak sesuai dengan orientasi non hukum yang dituntut bagi pembentukan hukum yang baru.

Sudah sejak lama orientasi non hukum dianut dan tercermin pada asas sistem terbuka dari perkembangan tata hukum.

Bentuk ekstrim daripada mitos ini bahkan menghendaki agar hukum "menyatukan diri" dengan salah satu orientasi non hukum tersebut. Dengan berlomba-lombanya seseorang sarjana hukum memperluas cakrawala orientasinya dapat terjadi bahwa ia tidak mengayunkan hukum (membentuk, menerapkan menegakkan dan lain-lain) melainkan menerapkan teori dari disiplin yang menambah orientasinya. Keresahan di masyarakat banyak ditimbulkan karenanya, sebab masyarakat belum sejauh itu "pemikirannya". Ungkapan "si mata satu adalah raja di dunia si buta", berlaku dalam suasana seperti ini. Dimisalkan si mata satu di sini, karena mata hukumnya ditutup dan mata orientasi pendukung yang dominan.

6. Pendidikan hukum hanya di lembaga pendidikan formal.

Bahwa mitos ini hidup dengan subur di masyarakat terbukti dengan banyaknya calon ma-

hasiswa hukum dan disorotnya dengan tajam fakultas-fakultas hukum dalam hubungannya dengan hal ihwal hukum di masyarakat. Orang melupakan bahwa di masyarakat sendiri terdapat pendidikan hukum non formal yang banyak mempengaruhi cepat atau lambatnya terbentuk sistem hukum nasional.

Pendidikan di masyarakat di sini bukanlah yang diberikan oleh Fakultas Hukum Swasta, karena sekalipun akhir-akhir ini merisaukan mutu namun keadaannya tidak begitu jauh berbeda dengan yang negeri. Yang dimaksudkan ialah pendidikan yang diberikan secara tidak langsung oleh kelompok-kelompok di masyarakat misalnya dalam hal penyelenggaraan negara oleh para pejabat penerapan, penegak hukum, kelompok-kelompok di masyarakat yang memberikan bantuan hukum, "peradilan oleh media massa, maupun sikap/tingkah laku yang tidak menunjukkan ketauladanan dalam hubungannya dengan hukum.

Pendidikan nonformal ini seringkali lebih efisien, namun di sana sini tidak menguntungkan realisasi sistem hukum nasional kita. Contoh-contoh kongkrit dan cara-cara mengatasinya masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Dampak positif yang bagaimana yang diharapkan berkembang di masyarakat akibat pendidikan nonformal ini memerlukan kesepakatan oleh semua pengayun hukum.

Suatu mitos lain dalam hubungan ini ialah adanya anggapan bahwa justru di lingkungan praktisi hukum tumbuh sikap kurang mendukung tumbuhnya sistem hukum nasional yang baru.

Hal ini disebabkan karena dipertahankannya sistem hukum yang telah dikuasainya demi nafkah hidupnya, suatu sikap konservatip. Mitos ini mungkin benar secara terbatas di lingkungan yang mengutamakan komersialisasi yang tidak manusiawi dalam pelayanan hukum atau pola-pola mafia yang seringkali diungkapkan di masyarakat. Tindakan kongkritnya ialah tidak memberikan masukan bagi perubahan hukum.

7. Masyarakat pada umumnya berkesadaran hukum rendah.

Mitos apriori ini seringkali diungkapkan untuk menjawab adanya kesemrawutan hukum atau tidak terterapnya peraturan-peraturan yang dibuat. Dengan mengecualikan orang-orang yang

memang berniat jahat dalam menentukan baik buruknya suatu tindakan, maka bangsa Indonesia pada umumnya berkesadaran hukum yang tinggi.

Sehingga tidak mungkin buta hukum, kemungkinan yang ada ialah buta peraturan perundangan buta sarana-sarana hukum, buta pengayuman hukum.

Dengan menginformasikan medan juang hukum dan "teriakan perjuangan (hukum)" yang bervariasi dan tidak yang sedang top saja serta didukung oleh satu jajaran pengayun hukum yang tangguh, maka kegiatan ini akan bersambut dengan kesadaran hukum di masyarakat, sehingga dipercepatlah penegakan suatu sistem hukum nasional.

Demikianlah beberapa contoh dari pada mitos-mitos yang hidup di masyarakat, yang sedikit banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran tentang hukum. Deretan contoh ini masih dapat diperpanjang dan perlu diteliti agar pengajaran teori hukum maupun tata hukum dapat diperkaya dengan bagaimana masyarakat Indonesia mengayunkan hukum yang dapat kita katakan budaya hukum Indonesia, masa kini.

Kesadaran dan kemantapan akan adanya suatu sistem hukum nasional bersumberkan Pancasila sangat diperlukan agar kita tidak hanyut dalam arus mitos-mitos di masyarakat.

Bahwa peranan pendidikan sarjana dan pendidikan lanjutan setelah sarjana adalah penting tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Pembaharuan atau penataan kembali pendidikan tinggi hukum, sesuai Peraturan Pemerintah no. 5 tahun 1979 beserta peraturan-peraturan pendukungnya seyogianya dapat mengakomodir perubahan-perubahan dan permasalahannya sehingga diperoleh teori-teori yang lebih mantap.

V. Langkah-langkah menuju realisasi sistem hukum nasional.

Setelah kita tunjukkan rambu-rambu ideal menurut Undang-Undang Dasar 1945, kenyataan-kenyataan yang ada, serta mitos-mitos yang hidup di masyarakat yang berkenaan dengan hukum, maka adalah tidak memenuhi kejujuran-akademik apabila tidak ditunjukkan pula alternatif-alternatif yang dapat menuju ke pemecahan persoalan.

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab yang terdahulu, maka dapat kita simpulkan perlunya

kegiatan di bidang hukum sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan kehidupan hukum yang lebih sesuai dengan rambu-rambu Undang-Undang Dasar 1945, secara murni dan konsekuen perlu pemahaman yang mendalam dan berulang secara konsisten oleh setiap pengayun hukum, mengenai rambu-rambu tersebut.

2. Oleh karena pemegang kedaulatan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu diberikan arahan yang lebih tegas dalam hal pengembangannya di bidang tata hukum hal-hal yang mengenai:

- a. pelaksanaan fungsi legislatif (perbaikan TAP/MPRS/XX/1966.
- b. pelaksanaan fungsi pembangunan. (TAP/IV/MPR/1978)
- c. pelaksanaan fungsi kehakiman (belum ada TAP MPR-nya)
- d. pelaksanaan fungsi polisional (belum ada TAP MPR-nya)
- e. pelaksanaan fungsi kepenasehatan/perancangan/perencanaan (belum ada TAP MPR-nya)
- f. pelaksanaan fungsi kelembagaan negara (peningkatan TAP/III/MPR/1978)
- g. pelaksanaan fungsi keuangan negara (belum ada TAP MPR-nya)
- h. pelaksanaan fungsi hubungan luar negeri. (peningkatan TAP/XII/MPR/1966)
- i. pelaksanaan kehidupan negara (peningkatan TAP/MPR/VII/1978 pemilu/kampanye/parpol
- j. pelestarian dasar negara yang merupakan sumber hukum (peningkatan TAP/MPR/II/1978).

Dan lain-lainnya yang membentuk kebulatan pengarahan oleh pemegang kedaulatan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, agar dengan demikian diperoleh "instruksi" yang lebih tegas bagi para penyelenggara negara, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta para warga negara.

3. Agar dipercepat pembentukan Undang-Undang yang diinstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam suatu kurun waktu yang diperhitungkan, ketentuan-ketentuan tersebut ialah:

- a. Ketentuan tentang pokok-pokok perundang-undangan.
- b. Ketentuan lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman dan badan peradilan.
- c. Ketentuan tentang kedudukan para hakim.
- d. Ketentuan tentang hukum yang berlaku bagi para warganegara, dalam hidup pribadinya maupun dalam hubungannya dengan masya-

rakat dan negara yang benar-benar mencerminkan kesamaan kedudukan dalam hukum.

- e. Ketentuan tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- f. Ketentuan lebih lanjut tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya.
- g. Ketentuan yang menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- h. Ketentuan tentang pembelaan negara.
- i. Ketentuan tentang pengajaran nasional.
- j. Ketentuan tentang kebudayaan Nasional Indonesia.
- k. Ketentuan tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- l. Ketentuan tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara.
- m. Ketentuan tentang bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- n. Ketentuan tentang bangun perusahaan (hukum perseroan).
- o. Ketentuan tentang pengurusan fakir miskin dan anak-anak terlantar.

4. Ketentuan yang diinstruksikan oleh Undang-Undang Dasar ini dapat diperhalus dengan pengarahan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, misalnya yang dimuat dalam TAP/MPR/IV/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang terperinci dalam bidang:

- a. ekonomi;
- b. Agama, Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan Sosial Budaya;
- c. Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Pengerangan dan Pers serta Hubungan Luar Negeri;
- d. Pertahanan dan Keamanan Nasional.

5. Bidang-bidang tersebut akan dapat berkembang sebagai deret ukur, yang untuk sistematisasinya memerlukan suatu pemikiran tentang Program Legislatif Nasional didukung oleh suatu Proses Legislatif yang mantap dan yang benar-benar merupakan program yang nyata berdasar-

kan sistem hukum nasional. Kegiatan ini harus dilengkapi dengan suatu skala prioritas dan pendanaan sehingga benar-benar merupakan suatu program dan bukan sekedar himpunan keinginan Departemen Pemerintahan.

6. Kegiatan perundang-undangan berdasarkan sistem hukum nasional ini dapat dilakukan secara simultan deduktif maupun induktif. Artinya deduktif kita mulai dengan peraturan perundangan primernya dan induktif, kita mulai dengan peraturan perundangan sekundernya. Dalam hal ini perlu dikaji kembali tata aliran kerja antara lembaga yang telah ada. Pematangan proses legislatif ini merupakan suatu kegiatan penunjang tersendiri disamping kegiatan yang mengenai hukum acara.

7. Untuk bidang-bidang kehidupan yang mungkin belum terjangkau oleh peraturan perundangan primer maupun sekunder, sejauh belum/tidak merugikan kepentingan umum dapat dikembangkan dan dibina dengan pola sandi susila di lingkungan profesi dan asosiasi atau dibiarkan berkembang sebagai adat yang tidak bertentangan dengan dasar negara yaitu Pancasila Peraturan lembaga yang melaksanakan pembinaan hukum serta penyelenggara kekuasaan polisional dalam hal ini adalah besar.

8. Pembinaan kepatuhan pada hukum haruslah konsekuen diseluruh lapisan masyarakat, baik ia penyelenggara negara maupun warga masyarakat. Peranan pendidikan hukum dalam arti luas, adalah dominan sehingga diperlukan suatu musyawarah untuk memperoleh kesepakatan tentang dampak apa yang diharapkan dari pendidikan hukum terhadap kepatuhan kepada hukum.

9. Harus digerakkan adanya kesungguhan dan keterbukaan dalam peningkatan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sehingga sesuai dengan rambu-rambu Undang-Undang Dasar 1945.

10. Perlu dikaji kembali penggunaan pranata-pranata dari sistem hukum yang selama ini digunakan sebagai warisan dari zaman yang lam-

pau, agar lebih sesuai dengan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila.

Di sini diperlukan pemikiran dan penglihatan yang lebih terpadu antara pelbagai sub disiplin hukum maupun bagian-bagian dari tata hukum sehingga benar-benar mencerminkan suatu sistem. Peninjauan secara integral ini akan mempermudah mengkaji:

- a. Masih relevankah pembagian sistem hukum dalam hukum privat dan publik.
- b. Bagaimanakah realisasi ide pemasyarakatan dalam sistem hukuman.
- c. Bagaimanakah mempertemukan teori-teori hukum yang sudah berkembang maju dengan daya mengerti dari pada masyarakat agar tidak tercipta suatu "juristen-recht", yang akan dianggap asing karena memiliki orientasi-orientasi pendukung yang sophisticated, oleh masyarakat luas.
- d. Bagaimana merealisasikan ide pengayoman di setiap cabang tata hukum nasional kita.

11. Tidak dapat dikesampingkan disini ialah pemikiran tentang bahasa hukum kita. Dalam hal ini sebagai yang dipelopori oleh Undang-Undang Dasar 1945, digunakan bahasa yang mudah difahami oleh rakyat tanpa terlampau terikat dengan istilah yuridis teknis. Pembukaan dan rumusan dalam pasal-pasal merupakan contoh yang ideal. Pola ini diikuti pola secara sadar oleh Ketetapan-ketetapan MPR khususnya Tap/II/MPR/1978. Namun demikian tidak dapat diingkari akan adanya istilah-istilah khusus hukum yang padat pengertian dan disepakati bersama agar suatu peraturan maupun ketetapan hukum tidak menjadi dongeng tentang keadilan. Suatu otorita diperlukan untuk sahnya pembakuan istilah hukum.

12. Sebagai salah satu langkah yang mendasar pula ialah penciptaan iklim di masyarakat luas yang menunjang akrabnya setiap warganegara dan penyelenggara negara dengan hukum. Bahwa manfaat serta tata cara pengayoman hukum yang terutama harus diinformasikan sudah tidak perlu penguraian lebih lanjut.

Bersambung ke hal. 52

Secuil Tentang Ibu Inggit dalam Proses Pergerakan dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Oleh: Drs. Sumurun Harahap

*Mungkin masih banyak orang yang belum tahu, bahwa dalam proses pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia Ibu Inggit Garnasih banyak ambil bagian bersama-sama dengan Bung Karno. Bukan saja sebagai warga negara, tetapi juga sebagai isteri yang setia rela berkorban baik moril maupun materiel demi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia tercinta !
Tulisan ini sengaja kami muat sekedar untuk persembahan mengenang jasa beliau*

PENDAHULUAN :

Seperti dikatakan orang bahwa masalah jodoh, rejeki dan mati itu adalah di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga halnya dengan Ibu Inggit yang tak diduga kawin dengan Bung Karno hal mana karena sebelumnya Inggit telah punya suami (kawin) dengan Sanusi. Awal pertemuan mereka adalah setelah Soekarno meneruskan sekolahnya ke Bandung, di rumah Inggit tempat Soekarno in-de-kost yang tidak lama kawin dengannya. Bagi Soekarno perkawinan ini membuatnya tampak lebih bahagia dan senang walaupun dalam kehidupan ekonomi rumah tangganya tidak berubah. Bahkan boleh dikatakan kian melarat. Tidak jarang saat itu Inggit dan Karno hanya mampu menyediakan teh tawar tanpa kue kepada tetamunya.

Salah satu penyebab kemiskinan Ibu Inggit ialah, Bung Karno suaminya tidak pernah mencurahkan waktu dan perhatiannya secara penuh bekerja kepentingan rumah tangganya. Waktu dan perhatiannya lebih banyak dicurahkan

untuk perjuangan. Sebenarnya dengan menulis artikel-artikel di koran-koran atau Majalah-majalah waktu itu Bung Karno bisa mendapatkan banyak penghasilan, karena tulisannya selalu menarik perhatian orang. Tapi hal itu tidak dikerjakan olehnya. Bukannya tidak senang dengan pekerjaan tulis menulis itu, tapi karena tulisannya dilarang disiarkan oleh pemerintah Belanda. Meskipun sudah diusahakan menggunakan banyak nama samaran, tapi pada akhirnya pemerintah penjajah tahu juga. Itulah sebabnya kemudian Bung Karno tidak bebas menulis.

Pernah juga Bung Karno membuka biro arsitek bersama Ir. Anwari, tapi usaha itu tidak banyak membantu Bung Karno. Sebab Bung Karno yang senantiasa lebih banyak memusatkan perhatiannya pada perjuangan bangsanya itu, kadang-kala "menyeret" Ir. Anwari ke dalam kegiatannya. Akibatnya kedua pelaksana dan pemimpin biro arsitek itu tidak sempat memikirkan bironya. Itulah sebabnya kemudian Bung Karno meninggalkan biro arsitek tersebut dan kembali hidup tanpa kerja tetap.

Saat itu bila Bung Karno ditangkap, Ibu Wardoyo kakak kandung Bung Karno lalu dipanggil untuk menemani Inggit. Dia dan Inggit seringkali mencari nafkah bersama. Lebih-lebih bila Bung Karno sedang berada dalam penjara. Salah satu usaha yang dilakukannya untuk mencari uang ialah berjualan sabun dan telur. Lama juga berjualan telur dan sabun itu untuk membiayai keluarga Bung Karno dan Inggit. Dikatakan oleh Ibu Wardoyo, bila Bung Karno sedang berada dalam penjara, dia dan Inggit yang paling rajin menjenguk karena

ayah dan ibu berada jauh di Blitar, sedangkan teman-teman Bung Karno yang lain seringkali tidak diizinkan menjenguk Bung Karno.

Ketika dipenjarakan di Sukamiskin, Bung Karno diperlakukan dengan keras dan ketat, karena dia sudah benar-benar dianggap sebagai orang yang berbahaya. Dia tidak boleh disatukan dengan tawanan bangsa Indonesia lainnya. Dia dikerjakan dekat direktur hingga selalu dia diawasi gerak geriknya. Malahan ketika waktu makanpun tidak dicampur dengan tawanan bangsa Indonesia yang lain, melainkan disatukan dengan tawanan kelas tinggi bangsa Belanda sendiri. Mereka itu kebanyakan adalah orang-orang yang melakukan korupsi, penggelapan, penyelewengan dan pelanggaran sumpah jabatan lainnya. Tentu saja Bung Karno tidak bisa bicara soal politik dengan mereka. Paling-paling yang diomongkan soal makanan, cuaca dan lain-lain.

BANYAK AKAL MENIPU BELANDA:

Memang semakin ketat penjagaan dan pengawasan terhadap Bung Karno semakin sulit pula hubungan dengan teman-teman seperjuangan. Namun hubungan itu sebenarnya tidaklah pernah putus sama sekali. Ada saja jalan untuk bisa berkomunikasi, meskipun secara samar-samar saja. Pokoknya banyak akal yang ditemukan saat itu untuk mengelabui Belanda.

Setelah beberapa bulan Bung Karno dilarang menerima kiriman apapun dari luar, akhirnya diperbolehkan menerima kue dan telur dari luar. Telur dagangan Inggit itu bila dikirim tetap bisa dijadikan "media" komunikasi. Misalnya bila Inggit mengirim telur asin, Bung Karno pun tahu, di luar ada kabar buruk. Apa jenis kabar butuk itu memang tidak diketahui persis, namun demikian telur asin kiriman isterinya itu Bung Karno sudah bisa menduga-duga bagaimana keadaan teman-temannya di luar penjara.

Kesempatan yang diberikan kepada ibu Inggit untuk menjenguk Bung Karno seminggu dua kali. Karena kepadanya boleh dibawakan buku-buku agama dan Al-Qur'an, maka melalui itulah komunikasi bisa berlangsung. Misalnya Bung Karno dikirim Al-Qur'an pada bulan April (bulan 4, tanggal 24), maka berarti dia harus membuka surat 4 halaman 24, di bawah

huruf-huruf tertentu halaman tersebut terdapat lubang-lubang yang dibolongi dengan jarum jahit, seperti huruf-huruf braille. Misalnya di bawah huruf B terdapat tusukan, lalu di bawah huruf U ada lagi dan seterusnya, hingga terbentuk kalimat-kalimat yang menggambarkan segala apa yang akan disampaikan dari luar oleh teman-temannya.

Pengiriman telur pun ternyata mempunyai banyak arti. Bila ingin menyampaikan kabar buruk secara umum, maka Ibu Wardoyo dan Ibu Inggit mengantarkan telur asin pada Bung Karno. Tapi bila ingin menggambarkan kabar yang terperinci melalui telur caranya lain lagi, yang digunakan adalah telur yang juga ditusuk dengan jarum. Caranya sederhana sekali. Tapi Bung Karno sudah membaca pesan yang dititipkan lewat telur itu. Misalnya bila ada suatu tusukan pada telur berarti semua kabar baik. Bila dua tusukan artinya seorang teman ditangkap. Tiga tusukan berarti ada penyeragaman besar-besaran.

Selain menggunakan tusukan-tusukan telur dan buku agama atau Al-Qur'an, kadang-kadang digunakan gerakan tangan untuk menyampaikan sesuatu berita. Bila Ibu Wardoyo menarik telinga, menyilangkan jari, mengedipkan mata, menggerakkan satu tangan atau menggerakkan muka, mempunyai makna-makna tertentu yang bisa dimengerti oleh Bung Karno. Ibu dan ayah Bung Karno tidak pernah datang menjenguk Bung Karno. Tidak sanggup mereka melihat anak yang mereka sayangi dan harap-harapkan itu berada di dalam tempat yang "hina". Yakni penjara. Berada dalam siksaan Belanda, musuhnya. Dan berada dalam posisi yang tampak tidak berdaya sama sekali.

Lain lagi pengalaman Ibu Inggit di hutan belantara Sumatera dalam perjalanan dari Bengkulu ke utara digiring oleh dua polisi bangsa kita. Payah sekali Ibu Inggit dan Bung Karno berjalan dalam hutan itu. Kaki sakit, lapar, polisi itu kejam, tak mengerti siapa Bung Karno. Setelah di tengah hutan polisi yang kebetulan orang Sunda dari Sumedang itu menurunkan bedilnya dan mengatakan akan ikut Bung Karno dan menjadi teman. Tapi yang sulit rasakan ialah makanan. Sangat pedih hati Ibu Inggit dengan memohon kepada Allah s.w.t. agar

mendapat pertolongan. Tiba-tiba melihat gubuk kecil dan masuk ke dalamnya yang ternyata gubuk itu kosong dan di sana tak ada makanan dan beristirahat. Tiba-tiba Ibu Inggit melihat seorang memakai sarung palekat, pakai kupiah dan baju putih. Ia menyimpan dukuh satu telompang. Tanpa banyak bicara orang itu membalik dan menghilang.

Begitulah secuil Ibu Inggit sebagai isteri ikut berjuang mendampingi Bung Karno tanpa pamrih. Korban perasaan dan materi. Konon ceritanya, ketika kembali dari Jakarta setelah dicerai oleh Bung Karno, dulu datang seorang Kapten melamarnya dengan memperlihatkan segenggam mas intan. Bu Inggit menolaknya dengan amat halus. Kalau dibahasakan kembali, Bu Inggit tidak merasa butuh emas intan karena pernah memilikinya lebih banyak. Saat ini lemarnya masih tersimpan sebuah kotak cerutu dulunya tempat menyimpan emas intan. Semua itu habis dipergunakan membiayai perjuangan suaminya Bung Karno tanpa pamrih. Cita-citanya: Indonesia Merdeka! Cita-cita itu dimiliki sejak masih jadi santri di Pesantren Cipaera Kosambi Bandung.

BU INGGIT CERMIN WANITA PEJUANG:

Sebagai seorang wanita pejuang patutlah Bu Inggit menjadi contoh tauladan bagi kita semua, kaum wanita Indonesia kini dan nanti. Karena selain ketabahan yang dimilikinya dalam mengemban tugasnya sebagai pendamping seorang pejuang, kita ketahui pula, bahwa Bu Inggit mempunyai suatu daya juang yang sangat mulia. Pengorbanan-pengorbanan yang dilakukannya dalam mendampingi Bung Karno ataupun ketegasan sikapnya yang konsekuen terhadap suatu persoalan merupakan hal-hal yang terus menerus diapresiasi. Apalagi manakala melihat beliau tidak mempunyai karakter sebagaimana yang bisa dilihat pada kebanyakan wanita

masa kini. Ia bukanlah seorang yang status oriented, karena itulah melihat, betapa dimensi humanitasnya sebagai seorang wanita sekaligus pejuang merupakan cerminan apik. Kita tidak dapat menyangkal, bahwa sumbangsih yang diberikannya terhadap perjuangan kemerdekaan RI, merupakan sumbangsih besar, betapapun tak tampak di kasat mata.

Selain itu, manakala coba menyimak kehidupan beliau di hari tuanya, menemukan semacam mutiara kehidupan. Terutama tentang kesederhanaan hidup seorang manusia hamba Allah.

Bu Inggit telah memberikan sebuah cermin, untuk berkaca. Khususnya dalam konteks penatapan terhadap suatu pertanyaan pendek: "Apa yang bisa kita lakukan kini sebagai wanita, dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, sebagai isteri dan juga sebagai ibu? Ibu Inggit memberikan gambaran utuh, tentang hakekat kedudukan wanita Indonesia. Ia bukan saja sumber inspirasi perjuangan, bukan sekedar penyentuh semangat dan daya juang belaka, melainkan jauh dari itu, sekaligus merupakan suatu pesona dari kiprah perjuangan itu sendiri.

Alangkah wajarnya, manakala kini wanita mempunyai semacam cita-cita, atau katakanlah angan-angan, untuk memiliki karakter sebagaimana yang dimiliki oleh Ibu Inggit, memiliki suatu nilai kepribadian, betapapun sebagai manusia biasa, beliau jelas tak akan pernah lepas dari ketidak sempurnaan.

Dan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar Bu Inggit, benar-benar menjadi cermin kehidupan wanita Indonesia dalam kurun panjang di depan. Sekaligus berharap, semoga Allah masih memberikan umur yang panjang. Kita bisa berharap lakukan kini. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah s.w.t.

Bu Inggit, kami rindu meneruskan jiwamu, beri kami izin menjadikan dirimu, tolok ukur eksistensi wanita Indonesia. Merdeka.

(MH, Febr. 83)

VI. Kesimpulan:

Keduabelas langkah yang disarankan adalah langkah-langkah permulaan atau langkah-langkah dasar yang sudah barang tentu akan berkembang dalam ribuan langkah lanjutan.

Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk merealisasikan sistem hukum nasional yang pokok-pokoknya ialah:

1. Didasarkan pada suatu peningkatan hukum baik mengenai bentuk/jenis/materi maupun cara pengaturan dengan hukum. Sebagai mekanisme realisasi Kedaulatan Rakyat.

2. Bahwa puncak daripada peningkatan tersebut ialah Undang-Undang Dasar 1945 di mana tercantum dasar negara kita yaitu Pancasila yang membentuk cita-cita hukum dan tujuan bernegara.

3. Bahwa sistem hukum nasional mendasarkan pengembangannya dengan penciptaan lebih lanjut cita-cita hukum kita, dengan menggunakan Sistem Hukum Dasar;

Sistem Undang-Undang Dasar;

Sistem Garis Besar Haluan Negara;

Sistem kelembagaan negara;

Sistem kepatuhan pada hukum;

Sistem penegakan hukum;

Sistem pendidikan hukum dalam arti luas.

Ketujuh sistem ini merupakan yang pokok yang didukung oleh bagiannya masing-masing secara bulat.

Demikianlah saran langkah yang sudah barang

tentu tidak atau belum sama dengan keadaan dalam praktek.

Mungkin di bidang hukum ketidaksamaan tersebut memang perlu dengan catatan bahwa yang dalam teori harus selalu lebih ideal.

Karena justru apabila ada kesamaan dalam teori dan praktek secara sepenuhnya (bukan secara insidental) maka dapat dikuatirkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Teori mendukung praktek semata-mata sehingga ada kemungkinan pembenaran keadaan yang salah yang mungkin bertentangan dengan dasar negara.

b. Praktek dipaksakan pada teori sehingga diperoleh suatu persamaan yang semu, karena masyarakat mungkin belum matang untuk persamaan tersebut.

c. Persamaan akan menghilangkan tolok ukur ideal untuk pengembangan dan pemecahan persoalan sesuai dengan pengembangan masyarakat menuju suatu masyarakat adil makmur dan beradab dan layak bagi kemanusiaan.

Sebagai kesimpulan akhir dapat dikemukakan bahwa praktek harus menengok teori, dalam arti memperhatikan-mengkaji dan mengamalkannya, sedangkan teori harus memperhatikan derajat perkembangan masyarakat pada setiap kurun memperhatikan derajat perkembangan masyarakat pada setiap kurun waktunya, sehingga akan terlaksana dengan baik ungkapan:

TIADA MASYARAKAT TANPA HUKUM



PENERBIT DAN TOKO BUKU

P.T. PRADNYA PARAMITA (PERSERO)

Jl. Kebon Sirih No. 46 – Tromolpos No. 146/Jkt. Telpon 360411 – Jakarta Pusat

Alamat Kawat: PRADNYA – Jakarta

BANK: BANK DAGANG NEGARA Gambir – B.N.I. 1946 Kramat dan Gambir – BANK BUMI DAYA Gambir

**MENERBITKAN BUKU-BUKU PELAJARAN UNTUK
S.D./SMTP/SMTA. PENYALUR BUKU-BUKU PAKET
JUGA MENYEDIAKAN BUKU-BUKU UNTUK UNIVERSITAS
DAN UMUM.
MINTALAH DAFTAR BUKU KAMI.**

TAHUKAH ANDA ?

(II)

Tahukah Anda, bahwa :

10. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1981 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta tidak berlaku terhadap sekolah atau kursus keagamaan, dan perguruan tinggi serta pendidikan di luar sekolah.
11. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pembinaan Sekolah Swasta No. 0374/U/1982:
 1. Sekolah Swasta adalah sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang dan badan-badan swasta yang bersifat amal.
 2. Pembinaan adalah segala usaha yang meliputi perencanaan, standarisasi/penilaian, pengaturan, pengawasan, dan perizinan pendirian sekolah serta bantuan yang dilaksanakan oleh Departemen.
 3. Maksud dan tujuan pembinaan Sekolah Swasta adalah:
 - 3.1. Mengusahakan agar Sekolah Swasta dapat berkembang sesuai dengan sistem pendidikan nasional.
 - 3.2. Meningkatkan partisipasi dan inisiatif untuk turut menyelenggarakan usaha pendidikan secara efektif dan efisien.
 - 3.3. Memanfaatkan segala sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan.
 - 3.4. Mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, dalam rangka usaha pemerataan kesempatan belajar.
 - 3.5. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan serta penyimpangan dari tujuan pendidikan nasional.
 - 3.6. Menjaga supaya isi dan mutu program, tenaga pengajar, dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.7. Meningkatkan kemampuan Penyelenggara Sekolah Swasta di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah.
4. Tugas dan fungsi Sekolah Swasta adalah:
 - 4.1. Sekolah Swasta bertugas melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional, dengan mempergunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen.
 - 4.2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekolah Swasta berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan pendidikan nasional dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas perguruan yang bersangkutan.
5. Pendirian Sekolah Swasta diatur sebagai berikut :
 - 5.1. Penyelenggara Sekolah Swasta adalah orang-orang atau badan-badan swasta yang bersifat amal.
 - 5.2. Penyelenggara Sekolah Swasta dapat mendirikan sekolah swasta mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan.
 - 5.3. Pendirian Sekolah Swasta harus mendapat persetujuan tertulis Kepala Kantor Wilayah yang bertindak atas nama Menteri.
 - 5.4. Syarat-syarat dan tatacara untuk memperoleh persetujuan Kantor P

dan K ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- 5.5. Sekolah Swasta baru yang didirikan berdasarkan ketentuan ini disebut Sekolah Swasta Terdaftar.
6. Standarisasi persekolahan termasuk sekolah swasta diatur oleh Direktur Jenderal.
7. Akreditasi Sekolah Swasta adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Sekolah Swasta yang sudah tercatat dapat ditetapkan akreditasinya berdasarkan standarisasi yang berlaku.
 - 7.2. Tentang akreditasi sekolah swasta adalah:
 - a. Terdaftar
 - b. Diakui
 - c. Disamakan
 - 7.3. Jenjang akreditasi untuk Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.
 - 7.4. Jenjang akreditasi untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama Swasta ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.
 - 7.5. Jenjang akreditasi untuk Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Sekolah Luar Biasa Swasta ditetapkan oleh Direktur Sekolah Swasta atas nama Direktur Jenderal.
8. Pengelolaan dan Pembiayaan Sekolah Swasta diatur sebagai berikut:
 - 8.1. Penyelenggara Sekolah Swasta berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah yang diselenggarakannya dengan sebaik-baiknya.
 - 8.2. Pembiayaan penyelenggaraan sekolah swasta berasal dari uang sekolah, bantuan orangtua/wali murid, bantuan atau pendapatan lain yang sah, dan atau bantuan dari Pemerintah.
9. Bantuan bagi Sekolah Swasta adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Sekolah Swasta dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah apabila:
 - a. Diselenggarakan oleh Penyelenggara Sekolah Swasta.
 - b. Telah ditetapkan jenjang akreditasinya.
 - 9.2. Jenis dan besarnya bantuan serta syarat dan tatacara untuk memperoleh bantuan diatur dalam ketentuan tersendiri.
 - 9.3. Bantuan dari badan asing atau negara asing diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bimbingan dan Pengawasan terhadap Sekolah Swasta adalah sebagai berikut:
 - 10.1. Departemen memberikan bimbingan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta dalam meningkatkan kemampuan, pengelolaan, dan mutu pelayanan terhadap sekolah yang diselenggarakannya.
 - 10.2. Departemen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah swasta.
 - 10.3. Dalam rangka pembinaan sekolah swasta diadakan supervisi berkala oleh petugas Departemen.
11. Sanksi terhadap Sekolah Swasta adalah sebagai berikut:

Terhadap Penyelenggara Sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dalam Keputusan ini, akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Sekolah Swasta yang ada pada saat berlakunya Keputusan Menteri P dan K RI No. 0374/U/1982, dan telah memperoleh nomor data sekolah dari Direktorat Sekolah Swasta, dianggap sebagai Sekolah Swasta Tercatat.

===***===

Bagaimana membantu Dokter Anda **MENANGGULANGI** Tekanan darah tinggi Anda

Dokter anda baru saja memberitahukan anda bahwa anda menderita tekanan darah tinggi -- hypertension -- dan perlu menjalani pengobatan.

Guna memahami betapa pentingnya mentaati nasihat dokter, ada beberapa hal yang harus anda ketahui :

- * Tekanan darah tinggi tidak boleh diabaikan karena tidak akan hilang dengan sendirinya.
- * Penyakit ini bisa ditanggulangi secara efektif.
- * Penanggulangan tekanan darah tinggi dapat mencegah serangan jantung, penyakit lumpuh (stroke) atau penyakit ginjal.

Mengingat kenyataan tersebut, silakan membaca halaman-halaman berikutnya. Anda akan memahami bagaimana penanggulangan tekanan darah tinggi dapat berarti hidup lebih lama dan lebih sehat.

1. Apakah tekanan darah tinggi itu?

Kalau dokter anda mengukur tekanan darah anda, dicatatnya dua bilangan, yaitu bilangan yang tinggi - dinamakan tekanan systolic, dan bilangan yang rendah - dinamakan tekanan diastolic.

Misalnya, $\frac{120 \text{ (systolic)}}{80 \text{ (diastolic)}}$

Tekanan systolic ialah tekanan darah dalam pembuluh darah nadi pada waktu jantung memompa darah; tekanan diastolic ialah tekanan darah dalam pembuluh darah nadi pada waktu jantung diisi darah untuk denyut berikutnya.

Biasanya, pada orang berumur di bawah 40 tahun, tekanan systolic lebih daripada 140 dianggap tinggi. Namun, bagi mereka yang berumur antara 60 sampai 70 tahun, tekanan systolic antara 150 - 155 tidak perlu dirisaukan. Kalau tekanan diastolic tetap melampaui 90 - 95, maka terdapat tekanan darah tinggi atau hypertension, yang berarti bahwa meskipun jantung sedang beristirahat, tekanan dalam pembuluh darah nadi adalah terlalu tinggi dan bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah.

Tekanan darah akan berubah tiap saat, seperti pada saat kita mengubah sikap badan, mengadakan gerak badan, mengalami ketegangan, sedang merokok, dan ketika tidur. Dengan adanya berbagai perubahan tersebut, dokter anda dalam sesuatu jangka waktu tertentu beberapa kali akan mengukur tekanan darah anda sebelum menentukan ada tidaknya tekanan darah tinggi.

Tekanan darah tinggi - istilah kedokterannya, hypertension - bukanlah "tegang saraf". Orang yang menderita tekanan darah tinggi, tidak selalu menunjukkan gejala gelisah, cepat bereaksi/marah atau bersikap tegang. Kenyataannya, ada orang yang tekanan darahnya tinggi sekali tapi sama sekali tidak merasakannya. Ini disebabkan karena tekanan darah tinggi - pada tahap awal - hampir tidak menunjukkan sesuatu gejala apapun.

Tekanan darah tinggi dapat dialami oleh semua umur, umumnya lebih banyak terdapat pada mereka yang berumur di atas 40 tahun. Walaupun dalam suatu keluarga bisa terdapat banyak kasus tekanan darah tinggi, namun banyak orang-pun yang berasal dari keluarga yang demikian

itu tidak pernah mengalami atau menderita tekanan darah tinggi.

2. Apakah sebenarnya penyebab tekanan darah tinggi?

Banyak orang yang bertekanan darah tinggi, umumnya menderita apa yang dinamakan *essential hypertension*, yang berarti bahwa penyebabnya tidak diketahui. Penyelidikan terhadap penyakit ini masih berlangsung terus, tapi dapat dikatakan bahwa 90 persen dari penderita penyakit ini tidak dapat diketahui penyebabnya yang menimbulkan tekanan darah tinggi tersebut. Makanan dengan terlalu banyak garam bisa merupakan faktor penyebabnya pada orang tertentu.

Penampilan lain dari tekanan darah tinggi disebabkan karena penyakit ginjal, tumor pada kelenjar dekat ginjal, atau penyempitan pada pembuluh darah nadi tertentu. Gangguan tersebut sepenuhnya dapat diatasi. Misalnya kalau tekanan darah tinggi itu timbul karena menyempitnya pembuluh darah ke ginjal, pengobatan pada pembuluh darah tadi sering dapat menyembuhkan tekanan darah tinggi tanpa pengobatan lebih lanjut. Sebagian besar dari kelainan tadi dapat dihilangkan berdasarkan hasil pengamatan cermat dari riwayat kesehatan sipenderita, pemeriksaan kesehatan dan beberapa test sederhana. Ada kalanya diperlukan pemeriksaan khusus, tetapi umumnya sipenderita tidak perlu tinggal di rumah sakit untuk pemeriksaan tersebut.

3. Bagaimanakah terjadinya tekanan darah tinggi?

Jantung memompa darah melalui pembuluh-pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Pembuluh darah besar yang keluar dari jantung dan bercabang ke pembuluh darah yang lebih kecil yang dinamakan arteriola. Arteriola bercabang ke pembuluh darah yang lebih kecil lagi untuk menyalurkan zat asam dan bahan makanan yang dibutuhkan oleh berbagai organ tubuh. Darah kemudian kembali ke jantung melalui pembuluh darah balik. Arteriola tadi, kalau memperoleh rangsangan saraf tertentu, dapat membesar atau mengecil. Kalau pembuluh darah tadi terbuka penuh, darah dengan mudah dapat mengalir dan jantung tidak perlu berdenyut lebih kuat untuk mendorong darahnya. Tetapi, kalau pem-

buluh darah tadi menyempit, maka jantung harus berdenyut lebih keras untuk mendorong darahnya melalui pembuluh darah ukuran sedang itu dan terjadilah tekanan darah tinggi atau *hypertension*. Kalau hal ini terjadi, maka jantung menegang/memikul beban tambahan dan pembuluh darah bisa mengalami kerusakan. Kelainan yang timbul pada pembuluh darah yang mengalirkan darah ke ginjal dan otak bisa menimbulkan kelainan pada organ-organ tadi. Untungnya jantung, otak dan ginjal mampu bertahan cukup lama terhadap pembebanan yang bertambah ini.

Inilah sebabnya mengapa banyak penderita tekanan darah tinggi bertahun-tahun lamanya nampaknya sehat-sehat saja tanpa menunjukkan gejala buruk *apapun*. Tetapi, ini tidak berarti bahwa kesehatan mereka itu tidak terganggu/dirugikan. Telah terbukti bahwa *tekanan darah tinggi tergolong salah satu faktor utama penyebab serangan jantung, kekhupuhan, dan penyakit ginjal*.

4. Tindakan apa bisa diambil terhadap tekanan darah tinggi?

Bagaimana caranya agar anda dapat menolong pembuluh darah dan organ-organ vital anda sehingga sanggup memikul beban tambahan yang disebabkan oleh *hypertension*? Cara bagaimana dokter anda dapat menolong anda? Tekanan terhadap jantung anda dapat diperkecil dengan mengurangi kebutuhan darah yang diperlukan oleh beberapa bagian tubuh anda. Lapisan lemak membutuhkan banyak sekali darah sebagai makanannya. Karenanya, kalau anda terlalu gemuk, salah satu cara untuk mengurangi beban jantung anda ialah dengan mengurangi berat badan.

Disamping menurunkan tekanan darah, diet yang terdiri dari makanan yang tidak mengandung banyak lemak dan kolesterol serta usaha menurunkan berat badan juga dapat membantu menanggulangi timbulnya *arteriosclerosis* (mengerasnya pembuluh darah). Gerak badan ringan boleh dilakukan, tetapi jangan terlalu memaksa diri. Kalau anda berolah raga, berhentilah jika merasa lelah. Sebaiknya, dokter anda menyusun jadwal olahraga yang paling cocok bagi anda.

Kelebihan cairan yang ditahan oleh sodium (garam) di dalam tubuh dapat juga akan menam-

bah beban jantung anda. Karenanya, diet makanan dengan kadar garam rendah, juga dipergunakan untuk menanggulangi hipertension. Namun, jika anda hanya *semata-mata* mengandalkan pada diet ini, maka larangan makanan garam itu, harus benar-benar dijalankan (tidak hanya sekedar meniadakan garam dalam masakan makanan) dan umumnya, sukar sekali bagi orang untuk mentaati pantangan demikian itu untuk jangka waktu yang cukup lama.

Larangan ketat terhadap garam mungkin tidak diperlukan dalam penanggulangan tekanan darah tinggi karena biasanya diadakan pengobatan dengan obat *diuretic* untuk memperlancar pengeluaran kelebihan garam dari tubuh. Anda dapat mengatur kadar garam dalam tubuh anda agar tidak terlalu tinggi dengan berpantang terhadap makanan yang diasinkan seperti kacang atau babi yang diasinkan dan tidak menambahkan garam pada hidangan lainnya. Tidak ada alasan mengapa orang yang menderita tekanan darah tinggi tidak boleh minum sedikit alkohol. Tetapi, kalau anda sedang berdiet untuk menurunkan berat badan, ingat bahwa kadar kalori alkohol itu sangat tinggi. Merokok, faktor risiko penting lain, yang dapat menimbulkan penyakit jantung (coronary heart disease) dan mengerasnya pembuluh darah, harus dikurangi, atau lebih baik lagi dihentikan sama sekali.

Membiasakan diri untuk mengaso/relax sejenak pada waktu bekerja, malam hari dan pada akhir pekan adalah baik sekali. Anda harus banyak tidur, karena pada waktu tidur tekanan darah mencapai tingkat paling rendah dan akan naik lagi ketika anda terjaga.

5. Tentang pemakaian obat.

Umumnya, obat penenang (tranquilizer atau sedative), tidak manjur untuk menurunkan tekanan darah secara berarti.

Obat diuretic (melancarkan pengeluaran air seni), biasanya obat terpenting dalam rencana pengobatan. Dengan mengeluarkan kelebihan garam (sodium) dari tubuh, penggunaan obat tersebut sangat membantu mengendalikan tekanan darah. Berbagai obat diuretic yang umum dipakai meliputi chlorothiazide (Diuril), hydrochlorothiazide (Esidrix, HydroDIURIL, Oretic), bendroflumethiazide (Natoretin), chlorthalidone

(Hygroton), Furosemide (Lasix) dan methyclothozide (Enduron). Semua bekerjanya sama tetapi lamanya bekerja bisa berbeda. Dokter anda akan memilih obat yang paling dikenal olehnya.

Kalau obat diuretic kurang mampu menurunkan tekanan darah sampai normal lagi, dokter anda menambah pengobatannya dengan obat lain. Sering kali akan digunakan tablet kombinasi yang mengandung obat diuretic dan obat untuk khusus menurunkan tekanan darah. Hal ini untuk mengurangi banyaknya jenis tablet yang harus ditelan tiap hari. Di antara obat yang lebih manjur terdapat obat yang berasal dari akar Rauwolfia (reserpine), alpha methyl dopa (Aldomet), propranolol (Inderal), hydralazine (Apresoline) guanethidine (Ismelin), clonidine (Catapres) dan prazosin (Minipres). Obat-obat tersebut melembaskan/relax pembuluh darah yang telah menyempit, dan menurunkan tekanan darah tetapi *hanya* selama obat tersebut bekerja. Karenanya, *pengobatan tidak dapat dihentikan*, walaupun tekanan darah telah turun. Umumnya, sebagian pengobatan harus terus dilanjutkan – mungkin selama hidup – untuk menjamin keberhasilannya. Kalau salah satu obat tersebut ditentukan bagi anda, takarannya harus ditentukan dengan teliti sekali dan anda harus sering diperiksa dokter anda – sedikit-tidaknya sampai tekanan darah tinggi telah diatasi. Setelah itu, anda tidak perlu begitu sering datang ke dokter anda lagi.

Riwayat kesehatan, gaya hidup, dan reaksi anda itu mempunyai ciri-ciri khas sendiri. Dokter anda mungkin harus mencoba dahulu berbagai jenis obat sebelum menemukan yang paling cocok bagi anda – obat yang mampu meredakan tekanan darah tinggi anda dan menimbulkan efek samping yang paling sedikit.

6. Obat penurunan tekanan darah dan beberapa efek sampingannya

Beberapa fungsi tubuh tertentu, di samping yang mengatur tekanan darah, sering terganggu oleh obat tersebut. Adakalanya, obat-obat itu menimbulkan efek sampingan. Ini tidak berarti bahwa anda selalu akan mengalami efek sampingan – **BANYAK PENDERITA TELAH MENGGUNAKAN OBAT-OBAT ITU TADI TANPA MENGALAMI GANGGUAN APAPUN**. Namun apabila anda mengalami efek sampingan, di antaranya

terdapat :

1) **OBAT DIURETIC** dapat menurunkan produksi pelikan atau mineral potassium untuk tubuh. Gejala seperti rasa lemah, tegang urat dan rasa letih pada kaki. Makanan yang mengandung potassium dapat mencegah kekurangan potassium bagi penderita yang menggunakan obat diuretic pada umumnya.

Para dokter mencegah kekurangan potassium dengan memberikan obat cairan atau tablet yang mengandung potassium bersama-sama dengan obat diuretic, terutama untuk penderita yang diberi obat digitalis (perangsang jantung) kalau menderita penyakit jantung. Obat pencegah kekurangan potassium, seperti spironolactone (Aldactone) atau triamterene (Dyrenium) dapat juga diberikan.

Ada penderita yang bisa mengalami gangguan penyakit encok (gout) setelah lama menggunakan obat diuretic. Dokter anda dapat memberikan colchicine untuk mengatasi gangguan tersebut, ataupun allopurinol (Zyloprim) atau probenecid (Benemid) untuk mencegah timbulnya gangguan ini.

Pada penderita sakit gula (diabetes), obat diuretic bisa meningkatkan kadar gula dalam darah. Hal ini dapat ditanggulangi, pada umumnya, dengan mengadakan perubahan diet, pemberian insulin atau obat anti diabetes lain. Dokter anda memahami efek sampingan itu dan akan menyesuaikan pengobatannya.

2) **OBAT RAUWOLFIA** (reserpine) dapat menimbulkan gejala hidung tersumbat, buang-buang air atau rasa sakit pada jantung (heartburn). Gejala tersebut tidak parah dan tidak memerlukan pengobatan kecuali mengubah dosis pengobatan yang diberikan. Kalau timbul gejala mimpi-mimpi yang menakutkan, sukar sekali tidur atau deperesi, anda harus memberitahukannya kepada dokter anda, dan pemberian obat ini harus dihentikan.

3). **ALPHA METHYLDOPA** (Aldomet dapat menimbulkan penurunan tekanan darah bagi orang yang sedang berdiri atau berjalan dan bisa menyebabkan rasa lemah atau pusing seakan-akan tidak sadarkan diri kalau tekanan darah turun terlalu banyak. Perubahan dosis obat, pada umumnya, akan menghilangkan gejala-gejala

tersebut. Obat ini juga dapat mendatangkan rasa kantuk, mulut terasa kering, rasa demam atau lesu. Penderita pria yang menggunakan obat ini dapat mengalami gejala lemah syahwat/impotensi yang mungkin sangat mengganggu. Kalau gejala ini tidak mau hilang, dokter anda mungkin harus mengubah dosis obatnya.

4) **PROPRANOLOL** (Inderal) bisa menyebabkan orang susah tidur, denyut jantung lamban atau bisa menimbulkan gejala asma/sesak napas. Lemah syahwat, walaupun jarang sekali, bisa timbul. Penderita diabetes yang diberi insulin harus memperhatikan reaksinya dengan seksama.

5) **HYDRALAZINE** (Apresoline) bisa menyebabkan sakit kepala, pembengkakan di sekitar mata, denyut jantung yang cepat (heart palpitations) atau rasa sakit pada persendian. Biasanya, gejala-gejala tadi tidak ada yang parah dan akan menghilang setelah menjalani pengobatan beberapa pekan. Kalau tetap tidak mau menghilang, dokter anda akan menanggulangi gejala yang mengganggu itu dengan mengganti obatnya.

6) **GUANETHIDINE** (Ismelin) bisa menimbulkan gejala buang-buang air. Umumnya, dengan dilanjutkannya pengobatan ini, gejala tersebut akan berkurang. Karena penggunaan obat ini, daya penurunan tekanan darah akan lebih besar kalau orangnya sedang berdiri, maka pemakaiannya ada kalanya akan merasa pusing, seakan-akan melayang serta merasa lemah di waktu meninggalkan tempat tidur pagi hari, atau jika tiba-tiba berdiri. Kalau anda mengalami salah satu dari gejala tersebut dan hal itu berlangsung lebih lama dari satu atau dua menit, maka sebaiknya anda duduk dulu atau merebahkan diri sejenak, dan mengurangi atau tidak memakan dosis obat berikutnya dan apabila gejalanya berlangsung terus, hubungilah dokter anda. *Meletakkan sebuah ganjal dari kayu di bawah tempat tidur untuk menaikkan beberapa sentimeter lebih tinggi dari posisi pada waktu tidur, akan memberikan perasaan yang lebih baik.* Akan berguna juga, jika anda bangun dan turun dari tempat tidur secara pelan-pelan dan jangan berdiri diam lebih lama dari beberapa menit. Jika anda mulai merasa seakan-akan melayang-layang atau lemah. Kalau anda memakan obat guanethidine dan janganlah berdiri lama di terik matahari atau

mengikuti acara minum-minum sambil berdiri. Hal yang demikian itu menurunkan tekanan darah. Penderita pria dapat mengalami suatu bentuk lemah syahwat atau impotensi yang tidak membahayakan tetapi bisa terasa mengganggu. Kalau hal semacam itu terjadi, maka hubungi dokter anda.

7) **CLONIDINE** (Catapres) bisa menimbulkan rasa kering sekali di mulut, sukar membuang air besar atau rasa mengantuk. Kalau anda memakai obat ini, jangan tiba-tiba menghentikannya karena tekanan darah bisa cepat naik.

8) **PROZOSIN** (Minipress) bilamana untuk pertama kali dipakai dapat menyebabkan tekanan darah turun dengan tiba-tiba. Kalau anda sebelumnya sudah mengetahui pengaruh obat tersebut terhadap tubuh anda serta mengetahui bagaimana cara mengatasinya, maka akan lebih mudah bagi anda untuk melanjutkan pengobatan. Anda akan menikmati manfaat jangka panjang dari ketekunan anda yaitu tekanan darah yang turun dan umur yang lebih panjang.

Daftar berikutnya menunjukkan kepada anda makanan apa yang boleh anda makan dan yang mana harus anda jauhi, agar banyak menerima potassium dan membatasi penerimaan garam atau sodium.

YANG BAIK : Bahan makanan ini mengandung relatif banyak potassium dan sedikit sodium. Memperbanyak jenis makanan ini akan mencegah gejala kekurangan unsur potassium.

BUAH-BUAHAN

Apel
Apricot
Apokat
Pisang
Cantaloupe (semacam semangka)
Kurma
Grapefruit (sejenis jeruk)
Honeydew Melon (semacam labu)
Nectarine (semacam buah peer)
Prunes
Buah anggur yang dikeringkan
Semangka
Sari buah apel
Grapefruit juice
Prune Juice
Air jeruk

SAYUR-SAYURAN

Asparagus
Buncis
Broccoli (semacam kol kembang)
Brussel Sprouts (semacam kol)
Kobis/kol (direbus)
Kol kembang (direbus)
Jagung yang tidak dipipil
Terong (direbus)
Lima Beans (semacam kacang-kacangan) segar maupun direbus
Kacang hijau (dimasak)
Cabe
Kentang . (dibakar atau dipanggang)
Rades
Squash (semacam labu
Sangat cocok

JAUHI/HINDARKAN :

Bahan makanan berikut ini relatif *banyak* mengandung potassium tetapi juga *banyak* mengandung *sodium* atau garam. Batasi atau hindarkan memakan jenis tersebut:

Tomato juice (kalengan)
Kerang, mentah
Sardines
Lima beans, dibekukan
Kacang-kacangan, dibekukan
Bayem (kalengan)
Wortel (kalengan).

8. Beberapa saran sebagai penutup.

Cara modern untuk menanggulangi hipertensi mungkin nampak rumit dan memerlukan waktu lama, kesabaran, serta perhatian dari dokter maupun sipenderita. Sangat menjengkelkan melelan pil dan mengalami efek sampingan sedangkan sebelum anda berobat anda merasa sehat. Jangan berkecil hati kalau anda diharuskan terus berobat untuk selanjutnya. Jerih-payah ini belum seberapa bila dibandingkan dengan apa yang diperlukan untuk menanggulangi berbagai *komplikasi* yang timbul akibat tekanan darah tinggi. Umumnya penyakitnya dapat *disembuhkan* dengan pengobatan, dan banyak penderita yang tekanan darah tingginya telah disembuhkan secara berhasil kemudian masih dapat hidup normal dan lama.

Tiap-tiap orang yang menderita penyakit hiper-

tensi harus memakan obat yang disebut dalam tulisan ini. Ada orang yang menjadi sembuh dengan cara pengobatan lain. Anda jangan bersikeras memaksa dokter anda untuk memberikan obat-obat tertentu karena anda pernah membaca tentang kemanjurannya terhadap orang lain. Anda bisa mengalami efek sampingan parah akibat memakan obat "mujarab" yang sebenarnya tidak cocok untuk anda. Pilihan obat anda serahkan saja pada dokter anda.

9. Belajar menerima saja tekanan darah tinggi.

Ingat:

- * Jangan takut menghadapi tekanan darah tinggi. Penyakitnya dapat ditanggulangi secara efektif.
- * Ikuti saran-saran dokter anda. Tindakan sederhana seperti penggunaan obat-obat diuretic, sering berhasil baik.

- * Jangan berpindah dari dokter yang satu ke dokter yang lain untuk mendapatkan obat "muzizat". Tetapkan berlangganan pada satu dokter saja atau rumah sakit yang baik dan dengan tekun menjalani acara pengobatannya.
- * Kalau anda diharuskan memakan obat-obatan tertentu, anda harus bersabar dan jangan menghentikannya kalau timbul efek-efek sampingan yang kurang menyenangkan. Beritahukan gejalanya kepada dokter anda.
- * Berikan diri anda kesempatan untuk melahirkan penyesuaian terhadap efek obatnya. Hal ini sering membutuhkan waktu beberapa minggu, tetapi hasil yang akhirnya dicapai akan membenarkan ketekunan anda.

(Yayasan Jantung Indonesia).

DIRGAHAYU
REPUBLIK
INDONESIA

Selamat HUT
Ke-38

RAMAYANA 83

HARUM GURIH NIKMAT

DIREKSI, STAF & SEGENAP KARYAWAN,
P.T. Perusahaan Rokok
GUDANG GARAM Kediri-Indonesia

LAMBAH KENIKMATAN



Drs. Achmad Djunaedi dan Supriadi, BA (baris depan) masing-masing utusan PD IV PGRI DKI Jakarta pada Konpus PGRI th. 1983.



Suasana pembukaan Konpus PGRI 6 Juni 1983 di Jakarta. Dari kiri: Rh Kusnan, Ketua Umum PB-PGRI th. 1945, Wahyu Sukotjo, Pejabat Tinggi Menko Kesra, Prof. Dr. Nugroho Notokusanto, Menteri P dan K - RI, R. Soepranto, Gubernur KDKI Jakarta.



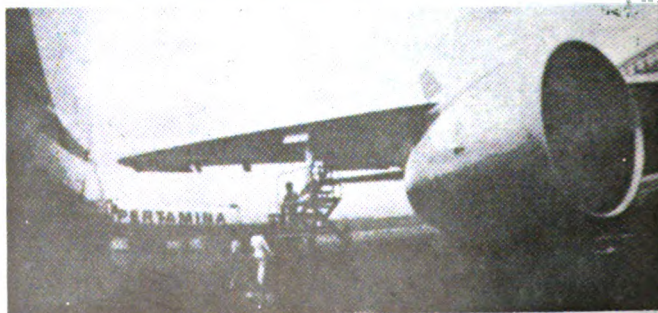
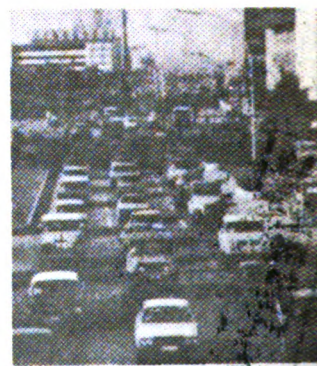
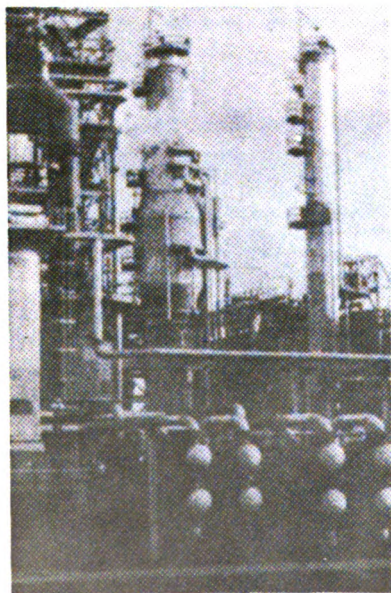
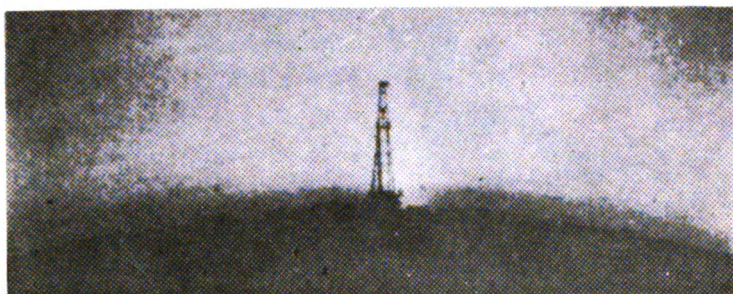
PERTAMINA

PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA

Kantor Pusat : Jl Merdeka Timur No 1

Telp : 3039, 3032300 s/d 3032307

Telex : 44152, 44302, 44441.



".....kami menantang buasnya hutan rimba, hempasan ombak lautan untuk mencari dan menemukan sumber minyak dan gas bumi penggerak roda-roda pembangunan....."

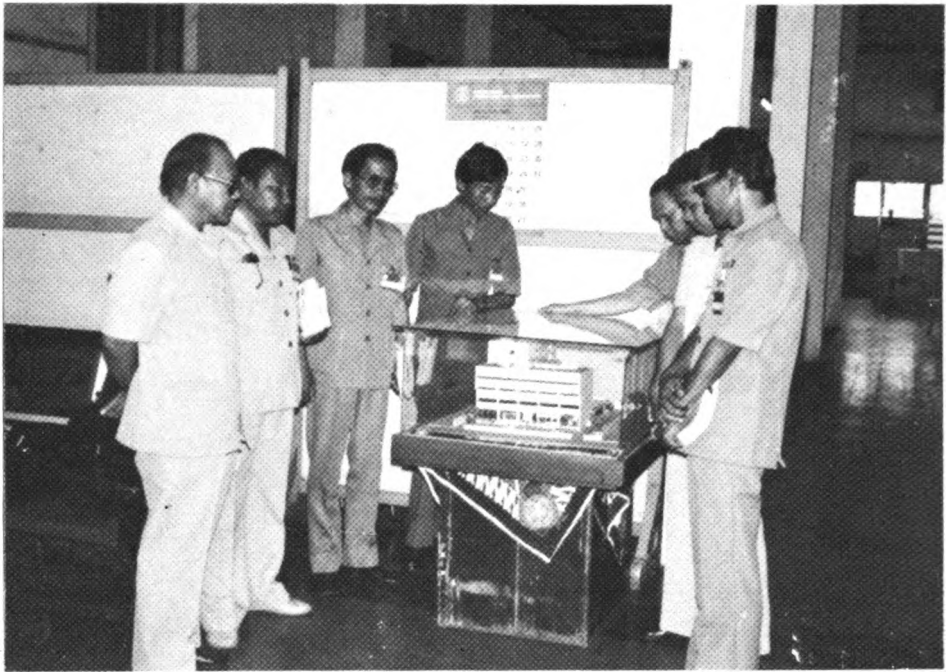
Suara GURU

No. 8 Th. XXXII – 31 AGUSTUS 83

MAIN/JUC-B

LIBRARY
APR 05 1983
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

Majalah Bulanan Profesi Guru



Pemenang Sayembara Mengarang Guru SD Th 1983 sedang melihat maket Gedung Pengurus Besar PGRI.



Guru Teladan Tingkat Nasional (Guru SLP) berfoto dengan PB-PGRI sesudah diterima oleh Pengurus Besar PGRI, 12-8-1983



Majalah Suara Guru
No. 8 Th. XXXII – 31 Agustus 1983.

PENERBIT

Pengurus Besar Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI)

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI

PEMIMPIN UMUM

H.Basyuni Suriamiharja

KETATAUSAHAAN

Pimpinan : Drs.W.D.F.Rindorindo
Wkl.Pimp. : Muhd. Hatta
Anggota : F.A.Santoso, B.Sc.

REDAKSI

Pimpinan : Prof.Dr.Amran Halim
Wkl.Pimp./Skr. : Drs.H.Gazali Dunia
Anggota : Suyono ● A.T.Sianipar, SH.
● Ki Soeratman ● Drs. Gino Sutarno
● Anggota PB-PGRI lainnya

STAF REDAKSI

● Galisung MS ● Syarifulkani ● Sutiyo
● Edi Marhami

IZIN TERBIT

Skp Deppen No. 099 SK-PDHM-SIT-66
Tanggal 18 Februari 1966
(Izin Peperada Jaya No KEP-108-P/5-1966)

REDAKSI & TATA USAHA

Jl. Tanah Abang Tiga No.24 Jakarta
Telp. 341121 – 340598

Percetakan

PT. HARAPAN MASA
Telp. 582225

DAFTAR ISI

	Halaman
• Tajuk Rencana	2
• Pidato Kenegaraan Presiden RI – Soeharto di depan Sidang DPR, 16-8-1982	3
PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
• Prof. Dr. Nugroho Notosusanto: Minat Kepada Sekolah Kejuruan akan lebih dikembangkan	9
• Di masa Transisi Nilai Sulit Menjadi Guru	10
• Prof. Darji Darmodihardjo; SH: Hari Pendidikan Nasional Tidak Untuk Menghambur-hamburkan Uang	12
• Sambutan Dirjenbud pada Upacara Penyerahan Hadiah Lomba Mengarang Tingkat SD dalam Rangka Harpenas di Jakarta	13
• Dra. Soedijarto, MA: Pelaksanaan Kurikulum 1975 Implikasinya bagi Penyusunan dan Pelaksanaan Program Penataran Tenaga Kependidikan	14
• Menteri Dikbud Serahkan Buku PMP Edisi Baru Pengganti Edisi Lama	20
• Warisan Budaya Baru Bermanfaat Bila dapat Dikomunikasikan dengan Masyarakat	21
• Prof. Harsja W. Bachtiar, MA Kepala Balitbang Depdikbud yang Baru	22
• Petunjuk Pembinaan Sekolah	23
• Penulisan dan Penerbitan Buku Bacaan perlu ditingkatkan	27
• Pedoman Pemberian Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Ditetapkan	28
• Mendikbud Meninjau Muhammadiyah dan Taman Siswa	32
• Mendikbud Tetapkan Akronim Komunikasi Informal Bagi Unit Organisasi Depdikbud	33
• Hasil Sayembara Mengarang untuk Guru SD Dalam Rangka Hardiknas Tahun 1983	37
• Guru Memberikan Saham yang Amat Besar dalam Membentuk Manusia Masa Depan	38
• Hingga Kini Ria Pembangunan Tetapkan Tampil Sebagai Sponsor Pemilihan Guru Teladan	39
RUANG P – 4	
• Pendekatan Pendidikan Orang Dewasa dalam Masyarakat P-4 di Kalangan Masyarakat	40
YPLP-PGRI ! PUSAT	
• Daftar Lembaga Pendidikan PGRI Seluruh Indonesia	47
SUMBANGAN GEDUNG GURU	
• Uang masuk sampai dengan Agustus 1983	48
RUANG KESEHATAN	
• Penyakit Hipertensi & Jantung	49
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
• Undang-undang No. 8 Th. 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian	51
RUANG SASTRA	
• GURU ; Karya Rampi Nila	58
SURAT PEMBACA	
• Surat Pembaca	59

Keterangan Cover.

H. HARMOKO, MENTERI PENERANGAN RI
DALAM KABINET PEMBANGUNAN IV.

TAJUK RENCANA

Dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1983 di depan Sidang DPR, antara lain Presiden mengatakan, betapa perlunya kita mengadakan penyegaran motivasi dan moral dalam menghadapi tugas berat dalam tahun-tahun mendatang.

Pembangunan yang kita hadapi sekarang dan dalam Pelita IV nanti memerlukan kemampuan di segala bidang. Kemampuan ilmu, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur dan tekun, perlu didukung oleh motivasi yang segar dan moral yang jujur murni, bukan moral yang mumpung, bukan moral yang santai, bukan pula moral yang korup yang merusak kehidupan Bangsa dan Negara.

Pembangunan dalam segala bidang memerlukan tenaga-tenaga ahli, tenaga juru-juru teknik, mulai dari pembangunan sederhana sampai kepada pembangunan-pembangunan raksasa. Para pelajar dan orang tua murid dari sekarang hendaknya sadar dan insaf bahwa masuk sekolah kejuruan seperti yang telah dikembangkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan salah satu langkah positif untuk menjawab tantangan-tantangan bagi pembangunan sekarang dan nanti, yang memerlukan beratus, beribu, ya mungkin jutaan para juru, para ahli dan para teknisi kita, yang kemampuannya sangat diperlukan dalam pembangunan industri ringan dan industri berat.

Sementara itu penyerahan buku PMP yang baru oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pengganti Edisi lama yang di sana-sini terdapat kesalahan, satu tanda bahwa Pemerintah amat prihatin dan selalu memperhatikan masalah-masalah sensitif, terutama menyentuh soal-soal agama. Adanya PMP baru ini kita harap dapat menghilangkan kegelisahan dan keresahan selama ini dengan dapat memberikan suasana lega dan tenang dalam masyarakat kita yang sedang membangun.

Redaksi

PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
16 AGUSTUS 1983



Presiden Republik Indonesia
Soeharto

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati;

Para hadirin yang berbahagia;

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Besok, tanggal 17 Agustus 1983, Insya Allah, kita akan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kita.

Tiga puluh delapan tahun yang lalu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Demikianlah kalimat-kalimat sederhana dan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Dalam kesederhanaannya itu terkandung makna yang dalam.

Kalimat-kalimat yang mengandung pesan yang penuh keagungan dan keluhuran itulah yang saat ini menyentuh dasar yang paling dalam dari lubuk hati kita, pada saat-saat kita memperingati hari yang paling bersejarah dalam kehidupan bangsa kita.

Merenungkan kembali kalimat-kalimat Pembukaan Undang-Undang Dasar tadi, hati kita terasa bergetar. Semangat kita terasa berkobar. Kita teringat kembali perjuangan dan pengorbanan yang sangat panjang dari rakyat Indonesia, di bawah pemimpin-pemimpin yang berani, melawan penjajahan semenjak mereka menjejakkan kaki di bumi Nusantara ini.

Kita teringat kembali lautan Sang Merah Putih yang melambai-lambai di mana-mana dari ujung ke ujung Tanah Air ini menyambut Indonesia Merdeka di tahun '45, melambangkan tekad kemerdekaan dan semangat kebangsaan.

Kita teringat kembali gelombang demi gelombang pejuang kemerdekaan, dengan senjata sederhana, menyerbu kubu-kubu musuh dengan semboyan: merdeka atau mati. Tidak sedikit mereka gugur di medan laga, demi kehormatan kita yang hidup sekarang dalam suasana merdeka.

Karena itu, setiap kali kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan, kita tidak henti-hentinya menyampaikan hormat atas pengorbanan

dari para Pahlawan Kemerdekaan kita yang berasal dari semua lapisan, semua golongan dan semua generasi yang puseranya tersebar menghiasi seluruh Tanah Air.

Perjuangan itu akhirnya berhasil karena kita bersatu padu mempertahankan dan menegakkan Negara Proklamasi Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dengan tujuan tunggal menjaga Kemerdekaan Nasional itu kita tidak pernah mempersoalkan suku bangsa, asal usul, pangkat, kekayaan, agama yang dipeluk di antara kita yang berjuang bersama untuk satu tujuan besar.

Semangat persatuan dan kesatuan yang demikian itulah yang akan terus kita perkukuh untuk bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju cita-cita kemerdekaan dalam zaman pembangunan lahir batin sekarang ini.

Sekarang, tiga puluh delapan tahun setelah Indonesia Merdeka, perjalanan kita sebagai bangsa dan negara telah makin jauh. Jalan yang kita tempuh tidak selamanya lapang. Tidak sedikit bukit yang kita daki, banyak lembah yang kita turuni, tidak kurang-kurang sungai telah kita seberangi. Dalam perjalanan yang panjang itu tubuh kita kadang-kadang mengalami luka-luka. Namun kita tidak merasa lelah, karena kita adalah bangsa pejuang. Kita juga tidak pernah menyerah karena kita tahu tujuan kita adalah masyarakat yang indah.

Kita makin kuat, kita makin banyak pengalaman dan kita makin dewasa.

Namun kita menyadari bahwa perjalanan kita sebagai bangsa dan negara masih akan panjang. Perjalanan itu menuntut kekuatan baru dari kita semua.

Karena itu, setiap kali kita memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan kita perlu menyegarkan, memperdalam dan memperbaharui kesadaran mengenai: keadaan kita sebagai bangsa dan negara sekarang ini, dari mana kah kita telah berangkat dan ke arah mana kah kita akan melanjutkan perjalanan.

Tahun ini Hari Proklamasi Kemerdekaan kita peringati lima bulan setelah Sidang Umum MPR dalam suasana kegembiraan yang besar dan suasana persaudaraan yang akrab. Sebabnya ialah karena semua keputusan Majelis yang mengesawantahkan kedaulatan rakyat itu telah dapat diambil dengan hati yang ikhlas, pikiran yang bulat serta semangat persatuan dan kesatuan

nasional yang kukuh.

Karena itu dengan hati yang ikhlas, pikiran yang bulat serta persatuan dan kesatuan nasional yang kukuh pula saya mengajak semua lapisan, semua kalangan dan semua generasi bangsa kita untuk melaksanakan semua keputusan MPR itu sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya.

Hal itu bertambah penting karena tahun-tahun yang akan datang kita menghadapi pekerjaan yang besar, sedangkan ujian yang harus kita lalui adalah ujian yang berat.

Pekerjaan kita sangat besar karena kita harus segera menyusun Repelita IV dan mulai melaksanakannya tahun depan.

Dalam pada itu tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang dan tanggung jawab terhadap kejayaan bangsa kita di masa datang mengharuskan kita menyusun Repelita IV dengan jangkauan pandangan yang jauh ke depan, melampaui kurun waktu lima tahun mendatang.

Setidak-tidaknya ada dua alasan yang mengharuskan kita memiliki wawasan yang jauh itu.

Alasan pertama adalah arah pembangunan yang ditetapkan oleh GBHN sendiri. Di sana ditegaskan bahwa dalam Repelita IV kita harus mengusahakan percepatan tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang dengan mengusahakan terciptanya kerangka landasan bagi bangsa ini untuk tumbuh dan berkembang dengan kekuatannya sendiri. Selanjutnya, kerangka landasan yang kita ciptakan dalam Repelita IV tadi akan kita mantapkan dalam Repelita V, sehingga dalam Repelita VI kita dapat tinggal landas menuju masyarakat yang kita cita-citakan ialah masyarakat makmur berkeadilan berdasarkan Pancasila. Ini berarti kerangka landasan yang akan kita ciptakan dalam Repelita IV akan sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat Indonesia menjelang berakhirnya abad ke-20 nanti dan dengan landasan itulah bangsa kita akan memasuki abad ke-21.

Alasan kedua adalah bahwa dengan Repelita IV maka Angkatan '45 akan makin mendekati perampungan tugas historisnya. Ini berarti bahwa kerangka landasan yang akan kita ciptakan dalam Repelita IV nanti akan ikut menentukan apakah Angkatan '45 sebagai Generasi Pembebas telah berhasil dalam menjalankan tugas historisnya sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab yang

sebesar-besarnya terhadap generasi-generasi selanjutnya dan terhadap sejarah bangsanya.

Angkatan '45 telah bertekad menjadi Generasi Pembebas yang sukses. Angkatan '45 telah bertekad tidak meninggalkan masalah-masalah pelik yang membahayakan Generasi Penerus dan generasi-generasi selanjutnya. Tekad ini harus dihayati oleh setiap unsur Angkatan '45 yang didorong oleh rasa tanggung jawab dan hasrat untuk mengabdikan kepada negara dan bangsa yang kita tegakkan, kita pertahankan, kita bangun dan kita cintai bersama untuk kemudian dilanjutkan dan disempurnakan oleh generasi-generasi anak cucu kita.

Sama halnya dengan semua generasi dan setiap angkatan, maka Angkatan '45 terdiri dari manusia-manusia biasa yang tidak bebas dari kelemahan dan kekurangan. Namun dengan segala kekurangan dan kelemahannya, di atas pundak Angkatan '45 itu telah diletakkan tugas historis sebagai Generasi Pembebas dalam sejarah bangsa ini.

Setelah Pergerakan Kemerdekaan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, maka Generasi Pembebas kita telah mengantarkan rakyat Indonesia ke zaman baru, ialah zaman pembangunan dengan mengusahakan terciptanya landasan yang kukuh kuat.

Tahap berikut dari zaman pembangunan itu ialah tinggal landas dengan kekuatan sendiri menuju masyarakat moderen yang makmur berkeadilan berdasarkan Pancasila.

Sukses atau gagalnya bangsa kita setelah tinggal landas nanti dalam mewujudkan masyarakat maju material dan spiritual antara lain akan ditentukan oleh sukses atau gagalnya kita selama Repelita IV untuk menciptakan kerangka landasan bagi pertumbuhan dan perkembangan yang kokoh selanjutnya dari bangsa dan negara kita.

Karena itu sangat jelas bagi kita bahwa Repelita IV mempunyai arti yang teramat penting bagi generasi-generasi selanjutnya, bagi kejayaan dan kemakmuran bangsa kita seterusnya.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Tahun-tahun di depan kita adalah tahun-tahun yang masih sulit, berisi beraneka ragam tantangan dan kerawanan. Meskipun demikian, tahun-tahun di depan kita itu tetap mengandung banyak harapan. Ini mengharuskan kita semua menampilkan tanggung jawab bersama yang sebesar-besar-

nya agar di satu pihak kita dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dan menundukkan tantangan-tantangan sehingga kita dapat melampaui kerawanan-kerawanan dengan selamat. Di lain pihak, dengan bekerja keras bahu membahu antara semua lapisan, golongan dan kekuatan bangsa ini, kita berusaha mencapai kemajuan yang lebih besar lagi.

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 maka tiap tahun dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara kita selalu dihadapkan kepada ujian demi ujian. Namun lima tahun mendatang menghadapkan kita semua pada ujian yang bersifat khusus, dalam arti, bahwa tahun-tahun itu dari kita semua diharapkan ikut meletakkan kerangka landasan bagi perkembangan dan pertumbuhan bangsa dan negara kita dalam dasawarsa-dasawarsa selanjutnya.

Karena itu pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan tahun ini, kita menyadari secara khusus pula betapa perlunya kita mengadakan penyegaran motivasi dan moral dalam menghadapi tugas besar dan tantangan-tantangan berat di tahun-tahun yang akan datang. Tanpa penyegaran motivasi dan moral kita pasti tidak akan mampu mengatasi tantangan-tantangan berat dan memikul tugas-tugas besar tadi.

Sumber bagi penyegaran motivasi dan moral itu ialah penghayatan kepada perjuangan bersama dari semua pihak, semua golongan, semua lapisan dan semua generasi bangsa kita di masa lampau, khususnya dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan Kemerdekaan Nasional.

Dalam perjuangan untuk kemerdekaan dan persatuan itu Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan telah menjadi pedoman kita semua tanpa kecuali.

Pancasila merupakan sumber yang hidup, bukan sumber yang kering dan mati, bagi penyegaran motivasi dan moral bagi semua pihak, semua golongan, semua lapisan dan semua generasi dalam menghadapi tantangan dan ujian berat yang akan datang.

Pancasila sebagai sumber penyegaran motivasi dan moral dalam tahun-tahun mendatang tidak lepas dan sama sekali tidak bertentangan dengan sumber penyegaran motivasi dan moral di bidang kehidupan keagamaan, kebudayaan dan intelektual bangsa kita. Penyegaran motivasi dan moral

di bidang itu justru memperkuat, memperkaya dan memperdalam penyegaran motivasi dan moral yang bersama-sama kita peroleh dari Pancasila.

Dalam rangka inilah sangat penting bagian yang sangat hakiki dari GBHN 1983 yang mencerminkan tekad kita semua untuk memandang pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Jika kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, maka ini tidak berarti bahwa kita melamun untuk membangun masyarakat yang sempurna tanpa kekurangan atau tanpa cacad. Sebagai manusia yang secara kodrati memang tidak sempurna, maka kita pun tidak mungkin membangun masyarakat yang sempurna.

Pembangunan, seperti halnya setiap karya manusia tidak akan bebas dari kekurangan dan kesalahan. Itulah sebabnya dalam pembangunan diperlukan koreksi dan pembaharuan terus menerus.

Dengan bertekad melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, maka kita menyadari bahwa dalam melaksanakan pembangunan itu kita mempunyai arah dan tolok ukur bagi pemikiran, perencanaan dan kegiatan kita dalam membangun. Dengan demikian kita akan mengetahui apa yang kita anggap baik dan karena itu harus kita usahakan dengan penuh keyakinan. Kita pun akan mengetahui apa yang harus kita tolak dan karena itu akan kita hindari dengan penuh kesadaran.

Belajar dari pengalaman pembangunan masyarakat-masyarakat moderen lainnya, kita melihat kecenderungan-kecenderungan bahwa pembangunan masyarakat moderen itu dapat mengarah pada pendangkalan kehidupan keagamaan dan spiritual. Tidak jarang juga disertai oleh ketegangan-ketegangan dalam kehidupan keagamaan dan kepercayaan. Kecenderungan-kecenderungan ini dapat kita hindari sedini mungkin dengan pengamalan Pancasila, khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pembangunan masyarakat moderen tidak jarang membawa akibat samping merosotnya martabat manusia. Manusia diturunkan harkatnya sehingga hanya merupakan bagian yang tak berarti dari suatu mesin raksasa untuk pembangunan. Kecenderungan ini dapat kita hindari dengan mengamalkan Pancasila sebaik-baiknya,

khususnya Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam melaksanakan pembangunan yang secara konsekuen kita laksanakan sebagai pengamalan Pancasila.

Pembangunan masyarakat moderen acapkali membawa kecenderungan berbenturannya kepentingan antara golongan dalam masyarakat. Dalam masyarakat kita yang majemuk, keanekaragaman kita perlu kita cegah agar tidak menjadi kerawan-an-kerawanan. Kecenderungan-kecenderungan ke arah ini dapat kita hindari dengan mengamalkan Sila Persatuan Indonesia dari Pancasila. Pemikiran, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kita harus dapat melunakkan faktor-faktor yang dapat melemahkan persatuan bangsa, sambil memperkuat faktor-faktor yang dapat terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa itu.

Pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berarti kita mengembangkan sistem Demokrasi Pancasila yang mantap dalam rangka kesinambungan, pembaharuan dan peningkatan dari perkembangan pembangunan politik yang telah dapat kita capai hingga sekarang. Dengan demikian, di satu pihak, kita dapat memelihara stabilitas nasional dan pertumbuhan politik, sedang di lain pihak kekuatan-kekuatan dan aspirasi yang terus tumbuh dalam masyarakat dapat tersalurkan secara positif dan kreatif.

Mengenal pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka hal ini harus mewarnai seluruh gerak pembangunan kita. Kita pun harus berusaha untuk mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang cenderung menyertai pembangunan masyarakat moderen yang meningkat.

Sidang Dewan yang terhormat;

Saya menyadari sedalam-dalamnya, bahwa — seperti yang ditegaskan dalam kalimat-kalimat penutup GBHN — berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila itu tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu pada kesempatan ini, melalui Sidang Dewan yang mulia ini, saya menyerukan kepada seluruh lapisan rakyat Indonesia dan

segenap penyelenggara negara untuk bersama-sama maju sebagai barisan yang besar dengan sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin yang setinggi-tingginya melaksanakan GBHN sebaik-baiknya dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Dengan kesadaran yang sedalam-dalamnya akan tanggung jawab saya kepada rakyat Indonesia dan kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui, saya telah menyatakan sumpah menurut agama yang saya anut — ialah agama Islam — untuk melaksanakan GBHN itu sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Karenanya saya akan berusaha untuk melaksanakan tugas saya itu sebaik-baiknya dengan sepenuhnya-penuh kemampuan saya.

Dalam pada itu, saya menghargai dan berterima kasih atas sumbangan pikiran yang secara langsung atau tidak langsung telah saya terima dari lembaga-lembaga, golongan-golongan dan perorangan berupa saran-saran yang positif dan kreatif mengenai pelaksanaan yang sebaik-baiknya dari GBHN itu. Saya mengharapkan lebih banyak lagi datangnya pandangan-pandangan yang positif dan kreatif.

Sidang Dewan yang saya muliakan;

Memasuki tahun ke-39 dari usia Kemerdekaan kita, maka segala perhatian, pemikiran dan usaha-usaha kita akan terpusat pada pelaksanaan Repelita IV dalam rangka melaksanakan GBHN yang telah digariskan oleh Sidang Umum MPR bulan Maret '83 yang lalu. Sebagai Mandataris MPR yang ditugasi untuk melaksanakan segala putusan Majelis, maka saya telah membentuk Kabinet sebagai alat kelengkapan pemerintahan yang sangat penting.

Dalam menyusun Kabinet dan menentukan programnya saya memperhatikan dengan saksama Ketetapan-ketetapan MPR tahun '83 dan juga Ketetapan-ketetapan MPR '78 yang masih berlaku.

Memahami tugas nasional yang utama untuk melanjutkan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, memperhatikan perkembangan nasional dan internasional yang akan sangat mempengaruhi kita dalam waktu lima tahun mendatang, meneliti tugas-tugas lainnya yang dipercayakan kepada Mandataris, maka dalam membentuk Kabinet Pembangunan IV saya

telah menetapkan Panca Krida Kabinet yang sekaligus juga merupakan program nasional untuk waktu lima tahun mendatang.

Panca Krida Kabinet Pembangunan IV itu meliputi :

Pertama :

Meningkatnya Trilogi Pembangunan yang didukung oleh ketahanan nasional yang makin mantap;

Kedua :

Meningkatnya pendayagunaan aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

Ketiga :

Meningkatnya pemawarakan ideologi Pancasila dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila dan P4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;

Keempat :

Meningkatnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional;

Kelima :

Terlaksananya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1987.

Seperti halnya Repelita IV, yang merupakan kelanjutan dan peningkatan Repelita III, Panca Krida Kabinet Pembangunan IV ini juga merupakan kelanjutan dan peningkatan dari Sapta Krida Kabinet Pembangunan III dahulu. Dengan demikian terjamin pula kesinambungan program-program nasional dari kurun waktu lima tahun yang lalu dengan program nasional dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Memelihara kesinambungan, dengan berani mengadakan koreksi sambil meningkatkan dan memperluas pembangunan nasional itu sangat penting, sebab pembangunan nasional dalam jangka panjang memang merupakan proses maju dari serangkaian tahap-tahap pembangunan.

Panca Krida itu diarahkan untuk menciptakan kerangka landasan bagi bangsa Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang terus dalam tahap pembangunan selanjutnya.

Seperti yang ditunjukkan oleh GBHN, maka kerangka landasan yang tercipta dalam Repelita

IV tadi kita mantapkan lagi dalam Repelita V, sehingga dalam Repelita VI bangsa kita dapat tinggal landas untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri menuju terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan, ialah masyarakat yang adil dan yang makmur berdasarkan Pancasila.

Sekarang, izinkan saya, Saudara Ketua yang terhormat, menjelaskan pokok-pokok masing-masing Krida dari Panca Krida. Penguraian Panca Krida ini sekaligus merupakan bahan-bahan dan penegasan-penegasan sikap Pemerintah dalam menghadapi berbagai masalah di berbagai bidang yang sedang atau akan dihadapi dalam masa-masa mendatang.

Krida yang pertama ialah meningkatnya Trilogi Pembangunan yang didukung oleh ketahanan nasional yang mantap.

Dengan sadar dalam Krida pertama ini ditekankan perlunya dukungan ketahanan nasional dalam melaksanakan Trilogi Pembangunan.

Mengenai ketahanan nasional maka pengertian jelas jauh lebih luas dan dalam dari pertahanan dan keamanan nasional saja. Ketahanan nasional mencakup semua segi kehidupan bangsa dan negara baik ideologi, politik, sosial, budaya, di samping pertahanan dan keamanan itu sendiri. Karena itu ketahanan nasional berarti berkembangnya semua segi kehidupan bangsa dan negara tadi secara sehat dan serasi, sehingga keseluruhannya menghasilkan daya tahan yang besar dalam menghadapi ancaman, gangguan dan kerawanan-kerawanan baik yang timbul dari dalam maupun yang datang dari luar. Ini berarti bahwa segala gerak dan arah pembangunan kita tidak boleh melemahkan, melainkan harus memperkuat ketahanan nasional.

Ketahanan nasional ini perlu mendapat perhatian kita yang sebesar-besarnya karena tahun-tahun yang akan datang kita akan memasuki tahun-tahun yang sulit, berisi beranekaragam tantangan dan bisa juga merupakan tahun-tahun yang rawan.

Sebagai bangsa yang bertekad meneruskan pembangunan, maka di satu pihak kita harus berjuang keras agar momentum pembangunan tetap berada di tangan, sedang pada pihak lain kita menjaga agar masalah-masalah sosial ekonomi jangan sampai menimbulkan gejolak sosial politik dan menggoyahkan stabilitas nasional.

Demikian pula, dampak dan perkembangan politik internasional dan keamanan dunia pada umumnya dapat lebih terasa di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Sampai detik ini pun belum ada tanda-tanda yang meyakinkan mengenai peredaan ketegangan antara Timur dan Barat. Malahan perlombaan persenjataan terus berlangsung. Perlombaan senjata ini jelas mengurus kemampuan dunia untuk memperbaiki perekonomiannya yang suram. Kesuraman ekonomi dunia ini bertambah, karena di negara-negara industri yang sudah maju belum ada tanda-tanda lahirnya kesadaran baru yang diperlukan untuk membuka pintu bagi kemajuan masalah Utara — Selatan. Kemelut dunia bertambah lagi dengan perebutan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar dunia, serta pergolakan-pergolakan yang bermunculan di berbagai kawasan.

Selanjutnya, makin dekatnya perampungan proses peralihan generasi yang meliputi semua lapisan dan golongan masyarakat kita, dalam tubuh pemerintahan, Angkatan Bersenjata, kekuatan sosial politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, kalangan cerdik cendekiawan, dunia ekonomi dan seterusnya. Peralihan generasi kali ini mempunyai arti yang khusus dalam pertumbuhan bangsa kita, sebab Generasi '45 yang melahirkan dan meletakkan dasar-dasar Indonesia Merdeka diganti oleh generasi baru dengan pengalaman sejarah dan tantangan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Di samping mengandung harapan, maka masa-masa peralihan itu juga mengandung kerawanan. Peralihan generasi ini akan dapat selamat kita lewati dengan saling pengertian dan saling menghormati dan dengan rasa persatuan dan kesatuan yang sekukuh-kukuhnya.

Sementara itu, permasalahan dalam masyarakat dan negara pun akan bertambah rumit dan jalin menjalin, jumlah penduduk dan masalah kesempatan kerja terutama di kalangan muda akan bertambah. Aspirasi-aspirasi dan harapan-harapan di kalangan masyarakat juga akan bertambah meningkat.

Semuanya itu menyadarkan kita betapa pentingnya memperkuat ketahanan nasional, sebagai bagian dari persiapan-persiapan yang harus

Bersambung ke hal. 57

MINAT KEPADA SEKOLAH KEJURUAN AKAN LEBIH DIKEMBANGKAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto menyatakan Pemerintah dengan bantuan masyarakat akan melancarkan kampanye untuk menumbuhkan minat anak didik kepada sekolah kejuruan.

Anak didik sekarang menurut penilaian Menteri cenderung lebih banyak memilih pendidikan di sekolah umum. Dengan demikian tidak sesuai akan tuntutan pembangunan seperti yang dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam GBHN.

Menteri mengemukakan hal itu ketika meresmikan peningkatan sarana produksi Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) di Ciputat, Tangerang tanggal 19 Agustus 1983. Bersamaan dengan itu diremikan juga secara simbolik Pustekkom unit produksi di Yogyakarta, Semarang dan Surabaya.

Menyinggung tugas dan fungsi Pustekkom, dikatakan bahwa Pustekkom mempunyai peranan yang penting dalam memberikan penerangan-penerangan tentang pendidikan baik kepada masyarakat maupun kepada anak didik dalam penyampaian pengetahuan maupun ilmu. Hal itu diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan wajib belajar yang realisasinya akan dimulai permulaan Repelita IV. Pelaksanaan wajib belajar tersebut tidak akan banyak hambatan disebabkan adanya suatu kenyataan di mana minat baca anak-anak sekarang ini semakin meningkat.

Menurut Menteri, dengan berdirinya sarana produksi baru yang siap pakai maka masalah-masalah pokok yang dihadapi Pustekkom mengenai belajar jarak jauh, belajar mandiri dan belajar melalui media untuk pendidikan akan dapat segera terlaksana.

-- Koordinasi dan Kerjasama.

Lebih lanjut Menteri Nugroho mengemukakan rencana Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan melalui radio dan televisi dalam waktu tidak lama lagi. Ini tinggal pengaturannya



Prof. Dr. Nugroho Notosusanto

saja dalam rangka kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ditjen RTF Departemen Penerangan. Gagasan masalah pendidikan semacam ini sudah cukup lama serta persiapan ke arah pelaksanaan program tersebut.

Program ini meliputi dua model pendidikan yaitu untuk anak-anak dan umum, termasuk penyiaran program pemutaran film serial melalui TVRI yang bertema membina watak anak-anak. Sedang model yang lain yang dikembangkan menyangkut pendidikan lingkungan hidup, pendidikan kesejahteraan keluarga, kerajinan tangan serta ketrampilan.

Menurut Menteri Nugroho, dalam pelaksanaannya nanti keberhasilan Pustekkom akan sangat tergantung kepada kerjasama dan koordinasi antara unit-unit kerja lainnya dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu Menteri minta perhatian dari seluruh unit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menaruh perhatian kepada Pustekkom.

— Jenis Sarana Produksi.

Kepala Pustekkom, Yusufhadimiarso, M.Sc. dalam laporannya mengatakan bahwa sarana produksi baru yang akan meningkatkan kemampuan dalam melayani kebutuhan akan berbagai macam media pendidikan dan Instruksional, terdiri dari: studio utama produksi, yang mampu memproduksi semua bentuk rekaman gambar dan suara elektronik termasuk peralatan dan bangun-

Bersambung ke hal. 26

DI MASA TRANSISI NILAI SULIT MENJADI GURU

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto dalam sambutannya pada waktu menerima para peserta keteladanan (guru, dosen, siswa dan mahasiswa) dan peserta lomba, sekaligus pengumuman guru teladan tingkat nasional, Senin, 15 Agustus 1983 di Ruang Sidang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Senayan Jakarta, mengatakan bahwa di masa transisi nilai sekarang ini sulit menjadi guru. Masa transisi nilai tersebut menurut Menteri, terjadi dan dapat dirasakan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia, sejak zaman penjajahan Belanda, Jepang, perang kemerdekaan, sampai jaman orang baru. Perubahan nilai tersebut ada yang dulu dianggap baik dan benar, sekarang bahkan nilai itu sudah tidak cocok lagi. Sedangkan guru sebagai orang yang mengajarkan nilai-nilai itu akan sulit kedudukannya.

Menteri mengemukakan guru sebagai pendidik tidak hanya di sekolah, tetapi juga di masyarakat, bila nilai-nilai yang diajarkan yang selanjutnya akan menjadi norma itu belum mantap, maka akibatnya akan menjadi kacau. Karena itu Menteri minta agar para guru selalu mengikuti perkembangan yang positif dan berpandangan luas serta tidak terlalu picik.

—Dua belas Guru Teladan Tingkat Nasional

Dalam kesempatan melapor kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dardji Darmodihardjo, SH yang juga merupakan Ketua Umum Panitia Hari Pendidikan Nasional Tahun 1983, dan sekaligus sebagai Ketua I Panitia Pemilihan Guru Teladan, mengemukakan bahwa berdasar-

kan Keputusan Bersama 5 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, telah ditetapkan Guru Teladan Tingkat Nasional

Sebelumnya para peserta Guru Teladan itu telah menghadap Menteri Agama, Menko Kesra, Gubernur DKI, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dan sebagai kehormatan bagi Guru-guru Teladan itu, mereka telah mengikuti acara-acara kenegaraan seperti, menghadiri dan mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Soeharto di Depan Sidang DPR, 16 Agustus 1983 Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi dan Pengibaran Bendera Pusaka, 17 Agustus, beserta penurunannya, dari Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Para Guru Teladan diterima Bapak Presiden beserta Ibu RIA Pembangunan, tanggal 18 Agustus 1983 di Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah.

Para peserta pemilihan guru teladan tingkat nasional berada di Jakarta sejak tanggal 8 s/d 20 Agustus 1983 dengan segala kegiatannya. Di samping sebagai penghargaan dan penghormatan, juga sekaligus untuk menambah pengetahuan mereka mengenai keteladanan. Berbagai hadiah dan penghargaan yang diterima oleh para teladan adalah Tabanas dari Ibu RIA Pembangunan, sejumlah buku kenang-kenangan dari para Bapak Menteri yang dikunjungi, tanda penghargaan dan tanda keteladanan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang disematkan pada acara penganugerahan dan juga masih mendapat kesempatan mengadakan studi tour ke Jepang.



SRI MULJANI
Kepala TK Mutiara
PG Marican Kediri
Jawa Timur.



NURANI Z.
Guru TK Pertiwi
Kantor Gubernur Padang
Jln. Koto Tinggi Padang
Sumatra Barat.



Drs. TOPANDI
Guru SD Panorama II
Cidadap, Bandung
Jawa Barat.



DJAJANTO HADI SOEMARTO
Guru SD Srengat I Blitar
Jawa Timur.



AKHMAD
Kepala SD Sukaraja
Kabupaten Lombok
Tengah
Nusa Tenggara Barat.



SUKEN SUNARYA
Guru SMP Negeri 10
Pakanbaru
Jln. Harapan Raya
R i a u.



Drs. KAMTIJO
Wk. Kepala SMP Gondowulung,
Bantul
Yogyakarta.



SOEMARSO, BA
Guru SMP 1 Malang
Jawa Timur.



Ny. MONICA PARIELA
Guru SMA Negeri 3 Ambor
Mal u k u.



MUHAMAD SOEDIRO, B.Sc
Guru SPG 17 Bantul
Yogyakarta.



WARASTRI SITI DJENAB'
Kepala TK. Hang Tuah I
Jakarta Utara,
Jln. Gadang 36 Tanjung Priok
Jakarta. Digitized by Google



MOCHTAR SOEPIJONO
Wk. Kepala SPG Kediri
Jawa Timur.

HARI PENDIDIKAN NASIONAL TIDAK UNTUK MENGHAMBUR-HAMBURKAN UANG

Prof. Darji Darmodiharjo, SH mengemukakan Hari Pendidikan Nasional diadakan tidak hanya untuk beramai-ramai atau menghambur-hamburkan waktu, energi dan biaya saja, tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang lebih dalam dan penting yang terkandung di dalamnya. Demikian penjelasan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen P dan K selaku Ketua Umum Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 1983 kepada pers, di Departemen P dan K Senayan Jakarta tanggal 25 April 1983.

Dikatakan, peringatan ini diadakan sebagai sarana untuk menarik dan merangsang masyarakat luas dan instansi di luar Departemen P dan K untuk ikut berpartisipasi. Sedangkan bagi aparat Departemen P dan K adalah untuk lebih meningkatkan andil dan karyannya dalam pelaksanaan tugas pokoknya yang dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan guna menghasilkan manusia-manusia Pembangunan Indonesia yang Pancasila, yang seimbang jasmani dan rohaninya. Dengan demikian Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini mempunyai makna yang luhur dan mulia.

— Ketahanan Kantor.

Lebih lanjut Dirjen menjelaskan, untuk tahun ini tema Peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah "Dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Kita Tingkatkan Pembinaan Ketahanan Sekolah Sebagai Pusat Kebudayaan dan Ketahanan Kampus sebagai Masyarakat Ilmiah" Pemilihan tema ini telah disesuaikan dan dilandasi dengan titik berat kebijaksanaan Departemen P dan K dari program pendidikan yang dimulai pada tahun akhir Repelita III ini, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan baik tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Bagi aparat yang bergerak di bidang pendidikan baik yang teknis maupun yang administratif, maka dalam rangka menunjang tercapainya Sekolah Sebagai Pusat Kebudayaan dan Kampus Sebagai Masyarakat Ilmiah, perlu sekali diupayakan agar di kantor-kantor dalam jajaran Departemen P dan K



Prof. Darji Darmodiharjo, SH

sebagai pengelola pendidikan juga terwujud lebih dahulu terbinanya ketahanan kantor.

Berkaitan dengan hal tersebut, Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1983 ini akan digunakan sebagai titik awal langkah untuk meningkatkan disiplin dan ketertibanserta akan lebih keras lagi bekerja dan belajar demi terwujudnya Ketahanan Sekolah Sebagai Pusat Kebudayaan dan Ketahanan Kampus Sebagai Masyarakat Ilmiah.

Jadi, menurut Prof. Darji tidaklah mungkin kita akan dapat menumbuhkan dan membina terwujudnya Ketahanan Sekolah dan Ketahanan Kampus tanpa didahului dengan usaha membina terwujudnya ketahanan kantor.

— Berbagai Kegiatan

Berbagai Kegiatan yang mewarnai Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 1983 yang berpuncak pada tanggal 2 Mei, adalah: Upacara Bendera yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah serta di Sekolah-sekolah dan Sekolah Indonesia di luar negeri; Ziarah/anjungsana ke makam Ki Hajar Dewantoro di Yogyakarta; Olahraga dan Kesegaran Jasmani; Malam peggelaran Seni; Lomba Kebersihan dan Keindahan; Pemilihan Pegawai Teladan; dan Pameran Pendidikan.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang berpuncak pada tanggal 17 Agustus adalah: Lomba Sekolah Teladan; Pemilihan Siswa Teladan; Lomba Karya Ilmu Pengetahuan Bagi Remaja; Lomba Seni Siswa; Mahasiswa Teladan; Lomba Karya Inovatif Produktif bagi Mahasiswa; Pemilihan Guru Teladan; Pemilihan Dosen Teladan; Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; Pembinaan Bahasa Nasional; Penilaian Perpustakaan, dan Naskah Buku Umum, dan Lomba Kejar Paket A.

Sambutan Dirjenbud pada Upacara Penyerahan Hadiah Lomba Mengarang Tingkat SD dalam Rangka Harpenas di Jakarta

Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang terhormat,
Terutama para pemenang sayembara mengarang,

Dengan sangat senang hati saya penuhi permintaan Saudara Kepala Pusat Pembinaan Bahasa untuk menghadiri upacara penyerahan hadiah kepada para pemenang sayembara mengarang siang ini, dan lebih-lebih juga untuk ikut menyerahkan hadiahnya. Sayembara mengarang memang berupa kegiatan yang saya dukung sepenuhnya. Sebagaimana kita ketahui, dan juga kita risaukan, mengarang merupakan jenis kemahiran bahasa yang masih perlu sekali digalakkan di Indonesia ini. Dalam usaha kita untuk menghilangkan analfabetisme yang tujuannya ialah untuk menjadikan bangsa kita ini termasuk yang menguasai *literacy*, dalam arti bukan saja bisa membaca dan menulis, namun hidup dalam suasana dan berpikir menurut ukuran baca-tulis itu, maka menggalakkan keterampilan mengarang perlu mendapat tempat yang depan. Kita memerlukan bahan bacaan yang jauh lebih banyak dari apa yang dewasa ini tersedia dalam bahasa Indonesia dan yang kita inginkan terutama terdiri dari bahan bacaan yang asli dan tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai cita-cita kita semua.

Saya merasa sudah gembira mendengar, bahwa cukup banyak peserta yang tergairah untuk mencoba meraih hadiah yang disediakan dalam sayembara ini. Namun demikian, dalam penduduk yang berjumlah sudah lebih dari 150

juta, tentu peserta sebanyak 174 orang sebenarnya bukan jumlah yang memadai. Akan tetapi, tidak jarang dalam sayembara seperti ini jumlah peserta lebih sedikit lagi, dan juga kurang sekali mutunya, sehingga sudah beberapa kali, dalam jenis sayembara mengarang yang lain, hadiah tidak semuanya dapat diberikan.

Maka kali ini saya rasa kita patut bersenang hati, bahwa kita berhasil menyerahkan ketiga-tiga hadiah yang disediakan. saya ucapkan selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada semua peserta yang telah mencoba menyusun karangan yang bermutu, namun kali ini belum berhasil meraih kemenangan. Saya harapkan, bahwa semua pengarang yang menang dan juga yang belum tetap berusaha menulis karangan yang baik, sehingga dapat diterbitkan dan dijadikan bahan bacaan, baik yang berupa bahan di waktu senggang, maupun yang dapat digunakan sebagai petunjuk pekerjaan.

Memang penerbitan, dan dengan demikian juga penulisan bahannya, tergantung dari masyarakat pembaca dan pembeli. Kalau saya tak salah melihat tanda-tanda di dalam masyarakat, rasanya minat membaca dan juga membeli bahannya, lambat-lambat, tetapi jelas meningkat di Indonesia ini. Gejala tersebut perlu disambut dengan penyediaan bahan bacaan lebih banyak dan yang juga bermutu dalam arti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai yang diharapkan oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan sayembara mengarang seperti ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita yang baik ini.

Pelaksanaan Kurikulum 1975 Implikasinya bagi Penyusunan dan Pelaksanaan Program Penataran Tenaga Kependidikan



Drs. Soedijarto, MA

PENDAHULUAN

Dua hasil monitoring pelaksanaan kurikulum 1975 pada sekolah lanjutan umum telah memberikan gambaran tentang tingkat kemantapan pelaksanaan kurikulum 1975 sebagai yang direncanakan pada tahun 1974/1975. Secara umum gambaran itu mengemukakan bahwa sistem kurikulum 1975 yang menggunakan PPSI sebagai pendekatan dan metode dalam merencanakan program belajar mengajar dalam bentuk satuan pelajaran belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para guru dan belum sepenuhnya ditunjang oleh para kepala sekolah dan pengawas. Kedua tenaga kependidikan yang terakhir disebut pada hakikatnya adalah tenaga penggerak yang dapat membantu dan mendorong dilaksanakannya sistem kurikulum 1975 secara mantap oleh para guru. Berbagai penataran telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi hasilnya belum memuaskan sebagai yang diharapkan. Kini kita akan menyempurnakan program penataran itu. Agar kita dapat menyempurnakan program itu pertanyaan dasar yang harus diajukan untuk dijawab sebelum melakukan usaha memperbaiki adalah sebagai berikut :

- (1) Sampai berapa jauh penataran yang dilakukan telah mempengaruhi perubahan kemampuan dan kebiasaan para petugas dan guru dalam melaksanakan sistem kurikulum 1975?
- (2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan suatu program penataran?

Itu diharapkan akan dianalisis lebih lanjut kelemahan penataran yang lalu baik materi program, sistem penyajiannya, cara penilaian, maupun tindak lanjut pembinaannya. Dalam pada itu kita menyadari bahwa kelemahan suatu program sukar diketahui tanpa mempelajari tuntutan lapangan dari seorang pelaksana kurikulum 1975 yang baik.

Atas dasar pertimbangan di atas tulisan ini ingin menyoroti hakikat penataran yang harus dilaksanakan dipandang dari tuntutan lapangan dan saran-saran bagi disempurnakannya program penataran sesuai dengan tuntutan lapangan.

1. HAKIKAT SISTEM KURIKULUM DAN TUNTUTANNYA KEPADA PARA PELAKSANA.

Setelah kurikulum 1975 dilaksanakan sejak tahun 1976 masih ada saja pertanyaan yang muncul tentang gunanya satuan pelajaran, hubungan PPSI dan satuan pelajaran, dan lebih dari itu masih ada sementara guru yang menyusun satuan pelajaran hanya untuk memenuhi formalitas. Gejala ini menunjukkan bahwa kurikulum 1975 yang antara lain bercirikan diterapkan PPSI sebagai pendekatan dan teknik bagi perencanaan program belajar-mengajar dalam satuan pelajaran belum dipahami atau belum dapat diterima. Karena itu, pendalaman tentang hakikat dan latar belakang perlunya dilaksanakan sistem itu masih perlu diteruskan. Tulisan ini berpendapat bahwa pemahaman tentang kedua hal itu sukar dilakukan apabila arti proses belajar di sekolah dan

peranan seorang guru dalam proses itu tidak sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana.

Semua pengamat dan ahli pendidikan akan sependapat bahwa hakikat kurikulum dalam arti operasionalnya akan dapat dilihat pada proses belajar yang dialami oleh para siswa. Hal ini sudah sering disinggung dalam berbagai kesempatan menjelaskan pengertian kurikulum 1975. Bahwa meningkatnya mutu proses dan hasil belajar para siswa adalah tujuan pembaharuan kurikulum baik melalui pembakuan kurikulum 1975 maupun pengembangan kurikulum melalui PPSP perlu disadari. PPSI dan satuan pelajaran direncanakan dan ditetapkan untuk meningkatkan kualitas proses dan mutu hasil belajar. Peranan itu sebagai alat untuk memperbaiki kualitas proses dan mutu hasil belajar sukar dipahami apabila para pelaksana pendidikan tidak mengetahui kelemahan sistem yang ada. Karena itu, peningkatan kemampuan untuk mendiagnosa sistem yang digunakan, mengidentifikasi kelemahan sistem yang ada, membedakan proses belajar yang bermutu dari yang kurang bermutu dan menilai mutu hasil belajar secara tepat merupakan syarat pertama bagi seorang pembina dalam pelaksanaan kurikulum 1975 dan kurikulum PPSP.

Dengan kata lain para pelaksana harus dapat dan mau menjawab pertanyaan berikut. Apakah kelemahan sistem yang sedang berjalan yang telah lama digunakan? Mengapa sistem yang dulu dianggap memadai kini dianggap sudah usang? Jawaban pertanyaan itu sesungguhnya dapat dipelajari melalui berbagai tulisan dan hasil penelitian.

Kurikulum 1975, sebagai sistem kurikulum yang masih terus dikembangkan dan disempurnakan melalui PPSP, direncanakan dan dibakukan untuk mengatasi kelemahan sistem yang sudah berjalan.

Sistem kurikulum 1975, mengharapkan dari para guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk meningkatkan dan memiliki kemampuan profesional agar dapat membimbing para siswa melaksanakan dan mengikuti proses belajar secara aktif. Kemampuan profesional itu adalah sebagai berikut :

- (1) Penguasaan materi pelajaran secara memadai.
- (2) Kemampuan merencanakan program belajar mengajar yang meliputi:

- 2.1 subkemampuan merumuskan dan menetapkan tujuan instruksional khusus;
 - 2.2. menguasai berbagai metode pengajaran dan dapat memilih metode yang serasi bagi pencapaian tujuan;
 - 2.3. dapat menetapkan tata urutan kegiatan belajar secara berkesinambungan menuju tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan; dan
 - 2.4. mengetahui berbagai alat dan media pendidikan dan dapat memilih serta menggunakan alat pendidikan yang serasi dengan sifat proses dan tujuan pendidikan.
- (3) Kemampuan mengelola proses belajar-mengajar dalam arti dapat menciptakan suasana belajar, mengatur siasat yang ampuh bagi berlangsungnya proses belajar secara tepat guna dan berhasil guna.
 - (4) Dapat menilai kemajuan belajar yang meliputi subkemampuan:
 - 4.1 menyusun alat evaluasi yang serasi untuk mengukur suatu jenis tujuan pendidikan;
 - 4.2 dapat mengolah hasil penilaian, dan yang mendorong meningkatnya gairah belajar para siswa.
 - 4.2. dapat mengolah hasil penilaian, dan
 - 4.3. dapat merencanakan program evaluasi yang mendorong meningkatnya gairah belajar para siswa.
 - (5) Kemampuan mendiagnosa kesulitan belajar dan membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar.
 - (6) Dapat melaksanakan administrasi kurikulum seperti penjadwalan pelajaran sesuai dengan prinsip teori belajar, menentukan sistem promosi, dan memanfaatkan umpan balik hasil penilaian kemajuan belajar bagi penyempurnaan program.

Keenam kemampuan profesional guru yang disebutkan di atas merupakan syarat bagi seorang guru untuk dapat sepenuhnya melaksanakan kurikulum 1975 secara memadai. Syarat lain yang lebih menentukan di samping kemampuan itu adalah kemauan dan sikap profesional seorang guru.

Hal itu terakhir diungkapkan dalam tulisan ini

tidak lain karena banyak tenaga profesional yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dikuasainya. Kemampuan dan sikap profesional yang memadai seorang guru akan dapat ditumbuhkan melalui proses pembinaan yang terus-menerus oleh tenaga pembina yang memiliki kemampuan dan sikap profesional yang melebihi tenaga guru yang berada di bawah asuhan pembinaannya. Karena itu, salah satu syarat bagi seorang pembina adalah tenaga yang telah berpengalaman sebagai guru yang secara profesional dapat dipertanggungjawabkan kemampuan dan sikapnya.

Bagi seorang pembina di samping kemampuan dan sikap profesional yang dimiliki oleh seorang guru perlu dikembangkan dan dimiliki kepemimpinan dan kepekaan profesional. Kepemimpinan profesional akan dapat terlihat pada kemauannya dan kemampuannya dalam mencari jalan untuk membina dan meningkatkan kemampuan profesional guru yang di bawah asuhannya.

Seorang pembina diharapkan menjadi orang yang diharapkan kedatangannya oleh guru. Seorang pembina diharapkan menjadi orang yang merasa beruntung kalau mendapatkan kesempatan berdialog dengan guru dan murid-murid. Seorang pembina diharapkan untuk selalu memikirkan perbaikan dan peningkatan kemampuan profesional para guru. Dia adalah orang yang secara cepat dapat merasakan kelas yang baik dalam artian kualitas proses belajar yang dialami dari kelas yang kurang baik. Dia adalah orang yang secara cepat dapat merasakan dan menduga latar belakang kurang baiknya proses belajar kelas yang dikunjungnya.

Mungkin orang akan mengatakan bahwa sukar untuk memperoleh orang dengan kualifikasi yang demikian. Penulis pun sadar akan hal itu, tetapi kita harus mengarahkan kepada terbinanya tenaga yang demikian. Kemampuan lain yang perlu dikuasai oleh seorang pembina adalah kemampuan melakukan pengamatan kelas dan menganalisis hasil pengamatannya untuk mengambil langkah-langkah pembinaan tenaga guru.

Dari ulasan di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa seorang pembina (pengawas dalam arti profesional) hendaknya memiliki persyaratan sebagai berikut:

(1) memiliki kemampuan dan sikap profesional seorang guru.

- (2) Memiliki kepemimpinan profesional,
- (3) Memiliki kepekaan profesional,
- (4) memiliki kemampuan untuk melakukan pengamatan kelas.
- (5) Memiliki kemampuan untuk mengolah hasil pengamatan kelas dan memanfaatkannya untuk melakukan tindakan-tindakan pembinaan.

2. HAKIKAT DAN FUNGSI PENATARAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam tulisan tentang "Sebuah Pemikiran tentang Metode Pengembangan Program Penataran bagi Perencanaan dan Administrasi Kependidikan", Soedijarto (penulis kertas kerja ini) mengelompokkan penataran dalam tiga jenis;

- (1) penataran untuk perbaikan kemampuan kerja,
- (2) penataran untuk persiapan bagi pelaksanaan tugas yang baru,
- (3) penataran untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan dan kemampuan berhubungan dengan diterapkannya gagasan baru dalam suatu sistem kerja.

Tulisan ini berpendapat bahwa penataran yang akan dilaksanakan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya pada hakikatnya adalah kombinasi jenis penataran untuk memperbaiki kemampuan kerja dan jenis penataran untuk menambah pengetahuan dan kemampuan berhubungan dengan diterapkannya gagasan baru dalam suatu sistem kerja.

Tulisan ini memandang penataran ini memiliki dwifungsi, tidak lain karena pertimbangan berikut.

- (1) Ada tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya yang sudah mengenal dan mengetahui gagasan baru selama empat tahun, tetapi belum dapat menerapkannya secara memadai.
- (2) Ada tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya yang belum memahami atau belum begitu memahami gagasan baru yang terdapat dalam kurikulum 1975.
- (3) Pelaksanaan kurikulum 1975 dalam perkembangan selanjutnya akan memasukkan unsur yang baru sebagai perkembangan bentuk satuan pelajaran, yaitu sistem belajar mengajar dengan menggunakan modul dengan prin-

sip belajar tuntas.

Berpangkal kepada ulasan di atas fungsi penataran ini adalah meningkatkan memperbaiki kemampuan profesional tenaga guru dan tenaga pembina bagi makin mantapnya pelaksanaan kurikulum 1975 dan menambah pengetahuan dan kemampuan bagi perkembangan lebih lanjut pelaksanaan kurikulum 1975. Hal yang terakhir ini disebutkan karena selama Pelita III sistem pengajaran dengan modul sudah akan mulai memasuki kelas secara bertahap, baik melalui sekolah pradiseminasi, sekolah menengah terbuka, maupun sekolah lain yang akan ditentukan kemudian oleh pemimpin Departemen P dan K.

3. SARAN TENTANG MATERI PROGRAM PENATARAN TENAGA GURU DAN PEMBINA

Dalam tulisan yang sama penulis telah mengajukan rumus bagi penyusunan program penataran yaitu :

$K_t = K_s - K_m$. Artinya kemampuan yang ditatarkan = kemampuan yang disyaratkan dikurangi kemampuan yang dimiliki.

Pada bagian pertama ulasan ini dikemukakan pandangan penulis tentang kemampuan dan pengetahuan yang disyaratkan dari seorang guru dan tenaga pembina untuk dapat melaksanakan kurikulum 1975 secara memadai. Yang perlu diketahui lebih lanjut adalah apakah dari yang harus dimiliki itu telah dikuasai oleh para tenaga guru dan tenaga pembina. Tanpa mengetahui kedua hal ini secara memadai sukar dapat disusun program penataran yang tepat guna dan berhasil guna.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk melakukan sendiri analisis perbedaan antara kemampuannya yang dipersyaratkan dengan kemampuan yang telah dimiliki. Namun, tulisan ini menganjurkan agar kegiatan ini dilakukan dalam usaha menyempurnakan program penataran.

Walaupun belum melakukan analisis, sebagai penutup tulisan ini ingin mengajukan beberapa usul untuk mendapatkan perhatian hal-hal berikut.

- (1) Mengapa pendidikan kependudukan* dan lingkungan hidup yang dijadikan salah satu bidang kegiatan pokok dan bukan pendidikan moral Pancasila dan pendidikan keterampilan?

Pertanyaan ini timbul karena kedua bidang studi yang dikemukakan di atas merupakan ciri utama kurikulum 1975 yang masih perlu dimantapkan dan belum dipahami sepenuhnya.

- (2) Dalam kegiatan supervisi hendaknya diutamakan pembinaan kemampuan menganalisis hasil pengamatan kelas serta perumusan langkah-langkah pemecahan.
- (3) Dalam kegiatan Evaluasi untuk kepala sekolah hendaknya diutamakan pembinaan kemampuan mengolah hasil evaluasi bagi penentuan kenaikan kelas dan kelulusannya, serta arti sistem evaluasi bagi peningkatan motivasi belajar.
- (4) Dalam kegiatan kepemimpinan pendidikan hendaknya jangan dilupakan peningkatan kepemimpinan profesional.
- (5) Dalam kegiatan pembaharuan pendidikan kurikulum 1975 hendaknya dimasukkan informasi tentang sistem pengajaran dengan modul dan PPSI serta sistem SMP Terbuka.

Mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan sumbangan bagi penyempurnaan program penataran tenaga kependidikan SLU.

LAMPIRAN

KEDUDUKAN DAN PERANAN PENDIDIKAN IPA DALAM KURIKULUM 1975 DAN IMPLIKASI PELAKSANAANNYA.

Latar Belakang

Program pembakuan kurikulum 1975 direncanakan pada tahun 1971-1972 bersamaan dengan saat diakhirinya Proyek Penilaian Pendidikan Nasional dan mulai dirintisnya gagasan sistem sekolah pembangunan, yang kini dikenal dengan PPSP. Tujuan utama proses pembakuan itu adalah untuk menunjang program pembaharuan dan perbaikan pendidikan yang sarannya adalah: pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Pada saat kita merencanakan kegiatan itu sistem pendidikan persekolahan di

Indonesia dihadapkan pada kenyataan terdapat - nya berbagai kurikulum untuk setiap tingkatan dan jenis pendidikan, dan menimalnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan sistem pendidikan secara memadai.

Dalam pada itu GBHN 1973 menegaskan arah dan tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh setiap usah pendidikan nasional yang ditegaskan dalam GBHN itu, yang kemudian dicantumkan dalam pasal 3 setiap keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembakuan kurikulum 1975 adalah arah dan tujuan yang harus dicapai melalui setiap program, kurikulum. Karena itu, kurikulum 1975 memiliki misi utama menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang dimaksud.

Di dalam usaha mencapai tujuan pendidikan nasional, yang secara taksonomis dapat dikategorisasikan ke dalam tiga gugus, yaitu pembinaan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berjiwa Pancasila, dan berorientasi pembangunan; manusia yang cerdas, kreatif, dan memiliki pengetahuan yang tinggi; dan manusia yang memiliki ketrampilan; inilah kurikulum 1975 dibakukan.

Sejalan dengan misi itu struktur program kurikulum 1975, sebagai kerangka strategis untuk mencapai sarana yang ditetapkan dalam GBHN, meliputi program pendidikan umum (Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kesenian, Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan); program pendidikan akademis (Pendidikan Bahasa, IPS, Matematika, dan IPA); dan program pendidikan keterampilan. Dari ulasan ini jelaslah bahwa program pendidikan IPA merupakan bagian program pendidikan akademis. Apakah peranan program pendidikan IPA sebagai bagian dari program pendidikan akademis? Apakah arti IPA sebagai pendidikan akademis bagi perencanaan program belajar, belajar di kelas? Apakah hubungan PPSI dengan usaha memperbaiki mutu proses dan hasil belajar? Bagaimanakah dengan persyaratan bagi kemampuan profesional seorang guru? Masalah apakah yang timbul dan bagaimanakah pemecahannya?

Tulisan ini bermaksud menganalisis kelima pertanyaan itu secara singkat untuk memberikan gambaran tentang misi kurikulum dan implikasinya.

1. Kedudukan dan Peranan Pendidikan IPA dan Kurikulum 1975.

Sekolah hanyalah satu di antara berbagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak menuju kedewasaannya. Namun, sekolah secara potensial memiliki posisi yang paling strategis dalam membantu generasi muda mencapai berbagai karakteristik manusia Indonesia yang diharapkan dalam GBHN, baik GBHN 1973 maupun GBHN 1978, terutama dalam menumbuhkan manusia yang cerdas.

Manusia yang cerdas adalah salah satu tuntutan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang telah dikumandangkan sejak Indonesia baru merdeka sebagai yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945. IPA sebagai bagian program pendidikan akademis memiliki misi utama untuk menunjang tumbuhnya manusia yang cerdas, yaitu manusia yang kritis, rasional, dapat berpikir dalam rangkaian sebab akibat secara ilmiah, mengenal berbagai alternatif pemecahan, dan segala hal yang secara singkat oleh Dr. Daed Yoesoef disebut memiliki kemampuan penalaran.

Pendidikan kecerdasan di masyarakat yang sedang berkembang termasuk Indonesia, sukar diharapkan tumbuh dengan sendirinya dari kehidupan masyarakat yang masih memiliki sifat-sifat yang dalam bahasanya Prof. Kuncaraningrat menghambat pembangunan. Karena itulah IPA sebagai bagian pendidikan akademis memperoleh alokasi waktu yang cukup besar dibandingkan dengan bidang studi lainnya. IPA dari tingkat SD, SMP sampai dengan SMA kelas I memperoleh porsi lebih dari 10% waktu yang disediakan untuk program pendidikan di sekolah. Bahwa pada SMA kelas I kita mengetahui tentang IPA memperoleh alokasi waktu hampir 20%.

Dengan kedudukan yang demikian IPA memiliki potensi untuk dapat berperan guna memenuhi harapan bagi efektifnya pendidikan kecerdasan. Sampai berapa jauh hal itu dapat dipenuhi? Jawabannya adalah tergantung pelaksanaannya.

Dengan kata lain tersedianya waktu yang cukup tidak sendirinya menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan, tetapi bukannya suatu jaminan. Pertanyaannya adalah apakah yang dapat menjamin dapat dimanfaatkan potensi itu?

Pertanyaan itu akan dicoba dijawab pada

bagian kedua tulisan ini. Sebelum memasuki bagian itu ingin dikemukakan rumusan tujuan pendidikan IPA yang tercantum dalam kurikulum 1975. Rumusan itu pada hakikatnya memberikan gambaran tentang harapan yang harus dicapai dari pendidikan IPA. Berikut ini adalah kutipannya.

I. Tujuan Kurikuler IPA SD

- 1.1. Mengenal, memahami dan mampu menggunakan konsep-konsep dasar IPA yang berguna.
- 1.2. Mengenal dan memahami hubungan timbal balik antar berbagai makhluk hidup dan benda mati dalam hubungannya dengan kehidupan manusia.
- 1.3. Memiliki keterampilan menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah sederhana yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari.
- 1.4. Memiliki sifat ilmiah.
- 1.5. Menghargai alam dan mengagungkan penciptanya.

II. Tujuan Kurikuler Pendidikan IPA SMP

- 2.1. Mengerti dan memahami konsep-konsep dasar IPA yang berguna dalam kehidupan sehari-hari.
- 2.2. Memiliki kemampuan IPA sebagai bekal untuk melanjutkan studi dan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi.
- 2.3. Terampil menggunakan metode ilmiah untuk memahami gejala-gejala alam berdasarkan sifat-sifat dan hubungan hukum-hukumnya.
- 2.4. Memiliki sifat ilmiah.
- 2.5. Bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungannya.
- 2.6. Mencintai alam dan mengagungkan penciptanya.

III. Tujuan Kurikuler Pendidikan IPA SMA

- 3.1. Memahami dan mengerti konsep-konsep IPA.
- 3.2. Memiliki pengetahuan ilmiah dalam bidang IPA sebagai bekal untuk melanjutkan studi dan kehidupan dan kehidupan masyarakat.
- 3.3. Mengetahui hubungan antara berbagai bidang IPA dan antara IPA dengan ilmu pengetahuan lainnya.

- 3.4. Terampil menggunakan metode ilmiah dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
- 3.5. Memiliki sikap ilmiah.
- 3.6. Memiliki kebiasaan mencari keterangan-keterangan yang ilmiah mengenai hal-hal yang belum diketahui.
- 3.7. Menyadari bahwa IPA mempengaruhi cara hidup dan cara berpikir masyarakat.
- 3.8. Mencintai alam dan mengagungkan penciptanya.

Dari tujuan kurikuler sebagai yang telah dikutipkan di atas jelaslah betapa hanya sekolah yang akan dapat membantu mencapainya. Dari tujuan itu juga kita dapat mengharapkan betapa sekolah, bila dapat mendayagunakan semua potensinya secara optimal, akan dapat membantu pelajar mencapai tujuan itu.

Selanjutnya marilah kita telaah bagaimana tujuan itu mungkin tercapai.

2. Terlaksananya Proses Belajar yang Bermutu sebagai Syarat Bagi Dapat Terlaksananya Misi Pendidikan IPA yang Tujuannya Telah Ditetapkan.

Dari sekian banyak tujuan kurikuler tentang pendidikan IPA menurut kurikulum 1975, hanya sebagian kecil yang berkenaan dengan tujuan untuk memiliki pengetahuan. Sebagian besar tujuan itu berhubungan dengan kemampuan dan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah. Pertanyaan yang perlu kita telaah adalah sudahkah pelaksanaan kurikulum 1975 di bidang IPA mengarah kepada tercapainya tujuan itu? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan peninjauan ke kelas-kelas dan ke tempat-tempat pelajar mempelajari IPA.

Studi tentang hal ini secara khusus belum dilakukan. Akan tetapi, dari beberapa pengamatan kelas yang dilakukan dapatlah disimpulkan untuk sementara bahwa tekanan pelajaran pendidikan IPA di sekolah, terutama pada kelas-kelas tinggi, adalah penguasaan pengetahuan verbal tentang IPA. Banyak atau sebagian besar sekolah bahkan belum atau tidak memanfaatkan peralatan IPA yang tersedia secara optimal. Perihal pendidikan semacam itu perlu bagi tumbuhnya berbagai sikap dan keterampilan intelektual sebagai yang diharapkan oleh Kurikulum 1975. Bila keadaan demikian berjalan terus, potensi

MENTERI DIKBUD SERAHKAN BUKU PMP EDISI BARU PENGGANTI EDISI LAMA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto secara simbolik telah menyerahkan buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang telah disempurnakan atau edisi baru untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP), dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), dan sekaligus menerima buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang lama untuk dimusnahkan, di halaman SMP 216 Jalan Salemba – Jakarta, tanggal 5 Agustus 1983.

Pada kesempatan itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, penggantian buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dari edisi lama kepada edisi yang baru ini mencerminkan suatu perhatian yang besar dari Pemerintah terhadap dunia pendidikan terutama pendidikan moral Pancasila, dan pendidikan ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sempurna-sempurnanya. Sedangkan untuk buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP) edisi lama segera ditarik dan langsung dimusnahkan. Dalam hal ini pemusnahannya dengan cara dilebur untuk dijadikan bubur kertas, dan selanjutnya akan dijadikan bahan kertas yang akhirnya dapat untuk memproduksi buku kembali.

Menyinggung masalah ini buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Menteri mengatakan bahwa dalam buku PMP itu tercantum perilaku yang seyogyanya ditempuh oleh kita semua yang hidup di dalam masyarakat Pancasila. Mudah-mudahan dengan terlaksananya penyempurnaan buku PMP ini, pelajaran PMP akan berjalan dengan baik dan lancar, sehingga jangan sampai terjadi ada pihak-pihak yang masih mengada-ada tentang kehadiran buku tersebut.

Menteri menandakan, biasanya satu textbook itu setiap 10 tahun diperiksa kembali apakah perlu disempurnakan lagi atau paling tidak contoh-contohnya, sebab setiap sepuluh tahun itu akan ada perubahan-perubahan tertentu dalam masyarakat atau di dalam tata cara hidup masyarakat. Tetapi semua itu prinsip-prinsipnya

akan tetap sama yaitu prinsip-prinsip Pancasila.

– 40 juta Eksemplar

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Darji Darmodiharjo selaku Ketua Tim Pengendali Pusat Penggantian buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP) Edisi lama dengan buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP) edisi baru melaporkan, bahwa penggantian buku tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/C/Kep/R/83 tanggal 3 Agustus 1983, dan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4/M/1983 tanggal 4 Agustus 1983.

Untuk pengadaan buku yang telah disempurnakan direncanakan secara bertahap, yaitu tahap pertama melalui anggaran 1980/1981 sejumlah 7.046.874 eksemplar; tahap kedua pengadaan tahun anggaran 1981/1982 sejumlah 4.039.385 eksemplar; tahap ketiga pengadaan tahun anggaran 1982/1983 sejumlah 6.135.000 eksemplar; dan tahap keempat pengadaan tahun anggaran 1983/1984 sejumlah 23.235.867 eksemplar. Jadi seluruhnya berjumlah 40.457.126 eksemplar. Apabila pengadaan tersebut telah selesai seluruhnya maka tiap anak didik akan memperoleh satu buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sesuai dengan kelasnya. Sedangkan buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP) edisi lama yang dipergunakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) berasal dari pengadaan tahun anggaran 1979/1980, yang berjumlah 8.748.393 eksemplar.

Dapat ditambahkan, sesudah selesai acara penyerahan buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara simbolik itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberangkatkan satu truk berisi buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP) edisi lama sejumlah 19.181 eksemplar dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta menuju PN Kertas Lececs Probolinggo (Jawa Timur), untuk dihapuskan dengan dilebur menjadi bahan kertas kembali.

Warisan Budaya Baru Bermanfaat Bila dapat Dikomunikasikan dengan Masyarakat

Direktur Permuseuman Ditjen Kebudayaan mengatakan, sekalipun pembangunan permuseuman termasuk dalam program penyelamatan warisan budaya namun apabila kita amati arti dan fungsi museum sebagai lembaga ilmiah yang berperanan sosial-kultural-edukatif, maka warisan budaya yang menjadi koleksi museum barulah bermanfaat apabila koleksi tersebut di samping dirawat dan dikaji juga dapat dikomunikasikan dengan masyarakat lingkungannya demi pelayanan dan kepentingan kemajuan masyarakat. Demikian sambutan Direktur Permuseuman, Drs. Moh. Amir Sutaarga atas nama Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada pembukaan Penataran Tenaga Teknis Permuseuman Tipe Kejuruan, di Museum Nasional Jakarta, tanggal 8 Agustus 1983.

Direktur Permuseuman mengatakan, bahwa di pelbagai museum, baik museum umum maupun khusus tidak mungkin bisa berfungsi apabila tidak tersedia tenaga-tenaga ahli yang menangani. Memang, pada mulanya museum itu lebih banyak berfungsi sebagai lembaga ilmiah, yang ditangani oleh para ilmuwan yang tekun melakukan riset mengenai pelbagai jenis koleksi museum. Tetapi sekarang, dengan perkembangan ilmu dan teknologi komunikasi, semua itu memerlukan suatu proses sosialisasi dan edukasi secara lebih demokratis dan merata agar tidak ketinggalan zaman. Sehingga fungsi-fungsi museum di bidang pendi-

dikan dan rekreasi semakin menonjol. Lebih-lebih bagi negara-negara berkembang yang sejak berakhirnya perang dunia kedua memperoleh kemerdekaannya, maka secara sadar fungsi museum diarahkan antara lain, dalam hal usaha penggalian dan penemuan kepribadian dan ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Tetapi untuk mencapai hasil yang diharapkan maka di samping pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan gedung dan pengadaan sarana dan peralatannya, suatu sistem penataran yang berkaitan erat dengan program pembinaan karier dan keahlian serta ketrampilan, merupakan syarat yang perlu dipenuhi.

— Dasar Pokok Penataran

Dasar pokok dari penataran ini berupa latihan dalam jabatan mengenai pembinaan sikap dan kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi para peserta selain diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang menambah ketrampilan, juga dihadapkan kepada berbagai masalah yang memberikan latihan dalam bidang pengambilan keputusan dan perencanaan. Sedangkan untuk mencapai tujuan penataran, para peserta diberikan kesempatan untuk memperoleh kesan sebagai bahan perbandingan dengan mengadakan kunjungan widyawisata. Penataran yang berlangsung, selama tiga bulan ini diikuti oleh 20 orang peserta dari pelbagai propinsi di Indonesia.

MENCARI TENAGA PENGAJAR

Untuk SMA-PGRI Maumere, Jln. Kelimutu, Maumere - Flores, diperlukan 2 (dua) orang tenaga pengajar, masing-masing untuk mata-pelajaran *Kimia* dan *Fisika*.

Syarat : - Ijazah Program D3/Sarjana Muda
- Masih bujangan
- Sanggup berjuang.

Gaji : Menurut Peraturan Pemerintah
Tarnspor : - Dari tempat tinggal sampai ke Maumere akan ditanggung oleh Pengurus SMA -PGRI

Maumere, Jln. Kelimutu, Maumere.

- Supaya digunakan kereta api/kapal laut/bis.

Perumahan : Disediakan.

Para peminat supaya langsung berhubungan dengan Kepala SMA - PGRI Maumere, Jln. Kelimutu, Maumere - Flores.

Pengurus YPLP - PGRI Pusat
Jln. Tanah Abang III/24
Jakarta Pusat

Prof. Harsja W. Bachtiar, MA Kepala Balitbang Depdikbud yang Baru

Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar, M.A. Rabu, 3 Agustus 1983 dilantik sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbangdikbud) menggantikan Dr. Soeroso H. Prawirohardjo, MA

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto di Ruang Sidang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta yang disaksikan para Pejabat Eselon I dan II serta para undangan lainnya.

Menteri dalam sambutannya mengatakan berhasil tidaknya misi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini tergantung dari hasil kerja Balitbangdikbud. Untuk itu Menteri minta Badan ini mengkhhususkan diri berfikir, tidak dibebani tugas eksekutif.

Diharapkan oleh Menteri agar Kepala Balitbangdikbud yang baru dapat mengorganisir stafnya sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas yang semakin hari dirasakan meningkat. Menteri mengemukakan, kita tidak mengingkari adanya masalah yang mendesak yang kadang-kadang kita rasa belum waktunya untuk menangani, tetapi masyarakat menuntut untuk segera ditangani. Misalnya, seleksi masuk perguruan tinggi.

— Tidak Meninggalkan Dunia Pendidikan

Prof. Nugroho juga mengatakan Dr. Soeroso walau kini telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Balitbangdikbud, namun tidak berarti meninggalkan dunia pendidikan karena ia tetap mengabdikan dirinya di Univer-

sitas Gajah Mada.

Sebagai kata perpisahan Prof. Nugroho mengharap agar Dr. Soeroso dengan sepenuh hati mencurahkan perhatian kepada ilmunya, yakni ilmu politik.

Mengenai Prof. Dr. Harsja Bachtiar, Menteri berkomentar bahwa ia seorang senior yang cukup banyak pengalaman di bidang penelitian dan pendidikan. Sambil berkelakar Menteri mengatakan, "Kalau kita melihat kantor Pak Harsja, pasti ada kertas yang siap diisi dengan hasil pemikirannya. Bila pantas, saat ini pun akan dilakukannya".

Menurut Menteri, Prof. Dr. Harsja Bachtiar terkenal sebagai orang yang mengelola peningkatan pengetahuan dari sarjana-sarjana Indonesia, bahkan guru dari seluruh polisi.

Pada kesempatan itu dilakukan pula pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Sun Unit Balitbangdikbud dari Nyonya Soeroso kepada penggantinya Nyonya Harsja Bachtiar yang dilakukan oleh Nyonya Nugroho Notosusanto.

Dalam pidato singkatnya Nyonya Nugroho mengatakan ia dapat merasakan apa yang dirasakan Nyonya Harsja Bachtiar saat itu karena ia baru empat bulan yang lalu mengalami hal yang sama. Setelah empat bulan melakukan orientasi ternyata tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena para ibu di sini baik-baik dan suka bekerjasama. Untuk itu, ia mengajak Nyonya Harsja agar tidak ragu-ragu memasuki Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepada Nyonya Soeroso, ia mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini.

PETUNJUK PEMINAAN SEKOLAH

BAB I PENDAHULUAN

Tujuan nasional Indonesia, seperti tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional itu dilaksanakanlah pembangunan nasional yang merupakan rangkaian program-program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus menerus. Secara jelas dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa tujuan pembangunan nasional itu ialah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkeadilan rakyat dan suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Adapun hakikat pembangunan nasional itu ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pembangunan pendidikan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan pula bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama ber-

tanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Dalam Pembangunan Nasional tugas-tugas pendidikan harus ditujukan ke arah pembentukan manusia seutuhnya, seorang insan budaya.

Dengan demikian jelas bahwa tugas pendidikan merupakan bagian dari tugas pengembangan kebudayaan. Dalam kaitan ini maka pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengambil kebijaksanaan untuk mengembangkan sekolah sebagai salah satu pusat kebudayaan.

Perlu kiranya dikemukakan bahwa wawasan sekolah sebagai pusat kebudayaan sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. Dalam masyarakat Indonesia dulu, lembaga pendidikan (paguron, langgar, pesantren, biara dan lain-lain), dipandang sebagai lembaga yang mempersiapkan generasi muda untuk hidup di masa itu dan di masa depan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Lembaga pendidikan itu menjadi tempat bertanya bagi masyarakat sekitarnya, merupakan sumber pembinaan dan pengembangan masyarakatnya. Para pengajar dan para siswa lembaga-lembaga itu dapat dijadikan teladan lingkungannya. Pada hakekatnya lembaga pendidikan pada dewasa itu telah menjadi pusat kebudayaan. Jadi sebenarnya wawasan sekolah sebagai pusat kebudayaan merupakan penggalian kembali pada apa yang pernah kita miliki dulu.

Pada bab-bab berikut dijelaskan pengertian-pengertian dasar dalam konsep Sekolah Sebagai Pusat Kebudayaan dan Ketahanan Sekolah, petunjuk-petunjuk tentang kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan Kepala Sekolah, guru, karyawan sekolah/tenaga administrasi, orang tua/masyarakat, dan siswa dalam usaha mewujudkan sekolah sebagai pusat kebudayaan dan dalam usaha meningkatkan serta memelihara ketahanan sekolah, dan akhirnya diberikan pula petunjuk mengenai cara menilai sampai di mana usaha-usaha tersebut telah dilakukan.

BAB II BEBERAPA PENGERTIAN DASAR

Pada bab ini akan diuraikan beberapa pengertian dasar, baik mengenai pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan, maupun mengenai ketahanan sekolah.

1. *Sekolah* adalah tempat pendidikan, tempat guru mengajar dan murid belajar, dan terjadilah proses belajar mengajar, dan terciptalah masyarakat belajar yang bertujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya.

2. *Sekolah sebagai pusat kebudayaan* ialah sekolah yang merupakan pusat nilai-nilai yang disepakati sebagai terpuji, dikehendaki, berguna serta perlu dipertaruhkan bagi kehidupan warga, masyarakat dan negara-bangsa, dan karenanya dianggap perlu dibiasakan kepada anak didik untuk sedini mungkin menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan belajar mengamalkannya melalui proses belajar mengajar di sekolah.

Sebagai *pusat* kebudayaan, sekolah adalah tempat, atau sumber bagi pengembangan kebudayaan.

3. *Ciri-ciri sekolah sebagai pusat kebudayaan* ialah :

- a. terdapat guru mengajar dan murid belajar dengan baik;
- b. terjadi proses belajar mengajar yang baik;
- c. tercipta masyarakat belajar;
- d. terbentuk manusia Indonesia seutuhnya;
- e. terpilih menjadi teladan masyarakat sekitarnya.

4. Pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan *bertujuan* untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya. Secara terperinci tujuan pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan adalah :

- a. meningkatkan mutu pendidikan;
- b. menciptakan masyarakat belajar (belajar keras dan bekerja keras);
- c. membentuk manusia Indonesia seutuhnya;
- d. menjadi sekolah sebagai teladan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

5. *Kebudayaan* mempunyai arti sempit dan luas. Kebudayaan dalam *arti sempit* dapat disamakan dengan kesenian yang bertitik berat pada estetika, sedangkan kebudayaan dalam arti luas

mencakup logika, etika dan estetika.

Kebudayaan dalam *arti luas* dipandang dari dua segi, yaitu *dari segi pribadi (individual)* dan *dari segi masyarakat (sosial)*.

Dari segi pribadi, kebudayaan merupakan baik pengetahuan, pilihan hidup, maupun praktek komunikasi. Pengetahuan ialah pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain yang berbentuk keterangan (informasi). Dengan pilihan hidup dimaksudkan pilihan-pilihan atau putusan-putusan manusia yang menunjukkan arah dan tujuan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan praktek komunikasi ialah bentuk-bentuk sikap tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hubungan dengan manusia lain, alam sekitar, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dipandang dari segi masyarakat, kebudayaan berupa segenap perwujudan dan keseluruhan hasil logika, etika dan estetika manusia dalam rangka pengembangan manusia pribadi dan dalam rangka perkembangan manusia dengan manusia lain (masyarakat), dengan alam sekitarnya, dan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

6. Dengan lain perkataan dapat disebutkan bahwa *kebudayaan* adalah perwujudan perpaduan logika, etika dan estetika dalam praktika (karya), yaitu sistem nilai dan ide vital (*gagasan penting*) yang dihayati sekelompok manusia/masyarakat tertentu.

7. *Pendidikan* adalah usaha sadar yang bertujuan mengembangkan kepribadian dan kemampuan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan itu, hendaknya sekolah menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya.

8. *Tujuan Pendidikan*

a. Sesuai dengan GBHN tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, trampil, tinggi budi pekertinya, kuat kepribadiannya, tebal semangat kebangsaannya, dan cinta tanah air merupakan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bersama-sama bertanggung-jawab atas pembangunan bangsa.

b. Bangsa Indonesia mencita-citakan suatu masyarakat yang mencerminkan aspirasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara

bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang mempunyai tujuan nasional melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945).

9. Disamping orang tua dan masyarakat, guru mempunyai peranan sentral dalam pelaksanaan pendidikan.

Tugas guru dapat diperinci sebagai berikut:

a. *Tugas profesional*, yaitu mendidik dalam rangka mengembangkan kepribadian, mengajar dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir/kecerdasan dan melatih dalam rangka membina ketrampilan.

b. *tugas manusiawi* yaitu tugas guru dalam membina anak didik, sehingga mampu mentransformasi dirinya sendiri, dan mampu melaksanakan autoidentifikasi dan auto pengertian mengenai dirinya sendiri. Di sini guru adalah orang tua kedua di sekolah.

c. *Tugas kemasyarakatan* ialah tugas guru dalam mengembangkan terbentuknya masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guru adalah pencipta masa depan, dan penggerak kemajuan, karena itu guru adalah pahlawan.

10. Sekolah sebagai pusat kebudayaan melaksanakan *kegiatan-kegiatan* :

a. Pengembangan *logika* :

- 1) gemar, biasa, lalu butuh membaca;
- 2) rajin dan tekun belajar;
- 3) suka meneliti;
- 4) gairah menulis analitik.

Semua kegiatan itu menuju : *Belajar keras*.

b. Pengembangan *etika* :

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) bermoral Pancasila (menghayati dan mengamalkan Pancasila);
- 3) bersikap dan bertingkah laku yang baik (sopan santun serta berkepribadian);
- 4) berdisiplin.

Semua kegiatan itu menuju : *Berbudi luhur*.

c. Pengembangan *estetika* :

- 1) apresiasi seni (menghargai kesenian);
- 2) persepsi seni (dapat menikmati kesenian);
- 3) kreasi seni (dapat menciptakan karya baru).

Semua kegiatan itu menuju : *Berperasaan halus*.

d. Pengembangan *praktika* yang merupakan hasil karya logika, etika, dan estetika :

- 1) menghargai pekerjaan fisik;
- 2) trampil dan cekatan;
- 3) penerapan teknologi.

Semua kegiatan itu menuju : *Bekerja keras*.

11. Dalam rangka pelaksanaan sekolah sebagai pusat kebudayaan sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain :

- a. ruang belajar;
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. ruang laboratorium;
 - d. ruang ketrampilan;
 - e. ruang kesenian;
 - f. ruang/fasilitas Olahraga UKS (Usaha Kesehatan Sekolah);
 - g. ruang Bimbingan dan Penyuluhan;
 - h. ruang Kepala Sekolah dan tenaga administrasi;
 - i. ruang guru;
 - j. ruang-ruang lain sesuai dengan kebutuhan;
 - k. Kamar kecil;
- dengan segala kelengkapannya.

12. Agar pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan dapat berhasil secara optimal harus ditunjang oleh ketahanan sekolah. *Ketahanan Sekolah* adalah suatu kondisi dinamik yang berisi kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang timbul dari dalam dan dari luar sekolah, yang langsung atau tidak langsung mengganggu proses belajar mengajar dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.

13. Dalam meningkatkan Ketahanan Sekolah :

a. *Komponen* yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) letak sekolah dan lingkungannya;
- 2) sarana dan prasarana;
- 3) manusia pelaksanaanya :

- a. Kepala Sekolah, Wali Kelas, guru dan karyawan/tenaga administrasi;
- b. siswa;
- c. orang tua;
- d. masyarakat.

4) kebudayaan.

b. *Faktor* yang perlu ditingkatkan pelaksanaannya :

- 1) disiplin;
- 2) tata tertib sekolah;
- 3) wibawa Kepala Sekolah;
- 4) proses belajar mengajar;

- 5) upacara bendera;
- 6) senam pagi;
- 7) 5-K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan dan Kekeluargaan);
- 8) 12 Langkah Kepemimpinan (Kepala Sekolah):
 - (a) tahu tugas pokoknya sendiri;
 - (b) tahu jumlah pembantunya;
 - (c) tahu nama-nama pembantunya;
 - (d) tahu tugas masing-masing pembantunya;
 - (e) memperhatikan kehadiran pembantunya;
 - (f) memperhatikan peralatan pembantunya;
 - (g) menilai pembantunya;
 - (h) mengambil tindakan-tindakan;
 - (i) memperhatikan karier pembantunya;
 - (j) memperhatikan kesejahteraan;
 - (k) menciptakan suasana kekeluargaan;
 - (l) memberikan laporan kepada atasannya;
- 9) 12 Langkah pelaksanaan tugas Wali Kelas/guru kelas :
 - (a) mengetahui tugas pokoknya :
 - (1) mewakili orang tua dan Kepala Sekolah dalam lingkungan kelasnya;
 - (2) meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - (3) membantu pengembangan kecerdasan;
 - (4) membantu pengembangan ke-trampilan;
 - (5) mempertinggi budi pekerti dan memperkuat kepribadian;
 - (b) mengetahui jumlah anak didik;
 - (c) mengetahui nama-nama anak didik;
 - (d) mengetahui identitas anak didik, antara lain dengan jalan memanggil seorang demi seorang anak didiknya untuk menyesuaikan isi kartu pribadi dengan keadaan yang sebenarnya;
 - (e) mengetahui kehadirannya setiap hari di kelas;
 - (f) mengetahui masalah-masalah anak didik (masalah : pelajaran, ekonomi, sosial, dan lain-lain);
 - (g) mengadakan penilaian : kelakuan dan kerajinan;
 - (h) mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah;
 - (i) memperhatikan buku rapor, kenaikan kelas dan ujian akhir (EBTA);
 - (j) memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan anak didik;
 - (k) membina suasana kekeluargaan;
 - (l) melaporkan kepada Kepala Sekolah.

PENDIDIKAN

Sambungan dari hal. 9

annya; studio produksi foto, film dan grafis, yang meliputi diantaranya unit animasi, unit produksi film bingkai (slides) dan film rangkai (film strips), unit penyuntingan film 16 mm dan film bingkai, serta unit proses foto; studio produksi audio baik untuk produksi pita atau kaset rekaman (audio maupun rekaman suara film termasuk sarana untuk pengisian suara (dubbing) dan pemaduan suara (mixing).

Hampir semua peralatan produksi baru yang ada pada unit-unit produksi adalah merupakan realisasi bantuan teknis pemerintah Amerika Serikat melalui USAID yang pelaksanaannya dilakukan oleh AED, dengan nilai sebesar \$2,303,390. Bantuan teknis tersebut juga mencakup: program latihan dan pendidikan yang telah memungkinkan untuk diikuti 1181 tenaga trampil dan 333 tenaga ahli pada tingkat S1, S2, dan S3

di bidang teknologi pendidikan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri; Program pengadaan buku dan media yang menghasilkan 2634 eksemplar buku dalam bidang teknologi pendidikan dan dibagikan antara lain ke 23 perguruan tinggi.

Dapat ditambahkan bahwa program bantuan teknis dari USAID itu akan berakhir tahun 1984 yang akan datang. Selain mendapat bantuan dari USAID, Pustekkom juga mendapat bantuan dari UNICEF. Dengan keseluruhansarana dan tenaga yang telah disiapkan maka Pustekkom akan meningkat kemampuannya secara kualitatif maupun kuantitatif dalam memproduksi berbagai macam media instruksional serta dalam mengembangkan media sebagai suatu sumber belajar merupakan komponen integral pendidikan dan kebudayaan.

PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU BACAAN PERLU DITINGKATKAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan agar supaya dalam rangka menunjang kegiatan intrakurikuler, ko—kurikuler maupun ekstrakurikuler dilakukan peningkatan penulisan serta penerbitan buku-buku bacaan, baik untuk perpustakaan-perpustakaan sekolah maupun untuk dijual kepada masyarakat secara bebas. Hal itu dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Nongroho Notosusanto pada penutupan pameran buku Indonesia tahun 1983, di Balai Sidang Jakarta, tanggal 29 Juli 1983.

Menurut Menteri, cukup banyak buku bacaan yang telah ditulis dan diterbitkan, namun masih jauh di bawah jumlah yang diharapkan, dan itupun mutunya tidak sama. Karena itu agar para pengarang dan penerbit masih tetap meningkatkan penampilan buku bacaan, tanpa mengkaitkannya kepada pembelian massal oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Menyinggung mengenai prosedur penilaian, Menteri Nugroho Notosusanto mengatakan bahwa sebelum menjabat sebagai Menteri pernah mendengar adanya kecurigaan tertentu dari pihak masyarakat mengenai prosedur penilaian yang ditempuh oleh proyek. Dalam kedudukannya sekarang ini, sudah barang tentu tidak ingin kecurigaan itu terus terdapat. Sejalan dengan langkah-langkah yang telah diambil untuk usaha-hakan kemurnian prosedur penerimaan murid baru pada tahun ini, maka insya 'Allah juga akan diusahakan kemurnian prosedur penilaian buku bacaan.

Berkenaan dengan itu, maka cara yang ditempuh oleh Panitia Penilai itu akan disampaikan pula kepada masyarakat melalui media massa. Dengan keterbukaan ini, Menteri berharap tidak ada lagi kecurigaan dari pihak masyarakat

bahwa penilaian dilakukan juga dengan katte-bellece dan katrol-katrolan.

— Bukan Mengambil Alih

Lebih lanjut Menteri mengharapkan agar Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-anak Sekolah Dasar, dapat membeli buku-buku dalam jumlah besar. Menurut Proyek Penyediaan Buku Bacaan tersebut mempunyai fungsi untuk merangsang penerbitan dan dengan demikian juga merangsang penulisan buku bacaan dengan mutu yang setinggi-tingginya dan dalam jumlah yang sebesar-besarnya.

Untuk mencapai tujuan itu maka dengan dana terbatas, menurut Menteri lebih cenderung mengadakan pembelian terhadap sebanyak-banyaknya judul yang bermutu, meskipun jumlah eksemplar dari masing-masing judul yang dibeli lebih kecil. Dengan demikian kita akan dapat menghilangkan kesan maupun kemungkinan akan adanya apa yang oleh masyarakat disebut "penerbit musiman", yaitu penerbit yang menerbitkan buku semata-mata untuk memenangkan pembelian massal dari Proyek. Dengan demikian maka dalam kenyataannya yang menerbitkan buku lalu bukan penerbit melainkan proyek karena seluruh oplag buku dibeli habis. Sudah tentu ini bukan maksud pemerintah. Sedangkan yang diinginkan pemerintah adalah merangsang, bukan mengambil alih penerbitan.

Pameran buku 1983 itu berlangsung selama 12 hari dan mendapat perhatian yang besar dari masyarakat, terutama para pelajar. Secara perhitungan kasar setiap hari dikunjungi lebih kurang 20.000 pengunjung yang terdiri atas kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan juga para tuna netra.

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK DITETAPKAN

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan pedoman pemberian beasiswa peningkatan prestasi akademik kepada mahasiswa perguruan tinggi negeri. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0196/K/1983, tanggal 2 April 1983, yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Soetanto Wirjoprasono atas nama Menteri. Sebagai pertimbangan dikeluarkannya keputusan Menteri itu adalah untuk meningkatkan kemampuan hasil lulusan perguruan tinggi, agar dapat diandalkan kemampuan akademik dan keahlian profesionalnya, terutama dalam pelaksanaan pembangunan.

Basiswa tersebut diberikan selama setahun kepada setiap penerima beasiswa setiap bulan dengan jumlah sebesar Rp 25.000,00.

— Latar Belakang

Adapun latar belakang ditetapkannya pedoman tersebut adalah karena sangat dirasakan adanya kekurangan tenaga lulusan perguruan tinggi yang mendapat pendidikan dan latihan akademik dalam berbagai bidang, yang dapat diterapkan di lapangan yang memelukannya. Kekurangan ini antara lain disebabkan karena banyaknya mahasiswa yang berkemampuan untuk melanjutkan atau menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, tetapi mengalami kesulitan mengenai pembiayaannya, sehingga mereka terpaksa menghentikan kuliahnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah memberikan tunjangan belajar kepada mahasiswa perguruan tinggi negeri yang prestasi akademiknya tinggi, tetapi tidak mampu membiayai studinya. Tunjangan belajar tersebut diberikan dalam bentuk beasiswa, yang disebut beasiswa peningkatan prestasi akademik.

Beasiswa itu memberi kesempatan kepada penerima beasiswa untuk menjadi calon tenaga pengajar di perguruan tinggi. Dan beasiswa itu dikelola oleh proyek pengadaan tenaga akademik. Setelah penerima beasiswa tersebut berhasil

memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka selanjutnya penerima beasiswa akan dibina oleh proyek tersebut.

Tujuan pemberian beasiswa ialah : untuk mendorong mahasiswa yang ekonomis lemah, tetapi berprestasi akademik, baik untuk lebih meningkatkan prestasi akademiknya. Di samping itu untuk mempersiapkan tenaga lulusan perguruan tinggi negeri yang dapat diandalkan kemampuan akademiknya dan keahlian profesinya, yang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan. Juga membantu usaha pemerintah untuk mendorong minat mahasiswa menjadi calon tenaga pengajar di perguruan tinggi. Serta untuk menunjang secara aktif pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi negeri.

Sedangkan sifat dari pada beasiswa adalah tidak mengikat, hanya merupakan bantuan pembiayaan studi bagi penerimanya, sebab penerima beasiswa setelah menamatkan studinya, yang bersangkutan dapat menyumbangkan tenaganya di instansi pemerintah ataupun swasta yang memerlukan.

— Penerima Beasiswa

Adapun beasiswa ini diberikan kepada mereka mahasiswa dari Program Sarjana (S1) dan Program Diploma (D II, D III, dan D IV) yang memenuhi persyaratan, dengan catatan bahwa bidang studi yang masih dianggap langka di perguruan tinggi akan mendapat perhatian khusus. Pemberian beasiswa ini baru dilakukan setelah dimulai pada semester 3. Beasiswa ini diberikan dalam jangka waktu 1 tahun, yaitu mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Juli tahun berikutnya.

Syarat-syarat bagi penerima beasiswa adalah sbb : Warganegara Indonesia, berjiwa Pancasila; berprestasi akademik tinggi; berkelakuan baik sehat jasmani, dan rohani; rajin dan tekun belajar; ekonomi lemah; tidak berstatus penerima beasiswa lain dalam bentuk apapun; tidak bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta; serta

Bersambung ke hal. 46

sekolah sebagai lembaga pendidikan yang paling strategis untuk menumbuhkan berbagai sikap dan kemampuan yang diharapkan sukar terlaksana. Yang dapat terjadi hanyalah dikuasainya berbagai "jargon" dan rumus secara hafalan tanpa pemahaman yang memadai.

Keadaan yang demikian menurut tulisan ini dikategorikan sebagai situasi belajar yang tidak bermutu. Bagi tulisan ini, sesuai dengan tuntutan kurikulum 1975, proses belajar yang bermutu harus memenuhi beberapa persyaratan berikut.

- (1) Memiliki nilai intrinsik bagi tumbuhnya sikap yang diharapkan untuk dicapai. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa sikap ilmiah tidak dapat tumbuh dalam suasana kelas yang tidak mempraktikkan proses terjadinya kegiatan ilmiah dan tidak adanya suasana ilmiah.
- (2) Memungkinkan siswa secara aktif berpartisipasi dalam proses belajar, sifat yang demikian akan memungkinkan siswa memahami dan mengerti apa yang sedang dipelajari secara mendalam.
- (3) Efisien, dalam arti bahwa pada suatu saat berbagai jenis tujuan (kognitif, efektif, dan psikomotorik) dapat dicapai. Pendekatan menyelidik dan proses, bila dijalankan akan memungkinkan tercapainya ketiga hal itu dengan memadai. Mempelajari suatu konsep IPA dengan melalui belajar di laboratorium akan dapat menumbuhkan pada saat yang sama ketiga dimensi tujuan itu.
- (4) Serasi dengan tujuan yang akan dicapai. Keempat ukuran bagi suatu proses belajar yang bermutu itu secara bersamaan dapat meningkatkan potensi sekolah sebagai lembaga tempat terjadinya proses sosialisasi berbagai kemampuan dan sikap ke dalam diri anak didik.

Suatu keadaan yang berlainan dengan suasana belajar yang tidak bervariasi di mana guru menerangkan/mendiktekan dan pelajar mencatat. Suasana yang demikian juga akan meningkatkan relevansi pendidikan dengan harapan masyarakat sebagai yang diharapkan oleh GBHN.

Tulisan ini tidak memandang bahwa mutu pendidikan hanya dapat diukur dari tingkat kemampuan siswa menjawab pertanyaan dalam tes hasil belajar. Melainkan harus juga dilihat

dari dimensi hasil belajar lainnya yang masih sukar diukur dengan tes prestasi belajar. Kalau ukurannya hanya kemampuan menjawab tes prestasi belajar yang hanya mengukur aspek kognitif pada tingkat yang rendah, ditakutkan akan terjadi suasana kelas yang hanya digunakan untuk melatih siswa menjawab pertanyaan. Akibatnya kerja laboratorium tidak akan dianggap perlu.

Tulisan ini menganggap bahwa mutu pendidikan akan dapat dilihat di samping dari kemampuan siswa menjawab pertanyaan tes prestasi belajar juga perubahan sikap dan kemampuan intelektual siswa, keterampilannya, termasuk di dalamnya kemampuan dan kecepatan belajarnya. Dengan ukuran ini diharapkan bahwa sekolah akan didorong untuk menciptakan suasana belajar yang memenuhi syarat dan bukan kelas yang hanya sebagai tempat siswa mendengarkan dan mencatat.

Pernyataan berikutnya adalah, "Bagaimana-kah keadaan yang harus memadai itu harus diubah?" Berikut ini akan dicoba menjelaskan peranan PPSP sebagai pendorong bagi berkembangnya proses belajar yang bermutu di sekolah-sekolah di Indonesia.

3. Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional sebagai Sasaran bagi Pelaksanaan Program Belajar Mengajar yang bermutu.

Pada saat ditetapkannya PPSP sebagai kerangka yang harus di ikuti oleh para guru di dalam merencanakan program belajar, pertimbangannya adalah karena menurut pengamatan, banyak guru yang menganggap pekerjaan sebagai guru sama dengan menjelaskan dan mendiktekan. Tampak dalam pengamatan itu guru tidak menganggap memilih berbagai metode yang paling tepat, membatasi tujuan yang dapat dicapai dalam suatu satuan waktu, menetapkan hubungan kesinambungan antara satuan pelajaran dengan latar belakang kesulitannya, memilih dan menyiapkan alat pelajaran, dan mengelola proses belajar adalah tanggung jawab profesionalnya. Karena itu, dicarilah jalan untuk mengajak semua guru menyadari tanggung jawab dan tugas profesionalnya. PPSI adalah kerangka penyusunan program yang dalam dirinya menurut guru menyadari tugas dan tanggung jawab profesio-

nalnya. Dengan mengikuti prosedur PPSI seorang guru harus selalu menetapkan dan merumuskan tujuan yang akan dicapai untuk suatu program, memerinci bahan-bahan pelajaran yang akan dijadikan obyek belajar, merencanakan proses belajar mengajar yang paling ampuh untuk mencapai suatu tujuan, menyusun-menggunakan-mengolah alat evaluasi, dan menyiapkan alat pendidikan yang menunjang. Kesemuanya ini memerlukan kemampuan profesional.

Dengan kerangka ini diharapkan bahwa guru akan selalu memikirkan, karena dituntut, untuk mencari cara belajar-mengajar yang memenuhi syarat.

Dalam pelaksanaannya banyak guru yang tidak menyadari kegunaan PPSI. Dalam kunjungan ke berbagai sekolah masih ditemukan banyak guru pada berbagai sekolah yang tidak melakukan itu dan ditemukanlah kelas tradisional tidak sebagai yang diharapkan oleh kurikulum 1975.

Tulisan ini tidak mengatakan bahwa PPSI dengan sendirinya akan dapat menciptakan proses belajar mengajar yang bermutu. Yang benar adalah bahwa dengan PPSI guru didorong mencari jalan untuk dapat memenuhi tuntutan profesional seorang guru.

Tulisan ini pun sadar, setelah menganalisis keadaan, bahwa untuk dapat memenuhi harapan PPSI setiap guru harus memiliki kemampuan profesional. Apakah itu? Bagian berikut akan mencoba untuk mengulasnya.

4. Persyaratan Profesional dari Seorang Guru untuk Melaksanakan Sistem Kurikulum 1975 dengan PPSI-nya

Setelah kurikulum 1975 memasuki tahun yang kelima dari pelaksanaannya, harapan dari perbaikan mutu proses belajar sebagai yang disinggung di atas belumlah menjadi kenyataan.

Banyak guru yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman yang dituangkan dalam PPSI bagi penyusunan program belajar mengajar. Tulisan ini tidak menganggap bahwa hanya guru yang membuat satuan pelajaran sesuai dengan PPSI-lah yang secara profesional dianggap telah memenuhi syarat. Namun, sebaliknya tulisan ini menganggap bahwa guru yang membuat satuan pelajaran dengan penuh kesungguhan dan kesadaran tentang perlunya diikuti logika kerja sebagai yang dituntut oleh PPSI

adalah guru yang menyadari tanggung jawab profesional. Dalam hubungan ini tulisan ini memandang bahwa belum diterimanya logika dan prosedur kerja sebagai yang digariskan dalam PPSI tidak lain disebabkan oleh kemungkinan-kemungkinan berikut.

(1) *Kurangnya pemahaman dan kemampuan profesional seorang guru.*

Tidak adanya pemahaman akan pekerjaan guru sebagai tugas profesional dapat mengakibatkan seorang guru tidak mengetahui apa yang salah dengan keadaan yang sekarang. Guru ini sudah biasa melakukan apa yang selama ini dilakukan; karena itu, tidak mengetahui apa yang harus diperbaiki dan mengapa mengajar, yaitu datang ke kelas menjelaskan sesuatu atau mendiktekan sesuatu dan memberikan tugas. Sampai berapa jauh para siswa memahami apa yang diterangkan dan mengapa suatu bagian pelajaran perlu diterangkan tidak pernah menjadi masalah. Guru sebagai yang dilukiskan terakhir ini tidak dapat diajak secara sukarela untuk memperbaiki kualitas proses belajar di kelas. Karena baginya keadaannya sudah sebagai yang telah dia jalankan selama ini.

(2) *Tiadanya kemauan profesional.*

Guru tipe ini mungkin memahami perlunya perubahan untuk perbaikan. Akan tetapi, baginya untuk melakukan perubahan memerlukan tambahan energi dan waktu. Karena itu, segan dan tidak mau melakukan sesuatu yang baru.

(3) *Tiadanya atau kurangnya tanggung jawab profesional.*

Guru yang termasuk dalam kelompok ini tidak merasa bahwa tinggi rendahnya mutu pendidikan adalah tanggung jawabnya. Baginya bekerja sebagai guru adalah untuk mencari nafkah. Guru tipe ini bukan tidak pernah menghasilkan lulusan yang baik, pernah, tetapi bila pelajarannya memang sudah tinggi motivasinya dan tinggi tingkat kemampuannya intelektualnya.

PPSI sebagai pedoman bagi guru direncanakan

agar tiga kelompok guru itu berangsur-angsur meningkat kemampuan dan pemahaman profesionalnya, meningkatkan kemauan profesionalnya, dan meningkatkan rasa tanggung jawab profesionalnya. Bagaimana ketiga hal itu dapat ditingkatkan akan dibahas secara singkat dalam bagian berikut.

Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa syarat bagi seorang guru untuk dapat melaksanakan tugas profesionalnya sebagai yang dituntut oleh kurikulum 1975 dengan sistem PPSI-nya.

Dalam analisis kami, kemampuan profesional yang diharapkan dari seorang guru untuk melaksanakan kurikulum 1975 dengan sistem PPSI-nya dapat dikemukakan sebagai berikut.

- (1) Pengurus materi pelajaran sebagai obyek belajar secara memadai, di dalamnya termasuk pemahaman tentang *ways of knowing* suatu bidang studi menurut tingkat usia, serta peranan suatu obyek belajar dalam proses perkembangan anak menjadi dewasa.
- (2) Kemampuan merencanakan program belajar mengajar yang meliputi beberapa subkemampuan.
 - 2.1. Merumuskan dan menetapkan tujuan instruksional khusus. Kemampuan ini perlu ditunjang dengan pemahaman tentang indikator suatu tingkah laku yang menggambarkan telah dikuasainya suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap.
 - 2.2. Memahami dan menguasai berbagai pendekatan belajar mengajar serta teknik mengajar, dan mampu memilih pendekatan dan metode yang paling ampuh untuk membantu pelajar mencapai suatu tujuan pendidikan pada singkatan instruksional.
 - 2.3. Dapat menata urutan kegiatan belajar secara berkesinambungan serta secara akumulatif akan mencapai tujuan pendidikan yang diterapkan.
 - 2.4. Mengetahui berbagai alat dan media pendidikan dan memilih serta menggunakan media pendidikan yang paling ampuh dalam menunjang tercapainya tujuan pendidikan
 - 2.5 Mengetahui berbagai jenis alat evaluasi dan dapat memilih jenis yang me-

madai untuk mengukur mengenai suatu jenis tujuan pendidikan.

- (3) Kemampuan mengelola proses belajar-mengajar dalam arti dapat menciptakan suasana belajar, dan mengatur siasat yang ampuh bagi berlangsungnya proses belajar secara tepat guna berhasil guna.
- (4) Kemampuan menafsirkan dan menggunakan hasil evaluasi kemampuan belajar untuk menyempurnakan program belajar selanjutnya dan mendiagnosa faktor yang melatar belakangi tingkat pencapaian itu.
- (5) Kemampuan membantu pelajar dalam mengatasi kesulitan belajar dan mendorong pelajar yang untuk meningkatkan prestasinya.

Penulis menyadari bahwa hanya sebagian kecil guru, kalau dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman profesionalnya, yang memiliki sepenuhnya kemampuan yang disebut di atas. Namun, kita tidak boleh mundur untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar anak-anak kita. Karena itu, berbagai jalan harus ditempuh agar dalam dan dengan kondisi yang ada, putra-putra Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang bermutu, relevan dan bermanfaat bagi masa depan mereka, yang adalah masa depan bangsa. Bagian terakhir tulisan ini bermaksud secara singkat mengemukakan beberapa jalan yang sedang dan akan ditempuh untuk mencapai keadaan yang diharapkan.

5. Usaha-usaha yang Perlu Dikembangkan dan Dilaksanakan bagi Pemantapan Pelaksanaan Sistem Kurikulum 1975.

Bagian terdahulu tulisan ini telah mencoba mengulas harapan dan tuntutan dilaksanakannya sistem kurikulum 1975. Dari usaha-usaha itu jelaslah bahwa kualitas proses belajar merupakan inti proses pembaharuan pendidikan yang dirintis melalui pembakuan kurikulum 1975 dan penelitian serta pengembangan yang dilakukan melalui PPSP (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan). Faktor yang penghambat tidak memadainya perencanaan dengan pelaksanaan antara lain adalah tenaga pengajar yang sebagian kurang memahami dan tidak menguasai persyaratan profesional dari seorang guru, sebagian karena

tiadanya kemauan dan tanggung jawab profesional guru. Penataran yang dilakukan ternyata tidak dengan sendirinya mengubah kualitas proses belajar. Hal yang terakhir ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor: (1) kurang intensifnya program penataran; (2) tidak adanya tindak lanjut dari penataran, dan (3) tidak adanya suasana yang memperkuat perlunya pelaksanaan apa-apa saja yang telah diperoleh dalam penataran.

Dari berbagai pertimbangan yang dikemukakan di atas berbagai usaha kini sedang dilakukan dan akan dilakukan.

- (1) Penyempurnaan program penataran, baik bentuknya, materinya, maupun pendekatannya. Bentuk penataran yang tidak sinambung dengan pelaksanaan dan tidak adanya usaha penguatan sukar diharapkan untuk menjadi efektif. Pendekatan penataran yang sifatnya satu arah dari penatar kepada petatar tidak mendorong petatar untuk secara aktif mencari jalan pemecahan dengan penatar sebagai pembantu.
- (2) Pengembangan sistem penyajian pelajaran yang memungkinkan pelajar belajar sendiri (dikenal dengan sistem pengajaran dengan modul) akan memungkinkan guru yang pendidikan profesionalnya maupun pengalaman profesionalnya sangat terbatas, guru tipe ini akan bertambah banyak, menggunakan bahan-bahan yang tinggal dikelola pada saat dipelajari para siswa. Sistem ini sedang dimantapkan melalui PPSP akan se-

gera dapat dimanfaatkan oleh sekolah di luar PPSP yang tenaga gurunya belum dapat sepenuhnya diberi tanggung jawab profesional.

- (3) Pengembangan sistem supervisi profesional, di samping supervisi administratif. Jenis supervisi ini diharapkan akan memberikan bantuan secara langsung kepada para guru, baik sebagai tindak lanjut penataran maupun pemantapan pelaksanaan sistem pengajaran dengan modul.
- (4) Pengembangan media komunikasi profesional, untuk menyajikan secara langsung kepada para guru perkembangan baru di bidang kependidikan dan menyajikan pemecahan masalah yang dihadapi guru, baik yang disampaikan secara langsung maupun sebagai hasil pengamatan atau penilaian.
- (5) Peningkatan kemampuan daerah dalam pengembangan kurikulum agar segala masalah yang dihadapi di daerah dapat diatasi secara langsung oleh pertemuan profesional di setiap lokasi.

PENUTUP

Demikianlah beberapa hal yang dapat disajikan secara singkat. Mudah-mudahan tulisan ini dapat mengundang gagasan makin sempurnanya kualitas proses dan mutu hasil belajar generasi muda Indonesia.

MENDIKBUD MENINJAU MUHAMMADIYAH DAN TAMAN SISWA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, pekan yang lalu mengadakan kunjungan kerja ke pendidikan Muhammadiyah Jalan Kramat, dan pendidikan Taman Siswa Jalan Garuda, Jakarta.

Dalam kunjungan kerja yang diikuti oleh sejumlah wartawan ibukota, Menteri, kecuali mendapat penjelasan dari Ketua Yayasan pendidikan, juga meninjau langsung ke ruang-ruang kelas untuk menyaksikan proses belajar dan mengajar di dua sekolah tersebut.

Di Muhammadiyah setelah menerima laporan perkembangan Muhammadiyah Menteri menang-

gapi, bahwa dibanding 43 tahun yang lalu Muhammadiyah telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Namun tidak berlebihan bila Menteri menghimbau untuk makin memperhatikan peningkatan mutu. Dan atas partisipasi di bidang pendidikan itu Menteri menyampaikan terima kasih.

Dalam kunjungan kerja yang penuh keakraban itu Menteri menginginkan jangan berbentuk protokoler, tetapi sekarang ini tidak dapat lagi hal itu dilakukan, selama saya menjadi pejabat, kata Menteri. "Sebetulnya saya sebagai kerabat Muhammadiyah akan berlaku sepanjang hayat,

Bersambung ke hal. 38

Mendikbud Tetapkan Akronim Komunikasi Informal Bagi Unit Organisasi Depdikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Nugroho Notosusanto tgl. 22 Juli 1983 telah menandatangani keputusan dengan nomor 0318/U/1983 menetapkan tentang Akronim Yang Dipakai Dalam Komunikasi Informal Bagi Unit Organisasi Tertentu dan Pimpinannya Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ketetapan ini dipandang perlu oleh Menteri karena menurut kenyataan sekarang baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipakai pelbagai singkatan dan akronim, terutama dalam komunikasi informal. Singkatan dan akronim ini timbul secara spontan tanpa pembakuan secara terpusat. Menurut Menteri Nugroho singkatan yang terdiri atas huruf awal bagi komunikasi kurang praktis karena sukar diterka, sedangkan akronim lebih mudah diterka

dengan memperhatikan kegunaannya yang dalam kenyataan hidup dalam bahasa birokratik yang ada dan telah mengalami pembakuan dalam penggunaan potongan kata untuk meningkatkannya. Berdasarkan pemikiran dan pertimbangan sebagai diungkapkan oleh Menteri tersebut, maka dipandang perlu menyeragamkan pemakaian akronim dalam komunikasi informal bagi unit organisasi tertentu dan pimpinannya dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ditetapkan bahwa akronim yang dimaksud adalah untuk dipakai baik secara lisan maupun tertulis. Dalam lampiran keputusan Menteri disebutkan tidak kurang dari 69 singkatan/akronim yang berhasil dibakukan. Singkatan dan akronim yang dimaksud dapat diketahui sebagai berikut :

**Salinan LAMPIRAN Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Juli 1983 No. 0318/U/1983**

No.	Nama Unit Organisasi	Singkatan/ Akronim Unit Organisasi	Singkatan Lebih lanjut	Singkatan/ Akronim Pim pinan Unit Organisasi	Singkatan Lebih Lanjut
1	2	3	4	5	6
1.	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.	Balitbang Dikbud	Litbang	Ka Balitbang Dikbud	Kalitbang
2.	Biro Perencanaan	Roren	—	Karoren	—
3.	Biro Kepegawaian	Ropeg	—	Karopeg	—
4.	Biro Keuangan	Roku	—	Karoku	—
5.	Biro Perlengkapan	Rokap	—	Karokap	—
6.	Biro Organisasi	Rogan	—	Karogan	—
7.	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Ro Kum- humas	—	Karo Kum- humas	—

8.	Biro Kerjasama Luar Negeri	Ro Kerslugri	—	Karo Kerslugri	
9.	Biro Tata Usaha	Rotaus	—	Karo Taus	—
10.	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Depdikbud	—	Mendikbud	—
11.	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	Ditjen Dikdasmen	Dikdasmen	Dirjen Dikdasmen	—
12.	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Ditjen Dikti	Dikti	Dirjen Dikti	—
13.	Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga	Ditjen Diklusepora	Diklusepora	Dirjen Diklusepora	—
14.	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Ditjenbud	—	Dirjenbud	—
15.	Direktorat Pendidikan Dasar	Ditdikdas	Dikdas	Dirdikdas	—
16.	Direktorat Pendidikan Menengah Umum	Dit Dikmenum	Dikmenum	Dir Dikmenum	—
17.	Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.	Dit Dikmenjur	Dikmenjur	Dir Dikmenjur	—
18.	Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis	Dit Dikguten-tis.	Dikguten-tis.	Dir Dikguten-tis	—
19.	Direktorat Sarana Pendidikan	Ditsardik	Sardik	Dirsardik	—
20.	Direktorat Sekolah Swasta	Ditseswa	Seswa	Dirseswa	—
21.	Direktorat Pembinaan Kesiswaan	Ditbinwa	Binwa	Dirbinwa	—
22.	Direktorat Pembinaan Sarana Akademis	Dit Binsarak	Binsarak	Dir Binsarak	—
23.	Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	Dit Binlintabmas	Binlit Abmas	Dir Binlitabmas	—
24.	Direktorat Perguruan Tinggi Swasta	Dit Gutiswa	Gutiswa	Dir Gutiswa	—
25.	Direktorat Kemahasiswaan	Ditmawa	—	Dirmawa	—
26.	Direktorat Pendidikan Masyarakat	Ditdikmas	Dikmas	Dirdikmas	—
27.	Direktorat Pembinaan Generasi Muda	Ditbinmud	Binmud	Dirbinmud	—
28.	Direktorat Keolahragaan	Ditora	—	Dirora	—

29.	Direktorat Pendidikan Tenaga Teknis	Dit Diktentis	Diktentis	Dir Diktentis	—
30.	Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional	Dit Jarahnitra	Jarah Nitra	Dir Jarahnitra	—
31.	Direktorat Kesenian	Ditseni	—	Dirseni	—
32.	Direktorat Permuseuman	Ditmus	—	Dirmus	—
33.	Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	Ditlinbin Jarah	Ditlinbin	Drlinbin Jarah	Dirlinbin
34.	Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Ditbinyat	—	Dirbinyat	—
35.	Inspektorat Jenderal	Itjen	—	Irjen	—
36.	Inspektur Kepegawaian	—	—	Irpeg	—
37.	Inspektur Keuangan	—	—	Irku	—
38.	Inspektur Perlengkapan	—	—	Irkap	—
39.	Inspektur Pendidikan Dasar dan Menengah	—	—	Ir Dikdasmen	—
40.	Inspektur Pendidikan Tinggi	—	—	Irdikti	—
41.	Inspektur Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga	—	—	Ir Diklusepora	—
42.	Inspektur Kebudayaan	—	—	Irbud	—
43.	Inspektur Proyek Pembangunan	—	—	Irprobang	—
44.	Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Kanwil Depdikbud	Kanwil	Kanwil Depdikbud	Kakanwil
45.	Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya	Kandep Dikbud Kab/Kodya	Kandep Kab/Kodya	Kakandep Dikbud Kab/Kodya	Kakandep Kab/Kodya
46.	Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan	Kandep Dikbudcam	Kancam	Kakandep Dikbuncam	Kakancam
47.	Koordinator Urusan Peraturan Perundang-undangan dan Disiplin Pegawai			Kordangplin	
48.	Koordinator Urusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Guru			Kor Dikdagu	
49.	Koordinator Urusan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi			Kor Dikmenti	
50.	Koordinator Urusan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Instansi Vertikal			Kor Diklusepora	

51.	Koordinator Urusan Administrasi			Kormin	
52.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian	Puslitbang Sisjian	Litbang Sisjian	Kapus Litbang Sisjian	Kalitbang Sisjian.
53.	Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan	Pusbang Kurrandik	Bang Kurrandik	Kapusbang Kurrandik	Kabang Kurrandik
54.	Pusat Informatik untuk pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan	Pusinfot	Infpt	Kapus Infot	Kainfot
55.	Pusat Pengembangan Inovasi Pendidikan dan Kebudayaan	Pusbangnov	Bangnov	Kapus Bangnov	Kabangnov
56.	Pusat Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan	Puslit Dikbud	Likdikbud	Kapuslit Dikbud	Kalit Dikbud
57.	Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan	Pus Tekkom	Tekkom	Kapus Tekkom	Katekkom
58.	Pusat Pembinaan Perpustakaan	Pusbin Pustak	Binpustak	Kapusbin Pustak	Kabin Pustak
59.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	Pusbin Bangsa	Binbangsa	Kapusbin Bangsa	Kabin Bangsa
60.	Pusat Penelitian Arkeologi Nasional	Puslit Arkenas	Lit Arkenas	Kapuslit Arkenas	Kalit Arkenas
61.	Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Pussegas	Segjas	Kapus Segjas	Kasegas
62.	Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai	Pus Diklatpeg	Pusdiklat	Kapus Diklatnge	Kapus Diklat
63.	Pusat Grafika Indonesia	Pusgrafin	—	Kapus Grafin	—
64.	Sekretariat Jenderal	Setjen	—	Sesjen	—
65.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Set Itjen	—	Ses Itjen	—
66.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan	Set Ditjen Dikdasmen	Set Sikdasmen	Ses Ditjen Dikdasmen	Ses Dikdasmen
67.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Set Dikjen Dikti	Set Dikti	Ses Ditjen Dikti	Ses Dikti
68.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga	Set Ditjen Diklusepora	Set Diklusepora	Ses Ditjen Diklusepora	Ses Diklusepora
69.	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan.	Set Ditjenbud	—	Ses Ditjenbud	—

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ttd

Prof. Dr. Nugroho Notosusanto

Hasil Sayembara Mengarang untuk Guru SD Dalam Rangka Hardiknas Tahun 1983

SAYEMBARA Mengarang untuk Guru Sekolah Dasar dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 1983, yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan bantuan Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berlangsung mulai tanggal 3 Januari 1983 sampai dengan tanggal 13 Juni 1983. Sayembara mengarang itu, yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di kalangan guru Sekolah Dasar (SD), telah mendapat sambutan yang masuk dari seluruh Indonesia berjumlah 174 buah. Dari 174 naskah yang masuk terdapat 161 naskah yang memenuhi syarat sebagai karangan ilmiah atau ilmiah populer dengan tema sebagai berikut: Bahasa Indonesia dan pelaksanaan wajib belajar; Bahasa Indonesia dan pembinaan penalaran murid sekolah dasar; Bahasa Indonesia dan buku pelajaran murid sekolah dasar; Bahasa Indonesia dan buku pegangan guru sekolah dasar; Pengajaran Bahasa Indonesia dan peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia murid sekolah dasar; Pengajaran sastra Indonesia di sekolah dasar; Pembinaan apresiasi sastra di sekolah dasar; dan Pengaruh lingkungan terhadap minat sastra murid sekolah dasar.

— Pemenang

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Panitia Sayembara, para pemenang Sayembara Mengarang untuk Guru SD dalam rangka hari Pendidikan Nasional 1983 itu telah ditetapkan sebagai berikut. Bidang Bahasa: Pemenang I, A. Rustoyo, B.A., Kepala Sekolah Dasar Kramat I Gang 4 Rt 006 RK 06 Panggung, Tegal, Jawa Tengah. Judul karangan yang ditulis "Teknik Pengajaran Lafal Baku Bahasa Indonesia di Kelas IV Sekolah Dasar. Hadiah yang diterima Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pemenang II, Barmin, (Guru Sekolah Dasar Negeri Balong I, Kecamatan Balong Ponorogo, Jawa Timur. Judul karangan "Pengaruh Lingkungan terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia Anak Didik".

Hadiah yang diterima Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pemenang III, St. Suropto Atmosuwito, B.A., Guru Sekolah Dasar Tarsisius Jalan Brigjen Katamso 49 Semarang. Judul karangan "Pengajaran Bahasa Indonesia di Kelas I SD dengan Menggunakan Metode SAS dan Buku Murid". Hadiahnya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Untuk Bidang Sastra: Pemenang I, Sanusi Surya Permana, Kepala SDN Ciginggong III Kampung Kadubongkok, Ciginggong, Gunung Kencana, Kabupaten Lebak Jawa Barat. Judul karangan "Menumbuhkan Minat Anak terhadap Sastra Indonesia di Sekolah Dasar Pedesaan". Hadiah, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pemenang II, Sukamto, Guru SD Baturetno I Kecamatan Baturetno Wonogiri, Jawa Tengah. Judul karangan "Mengajar Drama di Sekolah Dasar". Hadiah yang diterima Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Pemenang III, Drs. Usman Awini Kepala SD Inpres Bonto-bonto Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Judul karangan yang ditulis "Pembinaan Apresiasi Sastra di Sekolah Dasar". Ia memperoleh hadiah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

— Diundang ke Jakarta

Para pemenang sayembara itu telah diundang sebagai tamu Panitia Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1983 untuk menerima hadiah dan piagam penghargaan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta mengikuti acara puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 1983 dan Hari Ulang Tahun ke-38 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, selama 6 hari, pada tanggal 15 – 20 Agustus 1983, di Ibu Kota Jakarta.

Kepada para peserta sayembara yang telah mengirimkan naskah karya tulisnya dan kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggara sayembara itu, panitia menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

Guru Memberikan Saham yang Amat Besar dalam Membentuk Manusia Masa Depan

GURU memberikan saham yang amat besar dalam membentuk manusia masa depan. Demikian dinyatakan Ny. K. Umar Wirahadikusumah pada acara penerimaan/perkenalan guru teladan pada acara penerimaan/perkenalan guru teladan tahun 1983 di Hotel Sahid Jaya, 8 Agustus lalu.

Lebih lanjut Ny. Umar mengatakan pembentukan manusia Indonesia masa depan bukanlah terletak hanya pada hafalnya PMP atau suatu cabang ilmu oleh para murid, tetapi terletak pada sikap dan cara bagaimana para guru mengajarkan mata pelajaran PMP atau cabang ilmu itu.

Sikap dan cara guru mengajarkan itulah yang lebih menentukan apakah mata pelajaran yang bersangkutan ditampung oleh murid sebagai hasil suatu hafalan saja, ataukah diresapkannya dengan hati dan segenap inderanya, sehingga tertanam dalam sekujur alam jasmani dan rohaninya menjadi suatu sikap kepribadian yang utuh menyeluruh, yakni meresapi seluruh jasmani dan inteligensinya.

"Gelar guru teladan, gelar yang mencakup semua aspek kebaikan. Jadi gelar yang disandangkan oleh masyarakat kepada anda bukan hanya mengandung suatu penghargaan, tetapi juga mengandung suatu penghormatan, tegasnya.

Seusai sambutannya, Ny. Umar memberikan caramah kepada para peserta pemilihan guru te-

ladan, tentang etiket. Bagaimana mengenai cara menggunakan kamar tidur, kamar mandi, cara makan, sikap berbicara dengan rekan, bawahan, atasan dan lain-lain.

Sementara itu Prof. Darji Darmodiharjo, SH selaku Ketua Panitia Pemilihan Guru Teladan Tingkat Nasional Tahun 1983 mengatakan dalam proses pelaksanaan pendidikan, guru merupakan faktor yang amat penting dan menentukan bahkan merupakan titik sentral dalam pendidikan. Betapapun baik dan lengkapnya pengaturan kurikulum serta metode pengajarannya, betapapun baik dan lengkapnya penyediaan bangunan gedung serta sarana pendidikan lainnya, namun kunci keberhasilan pelaksanaan pendidikan banyak ditentukan oleh faktor tenaga pelaksanaannya yaitu guru.

Pemilihan guru teladan yang disponsori Ibu Ria Pembangunan dan dilaksanakan bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Agama, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, pada hakekatnya merupakan usaha Pemerintah dalam rangka mempertinggi harkat dan martabat guru, serta memberikan dorongan dan perangsang dalam meningkatkan dedikasi dan prestasi kerja guru.

Sambungan dari hal. 32

kalau sebagai pejabat hanya terbatas 5 tahun".

Meanggapi usul Ketua Yayasan dan Ketua pendidikan Muhammadiyah mengenai bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Menteri menyatakan "saya tidak dapat berjanji apa-apa, yang benar adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Ketua Yayasan pendidikan Muhammadiyah yaitu bekerja yang sebaik-baiknya nanti pasti akan ada perhatian" tegas Menteri.

Di Taman Siswa Menteri mengemukakan bahwa fasilitas pendidikan di Jalan Garuda itu kelihatan sudah cukup baik. Demi kesehatan

anak didik agar pagar dari bangunan sebelah kirinya itu tidak dibangun lebih tinggi lagi agar tidak menghalang sinar matahari, hal itu oleh Menteri telah dihimbau kepada Pemda untuk perhatiannya. Dalam kesempatan itu Menteri mengemukakan untuk lebih memperhatikan pengelolaan perpustakaan sekolah. Pengelola perpustakaan itu paling tidak harus ada 2 ahli yaitu, pertama yang tahu administrasi perpustakaan, dan kedua seseorang yang ahli untuk dapat membuat perpustakaan menarik dan membuat krasan bagi para pembacanya, dan mampu menyediakan buku-bukunya, yang selalu up to date.

Hingga Kini Ria Pembangunan Tetapkan Tampill Sebagai Sponsor Pemilihan Guru Teladan

TERHADAP penyelenggaraan pemilihan guru teladan hingga sekarang Ibu RIA Pembangunan dengan Ketua Umumnya Ibu Tien Soeharto, sangat tanggap dan beliau sendiri berketetapan hati untuk tetap bersedia sebagai indung dan pemrakarsa serta sebagai sponsor dari pemilihan Guru Teladan. Ini dikemukakan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Prof. Darji Darmodiharjo, SH selaku Ketua Umum Pemilihan Keteladanan dan Lomba Hari Pendidikan Nasional 1983 pada kesempatan jumpa pers di Kantor Pusat Depdikbud, Jakarta Sabtu 6 Agustus kemarin. Kegiatan itu sendiri merupakan langkah atau upaya Pemerintah dalam rangka mendorong dan meningkatkan diri dan kemampuan profesi diri guru, prestasi guru, demi berhasilnya pelaksanaan pendidikan, Usaha ini ditempuh, karena Pemerintah menyadari betapa penting dan menentukan faktor guru dalam pencapaian sasaran pokok pendidikan.

Kegiatan Pemilihan Guru Teladan Tk. Nasional yang telah berlangsung sejak tahun 1972, tahun ini dilaksanakan mulai 8 Agustus sampai dengan 20 Agustus 1983. Pengumuman bagi pemenangnya telah diadakan di Kantor Pusat Depdikbud, Senayan tgl. 15 Agustus 1983. Seluruh peserta yang berjumlah 105 orang dari 27 propinsi pada hari Senin 8 Agustus pula telah berkumpul di Jakarta. Jumlah seluruh peserta mestinya 108 orang guru, dengan perhitungan setiap propinsi mengirimkan 4 orang calon yang merupakan guru teladan tingkat propinsi, masing-masing seorang dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMTA, Namun Propinsi Timor Timur sebagai propinsi yang termuda, tahun sekarang baru mengirimkan seorang wakil.

— Hadiah

Kepada semua peserta pemilihan Guru Teladan Tingkat Nasional tahun ini tetap disediakan hadiah baik oleh Presiden dan Ibu Tien Soeharto maupun penghargaan lain dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hadiah dari Presiden

Soeharto antara lain deposito berjangka masing-masing sebesar Rp 100.000,00; Foto Bapak beserta Ibu Tien Soeharto dengan tanda tangan beliau; dan buku satu set, terdiri 7 buah buku a.l. buku 30 tahun Indonesia Merdeka; Soeharto Anak Desa; Janur Kuning; Pandangan Soeharto tentang Pancasila; P 4; UUD 1945 dan GBHN. Hadiah dari Ibu Tien Soeharto selaku Ketua Umum RIA Pembangunan berupa, piagam penghargaan, Tabanas sebesar Rp 100.000,00 dan tambahan Rp 50.000,00 bagi Guru Teladan Nasional. Kemudian diberikan pula pakaian sipil lengkap 1 stel bagi guru teladan pria, dan seperangkat kain kebaya bagi guru teladan wanita.

Dijelaskan oleh Prof. Darji, penyelenggaraan maupun penilaian dari pemilihan Guru Teladan, tiap tahun ditingkatkan dan dikembangkan. Peningkatan penilaian atas kepribadian, keluhuran budi dan manusiawi. Mulai tahun 1983 khusus bagi Guru Teladan yang telah berhasil dipilih, diadakan pembinaan lebih lanjut dan secara terus menerus, dengan jalan penambahan pengetahuan, ketrampilan serta pembinaan kepribadian guru secara teratur, baik di tingkat pusat maupun di tingkat regional. Sesuai dengan rencana, telah berhasil diterbitkan pula Buku Peringatan Dasa Warsa Pelaksanaan Pemilihan Guru Teladan dengan judul "Pengabdianku". Di dalamnya termuat data-data sekitar pemilihan sejak dari awal penyelenggaraan, yaitu : pelaksanaan kegiatan pemilihan guru teladan ini; statistik data dan perbandingan jumlah guru teladan nama-nama guru teladan baik tingkat nasional maupun propinsi; dan dimuat juga contoh-contoh karya tulis yang masih asli dari guru teladan serta kesan-kesan penyelenggaraan pemilihan.

Dalam rangka Hardiknas

Kegiatan pemilihan keteladanan dan lomba yang pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional 1983 dan menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-38 meliputi : Pemilihan Siswa Teladan;

Bersambung ke hal 57

Pendekatan Pendidikan Orang Dewasa dalam Pemasyarakatan P-4 di Kalangan Masyarakat



Drs. M. Soedomo, MA

Drs. M. Soedomo MA. adalah dosen Fak. Ilmu Pendidikan IKIP – Malang. Gelar kesarjanaannya diperoleh dari Universitas Gajah Mada (1960).

Selain sebagai Dosen juga menjadi Ketua Harian Laboratorium Pancasila IKIP Malang (1978), Direktur Program Diploma Kependidikan (1980-1982) dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat IKIP Malang.

Pendidikan yang pernah ditempuhnya antara lain belajar di School of Education Universitas Stonford California USA (1977) dan latihan Inovasi dan Teknologi Pendidikan pada Seameo Innotech Center di Singapor (1972-1973).

I. PENDAHULUAN.

Pusat perhatian tulisan ini akan mengetengahkan seperangkat pengalaman, permasalahan dan tinjuannya ke depan sekitar pemasyarakatan P 4 di kalangan masyarakat luas, khususnya masyarakat yang dipandang sebagai orang dewasa. Sesuai dengan hajat tulisan kupasan masalahnya mengetengahkan pokok-pokok pikiran sekitar pendekatan Pendidikan Orang Dewasa dalam Pemasyarakatan P-4 di kalangan masyarakat luas.

Bertolak dari sasaran permasalahan di atas, bagian ini akan menjelaskan suatu pendekatan Pendidikan Orang Dewasa dalam kaitannya dengan Pemasyarakatan P-4.

Telaahan mengenai pendekatan Pendidikan Orang Dewasa diletakkan dalam kerangka Pendidikan Nasional. Bertolak dari tinjauan ini Pendidikan Orang Dewasa diamati sebagai sub sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional pada dasarnya berdasar atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat

kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan Pendidikan Nasional tersebut, maka untuk kegiatan Pendidikan Orang Dewasa perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan terjadinya proses penghayatan, pengamalan dan proses sosialisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Sebab sasaran pemasyarakatan P-4 ditujukan pada terjadinya proses penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara.

Beberapa pertimbangan yang mendasari tulisan ini diantaranya: (1) kita telah hampir memasuki tahun kelima dari upaya kita dalam memasyarakatkan P-4 di kalangan masyarakat luas. Dari pengalaman ini, sebenarnya kita telah diperkaya oleh pengalaman belajar dalam mengupayakan pelbagai pendekatan dan metode pendidikan agar masyarakat luas memahami dan mengamalkan Pancasila, bahkan terdorong untuk itu; (2) dari sasaran ketiga Panca Krida Kabinet Pembangunan IV ditegaskan untuk meningkatkan pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam rangka mengembangkan demokrasi Pancasila dan P-4 demi pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa; (3) disadari bahwa upaya memasyarakatkan P-4 dengan pelbagai pendekatan, hendaknya dilakukan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna, tetapi sekaligus tepat arah dan tujuannya, lebih-lebih dengan dicanangkannya usaha ke arah penggunaan sumber daya manusia, dana dan sarana seefisien dan seefektif mungkin;

(4) ditinjau dari sudut sasaran pemasyarakatan P-4 terletak pada tumbuhnya sikap, perilaku dan tatanilai di kalangan masyarakat yang mencerminkan terwujudnya P-4 sebagai tuntunan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara.

Bertolak dari pertimbangan di atas, pada tempatnya dilakukan pelbagai renung-ulang terhadap upaya pemasyarakatan P-4 di kalangan masyarakat, baik yang dilakukan melalui jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, maupun melalui jalur bacaan, dan mass media lainnya. Perenungan ulang ini penting dilakukan baik atas dasar pertimbangan pemikiran deduktif, maupun pengamatan secara empirik atau atas usaha pengkajian - penelitian terhadap langkah-langkah pemasyarakatan P-4 yang telah dilakukan selama ini. Hasil pemikiran ulang ini diharapkan mampu memikirkan pendekatan-pendekatan INOVASI kependidikan yang dapat didayagunakan dalam memasyarakatkan P-4 di kalangan masyarakat di masa mendatang.

Pendekatan inovasi kependidikan mencakup semua usaha yang ditujukan untuk meningkatkan sesuatu usaha atau untuk menemukan pendekatan atau metode lain yang lebih berdayaguna dan berhasilguna kepada usaha pemasyarakatan P-4 yang telah ada atau yang sedang dipraktekkan.

Berbagai upaya pemasyarakatan P-4 yang telah dilakukan memang telah diakui dampak positifnya bagi kalangan masyarakat khususnya pegawai, pemimpin-pemimpin organisasi kemasyarakatan dan lain-lain yang pernah mengikuti penataran atau bentuk-bentuk pemasyarakatan P-4 lainnya yang serupa. Namun pada sisi lain memang diamati beberapa permasalahan di antaranya : (1) Bagaimana mengupayakan pemasyarakatan P-4 terhadap sejumlah masyarakat yang cukup luas dan besar dengan pelbagai ragam latar belakang sosial budaya, ekonomi dan variasi tingkat pendidikannya, serta sebaran permukiman dan kepadatannya yang wajib dijangkau secara tepat dan dalam waktu secepatnya; (2) Dipihak lain, kita wajib memikirkan pelbagai upaya untuk menciptakan pelbagai pendekatan dan metode pendidikan, agar masyarakat luas terdorong bersama dalam menghayati dan mengamalkan tuntunan yang terkandung dalam P-4 secara mudah, sederhana dan menarik, serta tepat arah dan tujuannya; (3) Disadari bahwa tantangan masa kini dan masa

Jepan bangsa Indonesia terletak pada perlunya mewujudkan tuntunan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti yang terkandung dalam P-4.

Upaya yang demikian itu merupakan salah satu jalan untuk memperkokoh pandangan hidup bangsa. Kokohnya pandangan hidup bangsa merupakan salah satu usaha memperkuat ketahanan nasional; (4) Dari pengamatan empirik sementara terlihat kecenderungan bahwa upaya pemasyarakatan P-4 khususnya melalui penataran atau cara-cara yang serupa. mempunyai : (a) kecenderungan ke arah pengembangan kognitif lebih besar daripada pengembangan sikap dan perilaku, (b) pengelolaan program pendidikannya di mana materi bahasanya masih dapat ditingkatkan, agar lebih menventuli kehidupan nyata peserta penataran yang umumnya bervariasi. Sedangkan terkait dengan masalah di atas, Kepala Negara selalu mengisyaratkan agar Pancasila benar-benar dapat memberi bimbingan bagi masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan nyata dan terasa menyentuh kehidupan nyata, sebab bila tidak, lambat laun pengertian Pancasila akan kabur dan luntur, (c) sepanjang pengamatan memang belum diketahui seberapa tingkat dan kadar dayaguna dan hasilguna upaya pemasyarakatan P-4 ditinjau dari sudut terjadinya perubahan sikap dan perilaku peserta penataran dari sebelum dan sesudah mengikuti penataran P-4 melalui penelitian, Belum lagi dipermasalahkan bagaimana mewujudkan sikap, perilaku dan keperansertaan mereka dalam menghadapi persoalan-persoalan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari, (d) diamati secara kasus adanya kegiatan penataran cenderung mengarah ke pelaksanaan pendidikan yang bersifat formal - rutin, yang sebenarnya dapat diciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, menarik, dan lebih dikembangkan "dialog" daripada "monolog". Oleh karenanya, merupakan panggilan bagi kita semua untuk mengadakan langkah perbaikan dan berupaya secara kreatif dan sungguh-sungguh mengkaji dan mengembangkan pelbagai pendekatan dan metode pemasyarakatan P-4 yang inovatif di kalangan masyarakat.

Yang menjadi keprihatinan dan tantangan kita dalam pemasyarakatan P-4 terletak pada bagaimana agar tuntunan yang terkandung dalam P-4 tersebut dapat menjangkau seluruh masya-

rakat dengan mudah, sederhana, menarik, wajar, tepat arah dan tujuannya.

II. PENDIDIKAN ORANG DEWASA: Konsep dan Karakteristik utamanya.

Dalam konteks ini, Pendidikan Orang Dewasa dapat dibataskan sebagai seperangkat pengetahuan dan kian mempengaruhi proses belajar orang yang dipandang dewasa oleh masyarakat untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Dengan demikian Pendidikan Orang Dewasa merupakan serangkaian proses usaha belajar yang bertujuan, direncanakan dimana pendidikannya, materi pelajaran (pesan belajar), metode belajar, sarana belajar, suasana belajar dan satuan waktu yang diperlukan *dipilih* untuk kepentingan orang dewasa yang bersangkutan, sehingga mereka memperoleh seperangkat pengalaman belajar yang bermakna bagi hidupnya dan sesuai kebutuhan mereka.

Penegasan konsep tersebut sengaja dilakukan demikian, karena (1) guna menempatkan harkat dan martabat orang dewasa sebagaimana adanya, (2) guna mengalihkan tekanan perhatian di kalangan para pengelola program Pendidikan Orang Dewasa dari pendekatan yang berpola Pendidikan formal ke arah pendekatan Pendidikan yang lebih berorientasi kepada kepentingan, kebutuhan dan minat orang dewasa, (3) untuk mengurangi seminimal mungkin kecenderungan di kalangan pengelola masyarakatan P-4 yang mempunyai sasaran orang dewasa yang memperlakukan mereka sebagai "anak kecil". (4) guna menciptakan suasana belajar yang lebih memungkinkan terjadinya "dialog" antara pendidik/penatar dengan orang dewasa sebagai warga belajarnya, atau antara sesama orang dewasa sebagai warga belajar dan bukan suasana belajar yang "menolong" antara pendidik/penatar dengan peserta didiknya saja, (5) Untuk mengembangkan penggunaan pelbagai metode dan media belajar yang lebih beragam dan kreatif daripada penggunaan metode dan media belajar "tunggal" dan "rutin" (6) Guna lebih meningkatkan peran pendidik orang dewasa agar bertindak sebagai "fasilitator" daripada bertindak sebagai pengajar (guru). Pendidik orang dewasa hendaknya berperan sebagai "pelancar" yang mempermudah terjadinya proses belajar yang wajar, mengesankan dan menarik, (7) Guna menciptakan suasana

belajar yang lebih memeransertakan orang dewasa sendiri dalam proses penghayatan dan pengamalan tuntunan yang terkandung dalam P-4 daripada mempersepsi mereka (orang dewasa) sebagai seseorang yang "hampa" dari pengalaman hidup, keyakinan, nilai dan norma hidup. Pada dasarnya yang dipelajari orang dewasa adalah apa yang mereka hayati dan bukan apa yang diajarkan oleh pendidikannya. Dengan demikian, proses akhir yang dinilai terletak pada wujud pengamalan sesuai dengan tuntutan P-4 yang merupakan konsekuensi dari proses belajar orang dewasa itu sendiri, dan bukan apa yang diperkuat oleh pendidikannya, (8) Orientasi masyarakatan tuntunan yang terkandung dalam P-4 ditujukan ke arah terjadinya perubahan sikap dan perilaku (afektif) di kalangan orang dewasa sesuai dengan tuntunan P-4 tersebut.

Oleh sebab itu masyarakatan P-4 bagi kalangan orang dewasa hendaknya memenuhi persyaratan dan diorientasikan kepada karakteristik utama belajar orang dewasa.

Proses kegiatan belajar pada pendidikan orang dewasa berbeda secara prinsipal dengan proses kegiatan belajar anak-anak yang umum kita kenal. Hal ini berpengaruh terhadap model pendekatan pendidikan orang dewasa yang memiliki ciri-ciri utama, diantaranya sebagai berikut : (a) penciptaan suasana belajar yang memungkinkan tumbuhnya "transaksi gagasan, tuntunan dan nilai" antara warga belajar, (b) terjadinya "multi komunikasi" antar warga belajar serta memiliki daya "himbis" terhadap warga masyarakat tetangganya dan bukan "komunikasi satu arah", (c) suasana belajarnya tercipta secara menyenangkan dan "menantang" karena dirancang dan dikembangkan sesuai kebutuhan, kepentingan dan minat warga belajar orang dewasa. Untuk menciptakan suasana belajar yang sedemikian, diperlukan tahap awal yaitu mengadakan diagnosis terhadap kebutuhan, kepentingan dan minat orang dewasa tersebut. Tuntunan yang terkandung dalam P-4 harus menyentuh kebutuhan hidup warga belajarnya. Dengan demikian tuntunan yang terkandung dalam P-4 akan mempunyai makna fungsional "sebagai pembimbing" dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan mereka sehari-hari. (d) suasana belajar lebih memeransertakan orang dewasa sebagai nara sumber, atau petunjuk kepada sumber belajar

yang lain ("resource linker"); (e) Menempatkan harkat dan martabat orang dewasa dalam proses belajar, dengan jalan, apabila pendapat pribadi mereka dihormati, mereka akan lebih terkesan kalau mereka mendapat kesempatan untuk turut merasakan, turut berfikir, dan mengemukakan pendiriannya daripada pendidik/penatar menjejalkan gagasan dan sistem nilai mereka perlu dihargai. Mengabaikan harga diri mereka akan berarti mematikan gairah belajar orang dewasa, (g) Orang dewasa yang belajar memang perlu percaya kepada penatarannya, akan tetapi orang dewasa pun perlumendapat kepercayaan dari penatarannya agar pada akhirnya tumbuh kepercayaan pada diri sendiri – yang menjadi hasil pendidikan yang diharapkan, (h) orang dewasa (bahkan manusia pada umumnya) mempunyai sistem nilai yang berbeda-beda, mempunyai pendapat dan pendirian yang berbeda pula. Banyak hal-hal yang bermanfaat dapat dipetik kalau masing-masing dapat mengemukakan isi hati dan pikirannya tanpa rasa takut walaupun disadari terdapat perbedaan pendapat, bahkan boleh berbuat salah dalam suasana belajar dalam pendidikan orang dewasa tanpa dirinya merasa terancam. Disinilah pentingnya penciptaan suasana belajar yang wajar (manusiawi), (i) orang dewasa bahkan manusia pada umumnya mempunyai cara belajar yang unik (khas). Masing-masing berdasarkan tingkat kecerdasannya sendiri, kepercayaan sendiri dan perasaan sendiri. Kondisi demikian harus diakui, yakni bahwa antara pelatih dan orang dewasa warga belajar tidak sama; (j) Orang dewasa yang berkumpul untuk belajar bersama seringkali menghasilkan beberapa alternatif cara atau gagasan dan bahkan dua tiga diantaranya sama baik ataupun sama buruk. Pemaksaan untuk menerima salah satu yang paling benar akan dapat menghambat proses belajar. Proses belajar demikian memperkenankan terjadinya keraguan berlangsung untuk waktu yang cukup, agar tercapai keputusan yang memuaskan (k) Dan pada akhirnya orang dewasa ingin mengetahui apa arti dirinya dalam kelompok belajar orang dewasa ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya. Oleh karena itu evaluasi belajar bersama baik oleh dirinya sendiri maupun oleh seluruh anggota kelompok dirasakan berharga sebagai bahan mawas diri. Dengan demikian akhir yang dinilai adalah

apa yang dipelajari oleh orang dewasa sebagai warga belajar dalam kelompok belajarnya dan bukan apa yang dilakukan fasilitator atau pelatih dalam kelompok belajar itu. Dengan kata lain yang terpenting pada pendidikan orang dewasa adalah "apa yang dipelajari warga belajar" bukan "apa yang diajarkan penatar".

Dengan penyajian seperangkat karakteristik utama belajar orang dewasa serta dampaknya dalam pengelolaan program-program pemasyarakatan P-4 di kalangan masyarakat, kiranya merupakan masukan berharga untuk didaya manfaatkan oleh para penyusun kebijakan, pengelola pendidikan di kalangan BP-7 maupun juga para perencana pemasyarakatan P-4 di kalangan masyarakat orang dewasa.

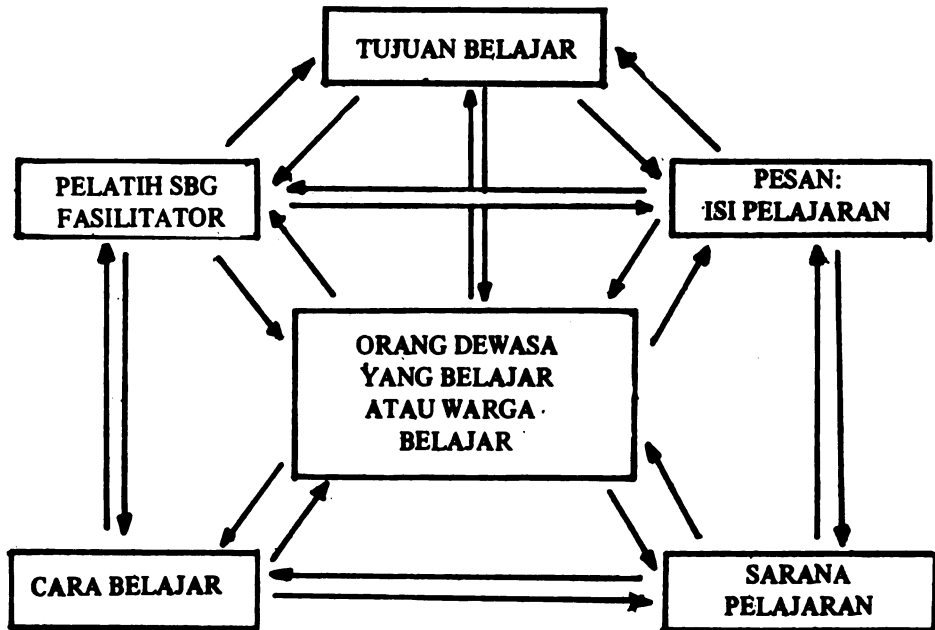
III. WARGA BELAJAR ORANG DEWASA : Dimensi sentral dalam pemasyarakatan P-4

Telaahan bagian kedua di atas menunjukkan bahwa orang dewasa (warga belajar) adalah dimensi sentral dalam suasana belajar yang direncanakan. Memang demikian keadaannya, karena semuanya (semua faktor-faktor dalam proses belajar) dimaksudkan agar orang dewasa itu *belajar* secara menyenangkan. Belajar, bagi warga belajar orang dewasa adalah pangkalan dan tujuan yang wajib diciptakan dan dicapai, sedang faktor lainnya merupakan sarana agar pangkalan dan tujuan itu tercapai.

Mengapa disebut pangkalan belajar? Karena, tujuan belajar yang dicapai seseorang bukanlah final. Tujuan belajar yang dicapainya dari sesuatu program pendidikan, sebutlah sebagai langkah "transit" belajar atau dengan pernyataan sebagai pangkalan belajar – bagi serangkaian aktivitas belajar berikutnya. Tugas penting seorang pelatih sebagai fasilitator adalah mengurangi sebanyak mungkin variabel yang merusak konsentrasi suasana belajar, sehingga seoptimal mungkin upaya dan waktu dimanfaatkan oleh Orang dewasa untuk "berreaksi" dengan materi pelajaran (pesan pelajaran). Daya guna dan daya-hasil pengalaman belajar yang demikian berhubungan erat dengan suasana belajar warga belajar yang di "alami"nya.

Secara skematik proses belajar orang dewasa yang demikian dapat dilukiskan sebagai berikut:

**BAGAN
DIMENSI SENTRAL
ORANG DEWASA SEBAGAI WARGA BELAJAR**



Bagan di atas ini menjelaskan jaringan psikologik hubungan antar komponen utama orang dewasa yang belajar dengan pelatih yang berfungsi sebagai fasilitator. Jaringan psikologik yang bermuatan belajar ini dipengaruhi dan mempengaruhi komponen-komponen lainnya seperti pesan pelajaran/isi pelajaran, cara belajar dan sarana belajarnya. Suasana psikologik yang demikian itu digerakkan ke suatu tahap tujuan yang ditentukan atau yang ingin dicapai.

Suasana belajar dalam proses pemasyarakatan P-4 hendaknya diciptakan sedemikian rupa, sehingga menjadi suasana antar orang dewasa yang merupakan partisipan belajar dengan fasilitatornya berlangsung dalam hubungan yang "akrab", "hangat" dan "Menantang". Melalui proses yang demikian itu tuntunan yang terkandung dalam P-4 akan diterima secara mudah, sederhana dan mengesankan. Bila proses yang demikian terjadi, maka terjadilah proses penghayatan P-4 yang wajar. Bila proses penghayatan tersebut terjadi, maka sekaligus akan terjadi proses sosialisasi, sebagai konsekuensi dari terjadinya "transaksi" gagasan, nilai dan tuntunan yang di-"dialog"-kan. Tentunya akan mempunyai

himbias terhadap kehidupan mereka di lingkungannya dalam wujud pengamalan.

Bila proses penghayatan dan pengamalan tersebut dilakukan secara berencana, bertahap dan wajar, maka akan memungkinkan terciptanya suasana belajar di kalangan masyarakat luas sehingga diharapkan terjadi proses "transaksi" nilai atau pesan-pesan pembangunan. Proses yang sedemikian itu diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat khususnya orang-orang dewasa yang terhimpun ke dalam kelompok belajar pemasyarakatan P-4 dalam memahami, menyadari dan mengamalkan tuntunan yang terkandung dalam P-4 (yang terkait dengan peri kehidupan masyarakat dalam usaha membangun lingkungannya masing-masing). Bila suasana yang demikian dapat diciptakan secara berencana diharapkan akan terjadi gerakan masyarakat untuk meresapi kembali, menyadari dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di kalangan masyarakat sebagaimana yang diidam-idamkan.

Usaha-usaha ke arah agar tuntunan yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) dipakai, dihayati

serta diamalkan menjadi tuntunan hidup bagi setiap warganegara dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, menjadi pusat perhatian dalam kerangka kegiatan pembangunan nasional.

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang luhur tersebut, kewajiban kita *pertama-tama* untuk merasa ikut memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi milik bangsa itu *kedua* ikut bersama-sama bertanggungjawab dalam mempertahankan milik bangsa dan kepentingan bersama itu, dan *ketiga*, bersedia meneliti diri sendiri sampai seberapa jauh nilai-nilai luhur itu telah dimiliki, dipatuhi dan diamalkan dalam hidup sehari-hari.

Pandangan di atas sangat tepat untuk menilai seberapa jauh amal pengabdian kita telah kita laksanakan dalam mewujudkan Pancasila. Bergerak dari sudut pandangan di atas nilai-nilai luhur Pancasila bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah Negara yang sekedar "dikeramatkan" dalam dokumen Pembukaan Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Tanpa dihayati dan diamalkan, apapun dasar falsafah negara yang kita pakai, apapun konsepsi dasar yang kita buat, tidak akan berguna dan tidak ada artinya. Oleh karena itu Pancasila perlu diresapi diamalkan dan dipertahankan, karena, Pancasila bagi kita adalah masalah hidup dan matinya bangsa Indonesia.

Menjadikan nilai-nilai luhur itu milik seluruh masyarakat menuntut adanya penghayatan. Penghayatan bermakna proses merasakan, proses menjiwai, proses meresapkan sesuatu dalam batin seseorang. Dengan demikian sesuatu yang dihayati baik disadari maupun tidak disadari, akan selalu mempunyai pengaruh terhadap nilai hidup, sikap hidup, dan tingkah laku hidup seseorang. Hal tersebut akan selalu menjadi sumber inspirasi dan motivasi hidup seseorang.

Karena penghayatan merupakan proses tepat seseorang "memasukan" sesuatu nilai ke dalam sanubarinya, maka dengan sendirinya penghayatan hanya dapat terjadi apabila didahului dengan *proses penerimaan* (sikap menerima). Tanpa sikap menerima, tidak mungkin seseorang dapat meresapkan, merasakan, menjiwai suatu nilai. Proses penghayatan tersebut akan mantap dan berakar kuat, apabila proses penerimaannya dialami secara ikhlas, mudah dan "berkesan".

Menjadikan nilai-nilai luhur itu milik masyarakat menuntut adanya *pemasyarakatan* nilai-

nilai tersebut melalui proses sosialisasi. Maksudnya adalah mengupayakan penyaluran nilai-nilai tersebut melalui jalur hubungan antar manusia bermasyarakat, serta mengkaitkannya dengan peri kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Untuk itulah Kepala Negara seringkali menganjurkan : "agar masyarakat luas berusaha memikirkan dan mengusahakan rumusan-rumusan penjabaran Pancasila itu secara sederhana dan mudah dimengerti, sehingga mudah dihayati dan diamalkan oleh rakyat Indonesia, dan pada gilirannya diharapkan mampu menggugah merca dalam menjawab tantangan hidupnya.

Oleh karenanya merupakan panggilan dan kewajiban bagi kita untuk bekerja lebih ber-sungguh-sungguh dalam mengembangkan pendekatan dan cara-cara memasyarakatkan nilai-nilai luhur Pancasila di kalangan masyarakat. Proses pemasyarakatan tersebut, merupakan wujud proses penghayatan, yang pada gilirannya diharapkan mampu menggugah sikap dan perilaku masyarakat. Proses yang demikian, hanya dapat terjadi, bila dilakukan melalui usaha pendidikan bangsa. Pendidikan bangsa berperan sebagai suatu proses usaha bangsa yang dilakukan secara sengaja, metodis dan bertujuan untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan amal perbuatan warga bangsa ke arah sikap perilaku dan amal perbuatan sesuai cita-cita bangsanya.

IV. PENUTUP

Berupaya secara lebih baik dalam memasyarakatkan P-4 di kalangan masyarakat luas khususnya di kalangan orang dewasa memerlukan pendekatan sesuai karakteristik utama orang dewasa itu sendiri.

Menempatkan orientasi pendekatan sesuai harkat dan martabat orang dewasa, bermakna menciptakan suasana belajar sehingga tuntunan yang terkandung dalam P-4 diterima secara wajar dan terkait dengan konteks sosiobudaya mereka sendiri. Serangkaian upaya demikian hendaknya dirancang melalui langkah-langkah pengidentifikasian kebutuhan, kepentingan dan minat orang dewasa, dituangkan ke dalam program pendidikan yang memungkinkan terjadinya proses penghayatan dan pengamalan Pancasila. Proses demikian selanjutnya diikuti dengan pengembangan sistem supervisi dan monitoring secara berkesinambungan.

Oleh karen proses penghayatan dan peng-

amalan Pancasila secara terus menerus perlu ditingkatkan, maka hendaknya dilakukan pembinaan dan pemanfaatan secara terpadu mass media yang ada dan pengembangan pola keteladanan pimpinan yang konsisten.

Pengelolaan dan pengembangan materi atau pesan P-4 yang merupakan bagian integral dari program pendidikan orang dewasa kiranya pembentukan Bank Pesan mulai terasa mendesak keperluannya. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya "kemandegan" atau kebosanan belajar di kalangan orang dewasa melalui kelompok-kelompok belajar yang ada.

Pengkajian secara terus menerus untuk mengamati kecenderungan dari gerakan pemasyarakatan ini wajib dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan.

Pengembangan pola-pola penataran di kalangan pengelola, pelatih inti, fasilitator pemasyarakatan P-4 di kalangan masyarakat perlu secara terus menerus diadakan pengkajian ulang dan

pembaharuan. Hal ini dimaksudkan agar proses pemasyarakatan P-4 dapat berlangsung sesuai kebutuhan orang dewasa dalam menjawab tantangan hidupnya yang terus meningkat.

Pengembangan kerjasama dengan kalangan perguruan tinggi untuk menciptakan konsep-konsep dasar, pendekatan, metode pendidikan dan asesmen dalam proses pemasyarakatan P-4 kiranya merupakan usaha yang sepatutnya dijinakan dan dikembangkan terus.

Kata Mutiara

Hanya rakyat yang sadar politiklah yang akan menjadi kekuatan pendukung, pelaksanaan dan panjaga demokrasi.

Sambungan dari hal. 28

memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan.

— Cara mengajukan Permohonan

Calon penerima beasiswa mengajukan permohonan yang ditulis tangan sendiri, kepada pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan dengan dilampiri: keterangan mengenai status mahasiswa (terdaftar) dari ketua jurusan; hasil yang telah dicapai selama belajar di jurusan yang bersangkutan (transcript of record);

surat keterangan berkelakuan baik dari polisi; surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter umum pemerintah (kalau mungkin dilampiri pula dengan surat keterangan dari dokter ahli penyakit paru-paru); daftar perincian penghasilan orang tua/wali yang bersangkutan dari instansi yang berwenang; keterangan lain yang dapat memperkuat permohonan beasiswa yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; dua buah pasfoto, satu untuk kartu beasiswa dan satu untuk arsip di Ditjen Pendidikan Tinggi.

Daftar Lembaga Pendidikan PGRI Seluruh Indonesia
Sampai dengan bulan Juni tahun 1983

PD	DAERAH	TK	SD	SMP	SLB	ST	SMA	SMEASPG	KPG	STM	KPPASMKK	STKIP	KURSUS	SGO	Keterangan Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1. SUMATERA UTARA	-	-	28	-	-	22	-	2	-	1	-	-	1	-	1	55
	2. SUMATERA BARAT	1	-	8	-	-	9	3	-	3	-	-	-	-	-	-	24
	3. SUMATERA SELATAN	-	2	95	-	-	15	2	8	2	1	2	-	-	-	-	126
	4. DKI JAKARTA	1	-	22	-	1	5	3	1	-	8	-	-	1	-	-	42
	5. JAWA BARAT	50	3	302	-	-	61	15	16	-	4	3	1	-	-	2	357
	6. JAWA TENGAH	3	-	178	-	-	45	4	2	-	1	-	-	1	-	-	234
	7. DI. YOOGYAKARTA	-	-	11	5	-	10	-	4	-	-	-	-	2	-	-	32
	8. JAWA TIMUR	26	1	534	-	-	127	23	15	1	19	2	-	26	-	-	774
	9. KALIMANTAN BRT	2	-	31	-	-	9	-	-	3	-	-	-	2	-	-	44
	10. KALIMANTAN SLT.	1	-	35	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55
	11. SULAWESI UTARA	-	-	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	7
	12. SULAWESI SELATAN	-	-	56	-	-	43	1	1	-	1	-	-	-	-	-	102
	13. BALI	2	-	48	-	-	22	-	-	-	2	-	-	-	-	-	74
	14. MALUKU	1	-	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	15. DI. ACEH	1	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
	16. KALIMANTAN TMR.	-	-	24	-	-	5	1	2	-	1	-	-	2	-	-	35
	17. KALIMANTAN TNG	-	-	7	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10
	18. RIAU	-	-	11	-	-	8	2	2	1	-	-	-	-	-	-	22
	19. J A M B I	-	-	8	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	12
	20. NUSATENGGARA BRT	2	-	28	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	37
	21. NUSATENGGARA TMR	1	-	12	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	22. IRIAN JAYA	-	-	6	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	23. LAMPUNG	3	-	96	-	-	18	3	8	3	-	-	-	1	-	2	134
	24. SULAWESI TENGAH	-	-	17	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	25. SULAWESI TENGGARA	4	-	18	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
	26. BENGKULU	-	-	11	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
	27. TIMOR TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	97	6	1599	5	1	463	62	65	9	38	6	1	36	1	6	2395

Ketua

SLAMETI

Jakarta, 1 - 8 - 1983
PENGURUS YAYASAN
PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI PUSAT

Sekretaris

ttd

D. SUMANTRI WIRADISASTRA

**UANG MASUK SUMBANGAN GEDUNG PGRI
SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 1983.-**

No	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	30 - 6 - 83	Transfer	Rp 178.819.460,-
2.	5 - 7 - 83	PGRI Cabang Bengkalis, Riau	Rp 1.000.000,-
3.	7 - 7 - 83	PGRI Bima, Nusa Tenggara Barat	Rp 300.000,-
4.	20 - 7 - 83	Jasa Giro bulan Juni	Rp 44.250,-
5.	21 - 7 - 83	PGRI Kodya Tegal, Jawa Tengah	Rp 100.000,-
6.	23 - 7 - 83	PGRI Ancab Kec. Jabung, Lampung Tengah, Lampung	Rp 25.000,-
7.	23 - 7 - 83	PGRI Kepala Kantor Dept. P & K Kec. Serwaru, Maluku	Rp 70.000,-
8.	25 - 7 - 83	PGRI Cabang Bima, Nusa Tenggara Barat	Rp 300.000,-
9.	25 - 7 - 83	PGRI Mataram, Nusa Tenggara Barat	Rp 514.000,-
10.	26 - 7 - 83	PGRI Teluk Betung, Tanjung Karang, Lampung	Rp 34.000,-
11.	27 - 7 - 83	PGRI SMP Persiapan Kali Rejo, Lampung Tengah	Rp 14.000,-
12.	27 - 7 - 83	PGRI SMP Negeri Kali Rejo Lampung Tengah	Rp 22.000,-
13.	27 - 7 - 83	PGRI Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	Rp 1.000.000,-
14.	30 - 7 - 83	PGRI SMP Negeri 2 Metro Lampung Tengah	Rp 40.000,-
15.	3 - 8 - 83	PGRI, Guru, Karyawan Kanwil Dept. P & K Prop. Maluku di Ambon	Rp 275.840,-
16.	8 - 8 - 83	PGRI Kodya Bitung, Sulawesi Utara	Rp 25.000,-
17.	8 - 8 - 83	PGRI SMP Negeri Metro Lampung Selatan	Rp 38.000,-
18.	10 - 8 - 83	PGRI Cabang Sabu, Nusa Tenggara Timur	Rp 50.000,-
19.	10 - 8 - 83	PGRI Pengurus YPLP - PGRI Nusa Tenggara Timur	Rp 10.000,-
20.	10 - 8 - 83	PGRI Peserta Rapat Kerja YPLP - PGRI NTT 16 orang	Rp 16.000,-
21.	11 - 8 - 83	PGRI Mataram, NTB	Rp 443.000,-
22.	11 - 8 - 83	PGRI OKU, Sumatera Selatan	Rp 65.000,-
23.	11 - 8 - 83	PGRI Kodya Malang, Jawa Timur	Rp 500.000,-
24.	11 - 8 - 83	PGRI Jasa giro bulan Juli	Rp 51.080,-
25.	12 - 8 - 83	PGRI Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat	Rp 40.000,-
26.	15 - 8 - 83	PGRI Lampung Utara, Kota bumi	Rp 1.050.000,-
27.	15 - 8 - 83	PGRI Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat	Rp 870.425,-
28.	15 - 8 - 83	PGRI Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat	Rp 1.200.000,-
29.	16 - 8 - 83	PGRI SMP Negeri 203 Kali sari, Jakarta Timur	Rp 22.000,-
30.	20 - 8 - 83	PGRI SMP Kristen 3 Lampung Tengah	Rp 6.000,-
31.	20 - 8 - 83	PGRI Kab. Karang Asem, Bali	Rp 1.200.000,-
32.	22 - 8 - 83	PGRI PAC Pulau Panggung, Teluk Betung	Rp 200.000,-
33.	22 - 8 - 83	PGRI SMA Negeri VII Jakarta Pusat	Rp 52.000,-
34.	23 - 8 - 83	PGRI Kab. Cianjur, Jawa Barat	Rp 442.100,-
35.	30 - 8 - 83	PGRI Kodya Padang Panjang, Sumatera Barat	Rp 406.235,-
36.	31 - 8 - 83	PGRI Kab. Bekasi, Jawa Barat	Rp 300.000,-
37.			
		J U M L A H	Rp 189.540.390,-

Bapak Sunardjo Haditjaroko, MA

N.F. 300,-

Jakarta, 31 Agustus 1983

PANITIA PEMBANGUNAN GEDUNG GURU

Bendahara

S l a m e t I.-

PENYAKIT HIPERTENSI & JANTUNG

Hiper berarti berlebihan. Tensi berarti tekanan atau tegangan. Dalam istilah kedokteran hipertensi diartikan tekanan darah tinggi.

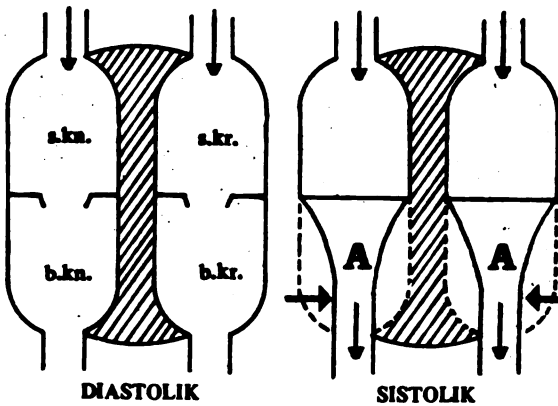
Tekanan darah adalah kekuatan menekan darah pada dinding rongga di mana darah itu berada. Dalam ilmu kedokteran ada tekanan darah pada serambi jantung kiri atau kanan, bilik jantung kiri dan kanan, tekanan darah pada pembuluh nadi atau arteri, pada pembuluh kapiler pembuluh balik dan sebagainya. Dan yang dimaksud dengan tekanan darah dalam perkataan sehari-hari adalah tekanan dalam pembuluh nadi.

nya adalah tekanan sistolik 120 dan tekanan diastolik 80 mm.Hg.

Tekanan darah adalah tekanan yang dihasilkan oleh :

1. Kekuatan kuncup jantung yang mendesak isi bilik kiri untuk memasukkan darah ke dalam batang pembuluh nadi.
2. Tahanan dalam pembuluh nadi terhadap mengalirnya darah.
3. Syarat otonom yang terdiri dari sistim simpatikus dan para simpatikus.

BAGAN ORGAN JANTUNG



s.kn. = serambi kanan s.kr. = serambi kiri
 b.kn. = bilik kanan b.kr. = bilik kiri
 A = jantung menguncup (sistolik)

DIASTOLIK = angka terendah pada saat jantung relaksi, mengembang atau istirahat.

SISTOLIK = angka tertinggi pada saat jantung menguncup/konstraksi atau memompa.

Tekanan darah disebut dengan dua angka, dalam bilangan satuan mm.Hg (mili meter air raksa pada alat tekanan darah/tensi meter). Angka yang tertinggi ialah tekanan darah pada waktu jantung sedang menguncup atau sedang melakukan kontraksi (sistolik). Diastolik adalah angka yang terendah pada waktu jantung mengembang di dalam akhir relaksasi.

Misalnya tekanan darah 120/80 mm. Hg arti-

AKIBAT AKIBAT TEKanan DARAH TINGGI :

- kerusakan ginjal
- kerusakan pembuluh darah
- perdarahan otak
- kelumpuhan
- pembesaran jantung/payah jantung
- penyempitan pembuluh darah koroner/serangan jantung.

TEKANAN DARAH HARIAN

Tekanan darah bervariasi selama 24 jam tergantung pada :

1. aktifitas fisik
2. pengaruh emosi
3. pengaruh zat-zat. dalam badan, (hormon-hormon).

- Tekanan darah terendah dalam keadaan tidur.
- Tekanan darah naik jika ada aktifitas fisik maupun psikis (emosi).

Oleh karena itu jika hendak memeriksa tekanan darah haruslah dalam keadaan tenang, dan cukup waktu istirahat

TEKANAN DARAH NORMAL

Tekanan darah bervariasi tiap hari dan tergantung pada keadaan seseorang, jadi tekanan darah normalpun bervariasi. Pada dasarnya untuk orang dewasa bila tekanan darah menunjukkan angka 160/95 mm.Hg ke atas dianggap tidak normal.

Jadi angka normal di bawah 160/95 mm.Hg.

Tekanan darah dapat naik karena usia bertambah, tetapi ada juga yang menetap atau naik tetapi hanya sedikit. Ada anggapan tekanan darah rendah kurang baik, hal tersebut kurang tepat. Sebab data statistik menunjukkan bahwa orang dengan tekanan darah rendah mempunyai umur yang sama dengan yang disebut normal. Pokoknya tekanan darah rendah sama baik dengan yang normal.

SEBAB SEBAB TEKINAN DARAH TINGGI

Sebagian besar tak diketahui, disebut hipertensi esensial. Antra 10-15% orang dewasa mengidap tekanan darah tinggi.

Hanya sebagian kecil (lebih kurang 10%) diketahui, sebab-sebanya.

- penyakit ginjal
- kelainan hormon
- kelainan pembuluh darah,

Disebut hipertensi sekunder.

GEJALA GEJALA TEKINAN DARAH TINGGI

- tidak ada gejala (sebagian besar)
- sakit pada bagian belakang kepala (botak kepala)
- mudah tersinggung
- sukar tidur.

GEJALA GEJALA PAYAH JANTUNG

jantung tidak mampu memompa darah lagi,

sehingga tertimbun di paru-paru, menyebabkan sesak nafas asma kardiale atau asma jantung.

timbul mendadak karena tekanan darah yang melampaui kemampuan jantung, misalnya waktu aktifitas fisik.

PENYAKIT JANTUNG HIPERTENSI

Penyakit jantung yang mudah mengakibatkan kelainan-kelainan pada jantung :

- pembesaran jantung
- payah jantung

PENCEGAHAN :

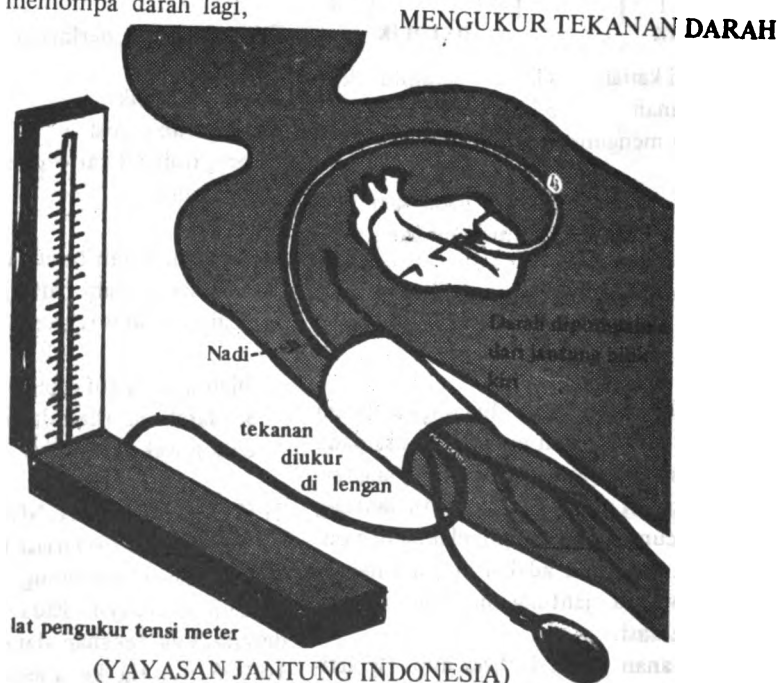
- * Ukur tekanan darah secara teratur
- * Jaga berat badan ideal
- * Kurangi konsumsi garam
- * Tidak merokok
- * Olah raga secara teratur
- * Hidup cukup istirahat

PENGobatan :

- Berobatlah secara teratur
- Makanlah obat meskipun tidak ada keluhan
- Ikutilah nasehat dokter

CAMKAN :

Tekanan darah anda hanya dapat diketahui dengan mengukurnya dan bukan dengan keluhan ataupun perasaan



UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TH. 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

MEMUTUSKAN :

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan materiil dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyclenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan ;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang demikian itu, diperlukan adanya suatu Undang-undang yang mengatur kedudukan, kewajiban liak dan pembinaan Pegawai Negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja ;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang behubungan dengan itu, dianggap tidak sesuai lagi, maka oleh sebab itu perlu diganti :

Mengingat :

1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK KEPEGAWAIAN

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Negeri adalah merckayang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
- c. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan kepaniteraan Pengadilan ;
- d. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih pegawai Negeri ;
- e. Pejabat yang berwajiban adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2.

- (1). Pegawai Negeri terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil, dan
 - b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2). Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

Pasal 5

Setiap Pegawai Negeri Wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang.

Bagian Ketiga Hak Pasal 7

Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Pasal 8

Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.

Pasal 9.

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.
- (2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rokhani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas. keluarganya berhak memperoleh uang duka.

Pasal 10.

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun.

Bagian Keempat Pejabat Negara

Pasal 11

Seorang Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

BAB III. PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama Tujuan Pembinaan Pasal 12.

- (1). Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan

untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil, guna.

- (2) Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja.

Bagian Kedua Kebijaksanaan Pembinaan Pasal 13.

Kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden.

Pasal 14.

Untuk lebih meningkatkan pembinaan, ketuhanan dan kekompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh Pegawai Negeri Sipil terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat di kalangan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Formasi dan Pengadaan Pasal 15

Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi.
- (2) Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima, maka ia harus melalui masa percobaan dan selama masa percobaan itu ia berstatus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah melalui masa percobaan sekurang-kurangnya 1

(satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat Kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian. Pasal 17.

- (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 18.

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Syarat-syarat kenaikan pangkat reguler adalah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat-syarat obyektif lainnya.
- (5) Kenaikan pangkat pilihan, disamping harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus pula didasarkan atas jabatan yang dipangkunya dengan memperhatikan daftar urutan kepangkatan.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi anumerta.

Pasal 19.

Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syarat obyektif lainnya.

Pasal 20.

Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam

mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan.

Pasal 21.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu ditetapkan tanda pengenalan.

Pasal 22.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja.

Pasal 23.

- (1). Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. telah mencapai usia pensiun;
 - c. adanya penyederhanaan organisasi Pemerintah;
 - d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2). Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat.
- (3). Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
 - a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji jabatan Negeri atau peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat.
- (4). Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak

dengan hormat, karena :

- a. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- b. ternyata melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Pasal 24.

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara.

Pasal 25.

Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, penindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewengunya kepada Menteri atau pejabat lain.

Bagian Kelima

Sumpah, Kode Etik dan Peraturan disiplin Pasal 26.

- (1) Setiap calon Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri sipil menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji.
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab,

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Pasal 27.

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk menemagku sesuatu jabatan tertentu wajib mengangkat Sumpah/Janji Jabatan Negeri.

Pasal 28.

Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di luar kedinasan.

Pasal 29.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undang pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(Pasal 30.

- (1). Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal 27 dan 28 Undang-undang Dasar 1945.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, akan diatur tersendiri.

Bagian Keenam Pendidikan dan Latihan Pasal 31.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan

latihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pangabdian mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan.

Bagian Ketujuh Bagian Ketujuh Kesejahteraan Pasal 32.

- (1). Untuk meningkatkan keairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
- (2). Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya pada waktu sakit atau melahirkan, berhak memperoleh bantuan perawatan kesehatan.
- (3). Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan.
- (4). Penyelenggaraan kesejahteraan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1),(2) dan (3) pasal ini diatur dan dibina oleh Pemerintah.

Bagian Kedelapan Penghargaan Pasal 33.

- (1). Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya.

Bagian Kesembilan Penyelenggaraan Pembinaan Kepegawaian Pasal 34.

Untuk menjamin kelancaran pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dibentuk badan yang membantu Presiden dalam mengatur dan menyelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kesepuluh Peradilan Kepegawaian Pasal 35.

Penyelesaian sengketa dibidang kepegawai-

an dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Bagian Kesebelas
Lain-lain
Pasal 36.

Perincian terhadap hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 35 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN ANGGOTA ANGKATAN
BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 37.

Pembinaan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38.

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan perundang-undangan yang ada dibidang kepegawaian yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BABVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39.

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Negeri (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263);
- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun

1952 Nomor 78;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 Nomor 58) tentang Menambah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78) tentang "Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai - pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia", sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 100);

- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1061 Nomor 259).

Pasal 40.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undang.

Pasal 41.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dalam penematannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada Tanggal 6 Nopember 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SOEHARTO
Jenderal TNI.—

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Nopember 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

t.t.d.

SUDHARMO S.H.

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1974 NOMOR 55**

**SUMPAH/JANJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(ex. pasal 26 U.U. No. 8/1974)**

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah:

Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada

saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab:

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

PIDATO PRESIDEN RI

Sambungan dari hal. 9

kita adakan bersama dalam mengadakan prasyarat-prasyarat untuk tinggal landas pada dasawarsa 90-an, yang sudah harus kita mulai dalam waktu lima tahun mendatang dalam menyiapkan kerangka landasannya.

Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi terhadap dampak resesi ekonomi dunia, maka kita telah melakukan berbagai langkah di bidang ekonomi, ialah dengan mengadakan devaluasi rupiah beberapa bulan yang lalu, dengan penjadwalan kembali sejumlah proyek-proyek pembangunan yang besar, dengan meningkatkan pengerahan modal dalam negeri melalui kebijaksanaan perbankan. Pendek kata kita

telah melakukan langkah-langkah nyata untuk mengeratkan ikat pinggang. Saya berterima kasih, bahwa kebijaksanaan itu dipahami oleh masyarakat luas dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya.

Langkah-langkah yang tampaknya pahit itu tidak lain adalah untuk memperkuat lagi ketahanan nasional kita, khususnya di bidang ekonomi, agar mampu menanggulangi tantangan-tantangan dan kerawanan di bidang ekonomi dalam melanjutkan pembangunan dalam menyiapkan kondisi yang memadai untuk memasuki Repelita IV.

BERSAMBUNG

Sambungan dari hal 39

Pemilihan Mahasiswa Teladan; Pemilihan Paskibraka; Pemilihan Guru Teladan; Pemilihan Dosen Teladan; Lomba Sekolah Teladan; Lomba Seni Siswa; Lomba Karya Ilmu Pengetahuan Bagi Remaja; Lomba Karya Inovatif Produktif; Lomba Mengarang Guru SD; Lomba Kejar Paket A; Penilaian Perpustakaan; dan Pemberian hadiah dan tanda kehormatan.

Sebagai diketahui peringatan Hardiknas itu sendiri berpuncak pada tgl. 2 Mei dan tgl. 17 Agustus 1983. Peringatan 2 Mei adalah berupa upacara memperingati hari Pendidikan, dan puncak peringatan tgl. 17 Agustus ditandai dengan kegiatan pemilihan keteladanan dan penyelenggaraan sejenis lomba yang bertingkat nasional.

GURU

Karya : Rampi Nila

guru digugu dan ditiru
lambangmu bagaikan sutera putih
terbentang, terhampar dari sumber yang mengalir
paling jernih
pengabdianmu suci
menyelusuri relung-relung fitrah anak didik
yang tumbuh bagai tunas-tunas mekul putih melati
harum semerbak
mewangi pada taman-taman pertiwi
guru
ilmumu bagaikan sebilah keris
tajam dan berbisa, terukir menjaga
sudut kehidupan awal dan akhir
sepanjang hayat
engkau adalah segala-galanya
dalam gala kehidupan sejak dari buaian sampai liang kubur
engkau adalah sebuah nama
bertanam kebun di dunia, subur-subur hijau
kau akan panen, terbentang syurga dalam kebun akhirat
tapi itu masih lama bukan
tapi itu profesi orang bijak dan para nabi
nanti dulu
dengarkanlah dari hatimu yang jujur :
guru, sebuah predikat
tanpanya, tanpa yang lain
tanpanya tidak ada yang lain
tak ada Gubernur, tak ada Menteri, tak ada Presiden
hei, kamu semua adalah murid-murid
enjeniring, tehnolog, marfolog, sosiolog, psikolog
sampai pada siolo di hutan-hutan mencari sumber minyak
taka ada guru tak
tak
tak
penjual koran
penunggu warung mencatat piutang
petani mencatat hasil jualannya di kalangan
nelayan menimbang ikan di pelabuhan
saritem penjual jamu menghitung perolehannya hari ini sepanjang jalan
guru, bahagialah engkau
karena muridmu dimana-mana
dengarkanlah laguku :

.....
.....

Agsutus 1983

SURAT PEMBACA



IMAM PARDIYO

Mataram, 1 Agustus 1983

Kepada
Yth. Bapak Pimpinan Majalah
SUARA GURU
Jl. Tanah Abang Tiga
No. 24.
Jakarta Pusat.

Dengan hormat.

Saya telah lama berniat untuk berkenalan dengan teman-teman sejawat di seluruh Tanah Air maupun di luar negeri melalui Majalah Suara Guru yang tercinta ini.

Perlu saya sampaikan kepada Bapak, bahwa saya seorang pecinta Majalah Suara Guru dan saya adalah anggota langganan yang setia dari majalah kita. Saya anjurkan kepada kaum pendidik dan karyawan pendidikan di mana saja agar berlangganan majalah Suara Guru karena banyak memuat tentang pendidikan yang sangat berguna bagi kaum pendidik dan generasi penerus.

Baiklah saya lengkapi isi surat ini dengan keterangan mengenai diri saya :

Nama : IMAM PARDIYO
Tgl. lahir : 13 Agustus 1951 di Sribit, Solo.
Alamat : Desa Mendagi Beleka, Kecamatan Gerung, Kab. Lombok Barat, NTB
Pendidikan : 1. SD Sribit, Solo
2. PGAN 4 th Klaten.
3. PGAN 6 th Mataram.
4. IAIN Tk. III Mataram, NTB.

Cita-cita : Ingin menjadi seorang Alim Ulama yang terkenal, dan berguna bagi agama, Nusa dan Bangsa Indonesia yang tercinta.

Hobby : 1. Membaca Kitab Al Qur'an dan berkenalan.
2. Membaca buku-buku majalah yang bermutu dan Kitab-kitab Agama Islam.

Kesan saya tentang Majalah Suara Guru sbb. :
Majalah Suara Guru banyak memuat tentang pendidikan yang sangat berguna bagi generasi penerus.

Mohon bantuan Bapak Redaksi Majalah Suara Guru untuk memuat anjuran dan kesan saya dalam majalah Suara Guru.

Terima kasih atas bantuan Bapak.

Wabillahittaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Hormat saya

ttd

IMAM PARDIYO

Kandangan, 5 September 1983

Kepada
Yth. Bapak Panitia Pembangunan
Gedung Guru/PGRI
di
JAKARTA

Dengan hormat,

Membaca Suara Guru No. 5 tanggal 31 Mei 1983, kami turut bergembira karena banyaknya sumbangan yang mengalir dari daerah-daerah untuk pembangunan gedung dimaksud, tidak terkecuali dari daerah kami PGRI Cabang Hulu Sungai Selatan - Kandangan Kalimantan Selatan.

Kami agak kaget melihat sumbangan kami yang cuma sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) saja, apakah tidak Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) mestinya.

Pertanyaan ini kami ajukan oleh karena sumbangan dari kami Guru SD se Kabupaten HSS saja sudah lebih dari Rp 1.500.000,-

Perlu kami tambahkan bahwa jumlah guru SD se Kabupaten Hulu Sungai Selatan ± 1.550 orang, dimana tiap orang guru diharuskan menyumbang sebesar a Rp 1.000,- (Seribu rupiah) (2 x angsur-

an) gaji bulan November dan Desember 1982 yang lalu dan ditangani langsung oleh Bendaharawan Gaji Dinas P dan K Cabang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Surat ini kami tulis oleh karena kami sebagai anggota PGRI di daerah merasa bertanggung jawab atas sukses dan tidaknya Pembangunan Gedung Guru yang sama kita idam-idamkan itu.

Kami mohon agar Bapak bisa memberikan tanggapan atas surat kami ini melalui media kita Suara Guru.

Terima kasih.

Wassalam
a/n Guru-guru SD Jaya Subur I

ttd

Handayani

Jawaban :

Terima kasih atas perhatian dan sumbangan Guru-guru SD Jaya Subur I untuk biaya pembangunan Gedung Guru Indonesia/Kantor Pusat PGRI. Untuk jawaban surat Saudara Handayani, kami persilakan membaca Suara Guru No. 3 Th. XXXII-31 Maret 1983 yang memuat sumbangan pertama (5-1-1983) sebesar Rp 1.500.000,- dan Suara Guru No. 5 Th. XXXII-31 Mei 1983 yang memuat sumbangan Kedua (26 - 3 - 1983) sebesar Rp 150.000,-.

Panitia Gedung Guru

ttd.

Slamet I
Bendahara



Ketua YPLP-PGRI Pusat -- SLAMET I diterima oleh Kepala Kanwil Depdikbud Lampung E.P. Hutabarat didampingi Pengurus YPLP-PGRI Daerah Lampung.



Guru Teladan Tingkat Nasional Th 1983 (Guru SD) berfoto dengan Pengurus Besar PGRI setelah diterima oleh PB-PGRI, 12 Agustus 1983.



Guru Teladan Tingkat Nasional Tahun 1983 (Guru TK) sesuai diterima oleh PB-PGRI, Jl. Tanah Abang Tiga No. 24 Jakarta Pusat.



Pemenang Sayembara Mengarang untuk Guru Sekolah Dasar. Dari kiri: Drs. Usman Awing — Kep. SD Inspres Bonto, Sukamto — Guru SDN Batu Ratno, Sanusi Surya Dermans — Kep. SDN Cigenggong III, A. Rustoyo, BA — Kepala SD Kramat I, Barmin — Guru SDN Balong I, St. Suropto Atmosuwito, BA — Guru SD Tarsisius.

Suara GURU

No. 9 Th. XXXII - 30 SEPTEMBER 83

MAIN/UC-B



Majalah Bulanan Profesi Guru

Digitized by Google



1. Ketua Umum PB-PGRI H. Basyuni Suriamiharja saat menyampaikan kata sambutan, pada pembukaan Latihan Kepemimpinan PGRI, 23-8-1983 di Hotel Wisata International, Jakarta.



2. Suasana Pembukaan Latihan Kepemimpinan PGRI. Baris depan dari kiri : Dra. Nasrah Effendi, pengurus MDI-Golkar, Dra. Louse Golden Choff, Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta, Drs. W.D.F. Rindorindo, Sekjen PB-PGRI, Mr. Rajaguru (Malaysia) dan Dra. Achmad Nuryani (PG-PGRI).



3. Dari kiri ke kanan : Mr. Rajaguru (Malaysia) Mr. Leonard Forseel (Swedia), Mathews (WCOTP), Prof. Dr. Amran Halim (PB-PGRI), Dra. M. Wahjudi (PB-PGRI), F.A. Santoso, B.Sc. (PB-PGRI) pada saat Upacara penutupan Latihan Kepemimpinan PGRI.

Suara GURU

Majalah Suara Guru
No. 9 Th XXXII – 30 September 1983

PENERBIT

Pengurus Besar Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI)

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI

PEMIMPIN UMUM

H. Basyuni Suriyamiharja

KETATAUSAHAAN

Pimpinan : Drs. W. D. F. Rindorindo
Wkl. Pimp. : Muhd. Hatta
Anggota : F. A. Santoso, B.Sc.

REDAKSI

Pimpinan : Prof. Dr. Amran Halim
Wkl. Pimp./Skr. : Drs. H. Gazali Dunia
Anggota : Suyono ● A. T. Sianipar, SH.
● Ki Soeratman ● Drs. Gino Sutarno
● Anggota PB-PGRI lainnya

STAF REDAKSI

● Galisung MS ● Syarifulkani ● Sutiyo
● Edi Marhami

IZIN TERBIT

Skp Deppen No. 099 SK-PDHM-SIT-66
Tanggal 18 Februari 1966
(Izin Peperada Jaya No KEP-108-P/5-1966)

REDAKSI & TATA USAHA

Jl. Tanah Abang Tiga No. 24 Jakarta
Telp. 341121 – 340598

Percetakan

HARAPAN MASA - Jakarta
Telp. 582225

DAFTAR ISI

	Halaman
* Tajuk Rencana	1
* Prof. Dr. Nugroho Notosusanto : Mempelopori Masyarakat di Dalam Menghayati dan Mengamalkan Tata Hidup Pancasila	3
* Pidato Presiden Soeharto di depan DPR-RI, 16 Agustus 1983	6
LATIHAN KEPEMIMPINAN PGRI	
* Sambutan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI	13
* Ki Soeratman : Fungsi Sejarah Perjuangan Bangsa bagi Pembentukan Manusia Indonesia Seutuhnya	15
* Prof. DR. Conny Semiawan : Fungsi Pendidikan Sejarah Perjuangan Dalam Membentuk Manusia Indonesia Seutuhnya	19
* Laporan Pelaksanaan Latihan Kepemimpinan PGRI, 23 – 29 Agustus 1983	22
PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
* Dengan Hapsak Pancasila Kita Tingkatkan Pembangunan Masyarakat Pancasila	25
* Kurikulum SMP/SMA 1975 Sangat Penting dan Strategis	26
* Praseleksi Memasuki Perguruan Tinggi Dilaksanakan Tahun ini	27
* Pemberantasan Buta Huruf Merupakan Bagian Integral Pembangunan	28
* Mendikbud : Wajib Belajar Harus Dilaksanakan Mei 1984	30
* Peranan Universitas dalam Pembangunan Sangat Menentukan	31
* Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang Pleno DPR-RI, 16 Agustus 1983 (I)	32
* Petunjuk Pembinaan Sekolah (II)	35
* Dr. Mohammad Amien, MA : Peranan Kreativitas dalam Pendidikan (I)	38
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI	
* Pedoman Penilaian Untuk Akreditasi Sekolah Swasta : Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 020/C/Kep/I 83	46
UMUM & ILMU PENGETAHUAN	
* Kerjasama di Bidang Teknik Antara Pemerintah Swiss dan Indonesia ditandatangani	59

Rekening Giro :

BRI Cabang Tanah Abang Tiga No. 4 Jakarta
Pusat : No. 31. 46. 2118

Keterangan Gambar Kulit Depan :

PROF. DR. NUGROHO NOTOSUSANTO
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM KABINET PEMBANGUNAN IV.

TAJUK RENCANA

Pada Konperensi Pusat PGRI di Jakarta beberapa waktu yang lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto dalam kata sambutannya di antaranya menyatakan :

" . . . pada Konperensi Pusat PGRI sekarang ini perlu saya sampaikan bahwa tugas kita tidak sedikit; tugas kita itu adalah sesungguhnya landasan dari pada pembangunan manusia Indonesia seluruhnya. Pada tahun 2000 anak-anak kita yang sekarang di TK/SD ini nanti akan mengelola negara ini. Jadi bagaimana cara mereka mengelola negara ini, itu ada di tangan kita". Selanjutnya dikatakan, ". . . pada tahun 2000, jika anak kecil kita tidak beres menjadi penyelenggara negara saya ikut bertanggung jawab dan sebagai guru kita semuanya harus bertanggung jawab". Ya, semua harus bertanggung jawab, ya guru, ya orang tua murid, ya pemerintah, bertanggung jawab atas masa depan bangsa dan negara kita, negara yang berfalsafahkan Pancasila dan UUD 1945 yang kita perjuangkan dan kita pertahankan dengan tulang dan darah dan segala kemampuan kita semenjak 38 tahun yang lalu, sekarang dan nanti !

Kunci keberhasilan itu terletak di bahu para pendidik, para guru, para anggota PGRI! Di antara tugas yang diamanatkan oleh GBHN pada kita, pelaksanaan Wajib Belajar, yang hasilnya kelak berkaitan langsung dengan perkembangan dan martabat bangsa!

Pokoknya, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Peranan Guru tetap akan merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam upaya pembaharuan dan pembangunan bangsa, mulai dari kota sampai ke desa-desa.

Redaksi.—

**Sambutan Mendikbud Prof. Dr. Nugroho Notosusanto
Pada Konpus PGRI, 6 Juni 1983 di Jakarta**

**MEMPELOPORI MASYARAKAT DI DALAM
MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN
TATA HIDUP PANCASILA**



Prof. Dr. Nugroho Notosusanto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Bapak Ketua Umum PGRI, Pak Basyuni,
Bapak Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu kota
Jakarta,
Utusan Bapak Menteri Koordinator Kesejah-
teraan Rakyat,
Utusan Bapak Menteri Agama,
Para tamu sekalian, dan terutama sekali
Saudara-saudara para peserta Konperensi Pusat
PGRI.

Tadi pagi pada waktu saya berangkat, dan istri
saya mengetahui saya mau kemari, dia meng-
ingatkan saya, jangan berani-berani menggurui
para guru. Ini karena dia sudah sekitar $\frac{1}{4}$ abad
bersama saya, jadi mengetahui. Dan saya sendiri
juga guru, kadang-kadang lupa siapa yang di-
hadapi, sehingga ada kecenderungan untuk
memberitahu ini dan itu. Akan tetapi karena kita
sama-sama guru, barangkali jika ada kata-kata
saya yang menggelincir ke sana, dapat dimaafkan.
Kita saling mengenal, dan saling juga mengetahui
sifat-sifat kita yang terbawa oleh profesi. Soal
profesi itulah yang ingin saya pakai sebagai titik-
tolak pembicaraan saya pagi hari ini. Yakni
setelah saya resapkan kembali Kode Etik Guru
Republik Indonesia dimana ditekankan juga
mengenai soal profesi itu sendiri.

Profesionalisasi itu merupakan suatu soal yang
di dalam melaksanakan tugas senantiasa saya te-
kankan sebagai satu di antara dua proses yang
sedang berjalan di dalam masyarakat kita yang
sedang berubah. Saya selalu ingin mengetengah-
kan bahwa dua proses yang berjalan di kalangan
profesi-profesi itu adalah, pertama proses insti-
tusionalisasi atau proses pementapan, yang kedua
proses profesionalisasi. Kedua hal ini memang
merupakan ciri khas daripada sesuatu masyarakat
yang sedang berkembang. Berlainan dengan kea-
daan masyarakat-masyarakat yang sudah maju

seperti masyarakat di Barat dan juga di Asia ini,
masyarakat di Jepang. Kecuali di masyarakat-
masyarakat yang sudah berkembang, di wilayah
luas yang disebut dunia ketiga, dua proses inilah
merupakan proses utama yang berlangsung di
dalam rangka national development atau pempa-
ngunan nasional. Dan karena berada dalam ling-
kungan sesuatu profesi, maka dua hal ini yang
saya kira perlu kita perhatikan yaitu proses insti-
tusionalisasi dan proses profesionalisasi.

Kalau kita mengambil contoh dari sejarah,
misalnya sejarah persebaran budaya, dapat kita
ambil contoh proses pembudayaan Kerajaan
Romawi. Kerajaan Romawi pada suatu ketika
telah mencapai suatu kekuasaan politik yang
meliputi seluruh daerah Mediterania (Laut Ten-
gah) dan anatara lain yang dikuasai adalah
daerah Yunani. Karena ia mempunyai kekuasaan
politik tetapi secara kultural merasa ketinggalan
dari daerah Yunani, maka orang-orang Romawi
itu secara besar-besaran mendatangkan guru dari
daerah Yunani. Sehingga akhirnya terciptalah
budaya yang dikenal dalam sejarah Eropah sebagai
Graeco-Roman Culture. Adapun Graeco Roman
Culture sesungguhnya esensinya adalah budaya
Yunani, tetapi yang mengemban adalah orang
Romawi. Jadi kalau kita tafsirkan, maka orang
Romawi telah memperoleh kemenangan budaya.
Akhirnya menghasilkan suatu perpaduan dari
keduanya yang merupakan salah satu landasan
dari budaya dunia sekarang ini, yang kita ikut
juga dalam arusnya, yakni dalam proses moder-
nisasi.

Ini contoh daripada bagaimana vitalnya kedu-
dikan guru di dalam tersebarnya budaya. Jadi
kalu kita sekarang ingin bicara soal pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan perkembangan
masyarakat seluruhnya, maka yang primer adalah
manusia, bukan jabatan, bukan jalan-jalan, pabrik-
pabrik dan lain sebagainya. Jembatan, pabrik-

pabrik dan jalan-jalan itu adalah untuk manusia. Jadi yang pokok adalah manusianya, yang harus dibina, yang harus dibangun. Dan yang diharapkan untuk membangunnya adalah kita para guru. Mulai anak kecil dari TK/SD samapai perguruan tinggi, yang membentuk jiwanya adalah para guru, dan meskipun juga para orangtua ikut aktif, tetapi kenyataannya cukup banyak para orangtua itu sendiri belum memiliki tradisi kultural yang maju. Sehingga kemajuan anak itu terutama di tangan guru, ini kenyatannya.

Kalau di Dunia Barat di mana situasi budaya sudah mantap, maka anak dari rumah sudah mempunyai bekal tradisi intelektual dan membaca sudah menjadi darah daging. Tetapi dalam masyarakat kita keadaannya belum begitu. Mungkin anak itu baru di sekolah diajarkan membaca, mungkin di sekolah dia baru merasakan bahwa membaca itu suatu kenikmatan, bukan suatu beban. Para hadirin sebagai guru yang menghadapi para anakdidik kita, seperti juga saya sebagai guru di perguruan tinggi masih mengalami bahwa mahasiswa itu kalau disuruh membaca seperti menderita azab dan sengsara. Padahal seharusnya ia bersyukur karena diijinkan dengan tenang memusatkan dirinya untuk membaca. Sedangkan kalangan-kalangan yang luas dalam masyarakat tidak diberi *privilege*, tidak punya hak yang sedemikian nikmatnya, yang diperoleh oleh mahasiswa di sekolah.

Yang mengajari membaca adalah gurunya, jadi peranan guru dalam masyarakat-berkembang itu paling sedikit dua kali lipat daripada peran guru di negara-negara yang telah modern, yang telah mantap. Dalam perasaan saya, kita sendiri belum menyadari betapa pentingnya peranan kita sebagai guru, sehingga kadang-kadang kita dilanda oleh rasa rendah diri. Padahal tidak ada salahnya, kalau kita percaya pada diri sendiri, karena kita akan mengetahui, bahwa apa yang kita lakukan itu esensial, bahkan kalau *tidak* kita lakukan, akan dapat terjadi malapetaka. Seharusnya kita lakukan secara sebaik-baiknya secara mengejar keseluruhan, karena setiap kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas kita itu nanti akibatnya akan nampak satu dua dasa warsa yang akan datang.

Jadi ini barangkali yang pada Konperensi PUSat PGRI sekarang ini perlu saya sampaikan. Bahwa tugas kita tidak sedikit, tugas kita itu

adalah sesungguhnya landasan daripada pembangunan manusia Indonesia seluruhnya. Pada tahun 2000 anak-anak kita yang sekarang di TK/SD ini nanti akan mengelola negara ini. Jadi bagaimana cara mereka mengelolal negara ini, itu ada (di tangan kita, kalau kita tidak lulus dalam ujian mendidik mereka itu maka mungkin mereka pun akan tidak lulus mengendalikan negara ini. Ini yang sesungguhnya siang-malam harus berada dalam kesadaran kita, kita harus bertanggungjawab. Saya yang hanya bertugas mengelola bidang pendidikan dan kebudayaan sekarang ini, setiap melihat anak kecil merasa ada suatu beban mental. Sebab nanti pada tahun 2000, jika anak kecil itu tidak beres menjadi penyelenggara negara saya ikut bertanggungjawab dan sebagi guru kita semuanya haru bertanggungjawab.

Jadi inilah tugas kita, tugas memantapkan nilai-nilai modern pada anak-anak itu. Nilai-nilai yang dalam masyarakat kita sendiri belum lagi mantap. Sebab di dalam masyarakat yang berkembangitu, pendidikan selalu satu langkah lebih maju daripada masyarakat sekitarnya. Karena itulah kita merasakan betapa berat tugas kita : kita berkewajiban memantapkan nilai-nilai yang di dalam masyarakat sendiri belum sepenuhnya mantap.

Bapak Presiden Soeharto sudah menekankan menurut interpretasi beliau yang diinginkan oleh rakyat yang harus kita lakukan selama lima tahun yang akan datang ini ialah, untuk melanjutkan, meluaskan, meningkatkan pembangunan msyarakat Pancasila. Itu berarti bahwa di dalam perguruan kita masing-masing kita harus berhasil menciptakan "Prototype" daripada masyarakat Pancasila. Sebab kita tahu bahwa msyarakat Pancasila itu sedang dalam proses untuk kita capai, jadi memang belum sepenuhnya tercapai. Beberapa kali saya mendengar pertanyaan bagaimana kita bisa memantapkan nilai Pancasila, kalau di sekitar kita pun hal itu belum tercapai. Ini proses berpikir yang terbalik; masyarakat justru mengharapakan dari kita, untuk memantapkan terlebih dulu nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan masyarakat kecil sekolah dan kampus. Kita harus satu langkah di depan masyarakat.

Jadi pendidikan tidak berarti berada satu langkah di belakang masyarakat, melainkan harus satu langkah di depannya. Tidak berarti kita superman atau *superwoman* yang menghasilkan

superboys atau *supergirls*, tidak. Memang kita harus satu langkah di depan, karena kita membangun masadepan, sedangkan masa depan harus lebih baik dari masakini. Tentu saja masakini belum sempurna dan masa depan itu harus lebih sempurna dari masakini. Secara bertahap kita makin lama makin maju dan makin mendekati masyarakat yang kita inginkan. Dan sasaran akhir daripada pembangunan nasional, adalah terciptanya masyarakat Pancasila, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan materiil yang bersemangat kekeluargaan serta di mana seluruh kehidupan itu berada dalam suatu keselarasan dan keseimbangan.

Tadi sudah kita sebutkan bahwa sebagai pendidik atau sebagai guru, kita sering mendengar pertanyaan bagaimana kita mau memantapkan nilai Pancasila, kalau di sekitar kita belum dihayati. Pertanyaan itu justru harus kita balik. Kita harus lebih maju satu langkah daripada masyarakat tentang apa yang sudah kita canangkan. Kita harus menjelaskan apa Pancasila itu secara sederhana saja, yaitu satu masyarakat yang didasarkan atas kekeluargaan. Kekeluargaan berarti kita tidak boleh mengijinkan adanya kontradiksi, ajaran Marxisme; tidak boleh mengijinkan kompetisi tanpa batas, ajaran liberalisme. Itu yang dalam prakteknya harus kita laksanakan. Hal ini pernah saya sebutkan *Pancasila-in-action*, bukan semata-mata Pancasila yang secara kognitif kita pelajari. Melainkan *Pancasila-in-action* yang kita hayati, yang seharusnya pada penataran P4 sudah harus kita resapi secara efektif.

Dengan ini saya sampai pada soal hakekat pendidikan, yang juga merupakan suatu pokok dalam kebijaksanaan yang akan saya jadikan titikberat, yaitu bahwa pendidikan yang primair adalah *pendidikan watak*. Jadi pendidikan itu pertama kali bukan untuk membuat manusia pandai tetapi untuk manusia berperilaku yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut, berdasarkan kebudayaan kita. Baru sesudah itu, pendidikan itu menyangkut akal. Sebab manusia yang wataknya buruk sebaiknya jangan dibuat pandai, lebih baik dia bodoh saja, sebab kalau orang jahat itu pandai dia akan lebih berbahaya. Dengan demikian jelas bahwa yang lebih penting itu adalah watak yang baik.

Dan untuk tingkat pertama dalam studi, makin penting arti pendidikan watak itu, sedang-

kan makin tinggi tinggi tingkat studi tentu saja kadar ilmu dan ketrampilan makin banyak. Tetapi juga di kampus-kampus saya melihat pentingnya masalah pendidikan watak itu. Dan salah satu hal yang merisaukan saya adalah adanya semangat kontradiksi, jadi masih mewarisi semangat Orde Lama. Belum lagi hilang semboyan komunis; "politik adalah panglima" sehingga yang dipentingkan adalah *machts vorming* dan *machtsaandwending*. (pemupukan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan).

Seharusnya bukan begitu, semestinya kita merupakan massa yang *solid* (utuh bersatu) dan satu langkah lebih maju dari masyarakat di dalam melaksanakan sistem Pancasila yang bersemangat kekeluargaan menciptakan suasana yang serasi dan seimbang. Dan ini harus menjadi landasan sistem apapun, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam.

Jadi kalau ada harapan dari saya, sebagai pembina PGRI, yang saya harapkan untuk dilaksanakan adalah pengkajian dan perenungan beberapa hakekat yang diuraikan itu, untuk dilaksanakan dalam waktu 1½ tahun selagi masih memegang jabatan Pengurus PGRI, dan untuk dijadikan landasan bagi pengurus yang akan datang. Dan mohon kiranya hal ini disebarluaskan ke daerah-daerah.

Sekian dan terima kasih.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Prof. Dr. Nugroho Notokusanto

PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
16 AGUSTUS 1983

II

Tanpa tindakan devaluasi, maka cadangan devisa kita akan segera habis, dan tanpa penjadwalan kembali proyek-proyek, beban pembayaran hutang akan memberatkan, sehingga kita tidak mungkin melanjutkan pembangunan.

Perlu saya jelaskan bahwa penjadwalan kembali proyek-proyek tadi tidak berarti tercapainya sarana-sarana dalam Repelita III, sebab proyek-proyek itu memang kita bangun karena di waktu yang lalu kita memiliki tambahan kemampuan pembiayaan yang besar yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak bumi.

Devaluasi dan penjadwalan kembali proyek-proyek besar, yang sebelum itu kita awali dengan peningkatan harga bahan bakar minyak, menunjukkan sikap kita yang realistis dan merupakan tindakan penanggulangan yang efektif terhadap tantangan yang bersumber pada gejolak ekonomi dunia. Khususnya devaluasi dan penjadwalan kembali proyek-proyek merupakan langkah sangat menentukan untuk memperkuat ketahanan neraca pembayaran Indonesia dalam menghadapi ketidak-pastian yang melanda pasaran modal di dunia dewasa ini.

Dalam pada itu tekad kita untuk melanjutkan pembangunan tidak pernah mengendor. Untuk itu kita harus dapat meningkatkan lagi pengerahan dana pembangunan yang berasal dari sumber-sumber dalam negeri.

Pengerahan dana pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri akan terdiri dari tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat.

Untuk meningkatkan Tabungan Pemerintah, maka di satu pihak, perlu ditingkatkan penerimaan negara semaksimal mungkin, dan di lain pihak, pengeluaran rutin dibatasi sampai pada tingkat yang tidak dapat dikurangi lagi. Langkah itu akan dilakukan terus menerus di tahun-tahun yang akan datang dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara seperti anggaran berim-



Presiden Republik Indonesia
Soeharto

bang yang dinamis, penghematan pengeluaran rutin dan sebagainya. Dalam rangka usaha meningkatkan penerimaan negara, akan diadakan penyempurnaan sistem perpajakan, yang meskipun telah mengalami berbagai perubahan, hakekatnya merupakan warisan zaman penjajahan Belanda.

Untuk itu sebelum Repelita IV kita mulai, Pemerintah akan mengajukan kepada Dewan yang terhormat beberapa buah rancangan undang-undang yang sangat penting, yang menyangkut pembaharuan perpajakan nasional. Tujuan utama pembaharuan perpajakan ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Dalam pada itu kita semua sadar bahwa untuk membiayai pelaksanaan Repelita IV kita tidak dapat dan tidak akan sekedar mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam. Oleh karena itu peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam merupakan keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan Repelita IV. Dengan pembaharuan perpajakan nasional itu sistem perpajakan yang berlaku dewasa ini akan disederhanakan: yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, penyederhanaan tarif pajak dan penyederhanaan cara pembayaran pajak. Dengan pembaharuan ini sistem pembayaran pajak akan makin adil dan wajar, sedang jumlah wajib pajak akan makin luas. Selanjutnya pembaharuan perpajakan meliputi pula pembenahan aparatatur perpajakan, baik

yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin maupun mental. Dengan pembaharuan perpajakan ini maka beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup lubang-lubang yang selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak. Singaktnya kita akan menciptakan sistem pajak yang sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap orang; sistem pajak yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran; dan sistem pajak yang memberikan kepastian bagi setiap wajib pajak. Saya percaya, bahwa Dewan yang terhormat akan memberi perhatian yang khusus terhadap penyelesaian undang-undang perpajakan ini nanti.

Adapun Tabungan Masyarakat merupakan sumber dana untuk kegiatan investasi di luar sektor negara. Sebagian dari tabungan masyarakat ini berasal dari sektor dunia usaha. Bahagian terbesar lainnya berasal dari sektor rumah tangga, yang saat ini masih terdapat dalam bentuk tradisional. Potensi yang besar ini perlu dikembangkan agar kita makin dapat mengerahkan dana pembangunan dengan kekuatan sendiri. Peningkatan kegiatan ekonomi dan pembangunan yang pembiayaannya bersumber pada kemampuan masyarakat sendiri seperti itu tidak akan mengakibatkan gejolak inflasi. Itulah latar belakang pemikiran dan tujuan dari kebijaksanaan Pemerintah yang telah diambil baru-baru ini dengan menaikkan suku bunga. Tabungan dan deposito berjangka serta dengan pembaharuan kebijaksanaan perkreditan. Sangat jelas, kebijaksanaan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi kita dan sekaligus untuk mengerahkan kekuatan sendiri guna melanjutkan pembangunan yang meningkat. Bilamana kita berhasil mengerahkan tabungan masyarakat secara besar-besaran dalam bentuk Tabanas dan deposito pada perbankan maka akan tersedia dana perkreditan yang sangat besar, yang antara lain diarahkan untuk meningkatkan penyediaan perkreditan di daerah pedesaan guna lebih memperlancar kegiatan ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan gerakan tabungan nasional dengan menabung pada Tabanas dan deposito di perbankan dan dengan demikian ikut serta me-

nyediakan dana bagi pembangunan nasional, di samping memperoleh imbalan yang cukup menarik bagi tabungannya.

Selanjutnya untuk pelaksanaan Repelita IV maka di samping dana pembiayaan rupiah juga diperlukan devisa dalam jumlah yang meningkat. Guna menambah penerimaan devisa maka diambil serangkaian langkah-langkah untuk lebih mendorong ekspor barang, terutama di luar minyak dan gas alam, serta ekspor jasa pada umumnya. Dalam hubungan ini diusahakan perluasan pasaran barang-barang ekspor Indonesia serta peningkatan daya saing barang-barang tersebut di pasaran luar negeri. Kegiatan lain yang mengandung potensi besar bagi penerimaan devisa adalah bidang pariwisata. Oleh karena itu peningkatan pariwisata merupakan salah satu bidang yang diutamakan. Dalam pada itu guna mempercepat pelaksanaan pembangunan maka di samping peningkatan ekspor barang dan jasa pariwisata, kita akan memanfaatkan pula pinjaman luar negeri. Sebagaimana halnya hingga kini maka kita hanya bersedia menerima pinjaman luar negeri sepanjang tidak ada ikatan politik, syarat-syaratnya tidak memberatkan dan dalam batas kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Sudah barang tentu pinjaman tersebut hanya digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan kita. Dalam hubungan ini kita akan tetap sangat waspada, lebih-lebih mengingat pengalaman berbagai negara yang sedang membangun akhir-akhir ini yang terjerat di dalam beban pembayaran kembali pinjaman luar negeri yang melampaui batas kemampuan. Kewaspadaan itu juga tetap kita pegang teguh mengingat gejolak keuangan dan moneter yang masih terus melanda ekonomi dunia.

Dengan ketahanan nasional di berbagai bidang itu kita dapat meningkatkan pelaksanaan Trilogi Pembangunan dengan makin pemeratakan pembangunan menuju keadilan sosial, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan dengan memperkuat lagi stabilitas nasional.

Sidang Dewan yang terhormat,

Seperti yang ditunjukkan oleh GBHN maka Repelita IV itu merupakan tahapan keempat dari serangkaian pelaksanaan Repelita dalam usaha kita untuk melaksanakan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang. Dengan melihat hasil-

hasil pembangunan di segala bidang sampai sekarang, dan dengan belajar secara pandai dari pengalaman-pengalaman kita selama ini, maka GBHN juga memberi petunjuk agar kita mempercepat tercapainya sasaran jangka panjang tadi. Ini berarti bahwa di bidang ekonomi kita perlu mempercepat terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang, di mana terdapat industri yang maju yang didukung oleh pertanian yang tangguh.

Pembangunan akan kita titik beratkan pada sektor pertanian, dengan juga meningkatkan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan.

Dalam Repelita IV nanti, kita harus berusaha keras, agar pertumbuhan di sektor industri dan sektor-sektor lain di luar pertanian maju lebih cepat dari sektor pertanian, sedangkan sektor pertanian sendiri juga harus kita tingkatkan.

Adapun tujuan Repelita IV adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang makin adil dan merata di satu pihak, dan bersamaan dengan itu di lain pihak meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Sebagai kelanjutan dan peningkatan dari Repelita III, maka dalam Repelita IV akan makin kita tingkatkan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat lahir batin, mendorong pembagian pendapatan yang makin merata dan lebih memperluas kesempatan kerja. Demikian pula kita akan meningkatkan penanganan masalah-masalah sosial ekonomi yang telah digarap selama Repelita III tetapi belum sepenuhnya terpecahkan.

Secara keseluruhan, maka keadilan sosial akan mendapat tempat yang utama dalam Repelita IV dengan melanjutkan memperluas dan memberi kedalaman-kedalaman pada pelaksanaan Delapan Jalur Pemerataan yang selama ini telah kita tempuh.

Di bidang pertanian kita akan meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Keseluruhan pembangunan pertanian ini sekaligus diarahkan pada usaha peningkatan penghasilan petani, perluasan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, perbaikan gizi masyarakat, dukungan terhadap pembangunan daerah dan

peningkatan kegiatan transmigrasi. Melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi akan kita tingkatkan pembangunan pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Secara khusus masalah tanah akan mendapatkan perhatian dengan melanjutkan dan meningkatkan langkah-langkah pengendalian secara efektif masalah-masalah penggunaan tanah, penguasaan tanah, pemilikan tanah dan pengalihan hak atas tanah, sehingga benar-benar sesuai dengan asas adil dan merata. Dalam pengalihan hak atas tanah akan dicegah pemilikan tanah yang melampaui batas; sedang di lain pihak akan diusahakan untuk pencegahan pembagian tanah yang sangat kecil agar manfaat tanah tidak makin berkurang.

Pembangunan pertanian ini akan merupakan medan juang yang tidak pernah akan kita abaikan, sebab pertanian harus dapat mendukung pembangunan industri. Di samping itu, produksi pertanian juga tergantung dari musim. Dengan musim kemarau yang panjang, yang kita alami dalam tahun yang lalu dan tahun ini, maka produksi beras kita tidak dapat mencapai kenaikan tinggi seperti yang kita capai dalam tahun-tahun yang sebelumnya. Dalam tahun '80 produksi beras meningkat dengan 12,8%, dalam tahun '81 dengan 10,5%, dalam tahun '82 dengan 4,1% dan dalam tahun '83 diperkirakan bahwa angka persentase kenaikan akan lebih rendah lagi. Meskipun jumlah produksi beras tetap meningkat dari tahun ke tahun dan sudah jauh melebihi Repelita III, namun perkembangan ini hendaknya menyadarkan kita bahwa pembangunan pertanian harus benar-benar tetap kita garap dengan penuh ketekunan.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan pertanian maka akan ditingkatkan dan diperluas usaha-usaha untuk membuka dan mengusahakan tanah-tanah kritis dan tanah-tanah kering, sehingga dapat menjadi produktif.

Untuk mendukung pembangunan pertanian akan dilanjutkan pembangunan pengairan yang sekaligus dipadung dengan tujuan untuk melestarikan sumber-sumber air, penyediaan air untuk kesejahteraan umum serta dukungan terhadap pembangunan industri dan kelistrikan. Dengan langkah-langkah itu akan makin kuatlah pertanian kita dalam mendukung perkembangan industri dalam rangka mencapai keseimbangan

struktural ekonomi.

Dalam rangka itu maka pembangunan industri akan makin ditingkatkan. Pembangunan industri tetap diarahkan untuk terus memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan dari impor, serta untuk mendorong ekspor hasil industri guna memperbesar penerimaan devisa yang diperlukan untuk peningkatan pembangunan.

Dalam pembangunan industri ini perhatian yang khusus diarahkan pada pembangunan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri, dengan maksud agar secara bertahap kita akan dapat memenuhi sendiri kebutuhan mesin-mesin — termasuk suku cadangnya — dalam rangka pembangunan industri selanjutnya. Untuk mendukung maksud itu maka juga ditingkatkan pembangunan industri yang menjamin pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Dalam hubungan ini selama Repelita III telah dimulai pelaksanaan investasi di berbagai macam industri yang akan selesai dan mulai berproduksi dalam tahun-tahun permulaan Repelita IV. Sementara itu juga ditingkatkan pembangunan industri sektor pertanian yang menghasilkan sarana produksi pertanian dan mengolah hasil pertanian. Dalam rangka Repelita IV, dan sekaligus untuk memperluas kesempatan kerja, maka juga ditingkatkan kegiatan industri kecil dan kerajinan rakyat. Agar industri dapat makin berkembang dalam tahun-tahun yang akan datang, maka akan diciptakan kaitan yang erat dan saling menghidupi antara industri kecil, industri menengah dan industri besar.

Sementara itu kita akan mengembangkan pula berbagai industri tertentu lainnya yang selama ini telah dirintis seperti industri maritim, industri penerbangan, industri alat-alat berat, industri elektronika dan industri yang dapat menunjang pertahanan keamanan.

Untuk semua itu dilanjutkan pengembangan dan perluasan dalam penguasaan teknologi dan keteknikan lainnya yang juga telah lama kita rintis sampai sekarang. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung pembangunan industri adalah kesadaran kita yang harus meningkat dalam menggunakan produksi dalam negeri.

Dalam pada itu pembangunan pertambangan

Dalam pada itu pembangunan pertambangan juga kita tingkatkan. Di samping minyak dan gas bumi, maka pembangunan pertambangan lainnya mendapat perhatian yang lebih besar. Tujuannya ialah untuk meningkatkan produksi pertambangan, meningkatkan ekspor guna menambah penerimaan devisa dan juga diarahkan untuk ikut memperbesar penerimaan keuangan negara. Di samping itu juga diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan mengembangkan penyediaan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan bahan-bahan tambang akan kita lanjutkan usaha-usaha untuk mengolah bahan-bahan tambang tersebut di dalam negeri. Pembangunan dan perluasan kilang minyak di Cilacap yang saya resmikan awal bulan ini — yang segera akan disusul dengan selesainya perluasan kilang minyak di Dumai dan Balikpapan — merupakan usaha untuk makin memperbanyak pengolahan bahan tambang di dalam negeri. Usaha untuk mengolah sebanyak-banyaknya kekayaan alam di dalam negeri ini merupakan kebijaksanaan yang akan terus kita lanjutkan dan kita perluas. Karena itu lah sejak beberapa waktu yang lalu kita batasi dan pada saatnya kita tidak lagi meng-ekspor kayu gelondongan; melainkan kita olah kayu kekayaan hutan kita untuk menjadi kayu lapis.

Dalam pada itu pengelolaan sektor pertambangan diserasikan dengan kebijaksanaan umum energi. Perkembangan samapi sekarang menunjukkan bahwa penggunaan minyak bumi sebagai sumber utama pemakaian energi dalam negeri terus meningkat, sedangkan bagaimanapun juga persediaan minyak bumi itu sifatnya terbatas. Karena itu akan dilanjutkan dan ditingkatkan langkah-langkah penghematan penggunaan minyak bumi; sedangkan di lain pihak akan dikembangkan sumber-sumber energi lainnya seperti batubara, tenaga air, panas bumi, biogas dan lain-lainnya. Dalam rangka mengembangkan energi ini, maka pembangunan tenaga listrik ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, khususnya industri. Untuk tahun-tahun yang akan datang usaha listrik masuk desa akan lebih diperluas lagi.

Sementara itu untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang akan semakin

meningkat, maka akan ditingkatkan pula pembangunan perhubungan baik di darat, di laut, di udara maupun di sungai dan danau-danau. Pembangunan perhubungan diarahkan untuk melancarkan hubungan antara daerah produksi dengan daerah pemasaran, mendorong terbukanya pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru dan melancarkan hubungan ke daerah-daerah pemukiman yang terpencil. Khusus mengenai pelayanan luar negeri akan lebih ditingkatkan peranan dan kemampuan Indonesia untuk bersaing dalam pengangkutan barang-barang perdagangan luar negeri. Dalam pada itu pembangunan telekomunikasi, pos dan giro juga mendapat perhatian dalam peningkatannya.

Karena tujuan terpenting dari pembangunan kita adalah kesejahteraan rakyat, maka pembangunan perumahan dan pemukiman juga akan kita tingkatkan dan kita perluas. Perhatian terutama diarahkan pada pembangunan dengan harga yang terjangkau oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karena pembangunan perumahan memerlukan biaya yang sangat besar, maka dalam memobilisasi kemampuan masyarakat, akan didorong pula kemampuandan kegiatan usaha koperasi, swasta dan masyarakat pada umumnya.

Dalam pada itu seluruh pembangunan sektoral akan selalu diusahakan berkembang selaras dan saling menunjang dengan pembangunan daerah. Dengan kemajuan daerah-daerah yang lebih seimbang, maka akan lebih terbina lah Indonesia sebagai kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan kesatuan pertahanan keamanan. Perhatian yang makin besar akan diberikan pada pembangunan daerah-daerah yang relatif terbelakang, daerah-daerah kepulauan yang terpencil dan daerah-daerah perbatasan. Di samping itu perhatian juga terus diberikan kepada pembangunan daerah-daerah minus dan daerah-daerah yang sangat padat penduduknya. Untuk meningkatkan pembangunan daerah ditingkatkan pula langkah-langkah dan suasana yang dapat terus mendorong prakarsa dan partisipasi rakyat di daerah, terutama masyarakat di pedesaan. Dalam hubungan ini peranan PKK yang selama ini telah dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan sekaligus meningkatkan peranan partisipasi wanita akan terus digalakkan.

Dalam rangka mendorong prakarsa dan partisipasi rakyat itu, maka antara lain perlu kita kembangkan terus koperasi. Lebih dari itu, pengembangan koperasi merupakan usaha yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan semangat dan kehendak pasal 33 Undang-Undang Dasar. Dalam Repelita IV koperasi harus makin luas dan berakar dalam masyarakat, sehingga koperasi secara bertahap dapat menjadi salah satu sokoguru perekonomian nasional kita. Untuk itu peranan dan usaha koperasi perlu ditingkatkan dan diperluas di berbagai sektor : seperti sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, angkutan, kelistrikan dan lain-lain. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan koperasi di berbagai bidang tadi, maka akan didorong dan dikembangkan kerjasama antara koperasi dengan usaha swasta dan usaha negara. Di samping itu juga akan kita lanjutkan pembinaan koperasi fungsional seperti koperasi buruh dan karyawan perusahaan, koperasi pegawai negeri, koperasi mahasiswa dan sebagainya sehingga koperasi makin memasyarakat dan makin membudaya.

Demikian pula, dalam rangka memperbesar partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka peranan dunia usaha nasional juga akan ditingkatkan. Dalam hal ini perhatian khusus diberikan untuk membina terus golongan ekonomi lemah. Untuk itu diambil langkah-langkah guna lebih memperluas kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah dan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan berusaha yang tersedia. Selanjutnya akan makin ditingkatkan iklim yang menggairahkan dunia usaha. Semua perizinan yang menghambat kegiatan ekonomi harus dihapuskan. Prosedur perizinan yang masih ada harus makin disederhanakan dan tidak boleh membebani dunia usaha. Dengan demikian masyarakat dan dunia usaha nasional akan makin besar peranannya dalam Repelita IV nanti.

Di samping kita akan mendorong terus partisipasi usaha swasta nasional, kita juga tetap membuka kesempatan bagi usaha swasta asing yang berminat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dalam bidang-bidang yang masih terbuka dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan jaminan usaha sesuai dengan per-

aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemikiran kemampuan kita untuk mengembangkan pertumbuhan di berbagai sektor maka laju pertumbuhan ekonomi selama Repelita IV diperkirakan sebesar rata-rata 5% setahun. Angka ini tidak sebesar laju pertumbuhan ekonomi rata-rata selama Repelita III, yang menunjukkan perkembangan sebagai berikut : laju pertumbuhan ekonomi tahun '79 sebesar 7,3%, tahun '80 sebesar 9,9%, tahun '81 sebesar 7,9% dan tahun '82 sebesar 2,25%. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam tahun '82 menunjukkan betapa berat akibat tiga hal yang berlangsung bersamaan dalam tahun tersebut. Ke tiga hal itu adalah : (1) kemerosotan yang sangat tajam dalam kegiatan ekonomi dunia sebagai pencerminan resesi ekonomi dunia yang terpanjang selama 50 tahun yang terakhir; (2) sangat menyempitnya pasaran minyak bumi di dunia; dan (3) musim kemarau panjang yang melanda Indonesia dan sangat mempengaruhi produksi pertanian. Dewasa ini pemulihan kegiatan ekonomi dunia berlangsung dengan lamban sekali dan diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia dalam tahun-tahun yang akan datang masih akan rendah. Lagi pula sebagai akibat belum adanya penanganan yang tuntas dan efektif terhadap masalah-masalah struktural serta mendasar daripada tatanan ekonomi dunia maka tidak ada kepastian bahwa resesi yang dialami dunia dewasa ini tidak akan terulang kembali sesudah beberapa tahun berlalu. Karena itu perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama Repelita IV sebesar rata-rata 5% setahun adalah perkiraan yang cukup realistis. Namun untuk mewujudkan hal tersebut dalam ruang lingkup ekonomi dunia yang serba suram serta terus menerus dilanda ketidakpastian dalam berbagai bentuk dan macamnya, maka diperlukan tekad serta usaha yang sungguh-sungguh dari seluruh bangsa Indonesia untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Dalam pada itu Repelita IV diusahakan agar struktur ekonomi Indonesia makin seimbang. Untuk itu pertumbuhan sektor industri dan sektor-sektor lainnya perlu berlangsung lebih cepat daripada sektor pertanian, sedang untuk sektor pertanian sendiri tetap diusahakan pertumbuhan yang memadai. Diperkirakan bahwa sektor industri akan tumbuh dengan rata-rata

sekitar 9,5% setahun, sedang sektor pertanian dengan sekitar 3%. Dengan laju pertumbuhan tersebut maka peranan sektor industri akan lebih menonjol dan struktur ekonomi Indonesia akan makin seimbang.

Kita menyadari bahwa seluruh rencana pembangunan kita akan berhasil dengan lancar jika ditunjang oleh pemecahan masalah kependudukan yang antara lain meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk, pendidikan, masalah lapangan kerja dan sebagainya.

Kelahiran akan terus kita kendalikan melalui peningkatan dan perluasan pelaksanaan program nasional keluarga berencana. Sedangkan tingkat kematian, terutama tingkat kematian bayi dan anak, diharapkan dapat menurun dengan cepat berkat bertambah baiknya taraf kesejahteraan sebagai hasil dari kemajuan pembangunan dan pelayanan kesehatan serta penyuluhan yang juga akan makin meluas. Dalam rangka ini maka dalam Repelita IV nanti diharapkan laju pertumbuhan penduduk masih berada sedikit di atas 2% setahun, sedang pada akhir Repelita IV diusahakan agar sudah ada di bawah 2%. Dengan demikian selama Repelita IV laju pertumbuhan penduduk diperkirakan rata-rata 2% setahun. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar itu maka produksi nasional nyata per jiwa akan meningkat dengan rata-rata 3% per tahun selama Repelita IV yang akan datang.

Penyebaran penduduk yang akan merupakan masalah yang makin mendesak, akan kita tangani melalui peningkatan transmigrasi. Dalam Repelita IV akan diusahakan dapat ditransmigrasikan jumlah penduduk yang lebih besar daripada dalam Repelita III. Sebagaimana kita ketahui sasaran transmigrasi dalam Repelita III adalah sebesar 500.000 kepala keluarga; yang diharapkan jumlah tersebut dapat dilaksanakan. Di samping untuk menyebarkan penduduk dan tenaga kerja, maka transmigrasi juga ditujukan untuk membuka dan mengembangkan daerah produksi baru di luar Jawa dan Bali, terutama untuk membuka daerah pertanian yang baru.

Mengenai perluasan lapangan kerja yang merupakan salah satu masalah besar yang harus kita tangani dalam tahun-tahun mendatang, maka pemecahannya diletakkan dalam keseluruhan

gerak dan arah pembangunan. Artinya semua program pembangunan, baik pembangunan sektoral maupun pembangunan daerah, selalu diusahakan agar menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini perhatian yang khusus akan diberikan kepada tenaga kerja usia muda, yang dewasa ini dan di tahun-tahun yang akan datang akan bertambah besar jumlahnya. Pengalaman kita selama ini menunjukkan, bahwa acap kali terjadi bukan lapangan kerja yang tidak ada, melainkan karena ketidak tahuan di mana lapangan kerja itu terbuka dan ketrampilan apa yang diperlukan. Tidak disangsikan lagi bahwa bangsa kita adalah bangsa yang suka bekerja keras, memiliki bakat-bakat yang mudah dibina dan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan yang baru. Karena itu di tahun-tahun mendatang akan dikembangkan dan disempurnakan informasi ketenagakerjaan serta akan diperluas pendidikan ketrampilan, sehingga terbina tenaga-tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dalam hubungan ini saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghormati setiap jenis pekerjaan yang halal. Martabat manusia bukan ditentukan oleh tinggi atau rendahnya penghasilan, bukan ditentukan oleh "halus" atau "kasar"-nya pekerjaan, bukan oleh jenis pekerjaan "Otak" atau jenis pekerjaan "tangan". Martabat manusia ditentukan oleh kemampuan manusia bekerja produktif, halal dan tidak amoral.

Memang, pembangunan suatu bangsa akan berhasil jika bangsa itu berhasil membangun sumber daya manusianya. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa dengan sumber daya manusia yang berkembang, maka sesuatu bangsa dapat mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang tinggi walaupun bangsa itu miskin dengan kekayaan alam.

Pengembangan sumber daya manusia terletak pada usaha-usaha pendidikan dan pengembangan kebudayaan. Karena itu di tahun-tahun mendatang masalah pendidikan ini akan mendapat perhatian yang makin besar. GBHN menegaskan bahwa pendidikan nasional kita harus berdasarkan Pancasila. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-

manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsanya. Dengan arah itu maka dalam lima tahun mendatang titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu serta perluasan pendidikan dasar guna menempatkan pelaksanaan wajib belajar dan bersamaan dengan itu memperluas kesempatan belajar pada tingkat pendidikan menengah. Demikian pula, sesuai dengan kemampuan akan diperluas kesempatan belajar pada pendidikan tinggi. Sistem pendidikan secara terus menerus akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang meningkat di segala bidang yang memerlukan berbagai jenis keahlian dan keterampilan, serta sekaligus dapat meningkatkan kreativitas, produktivitas, mutu dan efisiensi kerja. Dalam hubungan ini berbagai macam pendidikan kejuruan dan politeknik akan lebih diperluas dan ditingkatkan mutunya.

Cita-cita kita dalam pembangunan adalah membangun masyarakat Indonesia moderen, yang dalam kemoderenannya tetap masyarakat Indonesia yang berkepribadian sendiri. Untuk itulah dalam melanjutkan dan meningkatkan pembangunan kita kan terus membina dan mengembangkan bersama-sam nilai budaya Indonesia guna mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkukuh jiwa kesatuan. Bersamaan dengan itu tanggung jawab sosial dan disiplin nasional akan terus kita bina dan kita kembangkan bersama-sama pula sebagai usaha untuk memperkukuh kesetiakawanan nasional, lebih menanamkan sikap mental tenggang rasa, penuh rasa pengabdian, jujur dan kesatria.

Dengan rasa tanggung jawab yang besar, kita akan makin meningkatkan usaha-usaha pembauran bangsa di berbagai bidang kehidupan dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta ketahanan nasional. Dalam hubungan ini perlu makin dikembangkan sikap yang percaya-mempercayai, sikap saling hormat menghormati serta sikap saling memerlukan dalam hubungan antara golongan masyarakat kita.

(bersambung ke hal 24)

**SAMBUTAN KETUA UMUM PB – PGRI PADA UPACARA PEMBUKAAN
LATIHAN KEPEMIMPINAN PGRI
TANGGAL 23 AGUSTUS 1983 DI JAKARTA**

- Bapak Menteri P dan K beserta Bapak-bapak Menteri Pembina Pusat PGRI yang kami hormati,
- Yth. Para Undangan,
- Yth. Tuan L. Forsell dari LO/TCO – Swedia,
- Yth. Tuan A. Mathews dan Tuan Rajaguru dari WCOTP,
- Rekan-rekan para peserta penataran yang kami cintai
- Hadirin yang kami muliakan,



Bayuni Sartakarya

Asalamu'alaikum wr. wb.

Pada hari ini kita berkumpul dalam suasana baru saja 6 hari yang lalu, kita seluruh Bangsa Indonesia memperingati hari bersejarah yang kita muliakan, yaitu Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan R.I. ke-38.

Setiap menjelang malam tanggal 17 Agustus, setiap tahunnya kita berkumpul untuk mengadakan renungan suci di Taman-taman Makam Pahlawan Bangsa yang tersebar di seluruh Tanah Air untuk mengenang kembali, menghormati dan mendoakan Para Pahlawan Bangsa yang telah gugur mendahului kita mengurbani kemerdekaan. Pada saat itu, kita berjanji pula untuk mengemban amanat para pahlawan, melanjutkan perjuangan bangsa dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan yang kita proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, tiga puluh delapan tahun yang lalu.

Dengan renungan ini kita menyadari, bahwa kemerdekaan yang kita miliki dengan segala apa yang kita lihat dan kita rasakan sekarang ini sebagai hasilnya, tidaklah datang dengan sendirinya, ataupun suatu hadiah pemberian dari siapapun, melainkan semata-mata adalah rahmat Allah Yang Maha Kuasa yang ditebus dengan pengorbanan-pengorbanan harta benda, jiwa, darah dan air mata para pahlawan bangsa, para pejuang kemerdekaan serta penderitaan rakyat Indonesia.

Pengurus Besar PGRI menyambut dengan penuh rasa haru dan bahagia atas kebenaran renungan, penghormatan, amanat dan ajakan Bapak Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya di depan sidang paripurna DPR-RI tanggal

16 Agustus 1983 yang lalu yang antara lain mengemukakan sebagai berikut :

”Kita teringat kembali gelombang demi gelombang pejuang kemerdekaan dengan senjata sederhana, menyerbu kubu-kubu musuh dengan semboyan : merdeka atau mati. Tidak sedikit mereka gugur di medan laga demi kehormatan kita yang hidup sekarang dalam suasana merdeka.

Karena itu setiap kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan, kita tak henti-hentinya menyampaikan hormat yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas pengorbanan dari semua lapisan, semua golongan dan semua generasi yang puseranya tersebar menghiasi seluruh Tanah Air.

Perjuangan itu akhirnya berhasil karena kita bersatu padu mempertahankan dan menegakkan Negara Proklamasi Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dengan tujuan tunggal menjaga Kemerdekaan Nasional itu kita tidak pernah mempersoalkan suku bangsa, asal-usul, pangkat, kekayaan, agama yang dipeluk di antara kita yang berjuang bersama untuk satu tujuan besar.

Semangat persatuan dan kesatuan yang demikian itulah yang akan terus kita perkokoh untuk bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju cita-cita kemerdekaan dalam zaman pembangunan lahir batin sekarang ini”.

Khusus Saudara-saudara anggota PGRI yang saya cintai, saya sengaja mengawali pembicaraan saya saat ini dengan mengenangkan kembali pe-

istiwa mulia, peristiwa sejarah kepahlawanan yang kita hormati dan kita banggakan, karena PGRI sendiri lahir pada tanggal 25 November 1945, yaitu pada saat-saat bergelornya Revolusi dan Perang Kemerdekaan Bangsa, dengan misi dan motivasi utama adalah sebagai "organisasi perjuangan" dalam berperan serta bersama seluruh rakyat untuk merebut dan menegakkan kemerdekaan.

Sekian banyak rekan-rekan guru yang telah gugur mendahului kita.

Sekian banyak pula anak-anak didik kita tercinta yang terlibat dalam berbagai kesatuan Pelajar Pejuang Bersenjata di seluruh persada Tanah Air telah gugur mendahului kita dan teman-temannya. Itu semua mengetuk pula secara khusus dan langsung pada hati nurani kita untuk melanjutkan amanat perjuangannya dengan jiwa, semangat dan nilai-nilai bangsa yang mereka tegakkan, yaitu jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945.

Dengan landasan kesadaran mengemban amanat perjuangan bangsa yang secara operasional kita bergerak mengisi kemerdekaan dalam sektor pendidikan, sesuai dengan profesi kita sebagai guru, maka seluruh keluarga besar PGRI di seluruh Tanah Air pada saat ini sudah siap mental untuk melanjutkan dan meningkatkan perjuangan mengisi kemerdekaan, berpartisipasi mensukseskan GBHN 1983, Panca Krida Kabinet Pembangunan IV yang akan datang khususnya di sektor pendidikan dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.

Salah satu tugas nasional yang diamanatkan GBHN 1983 yang akan dilaksanakan pada tahun 1984 yang akan datang, bidang pendidikan adalah pelaksanaan Wajib Belajar. PGRI menyadari, bahwa sektor pendidikan, yang salah satu sisinya adalah pelaksanaan Wajib Belajar, merupakan salah satu indikasi kemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan keadilan sosial, perkembangan dan martabat bangsa.

Dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, pelaksanaan Wajib Belajar merupakan bagian integral dari strategi pembinaan masyarakat belajar (learning societies).

Memperhatikan akan jumlah, kualitas, posisi dan peranan kemasyarakatan para guru, khususnya di desa-desa pada saat ini, dan barangkali minimal sampai dengan 20 atau 25 tahun menda-

tang peranan guru tetap akan merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam upaya pembaharuan dan pembangunan pedesaan (agent of modernization and development).

Posisi tersebut akan makin efektif lagi bila program sekolah sebagai pusat kebudayaan, dapat dilaksanakan sebaik-baiknya secara berhasil.

Dalam menghadapi tugas yang besar dan mulia guru-guru sejak dini terpanggil untuk membenahi dan membekali diri dengan persaratan-persaratan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan yang menunjang tercapainya tujuan, baik secara pribadi maupun organisasi. Ia harus disemangati oleh prinsip, sesuai dengan GBHN, bahwa berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia.

Apa yang PGRI lakukan sekarang ini, meskipun mungkin hanya merupakan satu titik air dalam samudra yang luas, adalah manifestasi itikad dan upaya kebersamaan PGRI dalam peran-serta-nya bagi suksesnya pembangunan bangsa.

Penataran Kepemimpinan PGRI sekarang ini mengambil thema "Meningkatkan peranan dan kemampuan PGRI dalam membina dedikasi, keagairahan dan efektivitas belajar masyarakat dalam rangka pembangunan desa".

Usaha ini merupakan langkah awal dan bersifat pilot projek dengan tujuan untuk merintis para guru dan atau pimpinan PGRI untuk memiliki kemampuan menjadi fasilitator belajar masyarakat lingkungannya warga dan atau pimpinan PGRI yang efektif dalam rangka pembangunan desa.

Dengan adanya seorang atau beberapa orang fasilitator belajar (pemandu belajar) kiranya desa atau masyarakat akan dapat memetik banyak manfaat dari padanya.

Dalam melakukan peranannya, seorang pemandu belajar haruslah dijiwai semangat pengabdian para pahlawan bangsa. Segala sikap dan kiprah karyanya memmanifestasikan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Demikian pula melalui

(bersambung ke hal 23)

FUNGSI SEJARAH PERJUANGAN BANGSA BAGI PEMBENTUKAN MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA

Oleh : Ki Soeratman

PENDAHULUAN

DALAM judul ini terdapat dua masalah pokok, ialah pendidikan sejarah dan pembentukan manusia Indonesia. Dari kedua masalah itu perlu dicari hubungannya yang fungsional dalam rangka membina semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia lahir dan batin.

Persatuan dan kesatuan bangsa ini sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia seperti yang telah dimanfaatkan oleh rakyat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk dapat berjuang mencapai tujuannya bangsa Indonesia harus tetap lestari. Oleh karena itu usaha melestarikan bangsa Indonesia merupakan kewajiban setiap warga bangsa Indonesia.

Yang dimaksud lestari bagi bangsa Indonesia tidak sekedar survive sebagai manusia-manusia Indonesia, melainkan lestari dalam arti tetap merdeka, tetap berdaulat, tetap bersatukan tetap berpancasila.

Dikaitkan dengan tujuan dan kewajiban melestarikan bangsa demikian itu, maka perjuangan bangsa Indonesia sekaligus terkait dengan masa depan dan pembinaan bangsa Indonesia (nation-building) yang akan datang.

Sehubungan dengan itu, maka perlu kita telaah sejauh mana pendidikan sejarah dapat ikut berperan dalam pembentukan bangsa Indonesia. Sudah pasti akan dilihat pula kemungkinannya dalam bentuknya sebagai pendidikan formal maupun dalam bentuk pendidikan non-formal.

PENDIDIKAN NASIONAL

Bagi setiap bangsa, maka pendidikan merupakan suatu usaha yang sangat strategis sifatnya untuk mencapai kemajuannya. Dalam membangun dirinya setiap bangsa memerlukan banyak tenaga pembangunan dalam arti kualitatif maupun kuantitatif. Untuk keperluan tersebut pendidikanlah yang merupakan sarana yang paling efektif. Bagi setiap bangsa maka yang dipertanyakan adalah pendidikan nasional bangsa itu sendiri.

Tentang pendidikan nasional, Ki Hajar Dewan-

tara menegaskan, bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis-kodrat hidup bangsanya. Jadi bagi bangsa Indonesia, jika kita mensubstitusikan definisi Ki Hajar tersebut dengan kondisi bangsa Indonesia, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila, sebagai kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Dalam hal ini GBHN-pun sudah pula menegaskan, bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsanya.

Untuk dapat mencapai pendidikan tersebut sudah diusahakan melalui berbagai bidang studi tertentu. Untuk memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, semula digunakan bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Moral Pancasila. Di dalam IPS sudah termasuk pendidikan sejarah, tetapi karena merupakan gabungan dari berbagai cabang ilmu seperti geografi, demografi, dll., maka kadar dan intensitas pendidikan sejarah dirasakan sangat kurang. Hal ini adalah wajar, dan oleh karenanya Bapak Presiden berpendapat bahwa perlu usaha intensifikasi pendidikan sejarah tersebut, terutama mengenai Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.

ARTI PENDIDIKAN SEJARAH

Pendidikan sejarah sebagai salah satu bidang studi tertentu, merupakan komponen dari pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari padanya. Adalah wajar kiranya jika pendi-

dikan sejarah mempunyai tugas pula untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut.

Tentang arti sejarah, Kamus Umum Bahasa Indonesia dari WJS Poerwadarminta menjelaskan sebagai berikut :

Sejarah ;

1. Kesusasteraan lama : silsilah; asal-usul
2. kejadian dan peristiwa yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau.
3. ilmu, pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau; riwayat.

Setelah memperbandingkan dengan berbagai definisi lainnya Drs. M. Ali memberi arti sejarah sebagai berikut :

1. Jumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa dalam kenyataan sekitar kita
2. Cerita tentang perubahan-perubahan dan sebagainya itu
3. Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan dan sebagainya tersebut itu.

Menyesuaikan dengan pengertian di muka, maka Sejarah Perjuangan Bangsa berarti : seluruh uraian tentang perubahan, kejadian dan peristiwa dalam hidup dan perjuangan bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia.

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa adalah pendidikan yang menguraikan tentang seluruh perubahan, kejadian dan peristiwa dalam hidup dan perjuangan bangsa Indonesia.

Dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional, maka PSKB sebagai bidang studi tersendiri akan dapat digunakan untuk mencapai peningkatan kesadaran bangsa dan peningkatan kepribadian bangsa.

EKSISTENSI MANUSIA

Untuk dapat memahami arti manusia seutuhnya, maka perlu kiranya ditelaah eksistensi manusia di masyarakat ini. Sebagai titah Tuhan manusia bereksistensi :

- a. raga - jiwa (cipta - rasa - karsa)
- b. sebagai makhluk individu dan makhluk sosial
- c. berkesadaran Ketuhanan (religiusitas)
- d. berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan.

Semua sifat tersebut adalah kodrati dan dialami oleh setiap manusia. Jadi yang dimaksud dengan pengertian manusia utuh, adalah manusia yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya mengalami keseimbangan dalam perkembangan seluruh potensi kodratinya. Manusia mengakui perkembangan organnya seimbang dengan perkembangan jiwanya. Tentang perkembangan jiwanya ini terdapat keselarasan perkembangan ciptanya, rasanya, dan karsanya (seluruh aspek kognitif, efektif dan psikomotoriknya).

Manusia juga berkembang aspek individualnya di samping juga perkembangan aspek sosialnya secara serasi. Selain segala perkembangan yang sudah diuraikan di muka, maka kesadaran berketuhanannya pun juga berkembang seiring dengan perkembangan potensi lain-lainnya.

Manusia yang berkembang dalam keadaan serasi, seimbang dan selaras seluruh potensi kodratinya itulah yang dimaksud dengan manusia seutuhnya. Bagi bangsa Indonesia, maka manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia Indonesia yang berkepribadian, sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh tujuan pendidikan nasional dalam GBHN, manusia yang berkembang secara bulat, utuh dan menyeluruh.

Tentang kepribadian, MAW Brouwer menegaskan bahwa kepribadian adalah tingkah laku manusia terhadap suatu alam. Kepribadian itu terwujud melalui proses perkembangan dalam dan sepanjang kehidupan manusia. Oleh karena itu kepribadian adalah gejala historis. Manusia berkembang dalam menerima dan memberi dari lingkungannya.

FUNGSI PENDIDIKAN SEJARAH

TAP No. II/MPR/83 tentang GBHN selain menegaskan mengenai pendidikan nasional dengan tujuannya, telah pula digariskan mengenai kebijaksanaan mengenai Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai berikut :

”Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, maka di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta, wajib diberikan pendidikan sejarah perjuangan bangsa”.

Dengan penegasan itu maka fungsi dari PSPB adalah untuk meningkatkan kesadaran nasional sebagai suatu bangsa, menanamkan sikap patriot-

isme, dan merangsang kemampuan yang kreatif dan sikap inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungan hidup di mana kini maupun yang akan datang, serta sebagai usaha pembinaan kepribadian bangsa melalui integrasi dan internalisasi jiwa semangat dan nilai-nilai 1945 dan Pancasila kepada generasi muda.

Dalam bukunya *Mengerti Sejarah*, Louis Gottschalk menilai bahwa Pengajaran Sejarah memang dapat dipergunakan untuk melatih warganegara yang setia, jika memang kisah tanah airnya dapat menimbulkan rasa bangga pada diri kaum patriot.

Arti sejarah dalam kehidupan sehari-hari memang jarang sekali disadari. Seolah-olah belajar di sekolah hanya di sekolah saja dan melulu untuk mendapatkan nilai baik untuk kenaikan kelas dan ujian. Apakah guna belajar sejarah dan apakah tujuan menghafal dan mengingat-ingat nama-nama, tahun-tahun, peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian ?

Drs. R. Moh. Ali dalam *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia* menjawab sebagai berikut :

"Barang tentu nama-nama, tahun-tahun, peristiwa-peristiwa itu tidak ada artinya apabila hanya merupakan hafalan yang mati. Nama-nama dan sebagainya tersebut harus menjadi milik yang hidup, yang dapat digunakan untuk meninjau perubahan-perubahan dan kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari"

Maka jelas betapa pentingnya tentang sejarah untuk kehidupan sehari-hari. Semestinya timbul keharusan untuk memberikan pengertian dalam pelajaran sejarah agar dengan pengertian itu kita mempunyai "alat" untuk dapat menyingkap tabir rahasia gerak masyarakat kita "

Dr. Ruslan Abdulgani dalam *Bukunya Penggunaan Ilmu Sejarah* menegaskan, sbb. : . . . Ilmu Sejarah ibarat penglihatan tiga dimensi, yaitu pertama penglihatan ke masa silam, kedua ke masa sekarang dan kemudian ke masa depan. Maka sejarah masa lampau harus kita pelajari dengan berpijak kepada kenyataan-kenyataan perkembangan situasi sekarang, serta pula dengan menancapkan perkiraan-perkiraan serta harapan-harapan yang berperspektif ke masa yang akan datang . . . "

Sedang Dr. Setiabudhi dalam bukunya *Indie* :

handbook voor Indischen Nationalist (1921) tentang sejarah menerangkan sebagai berikut :
"Pengetahuan tentang fakta-fakta sejarah bukanlah pengetahuan mengenai sejarah

Kita mengerti bahwa sejarah yang sebenarnya ialah sejarah bangsa-bangsa, jadi sejarah umat manusia, dan bukan sejarahnya fakta-fakta; bahwa motif-motif di balik fakta-fakta itulah yang menyebabkan kita mengenal sejarah . . "

Dr. Sunario Waluyo dalam tulisannya tentang *Manfaat Sejarah* menjelaskan bahwa meninjau masa lalu melalui sejarah dapat memberikan kesinambungan yang serasi antara masa lalu, masa kini dan masa depan. Dengan mengetahui keadaan masa lalu, mungkin akan didapat inspirasi perbaikan masa kini untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik.

Sepercik pengalaman sejarah Ki Hajar Dewantara dalam mengelola pendidikan nasional dapat diutarakan sebagai berikut :

Ki Hajar Dewantara menilai bahwa pendidikan kolonial sebagai perwujudan politik kolonial, jiwanya juga kolonial dan sifatnya cenderung intelektualistik. Ki Hajar menentang intelektualisme tersebut (dalam arti terlalu mendewakan intelek), karena anak-anak Indonesia tidak sekedar memerlukan kecerdasan dan kepandaian saja, melainkan lebih dari itu. Anak Indonesia harus menjadi pejuang bangsanya, harus sanggup merebut kembali kemerdekaan nusa dan bangsanya, harus berjiwa dan bersemangat kebangsaan, berbudi pekerti luhur serta memiliki keterampilan untuk memajukan bangsanya.

Dengan tetap mengembangkan akal dan kecerdasan anak didik, maka dalam kurikulum pendidikan Tamansiswa ditambahkan pendidikan moral/budi pekerti, bahasa Indonesia, PENDIDIKAN SEJARAH KEBANGSAAN, pendidikan kesenian, pendidikan ketrampilan, pencak silat dimasukkan pendidikan jasmani.

Di sini jelas bahwa pendidikan sejarah perjuangan bangsa ternyata mempunyai fungsi yang banyak segi. Pertama untuk menanamkan nilai-nilai, dengan contoh fakta-fakta dan peristiwa; kedua untuk dijadikan pisau analisa dalam menentukan strategi perkiraan masa depan dan ketiga untuk menanamkan kesadaran dan kebanggaan nasional bagi generasi muda.

PELAKSANAAN PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

Sudah pasti pelaksanaannya yang bersifat kurikuler melalui pendidikan formal di sekolah. Tetapi jika para penulis sejarah sudah berkesempatan dan berkemampuan menulis buku-buku sejarah yang mantap, maka buku-buku demikian dapat digunakan untuk pendidikan sejarah di bidang pendidikan non-formal. Hal ini dapat dikerjakan di berbagai kegiatan pembinaan generasi muda seperti kepramukaan, karang taruna, balai-balai latihan dan sebagainya.

Pelaksanaan di sekolah selain buku-buku sejarah sesuai dengan kebijaksanaan di atas juga diperlukan lagi berbagai alat-peraga seperti : gambar sejarah, film, video, widya-wisata ke obyek-obyek sejarah dan sebagainya.

Adapun faktor yang memegang peranan sangat penting adalah guru pendidikan sejarah. Kepada mereka dipersyaratkan beberapa hal tertentu, manakala ingin sukses di bidang sejarah tersebut.

Adapun persyaratannya adalah :

- a. seorang patriot, nasionalis dan berjiwa pejuang
- b. seorang yng pancasilais
- c. seorang yang menguasai materi dan memahami akan fungsi pendidikan sejarah perjuangan bangsa
- d. menguasai retorika sehingga mampu menghidupkan tokoh-tokoh sejarah dan peristiwanya.

PENUTUP

Demikianlah sekedar "urusan rembug" mengenai Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa yang kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk melestarikan bangsa Indonesia agar tetap menjadi bangsa yang tetap merdeka, berdaulat, bersatu dan berpancasila diperlukan pembinaan jiwa persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Generasi muda perlu diberikan pendidikan sejarah perjuangan bangsa, agar supaya mereka memiliki kesadaran dan kebanggaan kebangsaan. Dengan kesadaran demikian mereka itu diharapkan akan menjadi penerus sejarah bangsa yang baik.
3. Untuk bisa mensukseskan pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa, diperlukan

guru-pendidik yang selain menguasai materi dan metoda penyajian pendidikan sejarah, harus pula seorang yang berjiwa pejuang dan mampu menghidupkan tokoh dan segenap peristiwa sejarah tersebut.

4. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa mempunyai berbagai fungsi, antara lain untuk :
 - a. menanamkan nilai-nilai dan sikap
 - b. dijadikan pisau analisa dalam perjuangan
 - c. menanamkan kesadaran dan kebanggaan nasional
5. Dengan penelitian seksama dan penulisan buku sejarah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, pendidikan sejarah perjuangan bangsa dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

• • » « • •

FUNGSI PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA DALAM BENTUK MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA

Oleh :

Prof. Dr. Conny Semiawan
Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum

*Ceramah pada Latihan Kepemimpinan PGRI,
di Hotel Wisata Jakarta*

I. Pendahuluan

DALAM rangka menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri seriat bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa serta sesuai dengan filsafat Pancasila, arah kebijakan pendidikan nasional telah dirumuskan dalam Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1983, yang kemudian dijabarkan pada Pasal 31 ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dan tercetus dalam GBHN 1983.

Butir-butir pemikiran dalam arah kebijaksanaan tersebut mengandung amanat dan makna bahwa kurikulum sebagai salah satu wahana utama guna mencapai tujuan pendidikan nasional harus selalu diperbaiki dan disempurnakan menuju pengembangan kurikulum nasional sebagai salah satu upaya pembangunan suatu sistem pendidikan nasional yang mantap dan terpadu.

Sejalan dengan arah kebijaksanaan tersebut, maka dilakukan serangkaian kegiatan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan dasar dan menengah, yaitu Kurikulum 1975/1976/1977, untuk mendeteksi permasalahan sebenarnya. Dari hasil deteksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum dari semua jenis dan jenjang pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal, yang bersifat reguler maupun eksperimental, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan.

Sebagai usaha tindak lanjut, dilakukan motifikasi kurikulum jangka pendek dan pengembangan kurikulum jangka panjang, yang bertitiktolak dari prinsip penyederhanaan dan pemilihan konsep-konsep esensial untuk mewujudkan pola kegiatan belajar-mengajar yang aktif dan kreatif serta bercirikan interpenetrasi antara matra efektif, kognitif, dan psikomotorik guna menyeimbangkan dan menyelaraskan pendidikan berpikir

dan pendidikan humaniora.

II. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa

Salah satu unsur dalam GBHN 1983, yang belum tercantum dalam Kurikulum 1975/1976/1977, adalah Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dalam rangka Pendidikan Pancasila yang terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran nasional sebagai satu bangsa, menanamkan rasa cinta tanah air, dan merangsang kemampuan kreatif dan inovatif dalam menghadapi masa kini dan masa depan serta membina kepribadian bangsa melalui proses integrasi dan internalisasi semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda.

Untuk itu akan ditempuh suatu kebijakan yang menempatkannya sebagai suatu bidang pendidikan dan pengajaran tersendiri yang mengakibatkan pula dilakukannya realokasi waktu pada struktur program setiap jenjang pendidikan.

Isi dan ruang lingkup Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa akan menekankan kepada segi efektif dan inspiratif yang meliputi aspek-aspek penerimaan ("receiving"), penanggapan ("responding"), penilaian ("valuing"), organisasi dan karakterisasi semangat, jiwa serta internalisasi nilai 1945 dan Pancasila melalui pendekatan episode yang mewujudkan respons-aktif yang menyeluruh ("total active response") bangsa terhadap semua tantangan baik dari dalam maupun dari luar.

Menjelang pelaksanaan program Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa secara efektif dan efisien mulai tahun 1984/1985, maka akan disiapkan semua unsur penunjangnya, sedangkan dalam hubungan dengan pengembangan kuri-

kulum jangka panjang persiapan komponen penunjang, pembinaan dan pengelolaan maupun pengadaan sarana, penataran guru dalam evaluasi domain efektif, akan dilaksanakan secara terus menerus. Setiap guru dan pembina perlu benar-benar mendalami komponen-komponen serta implikasi pelaksanaan program PSPB yang meliputi : (1) Kebijaksanaan Pokok; (2) Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), dan (3) Serangkat pedoman dan petunjuk pelaksanaan, seperti pedoman khusus bidang studi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), petunjuk pelaksanaan proses belajar-mengajar, petunjuk pelaksanaan evaluasi, dan pedoman pembinaan. Di samping itu telah dikembangkan pula pedoman, program, materi dan bahan penyerta penataran yang terutama berfungsi mempersiapkan para guru dan pembina.

Secara terperinci unsur-unsur baru dalam GBHN 1983 telah terintegrasi sebagai berikut :

1. Tujuan

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dalam rangka Pendidikan Pancasila bertujuan meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, dengan memberikan penekanan pada matra efektif, yang bersifat inspiratif dan integratif.

2. Struktur Program

Dalam rangka mencapai tujuan seperti yang dimaksudkan, maka kedudukan PSPB ditetapkan sebagai satu bidang studi yang berdiri sendiri yang merupakan bagian terpadu dari program pendidikan umum dan pendidikan humaniora. Waktu yang disediakan untuk PSPB adalah 2 (dua) jam setiap minggu melalui realokasi struktur program setiap jenjang dalam lembaga pendidikan, tanpa menambah jam pelajaran.

3. Materi

Materi PSPB ditetapkan berdasarkan pendekatan episode dalam konteks kurun waktu, mulai dari *era prakemerdekaan*, sampai dengan *era pengisian kemerdekaan*. Pemilihan episode dimulai dari peristiwa setempat yang berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia dan disajikan dalam suatu kebulatan melalui pendekatan multi-dimensional dan konsentris (*spiral-progresif*).

4. Metodologi

Dalam tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantumkan dalam GBHN 1983, terdapat empat butir di antara lima butir tujuan pendidikan yang bermatra efektif, yaitu ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembentukan pribadi kuat, peningkatan budi pekerti, cinta kepada bangsa dan tanah air, di samping yang non-efektif yaitu peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Pusat Kurikulum ditugaskan untuk menterjemahkan secara operasional kelima butir tujuan pendidikan itu dalam kurikulum 1975 sehingga lebih memfokuskan kegiatan pada penelitian interaksi guru-murid dan sumber belajar di dalam kelas. Konsekuensinya adalah bahwa interaksi guru-murid itu seyogyanya dilihat dari segi mendidik dalam arti yang sebenarnya.

Mendidik pada hakekatnya adalah "suatu perlakuan suasana kebersamaan dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu dengan memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menjadi dirinya sendiri". Ini berarti bahwa di dalam proses belajar mengajar (PBM) yang pada hakekatnya adalah suatu pekerjaan mendidik, dan bukan semata-mata mengajar dalam arti teknis, harus terjadi interaksi yang merupakan komunikasi dua arah, sebab manusia pada hakekatnya juga tumbuh dan berkembang dalam hubungan dengan sesamanya. Sudah diketahui, paling tidak secara teoritis, bahwa menjadikan seseorang subyek didik berfikir secara mandiri untuk dapat menjangkau pada tingkah laku yang mampu menghadapi masyarakat Pancasila yang menuju pada peningkatan sains dan teknologi tanpa melupakan landasan efektif dalam pengembangan pribadinya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maupun meletakkan kepentingannya ke dalam dan bertanggung jawab atas kepentingan bangsanya, menuntut suatu interaksi dalam kelas yang tidak semata-mata merupakan pemberian informasi searah dan menyimak tanpa ada kegiatan untuk mengembangkan ide maupun sikap dan keterampilan secara mandiri. Ini berarti bahwa cara-cara pemberian informasi itu dan suasana di mana interaksi itu berlangsung lebih penting dari pada informasi itu sendiri.

Untuk dapat membantu subyek didik di sekolah memahami berpuluh-puluh konsep yang diajarkan di sekolah dengan cara menemukannya sendiri perlu dibedakan "belajar konsep"

(learning concepts) dan "belajar keterampilan proses" (learning process skill).

Belajar konsep, fakta dan prinsip sangat tergantung kepada apa yang diajarkan, sedangkan belajar keterampilan proses dan mengembangkan sikap lebih tergantung kepada bagaimana pelajaran itu diajarkan.

Pengembangan dan penguasaan konsep melalui belajar bagaimana belajar konsep, itulah yang disebut pengembangan keterampilan proses; jadi tekanan daripada perkembangan dan pengajaran subyek didik diletakkan pada proses belajar tentang sesuatu konsep ataupun kejadian dalam lingkungannya.

IV. Kesimpulan

Mendidik subyek didik untuk membangun dirinya sendiri dan mampu bertanggung jawab atas pembangunan bangsanya dalam dunia dan masyarakat yang terus menerus berubah menuntut dia mampu berfikir mandiri untuk memahami dan memperlakukan tuntutan peningkatan teknologi dan sains yang terjadi di dalam lingkungannya.

Pengaruh peningkatan sains dan teknologi pada suatu generasi yang sebagian besar dari dan tumbuh dalam pedesaan, akan mempunyai dampak pada kehidupannya, yang sebelumnya belum dimaminya.

Pertumbuhan dan pendidikan sikap yang sesuai diperlukan supaya tekanan-tekanan hidup sebagai konsekuensi daripada perkembangan sains dan teknologi ini tidak menjerumuskan kita dalam suatu pertumbuhan masyarakat ekonomi yang serba materialistis, konsumtif, individualistis, dan tekad ini dapat diperolehnya dari nilai-nilai yang ditularkan oleh semangat Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.

Apa yang dihasilkan oleh sekolah merupakan persiapan dalam menghadapi tuntutan jaman dan masa depan yang dikaitkan dengan belajar dari masa yang lalu. Untuk ini tidak saja ia harus mewujudkan potensinya secara alamiah dalam menghadapi masa depan, tetapi ia harus juga mampu membangun masa depan itu serta memiliki kemampuan untuk membangun dan menguasai masa depan itu. Di sini faktor kemauan, pengembangan sikap untuk "committed" pada tugasnya (matra afektif) yang mewujudkan tekad itu akan menentukan kecenderungan (tendency)

dan kejadian (event) dari pada masa depan itu. Keterampilan (matra psikomotorik) dan perolehan pengetahuan (kognitif) untuk berfikir mandiri diperoleh dengan pendekatan keterampilan proses itu merupakan interpenetrasi dari ketiga matra yang membuka suasana kognitif dalam perwujudan kreativitas subyek didik, yaitu tahap perkembangan yang tertinggi yang dimiliki oleh manusia, untuk mampu membangun dirinya sendiri dan berperan dalam pembangunan bangsanya.

Dengan bekal sebagaimana teruraikan di atas, subyek didik diharapkan akan memiliki kepekaan terhadap tujuan hidupnya, apa yang diharapkan dari padanya sesuai kemampuan dan minatnya dan bagaimana cara ia memainkan peranannya itu.

• • • • •

SELINTAS TENTANG LATIHAN KEPEMIMPINAN PGRI

23 – 29 Agustus 1983

DI JAKARTA

Latihan Kepemimpinan PGRI telah diselenggarakan di Jakarta, dari tanggal 23 hingga 29 Agustus 1983 yang lalu, atas kerja sama antara PGRI dengan WCOTP dan LO/TCO (Persatuan Guru di Swedia) dengan tema :

”Meningkatkan peranan dan kemampuan PGRI dalam membina dedikasi, kegairahan dan efektifitas belajar masyarakat dalam rangka pembangunan desa”.

Sesuai dengan rencana, peserta latihan kepemimpinan ini merupakan langkah pertama dengan fokus peserta dari daerah-daerah tertentu dan akan diikuti oleh langkah-langkah berikutnya dengan peserta dari daerah-daerah yang lainnya.

Tujuan Latihan :

A. Tujuan Umum :

Pada akhir latihan ini para peserta memilih kemampuan untuk menjadi pemandu belajar masyarakat lingkungannya, warga atau pimpinan PGRI yang efektif dalam rangka pembangunan desa.

B. Tujuan Khusus :

Pada akhir latihan ini para peserta mampu

1. Membangkitkan dan meningkatkan gairah belajar pada sasaran didiknya.
2. Mengenali kebutuhan belajar sasaran didiknya.
3. Mengarahkan kebutuhan belajar sasaran didik kepada kepentingan pembangunan desa.
4. Mengorganisir kelompok belajar.
5. Memberi paduan tentang cara-cara belajar yang efektif.
6. Melakukan evaluasi terhadap hasil belajar.
7. Menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan Pancasila dalam melakukan perannya sebagai pemandu belajar.
8. Memantapkan kesadaran berorganisasi.
9. Menegakkan wibawa dan martabat guru.

10. Memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pembangunan lingkungannya.

Peserta :

Latihan kepemimpinan PGRI ini diikuti oleh 42 orang peserta, dengan perincian sbb. :

	PD	PC	PAC	Jumlah
Lampung	1	2	4	7 orang peserta
D K I	1	2	4	7 orang peserta
Jawa Barat	1	5	10	16 orang peserta
B a l i	1	2	4	7 orang peserta
P B	-	-	-	<u>5 orang peserta</u>
				42 orang peserta

Prasaran/kertas kerja yang disampaikan pada latihan kepemimpinan ini adalah :

1. Fungsi pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dalam membentuk Manusia Indonesia seutuhnya.
oleh : Prof. Dr. Conny Seniawan, dari BP3K Depdikbud.
2. Peranan Guru dalam rangka implementasi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa
oleh : Dr. Nyoman Dekker, S.H., Direktur Pendidikan Guru & Tenaga Teknis Depdikbud.
3. Peran PGRI dalam Pembangunan Desa
oleh : Drs. Is Riwidikdo
4. Kebijakan dan Program Pembangunan Desa
oleh : K. Kadi Direktur Jenderal Pembangunan Desa.
5. Memantapkan Pemasayarakatan Pancasila dan UUD 1945.
oleh : Prof. Padmo Wahjono, S.H., BP-7 Pusat.

6. Fungsi Sejarah Perjuangan Bangsa bagi Pembentukan Manusia Indonesia seutuhnya.
oleh : Ki Soeratman.

7. Ceramah tentang Persatuan Guru di Swedia
oleh : Mr. Lennart H. Forsell, LO/TCO Swedia.

Latihan ini diselenggarakan di Hotel Wisata International, Jakarta. selama 7 hari.

Latihan ini bersifat partisipatif, artinya sejauh mungkin para peserta dilibatkan secara aktif didalam proses belajar, dan telah pula disusun sebuah kurikulum dan dijabarkan dalam sebuah jadwal. Untuk mencapai semuanya itu digunakan bermacam-macam metoda, agar dapat dicapai hasil belajar secara maksimal, dan sekaligus para peserta mengalami sendiri bermacam-macam metoda, sehingga dapat menilai metoda mana yang paling tepat untuk sesuatu tujuan dari penyampaian sesuatu materi. Adapun metoda yang digunakan ialah :

- Diskusi Umum
- Diskusi Kelompok
- Simulasi
- Permainan peranan

- Blind trust (main si Buta)
- Curah pendapat
- Ceramah
- Lokakarya
- Diskusi panel - Seminar

Selama latihan ini berlangsung Mr. Mathews, Mr. Rajaguru yang mewakili WCOTP dan Mr. Lennart Forsell yang mewakili LO/TCO terus menerus mendampingi seluruh kegiatan karena persamaan bahasa maka tidak mengalami kesulitan hanya bagi wakil dari Swedia selalu didampingi oleh ketua panitia untuk menterjemahkan baik penyampaian kertas kerjanya maupun dalam menanggapi tanya jawab.

Kesimpulan :

Dari lembaran evaluasi yang dibagikan kepada seluruh peserta dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pelajaran bermanfaat, sesuai dengan minat dan jelas penyajiannya. Penilaian para peserta maupun oleh wakil-wakil dari WCOTP dan LO/TCO latihan ini mencapai tujuan yang ditetapkan dan oleh karenanya merupakan suatu sukses.

(Sambungan hal 14)

penunai tugasnya, ia sesungguhnya mengamalkan Kepemimpinan Pancasila dalam mengabdikan kepada masyarakat dan pembangunan bangsa.

Karena pelaksanaan usaha yang sangat penting ini terkait pada panggilan dimilikinya dedikasi, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman guru yang bersangkutan, maka ia harus memiliki pengetahuan dan kesadaran akan status, tugas dan panggilan profesinya secara mantap bagi Bangsa dan Negara serta kemanusiaan umumnya. Ia berkarya tidak berdiri sendiri, akan tetapi melalui prinsip kebersamaan dan terjun dalam masyarakat terorganisir di bawah panji PGRI dengan segala misi dan peranannya.

Selanjutnya, izinkanlah PGRI dengan segala kerendahan hati untuk menyampaikan terima kasih, pertama, kepada Pemerintah dalam hal ini Bapak Menteri P dan K yang telah merestui penye-

lenggaraan penataran ini dengan segala perizinan bagi para peserta yang datang dari daerah-daerah serta partisipasinya dalam pengisian acara-acara yang telah direncanakan. kedua, kepada LO/TCO - Swedia dan secara pribadi kepada Mr. L. Forsell serta kepada WCOTP dan secara pribadi kepada Mr. A. Mathews dan Mr. Rajaguru atas segala bantuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan penataran ini.

ketiga, kepada Bapak Dirjen Bangdes Departemen Dalam negeri, Bapak Ketua BP-7. Prof. Dr. Conny Semiawan beserta BP3K-nya, para pemrasaran, para moderator, para penulis, para peserta, panitia, para Ibu/bapak Guru dan anak didik tercinta pembawa paduan suara dan semua pihak atas segala bantuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan penataran ini.

Akhirnya kepada Bapak Menteri P dan K, Mr. L. Forsell a.n. LO/TCO Swedia dan Mr. A. Mathews

a.n. WCOTP kami mohon untuk menyampaikan amanat dan sambutannya pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kepada Bapak Menteri P dan K kami mohon pula untuk membuka dengan resmi penataran ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi agar penataran ini dapat berjalan lancar dengan sukses. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PENGURUS BESAR
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(PGRI)
Ketua Umum,
ttd.

H. BASYUNI SURIMIHARJA

— « » —

(Sambungan hal 12)

Demikian besar tugas-tugas pembangunan di hadapan kita., demikian banyak tantangan-tantangan yang harus kita tundukkan, maka pembangunan itu akan berjalan selamat dan memberi kebahagiaan lahir batin kepada kita semua, jika kita dapat membekali diri dengan sikap rohani yang bersih dan ahlak yang luhur. Untuk itu, lebih-lebih karena kita adalah bangsa yang kuat rasa keagamaan kita, maka pembangunan kehidupan keagamaan juga harus kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Sebagai umat beragama dalam Negara Pancasila yang sedang membangun, maka tugas umat beragama di negeri ini adalah mengamalkan sebaik-baiknya ajaran agama masing-masing dalam mengemban tugas bersama untuk membangun bangsa dan negara ini. Untuk itu pula, maka seperti yang ditunjukkan oleh GBHN, kita akan melanjutkan pengembangan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan di antara semua umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

Sidang Dewan yang saya muliakan;

Sekarang, izinkan saya menguraikan kerangka pelaksanaan Krida kedua, ialah meningkatkan pendayagunaan aparatur negara menuju terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Krida ini merupakan prasyarat yang penting, lebih-lebih karena tahun-tahun mendatang kita akan meningkatkan dan memperluas pembangunan yang memasuki tahap tinggal landas. Aparatur negara kita — baik sipil maupun ABRI — memainkan peranan yang besar dan sentral dalam kehidupan bangsa dan negara kita sampai sekarang, khususnya dalam menggerakkan pembangunan. Yang penting kita jaga adalah agar aparatur yang kuat itu tetap dapat memberi ruang gerak dan kegairahan bagi prakarsa-prakarsa masyarakat sendiri dalam mengambil peranan dalam kiprahnya pembangunan. Karena itu peningkatan pendayagunaan aparatur tidak hanya menyangkut segi-segi efisiensi dan administratif belaka, melainkan yang juga tidak kalah penting ialah pengembangan dedikasi dan motivasinya untuk mengantarkan bangsa dan negara ke tingkat yang lebih maju dalam sejarahnya. Dengan demikian maka pemerintahan yang bersih dan berwibawa memperoleh arti yang lebih dalam, bukan saja sebagai aparatur yang tidak korup, yang tidak menyalahgunakan kekuasaan atau sifat-sifat tercela lainnya; melainkan aparatur yang mampu menjadi kekuatan pendorong pembaharuan dalam masyarakat, mengantarkan bangsa Indonesia tinggal landas membangun dengan kekuatan sendiri.

Pemanfaatan pemerintahan yang bersih dilakukan dengan kerangka sistem dan langkah yang terpadu, baik pencegahan maupun penindakan. Di samping perbaikan organisasi, ketatalaksanaan dan personalia yang terus menerus di semua jajaran dan tingkatan aparatur pemerintahan, maka sistem dan langkah-langkah pengawasan dikembangkan lebih konseptual. Demikian penting pengawasan ini, sehingga tidak kurang dari Saudara Wakil Presiden yang menangani masalah ini. Di samping itu, ada Menteri Negara yang secara khusus melakukan pengawasan pembangunan, ialah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi,

BERSAMBUNG

Tema HAPSAK Pancasila 1983 :

DENGAN HAPSAK PANCASILA KITA TINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANCASILA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto telah menyatakan persetujuan dan menetapkan tema Hari Peringatan Kesaktian (HAPSAK) Pancasila tahun 1983 adalah : "Dengan Hari Peringatan Kesaktian Pancasila Kita Tingkatkan Pembangunan Masyarakat Pancasila". Demikian dikemukakan belum lama ini oleh Dirjen Kebudayaan, Prof. Haryati Soebadio pada kesempatan memimpin rapat mempersiapkan penyelenggaraan upacara HAPSAK Pancasila 1983. Upacara itu sendiri seperti halnya tahun-tahun yang lalu akan dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta. Sementara itu di Yogyakarta pun akan diselenggarakan upacara yang sama. Kemudian upacara juga akan diinstruksikan untuk diselenggarakan di kantor-kantor Instansi Pemerintah dan Swasta, Perwakilan RI di Luar negeri, di Daerah-daerah baik dari tingkat Propinsi sampai ke tingkat RW/Kampung-kampung, dan tidak ketinggalan di sekolah-sekolah maupun di Kampus. Khusus untuk di sekolah maupun di Kampus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan akan memberikan pidatonya secara tertulis. Sifat upacara adalah sederhana, hidmat dan tertib.

Pelaksanaan Upacara

Panitia merencanakan, penyelenggaraan Upacara Puncak di Lubang Buaya akan dimulai tepat pada jam 08.00 WIB. Bertindak sebagai Inspektur untuk memimpin upacara adalah Kepala Negara sendiri, Presiden Soeharto. Pejabat lain yang akan hadir dan terlibat dalam rangkaian upacara adalah Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah; Ketua MPR, Amir Machmud membacakan naskah Pancasila; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Nugroho Notosusanto, membacakan Pembukaan UUD 1945; Ketua DPR, membacakan Ikrar; Menteri Agama, Prof. Munawir Sadzali, membacakan Do'a Sedangkan pokok-pokok kegiatan upacara akan terdiri dari : Penghormat-

an Kebesaran, Laporan Komandan. Upacara, Mengheningkan Cipta, Pembacaan naskah Pancasila, Pembacaan Pembukaan UUD 1945, Pembacaan dan Penandatanganan Ikrar, Pembacaan Do'a, Andhika Bhayangkari, Laporan Komandan Upacara, kemudian diakhiri dengan Penghormatan Kebesaran. Akan bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Letkol. Pol. Drs. Simatupang. Seperti halnya tahun-tahun yang lalu kesatuan upacara akan terdiri dari satu kompi pelajar SD; satu kompi pelajar SMTP; satu kompi pelajar SMTA; satu kompi Pramuka; satu kompi Mahasiswa Jakarta; satu kompi Pemuda/KNPI, dan masing-masing satu kompi Protokol dari TNI-AD, AU, AL dan POLRI. Kemudian tidak ketinggalan adalah satu kompi KOWABRI yang merupakan gabungan dari KOWAD, KOWAL, WAR, dan POLWAN, masing-masing satu peleton; dan juga ikut pula satu kompi Taruna AKABRI, serta Unit Korsik Gabungan dari PASWAL PRES dan KOPASANDA. Sebelum pelaksanaan upacara pokok yang dipimpin oleh Presiden, satu regu pelajar Teladan dari DKI Jakarta akan mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Pengibaran bendera itu akan dilakukan pada jam 06.00 WIB. Kegiatan upacara pokok yang dimulai jam 08.00WIB diharapkan akan selesai pada jam 08.17. Sehingga dapat digambarkan keseluruhan upacara itu sendiri hanya akan berlangsung sekitar 17 menit.

KURIKULUM SMP/SMA 1975 SANGAT PENTING DAN STRATEGIS

PROGRAM pendidikan ketrampilan merupakan salah satu program pendidikan yang tercantum dalam kurikulum SMTP/SMTA 1975 yang sangat penting dan strategis dalam memberikan bekal ketrampilan dasar yang dapat dikembangkan dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi kepada para lulusan SMTP/SMTA untuk terjun ke masyarakat.

Hal itu dikatakan Dirjen Dikdasmen Dikdikbud Prof. Darji Darmodiharjo, S.H. sewaktu membuka Rapat Koordinasi Proyek Pembinaan dan Penguasaan Alat Pelajaran Ketrampilan SLU (P2APK-SLU) yang diadakan di Hotel Purnama, Cipayang Bogor, 5 September 1983.

Dikatakan bahwa untuk dapat menyediakan tenaga-tenaga pembangunan, maka pendidikan keterampilan di SMP dan SMA haruslah dapat mendidik siswa agar menjadi terampil, cekatan, menghargai pekerjaan fisik di samping pekerjaan intelektual dan dapat menerapkan teknologi di dalam kehidupan kita sehari-hari.

— Bentuk Pendidikan Keterampilan

Pendidikan keterampilan di SMTP dan SMTA diharapkan pada dua pilihan yaitu : di SMTP keterampilan pilihan bebas dan keterampilan terikat, sedangkan untuk SMTA keterampilan penunjang teori dan keterampilan pravokasional.

Pendidikan keterampilan terikat (di SMTP) dan pendidikan keterampilan pravokasional (di SMTA) menumbuhkan dan membina keterampilan dasar dan kemampuan praktis yang meliputi gabungan dari kemampuan logika, etika dan estetika yang keseluruhannya merupakan proses kebudayaan, oleh karena itu sekolah dapat menjadi pusat kebudayaan.

Dengan alat pendidikan keterampilan, ungkap Dirjen, kita dapat memperjelas apa yang diajarkan; memberikan pengalaman praktek kerja dan keterampilan, memperkenalkan alat dengan teknologi baru serta menumbuhkan sikap aktif, kreatif, produktif dan ekonomis.

Menurut Darji, untuk menunjang keberhasilan tersebut perlu tersedianya alat-alat, tenaga ter-

latih, ruang khusus dan berbagai buku/bahan bacaan yang berkaitan erat dengan jenis pekerjaan terbuka di masyarakat, serta buku-buku yang sesuai dengan yang diajarkan di sekolah.

Dirjen Dikdasmen menandakan, sekolah juga diharapkan dapat menambah/mengadakan sendiri buku-buku/bahan-bahan tersebut melalui : dana rutin/SPP-DPP, sumbangan/bantuan dari BP3/POMG dan masyarakat serta buku-buku yang disusun oleh guru dan karya tulis siswa dalam bidang pendidikan keterampilan

— 4.469 Set Alat Keterampilan

Dalam REPELITA III (1979/80 – 1983/84) P2APK-SLU mengadakan 4.469 set alat keterampilan untuk SMP dan SMA baik negeri maupun swasta se Indonesia.

Untuk tahun 1979/80 703 set oleh proyek pusat yang terdiri dari SMP 448 set, SMA 211 set dan revisi 44 set dengan alokasi dana Rp 1.091,06 juta; tahun 1980/81 554 set oleh pusat terdiri dari SMP 331 set, SMA 139 set dan revisi 84 set dengan dana Rp 1.100 juta; tahun 1981/82 333 set oleh pusat terdiri dari SMP 202 set, SMA 105 set dan revisi 46 set dengan dana Rp 1.235 juta; sedangkan untuk tahun 1982/83 1.565 set oleh pusat dan daerah yang terdiri dari pusat SMP 806 set + contoh 41 set, SMA 171 set + contoh 49 set dan oleh proyek daerah SMP 588 set dengan dana Rp 2.776,3 juta.

Sedang untuk tahun 1983/84 sebanyak 1.204 set dan oleh proyek pusat dan daerah terdiri dari oleh pusat SMP sebanyak 400 set dan oleh daerah SMA 804 set dengan alokasi dana Rp 1.816,65 juta.

Alat keterampilan tersebut terdiri dari 6 jenis yaitu : Jasa, Teknik, PKK, Pertanian, Kerajinan, dan Maritim.

Pengadaan tersebut dilaksanakan oleh P2APK-SLU di daerah/wilayah. Jenis alat-alat itu ialah : Otomotip, elektronika, pertukangan kayu, peternakan, keramik dan maritim (perikanan laut dan maritim) diadakan oleh proyek induk; sedangkan bagian proyek di daerah/wilayah mengadakan :

tatalaksana makanan, tatalaksana pakaian, tatalaksana rumah tangga, perikanan darat, pertanian, anyaman dan ukiran-ukiran.

Pimpinan Proyek P2APK-SLU, Darmansyah Hasan dalam laporannya pada rakor tersebut mengungkapkan, berdasarkan hasil pengamatan tim khusus penyelenggaraan pendidikan Maritim di SMP/SMA selalu meningkat setiap tahunnya seperti pada tahun 1979/80 baru ada 2 Sekolah se Indonesia, sedangkan pada tahun 1982/83

meningkat menjadi 54 sekolah dan pada tahun 1983/84 akan dikembangkan menjadi 232 sekolah.

Rakor berlangsung 4 hari dari tanggal 5 sampai 8 September 1983 diikuti 65 orang peserta dari pemimpin dan bendaharawan proyek dan bagian proyek pembinaan dan pengadaan alat pelajaran keterampilan sekolah lanjutan umum (P2APK-SLU) se Indonesia di Cipayung, Bogor.

PRA SELEKSI MEMASUKI PERGURUAN TINGGI DILAKSANAKAN TAHUN INI

Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Ka Balitbangdikbud) mengatakan pelaksanaan pra seleksi bagi murid SMTA yang hendak memasuki perguruan tinggi negeri akan dilaksanakan bulan Oktober sampai November mendatang.

Pra seleksi ini selain melihat hasil ebtanas juga melihat prestasi belajar murid di kelas I dan II, yakni melalui nilai raportnya. Melalui penilaian dari beberapa mata pelajaran yang dijadikan indikator maka akan terdapat tiga kategori siswa. Pertama mereka yang memiliki prestasi konsisten sejak kelas I hingga kelas III dapat langsung memasuki perguruan tinggi tanpa melalui ujian saringan masuk; kedua, mereka yang memiliki prestasi baik sehingga memenuhi persyaratan belajar di perguruan tinggi dan mereka ini berhak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi; ketiga, mereka yang dianjurkan tidak mengikuti pelajaran di Perguruan tinggi, karena memang tidak berbakat untuk itu mereka dianjurkan menempuh pendidikan praktis.

Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar mengemukakan hal itu pada kesempatan konperensi pers yang didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Doddy Tisna Amijaya dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Darji Darmodiharjo, S.H. Kamis, 8 September 1983, di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Maksud diadakannya pra seleksi ini adalah untuk memilih secara adil dan tepat guna agar anak yang masuk ke perguruan tinggi itu benar-benar mampu baik material maupun intelektual dan di samping itu juga untuk menanggulangi kekecewaan anak yang mengikuti ujian saringan masuk perguruan tinggi.

— Proyek Perintis Dihapuskan

Prof. Dr. Doddy, mengatakan pra seleksi ini dalam menilai prestasi belajar anak lebih jauh lagi, yakni seperti yang dilakukan Proyek Perintis II dengan pemaduan bakat. Dengan diadakannya pra seleksi ini maka penerimaan mahasiswa baru melalui Proyek Perintis I s/d IV dihapuskan. Sebetulnya pra seleksi ini merupakan kombinasi dari proyek perintis yang berlaku selama ini.

Pra seleksi ini dilaksanakan secara nasional untuk seluruh sekolah di Indonesia baik negeri maupun swasta yang seluruhnya berjumlah sekitar 6500 sampai 7000 SMTA.

— Sistem Rayon

Prof. Doddy lebih lanjut menjelaskan, ujian penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri itu akan diatur melalui sistem rayon berdasarkan penyebaran jumlah SMTA dan juga jumlah Perguruan Tinggi Negeri yang dapat menangani ujian masuk tersebut.

PEMBERANTASAN BUTA HURUF MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL PEMBANGUNAN

Hari Aksara Internasional 1983 di Blitar Meriah

PERINGATAN Hari Aksara Internasional ke 18, tanggal 8 September 1983 telah berlangsung meriah dengan pemusatan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ribuan warga Blitar Kamis pagi 8 September itu tampak memenuhi halaman dan jalanan sekitar Pendopo Kabupaten sebagai tempat pemusatan upacara. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto beserta Ibu dengan didampingi oleh Gubernur Jawa Timur yang baru, Wahono hadir di Blitar dan memimpin sendiri pelaksanaan upacara peringatan Hari Aksara tersebut. Suasana di Jawa Timur sendiri yang untuk tahun ini memperoleh kesempatan sebagai tuan rumah pemusatan peringatan dengan menunjuk Blitar sebagai tempat upacara, tampak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh sehingga nafas daerah setempat untuk memperingati dan menghayati akan makna Hari Aksara Internasional tampak terasa pada jalan-jalan utama di tiap-tiap Kabupaten dengan pemasangan spanduk, dan juga umbul-umbul. Puncak kemeriahan sangat terasa di kota Blitar sendiri bertepatan dengan hari berlangsungnya peringatan. Di samping penyelenggaraan pameran sekitar usaha pemberantasan buta huruf dan pelaksanaan program Kejar Usaha yang diikuti oleh Pemda beserta unsur Pendidikan Masyarakat dari Kabupaten se wilayah Keresidenan Kediri, juga tampak dimeiahkan dengan berlangsungnya Pawai dalam bentuk karnaval oleh kelompok-kelompok belajar Paket A dari seluruh desa di Kabupaten Blitar yang jumlahnya tidak kurang dari 248 desa dengan sekitar 2.500 orang warga belajar. Indonesia sebagai negara Unesco pada hari itu, 8 September bersama-sama dengan bangsa lain memang telah berniat untuk ikut memperingati Hari Aksara Internasional yang dicetuskan delapan belas tahun yang lewat melalui Konferensi Menteri-menteri Pendidikan di Teheran. Tujuannya, agar kita dapat memperbaharui tekad dan melanjutkan serta meningkatkan perjuangan dalam rangka menghapuskan buta huruf.

Kewajiban Bersama

Ditandakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto pada pidato peringatan tersebut, pertama kali yang harus diingat bahwa perjuangan memberantas buta huruf itu adalah kewajiban bersama Pemerintah, masyarakat dan keluarga, seperti juga bidang pendidikan luar sekolah seperti kelompok-kelompok belajar yang meliputi warga belajar beserta pembina, monitor dan tutor. Di dalam masyarakat, menurut menteri, segenap kekuatan sosial harus melibatkan diri, khususnya organisasi-organisasi pendidikan, agama, wanita, pemuda. Dalam hal ini kita sudah mempunyai tradisi pemberantasan buta huruf sejak jaman Perang Kemerdekaan, tatkala sambil bergerilya para pejuang mengajarkan baca-tulis-hitung kepada rakyat yang tuna-aksara.

Pada keluarga, perihal usaha pemberantasan buta huruf ini harus diberikan terhadap anggota yang masih memerlukannya. Di Indonesia terhadap keluarga-keluarga yang diperluas meliputi anggota-anggota keluarga yang ikut tinggal serumah dalam pelbagai rumah tangga. Ada pula para pramuwisma.

Dinyatakan pada bagian lain pidatonya, kita perlu melakukan penyadaran diri kembali, bahwa pemberantasan buta huruf merupakan bagian integral daripada Pembangunan Nasional dalam rangka emansipasi total rakyat. Pemberantasan buta huruf harus dikaitkan secara erat dengan prioritas-prioritas ekonomi dan sosial serta kebutuhan sumberdaya manusia pada masa kini dan masa depan.

Proses belajar baca-tulis itu harus dijadikan kesempatan untuk memperoleh informasi guna latihan kerja, produktivitas yang meningkat serta partisipasi dalam kehidupan bernegara. Harus pula memberikan kemampuan untuk pengertian yang lebih baik terhadap dunia sekitar serta membuka jalan ke arah budaya dasar manusia. Karena itu perayaan kali ini berthemakan : "Meningkatkan Pendidikan Dasar Yang Terpadu dengan Pendidikan Mata Pencaharian". Suatu

usaha menegakkan kemampuan aksara harus sejalan dengan kemampuan upajawa, demikian Menteri Nugroho.

Ditunjuknya Jawa Timur dengan Kabupaten Blitar sebagai tempat pemusatan Upacara Hari Aksara Internasional tahun ini, adalah merupakan kehormatan dan mempunyai arti tersendiri. Sejak awal Pelita III Jawa Timur dengan intensitas dan semangat yang tinggi telah bergairah melaksanakan usaha pemberantasan buta huruf. Jalur pemberantasan yang ditempuh sebagai dilaporkan oleh Gubernur Wahono, melibatkan keterpaduan antara aktivitas Pemerintah, bersama-sama dengan segenap lapisan masyarakat, khususnya melalui gerakan PKK, dengan intinya Dharma Wanita. Pada setiap desa dibentuk Kelompok Belajar Pendidikan Dasar (KBPD), yang dibina oleh kader-kader PKK sebagai tutor dan monitor. Referensi kepustakaan yang mendukung ialah Buku Paket A, terutama Paket A1 sampai dengan 10. Pada lomba KBPD tingkat Nasional tahun lalu Kabupaten Blitar dengan mewakili pada KBPD dari desa Suru telah berhasil keluar sebagai juara pertama. Tahun 1983 ini, Jawa Timur meraih kembali kejuaraan tingkat Nasional dengan Kabupaten Pacitan sebagai juara III. Kesemuanya ini, menunjukkan bahwa perhatian Daerah Tk. II kepada masalah pendidikan pada umumnya, dan pemberantasan tiga kebutaan pada khususnya, cukup besar dan mengembirakan.

Menjadi Momentum.

Gubernur Jawa Timur, Wahono mengajak agar peristiwa nasional peringatan Hari Aksara Internasional yang dipusatkan di Blitar itu dapat dijadikan momentum untuk lebih meningkatkan gerakan pemberantasan buta huruf, disertai upaya pelestarian hasil-hasil yang telah dicapai. Lebih dari itu kualitas KBPD di seluruh Jawa Timur perlu untuk ditingkatkan terus. Dikatakan, secara kuantitatif, jumlah penduduk Jawa Timur yang kini masih terhambat oleh tiga kebutaan, tinggal sebanyak 2,9 juta orang, sedangkan pada tahun 1980, berdasarkan hasil sensus penduduk, masih sebanyak 4,7 juta orang.

Khususnya di Blitar sebagai dilaporkan oleh Bupati Sardjono, dari jumlah penduduk 1.009.783 orang, 53.179 orang diantaranya yakni yang berumur 7 – 44 tahun masih belum bebas dari tiga kebutaan. Namun demikian dari sejumlah itu telah terjaring oleh pemberantasan Tiga Buta yang dilakukan oleh Kejar Paket A Kabupaten Blitar. Pada saat ini di Kabupaten Blitar terdapat 5.385 Kejar Paket A, dengan jumlah tutor sebanyak 7.665 orang. Dapat ditambahkan, dalam kunjungannya merayakan Hari Aksara di Blitar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Nugroho beserta Nyonya dengan diantar oleh Gubernur Wahono, telah berkesempatan mampir ke desa Suru, Kecamatan Doko guna meninjau KBPD setempat yang dalam kegiatannya telah berhasil menjuarai lomba nasional pada tahun lalu.

MENCARI TENAGA PENGAJAR

Untuk SMA-PGRI Maumere, Jln. Kelimutu, Maumere – Flores, diperlukan 2 (dua) orang tenaga pengajar, masing-masing untuk mata-pelajaran *Kimia* dan *Fisika*.

Syarat : – Ijazah Program D3/Sarjana Muda
– Masih bujangan
– Sanggup berjuang.

Gaji : Menurut Peraturan Pemerintah
Tarnspor : – Dari tempat tinggal sampai ke Maumere akan ditanggung oleh Pengurus SMA –PGRI

Maumere, Jln. Kelimutu, Maumere.

– Supaya digunakan kereta api/kapal laut/bis.

Perumahan : Disediakan.

Para peminat supaya langsung berhubungan dengan Kepala SMA – PGRI Maumere, Jln. Kelimutu, Maumere – Flores.

Pengurus YPLP – PGRI Pusat
Jln. Tanah Abang III/24
Jakarta Pusat

Mendikbud :

WAJIB BELAJAR HARUS DILAKSANAKAN MEI 1984

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notosusanto mengingatkan bahwa mulai bulan Mei 1984, yang merupakan awal Pelita IV program wajib belajar untuk seluruh bangsa Indonesia harus sudah dilaksanakan, walaupun Undang-Undang Wajib Belajar belum siap.

Hal itu diungkapkan Mendikbud di Ujungpandang Senin pagi tanggal 22 Agustus 1983, dalam acara tatap muka dengan seluruh jajaran Kanwil P dan K Sulawesi Selatan.

Dalam hubungan persiapan program tersebut Menteri menekankan perlunya kecermatan dan ketelitian parapengajar terutama di daerah-daerah karena pelaksanaan wajib belajar akan dilakukan dengan prioritas di daerah-daerah.

Oleh karena itu harus diperhatikan kekhasan daerah masing-masing, karena sesungguhnya kita akan membawa masyarakat ke alam modernisasi tanpa meninggalkan landasan budaya Indonesia yang sudah berakar di masing-masing daerah.

Sealain wajib belajar ini, pada tahun depan diharapkan juga sudah dapat dicanangkan secara resmi penerapan P4 di seluruh Indonesia.

Dalam penerapan P4 ini Menteri menekankan khusus untuk perguruan tinggi negeri akan diatur oleh Rektor masing-masing dan untuk perguruan tinggi swasta dilakukan oleh Kopertis.

Nugroho Notosusanto juga menekankan agar pokok-pokok rumusan yang sudah digariskan dalam Rakernas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1983 di Jakarta, perlu mendapatkan perhatian besar, karena pendidikan adalah suatu masalah yang berat untuk saat ini maupun di masa mendatang.

Hasil Rakernas tersebut secara umum menyimpulkan dua langkah yang perlu segera dilaksanakan dalam kurun waktu akhir Pelita III dan lima tahun Repelita IV, sehingga harus mampu dijabarkan secara baik oleh aparat Departemen P dan K di daerah-daerah.

Menteri menyebutkan kesimpulan Rakernas itu yakni, pertama, langkah intensif berupa rumusan program dan kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan, menyesuaikan isi pendidikan

an dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan.

Kedua, merupakan langkah ekstensif yang meliputi program dan kegiatan untuk lebih memperluas pelayanan pendidikan, penyediaan sarana dan pembinaan peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Universitas Tadulako

Mendikbud, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto ketika meresmikan penggunaan gedung kuliah Fakultas Pertanian Universitas Tadulako (Untad), yang terletak 6 km sebelah timur kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin sore tanggal 22 Agustus 1983.

Hadir pada peresmian penggunaan gedung tersebut Gubernur Sulteng Galib Lasahido, Bupati Donggala dokter Yan Moh. Kaleb, Walikota Palu drs. H. Kiesman Abdullah serta undangan lainnya.

Menteri Nugroho pada kesempatan tersebut menggaris bawahi arti penting peristiwa tersebut yang dikatakan merupakan tonggak sejarah bagi kampus Tadulako dan merupakan juga bagian dari sejarah bangsa Indonesia.

Kampus Bumi Tadulako dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang akan mempunyai 10 fakultas menggantikan lima fakultas yang kini berada di gedung lama yaitu kampus Bumi Nyiur yang terletak kini terpisah-pisah di kota Palu.

Menteri mengisyaratkan bahwa peresmian gedung kuliah fakultas pertanian tersebut sangat penting karena letaknya di desa Tondo disalah satu bukit yang gersang.

Ia mengharapkan dalam waktu yang panjang atau kalau mungkin 100 tahun lagi peristiwa ini akan selalu dikenang baik oleh para alumnus Universitas Tadulako maupun masyarakat Sulteng.

Menampung 720 mahasiswa

Pemimpin proyek Universitas Tadulako Ari-fuddin Bidin dalam laporannya mengatakan, pembangunan gedung ini merupakan yang per-

tama dibangun secara besar-besaran di Sulteng.

Luas lokasi kampus seluruhnya 250 hektar, di mana untuk gedung Fakultas pertanian ini saja seluas 1360 m² dan dapat menampung maha-

siswa sebanyak 720 orang.

Dalam anggaran pembangunan tahun 1982/1983 untuk proyek pengembangan Universitas Tadulakon ini dananya berjumlah Rp 509.775.000,00.

PERANAN UNIVERSITAS DALAM PEMBANGUNAN SANGAT MENENTUKAN

PERANAN Universitas dalam pembangunan sangat menentukan karena ia menyediakan "brain-power" bagi pembangunan daerahnya walaupun Universitas merupakan lembaga nasional.

Ia teguh berdiri pada bumi daerahnya melaksanakan program nasional dalam konteks daerahnya, demikian sambutan Mendikbud Prof. Dr. Nugroho Notosusanto pada perayaan ulang tahun II Universitas Haluoleo (Unhalu) di Kendari, tanggal 25 Agustus 1983 yang lalu.

Menteri menambahkan bahwa pembangunan baik dilihat secara nasional, maupun dalam konteks daerah tidak hanya meliputi segi-segi fisik, melainkan juga meliputi segi mental. Dalam hal ini menyangkut pembentukan nilai-nilai yang seringkali meliputi pula reinterpretasi terhadap tradisi-tradisi lama. Tradisi-tradisi yang tidak sesuai lagi dengan pembangunan masyarakat, tidak sesuai dengan tuntutan pembangunan, harus diberi makna baru, walaupun tidak harus diganti sama sekali.

"Di sinilah peranan universitas tampak menonjol. Ia dapat dan memang harus menjadi pelopor dalam usaha pembentukan nilai-nilai baru atau pemberian nilai baru pada tradisi-tradisi lama.", kata menteri sambil mengharapkan Universitas Haluoleo tidak mengingkari darmanya walaupun ia masih merupakan universitas yang masih sangat muda.

"Universitas yang masih muda ini pada kenyataan kini berada pada salah satu propinsi yang termuda di mana ia berdiri di depan sekali pada batas antara keterbelakangan dengan kemajuan, dan antara kemiskinan dan kemakmuran", tambahnya.

Suatu daerah muda berdiri di depan sekali pada garis front pembangunan. Ia langsung berhadapan dengan masalah-masalah pembangunan,

memahat hari esok pada batu karang masa kini, demikian Menteri Nugroho.

Modal bagi daerah

Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. H. Alala mengatakan Universitas Haluoleo merupakan modal besar bagi daerahnya karena ia merupakan "agent of development" atau "agent of modernization". Ia merupakan modal besar bagi mencerdaskan bangsa dan negara, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara.

Dalam rangka mencetak para ahli, para sarjana sesuai dengan bidang yang tercermin pada fakultasnya masing-masing dan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi berarti perguruan tinggi tidak semata-mata memajukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri tetapi lebih jauh dari itu dharma baktinya kepada masyarakat dalam arti bahwa perguruan tinggi harus turut mensukseskan setiap program pemerintah.

Oleh karena itu harus kita sadari perguruan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekitarnya yang merupakan suatu kesatuan sosial di mana dia sendiri terlibat, demikian Gubernur Alala.

Kegiatan selama dua tahun

Sementara itu Rektor Universitas Haluoleo E. Agus Salim Mokodampit mengatakan, Unhalu kini mempunyai empat fakultas, yaitu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP), Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Pertanian, serta program diploma.

Program Sarjana-1 (S.1) pada keempat fakultas kini baru memasuki semester VII, karena pada saat didirikannya tingkat/semester yang tertinggi ialah tingkat II. Diharapkan pada akhir semester VIII yaitu pada Dies Natalis ketiga nanti

telah dapat dilaksanakan wisuda sarjana hasil dari program sarjana-I keempat fakultas tersebut.

Tetapi walaupun Unhalu usianya masih relatif muda pada tahun ini ia telah dapat melaksanakan wisuda program diploma untuk bidang studi Pendidikan MOral Pancasila, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dari jumlah peserta 102 orang pada program tersebut yang berhasil lulus

97 orang, atau 94,12%. Mereka yang telah berhasil lulus mempunyai wewenang untuk mengajar dalam bidang-bidang studi yang telah dipelajarinya di sekolah-sekolah menengah tingkat pertama (SMTP). Pada puncak acara dies natalis, Unhalu tersebut Rektor Unhalu menyerahkan ijazah kepada 97 orang lulusan program diploma tersebut.

— ❦ —

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI DEPAN SIDANG PLENO DPR-RI TANGGAL 16 AGUSTUS 1983

Pengantar Redaksi :

Seperti tahun-tahun yang lalu, Redaksi memuat pula Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 1983 di depan Sidang Pleno DPR- RI, khususnya yang menyangkut bidang Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pemuatan tersebut dimaksudkan agar dapat kita ketahui tentang kemajuan yang dicapai di bidang tugas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Semoga bermanfaat !

PENDIDIKAN, GENERASI MUDA, KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

A. PENDIDIKAN DAN GENERASI MUDA

1. Pendahuluan

Salah satu tujuan nasional yang ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pasal 31 UUD menetapkan bahwa : (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang”.

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, pembangunan pendidikan nasional menurut Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan. Oleh karena itu pembangunan pendidikan diarahkan kepada

menumbuhkan manusia-manusia yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Selanjutnya dalam rangka mempersiapkan kader-kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional, kepada generasi muda diberikan ketrampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, kepribadian dan budi pekerti luhur.

Dalam rangka mewujudkan berbagai kebijaksanaan dasar tentang pembangunan pendidikan dan pengembangan generasi muda sebagaimana telah digariskan dalam GBHN, maka dalam Repe-lita III telah dijabarkan serangkaian kebijaksanaan dan program utama untuk pemecahan secara mendasar sejumlah masalah pokok yang berkaitan satu sama lain. Masalah-masalah tersebut menyangkut : (a) pemerataan kesempatan belajar, terutama dalam rangka persiapan kewajiban belajar ; (b) peningkatan mutu pendidikan pada semua tingkat dan jenis pendidikan; (c) relevansi

pendidikan agar mampu menghasilkan tenaga pembangunan; (d) persiapan generasi muda sebagai penerus perjuangan dan pembangunan nasional; dan (e) efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan untuk terlaksananya tujuan pembangunan pendidikan dan pembangunan nasional secara keseluruhan.

2. Kebijakan dan langkah-langkah

Pembangunan pendidikan dan pengembangan generasi muda dalam rangka mencapai tujuan-tujuan Repelita III dilaksanakan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok serta melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan

Untuk memungkinkan setiap rakyat Indonesia memperoleh pendidikan yang layak dalam hubungan dengan peningkatan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ditempuh usaha-usaha keterpaduan pengelolaan sistem pendidikan nasional. Dalam hubungan ini dilakukan usaha-usaha peningkatan daya tampung lembaga pendidikan berikut segala implikasinya dalam pembiayaan, ketenagaan, dan peralatan, diarahkan terutama untuk menyongsong pelaksanaan wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar. Peningkatan daya tampung sekolah dasar dilaksanakan melalui pengembangan fasilitas pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, pengembangan SD kecil dan SD PAMONG, serta usaha-usaha melalui jalur pendidikan luar sekolah dengan KEJAR (bekerja sambil belajar). Selain itu dilaksanakan pula peningkatan daya tampung SMTP dan SMTA melalui pembangunan pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas baru pada SMTP dan SMTA yang ada, dan penyelenggaraan SMP Terbuka, serta penambahan fasilitas lain. Peningkatan daya tampung lembaga pendidikan tinggi dilaksanakan melalui penambahan ruang dan fasilitas belajar. Selain itu, peranan perguruan swasta ditingkatkan sebagai mitra Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

b. Peningkatan mutu pendidikan

Di dalam usaha melaksanakan kebijaksanaan pemerataan pendidikan, sekaligus ditangani pula peningkatan mutu pendidikan itu sendiri

sehingga tercapai keseimbangan yang dinamik antara kedua aspek itu. Kegiatan meningkatkan mutu pendidikan, meliputi antara lain, usaha pembinaan kurikulum, penyelenggaraan EBANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) secara bertahap, peningkatan mutu tenaga kependidikan, penambahan buku dan sarana pendidikan lainnya, pembinaan perpustakaan sekolah, dan peningkatan pengelolaan pendidikan. Selain itu diadakan pula lomba penelitian dan penulisan karya ilmiah bagi anak didik di jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi, lomba karya tulis dan penulisan buku di kalangan guru serta penetapan siswa, mahasiswa, guru, dan dosen teladan, baik yang berasal dari sekolah negeri maupun swasta. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, dikembangkan pula konsep ketahanan sekolah yaitu "sekolah sebagai pusat kebudayaan" melalui peningkatan aspek metodologi dan evaluasi, guru, pengawasan, dan masukan instrumental lain. Pengembangan konsep sekolah sebagai pusat kebudayaan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan logika, etika, estetika, dan praktika. Pada tingkat pendidikan tinggi dikembangkan konsep perguruan tinggi sebagai masyarakat ilmiah melalui pelaksanaan normalisasi kehidupan kampus dan wawasan nusantara.

c. Peningkatan relevansi pendidikan

Pendidikan merupakan usaha penunjang yang efektif bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu usaha-usaha terus dilanjutkan untuk meningkatkan relevansi pendidikan terhadap pembangunan nasional melalui keterpaduan dalam perencanaan pendidikan dan pembangunan. Sebaliknya dengan adanya peningkatan pembangunan nasional, memperlancar pula pembangunan pendidikan nasional.

d. Pembinaan dan pengembangan generasi muda

Dalam rangka mempersiapkan kader-kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional maka kepada generasi muda diberikan bimbingan ke arah pembinaan bakat, ketrampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya

kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian, dan budi pekerti luhur terutama melalui Pendidikan Moral Pancasila dan sejarah nasional. Pendidikan jasmani dan kegiatan olah raga ditingkatkan dan disebarluaskan sebagai usaha pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap orang dalam rangka memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat.

e. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan, kebijaksanaan pokok yang ditempuh ialah mengkaitkan penggunaan sumber daya dan dana yang optimal dalam rangka pencapaian sasaran yang telah digariskan, baik fisik maupun non fisik. Dalam rangka mewujudkan satu sistem pendidikan nasional, telah mulai diambil langkah-langkah antara lain, penyusunan konsep pembaharuan pendidikan, peningkatan pengelolaan tenaga kependidikan secara terpadu dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, dan penyusunan konsep satu pendidikan nasional.

Selain itu terus diusahakan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan pelayanan administratif, kepegawaian, serta penelitian dan pengembangan, berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Program-program yang tercakup dalam bidang pendidikan dan generasi muda ialah : a. pembinaan pendidikan dasar; b. pembinaan pendidikan menengah tingkat pertama; c. pembinaan pendidikan menengah tingkat atas; d. pembinaan pendidikan tinggi; e. penunjangan bakat dan prestasi; f. peningkatan pendidikan masyarakat; g. peranan wanita; h. generasi muda; i. keolahragaan dan j. pengembangan sistem pendidikan. Hasil-hasil pelaksanaan masing-masing program dalam tahun 1982/1983 yaitu tahun keempat Repelita III dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Pembinaan Pendidikan Dasar

Program ini mencakup : usaha-usaha pembinaan pendidikan pra sekolah pada Taman Kanak-kanak (TK); usaha-usaha menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak berkelainan (mengalami hambatan fisik atau mental) melalui pembinaan Sekolah Luar Biasa (SLB); dan

usaha-usaha penyediaan fasilitas belajar pada tingkat pendidikan dasar bagi semua anak usia 7 – 12 tahun terutama melalui pembinaan Sekolah Dasar (SD).

Sesuai dengan prioritas program yang ditentukan dalam GBHN maka titik berat pembangunan bidang pendidikan selama Repelita II dan Repelita III diletakkan pada perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wajib belajar.

Jumlah murid pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah) yang pada tahun 1978/79 berjumlah 21,892 juta (19,075 juta di SD dan 2,817 juta di Madrasah Ibtidaiyah) telah meningkat pada tahun ajaran 1982/83 menjadi sekitar 28,238 juta (25,024 juta di SD dan 3,214 juta di Madrasah Ibtidaiyah) yang berarti mengalami kenaikan 6,346 juta atau 29% terhadap tahun ajaran 1978/79, khususnya kenaikan 5,949 juta atau 31,2% untuk SD selama 4 tahun terakhir ini. Hal ini berarti pula bahwa pada tahun 1982/83 sebanyak 93,4% dari kelompok usia 7 – 12 tahun yang berjumlah 25,817 juta sudah tertampung (angka partisipasi murni) pada pendidikan dasar (82,9% di SD dan 10,5% di Madrasah Ibtidaiyah) dibandingkan dengan 79,2% pada tahun 1978/79 (69,5% di SD dan 9,7% di Madrasah Ibtidaiyah). Sedangkan kalau seluruh jumlah murid SD dan MI (termasuk murid di bawah 7 tahun/di atas 12 tahun), langsung dibandingkan dengan jumlah penduduk 7 – 12 tahun (angka partisipasi kasar) maka daya tampung pendidikan dasar pada tahun 1982/83 ini sudah mencapai 109,3% (96,9% di SD dan 12,4% di MI).

Usaha perluasan dan pemerataan belajar pada SD dilakukan melalui Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Inpres SD). Dalam tahun 1982/83 telah dan sedang dibangun 22.600 buah gedung SD baru (masing-masing 3 ruang kelas). Di samping itu dilaksanakan pula pembangunan tambahan 35.000 ruang kelas baru pada SD yang sudah ada serta rehabilitasi 25.000 gedung sekolah (16.775 gedung SD Negeri 2.225 SD swasta dan 6.000 Madrasah Ibtidaiyah Swasta). Selanjutnya telah dibangun pula 20.000 rumah dinas kepala sekolah/perumahan guru di daerah terpencil dan 12.000 rumah penjaja

sekolah.

Dengan demikian, selama empat tahun Repelita III (1979/80 – 1982/83) seluruhnya telah dibangun 61.600 buah gedung SD dan tambahan 95.000 ruang kelas baru, rehabilitasi 85.000 gedung sekolah, pembangunan 42.000 rumah kepala sekolah/perumahan guru dan 44.350 rumah penjaga sekolah.

Untuk memenuhi keperluan guru dan tenaga lainnya sejalan dengan pembangunan gedung-gedung SD tersebut di atas, telah dilaksanakan penambahan tenaga guru dan tenaga lainnya. Dalam tahun 1982/83 telah dan sedang dilaksanakan pengangkatan 121.000 tenaga guru dan tenaga lainnya pada SD yaitu 85.550 guru kelas/bidang studi, 23.700 guru agama dan 11.850 penjaga sekolah.

Dengan demikian selama empat tahun Repelita III dilakukan pengangkatan tambahan 324.450 tenaga guru dan tenaga lainnya, yang

terdiri dari 227.550 guru kelas/bidang studi, 59.700 guru agama, dan 37.200 penjaga sekolah. Hal ini berarti bahwa pengangkatan tambahan tenaga guru selama Repelita III telah jauh melampaui sasaran semula yang direncanakan sebanyak 105.300 orang.

Perluasan pemerataan dan pemantapan kesempatan belajar pada SD disertai pula dengan usaha peningkatan mutu pendidikannya, antara lain melalui penarikan guru, pengadaan buku pelajaran dan buku bacaan/perpustakaan, penyediaan alat-alat peraga, ketrampilan, kesenian dan olah raga.

Dalam tahun 1982/83 sebanyak 299.393 tenaga guru kelas/bidang studi mendapatkan penataran termasuk guru Pendidikan Moral Pancasila, sehingga selama empat tahun Repelita III telah diadakan penataran bagi 1.711.541 guru SD.

(Bersambung)

PETUNJUK PEMBINAAN SEKOLAH

II

BAB III PELAKSANAAN

Sekolah terdapat di masyarakat dan merupakan bagian dari masyarakat. Berbagai unsur manusiawi, baik yang terdapat di sekolah maupun yang berada di sekitar sekolah, mempunyai peranan yang penting atas kehidupan sekolah. Karena itu kegiatan-kegiatan di sekolah hanya akan berhasil apabila semua unsur manusiawi itu (Kepala Sekolah, Wali Kelas/guru kelas, guru, karyawan sekolah/tenaga administrasi, siswa orang tua/masyarakat sekitarnya), mengetahui dengan tepat peranan apa yang harus dilakukannya sesuai dengan setatusnya masing-masing. Untuk itu di bawah ini dicantumkan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh unsur-unsur tersebut, baik dalam rangka pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan maupun dalam rangka meningkatkan dan memelihara ketahanan sekolah.

A. KEGIATAN-KEGIATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SEKOLAH SEBAGAI PUSAT KEBUDAYAAN.

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Logika.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan logika mencakup : gemar, biasa, serta butuh membaca, rajin belajar, suka meneliti, dan gairah menuli analitik.

a. *Gemar, biasa, serta butuh membaca.*

Belajar amat erat hubungannya dengan membaca, lebih-lebih di masyarakat modern. Dengan membaca orang dapat memperoleh informasi tentang pendapat, penemuan dan pengalaman orang lain. Dengan membaca orang dapat mempelajari dunia untuk mengenal adat, kebudayaan serta peradaban berbagai bangsa. Oleh karenanya kebiasaan gemar membaca akan memperluas cakrawala pengetahuan dan pengalaman, di samping

memberikan suatu kepuasan tersendiri. Dengan banyak membaca, pikiran berkembang, perasaan tersentuh, dan keinginan belajar bertambah kuat.

Dengan membaca dapat belajar, diperoleh inspirasi dan gagasan baru. Dari gemar membaca timbul kebiasaan membaca yang berkembang menjadi kebutuhan membaca.

1) Tugas *Kepala Sekolah*, antara lain :

- a) Menciptakan suatu situasi sekolah yang dapat menimbulkan dan meningkatkan kegemaran, kebiasaan dan kebutuhan membaca bagi guru dan siswa.
- b) Mengusahakan agar di sekolah tersedia ruang baca yang memadai, buku, majalah dan brosur dalam jumlah yang cukup serta ada pustakawan.
- c) Meningkatkan kemampuan guru dalam membimbing dan melatih ketrampilan siswa serta menumbuhkan kegemaran, kebiasaan, dan kebutuhan siswa membaca.
- d) mengikut sertakan siswa mengolah perpustakaan sekolah secara bergiliran.
- e) Memonitor dan mengawasi pertumbuhan minat dan kesenangan siswa dan guru membaca.

2) Tugas *guru*, antara lain :

- a) Berusaha menambah pengetahuan yang berhubungan dengan profesinya atau bidang pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara gemar, biasa, dan butuh membaca.
- b) Mengusahakan terciptanya suasana dalam proses belajar mengajar sehingga siswa gemar, biasa, dan butuh membaca.
- c) Membimbing dan memberikan motivasi agar siswa dapat meningkatkan kegemaran, kebiasaan, dan kebutuhan membaca.

3) Tugas *karyawan sekolah/tenaga administrasi*, antara lain :

- a) Menciptakan suasana dalam perpustakaan sedemikian rupa sehingga dapat mendorong timbulnya minat baca.
- b) Mengatur perpustakaan/ruang baca dan membuat sistem peminjaman buku perpustakaan yang sebaik-baiknya agar

siswa dan guru gemar, biasa, dan butuh membaca.

4) Yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh *orang tua/masyarakat*, antara lain :

- a) Menyediakan buku-buku bacaan yang bermanfaat sesuai dengan tingkat kemampuan dan usia putera-puterinya.
- b) Menciptakan suasana dalam lingkungan keluarga sehingga dapat menumbuhkan kegemaran, kebiasaan dan kebutuhan membaca.
- c) Mengetahui jenis buku bacaan yang tepat bagi putera-puterinya.

5) Tugas *siswa*, antara lain :

- a) Membiasakan diri untuk membaca buku pelajaran dan buku bacaan yang sesuai dengan pelajaran di sekolah secara teratur.
- b) Membiasakan diri menambah pengetahuan dengan membaca dan kemudian membuat ringkasan dari yang telah dibaca.
- c) Membuat laporan bulanan kepada Wali Kelas/guru mengenai buku-buku yang telah dibaca.
- d) Meningkatkan kebiasaan mengisi waktu kosong di sekolah dengan membaca buku di ruang kelas atau ruang perpustakaan.
- e) Ikut aktif membantu mengelola perpustakaan sekolah.

b. *Rajin Belajar.*

Belajar berarti suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri seseorang. Belajar yang direncanakan dan berlangsung secara efektif dan efisien akan mencapai hasil belajar dalam bentuk pertambahan pengetahuan dan tingkah laku, nilai, dan sikap serta keterampilan.

Rajin belajar merupakan hasil proses belajar sehingga rajin belajar dapat menjadi kebiasaan.

Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang mula-mula dilatihkan dan dilaksanakan berulang kali. Pada umumnya kebiasaan lebih mudah ditanamkan bila dimulai sejak anak masih kecil. Oleh karena itu kebiasaan rajin belajar hendaklah dimulai sedini mungkin. Sifat rajin belajar seyogyanya ditumbuhkan melalui motivasi. Motivasi

tersebut diberikan/diperkuat di sekolah melalui berbagai upaya, antara lain dengan memberikan pengharagaan.

1) *Tugas Kepala Sekolah*, antara lain :

- a) Membina dan membantu guru dalam meningkatkan profesinya, serta menciptakan situasi lingkungan sekolah yang dapat mendorong minat belajar siswa.
- b) Mengusahakan tersedianya buku dan alat-alat bantu mengajar yang diperlukan, baik oleh siswa maupun oleh guru.
- c) Menciptakan suatu situasi yang dapat mendorong siswa dan guru giat belajar.
- d) Memonitor dan mengawasi kegiatan proses belajar-mengajar dalam rangka membantu siswa maupun guru agar dapat meningkatkan minat belajar dan ketekunan mengajar.

2) *Tugas guru*, antara lain :

- a) Membina dan mengarahkan serta memberi motivasi agar siswa rajin belajar.
- b) Berusaha menambah pengetahuan baik yang berhubungan dengan profesinya atau bidang pengajaran yang menjadi tugasnya.
- c) Mengusahakan terciptanya suatu proses belajar mengajar yang mendorong siswa menjadi rajin belajar.
- d) Melatih siswa untuk saling membantu dalam kegiatan belajar baik secara perorangan maupun secara berkelompok.
- e) Secara rutin dan periodik menyelenggarakan tes/quiz.

3) *Tugas karyawan sekolah/tenaga administrasi*, antara lain :

- a) Membantu kelancaran pengadaan dan penyediaan fasilitas belajar di sekolah.
- b) Mengatur ruangan dan penyediaan fasilitas belajar yang dimiliki sekolah.

4) Yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh *orang tua/masyarakat*, antara lain :

- a) Mengarahkan putera-puterinya untuk belajar secara teratur, pada jam-jam tertentu.
- b) Menciptakan suasana dalam keluarga

agar dapat mendorong putera-puterinya rajin belajar.

- c) Memperhatikan dan menyediakan peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan sekolah.

5) *Tugas siswa*, antara lain :

- a) Memiliki jadwal pelajaran yang digantungkan/ditempelkan di dinding rumah dan membiasakan membacanya setiap hari.
- b) Membiasakan diri agar belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah secara teratur.
- c) Membiasakan diri menyiapkan buku-buku pelajaran sebelum berangkat ke sekolah.
- d) Membiasakan diri berangkat ke sekolah tidak terlambat atau lima belas menit sebelum jam pelajaran dimulai sudah tiba di sekolah.
- e) Mengembangkan kebiasaan berdiskusi sesama teman tentang topik yang disenangi dalam pengetahuan serta tanggap terhadap masalah mengenai dirinya sendiri.
- f) Membiasakan membuat catatan harian.

c. *Suka Meneliti*.

Perkembangan ilmu pengetahuan sebagian besar disebabkan oleh penemuan-penemuan baru yang dihasilkan melalui proses penelitian. Sekolah sebagai pusat dilakukannya proses belajar mengajar seyogyanya mengembangkan kegiatan penelitian sederhana yang diarahkan untuk mengembangkan kebiasaan berpikir dan bertindak logis serta sistematis di kalangan siswa, sehingga dengan demikian diharapkan akan tumbuh sikap ilmiah pada siswa dalam menghadapi dan menanggulangi masalah-masalah dalam kehidupan dan lingkungan kehidupannya.

Bersambung ke hal 60

PERANAN KREATIVITAS DALAM PENDIDIKAN

Oleh : Dr. Mohammad Amin, M.A.

Dr. Mohammad Amin, M.A., lahir di Tuban pada tahun 1934, adalah lektor kepala pada IKIP Yogyakarta dan tenaga pengajar tidak tetap pada Sekolah Pasca Sarjana IKIP Bandung. Gelar sarjana pendidikan diperoleh dari IKIP Yogyakarta (1966), M.A. dari Columbia University, New York (1970) dan doktor dari University of Northern Colorado (1978). Pengalaman kerjanya di FKIE-IKIP Yogyakarta antara lain berturut-turut sebagai dosen tetap, Ketua jurusan Biologi, Pembantu Dekan III, Kepala Biro Pengabdian Masyarakat, Ketua Departemen Pendidikan Science; Ketua Divisi Peralatan Pendidikan Proyek Peningkatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendidikan Departemen P dan K (1980 - sekarang); mengikuti berbagai seminar/ lokakarya bertaraf nasional dan internasional.



PENDAHULUAN

KITA tahu bahwa berhasil tidaknya suatu usaha atau kegiatan banyak tergantung pada jelas tidaknya *tujuan* atau *sasaran* yang hendak dicapai oleh orang atau lembaga yang melaksanakannya. Berdasarkan kenyataan ini, maka suatu tujuan perlu dirumuskan se jelas-jelasnya dan kemudian baru disusun suatu program kegiatan (kerja) yang obyektif dan realistik agar segala tenaga dan biaya tidak akan terbuang sia-sia.

Sehubungan dengan itu, apabila kita mau berbicara tentang pendidikan pada umumnya, maka kita harus menyadari bahwa segala proses pendidikan selalu diarahkan untuk dapat menyediakan atau menciptakan tenaga terdidik bagi kepentingan bangsa, negara, dan tanah air. Apabila kita membutuhkan tenaga terdidik dalam berbagai macam bidang pembangunan, maka segenap proses pendidikan, harus ditunjukkan atau diarahkan pada kepentingan pembangunan masa sekarang dan masa selanjutnya. Karena pembangunan merupakan proses perkembangan, yaitu suatu proses perubahan yang meningkat dan dinamis, maka pendidikan haruslah mampu membentuk atau mencipta tenaga yang dapat mengikuti dan melibatkan diri dalam proses perkembangan, terampil, dinamis, dan kreatif dengan tidak melepaskan diri dari dasar-dasar watak dan kepentingan bangsa, negara, dan tanah air kita. Ini berarti bahwa membangun hanya dapat dilaksanakan oleh manusia yang berjiwa pembangunan, yaitu manusia yang dapat menunjang pembangunan bangsa dalam arti yang luas, baik material maupun

spiritual serta sosial-budaya.

Selama dua puluh lima tahun terakhir ini, salah satu dari semua proses mental manusia yang telah menjadi sasaran utama dalam studi ilmiah atau penelitian ialah *kreativitas*. Baik para ahli psikologi maupun guru/dosen telah menyadari bahwa siswa/mahasiswa bukan semata-mata penerima informasi dan memecahkan permasalahan yang diberikan kepadanya, tetapi siswa/mahasiswa adalah *manusia kreatif* yang kemampuan kreatifnya harus dikembangkan sepenuhnya melalui proses belajar-mengajar.

Manusia mempunyai potensi untuk menjadi kreatif. Menjadi manusia berarti menjadi kreatif. Apabila kita melakukan kreativitas, *self-concept* kita akan tumbuh dan berkembang. Ini membuat kita lebih kukuh dan mantap sebagai individu, memperluas masa depan kita, dan membuka pengalaman-pengalaman kreatif yang baru. Seperti halnya sukses menjadikan sukses, maka kreativitas menjadikan kreativitas. Semakin banyak kita melibatkan diri dalam kegiatan kreatif, kita akan semakin menjadi kreatif. Sebaliknya bila kita tidak memiliki kesempatan untuk menyalurkan kreativitas, potensi kita akan menurun dan mempunyai pengaruh merugikan terhadap kesehatan mental kita.

Apakah hakekat proses kreatif itu ? Kemampuan-kemampuan intelektual apakah yang terlibat dalam kreativitas ? Bagaimanakah ciri-ciri siswa/mahasiswa yang kreatif ? Bagaimanakah kemampuan-kemampuan kreatif dapat dikembangkan ? Cara-cara apakah yang dapat diguna-

kan oleh guru/dosen untuk mengajarkan konsep atau prinsip-prinsip ilmiah secara kreatif? Semua pertanyaan ini sangat penting bagi guru/dosen yang harus memahami dan menghayati proses kreatif serta komponen-komponen lainnya yang terlibat dalam proses itu.

Banyak siswa/mahasiswa belajar lebih baik bila kemampuan kreatifnya dilibatkan dalam proses belajar, baik secara formal maupun informal. Semua siswa/mahasiswa memiliki potensi kreatif yang harus dikembangkan bila diharapkan agar mereka dapat hidup dengan penuh gairah atau semangat, dan produktif dalam melakukan tugas atau profesinya. Kesadaran atas kemampuan kreativitas dan usaha guru/dosen untuk memacu keberhasilan siswa/mahasiswa dapat membantu dalam pembentukan manusia sumber yang sangat berharga bagi masyarakat dan negara dalam era pembangunan ini.

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, terlebih dahulu akan diuraikan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan kreativitas.

Dr. Abraham H. Maslow (1971) pada usia akhir tiga puluhan, telah menjumpai kenyataan bahwa "psikologi modern" didasarkan atas studi terhadap individu yang sakit. Ia berpendapat bahwa hal ini memberikan suatu persepsi terbatas terhadap hakekat manusia. Oleh karena itu, ia berusaha melakukan studi terhadap individu yang bermental sehat. Pertama-tama ia melakukan wawancara secara agak luas, mengobservasi bagaimana kehidupan individu itu, meliputi segala perilakunya. Lambat laun ia menyadari bahwa individu dengan kepribadian sehat memiliki sejumlah ciri-ciri tertentu. Individu ini merupakan orang yang aktif penuh gairah, kreatif berdedikasi terhadap segala sesuatu yang mereka yakini, banyak melibatkan diri dalam keterikatan (komitmen) tugasnya, dan sebagainya. Bahkan ia mencirikan individu ini sebagai *self-actualized persons*.

Craig (1971), salah seorang siswa Maslow, melakukan penelitian tentang korelasi ciri-ciri manusia kreatif dengan ciri-ciri manusia *self-actualized*. Hasil studinya mengungkapkan adanya *overlap* yang sangat tinggi. Dari hasil penelitiannya dan penelitian-penelitian lainnya, ia menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang mendukung pembangunan kreativitas seseorang juga secara positif

akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Dari penelitian bidang kreativitas ini Maslow memberikan argumentasi bahwa semua tenaga pengajar dan semua bentuk mata pelajaran sebaiknya berusaha atau bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kreatif siswa/mahasiswa, sehingga mereka akan bergerak ke arah *self-actualization* dan kesehatan mental yang lebih besar. Dalam hal ini Maslow (1972) menyatakan sebagai berikut :

Dan mengapa setiap mata pelajaran tidak sebaiknya membantu ke arah pengembangan kreativitas siswa/mahasiswa? Sesungguhnya proses pendidikan semacam ini harus dapat membantu untuk menciptakan individu yang lebih baik, membantu individu tumbuh dan berkembang lebih besar, lebih tinggi, lebih bijaksana, lebih perseptif, dan lebih kreatif dalam semua aspek kehidupannya.

Bila kita harus menjadi arsitek kreatif dalam era pembangunan ini, maka harus ada pertumbuhan dan pengembangan segala potensi manusia semaksimal mungkin, tidak hanya sekedar penyesuaian diri/individu terhadap perubahan dalam lingkungan hidup kita. salah satu jalur utama untuk membentuk arsitek kreatif ialah pendidikan.

HAKEKAT KREATIVITAS DAN PROSES KREATIF

Selam tahun 1960-an dan permulaan tahun 1970-an, sejumlah ahli psikologi semakin tertarik terhadap "kreativitas". Mereka telah berusaha merumuskan, mencirikan, dan mengembangkannya. Torrance (1962), salah seorang dari mereka itu, menyatakan sebagai berikut :

I have been chosen to define creative thinking as the process of sensing gaps or disturbing missing element; forming ideas or hypotheses; and communicating the results, possibly modifying and retesting hypotheses.

Beberapa ahli psikologi percaya bahwa kreativitas harus terbatas pada penemuan atau penciptaan suatu ide atau konsep baru yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh manusia. Para ahli lainnya mendefinisikan kreativitas secara lebih inklusif, yaitu meliputi semua usaha produktif yang unik dari individu. Pandangan ini lebih bermakna bagi guru/dosen yang berusaha untuk me-

ngembangkan kemampuan kreatif siswa/mahasiswa dan membantu mereka dalam menggali dan mengembangkan potensinya semaksimal mungkin.

Dengan kata lain, kreativitas dapat diartikan sebagai pola berpikir atau ide yang timbul secara spontan dan imajinatif, yang mencirikan hasil artistik, penemuan ilmiah, dan penciptaan secara mekanik. Kreativitas meliputi hasil sesuatu yang baru, baik sama sekali baru bagi dunia ilmiah atau budaya maupun secara relatif baru bagi individunya sendiri walaupun mungkin orang lain telah menemukan atau memproduksi sebelumnya. Seseorang dapat menjadi ahli matematika, falsafah atau ilmuwan yang kreatif, seperti halnya dengan seorang penulis atau seniman yang kreatif. Demikian pula siswa/mahasiswa dapat melibatkan kemampuan kreatifnya dalam proses belajar *science*, seni sastra atau lain-lain mata pelajaran yang lebih abstrak seperti matematika dan ilmu-ilmu sosial serta mata pelajaran yang lebih praktis seperti pendidikan keolahragaan dan kesejahteraan rumah tangga.

APAKAH YANG TERLIBAT DALAM PROSES KREATIF ?

Ada dua pandangan utama tentang penyusunan utama proses kreatif, yaitu pandangan asosiasi (*S-R theorist*) dan pandangan kognitif (*Cognitive theorist*).

S - R theorist menyatakan bahwa kreativitas menyangkut pembentukan asosiasi *stimulus - responses* yang pada kenyataannya dicirikan bahwa elemen yang bergabung bersama tidak berhubungan secara normal, yaitu melibatkan penggabungan *stimuli* dengan *responses* yang berlainan. Penekanan pada pandangan ini terletak pada asosiasi yang dipelajari/dijumpai sebelumnya yang dihidupkan kembali dan kemudian dirangkaikan.

Cognitive theorist menyatakan bahwa kreativitas melibatkan penggabungan ide dan informasi dalam cara-cara baru dan berbeda, yang terdiri atas suatu strukturisasi atau penyusunan kembali terhadap alam pengertian manusia. Ide ditransformasikan dan dimasukkan dalam kombinasi sehingga betul-betul timbul produk (hasil) dari satu ide yang baru dan asli, yang kemudian diekspresikan melalui media. Penekanan dalam analisis kognitif kreativitas tidak semata-mata pada aso-

siasi yang luar biasa tetapi terutama pada timbulnya ide baru yang bermakna.

Hingga saat ini, penelitian belum cukup luas dan mendalam mengenai teori kreatif yang sempurna, yang berkaitan dengan proses internal yang terlibat. Suatu pengertian terbaik mengenai hakekat proses kreatif yang sampai saat ini masih tetap signifikan ialah yang telah diformulasikan oleh Walls hampir 54 tahun yang silam yang didasarkan atas analisis dari para seniman, ilmuwan, dan para ahli matematika yang kreatif.

Dalam analisis proses kreatif, Walls membedakan adanya empat fase, yaitu : 1. fase persiapan, 2. fase inkubasi, 3. fase inspirasi, dan 4. fase verifikasi.

1. Fase Persiapan

Fase ini merupakan fase jangka panjang dan jangka pendek. Pada landasan fase jangka panjang, persiapan melibatkan banyak hal, misalnya penyelidikan, penelitian terhadap sikap, pengamatan terhadap gejala alam di sekitar kita, pengetahuan tentang suatu disiplin ilmu dan metodologi disiplin ilmu itu.

Pada fase jangka pendek, persiapan ini dapat meliputi ide bacaan, pengamatan dan karya lain mengenai topik atau permasalahan khusus, ditambah dengan usaha bermakna dalam menghasilkan sesuatu.

2. Fase Inkubasi

Fase ini ditandai dengan suatu usaha yang santai, melepaskan topik atau permasalahannya dari kesadaran atau perhatiannya selama beberapa menit hingga berbulan-bulan dan tampak sedikit kegiatan (tidak aktif). Akan tetapi, pada akhir fase ini tampak adanya kemajuan timbulnya suatu *insight* baru. Hal ini mungkin terjadi sebagai akibat asimilasi tanpa kesadaran atau transformasi informasi yang diperoleh dari fase persiapan yang telah terjadi. Mungkin pula sebagai akibat karena "penampilan" telah berkembang menjadi sempurna setelah beberapa waktu istirahat (santai). Untuk ini belum ada penjelasan yang meyakinkan.

3. Fase Inspirasi

Aspek proses kreatif yang paling penting, yang merupakan puncak dua fase yang pertama ialah "inspirasi". Inspirasi merupakan ide atau citra yang memberikan model untuk produk kreatif.

Dalam bidang seni sastra, inspirasi merupakan citra ideal yang akan dijelaskan ke dalam kenyataan pada kanvas atau batu tempat melukis. Bagi seorang penulis, ilmuwan atau ahli falsafah, inspirasi merupakan kunci idea yang memberikan struktur karya sejarah, sanjak atau teori yang dihasilkannya. Sering kali *insight* ini timbul secara mendadak atau spontan yang disertai dengan suatu prasarana yang menggembirakan dan memuaskan serta suatu derajat kepastian bahwa "inilah dia". Telah lama dikenal bahwa sungguh banyak sumbangan terhadap pengetahuan manusia yang timbul secara tiba-tiba berupa *flashes of insight* semacam ini.

4. Fase Verifikasi

Dalam fase terakhir proses kreatif, yang biasanya paling lama dalam hubungannya dengan waktu, model yang timbul dalam fase inspirasi menjadi "kenyataan". Dengan kata lain, citra atau *insight* ditunjukkan dalam kenyataan konkret melalui kata, simbol matematika, lukisan dan sebagainya. Suatu bagian integral dari fase ini ialah proses "evaluasi" terhadap apa yang dihasilkan, revisi dibuat, bagian disusun kembali, dan ditemukan cara baru yang lebih baik dan relevan untuk mengekspresikan model. Terutama koreksi atau kritik kepada diri sendiri dilakukannya, tetapi sebagai tambahan penilaian atau pendapat orang lain kadang-kadang dapat diperoleh atau dicari. Bagi orang dengan inspirasi penuh, fase verifikasi ini ditandai dengan ekspresi *insight* atau citra. Bagi orang dengan inspirasi sebagian, fase verifikasi ini ditandai dengan elaborasi atau kerja keras, ditambah dengan evaluasi dan revisi secara kontinyu.

Tidak semua hasil kreatif menyertakan semua fase di atas, dan sesungguhnya tidak semuanya mengikuti urutan seperti yang tertera di atas. Evaluasi dapat timbul lebih dahulu atau pada saat terakhir. Dalam proses, seringkali fase inkubasi sangat singkat atau tidak ada. Dan akhirnya, fase inspirasi dapat merupakan fase keseluruhan sekaligus atau berangsur-angsur dan meluas melalui fase verifikasi. Akan tetapi, walaupun ada variasi antara individu dan bahkan antara hasil kreatif yang khas, analisa keempat fase proses kreatif ini sangat bermakna dan tampak bersesuaian dengan pengalaman orang kreatif dan penelitian kreativitas yang terbatas.

KEMAMPUAN-KEMAMPUAN INTELEKTUAL YANG TERLIBAT DALAM PROSES KREATIF

Sesuai dengan "model struktur intelek" yang dibuat oleh Guilford (Gorman, 1974), kreativitas terutama melibatkan proses berpikir secara *divergent*. Parnes (1972) mengungkapkan bahwa kemampuan kreatif dapat dibangkitkan dengan masalah yang memacu kepada 5 macam perilaku kreatif yaitu sebagai berikut :

1. *Fluency* (kelancaran), yaitu kemampuan mengemukakan ide-ide yang serupa untuk memecahkan suatu masalah.
2. *Flexibility* (keluwesan), yaitu kemampuan menemukan atau menghasilkan berbagai macam ide untuk memecahkan suatu masalah di luar kategori yang biasa.
3. *Originality* (keaslian), yaitu kemampuan memberikan respons yang unik atau luar biasa.
4. *Elaboration* (keterperincian), yaitu kemampuan menyatakan pengarah ide secara terperinci untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan.
5. *Sensitivity* (kepekaan), yaitu kepekaan menangkap dan menghasilkan masalah sebagai tanggapan terhadap suatu situasi.

Kemampuan-kemampuan lain yang sering pula terlibat dalam proses kreatif, antara lain ialah evaluasi, daya mengingat untuk menimbulkan ide, dan kemampuan mendefinisikan kembali.

Pada fase permulaan proses kreatif, kepekaan (*sensitivity*) terhadap masalah, kemampuan mengingat (*memory for ideas*), dan kelancaran (*fluency*) pada batas-batas tertentu sangat "aktif". Pada fase inspirasi, keaslian (*originality*), kelancaran (*fluency*), keluwesan (*flexibility*) dan mungkin pula kemampuan untuk mendefinisikan kembali (*redefinition abilities*) sangat "aktif". Selama fase verifikasi, keterperincian (*elaboration*), kemampuan evaluasi, ditambah dengan ekspresi dan kata-kata atau kelancaran yang berbentuk figural "berlangsung".

Perkaitan dengan *product dimension* dari model struktur intelek, adalah bahwa semua dapat terlibat dalam kegiatan kreatif. Dalam fase inspirasi, strukturisasi muncul kembali dan saling menghubungkan ide ke dalam suatu kombinasi yang membentuk model kerja kreatif, yang menghasilkan baik transformasi maupun sistem. Dalam fase elaborasi, yang terlibat adalah penarikan

implikasi ini.

Content dimension dari model struktur intelek memberikan beberapa *insight* yang menarik mengenai kreativitas di antara individu. Kemampuan kreatif yang melibatkan *figural content* sangat penting bagi pelukis (*visual*), ahli musik (*auditory*), dan para pencipta alat baru.

Kemampuan simbolik sangat penting untuk kerja kreatif dalam bidang matematika dan bidang lainnya, seperti linguistik, logika, simbolik, fisika, dan kimia. *Semantic content* terlibat dalam produk kreatif para penulis, pujangga atau penyair, filosof, dan *scientist*. (Perlu ditambahkan bahwa dalam bidang seperti tarian kreatif dan sandiwara bisu, baik kemampuan *figural* maupun psikomotor secara integral berhubungan dengan suatu produk kreatif).

Kemampuan-kemampuan utama yang paling sering terlibat dalam proses kreatif ditunjukkan dalam tabel di halaman 45

CIRI-CIRI INDIVIDU YANG KREATIF

Kesimpulan apakah yang dapat diperoleh dari pengertian kreativitas? Khususnya, bagaimanakah ciri-ciri individu yang kreatif, dan bagaimanakah kreativitas dapat ditanamkan dan dikembangkan pada diri siswa/mahasiswa ?

Manusia kreatif, bila dibandingkan dengan manusia biasa, menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dalam motivasi, intelektual, dan kepribadian. Mac Kennon (1961) dan Baron (1963) mengungkapkan hasil studinya bahwa individu yang kreatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. lebih menunjukkan sikap dewasa secara emosional dan peka dalam menangkap masalah dari suatu situasi.
 2. dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.
 3. tidak tergantung pada orang lain dan percaya pada diri sendiri,
 4. mampu menguasai dirinya sendiri,
 5. penuh keberanian yang bermakna, dan
 6. panjang akal.
- Torrance (1962), Weisberg dan Springer (1961), Toft dan Gilchrist (1970) menyatakan bahwa individu yang kreatif memiliki :

1. kesadaran atas diri sendiri,
2. insaf diri yang positif,
3. kesanggupan menguasai diri sendiri,
4. rasa humor yang tinggi,
5. kemampuan memberikan tanggapan yang

berani dan unik.

Getzels dan Jackson (1960), dalam studinya mengungkapkan bahwa individu yang kreatif menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mungkin sangat cerdas dan mungkin pula tidak, walaupun pada umumnya individu yang kreatif memiliki IQ di atas IQ rata-rata.
2. Korelasi antara kreativitas (*divergent thinking*) dan intelegensi (terutama *cognition*) cukup rendah, biasanya diperoleh sekitar 30.
3. Demikian pula, bila para siswa di ases, baik mengenai *divergent thinking* maupun mengenai *cognition abilities*, maka kurang lebih 70% dari para siswa yang sangat kreatif (di atas 20 dalam *divergent thinking*) tidak akan berada dalam kelompok tinggi (di atas 20 dalam *cognition*).

Dengan kata lain, siswa berbeda-beda dalam kemampuan proses intelektual, yaitu beberapa siswa lebih kuat dalam *cognition* beberapa siswa lain lebih kuat dalam *divergent thinking*, dan beberapa siswa lainnya lagi lebih kuat dalam keduanya (baik dalam *cognition* maupun dalam *divergent thinking*).

Getzels dan Jackson (1961), dan Edwards dan Tyler (1961), menemukan bahwa beberapa siswa dengan kemampuan kreatif yang tinggi pada umumnya melakukan tugas sama baiknya dengan para siswa dengan IQ tinggi dalam *achievement tests*. Sund (1975) menyatakan bahwa individu dengan potensi kreatif dapat dikenal secara mudah sekali melalui pengamatan ciri-ciri berikut :

1. hasrat ingin mengetahui,
2. bersikap terbuka terhadap pengalaman baru,
3. panjang akal,
4. keinginan untuk menemukan dan meneliti,
5. cenderung lebih suka melakukan tugas yang lebih berat dan sulit,
6. mencari jawaban yang memuaskan dan komprehensif,
7. bergairah, aktif dan dedikasi dalam melakukan tugasnya,
8. berfikir fleksibel,
9. menanggapi pertanyaan dan kebiasaan untuk memberikan jawaban lebih banyak,
10. kemampuan membuat analisis dan sintesis,
11. kemampuan membentuk abstraksi,
12. memiliki semangat *inquiry*, dan

13. keluasaan dalam latar belakang kemampuan membaca.

Sering kita jumpai kenyataan bahwa banyak guru atau dosen merasa terancam oleh pernyataan kreatif para siswa/mahasiswa. Terutama mereka tidak mengetahui bagaimana pengevaluasian hasil kerjanya. Hasil studi yang dilakukan oleh Getzels dan Jackson (1961), dan Torrance (1962) mengungkapkan bahwa guru cenderung lebih suka terhadap siswa yang penurut, jinak, pendiam, dan yang dapat diramalkan daripada siswa yang bersikap bebas aktif dan kreatif. Di dalam kelompok kelas, siswa yang lebih kreatif sering mengalami keresahan dan permusuhan dari teman-temannya sebagai akibat idenya yang lebih baik atau unggul (*superior*). Tekanan yang mengurangi produk kreatif ini dapat mengakibatkan mereka menjadi siswa penurut, masa bodoh atau sebaliknya menjadi keras kepala, bersikap suka menolak atau memisahkan diri untuk bekerja sendirian, bahkan mungkin menjadi frustrasi tergantung pada individu siswanya (Torrance 1962). Situasi yang dapat menyebabkan siswa/mahasiswa menjadi frustrasi, berarti membunuh kreativitas mereka.

BAGAIMANA IQ DAN NILAI MERAMALKAN KEMAMPUAN KREATIF SISWA?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tes IQ umumnya tidak mengungkapkan kemampuan kreatif dan sesungguhnya tidak merupakan alat yang baik untuk tujuan ini. Pengukuran intelegensi secara tradisional umumnya hanya mengevaluasi sedikit terhadap kemampuan individu.

Torrance (1962) menyatakan sebagai berikut :

Bila kita harus mengidentifikasi siswa sebagai siswa yang berbakat, yang didasarkan atas tes intelegensi (*IQ test*), maka kita akan mengeliminir kurang lebih sebanyak 70% dari siswa yang paling kreatif . . . Bila kesanggupan intelektual individu harus dikembangkan sepenuhnya, maka kemampuan yang terlibat dalam berpikir kreatif tidak boleh diabaikan. Pengukuran intelegensi secara tradisional berusaha mengevaluasi hanya sedikit bakat intelektual manusia.

Karena test tradisional tidak mengungkapkan potensi kreatif, maka para ahli psikologi telah menyusun sejumlah tes yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan kreatif.

Walaupun kreativitas dan intelegensi tidak harus mempunyai korelasi yang tinggi, ada beberapa petunjuk bahwa individu profesional yang sangat kreatif mempunyai intelegensi yang tinggi.

Ann Roe (1961) menemukan bahwa intelegensi minimum yang diperlukan untuk produksi kreatif dalam *science* adalah lebih tinggi daripada IQ rata-rata.

Usaha mengidentifikasi individu yang kreatif dengan menggunakan *nilai*, di sekolah umumnya kurang/tidak berhasil. Nilai yang diberikan di sekolah biasanya untuk *penguasaan materi*. Taylor (1964) melaporkan bahwa penguasaan materi belaka tidak menunjukkan suatu kondisi yang memenuhi penampilan kreatif. Dalam studinya terhadap ilmuwan yang kreatif, ia menemukan korelasi yang rendah antara *academic achievement* di sekolah dan produksi dalam industri. Kennon (1962) dalam studinya terhadap orang dewasa dengan kemampuan kreatif yang luar biasa menemukan bahwa mereka itu sebagian besar menerima nilai C dan B di sekolah daripada nilai A.

Kenyataan bahwa siswa yang kreatif tidak memperoleh nilai yang tinggi menunjukkan bahwa sekolah atau pendidikan tidak mengenal adanya kemampuan kreatif ini atau kurang menghargainya.

Muller (1964), dalam mereview masalah tentang apakah sekolah dapat memelihara dan mengembangkan kreativitas, menyatakan sebagai berikut :

Suatu paradoks yang luar biasa dalam penelitian terakhir ini tentang kreativitas di kelas : studi tentang proses kreativitas menekankan pandangan bahwa pikiran kreatif yang murni adalah pikiran dan kemauan yang selalu bebas. Bebas untuk membuat pilihan dan keyakinan yang dimilikinya dalam menghadapi kekangan (otoriter) dalam proses belajar-mengajar.

Barron (1972) menyatakan bahwa salah satu penemuan yang paling provokatif dalam penelitian kreativitas pada anak-anak ialah bahwa sistem sekolah itu sendiri mempunyai suatu pengaruh yang mencabarkan hati (meresahkan) terhadap spontanitas dan keaslian (*originality*). Akan tetapi, ia menekankan bahwa hal ini tidak perlu merupakan masalah yang mengecilkan hati. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa sekolah dapat dibuat

sebagai tempat pengalaman belajar-mengajar yang menyenangkan, kreatif, dan bermakna.

POTENSI KREATIF HARUS DIKEMBANGKAN SEJAK AWAL (SEDINI MUNGKIN)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi kreatif tidak akan muncul sendiri secara baik bila individu tidak mempunyai lingkungan yang memacu sejak awal.

Hess (1962) melakukan eksperimen dengan menggunakan tikus untuk menentukan bagaimana pengalaman mempengaruhi perilaku. Ia mengambil satu kelompok tikus rumah dan memeliharanya sebagai tikus piaraan. Tikus-tikus ini dibiarkan berlari-lari bebas di sekeliling rumahnya dalam waktu yang cukup lama. Kelompok tikus yang lain dibiarkan tinggal di dalam kandang di laboratorium. Setelah beberapa minggu, dua kelompok tikus itu diuji dengan menggunakan masalah yang menyedatkan (*maze-problems*). Penampilan pada tes kemampuan kelompok tikus yang dipelihara sebagai hewan piaraan secara signifikansi lebih tinggi daripada kelompok tikus di laboratorium.

Bennet dan kawan-kawan (1964), dalam studinya tentang anatomi dan biokimia pada kelompok hewan yang serupa, mengungkapkan bahwa hewan dengan pengalaman yang bermakna menunjukkan suatu kenaikan atau penambahan dalam jaringan korteks dan kegiatan *cholinestrase* otak. Dengan kata lain, korteks tidak hanya bertambah dalam ukurannya, tetapi fisiologi otak juga mengalami perubahan.

Hess (1963) menyatakan bahwa implikasi penelitiannya dalam pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Ada alasan untuk percaya bahwa potensi manusia, sebagaimana ditentukan secara genetik tidak mengungkapkan secara alamiah dan tidak dapat dielakkan, kecuali memerlukan partisipasi yang aktif dari suatu lingkungan yang memacu agar memperoleh pengembangan yang normal.
2. Sangat penting bahwa pacuan ini hendaknya terjadi sedini mungkin di dalam pengalaman anak.
3. Luasnya dan aneka macam pengalaman awal secara langsung mempengaruhi kemungkinan

proses belajar selanjutnya dan mengarahkan batasan terhadap keluwesan serta kemampuan intelektual manusia dewasa dengan membatasi atau memperluas jaringan konsep, pengertian, dan simbol yang merupakan jalur tempat individu mengalami dunianya.

4. Hambatan yang terjadi pada awal atau permulaan sekali terhadap pacuan yang memadai mungkin dapat mengakibatkan hilangnya beberapa kemampuan mental secara permanen.
5. Salah satu tujuan utama pendidikan di sekolah-sekolah ialah mengembangkan semaksimal mungkin kemampuan mental dengan memberikan pacuan secara sistematis dan latihan.

Hasil penelitian yang dilaporkan di atas jelas menunjukkan bagaimana guru/dosen harus memainkan peranannya. Guru/dosen mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa siswa/mahasiswa mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kreatif mereka agar dapat mencetuskan potensi kreatif yang terpendam.

MENGHARGAI KREATIVITAS DENGAN MEMBERIKAN NILAI DAPAT MERINTANGI PRODUKSI KREATIF KELAS

Gibbs (1972) bekerja dengan sejumlah perusahaan dan instansi pemerintah untuk menentukan pengaruh pemberian hadiah untuk kerja kreatif. Melalui wawancara yang sistematis selama jangka waktu yang cukup lama ia mengungkapkan bahwa pekerja yang diberi hadiah karena usaha kreatif tampaknya lebih suka untuk menyimpan secara rahasia idenya dan berhati-hati dalam menyebarkan/mengamalkan idenya. Selanjutnya ia menyatakan bahwa memberi hadiah atas usaha kreatif sesungguhnya dapat cenderung untuk mengembangkan penipuan, kepalsuan, dan mengurangi komunikasi antara individu.

Walaupun memberikan hadiah atas usaha kreatif, misalnya dengan memberikan nilai yang baik, yang pada lahirnya tampak sudah selayaknya, sesungguhnya hal ini dapat memungkinkan penghancuran atau kerugian untuk produk kreatif kelas. Lebih lanjut Gibbs menemukan bahwa siswa yang diberi penghargaan nilai untuk produksi kreatif cenderung lebih banyak bertingkah laku untuk tujuan *memperoleh nilai* daripada *belajar*.

Hadiah yang murni dan berlangsung lama untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif berasal dari *internal self-realization*, yaitu bahwa "saya dapat menjadi kreatif". Hal ini merupakan *self-satisfying* bagi seseorang untuk menemukan dan mengetahui bahwa ia mempunyai kemampuan atau potensi kreatif ini.

Kekuatan terhadap individu yang dipacu dengan pemberian nilai ialah bahwa sekali hadiah

ektrinsik ini tidak ada lagi ia mungkin mengurangi atau lepas sama sekali untuk menjadi produktif. Sebaliknya individu yang memperoleh hadiah intrinsik dari kreativitas penemuannya sendiri akan tampak lebih mengarah untuk melanjutkan kegiatan kreatif dan belajar selama hayat masih di kandung badannya.

(Bersambung)

Kemampuan Intelektual yang Terlibat dalam Proses Kreatif						
	Unit	Classes	Relations	System	Transfor- Implications	tions
Cognition	-	-	-	-	-	1
Memory	1	1	1	-	-	-
Divergent Thinking	1,3	2	3	2**	2**	3
Convergent Thinking	-	-	-	-	2	-
Evaluation	3	3	3	3	3	3

Richard M. Gorman. *The Psychology of Classroom Learning. An Inductive Approach* Columbus, Ohio : Charles E. Merill Publishing company, 1974.

Keterangan :

Nomor-nomor menunjukkan kapan masing-masing kemampuan dalam keadaan *aktif* (1 = fase awal; 2 = fase inspirasi; 3 = fase elaborasi); tanda bintang ganda menunjukkan kemampuan mana yang penting dalam proses kreatif.

Lampiran

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Tanggal : 23 Februari 1983

Nomor : 020/C/Kep/I 83

**PEDOMAN PENILAIAN
UNTUK AKREDITAS SEKOLAH SWASTA**

1. Penilaian sekolah swasta untuk menetapkan jenjang akreditasi dilakukan terhadap 7 (tujuh) komponen yaitu :
 - a. Komponen ADMINISTRASI SEKOLAH
 - b. Komponen KELEMBAGAAN
 - c. Komponen KETENAGAAN
 - d. Komponen KURIKULUM
 - e. Komponen MURID
 - f. Komponen SARANA/PRASARANA
 - g. Komponen SITUASI UMUM
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan akreditasi, maka terhadap komponen tersebut dilakukan pembobotan sebagai berikut ;
 - a. Komponen ADMINISTRASI SEKOLAH diberi bobot 3
 - b. Komponen KELEMBAGAAN diberi bobot 4
 - c. Komponen KETENAGAAN diberi bobot 4
 - d. Komponen KURIKULUM diberi bobot 4
 - e. Komponen MURID diberi bobot 3
 - f. Komponen SARANA/PRASARANA diberi bobot 3
 - g. Komponen SITUASI UMUM diberi bobot 4
3. Penilaian sekolah swasta dilakukan dengan memperhatikan kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Lembar 1 s/d 7 Kriteria penilaian pada Lampiran ini.
4. Setiap komponen mempunyai beberapa sub komponen yang harus dinilai sesuai dengan Formulir 1 s/d 7 pada lampiran ini.
5. Untuk jenis sekolah yang mempunyai kekhususan, jumlah sub komponen dapat disesuaikan dengan keperluan.
6. Setiap sub komponen diberi angka antara 1 s/d 100.
7. Angka rata-rata tiap komponen adalah jumlah angka seluruh sub komponen dibagi dengan jumlah sub komponen.
8. Angka rata-rata tiap komponen dipindahkan ke Formulir 8 s/d 16 pada Lampiran keputusan ini, untuk dikalikan dengan nilai pembobotan yang telah ditentukan.
9. Nilai akhir untuk menentukan jenjang akreditasi adalah jumlah nilai semua komponen sesudah dikalikan dengan nilai pembobotan kemudian dibagi 25 (jumlah nilai pembobotan).
10. Jenjang akreditasi "Terdaftar" diberikan kepada sekolah yang mencapai nilai akhir "kurang" dengan nilai 25 s/d 59 dengan catatan tidak terdapat komponen dengan nilai kurang dari 25. Jenjang akreditasi "Diakui" diberikan kepada sekolah yang mencapai nilai akhir "cukup" dengan nilai 60 s/d 80 dengan catatan tidak terdapat komponen dengan nilai kurang dari 30. Jenjang akreditasi "Disamakan" diberikan kepada sekolah yang mencapai nilai akhir "baik"

- dengan nilai 81 s/d 100 dengan catatan tidak terdapat komponen dengan nilai kurang dari 40.
11. Klasifikasi "Tercatat" diberikan kepada sekolah yang karena sesuatu hal belum ditetapkan jenjang akreditasinya.

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,
ttd.

Prof. Darji Darmodiharjo, S.H.
NIP 130676351

**KRITERIA PENILAIAN UNTUK INSTRUMEN
AKREDITASI SEKOLAH SWASTA
KOMPONEN : ADMINISTRASI SEKOLAH**

Lembar 1

No.	SUB KOMPONEN	KRITERIA YANG DIPAKAI UNTUK MENILAI			KETERANGAN
		(81 s/d 100)	(60 s/d 80)	(1 s/d 59)	
1.	ADMINISTRASI KEPALA SEKOLAH.	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pendirian sekolah lengkap. - Ada tempat khusus, peralatan cukup. - Ada program kerja, kalender pendidikan, daftar pembagian tugas, jadwal pelajaran, notula rapat, petugas piket, buku tamu, keadaan murid, guru, pegawai, data statistik, dan terpelihara baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen pendirian sekolah kurang lengkap. - Ada tempat khusus, peralatan cukup. - Ada program kerja, kalender pendidikan, notula rapat, buku tamu dan beberapa daftar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen pendirian sekolah tidak lengkap. - Ada tempat, peralatan kurang. - Ada program kerja dan kalender pendidikan. 	
2.	ADMINISTRASI MURID/SISWA.	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat khusus. - Ada buku induk, buku kumpulan nilai, kartu buku, buku mutasi, klaper, daftar kelas, dan buku absen yang terpelihara dan diolah dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat khusus - Ada buku induk, buku kumpulan nilai, buku mutasi, buku absen, diolah dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat. - Ada buku induk, buku kumpulan nilai, buku absen. 	
3.	ADMINISTRASI GURU	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat khusus. - Ada buku kurikulum, agenda guru, daftar nilai, kumpulan tes, daftar buku pegangan guru dan siswa, terpelihara dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat khusus. - Ada buku kurikulum, daftar nilai, kumpulan tes, terpelihara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat. - Ada buku kurikulum dan daftar nilai. 	
4.	ADMINISTRASI PEGAWAI.	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat khusus. - Tersedia file pegawai lengkap dengan pas-to, salinan SK, Ijazah, daftar urut kepegawaian, catatan waktu kenaikan tingkat/gaji, buku induk pegawai dan daftar hadir terpelihara dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat khusus. - Tersedia file tiap pegawai, daftar hadir dan terpelihara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat. - Tersedia file tiap pegawai, daftar hadir, tetapi kurang terpelihara. 	
5.	ADMINISTRASI SURAT MENYURAT.	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat khusus. - Ada agenda surat keluar/masuk, buku ekspedisi dan file untuk arsip serta terpelihara 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat khusus. - Ada agenda surat keluar/masuk, buku ekspedisi dan file untuk arsip tetapi kurang terpelihara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat. - Ada agenda surat keluar/masuk, dan file untuk arsip, tetapi tidak terpelihara. 	

**KRITERIA PENILAIAN UNTUK INSTRUMEN
AKREDITASI SEKOLAH SWASTA
KOMPONEN : ADMINISTRASI SEKOLAH**

Lembar 1

No.	SUB KOMPONEN	KRITERIA YANG DIPAKAI UNTUK MENILAI			KETERANGAN
		(81 s/d 100)	(60 s/d 80)	(1 s/d 59)	
6.	ADMINISTRASI KEUANGAN.	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat khusus. - Ada buku kas umum, buku kas pembantu atau buku kas tabelaris peti besi/kotak uang serta dikelola dengan baik dan terpelihara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat khusus. - Ada buku kas umum, buku kas pembantu atau buku kas tabelaris serta terpelihara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat. - Ada buku kas umum dan buku kas pembantu atau buku kas tabelaris tetapi tidak terpelihara. 	
7.	ADMINISTRASI BP.	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat khusus. - Ada kartu pribadi tiap siswa, catatan kasus serta terpelihara baik. - Ada peta kelas dan peta murid. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat khusus. - Ada catatan kasus serta terpelihara. - Ada peta murid dan peta kelas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat. - Ada catatan kasus. - Ada peta murid. 	
8.	ADMINISTRASI PERLENGKAPAN.	<ul style="list-style-type: none"> - Ada daftar seluruh inventaris, daftar inventaris tiap ruangan, daftar penghapusan, dan nomor inventaris pada setiap barang serta terpelihara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada daftar seluruh inventaris dan daftar inventaris tiap ruangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada daftar inventaris. 	
9.	ADMINISTRASI LABORATORIUM/ WORK SHOP.	<ul style="list-style-type: none"> - Ada catatan hasil percobaan/praktek murid, daftar peralatan, daftar bahan-bahan, daftar penggunaan, lengkap dan terpelihara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada catatan hasil percobaan/praktek murid, daftar peralatan, dan daftar penggunaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada catatan hasil percobaan/praktek murid, dan daftar peralatan. 	
10.	ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN.	<ul style="list-style-type: none"> - Ada daftar keseluruhan buku, katalog, kartu anggota, daftar peminjam, daftar penghapusan dan terpelihara baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada daftar keseluruhan buku, kartu buku dan kartu anggota, dan terpelihara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada daftar keseluruhan buku, kartu buku, kartu anggota, tetapi kurang terpelihara. 	

**KRITERIA PENILAIAN UNTUK INSTRUMEN
AKREDITASI SEKOLAH SWASTA
KOMPONEN : KELEMBAGAAN**

Lembar 2

No.	SUB KOMPONEN	KRITERIA YANG DIPAKAI UNTUK MENILAI			KETERANGAN
		(81 s/d 100)	(60 s/d 80)	(1 s/d 59)	
1.	STATUS LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN.	Berbadan Hukum, pengurus lengkap dan berfungsi dengan baik.	Berbadan Hukum, pengurus ada, kurang berfungsi atau belum berbadan hukum, pengurus ada dan berfungsi dengan baik.	- Belum berbadan Hukum, pengurus ada, tidak berfungsi.	
2.	LOYALITAS LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN TERHADAP KEBIJAKSANAAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAH.	- Menjabarkan dan melaksanakan, serta mentaati ketentuan Pemerintah.	- Kurang menjabarkan/ kurang tanggap tetapi tidak menyimpang dari ketentuan Pemerintah.	- Kurang sempurna dalam melaksanakan ketentuan Pemerintah	
3.	ORGANISASI PENYELENGGARA SEKOLAH.	- Terdapat pembagian tugas yang jelas antara penyelenggara sekolah dengan pelaksana pengelola. - Pengelola sekolah punya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas. - Wali kelas ada untuk setiap kelas, melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.	- Terdapat pembagian tugas antara penyelenggara sekolah dengan pelaksana pengelola sekolah. - Ada struktur organisasi pengelola sekolah dan pembagian tugas. - Wali kelas ada untuk setiap kelas.	- Kurang tampak adanya pembagian tugas antara penyelenggara sekolah dengan pelaksana pengelola sekolah. - Ada struktur organisasi pengelola sekolah, tetapi pembagian tugas kurang tampak. - Ada wali kelas.	
4.	PENEMPATAN TENAGA-TENAGA KEPENDIDIKAN.	- Menempatkan guru menurut syarat dan sesuai dengan bidang studi. - Menempatkan tenaga lainnya sesuai dengan keperluan sekolah.	- Menempatkan guru menurut syarat. - Menempatkan tenaga lainnya seimbang dengan keperluan sekolah.	- Menempatkan guru/ tenaga lainnya kurang/tidak sesuai dengan keperluan sekolah.	
5.	KESESUAIAN SEKOLAH DENGAN KEPERLUAN LINGKUNGAN.	- Komposisi/perbandingan persekolahan cocok. - Sangat diperlukan lingkungan. - Peminat meningkat tiap tahun.	- Komposisi/perbandingan persekolahan cocok. - Diperlukan lingkungan. - Peminat terbatas.	- Didirikan atas kehendak yayasan/ penyelenggara. - Kurang sesuai dengan keperluan lingkungan. - Kurang peminat.	

6. KESESUAIAN.....

**KRITERIA PENILAIAN UNTUK INSTRUMEN
AKREDITASI SEKOLAH SWASTA
KOMPONEN : KELEMBAGAAN**

Lembar 2

No.	SUB KOMPONEN	KRITERIA YANG DIPAKAI UNTUK MENILAI			KETERANGAN
		(81 s/d 100)	(60 s/d 80)	(1 s/d 59)	
6.	KESESUAIAN SEKOLAH DENGAN PEMERATAAN KESEMPATAN BELAJAR.	- Dapat menampung anak-anak yang ingin bersekolah.	- Daya tampung sekolah lebih besar dari peminat.	- Daya tampung sekolah jauh lebih besar dari peminat.	
7.	PROGRAM KERJA LEMBAGA PENYELENGGARA.	- Mempunyai program kerja jangka pendek, menengah dan panjang yang relevan dan dilaksanakan dengan baik.	- Mempunyai program tahunan serta dilaksanakan dengan baik.	- Mempunyai program tahunan tetapi tidak dilaksanakan. - Tidak punya program kerja yang pasti.	
8.	SUMBANGAN DANA DARI MASYARAKAT.	- Uang pangkal, uang gedung, uang sekolah dan lain-lain wajar (terjangkau masyarakat banyak).	- Uang pangkal, uang gedung, uang sekolah dan lain-lain cukup wajar (kurang terjangkau oleh masyarakat).	- Uang pangkal, uang gedung, uang sekolah dan lain-lain kurang wajar (tidak terjangkau oleh masyarakat).	

**KRITERIA PENILAIAN UNTUK INSTRUMEN
AKREDITASI SEKOLAH SWASTA
KOMPONEN : KETENAGAAN**

Lembar 3

No.	SUB KOMPONEN	KRITERIA YANG DIPAKAI UNTUK MENILAI			KETERANGAN
		(81 s/d 100)	(60 s/d 80)	(1 s/d 59)	
1.	JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga minimal 5/3 x kelas + 1. - Memenuhi keperluan semua bidang studi/ pengembangan. - Guru tetap 50% ke atas minimum 3 orang. - Mempunyai minimal 2 orang tenaga TU. - Untuk TK/SD Jumlah guru lebih besar jumlah kelas (jumlah kelas + 1). 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah guru kurang dari 5/3 x kelas + 1. - Kurang memenuhi keperluan bidang studi/ bidang pengembangan - Guru tetap minimum 3 orang. - Mempunyai minimal 1 orang tenaga TU. - Untuk TK/SD Jumlah guru kurang dari jumlah kelas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah guru minimal 5/3 x kelas + 1. - Memenuhi keperluan bidang studi/ pengembangan. - Guru tetap kurang dari 50% minimal 3 orang. - Mempunyai minimal 2 orang tenaga TU. - Untuk TK/SD Jumlah guru sama dengan jumlah kelas. 	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru tetap SK, Menteri. 2. Guru tetap SK, Yayasan.
2.	KEPALA SEKOLAH.	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai wewenang sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan Pemerintah. - Berpengalaman mengajar di sekolah yang sejenis 10 tahun atau lebih di antaranya minimal 5 tahun sebagai guru. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai wewenang sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan pemerintah. - Berpengalaman mengajar di sekolah yang sejenis 6 tahun atau lebih di antaranya minimal 3 tahun sebagai guru atau - Wewenang setingkat lebih rendah dari peraturan pemerintah. - Berpengalaman mengajar di sekolah yang sejenis 10 tahun atau lebih di antaranya 5 tahun sebagai guru. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai wewenang sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan pemerintah, atau - Wewenang setingkat lebih rendah dari peraturan pemerintah. - Berpengalaman mengajar di sekolah yang sejenis 6 tahun atau lebih di antaranya 3 tahun sebagai guru. 	
3.	KEMAMPUAN TENAGA PENGAJAR	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari 80% guru yang berpengalaman di atas 3 tahun. - Mengajar sesuai bidang studi masing-masing. 	<ul style="list-style-type: none"> - 50% – 80% guru berpengalaman di atas 3 tahun. - Sebagian guru mengajar lebih dari satu bidang studi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang dari 50% guru berpengalaman di atas 3 tahun. - Mengajar tidak sesuai dengan bidang studi. 	<p>Pada sekolah kejuruan guru-guru Vak minimal sesuai dengan jumlah jurusan.</p>
4.	KEWENANGAN TENAGA PENGAJAR.	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih 80% guru memenuhi persyaratan. 	<ul style="list-style-type: none"> - 50% – 80% guru memenuhi persyaratan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang dari 50% guru memenuhi persyaratan. 	
5.	DISIPLIN TENAGA KEPENDIDIKAN.	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih 90% tenaga kependidikan melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - 80% – 90% tenaga kependidikan melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang dari 80% tenaga kependidikan melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 	

**KRITERIA PENILAIAN UNTUK INSTRUMEN
AKREDITASI SEKOLAH SWASTA
KOMPONEN : KETENAGAAN**

Lembar 3

No.	SUB KOMPONEN	KRITERIA YANG DIPAKAI UNTUK MENILAI			KETERANGAN
		(81 s/d 100)	(60 s/d 80)	(1 s/d 59)	
6.	KREATIVITAS TENAGA PENGAJAR.	- Sebagian besar guru berbuat sesuatu yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar (80%).	- Sebagian kecil guru berbuat sesuatu yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar (80% – 40%).	- Guru kurang kreatif (40%).	
7.	PRESENTASE TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA TATA USAHA.	- Kehadiran semua tenaga kependidikan dan TU 98% – 100%.	- Kehadiran semua tenaga kependidikan TU 95% – 97%.	- Kehadiran semua tenaga kependidikan dan TU kurang dari 95%.	
8.	TANGGUNG JAWAB TENAGA PENGAJAR.	- Semua guru dapat melaksanakan Garis-garis Besar Program Pengajaran tepat pada waktunya (90%).	- Sebagian besar guru dapat melaksanakan Garis-garis Besar Program Pengajaran tepat pada waktunya 60% - 89%.	- Sebagian kecil guru dapat melaksanakan Garis-garis Besar Program Pengajaran dan tepat pada waktunya 60%.	

**KRITERIA PENILAIAN UNTUK INSTRUMEN
AKREDITASI SEKOLAH SWASTA
KOMPONEN : KURIKULUM**

Lembar 4

No.	SUB KOMPONEN	KRITERIA YANG DIPAKAI UNTUK MENILAI			KETERANGAN
		(81 s/d 100)	(60 s/d 80)	(1 s/d 59)	
1.	PROGRAM TAHUNAN PELAKSANAAN KURIKULUM.	<ul style="list-style-type: none"> - Ada program pelaksanaan tahunan kurikulum yang lengkap (kegiatan waktu, tenaga, sarana, tempat). 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pelaksanaan tahunan kurikulum kurang lengkap (kegiatan + waktu). 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pelaksanaan tahunan kurikulum tidak teratur. 	
2.	PROGRAM SATUAN PELAJARAN.	<ul style="list-style-type: none"> - Semua guru membuat Satuan Pelajaran/Unit (TK). - Jadwal alokasi waktu mengajar disiapkan dengan baik. - Program disusun berdasarkan GBPP secara lengkap. - Menerapkan metoda yang relevan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar guru membuat Satuan Pelajaran/Unit (TK). - Ada jadwal alokasi waktu mengajar. - Program disusun berdasarkan GBPP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian kecil guru membuat Satuan Pelajaran/Unit (TK). - Tidak ada jadwal alokasi waktu mengajar. - Program tidak disusun berdasarkan GBPP. 	Untuk sekolah yang kurikulumnya belum memakai Garis-garis Besar Program Pengajaran dan Satuan Pelajaran maka penilaian disesuaikan dengan kurikulum yang berikut.
3.	PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PENYULUHAN (BP).	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan oleh petugas khusus. - Bimbingan Penyuluhan. - Ada program kerja yang baik. - Ada file siswa lengkap. - Ada rekaman kasus secara lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dirangkap oleh wali kelas. - Ada program kerja. - Ada file siswa. - Ada rekaman kasus. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dirangkap oleh guru. - Tidak ada program kerja. - Tidak ada rekaman kasus. 	
4.	PENCAPAIAN TARGET KURIKULUM.	<ul style="list-style-type: none"> - Ada daftar satuan program pengajaran dan tugas untuk satu tahun. - Ada catatan lengkap kemajuan belajar serta kesulitannya. - Program dicapai 71% ke atas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada daftar satuan program pengajaran dan tugas untuk satu semester. - Ada catatan kemajuan belajar siswa. - Program dicapai 60% - 70%. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada daftar satuan program pengajaran dan tugas kurang dari satu semester. - Tidak ada catatan hasil belajar siswa. - Program dicapai kurang dari 60%. 	
5.	DAYA SERAP SISWA	<ul style="list-style-type: none"> - Ada daftar nilai hasil tes formatif dan sumatif yang lengkap. - Daya serap siswa 80% ke atas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada daftar nilai hasil tes formatif dan sumatif. - Daya serap siswa 60% - 79%. 	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar nilai hasil tes formatif dan sumatif kurang teratur. - Daya serap kurang dari 60%. 	
6.	PELAKSANAAN EVALUASI	<ul style="list-style-type: none"> - Tes formatif dan sumatif dilaksanakan secara baik dan teratur. - Untuk setiap satuan bahasan diadakan tes formatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes formatif dan sumatif dilaksanakan secara teratur. - Jumlah tes formatif lebih dari 70% dari jumlah satuan bahasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes formatif dan sumatif dilaksanakan. - Jumlah tes formatif kurang dari 70% dari jumlah satuan bahasan 	

7. PELAKSANAAN . . .

SUARA GURU

**KRITERIA PENILAIAN UNTUK INSTRUMEN
AKREDITASI SEKOLAH SWASTA
KOMPONEN : KURIKULUM**

Lembar 4

No.	SUB KOMPONEN	KRITERIA YANG DIPAKAI UNTUK MENILAI			KETERANGAN
		(81 s/d 100)	(60 s/d 80)	(1 s/d 59)	
7.	PELAKSANAAN PROGRAM KETERAMPILAN/PRAKTEK KEJURUAN.	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan oleh guru khusus keterampilan/praktek kejuruan. - Ada program dan pelaksanaan secara baik dan teratur sesuai kurikulum. - Dilaksanakan di ruang khusus dengan peralatan yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan oleh guru tertentu bukan guru khusus keterampilan/praktek kejuruan. - Ada program dan pelaksanaan sesuai kurikulum. - Dilaksanakan di ruangan dengan peralatan yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan oleh guru yang sedang bebas. - Ada program dan pelaksanaan kurang teratur. - Dilaksanakan dengan peralatan yang kurang. 	
8.	PELAKSANAAN PROGRAM KO. KURIKULER DAN EXTRA KURIKULER.	<ul style="list-style-type: none"> - Ada guru pembina khusus. - Ada program kegiatan yang disusun dan dilaksanakan secara baik dan teratur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada guru pembina. - Ada program kegiatan yang disusun secara baik, dan dilaksanakan secara memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada guru pembina. - Ada program kegiatan yang disusun tetapi pelaksanaan tidak teratur. 	Yang dimaksud antara lain UKS, Koperasi, Pramuka PKS, dll.
9.	PELAKSANAAN PROGRAM KEPUSTAKAAN.	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan oleh guru khusus perpustakaan. - Kesempatan meminjam tiap hari secara teratur. - Ada pencatatan peminjaman lengkap yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan oleh guru yang ditugasi khusus (bukan ahli perpustakaan). - Kesempatan meminjam berkala tetapi teratur. - Ada pencatatan peminjaman teratur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan oleh guru yang bebas meminjam. - Kesempatan tidak tentu. - Pencatatan peminjaman tidak teratur. 	

**KRITERIA PENILAIAN UNTUK INSTRUMEN
AKREDITASI SEKOLAH SWASTA
KOMPONEN : MURID/SISWA**

Lembar 5

No.	SUB KOMPONEN	KRITERIA YANG DIPAKAI UNTUK MENILAI			KETERANGAN
		(81 s/d 100)	(60 s/d 80)	(1 s/d 59)	
1.	MINAT MEMASUKI SEKOLAH.	- Jumlah calon siswa tiap tahun melebihi satu setengah kali daya tampung.	- Jumlah calon siswa tiap tahun melebihi daya tampung.	- Jumlah calon siswa tiap tahun sama dengan daya tampung.	
2.	PROSENTASE KELULUSAN TIAP TAHUN.	- Tiap tahun rata-rata lulus 90% – 100%.	- Rata-rata lulus tiap tahun 75% – 89%.	- Rata-rata lulus tiap tahun 70% – 74%.	
3.	KENAIKAN KELAS/TINGKAT (TK).	- Kenaikan kelas berdasarkan ketentuan yang berlaku. - Angka kenaikan kelas rata-rata 90% – 100%.	- Kenaikan kelas berdasarkan ketentuan yang berlaku. - Angka kenaikan kelas rata-rata 80% – 89%.	- Kenaikan kelas menyimpang dari ketentuan yang berlaku. - Angka kenaikan kelas rata-rata di bawah 80%.	
4.	KETERTIBAN	- Semua murid/siswa taat kepada tata tertib sekolah (>90%).	- Sebagian besar murid/siswa taat pada tata tertib sekolah (60% – 90%).	- Sebagian kecil murid/siswa taat pada tata tertib sekolah (<60%).	
5.	KEGIATAN OSIS.	- OSIS berfungsi sepenuhnya dalam menunjang kegiatan sekolah.	- OSIS hanya kadang-kadang berfungsi menunjang kegiatan sekolah.	- OSIS hanya berfungsi karya pada beberapa kegiatan sekolah.	Tidak berlaku untuk TK, SD dan SLB.
6.	PROSENTASE KEHADIRAN MURID/SISWA.	- Prosentase kehadiran murid rata-rata 95% – 100%.	- Prosentase kehadiran murid rata-rata 90% – 94%.	- Prosentase kehadiran murid/siswa < 90%.	
7.	PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID/SISWA.	- Sesuai dengan ketentuan Pemerintah.	- Menurut ketentuan Pemerintah ditambah persyaratan dari Yayasan.	- Menerapkan peraturan secara longgar ditambah pertimbangan tertentu di luar ketentuan yang ditetapkan.	
8.	MUTASI MURID/SISWA KELAS TERTINGGI TIAP TAHUN.	- Mutasi murid/siswa antara 0% – 1%.	- Mutasi murid/siswa antara 2% – 3%.	- Mutasi murid/siswa antara 4% – 5%.	

**KRITERIA PENILAIAN UNTUK INSTRUMEN
AKREDITASI SEKOLAH SWASTA
KOMPONEN : SARANA/PRASARANA**

Lembar 6

No.	SUB KOMPONEN	KRITERIA YANG DIPAKAI UNTUK MENILAI			KETERANGAN
		(81 s/d 100)	(60 s/d 80)	(1 s/d 59)	
1.	STATUS TANAH SEKOLAH.	- Hak milik dengan bukti yang sah dan lengkap.	- Hak pakai dengan bukti yang sah dan lengkap.	- Menyewa dengan bukti yang sah dan lengkap.	
2.	STATUS GEDUNG SEKOLAH.	- Hak milik dengan bukti yang sah dan lengkap.	- Hak pakai dengan bukti yang sah dan lengkap.	- Menyewa dengan bukti yang sah dan lengkap.	
3.	KESESUAIAN LUAS RUANGAN KELAS DENGAN JUMLAH MURID.	- Sesuai dengan pembakuan.	- Penyimpangan 20% di atas atau di bawah pembakuan.	- Penyimpangan lebih besar 20%.	Lihat standar tiap jenis sekolah.
4.	RUANGAN KETERAMPILAN/PRAKTEK/LABORATORIUM/BP/PERPUSTAKAAN DAN RUANG BERMAIN BEBAS UNTUK TK.	- Semuanya ada, lengkap peralatannya, terpelihara dan berfungsi dengan baik.	- Ada beberapa ruangan, peralatan, memadai dan berfungsi.	- Hanya ada satu ruangan, dengan peralatan memadai dan berfungsi.	
5.	RUANG KHUSUS KEPALA SEKOLAH.	- Ukuran dan kualitas memenuhi syarat. - Peralatan lengkap.	- Ukuran dan kualitas cukup memadai. - Peralatan cukup memadai.	- Ukuran dan kualitas kurang. - Peralatan kurang.	
6.	RUANG KHUSUS GURU-GURU DAN TATA USAHA.	- Keduanya ada terpisah - Ukuran dan peralatan cukup baik, menurut keperluan.	- Keduanya ada tapi tidak terpisah. - Ukuran dan peralatan cukup memadai, menurut keperluan.	- Hanya ada salah satu. - Ukuran dan peralatan kurang memenuhi syarat menurut keperluan.	
7.	GUDANG/RUANG KHUSUS UNTUK MENYIMPAN PERALATAN.	- Memenuhi persyaratan dengan baik.	- Cukup memenuhi persyaratan.	- Kurang memenuhi persyaratan	
8.	WC/KAMAR MANDI	- Ada WC/kamar mandi untuk guru dan untuk murid, pria dan wanita. - Jumlahnya sesuai dengan keperluan. - Terpelihara dengan baik.	- Ada WC/kamar mandi untuk guru dan murid pria dan wanita. - Jumlahnya cukup memadai. - Terpelihara.	- Ada WC/kamar mandi - Jumlahnya kurang. - Kurang terpelihara.	Lihat standar tiap jenis sekolah.

9. KONDISI

**KRITERIA PENILAIAN UNTUK INSTRUMEN
AKREDITASI SEKOLAH SWASTA
KOMPONEN : SARANA/PRASARANA**

Lembar 6

No.	SUB KOMPONEN	KRITERIA YANG DIPAKAI UNTUK MENILAI			KETERANGAN
		(81 s/d 100)	(60 s/d 80)	(1 s/d 59)	
9.	KONDISI TANAH GEDUNG DAN RUANGAN.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi menurut ketentuan/persyaratan. - Terpelihara baik. - Permanen. 	<ul style="list-style-type: none"> - kondisi cukup baik. - Terpelihara. - Semi permanen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi kurang memenuhi syarat. - Kurang terpelihara. - Darurat. 	
10.	PERABOT DAN KELENGKAPAN TIAP RUANGAN KELAS.	<ul style="list-style-type: none"> - Meja, kursi/bangku, lemari, papan tulis lengkap dan terpelihara dengan baik. - Atribut PMP lengkap (Garuda Pancasila, gambar Presiden dan Wakil Presiden, teks Sumpah Pemuda, bendera merah putih dan Peta Indonesia). 	<ul style="list-style-type: none"> - Meja, kursi/bangku, lemari, papan tulis memadai dan cukup terpelihara. - Atribut PMP cukup lengkap (Garuda Pancasila, gambar Presiden dan Wakil Presiden dan teks Sumpah Pemuda). 	<ul style="list-style-type: none"> - Meja, kursi/bangku, papan tulis, kurang memadai dan kurang terpelihara. - Atribut PMP tidak ada. 	
					(Bersambung)

KERJASAMA DI BIDANG TEKNIK ANTARA PEMERINTAH SWISS DAN INDONESIA DITANDATANGANI

BANTUAN teknik kali ini tidak kalah pentingnya dari yang terdahulu, mengingat bantuan teknik kali ini memiliki fungsi strategis dalam pengembangan Guru-guru Kejuruan bagi Sekolah-sekolah Teknologi Menengah di Indonesia.

Hal itu dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto pada acara penandatanganan persetujuan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Swiss oleh Duta Besar Swiss Jean Bourgeois mengenai pembangunan Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan Teknologi di Malang, tanggal 1 Agustus 1983 di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.

Dikatakan Menteri, bantuan ini berbeda dengan bantuan terdahulu yang telah menghasilkan pembangunan suatu lembaga pendidikan yang dikenal sebagai lembaga Pendidikan Politeknik Mekanik Swiss-ITB di Bandung. Lembaga Pendidikan tersebut telah menghasilkan tamatan yang merupakan perintis pembangunan dan sangat berdaya guna dalam pengembangan industri di Indonesia. Sedangkan bantuan yang sekarang baru saja ditandatangani akan merupakan masukan yang penting untuk menunjang pembangunan suatu Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi di Malang yang perangkat kerasnya sebagian dibiayai dengan dana pinjaman yang diperoleh Pemerintah Indonesia dari Asian Development Bank.

Menurut Menteri apabila kita ingin mempercepat laju perkembangan industri, maka tenaga guru khususnya guru praktek, merupakan masalah yang sangat penting baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Di negara-negara maju tenaga pengajar praktek kebanyakan adalah tenaga ahli dengan pengalaman industri yang telah mendapat pendidikan dan latihan kejuruan. Sebaliknya di Indonesia, perkembangan industri masih berada dalam tahap awal, di mana keperluan akan tenaga kerja terampil sangat mendesak. Oleh karena itu guru-guru dan instruktur kejuruan yang merupakan faktor penting dalam pemenuhan tenaga

kerja industri terampil, harus dididik di pelbagai lembaga pendidikan yang berhubungan erat dengan dunia industri.

– Mempunyai Peranan Strategis

Menyinggung masalah peranan strategis tenaga pengajar dalam pengembangan sumber daya manusia yang merupakan faktor penting bagi rencana Pembangunan Nasional, Menteri menekankan bahwa tenaga pengajar memegang fungsi awal dalam usaha membudayakan penerapan ilmu dan teknologi dalam tata kehidupan manusia melalui para siswa yang dididiknya. Karena itu kedudukan tenaga pengajar merupakan ujung tombak dalam pengembangan industri di Indonesia.

Menteri Nugroho mengharapkan lembaga ini berfungsi sebagai wahana pembaharuan yang dapat menyediakan masukan dan memberikan saran-saran mengenai : kebijaksanaan teknis pengembangan pendidikan menengah kejuruan; pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan; kebijaksanaan penganggaran dan penyediaan dana; hubungan kerjasama dengan industri, serta pengembangan dan peningkatan sekolah-sekolah kejuruan yang mencakup aspek pengelolaan, bangunan dan peralatan pendidikan, logistik dan pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Dengan kata lain fungsi-fungsi tersebut merupakan contoh usaha alih teknologi secara menyeluruh dan terpadu yang dapat disumbangkan oleh negara-negara maju sesuai dengan keperluan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

– US\$ 3.000.000

Sebagaimana diketahui, Proyek Peningkatan Pendidikan Kejuruan Teknik III memperoleh bantuan dari Asean Development Bank (ADB) terbagi atas dua fase, yaitu fase pertama membangun satu Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (P3GT) di Medan dan 17 STM di seluruh Indonesia, sedangkan untuk fase kedua membangun satu P3GT di Malang dan 16 STM di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Swiss memberikan bantuan hibah sebesar US\$ 3.000.000 untuk selama tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 pada Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi di Malang, yang persetujuan kerjasamanya ditandatangani hari ini. Bantuan tersebut berupa : 16 orang tenaga ahli yang akan ditugas-

kan di P3GT Malang selama 3 tahun dengan kemungkinan dapat diperpanjang, biaya perumahan tenaga ahli Swiss menjadi tanggungan Pemerintah Swiss, bantuan peralatan untuk kepentingan tenaga ahli yang bekerja di P3GT sebesar S.Fr. 340.000,00 dan beasiswa terbatas dengan biaya sampai dengan S.Fr. 80.000,00.

Sambungan hal 37

1) Tugas *Kepala Sekolah*, antara lain :

- a) Menciptakan suatu situasi yang dapat meningkatkan kegemaran dan kecintaan terhadap lingkungan hidup bagi siswa.
- b) Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengumpulkan data/fakta secara obyektif.
- c) Mengusahakan tersedianya laboratorium dan alat-alat yang diperlukan.
- d) Memberikan penghargaan kepada siswa atas hasil penelitiannya.

2) Tugas *guru*, antara lain :

- a) Memberikan pedoman dan petunjuk kepada siswa cara melakukan penelitian sederhana.
- b) Mengusahakan agar siswa gemar melakukan penelitian.
- c) Memberitahukan kepada siswa akan manfaat penelitian.
- d) Memberikan motivasi kepada siswa agar melakukan penelitian, dimulai dengan melatih siswa mengadakan penelitian yang sederhana.
- e) Mendorong siswa agar suka meneliti gejala-gejala alam dan gejala-gejala sosial yang terjadi di sekitarnya.
- f) Memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil melakukan penelitian.

3) Tugas *karyawan sekolah/tenaga administrasi*, antara lain :

- a) Membantu pengaturan dan penyimpanan alat-alat dengan baik agar mudah dipergunakan.
- b) Membantu memberikan informasi me-

ngenai penggunaan peralatan untuk penelitian.

4) Yang diharapkan dapat dilakukan oleh *orang tua/masyarakat*, antara lain :

- a) Mengusahakan tersedianya peralatan/bahan yang diperlukan putera-puterinya serta membantu dalam kegiatan penelitian.
- b) Menciptakan situasi di lingkungan keluarga yang dapat mendorong putera-puterinya suka meneliti.

5) Tugas *siswa*, antara lain :

- a) membiasakan diri untuk suka bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas atau belum dikenal.
-



1. Dra. M. Wahjudi Wk, Ketua PB-PGRI/Ketua Proyek Latihan saat menyampaikan kata sambutan pada , Pembukaan Latihan Kepemimpinan KGRI,23-8-1983



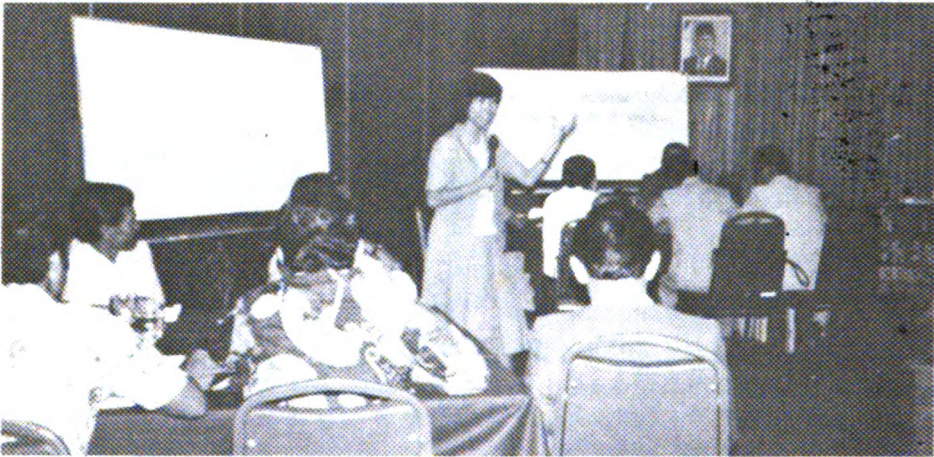
2. Saat Diskusi Panel berlangsung,tampak Drs. W.D.F. Rindorindo Sekjen PB-PGRI (tengah) sebagai Moderator.



3. Suasana sidang kelompok pada Latihan Kepemimpinan PGRI yang dipimpin oleh Muslim, BA peserta dari DKI Jakarta.



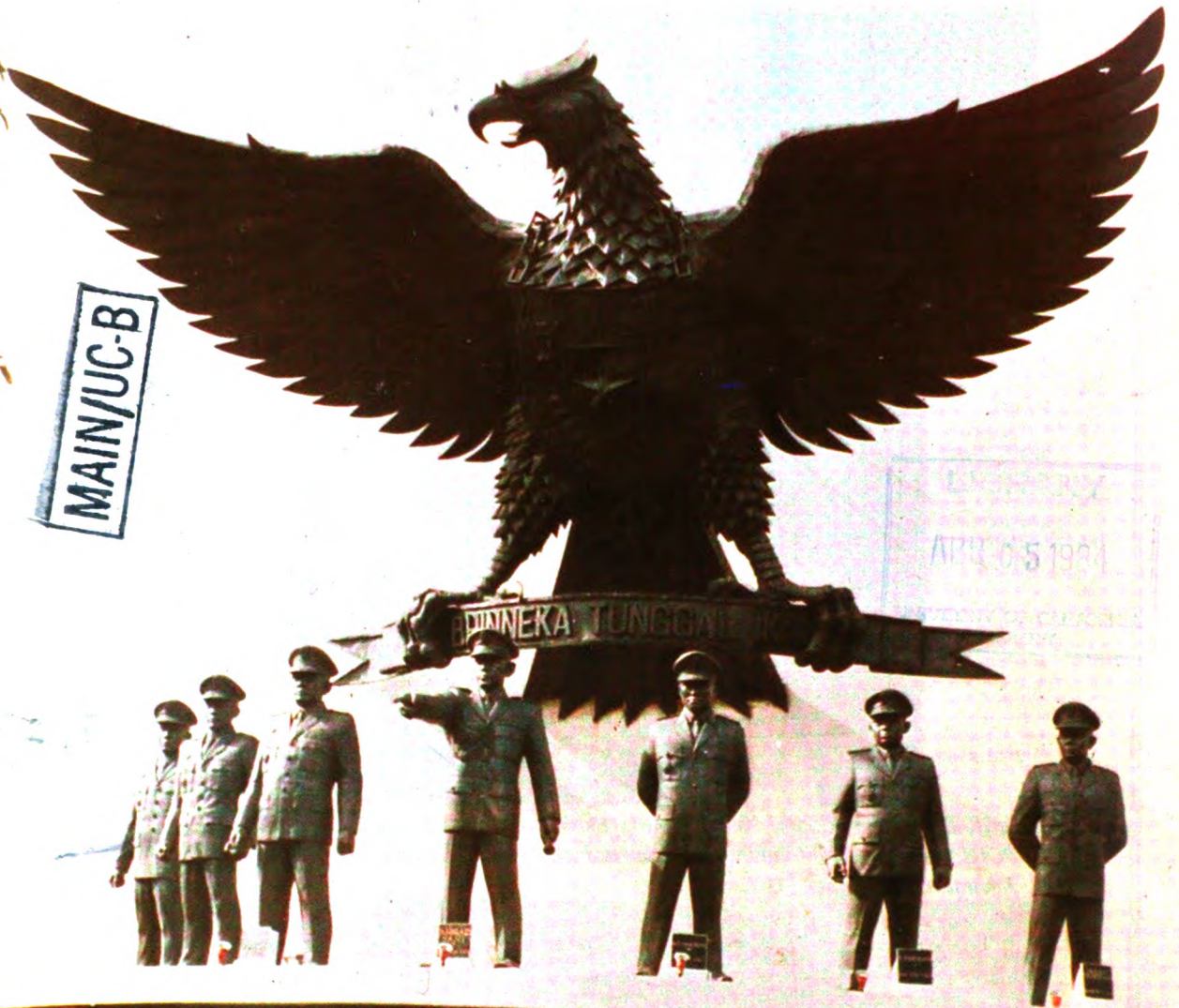
1. Dari kanan ke kiri: Bpk. K. Kadi, Dirjen Pembangunan Desa Depdagri saat menyampaikan prasarannya pada Latihan Kepemimpinan PGRI, 24-8-1983 di Jakarta.



2. Dr. Gayatri (Pemandu) saat memberi panduan kepada peserta Latihan Kepemimpinan PGRI.

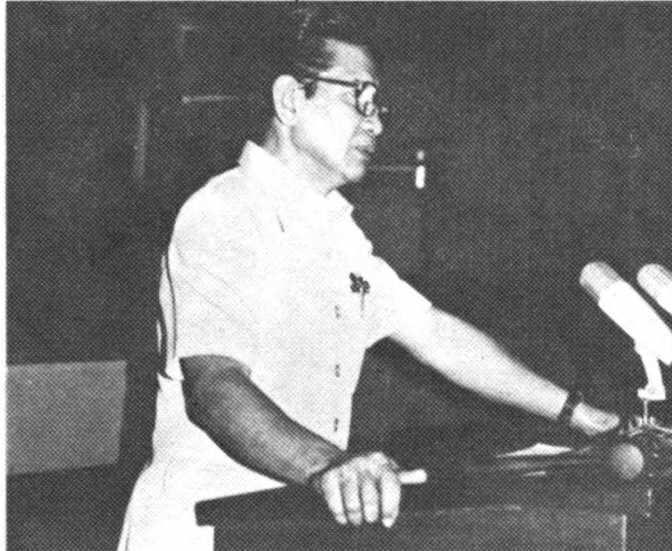


3. Simulasi Latihan Kepemimpinan PGRI dengan melakukan orang tunanetra yang dibimbing.





Bapak Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. sedang memasuki ruangan Latihan Kepemimpinan PGRI, 11 Oktober 1983.



Prof. Dr. Amran Halim, Ketua Panitia Latihan Kepemimpinan PGRI/Ketua PB – PGRI menyampaikan laporan pada acara Pembukaan "Latihan" di Gedung YTKI, Jakarta, 10 Oktober 1983.



Suasana Latihan Kepemimpinan PGRI. Tampak peserta dengan tekun mengikuti sambutan Dirjen Pelsepora Prof. Dr. W.P. Napitupulu mewakili Mendikbud.



Majalah Suara Guru

NO. 10 TH. XXXII – 31 OKT. 1983

PENERBIT

Pengurus Besar Peratuan Guru
Republik Indonesia (PGRI)

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI

PEMIMPIN UMUM

H.Basyuni Suriamiharja

KETATAUSAHAAN

Pimpinan : Drs.W.D.F.Rindorindo
Wkl.Pimp. : Muhd. Hatta
Anggota : F.A.Santoso, B.Sc.

REDAKSI

Pimpinan : Prof.Dr.Amran Halim
Wkl.Pimp./Skr. : Drs.H.Gazali Dunia
Anggota : Suyono ● A.T.Sianipar, SH.
● Ki Soeratman ● Drs. Gino Sutarno
● Anggota PB-PGRI lainnya

STAF REDAKSI

● Galisung MS ● Syarifulkani ● Sutiyo
● Edi Marhami

IZIN TERBIT

Skp Deppen No. 099 SK-PDHM-SIT-66
Tanggal 18 Februari 1966
(Izin Peperada Jaya No KEP-108-P/5-1966)

REDAKSI & TATA USAHA

Jl. Tanah Abang Tiga No.24 Jakarta
Telp. 341121 – 340598

Percetakan

HARAPAN MASA - Jakarta
Telp. 582225

DAFTAR ISI

	Hal
* Tajuk Rencana	1
* Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, 16 Agustus 1983 (III)	3
* Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Sisa-sisa Orde Lama	9

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

* Pendidikan Jarak Jauh Sebagai Jalan Keluar Mengatasi Ledakan Calon Mahasiswa	11
* Pendidikan Anak Berbakat Tidak boleh Bersifat Memaksakan	12
* Berbagai Lomba untuk Guru dan Murid Sekolah Dasar	14
* Petunjuk Pembinaan Sekolah (III)	16
* Sejumlah 25 Siswa dan Mahasiswa asal Timor Timur Mendapat Beasiswa	22
* Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden R.I., 16 - 8 - 1983 (II)	23
* Peranan Kreativitas dalam Pendidikan : Dr. M. Amin, M.A. (II)	27
* Ki Soeratman : Tutwuri Handayani, Suatu Pendekatan Sosial Kultural dalam Proses Belajar - Mengajar	38
* Sambutan Dirjen Pendasmen pada Penataran bagi Pengawas tentang Asimilasi di Bidang Pendidikan	44
* Menyambut Kongres Bahasa Indonesia ke IV : Drs. H. Gozali Dunia	49

PANCASILA DAN UUD 1945

* Prof. Padmo Wahjono, S.H. : Memantapkan Pemasayarakatan Pancasila dan UUD 1945	50
--	----

LATIHAN KEPEMIMPINAN PGRI

* Sambutan Ketua Umum PB - PGRI pada Latihan Kepemimpinan PGRI, 10 - 10 - 1983	55
--	----

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI

* Akreditasi Pembinaan Sekolah Swasta	58
---	----

SUMBANGAN GEDUNG GURU

* Uang Masuk sampai dengan Oktober 1983	60
---	----

Rekening Giro :

BRI Cabang Tanah Abang Tiga No. 4 Jakarta
Pusat : No. 31. 46. 2118

TAJUK RENCANA

Bulan Oktober punya makna dan arti tersendiri dalam sejarah kita. Pada bulan itu 38 tahun yang lalu lahir Tentara Nasional Indonesia kita yang merupakan pelindung ampuh bangsa dan tanah air kita, yang terdiri atas 13.000 pulau, yang menutupi permukaan bumi seluas hampir 2.038.161 Km²

Dalam bulan Oktober pula tanggal 28 Oktober 1928, 55 tahun dahulu, para pemuda pelajar telah menyatakan hasrat hati mereka sebagai berikut :

"Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertanah air yang satoe, tanah Indonesia;

Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa yang satoe, bangsa Indonesia;

Kami poetra dan poetri Indonesia menjoenjoeng bahasa persatuan, bahasa Indonesia".

Sumpah sakti para pemuda itu merupakan halilintar di siang bolong bagi kaum penjajah Belanda dan merupakan satu teriak persatuan, nusa, bangsa dan bahasa, yang sekaligus mengikis habis sisa-sisa rasa kedaerahan yang menyatakan dirinya dalam organisasi seperti : Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Jong Ambon, Jong Batak, dan sebagainya.

Di antara peristiwa yang maha penting ialah dipilihnya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan, bahasa persatuan yang mampu mempersatupadukan gerak langkah perjuangan kita, mulai dari perjuangan fisik sampai ke perjuangan pembangunan yang sedang dan akan kita laksanakan, Pelita demi Pelita, kini dan nanti !

Bulan depan Kongres Bahasa Indonesia ke IV akan dilaksanakan di Jakarta. Kita sambut Kongres itu dengan doa dan harapan agar kongres dapat menghasilkan butir-butir pemikiran para ilmuwan kita, yang hasilnya kelak mampu mengangkat bahasa kita setaraf dengan bahasa internasional dan mampu pula menjawab tantangan-tantangan abad ke XX ini, yang serba mekanis dan serba elektronik.

Persatuan Guru Republik Indonesia, dengan rasa bangga telah berhasil memasukkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipergunakan dalam Kongres Guru Sedunia (World Confederation Organization of Teaching Profession) ke - 27 tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 1978 di Jakarta, di samping bahasa internasional yang lain : bahasa Inggris, Sepanyol, Perancis, Jerman dan bahasa Jepang. —

Redaksi

PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
16 AGUSTUS 1983

(III)

Saudara Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat;

Krida ketiga ialah pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila dan P4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemasyarakatan ideologi Pancasila ini merupakan prasyarat bagi memantapkan pelaksanaan pembangunan selanjutnya sebagai pengamalan Pancasila dan untuk menjamin kelestarian kehidupan bangsa dan negara kita. Ini mengandung arti bahwa usaha menciptakan kerangka landasan yang kita usahakan dalam Repelita IV harus berisi langkah-langkah untuk memantapkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya kita makin nyata didasari, dijiwai dan diarahkan oleh Pancasila.

Justru untuk menyongsong tugas besar di masa datang itu kita perlu menarik pelajaran dari masa lampau. Adalah tidak bertanggung jawab apabila kita yang hidup di masa sekarang tidak mengambil langkah-langkah yang perlu, sehingga generasi-generasi yang akan datang merasakan kepahitan-kepahitan yang pernah kita alami di masa lampau. Adalah tugas kita meninggalkan kepahitan masa lampau itu menjadi sejarah, dan tidak membiarkannya menjadi benih-benih yang kelak akan membelit kembali generasi-generasi yang akan datang.

Untuk itulah maka kerangka landasan yang harus kita ciptakan adalah kerangka landasan pembangunan bangsa kita yang mampu menjamin kelestarian Pancasila, kestabilan nasional, dan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Bagi kita Pancasila adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional. Ia terbukti kuat



Presiden Republik Indonesia
Soeharto

menjadi dasar negara karena Pancasila adalah jiwa bangsa kita, kepribadian bangsa kita, pandangan hidup bangsa kita dan ideologi nasional sekaligus. Tanpa semuanya itu maka Pancasila sudah akan lama runtuh karena ujian dan cobaan yang berat di masa lampau.

Jika dahulu perjuangan kita berkisar pada usaha mempertahankan dan menegakkan Pancasila sebagai dasar negara dan menegakkan kehidupan kenegaraan berdasarkan Demokrasi Pancasila, maka sejak MPR menetapkan P4 di tahun 1978, perjuangan itu kita tingkatkan dengan gerakan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dengan pemasyarakatan P4 yang terus meluas selama lima tahun terakhir, maka sekarang, kita maju selangkah lagi dengan mengusahakan pengamalan Pancasila dalam pembangunan nasional kita seperti yang kita tegaskan sendiri dalam GBHN sebagai hasil Sidang Umum MPR bulan Maret yang lalu.

Sejak semula kita memandang pembangunan nasional kita dalam arti yang seluas-luasnya. Kita memandang pembangunan itu sebagai pembangunan lahir batin, pembangunan manusia Indonesia. Ini mengandung arti bahwa pembangunan sebagai pengamalan Pancasila meliputi pengamalan Pancasila dalam seluruh segi kehidupan bangsa dan negara kita baik di lapangan politik, ekonomi, sosial, hukum, pertahanan keamanan dan seterusnya. Ini adalah langkah nyata agar suasana serba Pancasila terasa di mana-mana, membimbing dan memberi arah kehidupan kita semua dalam bermasyarakat. Tegasnya, Pancasila sebagai pedoman sikap hidup sehari-hari manusia Indo-

nesia dalam bermasyarakat. Tanpa itu maka Pancasila tetap akan tinggal sebagai semboyan kosong. Apabila ini terjadi bukan saja kita mengulangi kesalahan masa lampau yang telah merobek-robek tubuh bangsa kita; melainkan juga berarti meninggalkan kerawanan-kerawanan bagi sejarah bangsa kita di masa depan dan marabahaya bagi generasi-generasi yang akan datang.

Dalam menjamin kelestarian Pancasila itu lah, GBHN telah menggariskan bahwa semua kekuatan sosial politik menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya azas.

Ini adalah keputusan bersama dan konsensus nasional yang sangat penting, tepat dan bertanggung jawab.

Sebagai ideologi, Pancasila bukan gabungan dari bermacam-macam ideologi lain yang ada di dunia ini. Pendahulu-pendahulu kita yang meletakkan dasar negara ini menggali Pancasila itu dari bumi Indonesia sendiri, dari kepribadian kita sendiri. Pancasila adalah ideologi nasional yang menjadi milik kita bersama. Jika masing-masing golongan memiliki ideologi sendiri, maka kita akan kembali ke zaman "nasakom" yang pernah kita alami, dengan segala malapetakannya. Menghidupkan kembali suasana seperti "nasakom" – walaupun komunisnya telah hilang – berarti memasang kembali bom waktu yang cepat atau lambat pasti akan meledak.

Ada yang khawatir bahwa pelaksanaan dari ketetapan ini akan menjerumuskan kita kepada sistem partai tunggal. Kekhawatiran ini tidak beralasan. Saya yakin Sidang Umum MPR bulan Maret yang lalu tidak mempunyai maksud ke arah itu. Ketetapan hati kita untuk menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua kekuatan sosial politik tidak lain adalah perampungan dan pembulatan proses pembaharuan kehidupan politik, yang sejak lahirnya Orde Baru telah kita putuskan justru untuk menjamin kelanjutan dan kelancaran pembangunan bangsa kita. Walaupun ketiga kekuatan sosial politik yang kita miliki menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas politik, namun mereka akan tetap memiliki pendekatan dan penekanan sendiri dalam memikirkan dan memecahkan masalah-masalah luas yang kita hadapi dalam pembangunan bangsa ini. Mereka akan menawarkan program mereka masing-masing dalam masa Pemilihan Umum, sekalipun program itu merupakan program dari

pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Mereka akan mengibarkan tanda gambar sendiri, sekalipun semua tanda gambar itu mengungkapkan bahwa semua kekuatan sosial politik itu mempunyai Pancasila sebagai satu-satunya asas politik.

Demikianlah kita mengembangkan secara kreatif semboyan Bhineka Tunggal Ika. Keanekaragaman tidak kita biarkan menggerogoti persatuan, sedangkan persatuan tidak mematikan kemadirian. Alangkah indah dan semaraknya kehidupan kita yang demikian itu.

Dalam usaha menciptakan kerangka landasan pembangunan nasional menuju masyarakat yang kita cita-citakan, GBHN juga menugasi kita untuk meningkatkan peranan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan nasional sesuai dengan bidang kegiatan, profesi dan fungsi masing-masing. Sebab itu perlu disusun undang-undang dalam rangka memantapkan dan menata organisasi-organisasi kemasyarakatan itu, sekaligus sebagai pelaksanaan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang.

Usaha memantapkan dan menata organisasi kemasyarakatan ini dengan sendirinya juga harus kita tempatkan dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, kestabilan nasional dan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Semuanya ini mewarnai semangat dan arah yang ditunjukkan oleh GBHN.

Berlainan dengan kekuatan-kekuatan sosial politik, maka organisasi-organisasi kemasyarakatan itu memperlihatkan perbedaan dalam bidang kegiatan dan fungsinya.

Mengenai bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Tang Maha Esa, maka kita tetap berpegang teguh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar '45, P4 dan GBHN 1983 itu sendiri.

Pancasila bukan agama. Pancasila tidak akan dan tidak mungkin menggantikan agama. Pancasila tidak akan diagamakan. Juga agama tidak mungkin dipancasilakan.

Tidak ada Sila-sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan agama. Dan tidak ada satu agamapun yang ajarannya memberi tanda-tanda larangan terhadap pengamalan dari Sila-sila dalam

Pancasila. Karena itu walaupun fungsi dan peranan Pancasila dan agama berbeda, namun dalam Negara Pancasila ini kita dapat menjadi pengamal agama yang taat sekaligus pengamal Pancasila yang baik. Dalam Negara Pancasila ini negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Karena itu jangan sekali-lagi ada yang mempertentangkan agama dengan Pancasila, karena kedua-duanya memang tidak bertentangan.

Karena itu pula, pelaksanaan GBHN 1983 pasti tidak akan bertentangan dengan ajaran-ajaran dari agama-agama itu. Dalam Negara Pancasila kebebasan beragama terjamin sepenuhnya. Sifat dan hakekat dari agama-agama dihargai setinggi-tingginya dan diakui sepenuh-penuhnya.

Sebaliknya dari organisasi keagamaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita diharapkan jaminan bahwa mereka ikut menjamin kelestarian Pancasila, stabilitas nasional dan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Untuk memasyarakatkan ideologi Pancasila itu, maka penataran-penataran P4 akan terus dilanjutkan dan diperluas. Malahan harus makin maju lagi. Artinya : dari usaha memberi pengetahuan ke tingkat pengembangan penghayatan dan selanjutnya ke tingkat mendorong pengamalan dalam pembangunan nasional. Walaupun pengamalan Pancasila itu harus dilihat sebagai keseluruhan, namun ada kalanya pengamalan dari sesuatu Sila perlu mendapatkan prioritas dari Sila yang lain. Dalam masyarakat akan terdapat golongan-golongan yang menitikberatkan pengamalan dari Sila yang lain. Dengan berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar '45 dan P4 bisa saja tetap timbul pandangan yang berlain-lainan mengenai cara yang sebaik-baiknya untuk mengamalkan sesuatu Sila. Dengan demikian dalam pembangunan sebagai pengamalan Pancasila tetap ada tempat bagi perdebatan dan kritik mengkritik, sedangkan semua pihak sama-sama bertekad untuk mengamalkan Pancasila sebaik-baiknya dalam pembangunan. Perdebatan dan kritik mengkritik dengan disertai rasa tanggung jawab pada dasarnya bersifat positif dan kreatif dalam usaha kita yang terus menerus untuk memberi dinamika dalam masyarakat kita dalam rangka mengamalkan Demokrasi Pancasila. Pan-

casila bukan dogma yang beku dan kaku. Pancasila adalah penuntun kita semua dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengamalannya harus kreatif sehingga Pancasila mampu memberi jawaban terhadap perkembangan masyarakat yang makin maju.

Mengenai pengembangan Demokrasi Pancasila maka kita kan memantapkan segala yang telah kita bina dan kita miliki sampai sekarang, disertai dengan pembaharuan dan penyegaran agar dapat menjawab tantangan-tantangan kemajuan. Penyelenggaraan kehidupan bernegara secara konstitusional terus kita mantapkan, kehidupan demokrasi kita suburkan dan hukum makin kita perkuat tegaknya. GBHN memberi petunjuk bahwa mekanisme kepemimpinan nasional perlu kita teruskan pelaksanaannya secara mantap. Demikian pula kita semua bertanggung jawab untuk memantapkan berfungsi dan saling berhubungannya lembaga-lembaga tertinggi/tinggi negara menurut jiwa, semangat dan ketentuan Undang-Undang Dasar : Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang mampu menghasilkan putusan-putusan yang mencerminkan aspirasi rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat yang semakin berbobot dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah dan melaksanakan tugas perundang-undangan; Badan Pemeriksa Keuangan sebagai badan yang berwibawa dalam memeriksa tanggung jawab Pemerintah dalam penggunaan uang negara; Dewa Pertimbangan Agung sebagai badan yang meberi nasehat-nasehat kebijaksanaan kepada Presiden; Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan yang memberikan pengayoman hukum yang seadil-adilnya kepada pencari keadilan. Dan adalah tanggung jawab para Menteri dan kita semua untuk membantu Presiden agar menjalankan Undang-Undang Dasar selurus-lurusnya, menjalankan pemerintahan seadil-adilnya, melaksanakan segala undang-undang dan peraturan sebaik-baiknya serta melaksanakan GBHN seberhasil-berhasilnya.

Untuk itulah penting kita lanjutkan dan kita perdalam pendidikan dan kesadaran politik rakyat, yang sekaligus merupakan unsur penting bagi penegmbangan kehidupan demokrasi dan terbinanya stabilitas politik yang dinamis. Dalam rangka ini penting sekali usaha-usaha untuk mengkonsolidasikan kekuatan sosial politik yang

ada dengan memantapkan kemandirian masing-masing, baik di kalangan Partai Persatuan Pembangunan maupun Partai Demokrasi Indonesia atau pun Golongan Karya.

Dalam rangka memantapkan stabilitas politik, dan juga untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan bangsa dan negara, akan ditingkatkan pula kegiatan penerangan dan peranan media massa termasuk pers nasional. Pers bebas dan bertanggung jawab yang makin hari makin tertanam di kalangan pers sendiri perlu terus dikembangkan.

Dalam rangka memantapkan stabilitas nasional itu ditingkatkan pula pembinaan dan pengembangan hukum. Hal ini makin penting artinya, karena negara kita adalah negara berkedaulatan rakyat dan sekaligus negara yang berlandaskan hukum. Karena itu penting sekali tegaknya hukum yang membuat setiap orang merasa tenteram lahir batinnya karena hidup dalam suasana tertib dan merasa ada kepastian hukum yang berkeadilan. Dalam rangka ini usaha-usaha untuk memasyarakatkan hukum melalui penyuluhan-penyuluhan hukum perlu ditingkatkan.

Dalam rangka pengembangan Demokrasi Pancasila dan pemantapan stabilitas nasional yang dinamis itu, penting sekali peranan ABRI baik sebagai alat pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial. Dwi fungsi ABRI harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya, sehingga ABRI dapat ikut mendorong dan menstabilkan perkembangan masyarakat kita ke arah pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Untuk itu lah, di samping melanjutkan usaha modernisasi ABRI, maka dalam pembangunan pertahanan keamanan perlu terus kita kembangkan doktrin perlawanan rakyat seinesta dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45.

Selanjutnya, Saudara Ketua yang terhormat, saya akan menguraikan secara singkat mengenai Krida keempat, ialah meningkatkan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.

Kepentingan nasional dalam hal ini tidak kita artikan secara sempit. Kepentingan nasional tidak perlu kita pertentangkan dengan kepentingan internasional. Kita malahan ikut bertanggung jawab mengenai perkembangan internasional,

sebab keadaan internasional yang baik ikut menjamin kepentingan nasional kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar memberi amanat kepada kita untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal itu harus kita pahami secara luas. Dalam rangka mewujudkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar itu dan dengan beraskan kepada Pancasila kita laksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Karenanya amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar '45 dan Pancasila itulah yang menjadi pedoman dan arah sikap serta dalam menilai perkembangan dunia, sehingga kita mendukung apa yang sejai dengan Pancasila dan sebaliknya kita tidak mendukung hal-hal yang bertentangan dengan jiwa Pancasila dan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar '45.

Berbagai ketegangan dan krisis yang selama tahun-tahun terakhir tidak henti-hentinya melanda dunia ini bersumber pada tatanan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tidak menjamin keadilan. Karena itu tepat sekali petunjuk GBHN agar kita memperkuat perjuangan untuk mewujudkan tatanan dunia baru, terutama Tata Ekonomi Dunia Baru.

Beberapa negara industri maju mengira bahwa pancaroba perekonomian dunia sekarang akan bisa diatasi oleh mereka sendiri, dalam arti, perekonomian dunia akan kembali bangkit jika ekonomi negara-negara industri maju dapat diperbaiki. Sebaliknya, kita bersama-sama negara-negara yang sedang membangun lainnya yakin bahwa perbaikan ekonomi dunia hanya akan terwujud jika ditangani bersama-sama oleh semua bangsa dan semua negara : yang kaya maupun yang miskin, yang maju industrinya maupun yang sedang membangun, yang besar maupun yang kecil. Alasannya sangat jelas : karena sekarang peranan negara-negara yang sedang membangun sudah bertambah besar dalam kehidupan perekonomian dunia dan percaturan dunia lainnya. Justru untuk melaksanakan pembangunannya negara-negara yang sedang membangun memerlukan modal dan peralatan yang dihasilkan oleh negara industri maju. Pada gilirannya, hal ini akan membangkitkan ekonomi negara-negara industri maju.

Agar dapat membeli peralatan, maka negara-negara sedang membangun harus memiliki devisa

yang besar, yang hanya dapat diperoleh dengan menaikkan ekspor. Padahal, ekspor dari negara negara yang sedang membangun itu sekarang mengalami kesulitan karena lesunya perekonomian negara-negara industri maju. Kesulitan bertambah, karena negara-negara industri maju memasang hambatan yang tidak perlu. Di samping itu aliran modal dari negara industri maju ke negara-negara yang sedang membangun juga mengalami kesetretan, baik karena negara-negara industri maju mencoba mengatasi kesulitan mereka secara sendiri-sendiri dan lebih-lebih lagi karena pengeluaran mereka yang luar biasa besarnya untuk perlombaan senjata.

Karena itu, perbaikan perekonomian dunia secara bersama-sama dengan membentuk Tata Ekonomi Dunia Baru merupakan keharusan. Hal ini bukan hanya merupakan kepentingan negara-negara yang sedang membangun saja, melainkan juga kepentingan negara-negara industri maju. Kepentingan semua bangsa, semua negara dan seluruh umat manusia.

Walaupun berkat pelaksanaan dengan penuh kesungguhan telah membawa bangsa kita pada tingkat bangsa yang berpenghasilan menengah, namun, kesadaran kita mengenai perlunya membangun duni yang tertib berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial mendorong tanggung jawab kita untuk menyerukan kepada negara-negara industri maju agar menaruh perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengulurkan tangan membantu negara-negara yang sangat miskin. Tanggung jawab itu pula, yang mendorong kita, memberikan bantuan teknik kepada sesama negara yang sedang membangun, sesuai dengan kemampuan terbatas yang ada pada kita.

Dengan rasa tanggung jawab itu, kita akan terus melanjutkan perjuangan pembangunan Tata Ekonomi Dunia Baru di semua forum yang tersedia.

Rasa tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia yang mendorong kita untuk menyerukan kepada negara-negara besar di dunia untuk mengakhiri perlombaan senjata yang bukan hanya tidak ada gunanya, malahan hanya akan saling menghancurkan.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan nasional dan menentang penjajahan

dalam segala bentuknya, kita terus meneruskan akan ikut berusaha agar hak-hak rakyat Palestina untuk merdeka di tanah airnya sendiri dihormati. Demikian pula hak-hak rakyat Afganistan, rakyat Kampuchea dan rakyat-rakyat lainnya, dengan penarikan mundur semua pasukan asing dari wilayah mereka. Pendek kata semua negara hendaknya menjauhkan diri dari campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain, dalam bentuk apapun juga.

Kita merasa berbahagia, karena di kawasan ini kita memiliki Asean, yang makin hari makin kukuh. Kita akan terus memperkuat Asean bersama-sama dengan negara-negara anggota lainnya, dengan memperluas kerjasama yang dapat kita bina sampai sekarang, dengan terus menjalin saling percaya dan memperdalam persahabatan yang tulus ikhlas. Kekukuhan Asean telah menjadi bagian dari kepentingan kita, dan kita yakin, juga menjadi kepentingan semua negara anggotanya.

Saudara Ketua yang terhormat;

Krida kelima adalah melaksanakan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1987.

Seperti telah ditegaskan dalam Ketetapan MPR mengenai Pemilihan Umum dan dalam GBHN, pelaksanaan Pemilihan Umum setiap 5 tahun sekali dilaksanakan berdasarkan Demokrasi Pancasila.

Walaupun Pemilihan Umum yang akan datang masih akan berlangsung empat tahun lagi, namun segala persiapan harus kita lakukan dari sekarang juga agar Pemilihan Umum nanti berlangsung makin baik lagi dari Pemilihan-pemilihan Umum yang telah beberapa kali kita laksanakan sampai sekarang. Berbagai undang-undang harus kita siapkan untuk melaksanakan konsensus nasional yang telah kita sepakati bersama dalam Sidang Umum MPR yang lalu, seperti penambahan jumlah anggota dari lembaga-lembaga perwakilan dan permusyawaratan rakyat mengenai peninjauan kembali pengangkatan sepertiga jumlah anggota MPR dalam hubungannya dengan referendum sebagai pengamanan kemungkinan perubahan Undang-Undang Dasar '45 dan sebagainya. Penyisipan pembaharuan undang-undang yang penting itu harus kita tempatkan dalam rangka usaha untuk menciptakan kerangka landasan bagi pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia

selanjutnya, dalam rangka mengamalkan dan mengembangkan Demokrasi Pancasila. Dengan semangat dan jiwa persatuan dan kesatuan nasional yang kuat, kita percaya bahwa perubahan berbagai undang-undang itu akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah, Saudara Ketua yang terhormat, masalah-masalah dan tantangan-tantangan serta apa yang ingin kita kerjakan dalam tahun-tahun yang akan datang.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air; Kita hidup dalam dunia yang sedang berubah dengan cepat dan yang mengalami berbagai krisis yang berat. Pada satu pihak kita mengalami dampak dari perubahan-perubahan dan krisis-krisis itu. Pada pihak lain, dalam batas-batas kemampuan kita, maka kita bertanggung jawab untuk ikut mengendalikan dan mengarahkan perubahan-perubahan yang sedang berlangsung di dunia ini ke arah yang memberi kebaikan bagi semua manusia dan kemanusiaan. Setidak-tidaknya kita ikut mengusahakan sekuat tenaga agar keadaan tidak lebih parah dari yang dialami dunia sekarang ini. Dalam batas-batas kemampuan kita maka kita ikut bertanggung jawab, tidak hanya menanggulangi akibat-akibat dan krisis-krisis yang tengah melanda dunia, tetapi juga ikut mencari jalan keluar mengatasi sebab-sebab yang mendasar dari krisis-krisis tadi. Dengan dibimbing oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45, kita ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Namun sumbangan kita yang utama di tengah-tengah perubahan dan krisis dunia tadi ialah membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita membangun tidak dengan mencontoh begitu saja masyarakat-masyarakat moderen sekarang ini yang sedang dilanda oleh beraneka ragam krisis, melainkan dengan membangun masyarakat Indonesia moderen yang mencerminkan kepribadian dan cita-cita sendiri.

Kita harus mengejar ketinggalan dan mengatasi keterbelakangan kita di berbagai bidang, dengan arah yang tepat disertai kewaspadaan yang tinggi, agar kita tidak terjerumus ke dalam berbagai krisis yang akhirnya menimpa masyarakat-masyarakat yang jauh lebih maju dari kita di bidang ilmu, teknologi, industri, pertanian dan penyakit-penyakit sosial lainnya.

Dengan mengambil pelajaran dari pengalaman masyarakat-masyarakat moderen lainnya, lebih-lebih belajar dari kesalahan mereka, maka dalam upaya membangun masyarakat moderen, kita sekaligus berusaha mewujudkan keadilan sosial, melestarikan budaya bangsa yang penuh ajaran keluhuran budi, menjaga lingkungan hidup dan memelihara sumber-sumber daya alam.

Itu berarti kita harus membangun masyarakat maju yang adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila. Itu lah pula yang kita maksud dengan membulatkan tekad kepada diri kita sendiri, bahwa pembangunan ini kita laksanakan sebagai pengamalan Pancasila.

Setelah berjuang sangat panjang dan penuh penderitaan dan pengorbanan untuk kembali hidup terhormat sebagai bangsa merdeka sejak penjajahan menginjakkan kaki di Bumi Pertiwi tercinta ini, setelah tumbuh dan berkembang mulai kebangkitan nasional di tahun 1908, setelah dimantapkan oleh Sumpah Pemuda di tahun 1928, maka pada tanggal paling bersejarah bagi kita, 17 Agustus 1945, Pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah mengantarkan rakyat kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Pintu gerbang kemerdekaan itu berdiri di atas dasar yang kuat, yang terbukti tahan terhadap ujian sejarah, yang makin menyatukan kita dan akan mengayomi kita selamanya, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45.

Kini, 38 tahun setelah kita berjalan bersama erat bergandengan tangan, dengan segala suka dan dukanya, dengan semua harapan dan kekecewaannya, pintu gerbang kemerdekaan itu telah makin jauh kita lewati. Kini, kita sedang bersiap-siap melaksanakan tugas sejarah yang tidak kalah besarnya, ialah memasuki pintu gerbang berikutnya dengan menanamkan kerangka landasan yang kuat bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berkeadilan. Sebagai kelanjutan sejarah perjuangan, pembangunan itu kita wujudkan sebagai pengamalan Pancasila. Dengan tekad itu lah kita memasuki tahun depan sebagai tahun pertama Repelita IV.

Kita menyadari bahwa perjalanan kita untuk membangun masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila akan menghadapi bangsa dan negara kita kepada berbagai macam tantangan.

(Bersambung ke hal 26)

TINGKATKAN KEWASPADAAN TERHADAP SISA-SISA ORDE LAMA

Delapan belas tahun yang lalu untuk kesekian kalinya Partai Komunis Indonesia (PKI) menyusuk Republik Pancasila dari belakang. Dengan mendadak pada tanggal 1 Oktober 1965 para Pahlawan Revolusi diculik dan dibunuh dan kemudian dilemparkan ke sumur tua di Lubang Buaya. Juga di Yogyakarta dilakukan pembunuhan serupa terhadap para Pahlawan Revolusi di desa Kentungan.

Kisah penghianatan itu kiranya sudah cukup diketahui. Telah pula umum diketahui kisah kesaktian Pancasila yang menjiwai para pemimpin kita di bawah pimpinan Pak Harto, yang segera dapat menilai, bahwa peristiwa yang dahsyat itu dilakukan oleh PKI, dan kemudian dapat menghimpun kekuatan Rakyat mengatasi pemberontakan itu.

Namun perlu pula pada saat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun ini kita meningkatkan kewaspadaan kita terhadap usaha-usaha sisa-sisa Orde Lama untuk perlahan-lahan menciptakan kondisi-kondisi seperti yang terdapat sebelum meletusnya pemberontakan G.30.S/PKI. Untuk itu kita perlu mengetahui latarbelakang politik daripada pemberontakan G.30.S/PKI, khususnya perkembangan pada zaman Orde Lama.

Sesudah pada tahun 1954 Partai Komunis Indonesia (PKI) mengeluarkan doktrinnya yang dikenal dengan sebutan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan disingkat MKTBP. Satu di antara tiga bentuk perjuangan itu ialah menguasai kekuatan bersenjata untuk kemudian digunakan di dalam usaha mereka merebut kekuasaan negara. Dari sana jelas, bahwa PKI sejak semula sudah menyiapkan diri untuk mengadakan perebutan kekuasaan dengan kekerasan dan dengan kekuatan senjata jika kondisi sudah matang untuk itu.

Pada tahun 1957, PKI mengeluarkan tesisnya yang berjudul : *Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia* disingkat MIRI. Di dalamnya termaktub sesuatu konsepsi mengenai pengembangan masyarakat Indonesia berdasarkan analisa



Prof. Dr. Nugroho Notokusanto

Komunis. Pada tahun 1959 Pimpinan PKI berhasil memasukkan isi daripada MIRI ke dalam Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol karena merekalah yang ditugaskan untuk merumuskan Manipol itu.

Kalau kita bandingkan isi kedua dokumen itu, maka akan nampak kesejajarannya :

MIRI

Bab II REVOLUSI INDONESIA

Pasal 2. Soal-soal Pokok Revolusi Indonesia (hal 50)

- A. Tentang sasaran pokok atau musuh pokok daripada Revolusi Indonesia
- B. Tentang tugas-tugas Revolusi Indonesia (h. 54)
- C. Tentang tenaga-tenaga penggerak atau kekuatan pendorong Revolusi Indonesia
- D. Tentang watak Revolusi Indonesia
- E. Tentang perspektif daripada Revolusi Indonesia (h. 69).

MANIPOL

II. Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia

5. Musuh-musuh Revolusi Indonesia

1. Dasar/tujuan dan kewajiban Revolusi Indonesia
2. Kekuatan-kekuatan sosial Revolusi Indonesia
3. Sifat Revolusi Indonesia
4. Hari depan Revolusi Indonesia (Tubapi, h. 28).

Karena Manipol kemudian ditetapkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara, maka dengan demikian program politik PKI sudah masuk ke

dalam program Negara Republik Indonesia. Seluruh periode yang kita aebut Zaman Orde Lama didominasi oleh Manipol itu yang intinya adalah suatu doktrin yang disebut Nasakom. Nasakom adalah singkatan daripada nasionalis – agama – komunis, yang dianggap kekuatan revolusi Indonesia.

Dengan ditetapkannya doktrin Nasakom itu mantaplah sudah kedudukan PKI dalam konstelasi politik Orde Lama, dan dapatlah ia secara leluasa memantapkan situasi untuk apa yang disebutnya : "Meningkatkan ofensif revolusioner sampai ke puncaknya". Dalam ofensif revolusioner itu termasuk aksi-aksi sepihak di pedesaan serta usaha menyingkirkan mereka yang dianggap lawan politiknya, seperti Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS), Partai Murba, Manifes Kebudayaan, dan lain sebagainya yang akhirnya memuncak dalam pembunuhan terhadap para Pahlawan Revolusi. Doktrin lainnya yang dicanangkan pula adalah doktrin "Marxisme yang diterapkan di Indonesia".

Bahkan Pancasila itu sendiri mereka manipulasi dengan tidak memakai rumusan yang sah dan autentik yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Mereka memakai rumusan yang sila keduanya berbunyi : "Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan". Ketentuan

itu dikatakan oleh mereka penting sekali bagi Rakyat Indonesia dan sekaligus dikatakan, bahwa sejak lahir kaum komunis sudah internasionalis, dan bahwa perjuangan kelas bersifat internasional.

Latarbelakang politik seperti inilah yang harus kita sampaikan kepada generasi muda, agar supaya mereka tidak masuk perangkap sisa-sisa Orde Lama yang mungkin saja sekarang ini mengusahakan suatu comeback. Kelemahan dan kekurangwaspadaan 18 tahun yang lalu telah ditebus oleh para Pahlawan Revolusi dengan nyawanya. Kita sudah berikrar bahwa Tragedi Nasional seperti yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 tidak akan terulang lagi. Hendaknya kita senantiasa mendengarkan degup-jantung Rakyat yang mendambakan suasana selaras dan seimbang dalam lingkungan kekeluargaan. Marilah kita bulatkan tekad untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila semurni-murninya dan untuk meningkatkan pembangunan masyarakat Pancasila.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Prof. Dr. Nugroho Notokusanto



Dari kanan : D. Somantri W, Sekretaris, Slamet I, Ketua YPLP – PGRI Pusat, Syamsuar, S.H., YPLP – PGRI DIY, Hidayat, Pengurus YPLP – PGRI dan para Dosen IKIP – PGRI DIY, pada upacara perkuliahan mahasiswa baru 83/84.

PENDIDIKAN JARAK JAUH

SEBAGAI JALAN KELUAR MENGATASI LEDAKAN CALON MAHASISWA

PENANDATANGANAN kerjasama mengenai Siaran Pendidikan Jarak Jauh telah dilaksanakan antara Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang masing-masing ditandatangani oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Prof. Dr. D.A. Tisna Amijaya dan Direktur Utama Perumtel, Ir. Willy Munandir, di Jakarta tanggal 14 September 1983.

Kerjasama berlaku selama lima tahun terhitung sejak tanggal 1 Nopember 1983, dan dapat diperpanjang apabila semuanya memungkinkan. Untuk itu pihak Perumtel akan menyediakan fasilitas transmisi untuk kepentingan pendidikan jarak jauh dari Bogor/Jakarta ke Ujung Pandang, Manado, Banjarmasin, Jayapura, Manukwari, Ambon, Palu dan Samarinda melalui Satelit Palapa B-1.

Kerjasama tersebut betul-betul merupakan "starting point" yang sangat menggembirakan, karena selama ini kebanyakan orang berpikir bahwa Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) hanya untuk keperluan telepon, telex dan TV, tetapi sekarang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan yang sangat penting artinya bagi kelangsungan kehidupan bangsa.

Motivasi

Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Doddy Tisna Amijaya mengatakan, sistem pendidikan jarak jauh melalui Satelit Palapa merupakan jalan keluar untuk mengatasi meledaknya minat para tamatan SMTA yang ingin

melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Keinginan para calon mahasiswa tersebut terbentur kendala, yang antara lain langkanya tenaga pengajar yang berpengalaman dan berkualitas. Di samping itu juga karena kurang meratanya kemampuan dosen serta kurang meratanya fasilitas pendidikan. Semuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan mutu yang merat di perguruan tinggi di Indonesia.

Lebih lanjut Dirjen mengatakan, kerjasama ini merupakan awal sejarah pendidikan jarak jauh dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Dengan sistem ini dapat merekrut jumlah mahasiswa yang besar dengan jumlah dosen yang terbatas. Untuk melaksanakan ini perlu ada penyesuaian dari para mahasiswa, terutama para mahasiswa harus mempunyai motivasi yang besar. Sedangkan sasaran pertama adalah para dosen/guru guna dapat meningkatkan mutunya. Diharapkan, pada akhir Pelita IV nanti, dengan sistem pendidikan jarak jauh ini akan dapat ditampung antara 100.000 sampai dengan 120.000 mahasiswa baru.

Sementara itu, Direktur Utama Perumtel Ir. Willy Munandir menjelaskan bahwa Perumtel tidak hanya berkewajiban melayani komunikasi saja tetapi juga bertanggung jawab terhadap kemajuan dunia pendidikan. Barangkali inilah sumbangan terbesar dunia telekomunikasi Indonesia terhadap dunia pendidikan kita.

PENDIDIKAN ANAK BERBAKAT TIDAK BOLEH BERSIFAT MEMAKSAKAN

BAKAT manusia sama luasnya seperti manusia itu sendiri bahkan sama luasnya dengan cakrawala yang diciptakan Tuhan sehingga di dalam usaha mengembangkan bakat anak-anak harus menyebar ke segala penjuru supaya kemampuan dan kemungkinannya yang ada dalam diri anak didik mendapat kesempatan berkembang dan tumbuh dengan subur. Demikian sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto pada peresmian pelaksanaan program pendidikan anak berbakat, di Jakarta tanggal 13 September 1983.

Dikatakan, di dalam pengelolaan pendidikan anak berbakat ini diperlukan pengasuhan yang sebaik-baiknya agar yang diasuh tersebut dapat tumbuh ke arah yang baik, dan pengasuhannya tidak boleh bersifat memaksakan apa yang tidak sesuai dengan nalurinya, maupun bakatnya. Jadi di sini mengetahui bakat itu adalah merupakan langkah pertama di dalam mengembangkan bakat ke langkah berikutnya, sebab anak-anak didik satu sama lain berbeda, yang mana masing-masing mengandung kekhususan-kekhususan. Dari hal inilah harus dapat ditemukan potensinya, dan ini bukan pekerjaan yang mudah.

Sedikit Hambatan

Dijelaskan Menteri, anak-anak didik yang hadir di sini sebagai angkatan pertama yang diusahakan untuk menemukan bakat-bakatnya maupun potensinya untuk memberi kesempatan berkembang secara wajar dengan sedikit mungkin mengalami hambatan. Bertitik tolak dari hal ini, mudah-mudahan kita akan memperoleh waduk daripada sumber daya manusia yang berbakat sehingga pembangunan kita untuk waktu yang akan datang akan lebih meningkat, lebih cepat guna mencapai hasil yang diinginkan kita bersama.

Menteri Nugroho mengharapakan di antara anak didik ini nanti akan tumbuh sebagai ahli matematika, ahli ilmu alam, ahli ilmu fisika, ahli sejarah, ahli pendidikan, ahli psikologi dan

berbagai macam keahlian yang masing-masing memerlukan bakat, apalagi kalau bakatnya itu luar biasa.

Kepada para bapak dan ibu guru, Menteri menjelaskan bahwa kepuasan sebagai profesi guru akan tercapai apabila kita dapat menumbuhkan apa yang diharapkan. Umpama tumbuh-tumbuhan, kita yang menyirami maupun mencabuti rumput-rumput yang tak berguna, sehingga kita akan berbahagia apabila melihat tumbuh-tumbuhan yang kita pelihara tersebut, mekar dan menjadi pohon yang tinggi serta kuat menjadi naungan daripada alam sekitarnya. Jadi guru itu sebenarnya adalah sumber daripada tenaga atau kekuatan yang menumbuhkan bakat-bakat yang terpendam tersebut.

Sumber yang langka

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, Prof. Dr. Ny. Conny R. Semiawan, menjelaskan bahwa yang disebut anak berbakat adalah kelompok anak yang diperkirakan dianugerahi kecerdasan tinggi dan ketekunan menyelesaikan tugas serta keterampilan menggerakkan pikirannya dan semangat belajarnya yang jauh lebih tinggi dari kelompok yang lain. Karena kelompok ini merupakan sumber yang langka, lagi pula setiap anak seharusnya memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan kondisi, minat maupun kecepatan belajarnya, maka diharapkan perkembangan individu akan mencapai optimal di dalam proses belajar mengajar yang diadaptasikan kepada kebutuhan tersebut.

Namun, sebenarnya keberbakatan yang tinggi belum menjamin keberhasilan dalam belajarnya karena baru merupakan indikator potensi. Tetapi melatih kebiasaan mencari dan mengatasi tantangan baru dalam bidang sains, yang dilandasi usaha meletakkan kepentingan itu dalam kepentingan lingkungan akan membuat penalaran yang tajam dan sikap yang menjurus kepada ikut serta bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa,

maupun mandiri terhadap usaha pengembangan dirinya.

Dalam melaksanakan program ini, para guru telah ditatar lebih dahulu dan dipersiapkan serta terus menerus akan dibina oleh suatu tim ahli

yang khusus ditugasi untuk itu. Diharapkan guru-guru yang terpilih melaksanakan tugas ini akan juga belajar terus, memperdalam ilmunya dan metodologinya.



MAJALAH KARYA PEMBANGUNAN INDONESIA



DITERBITKAN OLEH : YAYASAN KARYA PUTERA INDONESIA
JALAN K.H. HASYIM ASHARI NO. 42 F TELP. 359296
BANKER : BNI 1946 – B.D.N. JAKARTA – INDONESIA
Tata Usaha : Jalan Cikini Raya No. 23A Telp. 351227

MENGUCAPKAN :

**SELAMAT ATAS TERPILIHNYA
BAPAK SOEDHARMONO, S.H.
SEBAGAI KETUA UMUM GOLKAR**

Jakarta, 26 Oktober 1983

**PIMPINAN DAN SELURUH STAF
MAJALAH KARYA PEMBANGUNAN
INDONESIA**

PERUSAHAAN KUE KERING



Kwitang

Kantor : Jalan Kembang 12 - 14 Telpon 340091 – JAKARTA

Mengucapkan :

**SELAMAT HARI NATAL
25 Desember 1983
dan
SELAMAT TAHUN BARU
1 Januari 1984**

BERBAGAI LOMBA UNTUK GURU DAN MURID SEKOLAH DASAR

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Proyek Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan berbagai lomba untuk guru dan murid Sekolah Dasar tahun 1983/1984.

Untuk guru khusus lomba mengarang, boleh diikuti guru dan Kepala Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta, kecuali bagi yang pernah memenangkan lomba serupa tahun-tahun sebelumnya.

Judul dan isi karangan hendaknya berkaitan dengan salah satu pokok pikiran berikut : Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Dalam Rangka Pembinaan Tanah Air; -Wajib Belajar Dalam Rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa; Pembinaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup; Penerapan Pancasila Dalam Kehidupan Di Sekolah Dasar.

Panjang karangan minimal 20.000 kata, karangan diketik dengan jarak 2 spasi pada kertas berukuran folio, atau ditulis tangan pada kertas folio bergaris. Karangan beragam prosa, asli, bukan terjemahan atau saduran, belum pernah diterbitkan atau diikutsertakan dalam lomba/sayembara dan bila diperlukan untuk memperjelas ide ceritera karangan dapat disertai gambar atau sketsa.

Karangan selambat-lambatnya diterima panitia, Direktorat Pendidikan Dasar u.p. Pemimpin Proyek Pembinaan Sekolah Dasar, jalan Hanglekir II/16 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 1 Desember 1983.

Bagi pemenang I, II, dan III bulan Februari 1984 diundang ke Jakarta untuk menerima piala, piagam, dan Tabanas masing-masing :
Rp 700.000,00 ; Rp 500.000,00 ; dan
Rp 400.000,00.

Lomba untuk Murid

Lomba untuk murid boleh diikuti oleh mereka yang duduk di kelas IV, V, dan VI di Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta. Kegiatannya, meliputi : Lomba mengarang; lomba bidang studi Pendidikan Moral Pancasila, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam; lomba keterampilan; lomba seni lukis; lomba seni patung; dan lomba seni musik.

Adapun untuk lomba mengarang, boleh diikuti murid kelas V dan VI. Judulnya bisa memilih salah satu dari yang tersebut berikut ini : Masa Depan Yang Cerah; Aku Ingin Menjadi Guru; Guruku Yang Baik: Nelayan Kawan Setiaku; Gunung-gunungku Yang Hijau; Hutanku Yang Lebat; Air Laut Yang Biru; Keindahan Desaku; Sekolah Istana Ilmu; Yang Patut Diteladani Di Daerahku.

Panjang karangan sekurang-kurangnya 2.000 kata, ditulis tangan sendiri pada kertas folio bergaris (jangan timbal balik). Kertas diberi garis pinggir kiri 3 cm, alinea 1½ cm dari garis pinggir. Karangan harus asli.

Pemenang yang tergolong lima terbaik tingkat propinsi adalah calon peserta lomba tingkat nasional yang karyanya harus dikirim oleh Kepala Bidang PD/PDG Direktorat Pendidikan Dasar u.p. Pemimpin Proyek Pembinaan Sekolah Dasar, Jalan Hanglekir II/16 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, paling lambat akhir Desember 1983.

Setelah diadakan penilaian, ditentukan sepuluh calon pemenang tingkat nasional yang akan diundang ke Jakarta untuk mengadakan demonstrasi keterampilan mengarang pada bulan Februari 1984.

Lomba Bidang Studi

Lomba bidang studi Pendidikan Moral Pancasila, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Ilmu Pengetahuan Alam boleh diikuti murid kelas VI Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta.

Bidang yang diperlombakan itu bahannya bersumber dari pelajaran di kelas IV, V, dan VI serta buku paket dan buku-buku perpustakaan Sekolah Dasar.

Pemenang I setiap bidang studi dari masing-masing propinsi akan diundang ke Jakarta dalam bulan Februari 1984 untuk mengikuti lomba tingkat nasional melalui cara tertulis, cepat tepat, dan cerdas cermat.

Lomba ketrampilan

Lomba keterampilan diperuntukkan bagi murid kelas V dan VI. Yang dilombakan adalah hasil

karya murid sendiri dalam bentuk tiga dimensi yang dapat digunakan dalam kehidupan rumah tangga, sekolah, atau kantor.

Bahan baku yang digunakan boleh berupa kayu, bambu, kulit mutiara/kerang, batu-batuan hias, rotan, tempurung, daun lontar, lidi dan sebagainya.

Pemenang yang tergolong lima terbaik tingkat propinsi adalah calon peserta lomba tingkat nasional yang karyanya harus dikirim oleh Kepala Bidang PD/PDG ke Direktorat Pendidikan Dasar, selambat-lambatnya akhir Desember 1983. Setelah diadakan penilaian, ditentukan sepuluh orang calon pemenang Tingkat Nasional. Para calon pemenang ini akan diundang ke Jakarta bulan Februari 1984 untuk diuji dan mendemonstrasikan keterampilan membuat kerajinan untuk memilih pemenang I sampai dengan V Tingkat Nasional.

Lomba seni lukis

Lomba seni lukis bisa diikuti para murid kelas IV, V, dan VI yang belum pernah menjadi pemenang I, II, III Tingkat Nasional pada tahun-tahun sebelumnya.

Judul lukisan yang dilombakan ialah : Kehidupan Nelayan; Tanah Airku Yang Indah; Kehidupan Di Kota; Kehidupan Di Desa; Negaraku Sedang Membangun.

Bahan yang digunakan kertas gambar, karton atau kain kanvas dengan ukuran 60 x 50 cm. Sedang alatnya bisa pensil, konte, pastel, krayon, cat air, tempera, akrylic, tinta cina, spidol, warna tradisi, atau paduan berbagai bahan tersebut di atas.

Seperti lomba yang lain, lomba seni lukis ini juga memilih lima terbaik tingkat propinsi yang kemudian disertakan dalam lomba Tingkat Nasional yang diselenggarakan bulan Februari 1984.

Nantinya dari peserta lomba Tingkat Nasional ditentukan sepuluh calon pemenang yang akan diundang ke Jakarta bulan Februari 1984 untuk mengikuti pengujian dan demonstrasi melukis. Dari para calon pemenang tadi dipilih pemenang I sampai dengan V.

Lomba Seni Patung

Lomba Seni Patung terbuka bagi murid kelas IV, V, dan VI yang belum pernah memenangkan

lomba yang sama tahun-tahun sebelumnya.

Patung dibuat dengan ukuran tinggi minimal 30 cm dan maksimal 60 cm dari bahan kayu, tanah liat, gips, semen pasir, batu padas, bubur kertas, dan serbuk gergaji.

Judul patung Petani; Nelayan; Pramuka; Pelajar; Olahragawan; Gembala; atau Binatang.

Bagi pemenang yang tergolong lima terbaik Tingkat Propinsi, diikutsertakan dalam lomba Tingkat Nasional untuk menentukan sepuluh calon pemenang yang akan diundang ke Jakarta untuk diuji dan mendemonstrasikan kemahirannya dalam membuat patung pada bulan Februari 1984. Dari mereka kemudian ditentukan pemenang I sampai dengan V.

Loma Seni Musik

Lomba Seni Musik boleh diikuti murid kelas IV, V, dan VI yang belum pernah menjuarai lomba yang sama Tingkat Nasional sebagai juara I, II dan III.

Yang dilombakan ialah memainkan instrument pianika (pianika M 36). Peserta harus memainkan 4 buah lagu yang terdiri dua lagu Wajib masing-masing : Hymne Guru dan Wajib Belajar; sebuah lagu pilihan wajib dari : Desaku (L. Manik), Tanah Airku (Ismail Marzuki), Indonesia Tanah Pusaka (Ismail Marzuki); serta sebuah lagu pilihan daerah yaitu sebuah lagu asli yang berasal dari daerah masing-masing.

Pemenang I tingkat Propinsi akan diundang ke Jakarta bulan Februari 1984 untuk mengikuti Lomba Tingkat Nasional. Dari mereka dipilih pemenang I sampai dengan V Tingkat Nasional.

Semua pemenang I sampai dengan V Tingkat Nasional seluruh lomba bagi murid SD tersebut, akan menerima piala, piagam, dan Tabanas masing-masing sebanyak Rp 150.000,00; Rp 125.000,00; Rp 100.000,00 Rp 75.000,00; dan Rp 50.000,00.

PETUNJUK PEMBINAAN SEKOLAH

(III)

5) Tugas *siswa*, antara lain :

- a) Membiasakan diri untuk suka bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas atau belum dikenal.
- b) Membiasakan diri mempelajari buku-buku pengetahuan.
- c) Membiasakan diri membuat catatan tentang sesuatu yang telah dipelajari.
- d) Rajin memilih dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan pengetahuan yang terdapat dalam surat kabar dan mengolahnya.
- e) Membiasakan diri menyusun laporan penelitian yang sederhana.

d. *Gairah Menulis Analitik.*

Gemar membaca, rajin belajar dan suka meneliti harus dilengkapi dengan gairah menulis analitik. Menulis analitik adalah menelaah atau mengurai suatu permasalahan sehingga ditemukan hakekat permasalahan tersebut seperti resensi, kritik, komentar, telaahan dan sebagainya. Tidak semua yang dibaca adalah benar. Kemampuan analitik diperlukan agar dapat belajar dengan benar dan agar dapat melakukan penelitian. Kemampuan analitik itu dilatih dan diperkembangkan dengan menulis analitik.

1) Tugas *Kepala Sekolah*, antara lain :

- a) Menciptakan situasi sekolah yang mendorong guru dan siswa gemar menulis analitik.
- b) Mengusahakan agar di sekolah tersedia bahan-bahan bacaan dan tulisan yang membantu guru dan siswa untuk dapat menulis analitik.
- c) Meningkatkan kemampuan guru membimbing siswa menulis analitik.
- d) Memonitor kegiatan guru dalam meningkatkan kemampuan menulis analitik.

2) Tugas *guru*, antara lain :

- a) Berusaha meningkatkan kemampuan

menulis analitik dengan berlatih.

b) Mengusahakan terciptanya suasana dalam proses belajar mengajar sehingga kegairahan siswa menulis analitik meningkat.

c) Membimbing dan memberikan motivasi kepada siswa dalam berlatih menulis analitik.

3) Tugas *karyawan sekolah/tenaga administrasi*, antara lain :

Mengatur fasilitas sekolah agar gairah menulis analitik dapat ditingkatkan.

4) Yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh *orang tua/masyarakat*, antara lain :

a) Membina suasana di rumah agar siswa terdorong menulis analitik.

b) Membantu menyediakan buku/tulisan di rumah agar siswa dapat meningkatkan keterampilan menulis analitik.

5) Tugas *siswa*, antara lain :

a) Membiasakan diri mencari sumber-sumber bacaan sebanyak-banyaknya tentang sesuatu topik yang diajarkan di sekolah.

b) Melatih diri menulis secara analitik.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Etika.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan etika meliputi : Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila, bersikap dan bertingkah laku yang baik (sopan santun serta berkepribadian), dan berdisiplin.

a. *Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*

Pendidikan di sekolah tidak hanya menyangkut pembinaan dan pengembangan aspek logika saja tetapi juga aspek budi luhur dan perilaku dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan tidak hanya sekedar memberitahu-tentang keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, melainkan juga harus menanamkan suatu sikap

percaya dan taqwa yaitu sikap siap sedia melakukan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

1) *Tugas Kepala Sekolah*, antara lain :

Menciptakan suatu situasi di sekolah sehingga dapat meningkatkan sikap dan perilaku baik sesuai dengan agama dan kepercayaan siswa dan guru masing-masing.

2) *Tugas guru*, antara lain :

Membimbing siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan pelajaran sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

3) *Tugas karyawan sekolah*, antara lain :

Membantu sekolah dalam menciptakan situasi sehingga dapat meningkatkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan agama dan kepercayaan siswa dan guru masing-masing.

4) Yang diharapkan dapat dilakukan oleh *orang tua/masyarakat*, antara lain :

- a) Membiasakan diri melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- b) Mendorong putera-puterinya untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- c) Menyediakan peralatan peribadatan yang dibutuhkan oleh putera-puterinya.
- d) Menciptakan suatu situasi dalam lingkungan keluarganya yang dapat menumbuhkan gairah untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya.

5) *Tugas siswa*, antara lain :

Membiasakan diri berdoa sebelum dan sesudah pelajaran sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

b. *Bermoral Pancasila (menghayati dan mengamalkan Pancasila)*

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan kepribadian, pandangan hidup, dan dasar negara yang sekaligus merupakan jiwa dan watak bangsa Indonesia. Dalam pembentukan bangsa Indonesia

seutuhnya, sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan. Oleh karena itu di sekolah harus dilaksanakan pendidikan agar siswa memiliki moral Pancasila.

1) *Tugas Kepala Sekolah*, antara lain :

- a) Menerapkan 36 butir P4 dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Membina dan membimbing pelaksanaan Pendidikan Moral Pancasila di sekolah.
- c) Menciptakan situasi di sekolah sehingga dapat menumbuhkan suatu sikap pada siswa dan guru untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
- d) Menumbuhkan rasa cinta bangsa dan kebudayaan nasional pada siswa dan guru.
- e) Mengusahakan tersedianya atribut dan benda-benda kebanggaan nasional di sekolah.
- f) Mengikut sertakan siswa, guru dan karyawan sekolah dalam kegiatan-kegiatan sosial.

2) *Tugas guru*, antara lain :

- a) Menerapkan 36 butir P4 dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Melaksanakan kegiatan yang selaras dengan Pendidikan Moral Pancasila.
- c) Membimbing siswa untuk saling menghormati, berbuat amal, dan bekerja sama dalam proses belajar mengajar.
- d) Membimbing siswa untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
- e) Mendorong, membimbing, dan membina usaha menabung dan berkoperasi.

3) *Tugas karyawan/tenaga administrasi*, antara lain :

- a) Menerapkan 36 butir P4 dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Ikut membantu menciptakan situasi yang dapat memungkinkan penerapan P4 dalam kehidupan sekolah.

4) Yang diharapkan dapat dilakukan oleh *orang tua/masyarakat*, antara lain :

- a) Menerapkan 36 butir P4 dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Melaksanakan kegiatan yang selaras dengan

Pendidikan Moral Pancasila.

- c) Menciptakan situasi dalam lingkungan keluarga sehingga dapat menimbulkan sikap kekeluargaan di antara putera-puterinya.
 - d) Mendorong putera-puterinya untuk cinta tanah air dan bangsa.
 - e) Mendorong putera-puterinya untuk suka menolong.
 - f) Mendorong putera-puterinya untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar serta tepat pada waktunya.
- 5) Tugas *siswa*, antara lain :
- a) Menerapkan 36 butir P4 dalam kehidupan sehari-hari.
 - b) Melaksanakan kegiatan yang selaras dengan Pendidikan Moral Pancasila.
 - c) Mempelajari dan menghayati sejarah perjuangan bangsa.
 - d) Mengembangkan kebiasaan untuk ikut menolong sesama teman atau orang lain yang tertimpa kemalangan.
 - e) Ikut aktif dalam kegiatan usaha amal untuk meringankan penderitaan anak-anak penderita cacat, yatim piatu, dan yang tertimpa musibah bencana alam.
 - f) Aktif menjadi anggota koperasi di sekolah.
 - g) Mengembangkan kebiasaan untuk menabung.
 - h) Aktif memelihara tata tertib di sekolah.

c. Bersikap dan bertingkah laku yang baik (sopan santun serta berkepribadian).

Manusia adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupan dan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya harus berhubungan dengan manusia lainnya. Untuk dapat hidup bersama-sama dengan selaras, serasi, seimbang, dan penuh tenggang rasa, diperlukan cara berkomunikasi yang baik yaitu sopan santun. Tata pergaulan di sekolah yang merupakan perwujudan etika diharapkan dapat menjadi suri teladan bagi masyarakat sekitarnya. Selain itu setiap orang harus pula berkepribadian yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Untuk itu di sekolah harus ditanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam P4.

- 1) Tugas *Kepala Sekolah*, antara lain :
 - a) Bersikap sopan santun di dalam pergaulan.
 - b) Menciptakan situasi di sekolah sehingga dapat ditanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam P4.

dalam P4.

- c) Memahami dan menghormati tata cara hidup dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat, tanpa mengabaikan persatuan dan kesatuan bangsa.
- d) Mendorong siswa dan guru untuk membiasakan diri menghormati orang tua, pemuka pemuka masyarakat, serta pahlawan bangsa.
- e) Mengawasi laku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari.

2) Tugas *guru*, antara lain :

- a) Memberi contoh bersikap dan bertindak sopan dalam pergaulan sesuai dengan asas-asas ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.
- b) Membimbing siswa agar bertingkah laku sopan santun, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
- c) Membimbing dan membina siswa untuk menjadi manusia yang patut dicontoh.

3) Tugas *karyawan sekolah/tenaga administrasi*, antara lain :

- a) Membiasakan diri bersikap sopan santun terhadap siswa, guru dan masyarakat sekitarnya.
- b) Ikut membantu menciptakan kehidupan lingkungan sekolah sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

4) Yang diharapkan dapat dilakukan oleh *orang tua/Masyarakat*, antara lain :

Memberikan suri teladan terhadap putera-puterinya agar bersikap/bertingkah laku yang baik sesuai dengan adat istiadat yang berlaku (misalnya cara berbicara, cara menghormati orang lain, cara duduk, cara makan dan lain sebagainya), tanpa mengabaikan persatuan dan kesatuan bangsa.

5) Tugas *siswa*, antara lain :

- a) Membiasakan diri menghormati ibu dan bapak guru.
- b) Membiasakan diri saling menghormati sesama teman.
- c) Membiasakan diri mengatakan yang sebenarnya (tidak bohong).
- d) Membiasakan diri tidak memotong pembi-

cara orang lain.

- e) Membiasakan diri berpakaian bersih dan rapi.
- f) Membiasakan diri bersikap ramah-tamah.
- g) Membiasakan diri mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam percakapan.
- h) Membiasakan diri bersikap sabar.
- i) Membiasakan diri menjelaskan dan mengatakan secara sadar kepada Wali Kelas/guru piket tentang ketidakhadirannya di sekolah atau dalam latihan.
- j) Membiasakan diri tertib dan serasi dalam penampilannya sesuai dengan situasi dan kondisi.
- k) Membiasakan diri menanamkan dan memupuk rasa persaudaraan sesama teman.

d. Berdisiplin.

Pembinaan dan pembinaan etika juga menyangkut disiplin. Kegiatan itu harus dimulai dengan disiplin terhadap diri sendiri. Uraian lebih lanjut tentang kegiatan ini terdapat pada bagian yang memberikan petunjuk-petunjuk tentang peningkatan Ketahanan Sekolah.

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Estetika.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan estetika meliputi : apresiasi seni, persepsi seni dan kreasi seni.

a. Apresiasi Seni.

Apresiasi seni ialah kemampuan menghargai kesenian atau hasil seni. Peningkatan apresiasi seni di sekolah dimaksudkan untuk menanamkan rasa cinta akan kesenian, terutama kesenian bangsa Indonesia.

- 1) Tugas *Kepala Sekolah*, antara lain :
 - a) Menciptakan lingkungan sekolah yang dapat membangkitkan apresiasi seni pada siswa, guru, karyawan sekolah, dan masyarakat lingkungan sekolah.
 - b) Mengusahakan dapat hadir dalam setiap kegiatan kesenian yang diadakan sekolah agar siswa terdorong untuk selalu aktif hadir dalam setiap kegiatan tersebut.
 - c) Mendorong siswa dan guru mengadakan kunjungan ke tempat-tempat peragaan karya seni.

d) Mendorong siswa dan guru agar dapat menghargai karya-karya seni.

- 2) Tugas *guru*, antara lain :
 - a) Mengusahakan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan/meningkatkan apresiasi seni.
 - b) Membimbing dan membina siswa dalam menghargai kesenian.
 - c) Memberikan motivasi kepada siswa untuk menghargai kesenian.
 - d) Mengusahakan dapat hadir dalam setiap kegiatan kesenian yang diadakan oleh sekolah.
- 3) Tugas *karyawan sekolah/tenaga administrasi*, antara lain :
 - a) Ikut membantu terselenggaranya kegiatan kesenian di sekolah.
 - b) Ikut membantu memanfaatkan alat-alat kesenian.
- 4) Yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh *orang tua/masyarakat*, antara lain :

Mendorong putera-puterinya agar ikut aktif ambil bagian dalam acara-acara kesenian terutama yang diselenggarakan oleh sekolah.
- 5) Tugas *siswa*, antara lain :
 - a) Ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan kesenian yang diadakan oleh sekolah.
 - b) Membiasakan diri menghargai hasil kesenian, terutama ciptaan bangsa Indonesia.
 - c) Mengembangkan kebiasaan menghargai hasil cipta karya seni bangsa lain yang cocok dengan kepribadian bangsa sendiri.

b. Persepsi Seni.

Persepsi seni ialah kemampuan menikmati seni. Kegiatan persepsi seni ini perlu dilatih sejak usia masih muda agar anak tersebut nantinya memiliki perasaan halus.

- 1) Tugas *Kepala Sekolah*, antara lain :
 - a) Menjelaskan manfaat kesenian dalam kegiatan intra maupun ekstra sekolah.
 - b) Memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk dapat mengikuti kegiatan kesenian.
 - c) Mengusahakan tersedianya sarana dan pelatoh yang dapat memberikan bimbingan

bagi siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan mereka menikmati seni.

- 2) Tugas *guru*, antara lain :
 - a) Mengusahakan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan minat terhadap seni.
 - b) Membimbing dan membina kegiatan kesenian sehingga siswa memiliki kemampuan menikmati kesenian.
 - c) Mendiskusikan hasil kesenian agar siswa dapat mengembangkan persepsi seninya.
- 3) Tugas *karyawan sekolah/tenaga administrasi*, antara lain :

Ikut membantu menyelenggarakan peragaan kesenian di sekolah.
- 4) Yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh *orang tua/masyarakat*, antara lain :
 - a) Menciptakan situasi dalam lingkungan keluarga sehingga putera-puterinya dapat menikmati seni.
 - b) Mendorong putera-puterinya untuk mengunjungi kegiatan-kegiatan kesenian (pameran dan lain sebagainya).
- 5) Tugas *siswa*, antara lain :
 - a) Mengunjungi acara kegiatan seni.
 - b) Ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan kesenian.
 - c) Membiasakan diri mendiskusikan hasil seni.

c. *Kreasi Seni*.

Kreasi seni ialah kemauan menciptakan karya seni. Kegiatan pembinaan dan peningkatan kreasi seni perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar.

- 1) Tugas *Kepala Sekolah*, antara lain :
 - a) Mengusahakan terciptanya situasi yang dapat menumbuhkan minat siswa dan guru untuk dapat menghasilkan karya seni.
 - b) Mengembangkan keberanian, kemampuan, dan percaya diri yang diperlukan untuk menunjang kegiatan latihan mencipta seni.
 - c) Mengusahakan tersedianya tenaga pelatih dalam kegiatan kreasi kesenian.
 - d) Mendorong siswa dan guru yang mempunyai potensi/bakat untuk berkreasi dalam kesenian.
 - e) Mengadakan demonstrasi/pementasan hasil

karya seni dan mengadakan lomba seni.

- f) Menampilkan karya seni pada kesempatan hari-hari peringatan nasional dan akhir tahun ajaran sekolah.
- 2) Tugas *guru*, antara lain :
 - a) Mengusahakan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat membangkitkan minat siswa untuk berkreasi dalam bidang kesenian.
 - b) Membimbing dan membina siswa untuk dapat berkreasi seni.
 - c) Memberi motivasi agar berkreasi dan memberi penghargaan terhadap siswa yang berprestasi dalam kreasi seni.
- 3) Tugas *karyawan sekolah/tenaga administrasi*, antara lain :

Mengusahakan agar halaman, ruangan dan peralatan sekolah tetap rapi dan teratur sehingga menimbulkan keindahan yang dapat menunjang peningkatan kreasi seni.
- 4) Yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh *orang tua/Masyarakat*, antara lain :
 - a) Mengusahakan terciptanya situasi dalam lingkungan keluarga yang dapat menunjang terwujudnya kreasi seni putera-puterinya.
 - b) Menyediakan peralatan yang diperlukan untuk menumbuhkan kegiatan kreasi seni.
 - c) Mendorong dan memupuk putera-puterinya untuk berlatih menciptakan karya seni.

- 5) Tugas *siswa*, antara lain :
 - a) Berlatih dan mencoba menciptakan karya seni.
 - b) Mengembangkan keberanian, kemampuan, dan percaya diri dalam menampilkan hasil kreasi seninya dalam pameran atau lomba seni serta mau menerima saran dan kritik.

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Praktika.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan praktika meliputi : menghargai pekerjaan fisik, ke-trampilan, dan kecekatan serta penerapan teknologi.

a. *Menghargai pekerjaan fisik*.

Kegiatan pekerjaan fisik perlu dikembangkan di sekolah agar siswa mempunyai minat untuk mengolah bahan-bahan menjadi barang-barang

berguna serta dapat merawat dan memperbaiki perlengkapan/fasilitas.

- 1) Tugas *Kepala Sekolah*, antara lain :
 - a) Menanamkan kesadaran kepada siswa dan guru bahwa pekerjaan fisik adalah pekerjaan mulia/bernilai baik.
 - b) Mendorong dan memberi kesempatan kepada siswa dan guru untuk dapat melakukan pekerjaan fisik di sekolah dan mengadakan wisata ke tempat-tempat industri dan sebagainya.
 - c) Memberi penghargaan kepada siswa dan guru yang mempunyai prestasi dalam pekerjaan fisik.
- 2) Tugas *guru*, antara lain :
 - a) memberikan contoh agar siswa mampu dan mau menghargai serta melakukan pekerjaan fisik.
 - b) Mengusahakan agar siswa dapat menghargai dan melakukan pekerjaan fisik dalam proses belajar mengajar.
 - c) Membina dan membimbing siswa untuk dapat menghargai dan melakukan pekerjaan fisik.
- 3) Tugas *karyawan sekolah/tenaga administrasi*, antara lain :
 - a) Membantu tersedianya peralatan untuk kegiatan pekerjaan fisik.
 - b) Memanfaatkan peralatan sederhana hasil karya siswa.
 - c) Menyimpan dan memelihara hasil pekerjaan fisik siswa.
- 4) Yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh *orang tua/masyarakat*, antara lain :
 - a) Mendorong putera-puterinya untuk berkemampuan menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan rumah yang berhubungan dengan pekerjaan fisik.
 - b) Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan putera-puterinya agar mereka dapat menyelesaikan tugas pekerjaan rumah.
- 5) Tugas *siswa*, antara lain :
 - a) Membiasakan diri untuk menghargai pekerjaan fisik.
 - b) Membiasakan diri untuk menyukai dan me-

lakukan pekerjaan fisik.

b. *Ketrampilan dan Kecekatan.*

Ketrampilan dan kecekatan sangat diperlukan. Oleh karena itu siswa diharapkan melatih diri sehingga memiliki ketrampilan dan kecekatan.

- 1) Tugas *Kepala Sekolah*, antara lain :
 - a) Mengusahakan terciptanya situasi sehingga dapat terlaksana latihan ketrampilan dan kecekatan dalam program intra maupun ekstra sekolah.
 - b) Mengusahakan tersedianya tempat dan alat-alat yang diperlukan untuk mengadakan kegiatan ketrampilan.
 - c) Mengusahakan tenaga pelatih yang dapat memberikan bimbingan dan latihan kepada siswa.
 - d) Memperagakan hasil ketrampilan dan kecekatan siswa yang menonjol.
- 2) Tugas *guru*, antara lain :
 - a) Mengusahakan agar siswa dapat mengembangkan ketrampilan dan kecekatan dalam proses belajar mengajar.
 - b) Mengusahakan berbagai kegiatan untuk melatih ketrampilan dan kecekatan siswa dalam berbagai bidang.
 - c) Membina dan mengembangkan bakat-bakat ketrampilan dan kecekatan siswa.
 - d) Membuat alat-alat pelajaran yang sederhana bersama siswa.
- 3) Tugas *karyawan sekolah/tenaga administrasi*, antara lain :
 - a) Melatih diri agar trampil dan cekatan dalam melaksanakan tugas.
 - b) Ikut membantu mengadakan dan memelihara alat-alat untuk pendidikan ketrampilan dan pelaksanaan kegiatan dalam membina kecekatan.
- 4) Yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh *orang tua/masyarakat*, antara lain :
 - a) Menciptakan situasi dalam lingkungan keluarga sehingga putera-puterinya trampil dan cekatan.
 - b) Mendorong putera-puterinya untuk dapat mengadakan latihan-latihan sehingga menjadi trampil dan cekatan.

(Bersambung)

SEJUMLAH 25 SISWA DAN MAHASISWA ASAL TIMOR TIMUR MENDAPAT BEASISWA

Sejumlah 25 orang siswa dan mahasiswa asal Timor Timur telah ditetapkan untuk mendapatkan beasiswa. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0335/K/1983, tanggal 8 Agustus 1983.

Tujuan dari pemberian beasiswa tersebut yaitu untuk memberi kesempatan kepada para siswa dan mahasiswa yang berasal dari Timor Timur agar mereka dapat melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah tingkat atas, dan perguruan tinggi di beberapa kota seperti di Kupang (Nusa Tenggara Timur), Surabaya dan Malang (Jawa Timur), Surakarta (Jawa Tengah), dan Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Beasiswa tersebut untuk : biaya pemondokan dan uang saku, yang diberikan setiap bulan; biaya pembelian pakaian dan buku serta alat pelajaran yang diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun. Sedangkan biaya praktek diberikan sekali dalam satu tahun juga.

Untuk biaya darmawisa atau karyawisata diberikan juga dalam 1 (satu) tahun sekali. Dan

biaya kesehatan diberikan apabila diperlukan.

Beasiswa tersebut tidak diberikan lagi apabila: siswa atau mahasiswa dua tahun secara berturut-turut tidak naik kelas atau tidak naik tingkat; tidak menghadiri sekolah atau kuliah lebih dari 1 (satu) bulan tanpa alasan; dan beasiswa juga tidak diberikan lagi jika mahasiswa tersebut telah lulus ujian terakhir.

Untuk itu semua, Kepala Sekolah atau Pimpinan perguruan tinggi, bertanggung jawab atas kemajuan pendidikan para siswa dan mahasiswa penerima beasiswa. Sedangkan pelaksanaan daripada pembayaran beasiswa itu dilakukan oleh pimpinan bagian program penyusunan rencana program dan pengendalian pelaksanaan pendidikan kebudayaan Timor Timur.

Keputusan pemberian beasiswa tersebut berlaku mulai tanggal 8 Agustus 1983 dan berlaku surut sejak 1 April 1983.



Ketua YPLP – PGRI Pusat Slamet I didampingi oleh Rektor IKIP – PGRI Yogyakarta Drs. Suparno tatkala menggunting balon berhadiah pembukaan perkuliahan mahasiswa baru 1983/1984.

**LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DI DEPAN SIDANG PLENO DPR-RI
TANGGAL 16 AGUSTUS 1983**

II

Jumlah buku pelajaran pokok SD yang telah dan sedang disediakan tahun 1982/83 adalah 45.400.000. Dengan demikian selama empat tahun Repelita III dapat disediakan 187.507.000 buku pelajaran.

Di samping buku pelajaran telah disediakan pula buku bacaan kanak-kanak pada perpustakaan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Dalam Repelita III direncanakan penyediaan lebih dari 62,5 juta buku bacaan/perpustakaan atas dasar perhitungan setiap SD dan MI (baik Negeri maupun Swasta) akan memperoleh 100 judul setiap tahunnya. Dalam tahun 1982/83 disediakan 30,0 juta buku bacaan sedangkan dalam tahun 1979/80 sampai dengan 1981/82 dilakukan penyediaan sebanyak 41,5 juta buku bacaan. Dengan demikian selama empat tahun Repelita III akan dapat disediakan 71,5 juta buku bacaan kanak-kanak pada perpustakaan SD dan MI, yang berarti melampaui sasaran semula Repelita III.

Selanjutnya dalam tahun 1982/83 telah pula disediakan alat peraga (IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Indonesia) sebanyak 80.420 perangkat serta alat keterampilan, kesenian dan olahraga sebanyak 60.680 perangkat. Sementara itu dalam tahun 1982/83 pembinaan pendidikan Taman Kanak-kanak antara lain mencakup usaha-usaha pengadaan berbagai jenis buku (buku pedoman guru/murid, buku perpustakaan dan buku kurikulum TK) sebanyak 218.750 buku, 180.000 buletin guru, dan 100.000 buku evaluasi belajar. Sejalan dengan penyempurnaan kurikulum, dilakukan penataran bagi 3.500 guru dan pembina TK. Di samping itu alat-alat peraga untuk Taman Kanak-kanak telah disediakan sebanyak 1.145 perangkat. Dalam rangka pembinaan mutu, telah pula didirikan Taman Kanak-kanak percontohan sebanyak 10 gedung sekolah.

Seperti halnya dengan Taman Kanak-kanak, dalam tahun 1982/83 pembinaan Sekolah Luar Biasa (SLB) dilaksanakan antara lain melalui pengadaan 33.000 buah pedoman guru/murid

dan buku kurikulum, 5.000 buku evaluasi belajar dan 10.000 buletin guru, serta penataran sebanyak 450 guru dan pembina SLB. Selanjutnya peralatan pendidikan yang telah disediakan berjumlah 53 perangkat. Kecuali itu direhabilitasi 10 gedung Sekolah Luar Biasa (SLB), di samping pembangunan lanjutan 2 gedung SLB baru.

b. Pembinaan Pendidikan Menengah Tingkat Pertama (SMTP)

Pengembangan pendidikan menengah tingkat pertama (SMTP) dalam Repelita III bertujuan untuk meningkatkan daya tampung terutama pada SMP. Sejalan dengan itu mutu SMP dan SMTP Kejuruan ditingkatkan pula.

Jumlah murid SMTP secara keseluruhan (SMP dan SMTP Kejuruan dan Teknologi) yang pada tahun 1978/79 berjumlah 2.674.000 murid (2.271.000 murid SMP dan 403.000 murid SMTP Kejuruan) telah meningkat menjadi 4.334.000 murid (4.263.000 murid SMP dan 71.000 murid SMTP Kejuruan) pada tahun 1982/83. Hal ini berarti kenaikan 1.660.000 murid SMTP atau 62% selama tahun terakhir, khususnya kenaikan 1.922.000 murid SMP atau 87,7%. Penurunan jumlah murid SMTP Kejuruan dan Teknologi sebanyak 332.000 atau 82% adalah dikarenakan pengintegrasian sejumlah besar SMTP Kejuruan dan Teknologi (Sekolah Teknik dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga) menjadi SMP yang lebih ditingkatkan mutu pendidikan dan prasarannya. Di lain pihak sejumlah SMTP Kejuruan yang dipertahankan terutama di daerah pedesaan telah pula ditingkatkan mutu dan relevansinya sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan tenaga pembangunan setempat. Betapapun juga, perkiraan semula dalam Repelita III bahwa jumlah murid SMTP akan mencapai sekitar 4 719 juta murid pada tahun terakhir Repelita III (1983/84) ternyata sudah hampir terlaksana dengan tertampungnya 4,334 juta pada tahun 1982/83.

Jika jumlah murid SMTP pada tahun 1982/83 sebanyak 4,334 juta itu dibandingkan dengan penduduk 13 – 15 tahun yang diperkirakan berjumlah 11,285 juta, maka dapat dikatakan bahwa daya tampung SMTP terhadap kelompok usia sekolah yang bersangkutan (angka partisipasi) mencapai 38,4%. Hal ini berarti pula bahwa angka partisipasi pada SMTP telah meningkat 12,0% selama empat tahun terakhir ini.

Dalam pada itu, sekitar 1.644 juta lulusan SD atau 72,0% (angka melanjutkan) dari keseluruhan 2,282 juta lulusan SD tahun 1981/82 dapat tertampung pada SMTP pada tahun 1982/83, dibandingkan dengan 70,5% (angka melanjutkan) pada tahun 1978/79 yang berarti kenaikan (angka melanjutkan) 1,5%.

(1) Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pembangunan gedung baru SMP dan pembangunan tambahan ruang kelas baru pada SMP yang ada memungkinkan perluasan daya tampung yang besar. Dalam tahun 1982/83 dilakukan pembangunan gedung baru SMP sejumlah 1.010 buah (dengan rata-rata masing-masing 4 ruang kelas) dan pembangunan 5.000 tambahan ruang kelas baru pada SMP yang ada. Sebagai usaha pemantapan fasilitas belajar yang telah ada telah pula diperbaiki kembali 300 gedung SMP. Bersamaan dengan itu telah dirintis dan dikembangkan sejumlah SMP Terbuka yang ditunjang dengan penyediaan modul sebagai satuan pelajaran yang memungkinkan anak didik belajar secara lebih mandiri.

Sejak 1979/80 sampai dengan 1981/82 telah dibangun 667 gedung SMP baru dan 4.193 tambahan ruang kelas baru, sehingga selama empat tahun Releita III dapat dibangun sebanyak 1.677 gedung SMP dan 9.193 tambahan ruang kelas baru.

Perluasan kesempatan belajar pada SMP telah ditunjang pula dengan pengangkatan dan penempatan guru baru dalam tahun 1982/83 sebanyak 10.500 orang. Sejak tahun 1979/80 sampai dengan 1982/83 telah diangkat sebanyak 27.903 guru SMP baru.

Peningkatan mutu pendidikan SMP telah diusahakan terutama melalui penataran guru, penyediaan buku pelajaran pokok dan secara khusus melengkapi SMP yang memerlukan dengan ruang-ruang laboratorium IPA, ruang ke

terampilan, dan sekaligus disediakan peralatan praktek laboratorium IPA dan peralatan keterampilan. Dalam rangka pembinaan SMP dan SMA sebagai sekolah lanjutan umum, beberapa kegiatan utama telah diusahakan pelaksanaannya secara terpadu, antara lain, dalam hal penataran guru serta penyediaan buku-buku pelajaran dan buku perpustakaan.

Dalam tahun 1982/83 telah ditatar 21.500 guru SMP/SMA, sehingga selama empat tahun Repelita III dapat dilaksanakan penataran bagi sekitar 57.166 guru sekolah-sekolah lanjutan umum (SMP/SMA). Usaha penataran guru tersebut di atas secara selektif, telah sangat ditunjang oleh adanya 9 buah Balai Penataran Guru (BPG).

Dalam tahun 1982/83 telah disediakan buku pelajaran pokok bagi SMP dan SMA sejumlah 16.500.000 sehingga selama empat tahun Repelita III penyediaan buku pelajaran pokok bagi SMP dan SMA mencapai 65.431.000 buku.

Dalam tahun 1982/82 peningkatan mutu SMP telah pula secara khusus diusahakan melalui pengadaan ruang-ruang laboratorium IPA bagi gedung-gedung sekolah yang belum melikinya, yaitu sejumlah 451 ruang, yang berarti selama empat tahun terakhir Repelita III telah dibangun 1.098 ruang. Di samping itu dalam tahun 1982/83 telah dilaksanakan pengadaan alat laboratorium IPA bagi semua SMP sebanyak 1.600 perangkat. Dengan demikian maka sejak tahun 1979/80 sampai dengan tahun 1982/83 dilakukan pula penyediaan 2.587 perangkat peralatan IPA bagi SMP.

Selanjutnya dalam tahun 1982/83 mutu dan relevansi pendidikan SMP telah pula ditunjang dengan penyediaan buku perpustakaan/bacaan sebanyak 1.000.000 buah bersama SMA; penyediaan alat keterampilan 1.394 perangkat, alat peraga matematika 553 perangkat serta alat kesenian dan olahraga sejumlah 1.098 perangkat, kesemuanya bagi SMP.

(2) Pembinaan SMTP Kejuruan

Pada tahun 1982/83 telah dilakukan pengembangan/rehabilitasi gedung sekolah bagi 35 ST dan 9 SKK yang disertai dengan pengadaan peralatan praktek dan penyediaan buku pelajaran.

c. Pembinaan Pendidikan Menengah Tingkat Atas (SMTA)

Kegiatan utama pembinaan Pendidikan Menengah Tingkat Atas yang terdiri dari SMA, SMTA Kejuruan dan SPG/SGO ditujukan untuk meningkatkan daya tampung terutama pada SMA, serta meningkatkan mutu SMA, SMTA Kejuruan dan SPG/SGO.

Daya tampung berbagai SMTA meningkat dari 1.290.000 murid pada tahun 1978/79 menjadi 2.285.000 pada tahun 1982/83. Dengan demikian maka selama empat tahun terakhir ini terdapat kenaikan sebesar 995.000 atau 77%. Perkiraan dalam Repelita III semula bahwa jumlah murid SMTA akan mencapai 2,243 juta pada tahun 1983/84 ternyata sudah sedikit terlampaui dalam tahun 1982/83.

Murid SMA meningkat dari 604.000 pada tahun 1978/79 menjadi 1.503.000 pada tahun 1982/83, yang berarti kenaikan 148,8%. Dalam jangka waktu yang sama, murid pada SMTA Kejuruan dan Teknologi meningkat dari 474.000 menjadi 545.000, yang berarti kenaikan 15%; sedangkan murid SPG/SGO meningkat dari 212.000 menjadi 237.000 atau 11,8%.

(1) Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Dalam rangka mempercepat perluasan kesempatan belajar pada SMA, dalam tahun 1982/83 telah dibangun 152 buah SMA (masing-masing rata-rata dengan 6 ruang kelas) dan ruang kelas tambahan 1.000 ruang. Dengan demikian maka selama empat tahun Repelita III (1979/80 – 1982/83) telah dibangun sebanyak 283 gedung SMA baru dan 2.523 ruang kelas baru serta direhabilitasi sebanyak 396 gedung SMA.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dalam tahun 1982/83 telah dibangun 125 ruang laboratorium IPA, 100 ruang perpustakaan dan 90 ruang keterampilan pada SMA yang masih memerlukannya. Di samping itu telah disediakan 150 perangkat peralatan laboratorium IPA dan 319 perangkat alat peraga matematika serta 395 perangkat alat kesenian dan olahraga.

Bersamaan dengan pembinaan SMP telah pula disediakan buku-buku pelajaran (termasuk buku Pendidikan Moral Pancasila dan buku Pendidikan Keterampilan), dan buku perpustakaan serta penataran dan penempatan guru/kepala sekolah.

(2) Pembinaan SMTA Kejuruan

Tujuan utama pendidikan kejuruan ialah untuk menghasilkan tenaga yang trampil, terlatih terdidik dan mampu melakukan usaha sendiri (wiraswasta).

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan meliputi kejuruan teknologi industri dan kejuruan teknologi pertanian, kejuruan teknologi kerumahtanggaan, kejuruan kemasyarakatan serta kejuruan kesenian dan kerajinan.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan memantapkan daya tampung pada berbagai Sekolah Menengah Tingkat Atas Kejuruan, dalam tahun 1982/83 telah dilakukan banyak usaha untuk pembangunan, memperluas dan merehabilitasi fasilitas pendidikan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan pendidikan lainnya.

Kegiatan pengembangan tersebut dilakukan terhadap 8 buah STM Pembangunan (4 tahun) dan 9 Pusat Latihan Pendidikan Teknik (PLPT), 132 STM (3 tahun), 21 SMT Pertanian, 4 STM Khusus (Grafika, Perkapalan, dan Penerbangan), 279 SMEA dan 112 berbagai Sekolah Kejuruan lainnya.

Di samping itu dalam tahun 1982/83 juga dilakukan pengadaan buku pelajaran sebanyak 1.724.000 eksemplar, sehingga selama empat tahun Repelita III disediakan 6.170.000 buku pelajaran SMTP/SMTA Kejuruan. Dalam tahun 1982/83 telah dilakukan penataran guru kejuruan sebanyak 3.084 orang (termasuk guru SMTP Kejuruan). Pada tahun 1979/80 sampai dengan tahun 1981/82 telah ditatar sebanyak 13.506 orang guru kejuruan lagi. Dengan demikian selama empat tahun Repelita III telah ditatar sejumlah 16.590 orang guru.

(3) Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Olah Raga (SPG/SGLB/SGO)

Dalam rangka pembinaan pendidikan guru, khususnya untuk meningkatkan mutu sekaligus meningkatkan jumlah lulusan SPG/SGLB/SGO telah dilakukan pembangunan, rehabilitasi dan perluasan gedung sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Dalam tahun 1982/83 telah dikembangkan sejumlah 67 SPG, SGLB, SGO.

Selain itu dalam tahun 1982/83 telah disediakan sebanyak 2.660.000 buku pelajaran, yang

berarti bahwa selama empat tahun Repelita III telah disediakan sebanyak 5.760.000 buku pelajaran dan 1.089.000 buku perpustakaan.

Dalam rangka penambahan tenaga guru maka dalam tahun 1982/83 dilakukan penataran guru sejumlah 100 orang. Juga telah dilakukan penataran guru dan tenaga teknisi bagi sejumlah 1.160

tenaga, dengan demikian sejak tahun 1979/80 sampai dengan tahun 1982/83 telah ditatar sebanyak 18.709 tenaga.

Dalam tahun 1982/83 dilakukan penyediaan peralatan pendidikan sebanyak 100 perangkat, sehingga selama empat tahun Repelita III telah disediakan 594 perangkat peralatan pendidikan.

(Bersambung)

(Sambungan dari hal 8)

PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO DI DEPAN SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 16 AGUSTUS 1983

Justru karena itu lah kita harus meletakkan landasan yang kukuh kuat bagi pertumbuhan bangsa dan negara kita dalam memasuki tahapan-tahapan pembangunan selanjutnya, yaitu untuk tinggal landas menuju masyarakat moderen yang adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila.

Tugas sejarah kita ialah melanjutkan dan meningkatkan karya besar dari pendahulu-pendahulu kita, yang dengan segala perjuangan dan pengorbanannya, yang dengan segala keikhlasan dan ketulusan hatinya, telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Itulah renungan kita yang terdalam saat ini mengenai tugas sejarah di depan kita, yang kita pandang sebagai kesinambungan, peningkatan dan pembaharuan dari sejarah kita di masa lampau. Itu lah pula yang menjadi tekad dan harapan kita pada saat menyongsong peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan dalam tahun '83 ini, dengan menyegarkan, memperdalam dan memperbaharui kesadaran kita : mengenai keadaan kita sebagai bangsa dan sebagai negara sekarang ini, dari manakah kita telah berangkat dan ke arah manakah kita kan melanjutkan perjalanan.

Dengan tekad membaja untuk terus membangun dengan penuh harapan dan kepercayaan mengenai hari esok yang bahagia, maka dengan sedalam-dalamnya kita pun menyadari bahwa kita akan memasuki tahun-tahun berat yang penuh dengan ujian dan tantangan.

Dengan tradisi sebagai bangsa pejuang yang telah keluar dengan selamat dari ujian-ujian berat di masa silam, pembangunan di masa datang juga akan kita kerjakan dengan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Sebagai bangsa yang kuat rasa keagamaannya, sebagai bangsa yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita masuki tahun ke-39 Kemerdekaan Nasional kita dengan terus memohon bimbingan dan kekuatan lahir batin kepadaNya, Yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah.

Dengan semuanya itu, mari lah kita masuki tahun ke-39 Kemerdekaan Nasional kita dengan semangat yang tak kenal padam sebagai bangsa pejuang untuk membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Terima kasih.

Jakarta, 16 Agustus 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

PERANAN KREATIVITAS DALAM PENDIDIKAN

Oleh : Dr. Mohammad Amin, M.A.

LINGKUNGAN KELAS YANG MEMACU DAN KREATIF

Gibbs (1972), dalam studinya dengan berbagai macam bisnis, industri, dan instansi-instansi pemerintah, menemukan bahwa kreativitas dalam organisasi dapat dikembangkan dengan menambah kepercayaan, komunikasi yang bebas dan terarah, penentuan diri sendiri, dan pengurangan pengawasan yang terlalu ketat. Hasil studi Gibbs ini mempunyai relevansi untuk proses pendidikan.

Untuk memperbesar timbulnya kreativitas dalam pengajaran, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

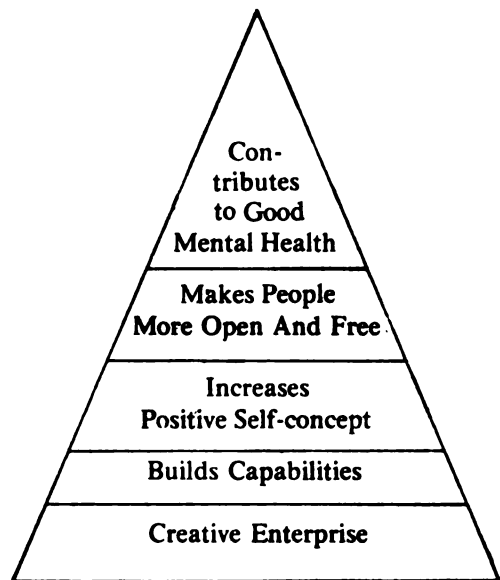
1. Mengembangkan kepercayaan yang tinggi kepada siswa dan mengurangi timbulnya rasa takut siswa.
2. Memberi semangat kepada siswa untuk suatu komunikasi ilmiah yang bebas dan terarah.
3. Memperkenankan siswa untuk menentukan sendiri sasaran dan evaluasi terhadap dirinya sendiri.
4. Pengawasan jangan terlalu ketat (kaku) dan otoriter.

Gibbs (1972) telah menemukan bahwa manager atau guru/dosen yang kreatif adalah individu yang percaya bahwa manusia itu adalah individu yang *self-motivated* dan bertanggung jawab terhadap idenya. Misalnya individu menjadi kreatif bila pekekangan dipindahkan atau dihilangkan; bekerja dengan baik bila ia merasa aman dan mengetahui tujuannya; dan mengungkapkan potensinya yang fantastik bila ia diperkenankan untuk melakukannya.

Guru/dosen membantu siswa/mahasiswa menjadi manusia dengan sikap terbuka, tidak mengancam, menerima, menyukainya, mengurangi rasa takut, dan membantu mereka menemukan identitasnya dengan membangun *self-concept*. Individu yang dibekali *positive self-concept* akan berani mengarungi hidup, percaya pada diri sendiri dan tidak mudah putus asa. Pada saat individu tumbuh, ia akan menjadi semakin kokoh, semakin berani mengambil resiko, dan dengan demikian

ia lebih mungkin untuk menjadi kreatif. Menjadi kreatif adalah ciri manusia yang berharga, lebih-lebih dalam era pembangunan sangat dituntut manusia-manusia kreatif, manusia pembangunan.

Maslow menyatakan bahwa tidak mungkin bagi kita menjadi sepenuhnya *self-actualized persons* tanpa menjadi kreatif. Piramida berikut ini menunjukkan kreatif yang sangat relevan bagi pendidikan.



Untuk mengajarkan kreativitas, guru/dosen harus menjadi kreatif dalam merencanakan metode, penugasan, dan sebagainya. Selain menyediakan lingkungan yang kreatif, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan bakat kreatif, antara lain ialah sebagai berikut.

1. Self-esteem approach

Dalam pendekatan ini, guru harus memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan *self-esteem* (percaya diri) siswa dan membantu untuk meningkatkan "harga diri", baik atas nilai-nilai mereka sendiri sebagai "manusia". Ini berarti bahwa guru

harus lebih aktif dalam membantu siswa mengembangkan *self-awareness* (sadar-diri), *positive self-consciousness* (insaf diri), dan menjadikan individu seutuhnya dengan *positive self-concept* (konsep-diri). Guru hendaknya semakin menyadari bahwa dengan mencurahkan seluruh perhatian agar siswa mempelajari ilmu pengetahuan saja (produk ilmiah), tanpa disertai pengembangan sikap dan proses ilmiah, tidak cukup untuk membantu siswa dalam menghadapi tantangan hidup modern. Guru harus sudah dapat menilai dan menanamkan *self-esteem* siswanya sedini mungkin pada awal tahun ajaran.

2. Creativity Approach

Beberapa cara yang disarankan untuk membuat proses belajar mengajar menjadi kreatif ialah sebagai berikut.

a. *Brainstorming*

Suatu masalah dikemukakan dan siswa diminta idenya. Setelah ide dikemukakan seluruhnya, siswa diminta meninjau ide yang dikemukakan tadi, kemudian ditanyakan ide mana yang akan digunakan untuk memecahkan masalah.

b. *Creative Completion*

Dikemukakan sesuatu yang belum selesai dan siswa diminta untuk menyelesaikannya.

c. *Role - playing*

Melibatkan siswa dalam suatu peranan tertentu dan dalam membuat situasi "*role-playing*".

d. *Penggunaan media lebih kreatif*

Berusaha menggunakan media dan alat audio-visual dengan cara yang lebih kreatif.

e. *Membuat humor*

Siswa diminta membuat humor dalam bentuk gambar dan/atau tulisan untuk menunjukkan suatu konsep atau prinsip yang akan dipelajari sambil memasukkan humor di dalamnya.

f. *Membuat syair empat kata*

Menunjukkan suatu obyek kepada siswa untuk diamati dan dipelajari. Kemudian siswa diminta membuat suatu daftar pernyataan yang terdiri dari satu kata. Akhirnya siswa diminta untuk mengkombinasikan empat kata dari daftar tersebut menjadi suatu syair empat kata.

3. Value-Clarification and moral development approach

Pendekatan *holistic* dan *humanistic* ditujukan

untuk mengembangkan penjelmaan potensi manusia dalam usahanya menuju *self-actualization*. Siswa dalam perjalanan hidupnya selalu berevolusi untuk mengembangkan sikap dan nilainya. Oleh karena itu, sekolah yang dengan sengaja atau tidak sengaja mengabaikan aspek perkembangan individual ini berarti akan menurunkan efektivitas pendidikannya. Ini dapat dimengerti karena pendidikan adalah suatu proses yang dinamis, suatu proses yang kemudian menghasilkan produk, seperti misalnya pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu. Proses ini adalah semua aktivitas yang bertujuan menyesuaikan diri individu di dalam masyarakat yang baik. Melalui proses ini manusia dipacu untuk berpikir sendiri, menilai dan menimbang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kemudian bertindak. Pendidikan dikatakan berhasil bila, setelah seseorang mengalami proses pendidikan, ternyata buah pikiran dan perilakunya dapat melayani kebutuhan sendiri dan masyarakat umumnya secara bermakna. Jelaslah bahwa pendidikan tidak berarti melulu memberikan pengetahuan, tetapi mengandung arti membentuk serta mengembangkan sebaik-baiknya kepribadian seseorang secara keseluruhan sebagai manusia seutuhnya. Berdasarkan hakikat pendidikan ini, maka falsafah dalam setiap kurikulum yang baru, selain dicantumkan tujuan untuk pencapaian atau pengembangan intelektual, hendaknya dimasukkan pula tujuan yang menyangkut pengembangan emosional, sosial, etika, dan moral sesuai dengan dasar falsafah negara kita, yaitu Pancasila.

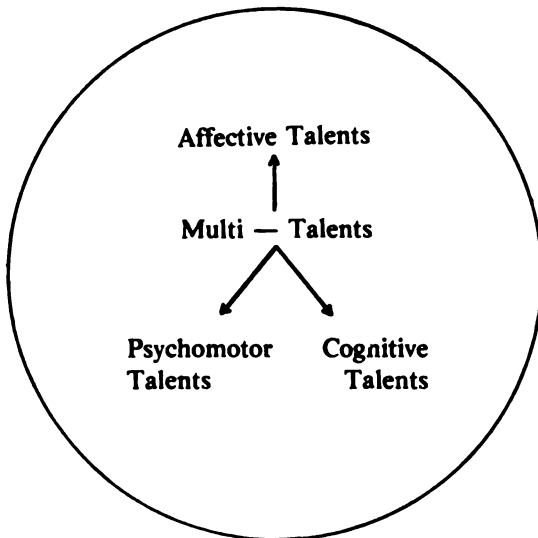
Sund (1976) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan perkembangan nilai dan moral siswa dapat dipengaruhi secara positif di sekolah melalui mata pelajaran apa pun. Simon, Howe, dan Kirschenbauw mengungkapkan bahwa siswa yang dihadapkan pada proses kejelasan nilai (*value clarification*) di sekolah ternyata sikap apatisnya, sikap bertingkahnya, dan sikap suka menolak menjadi berkurang. Mereka menjadi lebih bergairah, penuh semangat belajar/bekerja, lebih kritis pola berpikirnya dan kreatif. Kejelasan nilai telah membawa siswa yang mempunyai kemampuan intelegensi rendah menjadi lebih berhasil studinya.

4. Multiple-talent approach

Bagaimana guru dapat membantu seseorang membangun dirinya sendiri ? Pertama-tama guru

harus memperhatikan individu itu dengan sebaik-baiknya sebagai manusia yang utuh.

Paham klasik memandang siswa sebagai reservoir ilmu pengetahuan. Peranan guru ialah mengisi otak siswa dengan informasi. Guru yang berhasil memompakan informasi dan mencakup lebih banyak materi pelajaran dipandang sebagai guru yang menjalankan tugasnya dengan baik. Ini adalah pandangan yang telah usang. Guru harus memiliki pandangan yang menyeluruh (bulat) bukan bagian-bagian yang terpisah terhadap individu. Guilford, Taylor, dan lain-lainnya telah menunjukkan bahwa manusia atau seseorang itu merupakan suatu kumpulan lebih dari 120 bakat. Manifestasi dan pengembangan bakat ini membangun *self-concept* dan menunjang kesehatan mental, yang akan membantu siswa menjadi manusia seutuhnya.



Wholistic View of the Person

Oleh karena individu merupakan suatu koleksi dari sekian banyak bakat akademik, kreatif, perencana, organisasi, sosial, meramal, komunikasi, mengambil keputusan, dan masih banyak lainnya lagi, maka diperlukanlah *Multitalents approach* dalam proses belajar-mengajar. Dengan pendekatan ini guru harus berusaha mengembangkan semua bakat siswanya, bukan hanya bakat akademis semata-mata. Mengevaluasi siswa semata-mata berlandaskan bakat akademisnya saja sama dengan meremehkan eksistensinya sebagai manusia. Taylor (1968) menyatakan sebagai berikut :

If we restrict ourself to cultivating one talent we will merely find the top 10 percent to be highly gifted but if we will seek for the highly gifted in each of several different talents, the number found to be gifted will increase tremendously. In fact, if we cultivate three talents instead of only one, the percent found to be gifted will more than double (will be over 20 percent). Furthermore, if we work in six talent areas, the percent who are highly gifted will triple (will be about 30 percent).

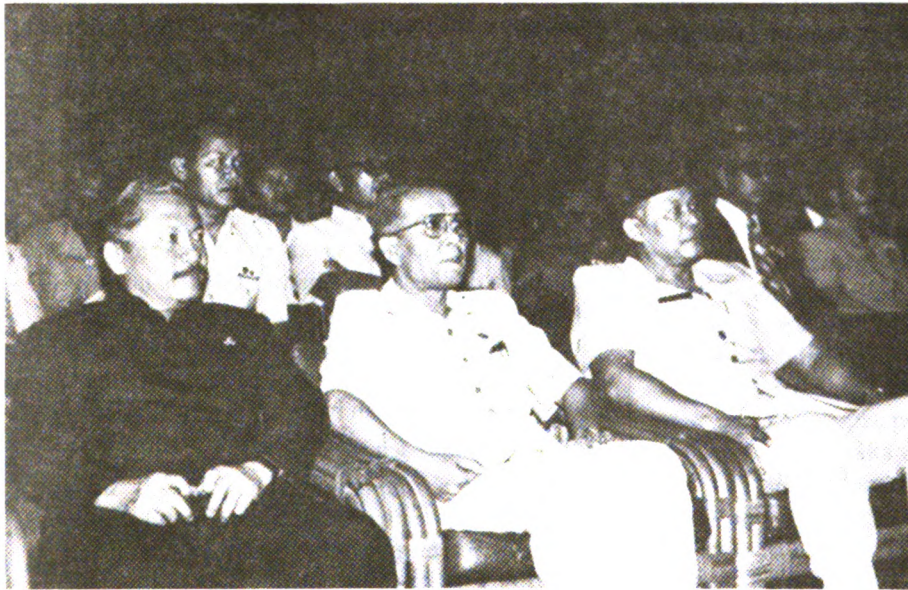
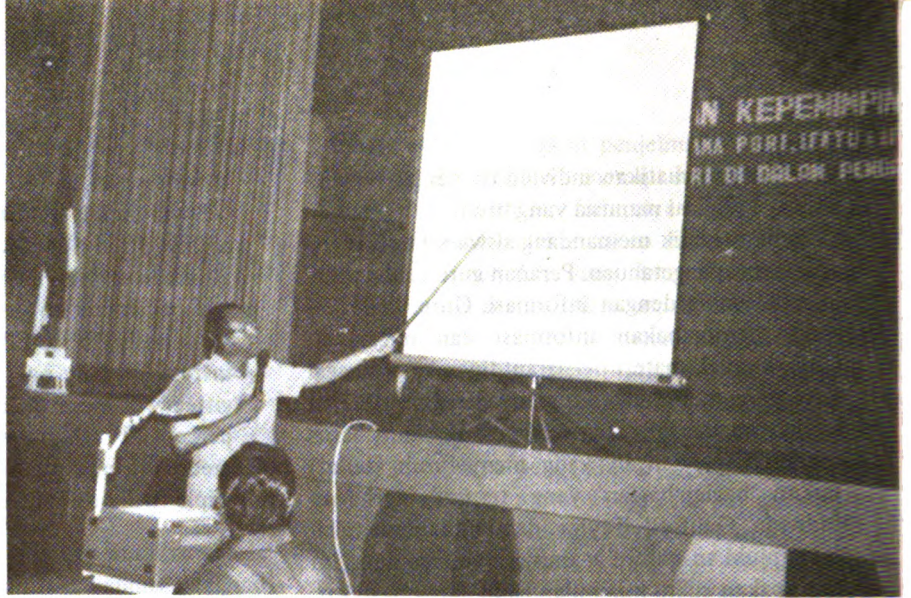
Memaklumi betapa kompleksnya mengembangkan semua bakat manusia mungkin menakutkan. Akan tetapi, renungkanlah sejenak betapa indahnya ide itu, tidak ada siswa di bawah rata-rata dalam semua bakat. Lima puluh persen siswa secara akademis mungkin di bawah rata-rata. Akan tetapi, apabila bakat-bakat yang terkemuka dari siswa yang rendah bakat akademisnya diwujudkan, siswa ini akan mengalami perasaan sukses. Penghargaan yang diterima akan mempengaruhi secara positif *self-concept* mereka dan mendorong harapannya sehingga membawa akibat bangkitnya keyakinan mereka : "Saya dapat belajar dan dihargai atas bakat-bakat saya di sekolah". Sebagai hasilnya, kemampuan akademisnya mungkin sekali akan bertambah baik.

5. Inquiry approach

Pendekatan *inquiry* memungkinkan siswa menggunakan semua proses mental untuk menemukan konsep atau prinsip ilmiah, ditambah protes mental lain yang memberikan ciri seorang dewasa yang sudah matang.

Dipandang dari aspek falsafah dan psikologi, mengajar dengan menggunakan pendekatan, *inquiry* banyak memberikan keuntungan. Keuntungan itu antara lain dapat meningkatkan potensi intelektual, memindahkan hadiah yang bersifat ekstrinsik beralih ke intrinsik, membantu siswa belajar melakukan penelitian, meningkatkan daya ingat, membuat proses pengajaran menjadi *student-centered* sehingga dapat membantu lebih baik ke arah pembentukan *self-concept* seseorang, meningkatkan harapan, mengembangkan kreativitas atau bakat lainnya, menghindari proses belajar secara menghafal, dan memberikan lebih banyak kesempatan atau waktu yang diperlukan oleh siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi informasi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Prof. Dr. Nugroho Notosusanto sedang menyampaikan pengarahan pada Latihan Kepemimpinan PGRI.



Suasana Pembukaan Latihan Kepemimpinan PGRI. Baris depan, dari kiri : Hari Suharto, S.H., Kepala BP-7, Prof. Dr. W.P. Napitupulu, Dirjen Pelsepora, H. Basyuni Suriamiharja, Ketua Umum PB - PGRI.

Dra. Mien Suwarmi Warnaen, Wakil Ketua Panitia "Latihan" menyampaikan pidato pada penutupan Latihan Kepemimpinan PGRI, 14 Oktober 1983.





Drs. Waskito, Manggala BP-7, saat menyampaikan makalahnya pada Latihan Kepemimpinan PGRI.



Drs. Dailami Amran dari Pengurus Daerah PGRI Bengkulu menerima Piagam dari Ketua Panitia "Latihan" Prof. Dr. Amran Halim, Ketua PB - PGRI.

wa akan membantu dalam pembentukan sumber manusia kreatif yang sangat berharga bagi masyarakat, pemerintah, dan negara kita yang sedang membangun.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Manusia mempunyai potensi untuk menjadi kreatif. Menjadi manusia berarti menjadi kreatif. Kreatif menumbuhkan dan mengembangkan *self-concept* individu.
2. Pendidikan dalam alam demokrasi harus membantu individu mengembangkan bakat/potensinya secara penuh menuju ke pembentukan manusia seutuhnya. Ini berarti kemampuan yang terlibat dalam pengembangan berpikir yang terlibat dalam pengembangan berpikir dan bertindak kreatif tidak boleh diabaikan.
3. Dalam pendidikan, suatu rekomendasi khusus yang sangat bermakna ialah memberikan kesempatan (motivasi) bagi setiap siswa/mahasiswa untuk belajar secara kreatif, tumbuh dan berkembang secara kreatif, serta hidup secara kreatif.
4. Pendidikan masa kini tidak hanya harus menanggapi prioritas pengembangan kurikulum dengan menitikberatkan pada pendidikan melalui *inquiry* dan kognitif saja, tetapi harus pula dilibatkan aspek efektifitasnya.
5. Guru/dosen harus menyadari bahwa siswa/mahasiswa tidak semata-mata penerima informasi dan memecahkan permasalahan yang diberikan kepadanya, tetapi adalah "manusia kreatif" yang kemampuan kreatifnya harus dikembangkan melalui proses pendidikan. Kreativitas siswa/mahasiswa sangat diperlukan dalam rangka penanaman jiwa kewiraswastaan dan proyek inovatif yang produktif.
6. Kesadaran asas kemampuan kreativitas dan usaha guru/dosen untuk memacu keberhasilan siswa/mahasiswa, dapat membantu dalam pembentukan manusia sumber yang sangat berharga bagi masyarakat, bangsa, dan negara dalam era pembangunan ini.
7. IKIP, sebagai lembaga pendidikan tinggi, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, khususnya lembaga pendidikan tenaga kependidikan, mempunyai peranan penting dan bertanggung jawab dalam memberikan kesempatan/ling-

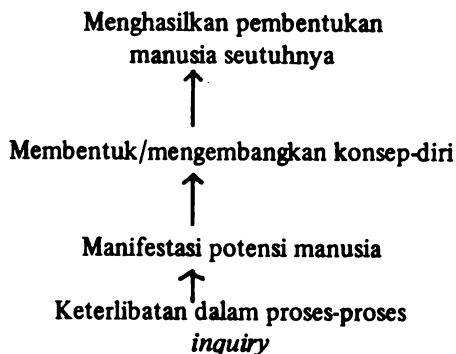
kungan belajar para siswa/mahasiswa untuk mengembangkan *self-concept*, *self-esteem*, kreativitas dan potensi-potensi lainnya, yaitu suatu program pendidikan yang berorientasi pada "keberhasilan".

Lampiran B.

RINGKASAN HASIL-HASIL PENELITIAN KREATIVITAS

1. Semua orang tanpa memandang usia dan suku bangsa adalah orang kreatif sampai pada batas-batas tertentu.
2. Individu mempunyai perbedaan dalam tingkat kemampuan kreatif dan unguapannya.
3. Kebebasan untuk menjadi kreatif mempunyai suatu pengaruh terhadap kesehatan mental. sesuatu yang menghambat atau meniadakan keinginan dan kemampuan kreatif akan menggagal sumber kepuasan yang fundamental dalam kehidupan, dan akhirnya akan menciptakan keresahan atau tekanan menuju ke arah keputusan atau frustrasi. Kreativitas seseorang merupakan suatu sumber yang tidak ternilai untuk menangani tekanan atau keresahan kehidupan sehari-hari sehingga dapat membuat frustrasi menjadi berkurang.
4. Siswa dapat belajar lebih efektif dalam suatu situasi atau lingkungan yang kreatif.
5. Beberapa sekolah tertentu telah berhasil dalam mengembangkan bakat kreatif.
6. Individu yang mempunyai kemampuan kreatif yang luar biasa, di dalam masyarakat sering merupakan individu dengan *academic achievement* yang tidak tinggi di sekolah.
7. Agar dapat menjadi efektif dalam mengembangkan usaha kreatif, sekolah harus menyediakan lingkungan yang kondusif untuk manifestasi kreativitas.
8. Penggunaan penguatan positif yang berlebihan dalam diskusi kelas dapat menghambat tanggapan kreatif siswa.
9. Waktu-tunggu (selang) yang lebih panjang untuk menggapi pertanyaan akan membantu pengembangan kreativitas. Rowe (1970) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa ada korelasi yang tinggi antara hakikat pertanyaan yang diajukan oleh guru dan tanggapan kreatif dari siswa. Bentuk pertanyaan yang diajukan oleh guru, waktu yang ia tunggu untuk jawaban, dan peranan penghargaan

Proses belajar melalui kegiatan *inquiry* dapat membentuk dan mengembangkan *self-concept* pada diri siswa. Setiap individu memiliki *self-concept*. Apabila kita memiliki *self-concept* yang baik, maka secara psikologis diri kita akan merasa aman, terbuka terhadap pengalaman baru, berkeinginan untuk selalu mengambil dan mengeksplorasi kesempatan yang ada, kreatif, dan umumnya memiliki mental yang sehat.



Jalur menuju ke pembentukan manusia seutuhnya.
(Sound, 1975)

Seringkali guru tidak memberikan waktu cukup kepada siswa untuk berpikir dalam hubungan dengan proses belajar. Siswa memerlukan waktu dalam menggunakan daya otaknya untuk berpikir dan memperoleh pengertian tentang konsep, prinsip dan teknik memecahkan masalah. Dr. Jean Piaget (Sound, 1976) percaya bahwa tidak akan terjadi proses belajar yang sejati (murni) apabila anak atau siswa tidak beraksi terhadap informasi secara mental, mengasimilasi serta mengakomodasi segala sesuatu yang ia jumpai di lingkungannya. Apabila hal ini tidak terjadi, maka guru dan siswa hanya terlibat dalam *pseudo-learning*, yaitu berupa hafalan/ingatan yang segera musnah menjadi kelupaan yang tak berguna.

6. Pictorial riddle approach

Pendekatan ini merupakan salah satu teknik atau metode untuk mengembangkan motivasi dan minat siswa dalam diskusi kelompok kecil dan besar. Suatu *riddle* biasanya berupa gambar di papan tulis, papan poster atau diproyeksikan dari suatu transparansi, kemudian guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan *riddle*. Pendekatan ini memungkinkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif.

katan ini memungkinkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif.

7. Synectics approach

William J.J. Gordon dan para teman sekerjanya (Sund, 1975), telah menghasilkan suatu pendekatan untuk memacu bakat kreatif anak atau siswa, yang dinamakan *synectics*. Gordon percaya bahwa proses kreatif dapat diungkapkan dan dikembangkan melalui pengajaran berbagai bidang ilmu pengetahuan, misalnya *science* dan ilmu-ilmu sosial-budaya. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa emosi, afektif, dan komponen arasional kreativitas pada permulaannya lebih penting dibandingkan dengan pikiran rasional. Oleh karena itu, kebanyakan kegiatan *synectics* dimulai dengan kegiatan kelompok yang tidak rasional, yang kemudian berkembang menuju pada masalah dan pemecahan masalah yang rasional. Pada dasarnya, *synectics* memusatkan pada keterlibatan siswa untuk membuat berbagai macam bentuk *metaphor* agar dapat membuka intelegensinya dan mengembangkan daya kreativitasnya. Hal ini dapat dilaksanakan karena *metaphor* dapat membantu melepaskan "ikatan struktur mental" yang melekat kuat dalam memandang suatu masalah sehingga dapat menunjang timbulnya ide kreatif.

BAGAIMANAKAH PERANAN KURIKULUM BARU TERHADAP KREATIVITAS

Guru atau dosen yang kreatif harus mampu memodifikasi dan mengembangkan materi pelajaran serta buku teks yang digunakannya sehingga betul-betul dapat memacu kegiatan kreatif. Suatu bahaya besar akan terjadi bila kurikulum baru itu diterima/ditelan begitu saja dan dianggap sebagai perintah atau tanggungan terakhir dalam pendidikan. Kesan demikian ini dapat memadamkan atau membunuh kemampuan kreatif guru dan siswanya. Umumnya kurikulum baru telah mengukuhkan isi/materi pelajaran yang mutakhir dan berdasarkan falsafah *inquiry*, tetapi hal ini tidak berarti bahwa kurikulum itu akan menjamin pengembangan kreativitas. Kurikulum baru umumnya tidak atau kurang menjabarkan secara eksplisit teknik mengembangkan kemampuan kreativitas. Keberhasilan tujuan ini sangat tergantung pada kesadaran dan usaha kreatif guru/dosen. Kesadaran akan adanya kemampuan kreatif dan usaha untuk memacu keberhasilan siswa/mahasiswa

banyak hubungannya dengan hasil kreatif siswa di dalam kelas.

Lampiran C.

KEJELASAN NILAI-NILAI (VALUE CLARIFICATION)

A. *Value* (nilai-nilai) memiliki ciri-ciri berikut :

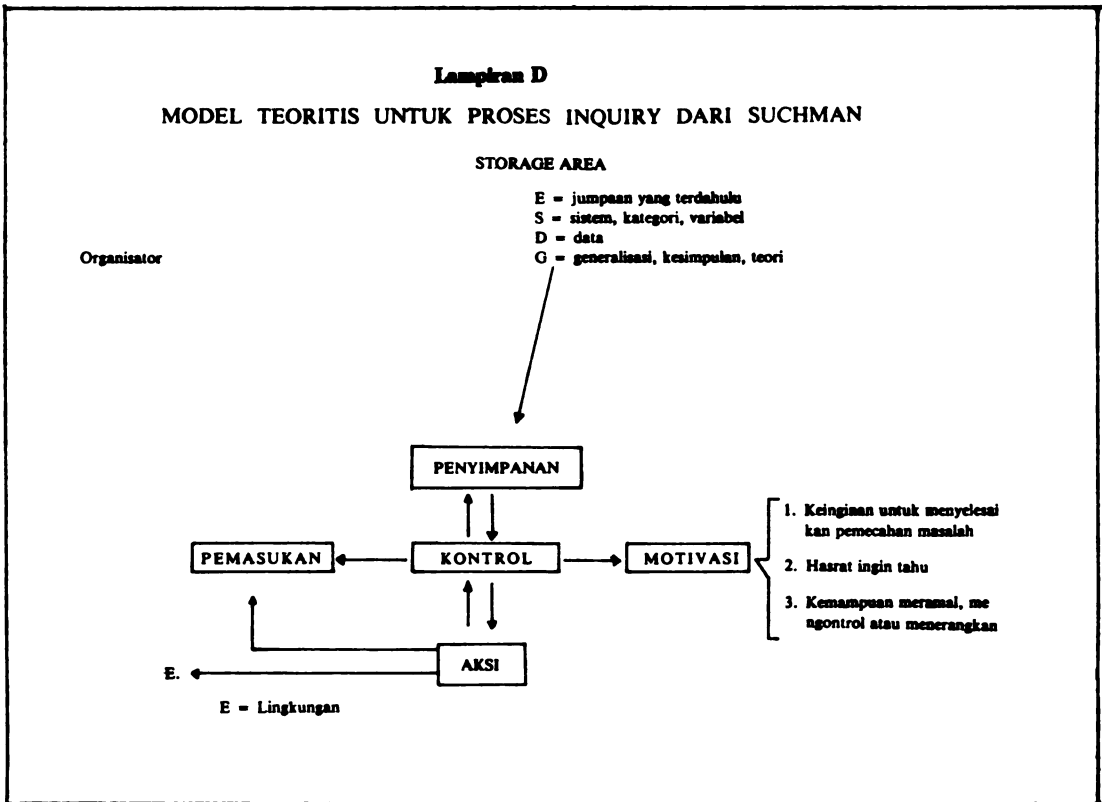
1. dicintai atau disenangi,
2. diakui atau dikuatkan secara umum,
3. dipilih secara bebas,
4. dipilih dari alternatif-alternatif,
5. dipilih dan mengetahui konsekuensi-konsekuensinya,
6. berkaitan erat dengan nilai-nilai lain, dan
7. dilaksanakan.

B. Individu yang memiliki dan mengerti nilai pribadinya akan menunjukkan :

1. Selalu tampak gembira dan bangga, percaya pada diri sendiri,
2. bersemangat dan bergairah,
3. bersikap positif dalam melakukan persepsi (tanggapan daya memahami) dan reaksi,
4. bertanggung jawab atau konsekuensi,
5. tidak mudah emosi,
6. memiliki tujuan tertentu dalam hidupnya.

C. Individu yang nilai pribadinya belum jelas atau tidak memiliki nilai akan menunjukkan:

1. apatis atau acuh tak acuh, lesu,
2. kurang atau tidak percaya pada diri sendiri,
3. tidak konsekuensi,
4. sukar atau tidak dapat menyesuaikan diri,
5. mudah emosi, dan
6. tidak tenteram, pikiran sering/selalu kacau atau bingung.



Lampiran A.
THE STRUCTURE OF INTELLECT (Gorman, 1974)

PROCESS	PRODUCT		UNIT	CLASSES		RELATIONS		SYSTEM	TRANSFORMATION	IMPLICATION
	COGNITION	MEMORY		DIVERGENT THINKING	CONVERGENT THINKING	EVALUATION				
	Perception of figures, sound*	Recognizing symbolic units	Verbal comprehension	Recognition of figures, symbols and words as belonging to classes, i.e., having a property in common	Seeing or grasping relationships " " " "	Seeing order or arrangement of objects in space Grasping order of symbols	Visualization Seeing similarities by a shift of meanings	Forseight in figures Ability to extrapolate with symbolic data		
	Visual and auditory memory	Rote memory	Logical memory	Memory for words or number classes Memory for class names	Memory of relationships between words/numbers ideas/things	Remembrance of the order of : objects in space, list of numbers, sequence of events	Memory for word transformations Memory for information of meanings	Memory for symbolic and semantic implications		
	Figural fluency	Word fluency	Ideational fluency	Ability to classify figures and word in various ways Spontaneous flexibility	Fluency for number/letter combinations Associational fluency	Fluency in production of object and symbol systems Fluency in production of sentences problems, theories	Adaptive flexibility Originality	Drawing out implied forms drawing out symbolic and semantic implications, elaborating given information		
	Ability to name abstractions	Perfectual speed	Judging identity of series Comparison of ideas	Classification of ideas, words Evaluation of symbolic and semantic classes	Education of correlates " " " "	Ordering of symbols or ideas into operational, logical or temporal sequence Judging internal consistency and conformity of systems with a principle	Redefinition abilities; changing use of part of unit and giving it new use in new unit Judgment of symbolic and semantic transformations	Deduction, reasoning Judging of symbolic implications Judging of logical inferences		

*) The upper third of each box represents figural content, the middle third symbolic content and the lower third semantic or ideational content.

Lampiran E
PROSES BELAJAR-MENGAJAR MELALUI
INQUIRY

- A. Ciri-ciri proses belajar melalui *inquiry*, antara lain :
1. bertanya, tidak semata-mata mendengarkan dan menghafal,
 2. bertindak, tidak semata-mata melihat dan mendengarkan,
 3. mencari penyelesaian/pemecahan, tidak semata-mata mendapatkan,
 4. menemukan masalah, tidak semata-mata mempelajari fakta,
 5. menganalisis, tidak semata-mata mengamati.
 6. membuat sintesis, tidak semata-mata membuktikan,
 7. berpikir, tidak semata-mata melamun atau membayangkan,
 8. menghasilkan atau memproduksi, tidak semata-mata menggunakan,
 9. menyusun, tidak semata-mata mengumpulkan,
 10. menciptakan, tidak semata-mata memproduksi kembali,
 11. menerapkan, tidak semata-mata mengingat,
 12. mengeksperimentasikan, tidak semata-mata membenarkan,
 13. mengkritik yang konstruktif, tidak semata-mata menerima,
 14. merancang, tidak semata-mata melaksanakan,
 15. mengevaluasi dan menghubungkan, tidak semata-mata mengulangi.
- B. Beberapa kondisi yang diperlukan untuk proses belajar melalui *inquiry*
1. kondisi yang fleksibel, bebas untuk berinteraksi,
 2. kondisi lingkungan yang responsif,
 3. kondisi yang memudahkan untuk memusatkan perhatian, dan
 4. kondisi yang bebas dari tekanan.
- C. Peranan guru dalam proses belajar-mengajar melalui *inquiry* :
1. menstimulasi dan menantang siswa untuk berpikir,
 2. memberikan keluwesan untuk berpendapat, berinisiatif dan bertindak,
 3. memberikan dukungan untuk ber *inquiry*,

4. menentukan diagnosa kesulitan siswa dan membantu mengatasinya, dan
5. mengidentifikasi dan menggunakan *teachable moment* sebaik-baiknya.

- D. Hal-hal yang harus dipacu dalam proses belajar melalui *inquiry* :
1. otonomi siswa,
 2. kebebasan dan dukungan kepada siswa,
 3. sikap keterbukaan,
 4. percaya kepada diri sendiri dan kesadaran akan harga diri,
 5. *self-concept*, dan
 6. pengalaman *inquiry*, terlibat dalam pemecahan berbagai macam masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amien Mohammad. *Penerapan Teori Piaget dalam Science dan Matematika*. Yogyakarta : FKIE- IKIP, 1978.
- Mengajarkan Science Dengan Menggunakan Metode Discovery Dan Inquiry*. Yogyakarta: FKIE – IKIP, 1978.
- Apakah Science itu ?* Yogyakarta FKIE - IKIP, 1978.
- Ilmu Alamiah Dasar Sebagai Mata Kuliah Dasar Umum*. Yogyakarta : FKIE - IKIP, 1979.
- Pendidikan Science*. Yogyakarta : FKIE- IKIP, 1979.
- Apakah Metode Discovery dan Inquiry Itu ?* Jakarta : Proyek NKK, Dit. Jen. Pendidikan Tinggi, Departemen P dan K, 1979.
- Kreativitas : Suatu Jalur Menuju Ke Pembentukan Manusia Seutuhnya*. Yogyakarta : FKIE - IKIP, 1980.
- Amien, Mohammad, Moh. Nur dan Wisnu Harso. *Humanistic Education*. Jakarta : Proyek NKK, Dit. Jen. Pendidikan Tinggi, Departemen P dan K, 1979.
- Amien, Mohammad, Prawoto dan Siti Maryam. *Seri MKDU – Ilmu Alamiah Dasar : Hak Science (I.P.A.)*. Yogyakarta : FKIE - IKIP, 1980.
- Barron, Frank. "Travels in Search of New Latitudes for Innovation", in *Climate for Creativity*, ed. Calvin Taylor New York : Pergamon Press, 1972.

- Carin, Arthir A and Robert B. Sund. *Teaching Science Through Discovery*. Columbus, Ohio: Charles B. Merrill Publishing Company, 1975.
- Developing Questioning Techniques : A Self-Concept Approach*. Columbus, Ohio : Charles E. Merrill Company, 1971.
- Drumheller, Sidney Y. *Handbook of Curriculum Design For Individualized Instruction*. Englewood Cliffs, N.J. : Educational Technology Publishing, Inc. ,1971.
- Edward, M.D. and Leona L. Tyler. "Intelligence, Creativity, and Achievement in a Noneselective Public Junior High School". *Journal of Educational Psychology*, 1965, 56, 96-99.
- Getzels, J.W. and Jackson, P.W. *Creativity and Intelligence*, New York : Wiley, 1961.
- Gibbs, Jack R. "Managing for Creativity in the Organization", in *Climate for Creativity*, ed. Calvin Taylor, New York : Pergamon Press, 1972.
- Gorman, Richard M. *The Psychology of Classroom Learning*. Columbus, Ohio : Charles E. Merrill Publishing Company, 1974.
- Harmin, Merrill, et. al. *Clarifying Values Through Subject Matter*. Minneapolis : Winston Press, Inc., 1973.
- Hess, Robert D. "The Latent Resources of the Child's Mind", *Journal of Research in Science Teaching*, 1, Issue I (1963) : 21.
- Hoover, Kenneth H. *Learning and Teaching in the Secondary School*. Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1968.



Drs. Said M. Idrus – Direktur Sekolah Swasta sedang memberikan pengarahan pada Rakerda YPLP – PGRI Sumsel, didampingi oleh M. Soeri – Ketua YPLP – PGRI Sumsel dan Drs. Hasan Ibrahim – Wk. Ketua PD – PGRI Sumatera Selatan.

TUTWURI HANDAYANI

Suatu Pendekatan Sosiokultural dalam Proses Belajar-mengajar.

Ki Soeratman lahir di Bandung pada tahun 1923, adalah Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa, anggota Komisi IX DPR - RI, anggota Pengurus Besar PGRI, Ketua Musyawarah Perguruan Swasta, anggota Majelis Pembimbing Nasional Pramuka, anggota Dewan Film Indonesia, anggota Dewan Kebijaksanaan Sekretariat Pewayangan Indonesia, dosen Sarjana Wiyata, dosen Akademi Senitari Indonesia. Pernah menjadi anggota Kwartir Besar Pandu Rakyat, anggota Kwartir Besar Kepanduan Bangsa Indonesia, Ketua Lembaga Kesenian Irama Citra. Sebelumnya, setelah menamatkan pendidikan di Taman Guru Taman Siswa (1943), menjadi pamong Taman Siswa (1943 - 1950), anggota Majelis Luhur Taman Siswa (1950 - 1955), Ketua Bagian Pendidikan Majelis Luhur Taman Siswa (1965 - 1975), dan Wakil Ketua Komisi IX DPR - RI (1971 - 1977).



Ki Soeratman

PENDAHULUAN

Setiap sesuatu yang hadir di dunia ini memiliki ciri-ciri khasnya yang membedakan dirinya dengan sesuatu yang lain. Ciri khas sebagai suatu identitas masing-masing, pernah terjadi bahwa berbagai kelembagaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menciptakan lambangnya sendiri-sendiri yang berbeda-beda.

Guna menyeragamkan kesemuanya itu, maka dengan Surat Keputusan Menteri P dan K No. 0398/M/1977, tanggal 6 September 77 telah ditetapkan satu lambang Departemen P dan K, yang berlaku bagi seluruh lembaga-lembaga di lingkungannya dengan mengecualikan lambang-lambang lembaga pendidikan tinggi dan institut.

Dalam lambang Departemen P dan K itu terdapat sebuah adagium *Tutwuri handayani*, yang telah banyak kita kenal sebagai bersumber dari Tamansiswa dan yang juga melambangkan suatu "sistem pendidikan". Dalam uraian tentang lambang Departemen P dan K itu dikemukakan antara lain sebagai berikut : "Semboyan *Tutwuri handayani* digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya".

Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional dan perguruan Tamansiswa telah menciptakan suatu sistem nasional bagi bangsanya, berdasarkan garis hidup dan kebudayaan bangsanya. Lahirnya

pendidikan nasional merupakan reaksi positif terhadap pendidikan kolonial yang berlaku pada waktu itu dengan kultur asing yang melandasinya.

Dalam rangka pelaksanaan sistem pendidikan Ki Hajar itu, cara penyajian pendidikannya disebut metode among, yang menurut berlakunya dapat juga disebut metode *Tutwuri Handayani*. Dengan penyebutan *tutwuri handayani* itu sudah dikandung di dalamnya suatu proses belajar-mengajar tertentu dan juga memiliki ciri khas tersendiri. Dianutnya prinsip *tutwuri handayani* menuntut pula perwujudannya dalam penyusunan kurikulum pendidikannya.

MAKNA DAN FUNGSI LAMBANG

Dalam kehidupan manusia lambang sering merupakan sarana untuk mendorong berbagai kegiatannya dan karenanya juga mempunyai peranan penting. Lambang hakikatnya merupakan visualisasi idea-idea yang terkandung dalam cita-cita lembaga pemilikinya. Oleh karena itu, lambang Departemen P dan K, selain merupakan visualisasi identitasnya, juga merupakan visualisasi tugas pokok Departemen P dan K itu sendiri. Oleh karena itu, lambang itu juga dapat berfungsi sebagai salah satu sarana kerja, yang dapat mendukung pembinaan korps dan motivasi kepegawaian.

Penggunaan semboyan pendidikan *Tutwuri handayani* dalam lambang Departemen P dan K itu sudah tentu maksudnya agar setiap petugas dan pelaku pendidikan, di mana pun mereka bertugas, dalam melakukan tugasnya selalu dijiwai oleh jiwa *tutwuri handayani*. Ini berarti bahwa di sekolah setiap guru-pendidik diharapkan akan selalu bersikap among atau bersikap *tutwuri handayani* terhadap anak-didiknya. Demikian pula

mereka yang bertugas di bidang nonedukatif, yang lingkungan kerjanya di perkantoran, diharapkan dapat bersikap among terhadap sesamanya.

Inilah makna hakiki yang tersirat dalam suatu lambang bagi segenap pemilik lambang itu. Dari lambangnya itu diharapkan akan didapat kekuatan dan dorongan guna bekerja lebih baik dalam mengejar cita-citanya.



URAIAN LAMBANG DEPARTEMEN P DAN K

Untuk melengkapi gambaran dan pengertian lengkap lambang Departemen P dan K itu, perlu kiranya dikutip penjelasan lambang itu berdasarkan SK Menteri P dan K No. 0398/M/1977 sebagai berikut :

1. *Belacok menyala bermotif garuda*

Belacok (menyala) merupakan lampu khusus dipergunakan pada pertunjukan wayang kulit. Cahaya belacok membuat pertunjukan menjadi hidup.

Burung garuda (yang menjadi motif belacok) memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mandiri mengarungi angkasa luas.

Ekor dan sayap garuda digambarkan masing-masing lima, yang berarti satunya kata dengan perbuatan Pancasila.

2. *Buku*

Buku merupakan sumber bagi segala ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

3. *Bidang segi lima (biru muda)*

Menggambarkan alam kehidupan Pancasila.

4. *Semboyan Tutwuri Handayani*

Digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Pencantuman semboyan ini berarti melengkapi penghargaan dan penghormatan kita terhadap almarhum Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya telah dijadikan Hari Pendidikan Nasional.

5. *Warna*

Warna putih pada ekor dan sayap garuda dan buku berarti suci, bersih tanpa pamrih.

Warna kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian.

Warna biru muda pada bidang segi lima berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam (pandangan hidup Pancasila).

Dengan demikian, kita telah dapat menangkap gambar secara fisik lambang Departemen P dan K itu, dan yang kita utamakan ialah mengenal lebih mendalam tentang makna dan arti *tutwuri handayani* agar kita dapat menghayatinya secara lebih baik untuk dapat melaksanakan segala tugas kita dengan jiwa yang tersimpan dalam semboyan itu.

Agar kita dapat menangkap lebih tepat makna dan arti semboyan itu, sebaiknya kita gali dari sumbernya, yaitu berbagai tulisan Ki Hajar Dewantara dan beberapa dokumen dari kalangan Tamansiswa.

MELACAK SUMBER TUTWURI HANDAYANI

Menurut statuta Perguruan Tamansiswa, tentang sistem pendidikannya dinyatakan sebagai berikut.

Pendidikan Tamansiswa dilaksanakan menurut *sistem among*, yaitu sistem yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan dua dasar :

- Kodrat alam, sebagai syarat untuk mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya;
- kemerdekaan, sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka.

Sistem tersebut menurut berlakunya juga disebut sistem *Tutwuri Handayani*.

Dalam pernyataan itu ada tiga hal yang perlu ditelusuri maknanya, yaitu kekeluargaan, kodrat alam, dan kemerdekaan. Sudah barang tentu karena kita membicarakannya dalam kaitannya dengan masalah pendidikan, dan pendidikan adalah permasalahan manusia dalam segala proses kehidupannya, maka ketiga masalah itu pun dikaitkan langsung dengan manusia itu sendiri.

Menurut sistem *Tutwuri Handayani*, setiap pamong Tamansiswa, sebagai pemimpin dalam proses belajar-mengajar, wajib melaksanakan :

- a. *tutwuri handayani*,
- b. *ing madyo mangun karso*,
- c. *ing ngarso sung tulodo*.

Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa *tutwuri handayani* adalah sikap-laku pendidik, yang berjiwa kekeluargaan dan, dilandasi dasar kodrat alam dan kemerdekaan.

Sumber lainnya dapat kita temukan pada Pernyataan Asas Tamansiswa (*beginsel-verklaring*) sebagai reaksi terhadap sistem pendidikan Hindia Belanda yang memaksakan kultur asing sebagai landasannya sehingga tidak sesuai dengan kodrat anak-anak Indonesia. Tamansiswa menegaskan : "Yang kita pakai sebagai alat pendidikan, yaitu pemeliharaan dengan sebesar perhatian (*toewijdende zorg*) untuk mendapat tumbuhnya hidup anak, lahir dan batin, menurut kodratnya sendiri. Inilah yang kita namakan *Among methode*.

Di sini tampak jelas bahwa kodrat anak Indonesia perlu diperhatikan dalam kita memberikan bimbingan pada pertumbuhan jiwa raganya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak Indonesia ialah menerima perlakuan berdasarkan garis hidup atau kultur bangsanya. Jika tidak demikian, yaitu melandaskan pendidikannya kepada kultur asing, kita bertindak bertentangan dengan kodrat anak tersebut. Dengan memberikan pendidikan yang bertentangan dengan kodrat alam anak, jalannya proses belajar-mengajar pasti akan terhambat, tidak akan berjalan lancar. Dari segi nilai-nilai yang akan diperkembangkan pasti juga akan menyimpang dari nilai-nilai budaya bangsanya. Hal ini tidak mungkin digunakan untuk keperluan membentuk watak dan kepribadian bangsa. Anak-anak akan terasing dari kehidupan bangsanya dan tidak akan peka terhadap segenap aspirasi dan penderitaan rakyatnya. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa dasar kodrat alam digunakan dalam arti edukatif dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar.

Tentang *tutwuri handayani* Ki Hajar Dewantara dalam bukunya *Demokrasi dan Leiderschap* menjelaskan antara lain sebagai berikut :

Bagi saya sendiri yang menginginkan terlaksananya 'demokrasi di bawah pimpinan kebijaksanaan', saya berkewajiban menyesuaikan semboyan-semboyan tersebut dengan cita-cita pendidikan serta sifat organisasinya, yang harus menandai kepribadian bangsa kita. Seperti di-

ketahui pendidikan Tamansiswa bercita-citakan menyongsong berkembangnya jiwa-raga anak-anak secara bebas menuju ke arah adab manusia.

Untuk mencapai cita-cita pendidikan tersebut kita menggunakan semboyan yang amat singkat, namun amat jelas artinya. Semboyan itu berbunyi 'tutwuri handayani'. Tutwuri berarti mengikuti dari belakang, tetapi tidak melepaskan anak didik kita dari pengawasan. 'Berjalan di belakang' berarti memberi kebebasan kepada anak-anak untuk melatih mencari jalan sendiri, sedangkan sebagai pendidik kita wajib memberi koreksi di mana perlu. Misalnya bila anak menghadapi bahaya yang tidak dapat dihindarinya dengan pikiran atau tenaga sendiri. Keberhasilan inilah yang sebenarnya merupakan demokrasi, sedangkan pimpinan yang wajib terus mengawasi tidak lain daripada kebijaksanaan Sang Pamong. Dengan perkataan lain di dalam perkembangan hidup anak-anak harus ada 'demokrasi dan leiderschap'.

Dari uraian Ki Hadjar Dewantara itu sudah dapat kita pahami penerapan asas atau dasar kodrat alam dan kemerdekaan.

JIWA KEKELUARGAAN

Dalam membina hidup keorganisasiannya dan pengaturan hidup kemasyarakatan segenap warganya, Tamansiswa membesarkan organisasinya pada sendi hidup kekeluargaan. Hal ini digali dari sumber hakiki manusia, yaitu sifat kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sikap laku berdasarkan kekeluargaan adalah sikap laku yang manusiawi.

Pandangan seperti itu timbul berdasarkan kenyataan bahwa kehadiran manusia di muka bumi ini dapat ditinjau sebagai individu, tetapi sekaligus juga sebagai bagian dari suatu kolektivum atau warga dari suatu masyarakat. Kehadiran manusia adalah kehadiran bersama, dan kehadiran individu baru akan bermakna jika ia hadir dalam kebersamaan itu. Karena manusia hadir secara bersama-sama, maka perwujudan kemerdekaan setiap individu sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan makhluknya, harus disesuaikan dengan kemerdekaan individu-individu lainnya.

Penyesuaian ini menimbulkan suatu konsekuensi yang berupa kewajiban bersama yang sifatnya juga kodrati dan manusiawi. Dengan demikian, setiap manusia, di samping memiliki hak-hak asasi juga memikul kewajiban-kewajiban asasi manusia. Secara tepat Tamansiswa mencantumkan hal tersebut dalam asas pertamanya sebagai berikut :

"Hak seseorang akan mengatur dirinya sendiri (*zelfbeschikkingsrecht*) dengan mengingat tertibnya persatuan dalam peri kehidupan umum (*saamhorigheid*), itulah asas kita yang pertama. Tertib-damai itulah tujuan kita yang setinggi-tingginya".

Dihubungkan dengan tujuan Tamansiswa itu perlu kiranya dikemukakan bahwa Ki Sutatmo Suryokusumo yang kemudian pernah menjadi presiden pertama Tamansiswa dalam majalah *Weder opbouw* mencantumkan pada halaman kulit majalah tersebut semboyan berikut :

*Schoonheid die Macht regeert;
Macht die Liefde looft;
Wijsheid die Recht doet wedervaren.*

Artinya :

*Keindahan yang membatasi kekuasaan
Kekuasaan yang memuja Cinta kasih
Kebijaksanaan yang membawa keadilan.*

Semboyan ini menggambarkan cita-cita kemasyarakatan yang ingin dicapai, yaitu suatu masyarakat yang tertib damai, yang menjunjung tinggi asas keselarasan dan keseimbangan antar perwujudan kepentingan individu dan kepentingan masyarakatnya. Dalam masyarakat semacam itu didambakan segenap warganya akan mengalami kehidupan yang salam bahagia, aman lahir batin karena kekuasaan harus bersandar kepada keindahan atau tertibnya lahir dan cinta kasih atau keesucian batin. Dalam pada itu kebijaksanaan itulah yang mengandung kebenaran dan keadilan.

Mungkin sekali landasan pikiran semacam inilah yang mengilhami para bapak pendiri republik kita dalam merumuskan demokrasi Indonesia yang kita anut yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Menarik kesimpulan dari berbagai yang telah dikutip di atas, maka dapat diartikan bahwa kekeluargaan hakikatnya adalah kesadaran kebersamaan manusiawi yang terikat oleh kepentingan

bersama yang wajib dijunjung tinggi. Dalam ikatan suatu bangsa, kekeluargaan berwujud solidaritas nasional, yang selalu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Dalam pengertian kekeluargaan tersirat pula kewajiban setiap individu untuk saling menghargai dan hormat-menghormati atas dasar martabat kemanusiaan. Proses belajar-mengajar berdasarkan sistem among yang dijiwai sendi hidup kekeluargaan menempatkan hubungan antara guru-murid dalam kedudukan yang secara manusiawi berkesamaan. Dalam kondisi dan dengan dalih apa pun tidak ada kewenangan guru secara kodrati dan sosial untuk memandang rendah para muridnya.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN

Tutwuri handayani yang menentukan sikap laku guru dalam hubungannya dengan proses belajar-mengajar bertolak dari kenyataan-kenyataan sebagai berikut.

1. Tiap anak mempunyai sifat kodrati berupa perbedaan-perbedaan pribadi.
2. Dalam pertumbuhan jiwa raga anak perlu diikuti tahap-tahap perkembangan sesuai dengan kodrat alamnya.
3. Untuk menumbuhkan segala potensi kodrati sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada anak perlu iklim dan suasana kemerdekaan.
4. Manusia adalah makhluk individu dan sekaligus juga makhluk sosial.
5. Tiap manusia mempunyai hasrat untuk dihargai dan diperlakukan sesuai dengan martabat kemanusiaannya.
6. Untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam hidup bermasyarakat, pelaksanaan hak asasi perlu diperbandingkan dengan perwujudan kewajiban asasi manusia.
7. Bagi suatu bangsa pendidikan merupakan suatu wahana untuk menanamkan nilai-nilai sesuai dengan perkembangan budaya bangsanya yang dinamis.

Berbagai faktor itu membawa akibat diperlukannya sikap laku tertentu dari pihak guru dalam menghadapi murid-muridnya. Pendekatan yang sifatnya menyeluruh (*generalisasi*) terhadap setiap murid tidak akan mengenai sasaran karena kondisi

kualitatif murid tidak sama. Dalam hal ini perlu adanya pendekatan secara individual agar bantuan bimbingan guru sesuai dengan apa yang diperlukan murid tepat pada saatnya dan dalam kadar yang tepat pula. Bantuan yang diberikan terlalu dini menyebabkan anak menjadi manja, sedangkan bantuan yang berlebihan dapat merupakan pemborosan dan mubazir.

Pertumbuhan jiwa raga anak dalam proses perkembangan kepribadiannya secara fisik-biologi dan psikologi mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang sifatnya evolusioner. Ketentuan ini berlaku bagi perkembangan anak yang normal. Sudah barang tentu bagi anak yang abnormal, dalam arti positif atau negatif, dapat juga berlaku penyimpangan dari ketentuan tersebut. Kenyataan ini akan menimbulkan kondisi anak yang berbeda dalam berada pada suatu tahap perkembangannya, dan oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian dan pelayanan yang berbeda-beda pula dari gurunya.

Klim dan suasana kemerdekaan dalam pendidikan adalah keadaan yang memberi kemungkinan perkembangan bebas dari segenap potensi anak tanpa hambatan, setidaknya dengan sekecil mungkin rintangan. Sikap laku guru yang dapat dirasakan sebagai tekanan, atau pemaksaan terhadap murid akan menimbulkan tekanan-tekanan jiwa pada anak dan ini akan menimbulkan tekanan jiwanya. Dalam keadaan tekanan jiwa demikian itu potensi kodrati anak yang perlu ditumbuhkan akan mengalami pelbagai hambatan.

Anak didik sebagai individu perlu mendapat bimbingan dalam usaha peningkatan dirinya secara kualitatif dalam keserasian perkembangan kesadaran sosial dan hidup kemasyarakatannya. Pendekatan berdasarkan prinsip demikian dapat menghindarkan tumbuhnya individualisme pada anak yang selanjutnya diharapkan akan lebih menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Kehadiran manusia juga disertai rasa harga diri, dan inilah yang turut menentukan corak kepribadiannya. Setiap manusia, dalam kondisi bagaimanapun, pada dasarnya menghendaki untuk dihargai, dan diperlakukan sesuai dengan martabat kemanusiannya. Guru berkewajiban menumbuhkan rasa harga diri ini karena itu akan merupakan modal utama dalam mengembangkan kepribadian anak didik.

Demokrasi pada dasarnya tiada lain adalah dapat diwujudkannya secara seimbang dan selaras hak-hak asasi dan kewajiban-kewajiban asasi kemanusiaan. Apapun predikat yang akan diberikan kepada demokrasi itu, tetapi dasarnya adalah keseimbangan terwujudnya hak dan kewajiban itu. Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran itu sedini mungkin pada sanubari anak didik akan sangat membantu perkembangan asas demokrasi dalam masyarakat.

Ki Hadjar Dewantara dalam memberikan batasan terhadap arti pendidikan menegaskan bahwa pendidikan adalah salah satu usaha kebudayaan. Menteri P dan K Daed Joesoef menegaskan pula dalam kebijaksanaannya bahwa pendidikan hakikatnya adalah bagian dari kebudayaan. Dalam kedudukannya yang demikian itu, maka pelestarian nilai-nilai budaya suatu bangsa yang tepat adalah juga melalui pendidikannya.

SIKAP LAKU GURU DAN POSISI MURID DALAM PENDIDIKAN

Kenyataan-kenyataan yang telah diuraikan di depan perlu mendapatkan perhatian dalam proses belajar-mengajar, dalam penyusunan materi pelajaran/kurikulum, metode penyajian, serta penentuan berbagai komponen lainnya. Kesemuanya hendaknya dapat menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan anak didik.

Meskipun tidak terlalu ketat, dalam dunia pendidikan secara teori terdapat berbagai sikap laku yang dapat ditempuh seorang guru. Namun, melalui contoh-contoh yang klasik sikap laku itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam.

Pertama, seorang guru dapat bersikap "otoriter" dengan asumsi bahwa pendidikan itu mampu berbuat segalanya, dan karenanya guru merasa wajib berbuat segalanya atas prakarsa sendiri demi kemajuan anak didiknya.

Sikap kedua, ialah sikap "liberal" atau memanjakan anak karena berpendapat bahwa anak-anak secara kodrati telah memiliki dasar atau potensi masing-masing, dan mereka itu akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Oleh karena itu, guru bersikap menyerahkan sepenuhnya kepada perkembangan yang dipilih oleh anak itu sendiri.

Sikap ketiga, adalah sikap laku among, yang merupakan paduan antara kedua sikap terdahulu. Dengan memperhatikan segala sifat kodrat yang ada pada anak didiknya, dengan penuh kesadaran

bahwa segala potensi tersebut harus dibantu perkembangannya, maka guru bersikap among. Guru memberi kebebasan kepada anak didik sejauh anak mampu memanfaatkan secara efektif kebebasan yang dimilikinya, dan akan memberikan bantuan seperlunya manakala anak memang memerlukan-nya.

Sikap laku guru itu pada dasarnya berkaitan erat dengan pandangannya terhadap posisi anak didik dalam proses pendidikan. Juga dalam hal ini ada 3 pandangan yaitu (1) murid berkedudukan sebagai objek, (2) sebagai subjek atau (3) sebagai subjek dan objek sekaligus. Sudah barang tentu penentuan posisi anak didik dan sikap guru tersebut akan sangat berpengaruh terhadap hasil pendidikan itu sendiri.

Jika kita menghendaki agar hasil pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dicita-citakan, maka kita harus melakukan pilihan terhadap penentuan kedudukan murid dan juga menentukan sikap laku yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk lebih menjelaskan uraian ini, dapat dikemukakan gambaran skematis di bawah ini.

POSISI MURID SEBAGAI	SIKAP LAKU GURU	HASIL YANG DICAPAI
1. Objek	"Otoriter" atau <i>handayani</i>	Anak yang jiwanya tertekan, inisiatif dan kreativitasnya tidak berkembang, dapat di-hinggapi rasa harga diri rendah dan sifat-sifat lain yang negatif.
2. Subjek	"Liberal" atau <i>tutwuri</i>	Anak yang manja, sering <i>over acting</i> , individualis, jiwa so-sialnya kurang berkembang, sombong, angkuh dan sifat-sifat lain yang sejenis.
3. Subjek dan Objek sekaligus	"Among" atau <i>tutwuri handayani</i>	Anak berkembang secara wajar dalam kebebasan, ber-watak dan berkepribadian, penuh inisiatif dan kreatif, mandiri dan sosial serta sifat-sifat lainnya yang sejenis.

Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa ada hubungan antara kedudukan murid, sikap laku guru, dan hasil proses belajar-mengajar. Jadi, pandangan guru akan kedudukan para muridnya, yang kemudian memungkinkan guru itu menentukan pilihan terhadap pendekatan yang akan digunakannya, serta mengatur tingkah lakunya, akan menentukan keberhasilan pendidikan itu.

PENUTUP

Sudah barang tentu studi tentang hakikat *tutwuri handayani* masih dapat dilakukan lebih teliti dan mendalam lagi. Dalam tulisan ini dikemuka-kan beberapa hal serba terbatas, dengan maksud sekedar membangkitkan minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka upaya pem-baharuan sistem pendidikan nasional kita. Namun, dengan uraian sekedarnya ini diharapkan agar setiap jajaran petugas di lingkungan Departemen P dan K, berkesempatan untuk memahami lambang departemennya, untuk selanjutnya mengamalkan isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Sistem among yang semula diciptakan dalam hubungannya dengan proses belajar-meng-ajar itu, hakikatnya akan berlaku pula dalam per-gaulan masyarakat, di mana terjadi hubungan antar manusia. Di situ dapat terjadi sikap laku among, yang dasarnya adalah saling menghargai semua orang sesuai dengan martabat kemanusiaan masing-masing.

TAHUKAH ANDA ?

1. Bahwa Kongres PGRI ke XV akan diselengga-rakan di Jakarta dari tanggal 11 s/d 16 Juli 1984 yang akan datang.
2. Bahwa utusan ke Kongres tersebut adalah 4 orang utusan Pengurus Daerah dan 2 orang utusan Cabang dengan peninjau maksimum 1 orang, dengan demikian jumlah peserta di-perkirakan 1.100 orang dengan perincian sebagai beriku t :

Cabang	=	300 x 3	=	900 orang
PD	=	26 x 5	=	130 orang
PB	=	1 x 25	=	25 orang
				1.055 orang
Undangan/peninjau	=			45 orang
				1.100 orang
3. Bahwa biaya utusan perorang adalah : Rp 105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah) yang sudah dapat mulai disetor ke BRI, Jalan Tanah Abang Tiga No. 4 Jakarta Pusat; Nomor rekening PB – PGRI : 31460706.
4. Bahwa untuk keperluan Kongres tersebut supaya Cabang/Pengurus Daerah Segera mengadakan Konperda/Konpercab dan menyi-apkan laporan daerah untuk disampaikan kepada PB - PGRI sebagai persiapan untuk Laporan ke Kongres ke XV tersebut.

S A M B U T A N
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PADA PENATARAN BAGI PENGAWAS TENTANG ASIMILASI
DI BIDANG PENDIDIKAN

TANGGAL 22 AGUSTUS 1983

Hadirin yang saya hormati,

Pembauran pendidikan adalah suatu gerakan yang merupakan salah satu sub sistem pendidikan nasional dalam rangka perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang dicita-citakan oleh Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 akan lebih cepat terwujud apabila hal itu dilakukan dengan sistematis melalui pengorganisasian mental ideologis yang diwadahkan dalam jalur pendidikan.

Sekolah sebagai salah satu institusi pembentukan manusia Indonesia seutuhnya benar-benar sangat diharapkan peranannya, sehingga pembauran pendidikan akan dapat menjadi alat perwujudan pembauran bangsa dan sekaligus merupakan mekanisme pembentukan manusia Indonesia seutuhnya seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan falsafah negara Pancasila.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari manusia yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Perbedaan ini bisa berdasarkan suku, tingkat ekonomi, tempat pemukiman, pendidikan, agama, budaya, bahkan mungkin juga ciri-ciri fisik. Namun demikian kita menyadari, bahwa semua anak-anak warga negara Indonesia, baik mereka yang berasal dari keturunan asing maupun anak-anak yang bukan berasal dari keturunan asing, harus sepenuhnya mendapat pendidikan nasional sesuai dengan pasal 31 dan 32 UUD 1945. Mereka ini perlu mendapat perhatian dalam jalur-jalur pembinaan yang sama terutama melalui sekolah, agar mereka dapat bersama-sama meresapi nilai-nilai hidup dan kebudayaan Bangsa Indonesia serta falsafah dan moral Pancasila yang menjadi landasan pembinaan kesatuan bangsa.

Sejak masa perjuangan kemerdekaan telah timbul kesadaran yang makin lama makin besar, bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar dan kuat apabila kita mampu membina dan mengembangkan persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara ini



Prof. Darji Darmodiharjo, SH

dengan segala keanekaragamannya, baik ditinjau dari segi kesukuan, kedaerahan, agama, cita-cita politik maupun asal keturunan.

Apa yang akhirnya tersurat dan tersirat di dalam Pembukaan UUD 1945 kiranya merupakan kristalisasi dari kesadaran tersebut, sehingga kita semua dan masing-masing pada dasarnya mempunyai kewajiban konstitusional dan moral untuk ikut serta dalam proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan fungsi dan posisi masing-masing dalam masyarakat. Kiranya kita tidak perlu menutup mata terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dan kita hadapi dalam masalah ini, bahkan sebaliknya sangat diperlukan sikap yang terbuka, sehingga kita mampu melihat masalahnya secara lebih jernih dalam usaha mencari dan menemukan jalan dan/atau cara-cara pendekatan yang sesuai dengan usaha tersebut menjadi lebih berdayaguna. Dalam hubungan ini kita melihat, bahwa proses integrasi nasional tidak selalu berjalan lancar, antara lain terbukti masih sering timbulnya benturan-benturan sosial dalam perjalanan sejarah negara kita, yang apabila ditelusuri bermotifkan salah satu atau kombinasi dari faktor-faktor perbedaan yang secara potensial memang bersifat disintegratif seperti kesukuan, agama, maupun asal keturunan.

Sebagaimana kita pada umumnya mengetahui, bahwa usaha-usaha untuk mengatasi masalah pembauran antara golongan Warga Negara asli dan Warga Negara keturunan asing, telah banyak dilakukan melalui berbagai kegiatan dan saluran, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Dan apabila sejauh ini usaha-usaha tersebut, belum

sepenuhnya berhasil kiranya dapat dimengerti, mengingat sifat permasalahannya yang cukup kompleks, karena secara langsung menyangkut sikap pandangan dan perilaku manusia. Mengubah sesuatu sikap dan pandangan yang telah terbentuk dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang, tentu memerlukan waktu yang cukup lama pula lebih-lebih dalam suasana demokrasi, sesuai dengan falsafah Pancasila kita, proses itu harus berjalan wajar tanpa unsur-unsur paksaan yang memperkosa hak-hak kemanusiaan setiap anggota masyarakat, baik yang asli maupun yang keturunan asing.

Di sini kita melihat, bahwa pendekatan melalui bidang Pendidikan, merupakan salah satu cara pendekatan yang efektif karena berbagai alasan, tetapi yang paling menonjol ialah bahwa masalah pembinaan kesatuan bangsa pada dasarnya, merupakan masalah menumbuhkan, membina dan mengembangkan suatu sikap mental tertentu. Masalah ini pada tempat pertama adalah masalah pendidikan dan oleh karena itu adalah sangat wajar apabila bidang pendidikan diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam proses pembauran dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi hal ini tidak dapat diartikan bahwa pendekatan pendidikan, merupakan satu-satunya jalan yang harus ditempuh, lebih-lebih apabila pendidikan hanya diartikan pendidikan formal saja.

Keberhasilan usaha ini banyak dipengaruhi pula oleh iklim dalam kehidupan kemasyarakatan secara keseluruhan yang perlu diciptakan secara sadar melalui berbagai jalan dan kebijaksanaan.

Sebagai tindak lanjut dari program pembauran pendidikan telah ditentukan oleh suatu sistem pendidikan nasional, yang antara lain bermaksud mendorong kelancaran proses pembauran dengan cara :

- a. Mengadakan pemisahan yang tegas antara pendidikan asing dan pendidikan nasional dengan maksud, agar anak didik Indonesia, terutama dalam tahun-tahun pembentukan jiwanya, sepenuhnya memperoleh pendidikan nasional.
- b. Adanya ketentuan bahwa pendidikan asing, hanya diizinkan bagi anak didik asing *penduduk sementara*, sedangkan anak didik Indonesia, bahkan anak-anak asing *penduduk tetap* Indonesia harus memperoleh pendidikan

nasional.

Berlandaskan pokok pikiran di atas timbullah keharusan-keharusan lainnya, yaitu antara lain :

- a. Menganggap semua lembaga pendidikan nasional di Indonesia sebagai satu sistem pendidikan, yang harus mengikuti pola yang sama, dan terbuka bagi semua anak didik Indonesia dari golongan apapun.
 - b. Bahwa antara sekolah negeri dan swasta tidak ada perbedaan lagi yang prinsipil, karena kedua macam sekolah itu sama-sama menjalankan fungsi pendidikan nasional.
 - c. Pikiran dasar itu sesungguhnya mendorong terjadinya pembauran secara alamiah melalui kontak sosial dan ("interchange of values") antara segenap anak didik dari golongan masyarakat manapun mereka berada di bangku sekolah.
 - d. Sifat-sifat kekhususan yang masih diperbolehkan melekat pada lembaga-lembaga pendidikan swasta tidak boleh menjurus kepada eksklusivisme, tetapi harus ikut aktif dalam menanamkan toleransi dan tanggung jawab sosial pada semua anak didiknya, sesuai dengan prinsip "Bhinneka Tunggal Ika". Saling bertukaran nilai.
 - e. Dalam mendirikan sekolah-sekolah baru perlu dipikirkan pemilihan lokasi yang tepat yang memungkinkan penampungan murid dari semua golongan etnis bertempat tinggal di lingkungan sekolah itu.
- Dalam kaitannya dengan pembauran pendidikan, juga berdasarkan pengamatan sehari-hari menunjukkan bahwa dalam pembauran pendidikan paling sedikit terdapat 4 komponen masyarakat yang menjadi penentu terhadap berhasil atau tidaknya proses pembauran, yaitu : Guru, anak didik, keluarga (Orang tua) dan Masyarakat. Keempat komponen itu saling menentukan cepat atau lambatnya proses interaksi secara wajar dan alamiah, menuju pembauran yang ideal. Ini berarti, bahwa berhasilnya anak didik dalam pembauran fisik dan mental (budaya) sangat tergantung dari interaksi antara guru, orang tua dan masyarakat yang saling menunjang. Guru mempunyai peranan dalam sekolah dan orang tua serta masyarakat menentukan corak yang akan mewarnai kehidupan masyarakat yang

menjadi lingkungan hidup anak didik tersebut.

Tingkah laku guru, orang tua dan masyarakat itu akhirnya menentukan sikap anak didik. Jika sikap guru, orang tua, dan masyarakat menunjukkan citra pembauran yang ideal, maka anak didikpun akan mengikutinya. Sebaliknya jika sikap guru, orang tua dan masyarakat cenderung menunjukkan sifat eksklusif, maka anak didikpun cenderung bersikap demikian, oleh karena itu tingkah laku komponen-komponen masyarakat tersebut menjadi sasaran utama penggarapan, karena tidak mustahil perilaku komponen-komponen itu dapat mempunyai motif-motif tertentu yang memungkinkan mempunyai akibat jauh.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa berhasilnya pelaksanaan pembauran pendidikan, bukanlah menjadi tugas sekolah saja akan tetapi merupakan tugas bersama antara sekolah, keluarga dan masyarakat dengan bimbingan dan pengarahan dari Pemerintah.

Menumbuhkan sikap cinta kepada Tanah Air, Bangsa dan Negara dari anak-anak didik yang berasal dari suku/keturunan yang berbeda, sungguh merupakan tugas kita bersama.

Sekalipun berhasilnya pembauran pendidikan tidak saja tercantum dari sekolah formal, namun peranan guru tetap menentukan karena anatara lain :

- a. Guru tetap menjadi "figur" yang di "gugu" dan di "tiru", yakni menjadi panutan.
- b. Guru ikut menentukan berhasil atau tidaknya seseorang anak untuk mendapat kemajuan intelektual dan pembentukan wataknya.
- c. Guru dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku anak didik dalam menuju kedewasaan. Oleh karena itulah dalam proses mengajar di sekolah, seorang guru harus menunjukkan sikap yang mendidik pembauran dan tidak menimbulkan benih-benih perpecahan, maupun pengkotakan ethnias rasial terhadap anak didik di kelas maupun di sekolah baik yang bersifat administratif maupun yang rasialistis.

Dengan demikian jelaslah betapa besarnya peranan-peranan guru/pendidik dalam meningkatkan pembinaan rasa persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungan anak didik pada sekolah formal, sekalipun hal itu masih dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan yang lain, baik keluarga maupun masyarakat. Karenanya pembauran pen-

didikan harus pula diikuti bersama-sama dengan pembauran di bidang-bidang lain.

Selain permasalahan tentang peranan pendidikan di sekolah formal di atas, juga komposisi anak didik di kelas masih merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan secara tuntas. Komposisi murid yang dipaksakan ternyata tidak seluruhnya berhasil, karena menyangkut kebebasan orang tua memilih sekolah yang dianggap baik dan kaitan antara lokasi sekolah dengan domisili murid.

Sarana bagi berhasilnya pembauran pendidikan yang paling penting adalah pelaksanaan kurikulum nasional di semua tingkat sekolah dan tersedianya guru/pendidik yang mempunyai sikap mental pembauran sebagai salah satu wujud sikap mental Pancasila yang dicerminkan dalam pola sikap dan tingkah laku sehari-hari di sekolah maupun di masyarakat.

Hadirin yang saya hormati,

Sudah kita maklumi bahwa anak-anak warga negara Indonesia, dari manapun mereka berasal harus sepenuhnya mendapatkan pendidikan nasional. Dalam hubungan ini maka anak-anak warga negara Indonesia keturunan asing perlu mendapat perhatian dalam pembinaannya yang sama dengan anak-anak warga negara yang bukan keturunan asing agar mereka dapat bersama-sama meresapi nilai-nilai hidup dan kebudayaan bangsa Indonesia, serta bersama-sama menghayati falsafah dan moral Pancasila sebagai landasan pembinaan kesatuan bangsa.

Sejalan dengan rencana pengembangan program pelaksanaan pembauran di bidang pendidikan untuk mencapai apa yang saya utarakan tadi, dirasa perlu akan pemahaman kembali tentang produk-produk hukum maupun petunjuk-petunjuk pelaksanaan sebagai peningkatan program tersebut, yang belum semuanya diketahui dan dihayati, terutama oleh para Pejabat dan Petugas yang langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab atas terlaksananya program yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai pula dengan keputusan Menteri P dan K No. 044/P/1975 tentang pembentukan Team Pembantu Pelaksanaan Asimilasi di Bidang Pendidikan dan Pengaturan Pendidikan Asing di Indonesia, di mana pada diktum : KEENAM, disebutkan bahwa untuk kelancaran tugas-tugasnya :

”Team diberi wewenang untuk mengadakan hubungan langsung dengan Lembaga-lembaga Negara, dan Instansi-instansi baik di dalam maupun di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di Pusat maupun di Daerah”.

Selanjutnya dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 1975 Nomor 060a/P/1975 tentang Penunjukan Gubernur Kepala Daerah Tk. I sebagai Penanggung jawab Pengendalian Pelaksanaan Asimilasi di Bidang Pendidikan di Daerah, pada diktum ”PERTAMA”, disebut sebagai berikut :

Menunjuk Gubernur Kepala Daerah Tk I. sebagai Penanggung jawab Pengendalian Pelaksanaan Asimilasi di Bidang Pendidikan di Daerah.

1. Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab dalam segi teknis edukatif dan teknis administratif pelaksanaan asimilasi di bidang pendidikan dan seterusnya.

Sebagaimana kita ketahui sampai saat ini kegiatan asimilasi di bidang pendidikan tidak ditangani secara institusional, dalam arti belum adanya suatu pola hubungan struktural dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga masih tampak adanya sikap yang ”kurang melembaga” dari sebagian Pejabat/Pengusaha kita baik di Pusat maupun Daerah terhadap problem asimilasi, sehingga untuk jenis tugas dan tanggung jawab ini, diperlukan langkah informatip yang agak istimewa. Di samping itu dirasakan pula bahwa frekuensi kunjungan ke sekolah-sekolah asimilasi yang sebagian besar merupakan Sekolah Swasta masih belum intensif dilakukan baik oleh Pengawas sebagaimana yang ditentukan oleh SK. Menteri P dan K No. 0222h/O/1980, maupun Petugas lainnya secara rutin.

Masalah ini baru dirasa hangat apabila telah terjadi gesekan-gesekan ataupun kerusuhan rasial lainnya seperti yang terjadi di Jawa Tengah pada tahun 1980 yang lalu.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka oleh Team Asimilasi Pendidikan dikandung maksud agar di antara Pengawas yang ada di

Kantor Wilayah, di samping tugas pokoknya, ”ditugasi” pula sebagai ”Pengawas yang juga memahami problem-problem konseptual dari sekolah-sekolah Asimilasi”.

Hal ini dirasa tepat untuk ditempuh mengingat bahwa :

1. Para Pengawas merupakan petugas lapangan yang langsung dapat melihat, menilai, merasakan, dan mengawasi sampai sejauh mana program asimilasi telah dilaksanakan di sekolah tersebut dan selanjutnya mengadakan pembinaan seperlunya.
2. Untuk kepentingan pengumpulan data, informasi yang akan diberikan oleh para Pengawas sebagai petugas lapangan akan sangat mendekati keadaan sebenarnya.
3. Untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan serta untuk konsultasi rencana program yang akan datang, para Pengawas merupakan nara-sumber (”resource person”) yang tepat karena lebih menghayati program-program mana yang perlu dan mana yang masih harus disempurnakan.

Untuk itulah maka Proyek Asimilasi di Bidang Pendidikan dan Pengaturan Pendidikan Asing di Indonesia mulai hari ini mengadakan semacam Penataran bagi para Pengawas yang oleh Kepala Kantor Wilayah ditunjuk untuk penanganan masalah Sekolah pembauran, guna diberikan pengetahuan dan latar belakang problematik asimilasi pendidikan, sehingga diharapkan para Pengawas tersebut dapat benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan dari Pemerintah dalam melakukan policy ini.

Pada gilirannya, para Pengawas ini kelak akan dapat bertindak sebagai penatar lokal bagi para Penilik yang akan menjalankan fungsi yang sama terhadap Sekolah-sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak pembauran, sehingga akan tercapai sekaligus diseminasi penataran tentang asimilasi secara vertikal.

Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut menyumbangkan tenaga dan pikirannya sehingga memungkinkan penataran ini dapat diselenggarakan, ingin saya sampaikan rasa penghargaan dan terima kasih.

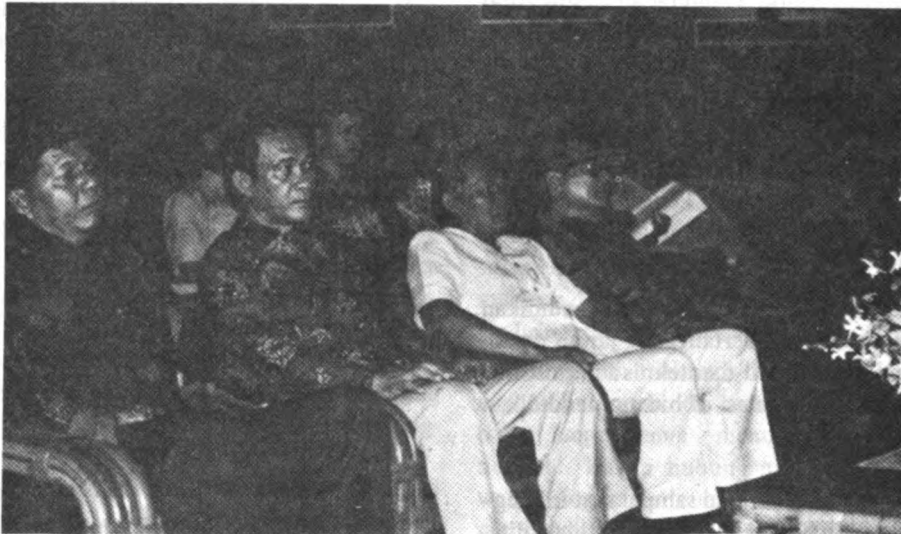
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita ini.

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang PENATARAN BAGI PENGAWAS TENTANG ASIMILASI DI BIDANG PENDIDIKAN Pada hari ini Senin tanggal 22 Agustus 1983, saya nyatakan resmi dibuka.

Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah,
ttd.

Prof. Darji Darmodiharjo, S.H.

NIP. : 130676351



Suasana Pembukaan Latihan Kepemimpinan PGRI. Dari kiri : Drs. M. Yunus Akbar, PB – PGRI Drs. W.D.F. Rindorindo, Sekjen PB – PGRI, H. Basyuni Suriandiharjo, Ketua Umum PB – PGRI, dst.



Drs. Is Riwidikdo, saat menyampaikan ceramahnya pada Latihan Kepemimpinan PGRI.

MENYAMBUT KONGRES BAHASA INDONESIA KE - IV

Oleh : Drs. H. Gazali Dunia



Kongres Bahasa Indonesia ke IV akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 21 s/d 26 November 1983 yang akan datang. Kongres Bahasa Indonesia ke I diadakan di Solo tahun 1938, Kongres yang ke II diadakan pada tahun 1954 di Medan dan Kongres Bahasa Indonesia ke III diadakan di Jakarta pada tahun 1978.

Bahasa yang mempunyai latarbelakang sejarah yang amat panjang dan punya pengaruh yang sangat luas, telah dipakai bangsa kita semenjak berabad-abad yang silam, semenjak zaman kerajaan Sriwijaya, di ribuan pulau Nusantara, pada tanggal 28 Oktober 1928 telah diakui dan dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan Indonesia.

Dan pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan, bahasa Indonesia telah siap untuk dipakai sebagai bahasa budaya di segala lapangan politik, lapangan ekonomi, lapangan pendidikan dan pengajaran, lapangan sosial dan budaya, dan lain-lain yang mampu mempersatupadukan serba macam komunikasi penduduk di kepulauan Indonesia yang terdiri atas 13.000 pulau dengan bahasa daerahnya lebih dari 400 dialek, yang antara satu dengan yang lain sangat berbeda. Gambarkanlah, betapa sukarnya kita berkomunikasi, bertukar pikiran, berdiskusi, berseminar dan berkongres, beradministrasi, dan sebagainya, seandainya kita tidak memiliki bahasa kesatuan, bahasa Indonesia, yang mampu mempersatupadukan seluruh bangsa kita dari Sabang sampai ke Irian.

Secara yuridis, Bahasa Indonesia telah dikukuhkan melalui Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, pasal 36, yang menyatakan Bahasa Indonesia adalah bahasa Negara !

Bahasa, sebagai manifestasi lahiriah pikiran manusia, tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan pikiran manusia yang memperlihatkan dirinya dalam segala aspek kebudayaan manusia. Dalam a abad ke XX, abad yang ditandai dengan serba alat modern yang serba mekanis dan elektronis, serba kilat, serba cepat, bahasa Indonesia harus mampu menjawab

tantangan-tantangan ini. Dengan perkataan lain, bahasa Indonesia harus mampu menjadi bahasa modern !

Untuk modernisasi bahasa perlu pembinaan yang terus menerus, perlu program yang teliti dan terarah, sehingga bahasa Indonesia ini tetap tumbuh dan berkembang dengan segala gerak lincahnya, sebagai bahasa modern yang hidup harmonis dan komunikatif. Kalau bahasa ini tidak dibina terus-menerus, laksana pohon tanpa pemeliharaan dan pupuk, bahasa itu akan jadi bahasa kerdil, kaku, dan akan kehilangan identitasnya sebagai bahasa kesatuan kebangsaan !

Ah, alangkah malang nasib kita jika bahasa ini jadi kacau balau, jadi ideologi-ideologi yang secara langsung-tak-langsung menghancurkan kesatuan komunikasi kebudayaan kita sebagai satu bangsa, satu nusa dan satu bahasa !

Karena itulah, setiap putra Indonesia, setiap individu, di lapangan manapun ia berdiri dan berada, ditagih dan dituntut ikut berdiri di garis depan untuk menyelamatkan bahasa ini, lisan dan tulisan di segala bidang dan lapangan, di segala situasi dan kondisi !

Marilah kita sambut Kongres Bahasa Indonesia ke IV ini dengan penuh kesadaran bahwa keselamatan bahasa kebangsaan kita amat besar maknanya bagi berhasilnya pembangunan bangsa kita. Bahasa yang kacau dan rusak dapat merusak komunikasi pikiran antara kita sesama kita, antara pemerintah dan rakyat, yang kelak menimbulkan gangguan-gangguan dan keresahan dalam masyarakat !

PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

CERAMAH PADA LATIHAN KEPEMIMPINAN PGRI

Tanggal 23 – 29 Agustus 1983, di Jakarta

MEMANTAPKAN PEMASYARAKATAN PANCASILA DAN UUD 1945

Oleh : Prof. Padmo Wahjono, S.H.

BP - 7 Pusat

I. Pendahuluan

Pancasila sebagai falsafah dasar negara dan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara, merupakan fundamen utama di dalam bernegara dan bermasyarakat di Indonesia sejak 17 Agustus 1945.

UUD 1945 sendiri pada hakekatnya, selain memuat Pancasila di dalam Pembukaannya, maka bagian pasal-pasalannya merupakan penjabaran atau penciptaan lebih lanjut daripada Pancasila, agar dapat dioperasionalkan dalam hidup bernegara dan bermasyarakat.

Oleh karena itu kedua fundamen utama tersebut haruslah difahami oleh seluruh anggota masyarakat Indonesia, atau warga negara Republik Indonesia, jadi harus dimasyarakatkan.

Dengan demikian sebagai jalur utama di dalam memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945 ialah penjabarannya ke dalam peraturan perundang-undangan, kemudian melaksanakannya dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun ketentuan pelaksanaan, agar dengan demikian dapat direalisasi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang telah ditunjukkan dasar-dasar maupun pedoman materinya di dalam Pancasila dan UUD 1945. Penjabaran ini dengan demikian merupakan kegiatan utama, namun jelas pula bahwa penjabaran ini baik yang berupa penguangan di dalam ketentuan perundang-undangan maupun pelaksanaannya dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan, serta kesediaan daripada masyarakat luas untuk mentaati serta menerima kebijaksanaan tersebut, tergantung pada manusia-manusia Indonesia.

Dengan demikian justru sikap perilaku tindak-tanduk dari manusia-manusia Indonesia ini yang kemudian menjadi dominan dalam hal memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam hubungan inilah kita memerlukan *pemantapan*, pemasyarakatan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945, di dalam Penjelasannya telah mengemukakan pula perlunya hal ini dengan rumusan :

”Yang sangat penting dalam pemerintahan dan hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan dan seterusnya”.

Hal ini lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR/II/1978, Ekaprasetia Pancasila. Sehingga dengan memasyarakatkan P-4 pada hakekatnya kita memantapkan pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945.

II. Komponen-komponen yang perlu dimantapkan

Di dalam rangka memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945, perlu diketahui apakah yang merupakan komponen pemasyarakatan agar dapat dimantapkan maupun ditingkatkan.

Komponen-komponen tersebut ialah antara lain : program, metoda dan materi, di samping fasilitas dan hal-hal yang bersifat penunjang.

1. Program pemasyarakatan

Dalam hubungannya dengan program, maka kita harus memperhatikan jalur pemasyarakatan yang digunakan.

Jalur-jalur tersebut ialah :

- a. jalur pendidikan yang dapat diperinci dalam :
 - jalur keluarga ; (pendidikan informal)
 - jalur sekolah ; (pendidikan formal)
 - jalur lingkungan ; (pendidikan non-formal).
- b. jalur media massa yang dapat berupa :
 - media komunikasi modern; dan
 - media tradisional.
- c. jalur organisasi sosial politik.

Dalam hubungannya dengan jalur-jalur tersebut maka program-program yang ada ialah :

- dalam jalur keluarga ; pola-pola pembinaan kehidupan keluarga yang membentuk insan Pancasila (cerdas-tangkas, kesenian, dan sebagainya).
- dalam jalur sekolah : program pendidikan moral Pancasila program mata kuliah dasar umum : Pancasila.
- dalam jalur lingkungan : program *pendidikan luar sekolah* meliputi, antara lain : Program ke pramukaan; program remaja putus sekolah; program karang taruna; program *pendidikan orang dewasa* meliputi, antara lain : program penataran P-4; program permainan simulasi P-4; Program pendidikan modul p-4; program pendidikan P-4, berprogram; dan sebagainya.

2. Metoda pemasyarakatan

Metoda yang dipergunakan dapat khusus untuk suatu macam program dan dapat pula digunakan oleh pelbagai program.

Metoda-metoda tersebut, misalnya :

- metoda ilmiah : diskusi, mengemukakan pendapat secara tertulis (makalah), mengemukakan pendapat secara lisan dengan bimbingan (pendalaman), mengemukakan pendapat secara bebas (pidato), dengan modul dan sebagainya.
- metode permainan : simulasi, cerdas-tangkas dan sebagainya.
- metoda kesenian : seni-suara, seni-tari, seni lukis dan sebagainya.

3. Materi pemasyarakatan

Materi pemasyarakatan dapat meliputi bahan P-4 (TAP/II/MPR/1978), Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara, besarnya bahan pelengkap dan referensinya.

Materi tersebut dapat ditambahkan dalam rangka *penyampaian secara terpadu*, misalnya :

- dipadukan dengan kegiatan pedesaan (Desa pelopor);
- dipadukan dengan kegiatan ilmiah/kampus (OPSPEK);
- dipadukan dengan kegiatan ketenaga kerjaan (Hubungan perburuhan Pancasila);

- dipadukan dengan ke-pegawai negeri-an (KORPRI);
- dipadukan dengan kegiatan umat beragama (Juru penerang);
- dipadukan dengan pembinaan generasi muda (ke-pemudaan);
- dipadukan dengan masalah kependudukan :
 - keluarga berencana (Safari Senyum Terpadu);
 - transmigrasi, dan sebagainya.

III. Pemantapan tenaga yang memasyarakatkan Pancasila

1. Memasyarakatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam arti menjabarkannya dalam ketentuan perundang-undangan, agar dapat "di nikmati" hasilnya oleh masyarakat memerlukan ketrampilan dan ketetapan dalam penjabaran tersebut. Dengan demikian pemantapan tenaga yang akan menjabarkan lebih lanjut ialah membekali mereka dengan gagasan-gagasan dasar yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.

Patokan-patokan daripada gagasan-gagasan dasar tersebut atau Ideologi Pancasila harus benar-benar difahami dan dihayati disertai jiwa pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian kita akan peroleh aparatur penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa.

2. Di dalam hal memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945 dengan mendasarkan atas keinginan rakyat sebagaimana tertuang di dalam TAP/MPR/II/1978, yang harus dilaksanakan oleh Mandataris bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, baik yang dalam bentuk Penataran P-4, maupun yang berbentuk permainan simulasi P-4, maka masalahnya ialah di samping meningkatkan ketrampilan dan pengetahuannya ialah memilih *tenaga yang strategis untuk panutan*.

Di sini trampil dan berpengetahuan saja (best-ten) tidak memadai, perlu diusahakan yang memiliki posisi strategis untuk mantapnya pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945.

Bahwa dalam kedua macam tenaga yang perlu dimantapkan tersebut diperlukan pemahaman dan penghayatan kepemimpinan berdasarkan Pancasila tidak perlu dijelaskan lagi.

IV. Sasaran pemasyarakatan Pancasila

Di dalam rangka pemantapan pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945, maka sasaran pemasyarakatan-pun merupakan masalah yang harus diperhatikan, dalam arti hal ikhwal apa yang berhubungan dengan sasaran/abyek, yang harus diperhatikan.

1. Di dalam rangka pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945, dalam bentuk kegiatan penjabaran dalam peraturan perundang-undangan, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan "yang bersangkutan dengan rakyat" sebagai sasaran/obyek daripada pemasyarakatan, yaitu :

- a. diperhatikannya aspirasi rakyat dengan sikap dasar pengabdian pada masyarakat untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- b. diperhatikan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu :
 - Negara persatuan;
 - Keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
 - Kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan;
 - Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. diperhatikannya tujuan bernegara kita yang meliputi :
 - melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - memajukan kesejahteraan umum;
 - mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Di dalam kegiatan yang berupa Penataran P-4, permainan simulasi P-4 dan lain-lainnya, maka terhadap sasaran pemasyarakatan dipegang prinsip :

- a. dapat menjangkau seluas-luasnya;
- b. dapat dilaksanakan secepat-cepatnya; dan
- c. dengan biaya yang memadai.

Dengan adanya prinsip ini maka terhadap sasaran pemasyarakatan harus dihindari gejala me-rutin, dia harus tetap merupakan suatu gerakan. Dengan demikian terhadap sasaran

ini diperlukan suatu tolok ukur strategis, artinya dalam menjangkau yang seluas-luasnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya harus dapat diteliti orang-orang yang sekiranya nantinya dapat berperan sebagai tenaga yang akan ikut memasyarakatkan lebih lanjut, di samping tenaga-tenaga yang diharapkan akan dapat mendukung kegiatan tersebut.

Jadi sasaran bukanlah sekedar yang ingin ikut dalam pemasyarakatan ini semata-mata, namun perlu suatu telaah strategis.

V. Hasil yang diharapkan dari pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945

Memasyarakatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan dimaksudkan untuk sekedar mengetahui dan memahaminya. Yang diharapkan adalah jelas suatu hasil konkrit yang dapat dinikmati secara spiritual maupun material oleh masyarakat. Untuk itu perlu ada gerakan pembangunan dalam arti :

"memperbaiki suatu hal/keadaan menuju ke yang lebih baik sesuai dengan yang dicita-citakan secara berharap".

Oleh karena itu pembangunan pada hakekatnya adalah suatu hasil pemasyarakatan Pancasila yaitu suatu *pengamalan Pancasila*.

Apabila pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur ini kita anggap sebagai *hasil-berkesinambungan* yang diharapkan dari pemasyarakatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka sesuai dengan pentahapan dalam pembangunan kita memerlukan pula identifikasi dari pada "hasil antara", yang hakekatnya berupa pematangan situasi dan kondisi untuk tahap selanjutnya.

Kegiatan-kegiatan untuk mencapai "hasil-antara" ini pada umumnya berupa penggalangan-penggalangan yang harus diperhatikan di dalam pemantapan pemasyarakatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan dua hal sebagai kriteria untuk menentukan hasil-antara tersebut.

Kedua hal tersebut, ialah :

- a. pentahapan setiap lima tahun atau sesuai dengan PELLITA, misalnya hasil antara yang berupa persiapan tahap tinggal landas, hasil antara berupa tahap tinggal landas, dan sebagainya.

b. pentahapan yang berhubungan dengan "pembentukan" lima tahun tersebut. Yang dimaksudkan di sini ialah pentahapan yang sesuai dengan Mekanisme Kepemimpinan Lima Tahun atau Kalender Ketatanegaraan. Penggalangan-penggalanagn di sini terkait dengan apa yang akan dicapai dalam suatu kurun waktu kegiatan, misalnya Pemilu, pembentukan REPELITA, Pengawasan Penyelenggaraan Negara, dan sebagainya.

c. penggalangan yang berpangkal tolak pada pokok pikiran ketiga yang pengejawantahannya dapat berupa antara lain masalah organisasi kemasyarakatan dan masalah referendum.

d. penggalangan yang berpangkal tolak pada pikiran keempat yang pengejawantahannya dapat berupa antara lain, masalah hubungan Pancasila dan Agama, kerukunan umat beragama, dan sebagainya.

Namun demikian sebagai suatu tolok ukur umum terhadap kedua kriteria tersebut dapat dikemukakan bahwa dasar-dasar penggalangan pada hakekatnya ialah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan.

Misalnya :

- a. penggalangan berpangkal tolak pada ide persatuan yang pengejawantahannya dapat berupa antara lain pada masalah Pancasila sebagai satu-satunya asas politik, sebagai kelanjutan dari pada Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan kita.
- b. penggalangan berpangkal tolak pada pokok pikiran kedua yang pengejawantahannya dapat berupa antara lain masalah pematapan tahap tinggal landas dan masalah-masalah trilogi pembangunan dan pe nerataan.

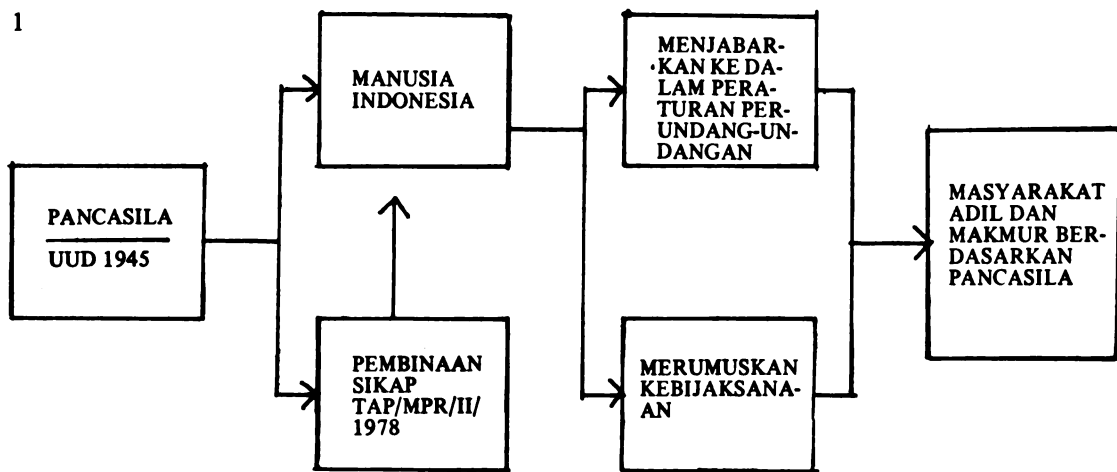
VI. Pendidikan politik etis normatif

Sebagai penutup dapat dikemukakan bahwa pemasyarakatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada umumnya termasuk pemantapannya, pada hakekatnya ialah pemberian suatu pendidikan politik etis normatif kepada masyarakat, sesuai dengan yang diinginkan rakyat sebagaimana tertuang di dalam TAP/MPR/II/1978, serta bahan-bahan kelengkapannya.

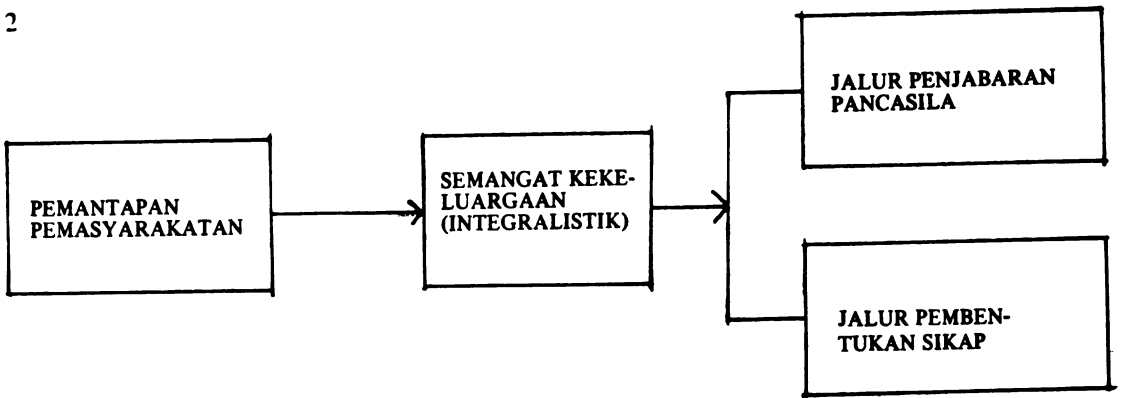
Suatu pendidikan yang menginginkan kita "bergerak" menuju masyarakat yang kita cita-citakan dengan tahap berjalan atas "relnya" Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi suatu pendidikan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan hukum dasar kita.

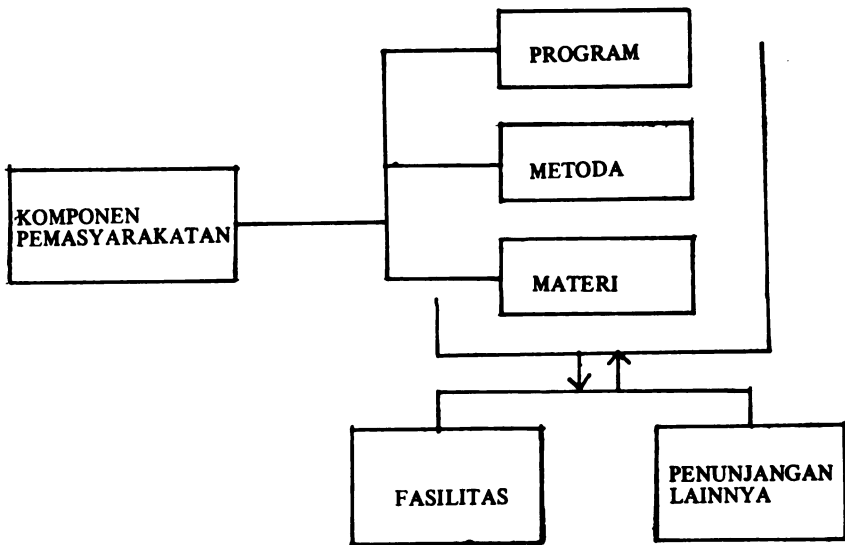
Jakarta, 24 Agustus 1983.



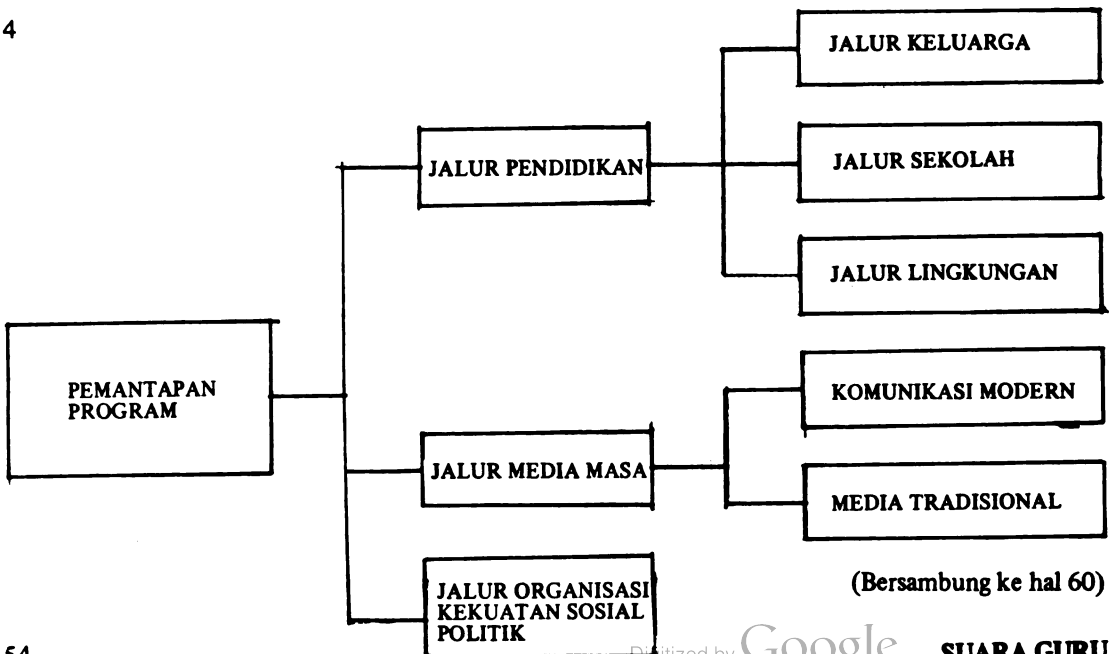
2



3



4



(Bersambung ke hal 60)

LATIHAN KEPEMIMPINAN PGRI

SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR PGRI PADA PEMBUKAAN LATIHAN KEPEMIMPINAN PGRI TANGGAL 10 OKTOBER 1983 DI JAKARTA

- Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta para Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati,
- Para peserta penataran serta hadirin yang kami muliakan,

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pertama-tama, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Mendikbud beserta para hadirin lainnya yang telah memenuhi undangan kami hadir dalam pertemuan ini.

Kepada seluruh peserta penataran dari daerah-daerah Pengurus Besar PGRI mengucapkan selamat datang di Jakarta dan selamat berjumpa dalam penataran.

Secara umum tugas pokok seorang guru adalah membimbing anak didiknya menyongsong kedewasaan, baik dalam pembentukan sikap dan nilai maupun dalam pemilihan dan penguasaan ilmu serta keterampilan untuk mampu hidup dan berperan dalam masyarakat pada zamannya di masa depan. Dari padanya dituntut dapat ditanggalkannya dan atau dikembangkannya nilai-nilai, cita dan citra hidup dan kehidupan yang manusiawi sesuai dengan hak dan martabat manusia.

Banyak orang menanggapi, bahwa perkembangan ilmu dan teknologi yang melaju dengan pesatnya dipenghujung akhir abad ke XX ini, laju pertumbuhan jumlah penduduk secara mondial yang belum dapat terkendalikan, kemiskinan dan keterbelakangan yang masih mewarnai kehidupan bagian terbesar umat manusia khususnya di negara-negara sedang berkembang, krisis kemasyarakatan dan pertentangan bersenjata antar bangsa dalam berbagai bentuk dan latar belakangnya perlombaan pengadaan senjata pemusnah yang belum nampak adanya titik-titik mereda, padahal kehidupan umat manusia di muka bumi ini sudah terbentuk demikian rupa

atas ketergantungan satu sama lain, dan lain sebagainya, hal itu semua cukup mempersulit untuk meramalkan bentuk masa depan dengan tepat.

PGRi menyadari itu semua. Akan tetapi PGRI menghindari diri untuk tidak tersandung kepada hal-hal yang melemahkan semangat, daya kreasi dan daya juangnya sebagai organisasi-organisasi pendidik bangsa.

Tepat atau tidak, kita ketahui indikator-indikator yang menentukan masa depan secara umum. Lebih dari itu dengan berpegang pada penghayatan akan hakekat eksistensi manusia dan kesadaran akan berbangsa dan bernegara dengan segala tujuan dan cita-citanya yaitu sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 maka pegangan sebagai guru pendidik bangsa dalam menyongsong masa depan anak didik kita, generasi muda umumnya, bangsa dan negara sudah tegas dan gamblang.

Apa yang menjadi tugas kita sebagai guru ? Secara idiil dan praksional, sesuai dengan GBHN TAP MPR No. II/MPR/1983, guru adalah pengemban dan pelaksana pendidikan nasional berlandaskan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta Tanah Air, serta dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Dengan berpedoman pada ketentuan tugas dan tujuan pendidikan nasional tersebut di atas, guru Indonesia telah memiliki pegangan kokoh dalam menghadapi masa depan, baik sebagai pribadi maupun dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini "kualitas manusia" menjadi sasaran utama.

PGRI bersyukur ke hadirat Allah Swt, bahwa Pembangunan Bangsa di bawah pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto saat ini telah sampai pada akhir Pelita III dengan berjalan lancar dan sukses. Kita bersyukur bahwa hasil-hasil pembangunan sudah mulai dapat kita rasakan bersama secara merata meskipun baru dalam tahap membenahi kerangka landasan untuk take of dalam Pelita IV yang akan datang dalam menuju perwujudan sepenuhnya cita-cita kemerdekaan.

Sambil merampungkan pelaksanaan Pelita III dengan sukses, sesuai dengan GBHN 1983, dalam Repelita IV, PGRI mencatat beberapa arah kebijaksanaan di sektor pendidikan yang akan menjadi program menonjol dalam Repelita IV yang akan datang.

Di samping usaha untuk memperluas dan meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui pendidikan pelaksanaan P-4, PMP serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda tercatat antara lain ada 4 hal yang meminta perhatian dan kesipaan guru sejak dini, yaitu :

1. Program peningkatan mutu
2. Program Pelaksanaan Wajib Belajar
3. Program peningkatan dan perluasan Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.



H. Basyuni Suriamidhardja

Bagi guru, berbicara tentang mutu serta berhasilnya pelaksanaan program kurikuler kependidikan dituntut untuk senantiasa melakukan pembenahan dan penyiapan diri, secara pribadi dan secara profesional. Karena itu usaha penataran guru hendaknya merupakan sesuatu hal rutin dan programatis. Bila tidak ia akan kehilangan fungsinya sebagai pendidik di sekolah dan atau di masyarakat.

Segi lain, pelaksanaan Wajib Belajar merupakan suatu program nasional kependidikan yang sangat strategis yang mendasari berhasilnya usaha mencerdaskan bangsa yang menjadi salah satu amanat kemerdekaan. Ia merupakan bagian integral daripada terciptanya suatu masyarakat belajar berlandaskan prinsip life long education.

Peranan dan keterpaduan pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah akan makin terjalin programatis secara lebih efektif, isi mengisi, lengkap melengkapi. Tugas dan peranan guru akan makin meningkat. Di samping di sekolah ia terpanggil pula dalam masyarakat lebih daripada biasanya, terdorong oleh laju tingkat dan perkembangan pendidikan dalam masyarakat sekitar itu sendiri.

PGRI menyadari, bahwa Wajib Belajar yang terkait dengan terciptanya situasi masyarakat belajar dan tingkat pendidikan bangsa merupakan salah satu indikator masyarakat dalam pelaksanaan keadilan sosial, tingkat dan martabat bangsa.

Dalam kaitan hal-hal tersebut di atas PGRI merasa terpanggil pula untuk membantu guru dan memperisapkan semua pimpinan dan warga PGRI, beserta program-program organisasinya, dalam turut mensukseskan tugas-tugas yang besar dan mulia tersebut di atas dan menyongsong Repelita IV umumnya.

Seperti pada angkatan pertama, latihan kepemimpinan PGRI angkatan kedua sekarang ini mengambil tema, yaitu : "Meningkatkan peranan dan kemampuan PGRI dalam membina dedikasi kegairahan dan epektivitas belajar masyarakat dalam rangka pembangunan desa".

Usaha ini merupakan langkah awal dan bersifat pilot projek di daerah yang bersangkutan, yang diundang dalam penataran ini, dengan tujuan untuk merintis para guru dan atau pimpinan PGRI untuk memiliki kemampuan menjadi fasilitator belajar masyarakat lingkungannya, warga

dan atau pimpinan PGRI yang efektif dalam rangka pembangunan desa.

Dengan adanya seorang atau beberapa fasilitas (pemandu) belajar, kiranya desa akan dapat memetik manfaat daripadanya.

Tidak bisa lain, dalam melakukan peranannya seorang fasilitator belajar masyarakat haruslah menjwai semangat pengabdian para pahlawan bangsa. Sikap dan kiprah-karyanya memanifestasikan penghayatan dan pengamalan Pancasila, dengan kata lain, dalam menunaikan tugasnya ia mengamalkan kepemimpinan Pancasila, mengabdikan kepada masyarakat dalam pembangunan bangsa.

Dalam menghadapi tugas yang mulia dan penting ini, terpanggil akan dirinya untuk memiliki dedikasi, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

Ia harus makin menyadari akan status, tugas dan panggilan profesinya secara mantap bagi bangsa dan Negara serta kemanusiaan umumnya.

Berkarya tidak berdiri sendiri akan tetapi berpartisipasi pada kebersamaan dan terjun dalam masyarakat terorganisir di bawah panji PGRI.

Meskipun merupakan setitik air dalam samudra upaya pembangunan bangsa yang sangat luas, usaha ini kami lakukan dalam rangka kebulatan itikad dan kesiapan mental dan fisik PGRI untuk melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan GBHN 1983, Pancakrida Kabinet Pembangunan IV serta

menyongsong Repelita IV.

PGRI menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pemerintah i.c. Bapak Menteri P dan K beserta para Pembina PGRI lainnya di Pusat dan daerah, para pemrasaran serta semua fihak yang terlibat atas terselenggaranya latihan ini.

Ucapan terima kasih dan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya kami samapaikan kepada Pimpinan IFFTU dan American Federation of Teachers atas segala bantuannya menyumbang dana untuk penyelenggaraan latihan ini.

Akhirnya kepada Bapak Menteri Dikbud kami mohon berkenan... menyampaikan amanatnya serta membuka secara resmi latihan ini.

Semoga Allah Swt. memberkahi latihan ini dapat berjalan lancar dan sukses.

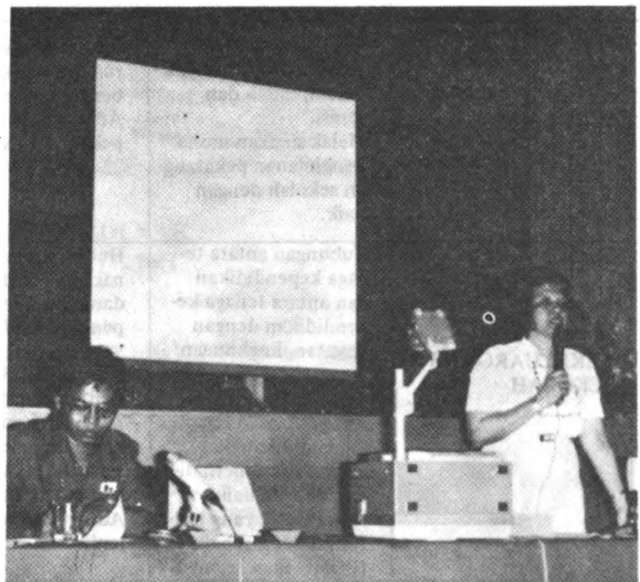
Jakarta, 10 Oktober 1983

PENGURUS BESAR
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(PGRI)
Ketua Umum,

ttd.

H. Basyuni Suriamiharja

Prof. Dr. Conny R. Semiawan saat menyampaikan ceramah pada Latihan Kepemimpinan PGRI.



PEDOMAN PENILAIAN UNTUK AKREDITAS SEKOLAH SWASTA

(Lanjutan)

KRITERIA PENILAIAN UNTUK INSTRUMEN AKREDITASI SEKOLAH SWASTA KOMPONEN : SITUASI

Lembar 7

No.	SUB KOMPONEN	KRITERIA YANG DIPAKAI UNTUK MENILAI			KETERANGAN
		(81 s/d 100)	(60 s/d 80)	(1 s/d 59)	
1.	KEAMANAN SEKOLAH.	<ul style="list-style-type: none"> - Penjaga sekolah sesuai dengan keperluan dan berfungsi baik. - Pagar yang kuat dan pintunya dapat dikunci dengan baik. - Pintu tiap ruangan dapat dikunci dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjaga sekolah cukup - Ada pagar yang cukup kuat. - Pintu tiap ruangan dapat dikunci. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjaga sekolah kurang. - Pagar kurang kuat/ tidak ada pagar. - Pintu tiap ruangan tanpa kunci. 	
2.	KEBERSIHAN SEKOLAH.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia air bersih. - Bak sampah sekolah sesuai keperluan dan berfungsi. - Jumlah petugas kebersihan memenuhi keperluan dan berfungsi. - Peralatan kebersihan tiap kelas memenuhi keperluan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia air cukup bersih. - Bak sampah sekolah cukup memadai. - Jumlah petugas kebersihan cukup memadai dan berfungsi. - Peralatan kebersihan sekolah cukup memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia air. - Bak sampah sekolah kurang memadai. - Petugas kebersihan kurang berfungsi. - Peralatan kebersihan sekolah kurang. 	
3.	KETERTIBAN SEKOLAH.	<ul style="list-style-type: none"> - Tata tertib sekolah dilaksanakan dengan baik. - Melaksanakan upacara bendera dan senam (pagi) secara teratur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tata tertib sekolah dilaksanakan cukup baik. - Melaksanakan upacara bendera tidak teratur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tata tertib dilaksanakan kurang baik. - Melaksanakan upacara bendera tidak teratur. 	Untuk TK, SPI dan upacara bendera.
4.	KEINDAHAN SEKOLAH.	<ul style="list-style-type: none"> - Pekarangan sekolah, ruangan kelas tampak bersih, indah dan serasi. - Melaksanakan usaha penghijauan pekarangan sekolah dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pekarangan sekolah, ruangan kelas tampak bersih dan teratur. - Ada usaha penghijauan pekarangan sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pekarangan sekolah dan ruangan kelas kurang bersih. 	
5.	KEKELUARGAAN SEKOLAH	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan antara tenaga kependidikan dan antara tenaga kependidikan dengan yayasan, lingkungan/ masyarakat dan anak didik baik. - Kesejahteraan tenaga kependidikan dan anak didik diperhatikan dengan baik. - Ada POMG yang berfungsi dengan baik (POMG atau sejenis). 	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan antar tenaga kependidikan dan antara tenaga kependidikan dengan yayasan, lingkungan/ masyarakat dan anak didik cukup baik. - Kesejahteraan tenaga kependidikan dan anak didik diperhatikan cukup baik. - Ada POMG atau sejenis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan antar tenaga kependidikan dan antara tenaga kependidikan dengan yayasan, lingkungan/ masyarakat dan anak didik kurang baik. - Kesejahteraan tenaga kependidikan dan anak didik kurang diperhatikan. - Tidak ada POMG atau sejenis. 	

TURUT BERDUKACITA

Pengurus Besar PGRI beserta Staf turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya :

Bapak RADEN ODING ABDULKODIR

(usia 50 tahun)

Wakil Sekretaris Umum PD IV PGRI DKI Jakarta, pada hari Kamis, 13 Oktober 1983, jam 20.15 di RSCM Jakarta, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Semoga arwah Almarhum mendapat tempat yang bahagia di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah sesuai dengan amal baktinya, dan semoga keluarga yang ditinggal senantiasa mendapat ketawakkalan dan kekuatan lahir batin.

PB – PGRI & Staff.

I. Riwayat Hidup

1. Nama : Raden Oding Abdulkadir, B.A.
2. NIP : 130428581
3. Karpeg : B 040992
4. Pangkat : Pembina Gol. IV/a Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta
5. Lahir : Losarang, Indramayu, 4 Agustus 1933
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Agama : Islam
8. Alamat : Jalan SMA 14, Gg. Swadaya I No. 8 Cililitan, Jakarta Timur.

II. Riwayat Perjuangan dan Tanda Jasa kepada Negara

1. Tahun 1945 : Anggota T.P. Pejuang Cirebon
2. Tahun 1926 : Anggota BPP Cirebon
3. Tahun 1947 – 1950 : Anggota TP BTN 400 BE XVII, Siliwangi
4. Tahun 1949 – 1950 : "Sersan Mayor" Non Organik Pasukan Siluman "Abimanyu" Bergerak dalam Kota Majalengka dan sekitarnya.
5. Tahun 1966 – 1968 : Dan Ton I CIE II Yon Pur MBLVRI

III. Riwayat Organisasi

1. Tahun 1945 – 1946 : Anggota KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia)
2. Tahun 1965 – 1968 : Sekretaris Kwarcab Pramuka
3. Tahun 1968 – 1975 : Anggota Pembina Pramuka
4. Tahun 1975 – 1979 : Kambigus Pramuka
5. Tahun 1965 – 1983 : Wakil Sekum PD IV PGRI DKI Jakarta
6. Tahun 1966 – 1983 : Anggota IKKEL 400 (Ex TP Yon 400 BE XVII Siliwangi)
7. Tahun 1970 – 1983 : Anggota/Kader GOLKAR
8. Tahun 1976 – 1983 : Anggota/Kader KORPRI

IV. Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tahun 1969 – 1980 : Sekretaris Rukun Warga 04 Cililitan (Dapat Penghargaan)
2. Tahun 1974 – 1981 : Bendahara LKMDK Cililitan
3. Tahun 1978 – 1981 : Wakil Ketua LKPMK Cililitan
4. Tahun 1980 – 1983 : Ketua II LKMDK Cililitan
5. Tahun 1978 – 1983 : Wakil Ketua Rayon Timur IKAMA

V. Riwayat Pendidikan

1. SDN Jatibarang, Ijazah tahun 1945
2. SMP - B Majalengka, Ijazah tahun 1951
3. SGAN II Bandung, Ijazah tahun 1954
4. B - I Ilmu Bumi, Ijazah tahun 1960
5. Sarmud IPG Negeri, Ijazah tahun 1964
6. Tk. V IKIP Jakarta, Tahun 1964 – 1967.

**UANG MASUK SUMBANGAN GEDUNG PGRI
SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 1983**

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	31 - 8 - 83	Transfer	Rp 189.540.390,00
2.	1 - 9 - 83	SMP Negeri 196 Jakarta Timur Timur	Rp 30.000,00
3.	2 - 9 - 83	PGRI Cabang Kabupaten Tegal Jawa Tengah	Rp 350.000,00
4.	5 - 9 - 83	PGRI Cabang Kodya Tegal Jawa Tengah	Rp 100.000,00
5.	7 - 9 - 83	PGRI Cabang Dati II Bekasi Jawa Barat	Rp 1.100.000,00
6.	7 - 9 - 83	PGRI Cabang Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat	Rp 85.000,00
7.	12 - 9 - 83	PGRI Cabang Kendari, Sulawesi Tenggara	Rp 345.000,00
8.	15 - 9 - 83	Jasa Giro bulan Agustus	Rp 52.630,00
9.	20 - 9 - 83	PGRI Cabang Kabupaten Sarko, Banko Jambi	Rp 80.000,00
10.	20 - 9 - 83	PGRI Cabang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah	Rp 138.250,00
11.	21 - 9 - 83	PGRI Cabang Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat	Rp 50.000,00
12.	21 - 9 - 83	PGRI Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat	Rp 853.000,00
13.	21 - 9 - 83	PGRI Ancab. Kota XI Tarusan Kab. Pasisir Selatan Padang	Rp 283.000,00
14.	26 - 9 - 83	Siswa baru SMTP/SMTA PGRI Kodya Banjarmasin Tahun Ajaran 1983/1984	Rp 1.400.000,00
15.	29 - 9 - 83	PGRI Cabang Kendari, Sulawesi Tenggara	Rp 216.000,00
16.	10-10 - 83	PGRI Cabang Kendari, Sulawesi Tenggara	Rp 184.000,00
17.	12-10 - 83	PGRI Mataram, Nusa Tenggara Barat	Rp 830.000,00
18.	17-10 - 83	PGRI Cabang Boul Toli-Toli, Sulteng	Rp 185.000,00
19.	18-10 - 83	PGRI Cabang Kupang, Nusa Tenggara Timur	Rp 250.000,00
20.	18-10 - 83	PGRI Ancab Laragung Cab. Kuningan, Jabar	Rp 123.000,00
21.	18-10 - 83	PGRI Cabang Kodya Banda Aceh, Aceh	Rp 100.000,00
22.	20-10 - 83	PGRI Ancab Brebet Kab. Purbalingga, Jateng	Rp 62.500,00
23.	21-10 - 83	PGRI SMA PGRI 3 Medan, Sumatera Utara	Rp 20.000,00
24.	21-10 - 83	PGRI Cabang Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat	Rp 85.000,00
25.	26-10 - 83	PGRI Cabang Tanjung Pinang, Riau	Rp 200.000,00
26.	26-10 - 83	PGRI Unit Kanwil Dept. Dikbud Jakarta *)	Rp 500.000,00
27.	27-10 - 83	PGRI Ancab Kediri Kab. Lombok Barat, NTB	Rp 250.000,00
28.	27-10 - 83	Jasa Giro bulan September	Rp 69.500,00
29.	27-10 - 83	PGRI Guru, Karyawan Kanwil Dept. Dikbud Prop. Maluku di Ambon	Rp 220.000,00
30.	29-10 - 83	PGRI Ancab Brebet Kab. Purbalingga, Jateng	Rp 62.000,00
J u m l a h			Rp 197.766.110,00

Bapak Sunardjo Haditjaroko, M.A.

N.F. 300.-

Jakarta, 31 Oktober 1983

PANITIA PEMBANGUNAN GEDUNG GURU
Bendahara,

*) Dana Gedung Guru-guru
Sekolah Menengah DKI
Jaya.

ttd.

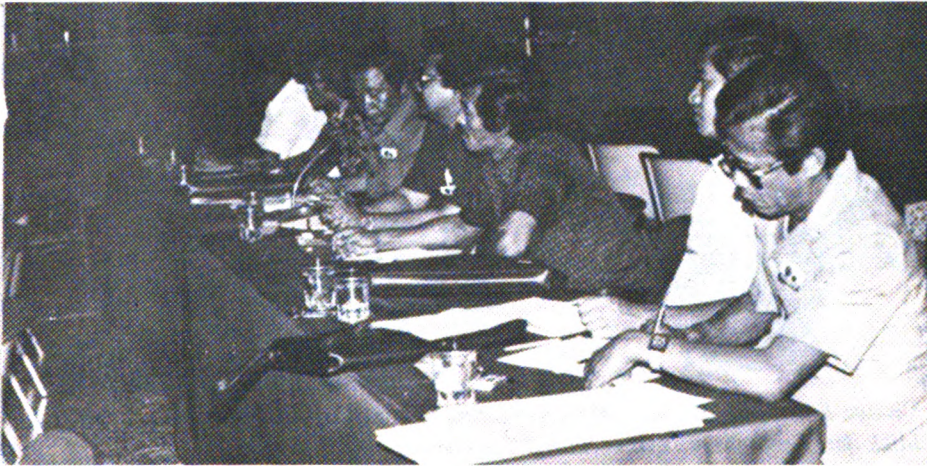
S L A M E T L

RALAT :

Suara Guru No. 6 Th. 1983,
No. 5 Tgl. 7 - 4 - 1983, hal
Seharusnya : PC - PGRI Kab. Tapin,
Banjarmasin sebesar : Rp 1.004.500,00



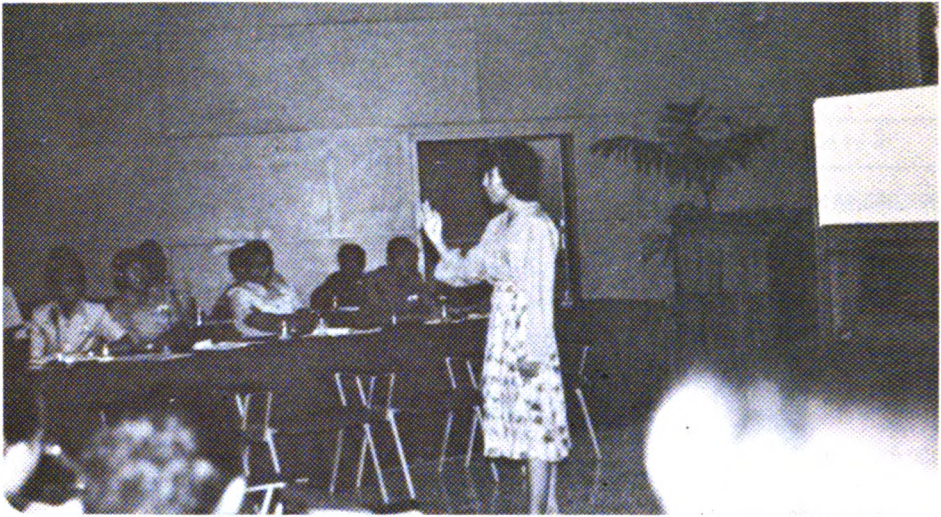
Prof. Dr. W.P. Napitupulu, Dirjen Pelsepora Depdikbud mewakili Mendikbud pada saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi Latihan Kepemimpinan PGRI, 10 Oktober 1983 di Gedung YTKI Jakarta.



Suasana rapat kelompok pada Latihan. Nampak peserta dari Riau, Sumbar, Sumsel, dan lain-lain.



Drs. Taswar Akip mewakili Dirjen Bangdes Depdagri pada saat menyampaikan pengarahan. Sebelah kanannya : Dra. Mien S. Warnaen dan Drs. Is Riwidikdo (penceramah) dari Pokja "A" PB - PGRI.



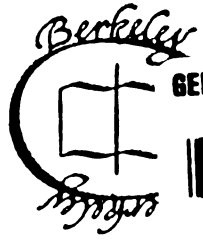
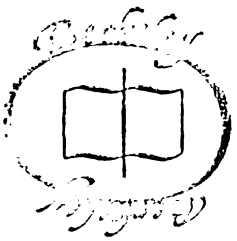
Dr. Gayatri (Pemandu) saat memberi panduan kepada peserta Latihan Kepemimpinan PGRI.



Diskusi Kelompok dalam Latihan Kepemimpinan PGRI, dipimpin oleh Drs. M. Aini Idjak dari Kalimantan Selatan (menghadap lensa).



Dari kiri : Dra. L.E. Coldenhoff, Kepala Kakanwil Depdikbud DKI Jakarta, Dra. Mien S. Warnaen Sekbid Pendidikan Guru PB - PGRI dan Drs. Sukarno, res re Latihan/Sekretaris Kakanwil Dendikbud Prop. Jatim



GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY

